RKPD 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 21 **TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6909);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 55);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 202 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);

33. Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);

34. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensinergikan serta mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2024 dan daerah otonomi baru.

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024;

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2025 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

(1) Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025.

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN;
Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
Bab III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
Bab V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN;
Bab VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
Bab VIII : PENUTUP.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 888

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR GAMBAR	.....	iv
DAFTAR TABEL	.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	.....	I - 1
1.1 Latar Belakang	.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	.....	I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	.....	I - 8
1.4 Maksud dan Tujuan	.....	I - 10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	.....	I - 12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	.....	II - 1
2.1 Kondisi Umum Daerah	.....	II - 1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Realisasi RPJMD	.....	II - 134
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	.....	II - 365
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	.....	III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	.....	III - 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	.....	III - 29

		Halaman
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV - 1
	4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV - 10
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN.....	V - 1
	5.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah	V - 1
	5.2 Pembangunan Kewilayahan	V - 6
	5.3 Kebijakan Struktur Ruang Kabupaten	V - 10
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	VI - 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI - 1
BAB VIII	PENUTUP.....	VII - 1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I.1.	Proses penyusunan RKPD Tahun 2024.....	I - 4
Gambar I.2.	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah.....	I - 10
Gambar II.1.	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II - 2
Gambar II.2.	Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus.....	II - 3
Gambar II.3.	Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 7
Gambar II.4.	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus.....	II - 9
Gambar II.5.	Peta Topografi Kabupaten Tanggamus.....	II - 10
Gambar II.6.	Peta Geologi Kabupaten Tanggamus	II - 15
Gambar II.7.	Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus	II - 16
Gambar II.8.	Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 17
Gambar II.9.	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus ...	II - 19
Gambar II.10.	Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus	II - 20
Gambar II.11.	Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus.....	II - 21
Gambar II.12.	Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus.....	II - 22
Gambar II.13	Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus	II - 23
Gambar II.14	Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus	II - 24

Halaman

Gambar II.15. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023..... II - 30

Gambar II.16. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2019-2023..... II - 31

Gambar II.17. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus..... II - 37

Gambar II.18. Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023 (Rupiah)..... II - 38

Gambar II.19. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2023..... II - 40

Gambar II.20. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022-2023 ..... II - 41

Gambar II.21 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023..... II - 43

Gambar II.22 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023..... II - 44

Gambar II.23 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023..... II - 45

Gambar II.24 Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II - 47

Gambar II.25 Perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023..... II - 47

Gambar II.26 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023..... II - 53

Gambar II.27 Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023..... II - 60

Halaman

Gambar II.28 Perkembangan Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023..... II - 61

Gambar II.29 Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023..... II - 62

Gambar II.30 Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus ..... II - 99

Gambar II.31 Transformasi Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus..... II -120

Gambar II.32 Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023..... II - 124

Gambar III.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023. ..... III - 9

Gambar III.2. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023..... III - 9

Gambar III.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023..... III - 10

Gambar III.4. Distribusi Persentase Dominan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanggamus, 2023..... III - 11

Gambar IV.1. Tema Pembangunan Tahun 2025..... IV - 11

Gambar IV.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2025..... IV - 12

Gambar IV.3. Prioritas Nasional 2025..... IV - 12

Gambar IV.4. Alur Pengusulan Musrenbang dan Pokir DPRD Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah..... IV - 77

Gambar IV.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil I..... IV - 77

Gambar IV.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil II..... IV - 78

Halaman

Gambar IV.7. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil III..... IV - 78

Gambar IV.8. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil IV..... IV - 79

Gambar IV.9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil V..... IV - 79

Gambar IV.10. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil VI..... IV - 80

Gambar VI.1 Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus..... VI - 4

Gambar VI.2 Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus..... VI - 5

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL II.1.	Ibu kota dan luas wilayah kecamatan di kabupaten tanggamus.....	II - 6
TABEL II.2.	Kelas penutupan lahan di kabupaten tanggamus.....	II - 8
TABEL II.3.	Kemiringan lereng yang membentuk permukaan kabupaten tanggamus.....	II - 9
TABEL II.4.	Daya tampung lahan di kabupaten tanggamus.....	II - 18
TABEL II.5.	Alokasi kebutuhan lahan tahun 2031.....	II - 19
TABEL II.6.	Persebaran penduduk per kecamatan di kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 25
TABEL II.7.	Nilai dan distribusi pdrb atas dasar harga konstan kabupaten tanggamus menurut lapangan usaha tahun 2020-2023.....	II - 26
TABEL II.8.	Nilai dan distribusi pdrb atas dasar harga berlaku kabupaten tanggamus menurut lapangan usaha tahun 2020-2023.....	II - 26
TABEL II.9.	Nilai dan distribusi pdrb atas dasar harga berlaku kabupaten tanggamus menurut pengeluaran tahun 2020-2023.....	II - 27
TABEL II.10.	Nilai dan distribusi pdrb atas dasar harga konstan kabupaten tanggamus menurut pengeluaran tahun 2020-2023.....	II - 28
TABEL II.11.	Perkembangan distribusi pdrb atas dasar harga berlaku (hb) dan harga konstan (hk) kabupaten tanggamus menurut lapangan usaha tahun 2020-2023.....	II - 28
TABEL II.12.	Laju pertumbuhan riel pdrb kabupaten tanggamus menurut lapangan usaha tahun 2020-2023.....	II - 29

Halaman

TABEL II.13.	Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut pengeluaran kabupaten tanggamus tahun 2020-2023.....	II - 30
TABEL II.14.	Perkembangan nilai inflasi tahun 2016-2023.....	II - 32
TABEL II.15.	Pdrb perkapita kabupaten tanggamus dan provinsi lampung tahun 2019-2023.....	II - 33
TABEL II.16.	Perkembangan pdrb perkapita kabupaten tanggamus tahun 2016-2023.....	II - 33
TABEL II.17.	Perkembangan nilai gini rasio kabupaten/kota se-provinsi lampung dan nasional tahun 2019-2023.....	II - 34
TABEL II.18.	Tingkat ketimpangan regional kabupaten/kota di provinsi lampung tahun 2019.....	II - 35
TABEL II.19.	Perkembangan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota se-provinsi lampung dan nasional tahun 2019-2023.....	II - 36
TABEL II.20.	Persentase penduduk miskin kabupaten/kota se-provinsi lampung dan nasional tahun 2019-2023.....	II - 37
TABEL II.21.	Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 39
TABEL II.22.	Perkembangan indeks keparahan kemiskinan kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 39
TABEL II.23.	Pertumbuhan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-provinsi lampung dan nasional tahun 2022 ke 2023.....	II - 41
TABEL II.24.	Perbandingan angka melek huruf kabupaten kabupaten tanggamus tahun 2019-2023.....	II - 44
TABEL II.25.	Cakupan balita gizi buruk kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 46
TABEL II.26.	Indeks kepuasan masyarakat kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 48
TABEL II.27.	Persentase pad terhadap pendapatan kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 49
TABEL II.28.	Opini bpk terhadap laporan keuangan daerah kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 49

Halaman

TABEL II.29.	Angka pendidikan anak usia dini (paud) kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 53
TABEL II.30.	Angka partisipasi kasar kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 55
TABEL II.31.	Angka pendidikan yang ditamatkan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 55
Tabel II.32.	Angka partisipasi murni kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 55
Tabel II.33.	Angka partisipasi sekolah kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 56
Tabel II.34.	Angka putus sekolah kabupaten tanggamus tahun 2018-2022.....	II - 57
Tabel II.35.	Angka mengulang kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 57
Tabel II.36.	Kondisi ruang kelas pendidikan dasar di kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 58
Tabel II.37.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 58
Tabel II.38.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 59
Tabel II.39.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama kabupaten tanggamus tahun 2018-2023....	II - 59
Tabel II.40.	Cakupan p2m dan ptm kabupaten tanggamus tahun 2019- 2023.....	II - 65
Tabel II.41.	Jumlah posyandu dan balita tahun 2018-2023.....	II - 66
Tabel II.42.	Jumlah dan rasio puskesmas, klinik dan pustu tahun 2018-2023 di kabupaten tanggamus.....	II - 67
Tabel II.43.	Akreditasi puskesmas di kabupaten tanggamus oleh kementerian kesehatan RI sampai dengan tahun 2023.....	II - 68
Tabel II.44.	Jumlah dan rasio rumah sakit per jumlah penduduk tahun 2018-2023 kabupaten tanggamus	II - 69
Tabel II.45.	Jumlah tenaga medis dokter sepesialis, dokter umum, dokter gigi di kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 70

Halaman

Tabel II.46. Jumlah dokter spesialis kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 70

Tabel II.47. Jumlah tenaga medis tahun 2023 menurut kecamatan di kabupaten tanggamus ..... II - 71

Tabel II.48. Ketercukuapn fasilitas kesehatan dan sdm kesehatan kabupaten tanggamus tahun 2023..... II - 71

Tabel II.49. Hasil pemantauan masalah gizi balita tahun 2017-2022..... II - 72

Tabel II.50. Prevalensi stunting kabupaten tanggamus berdasarkan elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2018-203..... II - 73

Tabel II.51. Kondisi infrastruktur jalan di kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 74

Tabel II.52. Kondisi infrastruktur jembatan di kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 75

Tabel II.53. Kondisi jaringan irigasi kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 75

Tabel II.54. Rumah layak huni kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 76

Tabel II.55. Perkembangan capaian indikator perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 78

Tabel II.56. Capaian indikator ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 78

Tabel II.57. Perkembangan indikator sosial kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 79

Tabel II.58. Data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 79

Tabel II.59. Perkembangan indikator tenaga kerja kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 81

Tabel II.60. Perkembangan jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di kabupaten tanggamus tahun 2022-2023..... II - 82

Tabel II.61. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019-2023..... II - 83

Halaman

Tabel II.62.	Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten tanggamus tahun 2019-2023.....	II - 83
Tabel II.63.	Perkembangan indikator pangan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 84
Tabel II.64.	Perkembangan indikator pertanahan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 85
Tabel II.65.	Capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2021-2023.....	II - 87
Tabel II.66.	Perkembangan capaian kinerja lingkungan hidup kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 87
Tabel II.67.	Perkembangan indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanggamus tahun 2018-2022.....	II - 88
Tabel II.68.	Perkembangan capaian indikator pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 90
Tabel II.69.	Data badan usaha milik desa (bumdes) kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 91
Tabel II.70.	Perkembangan indeks desa membangun kabupaten tanggamus tahun 2017-2023.....	II - 91
Tabel II.71.	Perkembangan indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten tanggamus tahun 2019-2023.....	II - 92
Tabel II.72.	Perkembangan indikator perhubungan kabupaten tanggamus tahun 2019-2023.....	II - 93
Tabel II.73.	Perkembangan indikator komunikasi dan informatika kabupaten tanggamus tahun 2019-2023.....	II - 94
Tabel II.74.	Perkembangan jumlah koperasi aktif menurut kecamatan di kabupaten tanggamus tahun 2020–2023.....	II - 95
Tabel II.75.	Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah menurut kecamatan di kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 96
Tabel II.76.	Perkembangan indikator penanaman modal kabupaten tanggamus tahun 2019-2023.....	II - 97
Tabel II.77.	Perkembangan indikator kepemudaan dan olah raga kabupaten tanggamus tahun 2018-2023.....	II - 98

Halaman

Tabel II.78. Perkembangan indikator statistik kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 99

Tabel II.79. Perkembangan indikator persandian kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 100

Tabel II.80. Perkembangan indikator kebudayaan kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 101

Tabel II.81. Perkembangan indikator perpustakaan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 101

Tabel II.82. Perkembangan indikator kearsipan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 104

Tabel II.83. Rumah tangga dan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 105

Tabel II.84. Perkembangan indikator kelautan dan perikanan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 106

Tabel II.85. Perkembangan indikator pariwisata kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 106

Tabel II.86. Perkembangan indikator pertanian kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 107

Tabel II.87. Perkembangan indikator energi dan sumber daya mineral kabupaten tanggamus tahun 2018-2023... II - 108

Tabel II.88. Perkembangan indikator perdagangan kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 109

Tabel II.89. Perkembangan indikator perindustrian kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 110

Tabel II.90. Perkembangan indikator transmigrasi kabupaten tanggamus tahun 2016-2023..... II - 112

Tabel II.91. Perkembangan indikator perencanaan pembangunan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 112

Tabel II.92. Perkembangan indikator keuangan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 114

Tabel II.93. Perkembangan indikator kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kabupaten tanggamus tahun 2019-2023..... II - 115

Halaman

Tabel II.94. Rincian aspek penilaian lndeks daya saing daerah tahun 2023..... II - 116

Tabel II.95. Perkembangan ipkd kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 117

Tabel II.96. Perkembangan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan apip inspektorat dan bpk, kabupaten tanggamus tahun 2017-2023..... II - 121

Tabel II.97. Perkembangan indikator pengawasan kabupaten tanggamus tahun 2017-2023..... II - 121

Tabel II.98. Analisis kebutuhan auditor dan ppupd kabupaten tanggamus ..... II - 122

Tabel II.99. Perkembangan indikator sekretariat dewan kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 123

Tabel II.100. Nilai tukar petani (ntp) per kecamatan di kabupaten tanggamus tahun 2018-2023..... II - 125

Tabel II.101. Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan skala prioritas tahun 2023..... II - 126

Tabel II.102. Sebaran rasio sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan skala prioritas tahun 2023..... II - 127

Tabel II.103. Angka kriminalitas kabupaten tanggamus tahun 2017-2023..... II - 129

Tabel II.104. Jenis tindak kriminal di kabupaten tanggamus tahun 2017-2023..... ..... II - 130

Tabel II.105. Persentase penduduk kabupaten tanggamus berumur 15 tahun keatas menurut karakteristik dan ijazah tertinggi yang dimiliki tahun 2023..... II - 130

Tabel II.106. Rasio ketergantungan kabupaten tanggamus tahun 2010-2022..... II - 131

Tabel II.107. Kondisi sumber daya aparatur pemerintah kabupaten tanggamus berdasarkan jenis kelamin sampai dengan tahun 2023..... II - 132

Tabel II.108. Kondisi sumber daya aparatur pemerintah kabupaten tanggamus berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan tahun 2023..... II - 132

Halaman

Tabel II.109.	Kondisi sumber daya aparatur pemerintah kabupaten tanggamus berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2023.....	II - 133
Tabel II.110.	Target dan realisasi pencapaian spm urusan pendidikan kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 136
Tabel II.111.	Target dan realisasi pencapaian spm urusan kesehatan kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 141
Tabel II.112.	Target dan realisasi pencapaian spm urusan pekerjaan umum kabupaten tanggamus tahun 2023	II - 155
Tabel II.113.	Target dan realisasi pencapaian spm urusan perumahan rakyat kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 158
Tabel II.114.	Target dan realisasi pencapaian spm urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 161
Tabel II.115.	Target dan realisasi pencapaian spm urusan sosial kabupaten tanggamus tahun 2023.....	II - 167
Tabel II.116.	Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun 2023 kabupaten tanggamus.....	II - 189
Tabel II.117.	Identifikasi permasalahan pembangunan daerah kabupaten tanggamus	II - 371
Tabel III.1.	Proyeksi indikator makro ekonomi nasional tahun 2025 berdasarkan ranwal rpjmn 2025-2029.....	III - 6
Tabel III.2.	Realisasi dan proyeksi/target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah kabupaten tanggamus tahun 2022-2026.....	III - 34
Tabel III.3.	Realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah kabupaten tanggamus tahun 2022-2026.....	III - 57
Tabel III.4.	Realisasi dan proyeksi/target belanja daerah kabupaten tanggamus tahun 2022-2026.....	III - 87
Tabel III.5.	Realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah kabupaten tanggamus tahun 2022-2026.....	III - 99
Tabel IV.1.	Hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kabupaten tanggamus.....	IV - 7
Tabel IV.2.	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025.....	IV - 13

		Halaman
Tabel IV.3.	Sasran pembangunan prioritas nasional 1.....	IV - 15
Tabel IV.4.	Sasran pembangunan prioritas nasional 2.....	IV - 16
Tabel IV.5.	Sasran pembangunan prioritas nasional 3.....	IV - 18
Tabel IV.6.	Sasran pembangunan prioritas nasional 4.....	IV - 20
Tabel IV.7.	Sasran pembangunan prioritas nasional 5.....	IV - 22
Tabel IV.8.	Sasran pembangunan prioritas nasional 6.....	IV - 23
Tabel IV.9.	Sasran pembangunan prioritas nasional 7.....	IV - 24
Tabel IV.10.	Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 8.....	IV - 26
Tabel IV.11.	Sasaran makro rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) provinsi lampung tahun 2025.....	IV - 28
Tabel IV.12.	Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah kabupaten tanggamus dengan permasalahan/isu strategis tahun 2025.....	IV - 29
Tabel IV.13.	Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas kabupaten tanggamus tahun 2025.....	IV - 31
Tabel IV.14.	Penyelarasan Sasaran Makro RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.....	IV - 33
Tabel IV.15.	Dukungan Program Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus	IV - 33
Tabel IV.16.	Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung.....	IV - 48
Tabel IV.17.	Dukungan program pembangunan daerah dalam rkpd kabupaten tanggamus tahun 2025 terhadap prioritas pembangunan nasional.....	IV - 64
Tabel V.1.	Ruas jalan provinsi lampung yang ada di kabupaten tanggamus	V - 11
Tabel V.2.	Rencana sistem pusat kegiatan kabupaten tanggamus tahun 2011–2031.....	V - 11

		Halaman
Tabel V.3.	Luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) kabupaten tanggamus.....	V - 13
Tabel V.4.	Luasan dan sebaran lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (lcp2b) kabupaten tanggamus	V - 14
Tabel V.5	Potensi tambang kabupaten tanggamus.....	V - 18
Tabel V.6	Obyek wisata bahari kabupaten tanggamus.....	V - 21
Tabel V.7	Obyek wisata alam buatan kabupaten tanggamus...	V - 22
Tabel V.8	Obyek wisata tirta kabupaten tanggamus.....	V - 22
Tabel V.9	Obyek wisata alam kabupaten tanggamus.....	V - 23
Tabel V.10	Obyek wisata kolam renang kabupaten tanggamus	V - 24
Tabel V.11	Obyek wisata budaya kabupaten tanggamus.....	V - 24
Tabel V.12	Obyek wisata situs pubakala/peninggalan sejarah kabupaten tanggamus.....	V - 24
Tabel V1.1	Rumusan rencana program dan kegiatan skpd tahun 2025 kabupaten tanggamus sumber dana apbd kabupaten tanggamus.....	VI - 6
Tabel V1.2	Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus terhadap Indikator yang Mendukung Kegiatan SPM Tahun 2025.....	VI - 282
Tabel VII.1	Penetapan indikator makro kabupaten tanggamus tahun 2025.....	VII - 2
Tabel VII.2	Penetapan indikator kinerja utama kabupaten tanggamus tahun 2025.....	VII - 4
Tabel VII.3	Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten tanggamus tahun 2025....	VII - 12
Tabel VII.4	Inovasi daerah kabupaten tanggamus tahun 2024.....	VII - 33

BAB I
PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top up dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum Dokumen RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan

5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja serta kerangka pendanaan selama 1 (satu) tahun. RKPD tersebut disusun dengan tahapan : penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Desa, Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
    a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
    b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
    c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
    d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
    a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
    b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
    c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
    d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
    e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
    f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
    g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
    h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
    i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
    j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
    k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan

    Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam sebagai pedoman untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

3. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025
   Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025
   Musrenbang RKP sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten Tanggamus merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025
   Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 ini sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.
6. Penetapan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025
   Penetapan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati. Penyusunan Rancangan Awal RKPD bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun Rancangan Renja-SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

   Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2025.

Gambar 1.I Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025

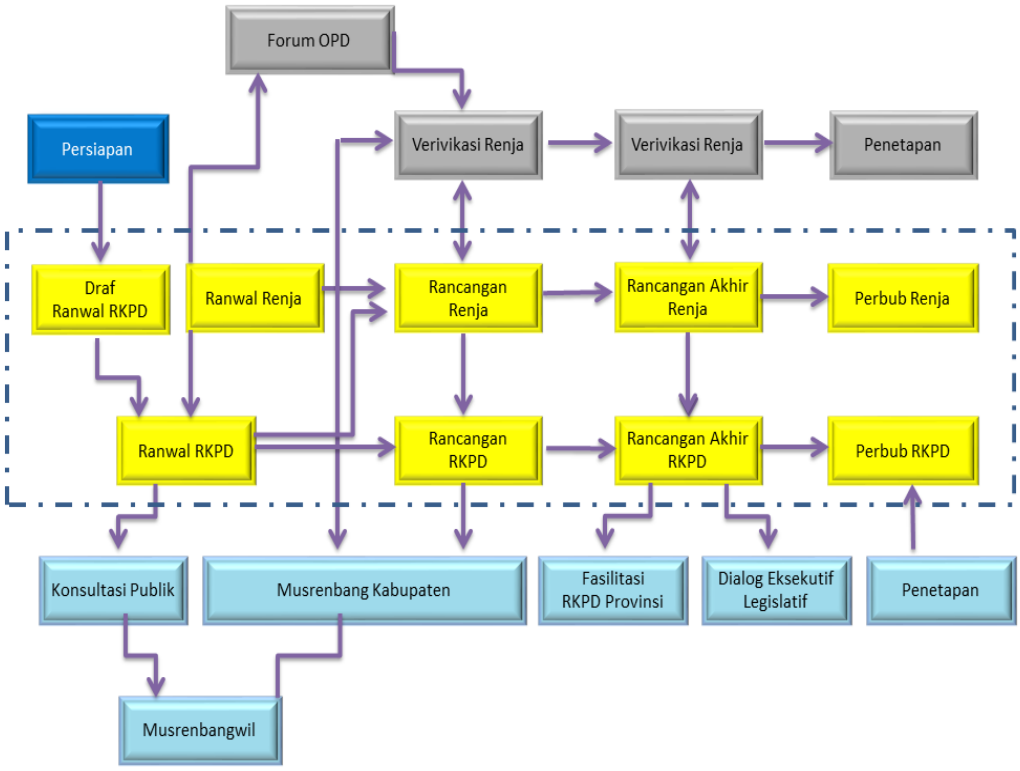

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berlandaskan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 55);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 202 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);
33. Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);
34. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 843);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPD 2024-2026

   RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 merujuk pada dokumen RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJPD Kabupaten Tanggamus.
2. RKPD dan Renja PD

   RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan

OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

3. RKPD dan APBD

   RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

4. RKPD dan RTRW

   Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Tanggamus sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

5. RKPD dan RPKD

   Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2024-2029, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

6. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

   Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

7. RKPD dan SPM Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

8. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi Dalam proses perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan, maka salah satu yang memiliki fungsi dan peran cukup krusial adalah dokumen RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Gambar I.2. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah

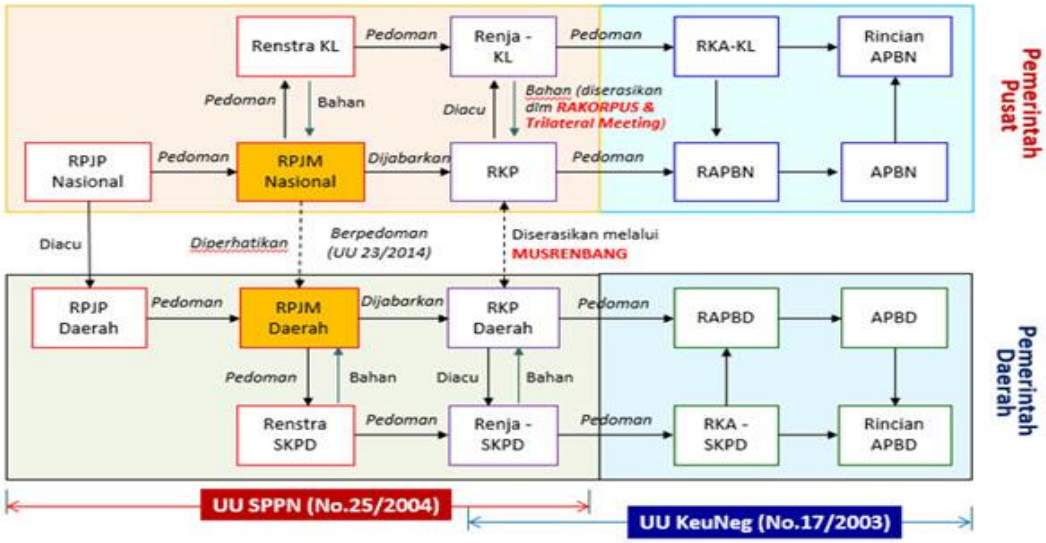

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Dari segi kerangka waktu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 104 penyusunan dokumen RKPD Kabupaten harus diselesaikan dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, sedangkan RKPD Provinsi ditetapkan setelah RKP ditetapkan. Substansi RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja-PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, RKPD disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD, dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), multidimensi, dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan yang mencakup indikasi rencana program dan

kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Tanggamus. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappelitbang dengan seluruh *stakeholders* terkait.

Dengan filosofi fungsi dokumen RKPD, agar lebih operasional dalam penyusunan RAPBD, maka RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan RAPBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen Rancangan RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 yang memuat prioritas pembangunan, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya disusun dengan tujuan:

1) Mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang sejalan, selaras, seimbang dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah;
2) Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder*s pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2025;
3) Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
4) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun

rencana kerja dan menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;

5) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah saat ini, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
6) Memudahkan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahun 2025;
7) Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra-PD, Renja-PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diuraikan kedalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing PD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis sub bab sebelumnya yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Memberikan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan menangani penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD sebagai pedoman semua pihak dan memfungsikan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RKPD merupakan kebijakan program kegiatan daerah yang berkelanjutan tiap tahunnya sehingga hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya menjadi landasan yang penting. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Tercapainya sasaran RKPD tahun sebelumnya dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program yang baru, sedangkan target RKPD tahun sebelumnya yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan yang baru.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Sebelum menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi umum daerah yang bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Aspek ini menjelaskan tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Kerangka pemikiran hubungan

antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya seperti gambar berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

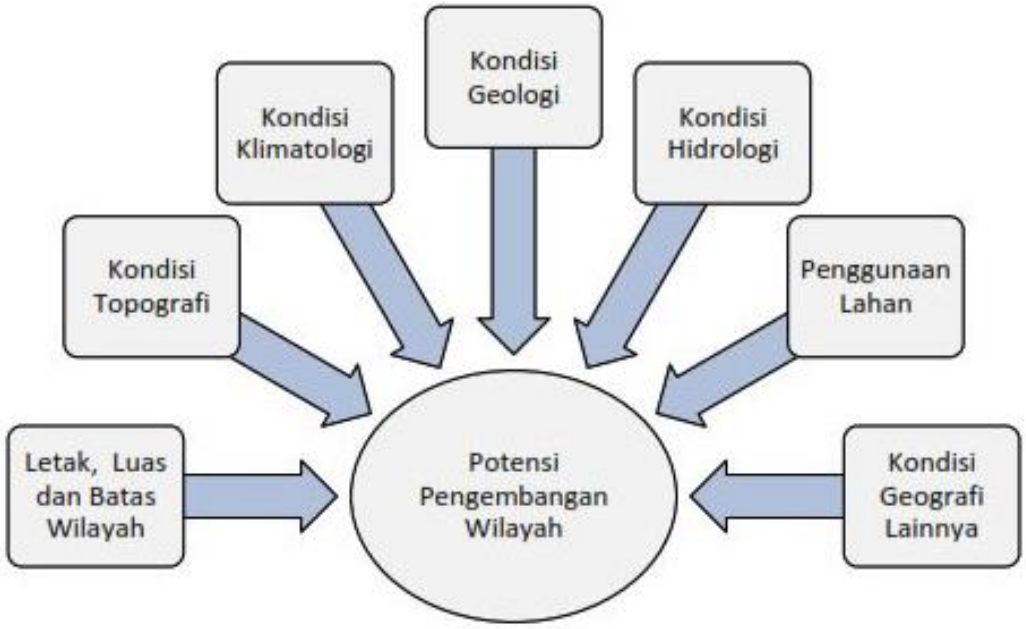

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas pengembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, serta aspek penggunaan lahan. Disamping itu dijelaskan pula tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, serta distribusi penduduk per Kecamatan.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan, dan Pulau maka saat ini Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.747,092 Km^2 yang terdiri dari daratan 2.947,592 Km^2 dan lautan 1.799,500 Km^2 yang memiliki garis pantai sepanjang 202 Km dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar II.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus

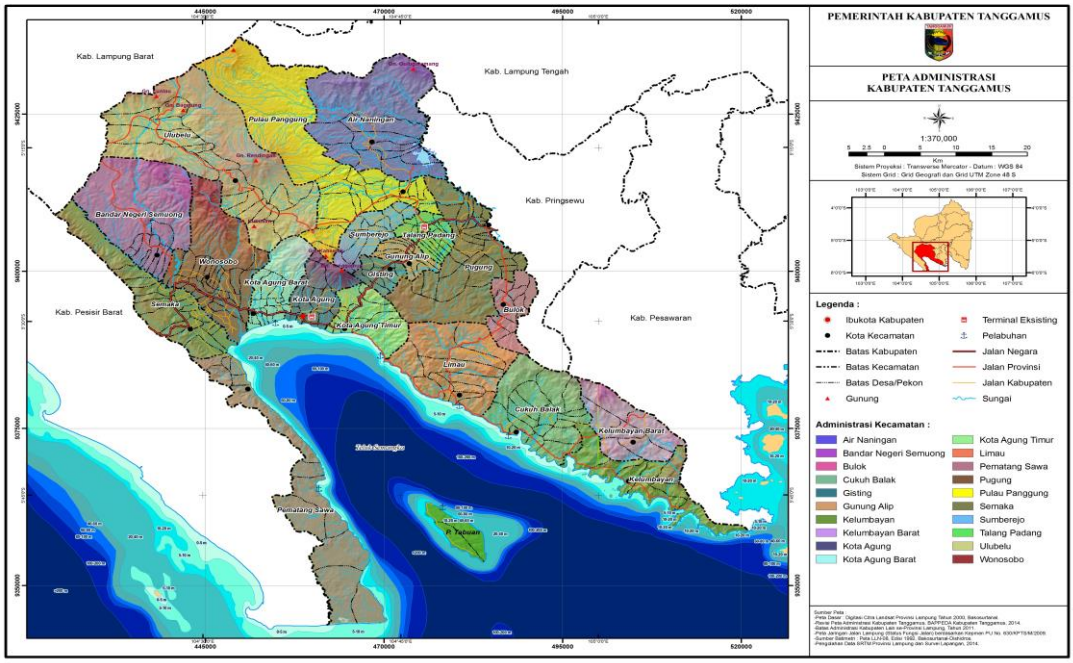

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Wilayah Kabupaten Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682 melalui ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799 perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung namun sejak tahun 1856 perlawanan terhadap pemeritahan Belanda mulai surut selanjutnya di wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controlir di Kota Agung. Pada saat itu Pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Adat yang disebut Marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang

Pasirah yang membawahi beberapa Kampung, 5 (lima) Marga tersebut adalah :

1) Marga Gunung Alip.
2) Marga Benawang.
3) Marga Belunguh.
4) Marga Pematang Sawa.
5) Marga Ngarip.

Selanjutnya pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan Adat/Marga.

Pada masa Pemerintahan Kewedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) wilayah Kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung. Pada Tahun 1964 Pemerintahan Kewedanaan di hapuskan yang selanjutnya pada Tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan.

Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi, maka pada tahun 1979 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa dan 3 Kelurahan serta 4 Desa Persiapan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V.Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat yang pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu :

1) Marga Gunung Alip (Talang Padang).
2) Marga Benawang.
3) Marga Belunguh.

4) Marga Pematang Sawa.
5) Marga Ngarip.
6) Marga Negara Batin.

Bupati Tanggamus pertama adalah Drs. Achmad Syah Putra yang memimpin Kabupaten Tanggamus sampai tahun 2003, kemudian pada tanggal 15 Februari 2003 dilantik Drs. H. Fauzan Sya'ie, M.Sc. dan Bambang Kurniawan, S.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2008 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Sujadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2008-2013 hasil Pilkada langsung yang pertama dilakukan di kabupaten ini. Kemudian sesuai hasil Pilkada kedua di Kabupaten Tanggamus tahun 2012, pada tanggal 15 Februari 2013 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Samsul Hadi, S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2013-2018.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017, Gubernur Lampung secara resmi melantik H. Samsul Hadi, M.Pd.I sebagai Bupati Tanggamus defenitif sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Bupati Tanggamus Tahun 2013-2018 yaitu pada tanggal 14 Februari 2018. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan maka Sekretaris Daerah Andi Wijaya, S.T., M.M. ditunjuk menjadi Plh. Bupati Tanggamus dari tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018, selanjutnya Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik Ir. Zainal Abidin, M.T. menjadi Penjabat Bupati Tanggamus sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 21 September 2018.

Berdasarkan hasil Pemilukada Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Juni 2018 maka telah dilantik Kepala Daerah Terpilih Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. dan Hi. AM. Syafi'i, S.Ag. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023 oleh Gubernur Lampung pada tanggal 20 September 2018 dan dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 21 September 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus.

Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan 6 (enam) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah Nomor

18 Tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan. Pada Tahun 2004 terdapat 7 Kelurahan serta 317 Pekon/Desa. Pada pertengahan tahun 2005 telah terbentuk kembali 7 Kecamatan baru hasil pemekaran berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005 yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau sehingga jumlahnya menjadi 24 Kecamatan dengan 7 Kelurahan dan 323 Pekon/Desa. Kemudian dengan disyahkannya Perda Nomor 15 Tahun 2006, maka dibentuklah 4 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Naningan, Bulok dan Kelumbayan Barat sehingga sampai tahun 2007 Kabupaten Tanggamus telah memiliki 28 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 371 Pekon/Desa.

Pada tanggal 26 November 2008, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu yang terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih dan Sukoharjo. Jadi sampai dengan pertengahan tahun 2011 Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 275 Pekon dan 3 Kelurahan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pemekaran 24 Pekon yang tersebar di 16 Kecamatan sehingga mulai tahun 2012 sampai sekarang, Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 299 Pekon dan 3 Kelurahan.

Tabel II.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km^2)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Wonosobo	Tanjung Kurung	209.63	4.50
2	Semaka	Sukaraja	170.90	3.67
3	Bandar Negeri Semuong	Sanggi	98.12	2.11
4	Kota Agung	Kuripan	76.93	1.65
5	Pematang Sawa	Way Nipah	185.29	3.98
6	Kota Agung Timur	Kagungan	73.33	1.58
7	Kota Agung Barat	Negara Batin	101.30	2.18
8	Pulau Panggung	Tekad	437.21	9.39

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
9	Ulu Belu	Ngarip	323.08	6.94
10	Air Naningan	Air Naningan	186.35	4.00
11	Talang Padang	Talang Padang	45.13	0.97
12	Sumberejo	Margoyoso	56.77	1.22
13	Gisting	Kuta Dalom	32.53	0.70
14	Gunung Alip	Banjar Negeri	25.68	0.55
15	Pugung	Rantau Tijang	232.40	4.99
16	Bulok	Sukamara	51.68	1.11
17	Cukuh Balak	Putih Doh	133.76	2.87
18	Kelumbayan	Napal	121.09	2.60
19	Limau	Kuripan	240.61	5.17
20	Kelumbayan Barat	Sidoarjo	53.67	1.15
		LUAS DARATAN	**2,855.46**	
		LUAS LAUTAN	**1,799.50**	
		LUAS KABUPATEN TANGGAMUS*)	**4,654.96**	

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2024

*) Masih berdasarkan luas wilayah yang lama karena untuk luas wilayah yang baru belum dipublish sampai dengan luas wilayah per kecamatan

Gambar II.3. Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2024

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tanggamus berada di pesisir Barat Provinsi Lampung dengan letak geografis 104⁰18' BT – 105⁰12' BT dan 5⁰05' LS – 5⁰56' LS. Pada bagian Barat semakin ke Utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian

Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yangmerupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari hutan lahan sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering/semak, semak belukar, tambak dan tubuh air. Pertanian lahan kering campur semak merupakan jenis tutupan lahan yang mendominasi di Kabupaten Tanggamus, dengan prosentase 62%. Sedangkan jenis tutupan lahan sawah memiliki prosentase 5% dari total luas daratan. Tutupan lahan yang luasnya terkecil adalah lahan tambak sebesar 1%. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.2. Kelas Penutupan Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KELAS PENUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Hutan Lahan Kering Primer	314,85	0,11%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	27.847,96	9,47%
3	Hutan Mangrove Sekunder	69,33	0,02%
4	Lahan Terbuka	197,11	0,07%
5	Perkebunan	481,09	0,16%
6	Permukiman / Lahan Terbangun	8.477,51	2,88%
7	Pertambangan	96,33	0,03%
8	Pertanian Lahan Kering	2.953,76	1,00%
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	228.700,17	77,74%
10	Sawah	16.633,51	5,65%
11	Semak Belukar	6.839,85	2,32%
12	Semak Belukar Rawa	138,99	0,05%
13	Tambak	407,29	0,14%
14	Tubuh Air	1.045,13	0,36%
	TOTAL	**294.202,86**	**100%**

Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2024

Gambar II.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus

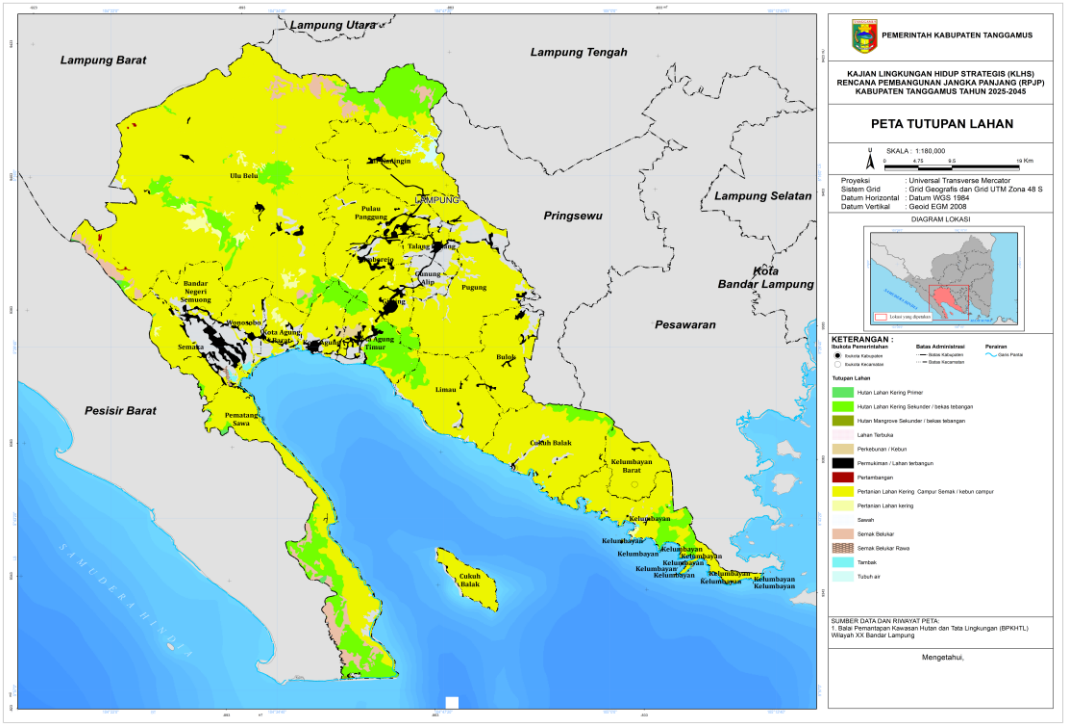

Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2021, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi perbukitan bergelombang menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus seperti di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Kota Agung, Talang Padang dan Cukuh Balak dengan ketinggian antara 700 – 1.500 meter diatas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kategorinya, kemiringan lereng yang membentuk permukaan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu kemiringan lereng antara 0 – 2 %, 2 – 5 %, 15 - 40 % dan > 40 %.

Tabel II.3. Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus

KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
0 – 2 %	Luas kemiringan lereng pada kelompok ini sebesar 19,28 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan sangat datar (0 – 2 %).
2 – 5 %	sekitar 10,86 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan lahan dengan kemiringan cukup datar. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan cukup datar (2 – 15 %) paling dominan adalah Kecamatan Kota Agung yaitu 8.580 Ha atau 23,47 %.
15 - 40 %	Kemiringan dengan kategori ini adalah sebesar 58.179 Ha atau 17,33 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan yang memiliki kemiringan 15 – 40 % paling besar yaitu 14.604 (25,10 %).
> 40 %	Kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah kemiringan > 40 % sebesar 165.215 Ha atau 49,22 % dari total wilayah Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar terdapat

KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
	di Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan yaitu sebesar 37.127 Ha atau 22,47 %.

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Kabupaten Tanggamus terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 2.115 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Tanggamus terbentuk dengan kondisi topografi wilayah yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (berbukit dan bergunung), Secara fisiografi wilayah Kabupaten Tanggamus dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yang mencerminkan keadaan topografi wilayahnya, yaitu dataran rendah, perbukitan, bergelombang, dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan, serta kerucut gunung api. Bentang alamnya terdiri dari daratan 65 % yang dimanfaatkan untuk perumahan dan pekarangan sebanyak 37,10%, perkantoran sebanyak 37,04% dan lebih kurang 35% dataran tinggi dimanfaatkan untukperkebunan/pertanian sebanyak 40,71% dan fasilitas lainnya sebanyak 59,29%

Gambar II.5. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus

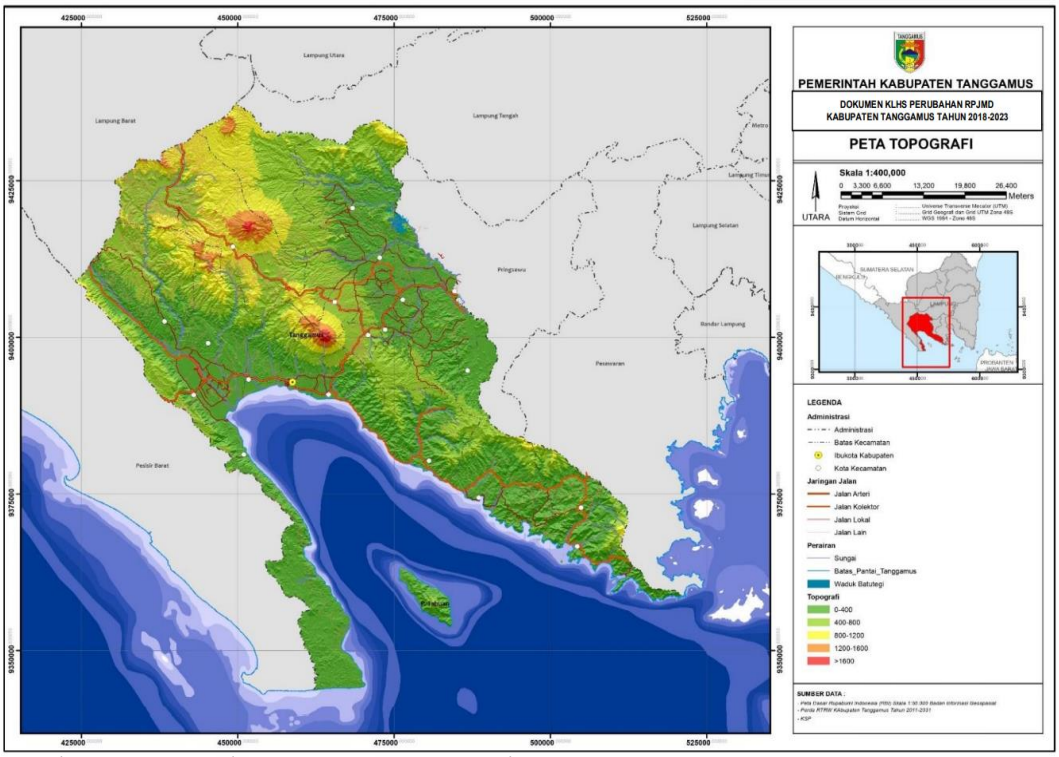

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

2.1.1.1.4 Geologi

Berdasarkan jenisnya, batuan yang membentuk wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri atas Batuan Pra Tertier, Batuan Tertier yang meliputi batuan gunung api andesit formasi tua, dan Batuan Kwarter berupa endapan gunung api muda. Batuan Tertier tersebar cukup luas di wilayah Kabupaten Tanggamus. Batuan Kwarter tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus, namun yang cukup mendominasi terdapat di Kecamatan Pulau Panggung dan Wonosobo. Sementara Alluvium yang berupa endapan permukaan lebih banyak terdapat di Kecamatan Wonosobo.

Wilayah Kabupaten Tanggamus secara geologis termasuk dalam formasi kwarter. Berdasarkan formasinya, formasi yang terdapat di Kabupaten Tanggamus merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan berupa satu rangkaian yang terletak di sebelah barat patahan (sesar) Semangka dan lainnya terletak di bagian timur patahan (sesar) Semangka. Tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus terbagi dalam beberapa jenis tanah. Penentuan jenis tanah tersebut ditinjau dari berbagai klasifikasi, yaitu :

1) Klasifikasi menurut USDA (*United States Department of Agriculture*).
2) Versi unit lahan menurut Pusat Penelitian Tanah (PPT).
3) Versi unit lahan menurut Repport.

Berdasarkan klasifikasi USDA, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus meliputi jenis-jenis tanah alluvial, latosol, andosol, regosol dan hidromorf kelabu. Lebih rincinya, jenis batuan dalam asosiainya dengan jenis tanah di Kabupaten Tanggamus dalam kaitannya dengan bentuk fisiografi wilayah adalah sebagai berikut :

1) Satuan tanah latosol yang berasal dari bahan induk kompleks tufa batuan gunung api intermedier dan basis dengan fisiografi pegunungan lipatan.
2) Satuan andosol coklat kekuningan yang berasal dari bahan induk kompleks tufa intermedier dan basis pada fisiografi pegunungan patahan.
3) Satuan tanah andosol coklat, kompleks tufa dan batuan tufa intermedier.
4) Satuan tanah podsolik merah kuning yang berasal dari bahan induk kompleks sedimen tufa dengan batuan metamorf pada fisiografi dataran.

5) Asosiasi podsoli merah kekuningan dan litosol yang berasal dari kompleks batuan kukuh plutonik masam dan metamorf pada fisiografi pegunungan.
6) Satuan tanah alluvial hydromorf yang berasal dari bahan induk endapan marin dengan fisiografi dataran.

Saat ini berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1) Biji Besi

   Biji besi yang ada di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Padang Ratu dan Pekon Tegineneng Kecamatan Limau, Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok serta Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Biji besi di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral magnetik yang memiliki kadar Fe antara 55-65%.
2) Mangan

   Mangan di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral purolusit dengan kadar Mn anatara 25-45% dan banyak dijumpai di Pekon Tanjung Kemala, Pekon Tanjung Agung, Pekon Gunung Kasih yang terdapat di Kecamatan Pugung. Terdapat beberapa perusahaan industri yang mengelola mangan tersebut.
3) Emas

   Bahan galian emas di Kabupaten Tanggamus memiliki sebaran cukup luas dengan jumlah cadangan yang cukup besar yang terdapat di Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan, Pekon Way Linggo dan Way Semong di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.
4) Galena

   Galena di Wilayah Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat serta Pekon Umar dan Pekon Paku di Kecamatan Kelumbayan.
5) Pasir Besi

   Pasir besi di Wilayah Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai tersebar disepanjang pesisir pantai seperti Pekon Tegineneng dan Pekon Badak Kecamatan Limau, pesisir pantai Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, pesisir pantai Pekon Napal dan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan. Pasir besi di Kabupaten Tanggamus memiliki ketebalan deposit berkisar antara 0,5 – 2,5 m.

6) Batu Bara

Batu bara di Kabupaten Tanggamus umumnya memiliki kalori berkisar antara 5.500-6300 dan dapat dijumpai di Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Gading Pertiwi Kecamatan Pugung, Teluk Berak Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Way Harong Kecamatan Air Naningan, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat dan Pekon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan.

7) Zeolit

Bahan galian Zeolit di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai di Pekon Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya : 720.000 m^3), Pekon Pertiwi Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 2000.000 m^3) pengelola PT Peragon Perdana Mining, Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 600.000 m^3).

8) Andesit

Batu Andesit diKabupaten Tanggamus tersebar merata dibeberapa Kecamatan diantaranya Pekon Toto Margo Kecamatan Air Naningan (sumber daya tereka 2.000.000 m3), Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 600.000 m3), Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 2.700.000 m3), Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya tereka 140.000 m3), Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa (sumber daya tereka 3.000.000 m3), Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok (sumber daya tereka 5.250.000 m3), Pekon Balak Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 18.000.000 m3), Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 3.800.000 m3), Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 18.750.000 m3), Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 6.000.000 m3).

9) Batu Gamping

Batu Gamping atau Batu Kapur di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai pada beberapa wilayah di Kecamatan Pugung seperti di Pekon Gunung Kasih (sumber daya tereka 200.000 m3) dan Pekon Tanjung Kemala (sumber daya tereka 700.000 m3).

10) Bentonit

Jenis mineral bentonit di Kabupaten Tanggamus terdiri dari dua jenis yang banyak di jumpai di Dusun Umbul Solo Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung dengan jumlah sumber daya sebesar 600.000 m^3.

11) Belerang

Belerang di Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai di Pekon Suka Indah Kecamatan Ulu Belu. Kegunaannya adalah untuk industri farmasi (obat-obatan)

12) Batu Apung

Bahan galian jenis batu apung di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa dan banyak digunakan sebagai bahan poles atau penggosok, bahan bangunan konstruksi ringan, bahan pengisi dan sebagai isolator temperatur tinggi.

13) Pasir

Pasir di Kabupaten Tanggamus banyak di temui di Pekon Sri Kuncoro dan Pekon Karang Rejo Kecamatan Samaka, disepanjang aliran sungai Way Semaka Pekon Tugu Rejo dan Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Baros Kecamatan Kota Agung.

14) Granit

Batu granit merupakan bahan galian yang sangat ekonomis dan di Kabupaten Tanggamus di jumpai di Pekon Talang Asahan dengan sumber daya sebanyak 6.000.000 m^3 dan Pekon Kali Pasir Kecamatan Semaka dan Kecamatan Wonosobo.

15) Lempung

Lempung di wilayah Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Gunung Kasih dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan banyaknya sumber daya sebesar 22.500.000 m^3

16) Silika

Mineral Silika atau Batu Kuarsa banyak dijumpai di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 600.000 m3) dan Pekon Air Kubang serta Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan.

17) Sirtu

Sirtu di Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo, Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung dan Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka.

18) Marmer

Bahan Galian Marmer di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 780.000 m3)

dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 3.240.000 m3).

19) Seng

Bahan Galian Seng di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung.

Gambar II.6. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus

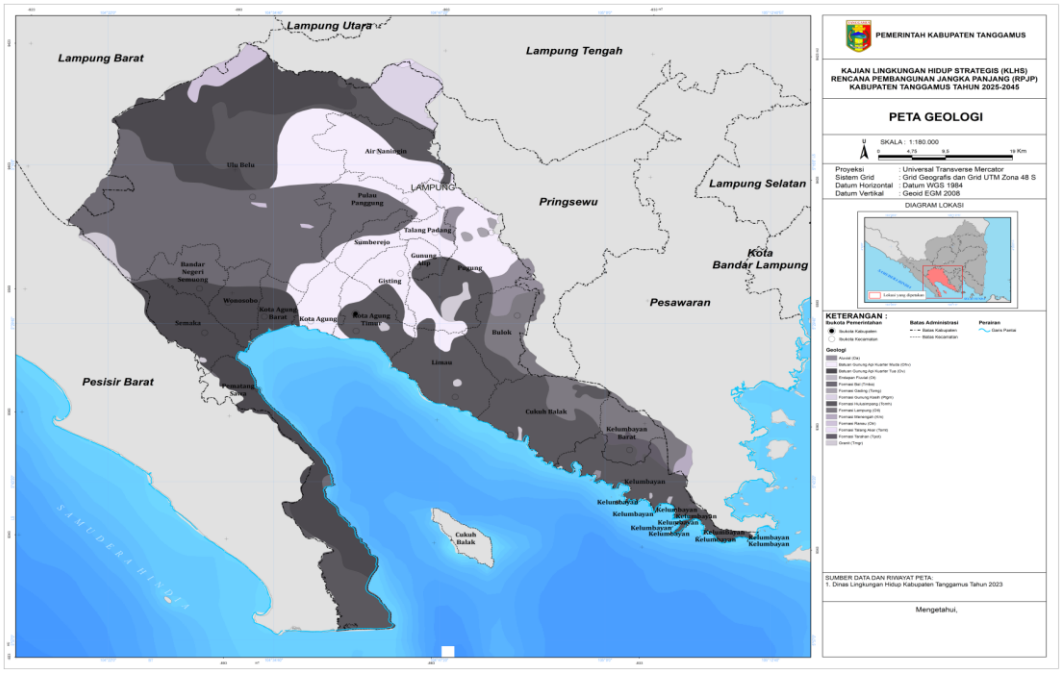

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kondisi perairan yang manjadi sumber air bagi penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.

Sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Tanggamus karena manfaatnya yang sangat besar bagi aktivitas penduduk adalah sungai Way Sekampung termasuk daerah-daerah aliran sungainya. Sungai dan anak sungai ini merupakan sumber air untuk Bendungan Batu Tegi yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan yang dibangun pada tahun 2002, dengan luas genangan 25 Km^2, yang diperuntukkan sebagai pembangkit tenaga listrik, air baku, pariwisata, pengedalian banjir dan

pengembangan perikanan air tawar. Pola aliran sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan, Talang Padang, Pugung, dan Bulok. Luas keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung adalah 479.252 Km^2.

Gambar II.7. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus

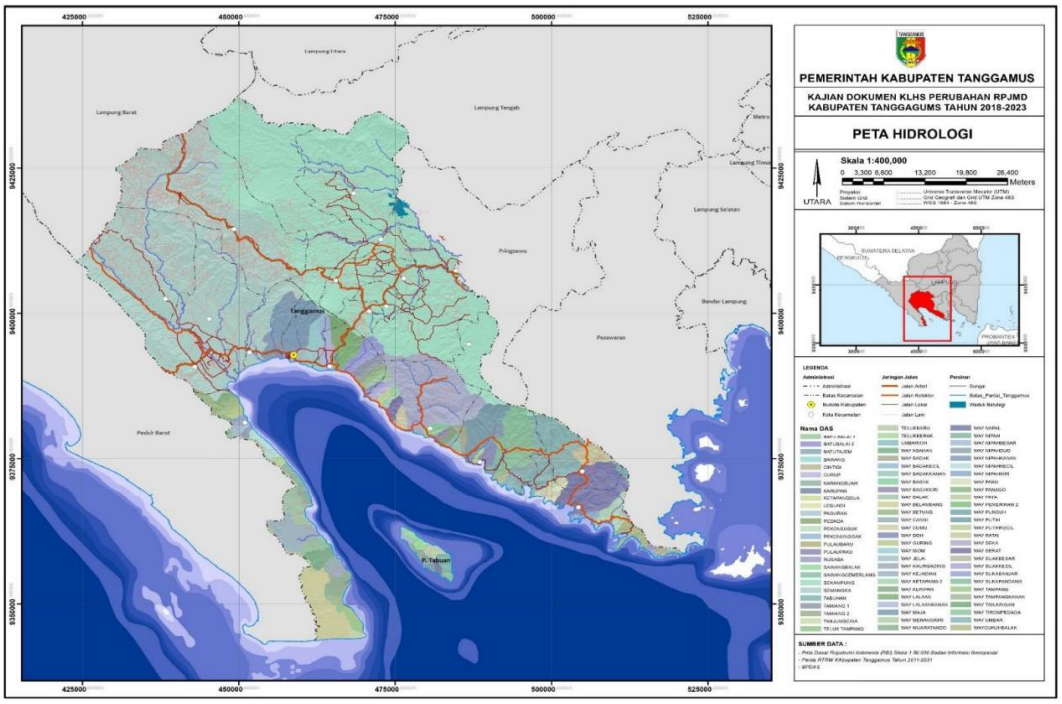

Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tangggamus, 2020, KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

2.1.1.1.6 Klimatologi

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Teluk Semangka yang merupakan bagian dari Samudera Indonesia menyebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran dengan temperatur udara berkisar rata-rata antara 26 ^{o}C (Derajat Celcius) sampai 30 ^{o}C pada ketinggian 20-60 m diatas permukaan laut sedangkan pada daerah yang lebih rendah temperatur udara di wilayah ini dapat mencapai 33 ^{o}C.

Wilayah dengan udara sejuk (pegunungan) berada di sekitar daerah Kecamatan Gisting dan Kota Agung Timur yang berada pada ketinggian 500 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl (Gunung Tanggamus). Kecepatan angin rata-rata adalah 5,83 km/jam, dengan kelembaban udara yang cukup

tinggi yaitu 80%-88%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Tanggamus juga cukup tinggi berkisar antara 1.750 mm per tahun sampai dengan 3.000 mm per tahun. Type-type iklim berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L. R. Oldeman (1978) dibedakan berdasarkan panjang bulan basah dan bulan kering yang berlangsung di wilayah Kabupaten Tanggamus. Atas dasar klasifikasi tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk pada zona B – 1 dimana jumlah bulan basah adalah 7 sampai dengan 9 bulan dan Zona C dengan jumlah bulan basah 7 bulan.

Gambar II.8. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus

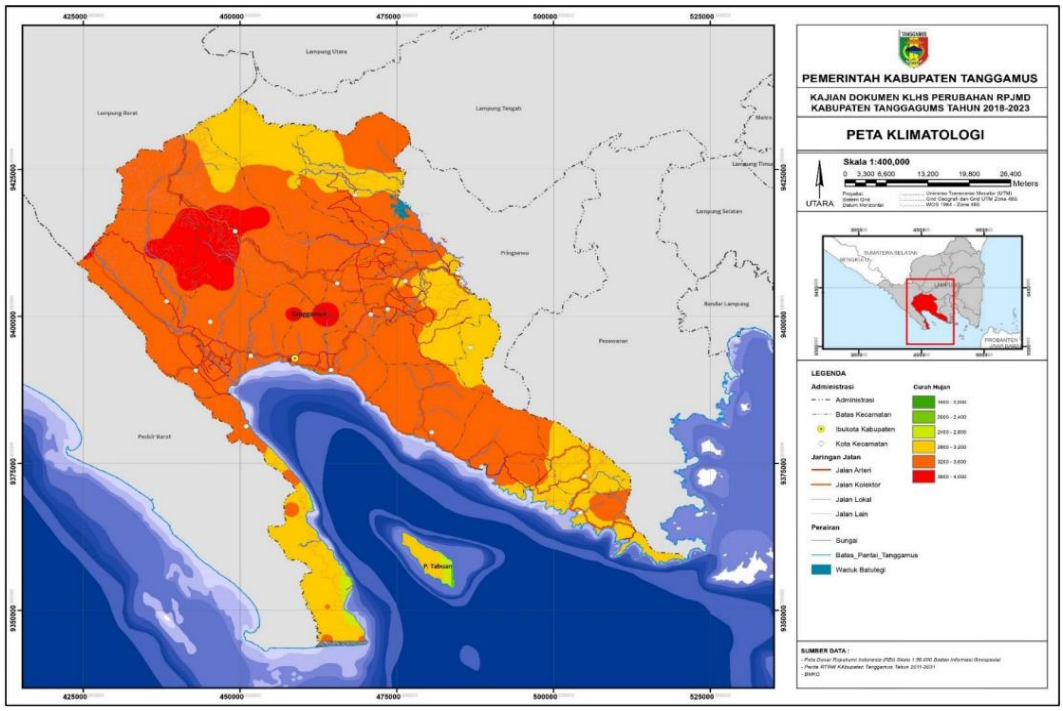

Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tangggamus, 2020, KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang wilayah adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya air. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan). Selain itu, secara alamiah kuantitasnya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan dan sumberdaya air ini akan menentukkan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan lahan pada wilayah tersebut.

Penetapan daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengkonversi lahan-lahan yang tidak termasuk dalam kategori kawasan lindung dan sawah beririgasi teknis.

Berdasarkan pada kondisi dan analisa potensi lahan serta bangunan maka daya tampung lahan di Kabupaten Tanggamus sampai dengan Tahun 2031 masih tercukupi. Luas daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di masa yang akan datang adalah 115.360 Ha atau 40%. Untuk lebih jelasnya ketersediaan dan daya tampung lahan Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4. Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PERMU KIMAN	SAWAH	HUTAN	DAYA TAMPUNG LAHAN	%
1	Wonosobo	20.963	218	3.183	11.295	6.267	5,4
2	Semaka	17.090	220	2.420	1.505	12.945	11,2
3	B. Negeri Semuong	9.812	113	-	-	9.699	8,4
4	Kota Agung	7.693	238	1.465	-	5.990	5,2
5	Pematang Sawa	18.529	110	1.298	-	17.121	14,8
6	Kota Agung Timur	7.333	116	3.358	2.013	1.846	1,6
7	Kota Agung Barat	10.130	115	2.917	3.765	3.333	2,9
8	Pulau Panggung	43.721	184	2.404	38.211	2.077	1,8
9	Air Naningan	32.308	162	-	29.562	2.584	2,2
10	Ulu Belu	18.635	229	1.200	15.203	2.003	1,7
11	Talang Padang	4.513	270	2.000	2.013	230	0,2
12	Sumberejo	5.677	188	1.388	-	4.101	3,6
13	Gisting	3.253	211	793	-	2.249	1,9
14	Gunung Alip	2.568	116	2.100	-	352	0,3
15	Pugung	23.240	336	3.544	15.156	4.204	3,6
16	Bulok	5.168	125	-	-	5.043	4,4
17	Cukuh Balak	13.376	142	1.425	11.546	263	0,2
18	Kelumbayan	12.108,60	70	1.223	4.054	6.762	5,9
19	Limau	24.061	122	953	-	22.986	19,9
20	Kelumbayan Barat	5.367,40	62	-	-	5.306	4,6
	JUMLAH	**285.546**	**3.347**	**31.671**	**134.324**	**116.204**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Berdasarkan hasil analisa, kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2031 adalah untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebesar 30% dari luas wilayah menjadi prioritas dalam pengalokasiannya. Untuk

kawasan budidaya terdiri atas kebutuhan pengembangan perumahan seluas 5.185 Ha dan pengembangan prasarana dan sarana seluas 3.486 Ha.

Tabel II.5. Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031

NO	JENIS KEGIATAN	KEBUTUHAN LAHAN (Ha)	KETERANGAN
I	Daya Tampung	116.204	
II	Kebutuhan Pengembangan		
1	Kawasan Lindung	85.664	Dari luas wilayah 30%
2	Kawasan Budidaya		
	- *Perumahan*	5.185	
	- *Prasarana*	2.324	Dari luas perumahan 30%
	- *Sarana*	1.162	Dari luas perumahan 20%
III	Jumlah (1+2)	94.335	
IV	Cadangan (I – (1+2))	21.869	

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Gambar II.9. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus

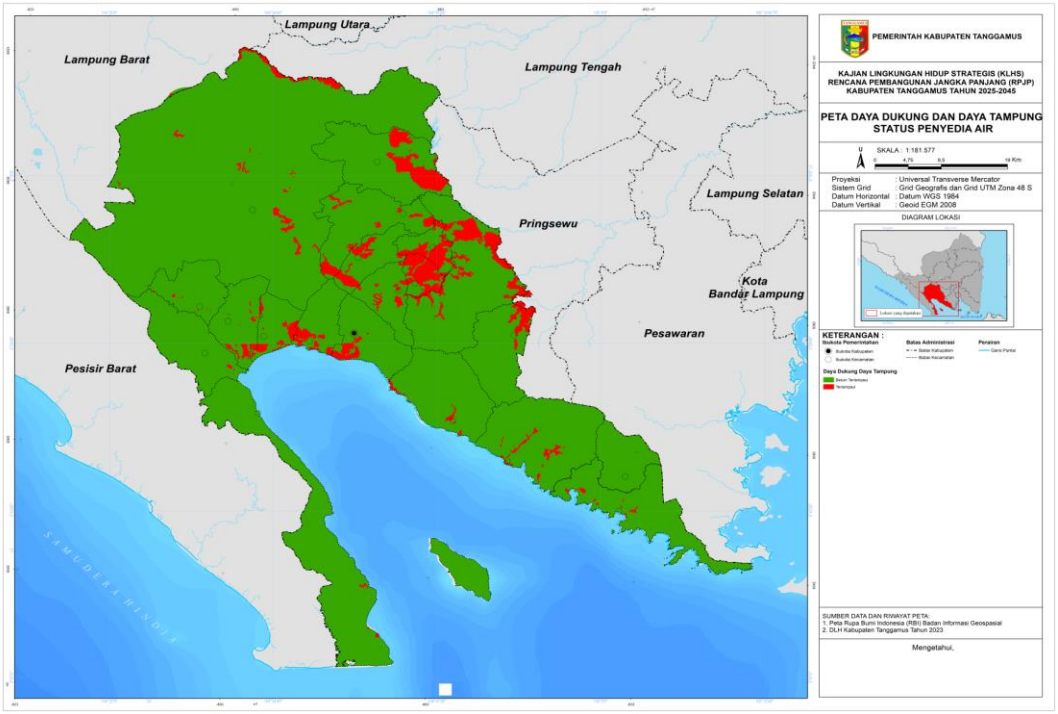

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Tanggamus yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40 %, banyaknya daerah aliran sungai, terdapatnya beberapa gunung serta terletak di dekat patahan semangka, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanggamus cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar. Dibawah ini adalah jenis bencana alam dan perkiraan daerah yang terkena dampak bencana tersebut.

2.1.1.2.1 Bencana Longsor dan Pergerakan Tanah

Merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, dan atau material lain yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Umumnya longsor yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (*debrisavalanches*) dan nendatan (*slumps/rotational slides*). Topogafi alam Kabupaten Tanggamus lebih banyak berkarakter pegunungan dan perbukitan dengan struktur tanah yang rata-rata labil, dan hal ini membawa konsekuensi bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki banyak daerah rawan bencana pergerakan tanah.Kecamatan yang memiliki daerah rawan bencana longsor/pergerakan tanah antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, Ulu Belu, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Bulok, dan Air Naningan, Gisting.

Gambar II.10. Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus

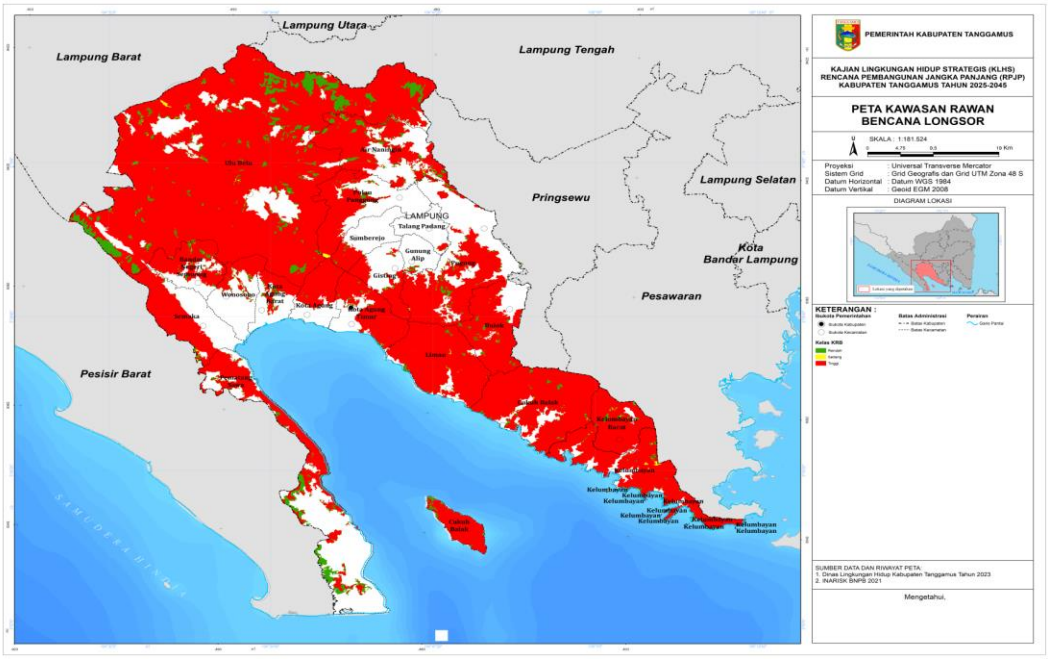

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.2 Bencana Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun makin meningkat, baik luasan areal terdampaknya maupun frekuensi terjadinya. Beberapa penyebab terjadinya peningkatan tersebut antaralain adalah maraknya alih fungsi lahan, berkurangnya luasan ruang terbuka hijau, perilaku tidak tertib masyarakat akibat rendahnya kesadaran masyarakat, pesatnya pembangunan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, dan sebagainya. Daerah potensial banjir di Kabupaten Tanggamus antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau, untuk Tahun 2023 yang sering terjadi banjir yaitu di daerah Semaka dan Bandar Negeri Semuong yang mengakibatkan putusnya jalan Nasional.

Gambar II.11. Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus

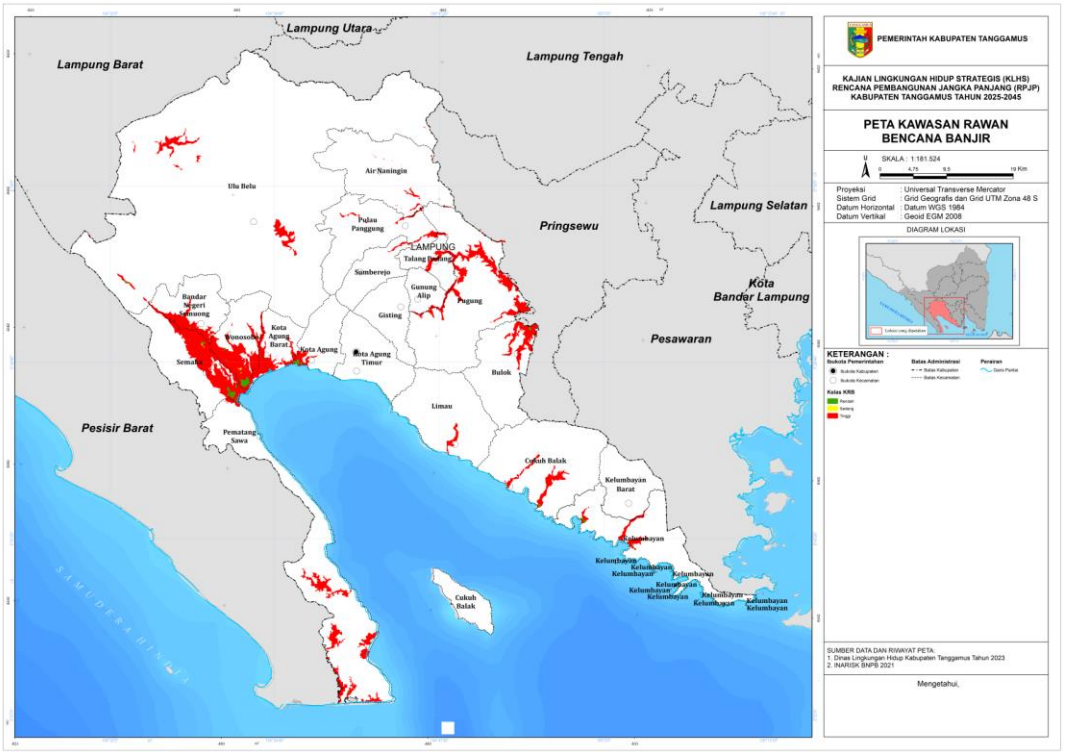

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.3 Gempa Bumi

Gempa bumi disebabkan oleh baik aktivitas kegunung apian (*vulkanik*) maupun akibat dari tumbukan beberapa lempeng bumi, ataupun reruntuhan batuan(*tektonik*). Kabupaten Tanggamus juga tidak luput dari kerawanan gempa bumi karena dilewati oleh patahan/sesar Semangko.

Beberapa kecamatan yang terlewati oleh sesar ini adalah Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Semaka, Wonosobo, Pematang Sawa, dan Kota Agung Barat. Daerah lain yang juga potensial akan terjadinya bencana gempa bumi adalah Ulu Belu, Kota Agung Barat, Kota Agung, Limau, Cukuh Balak, Kelumbayan Barat, dan Kelumbayan.

Gambar II.12. Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus

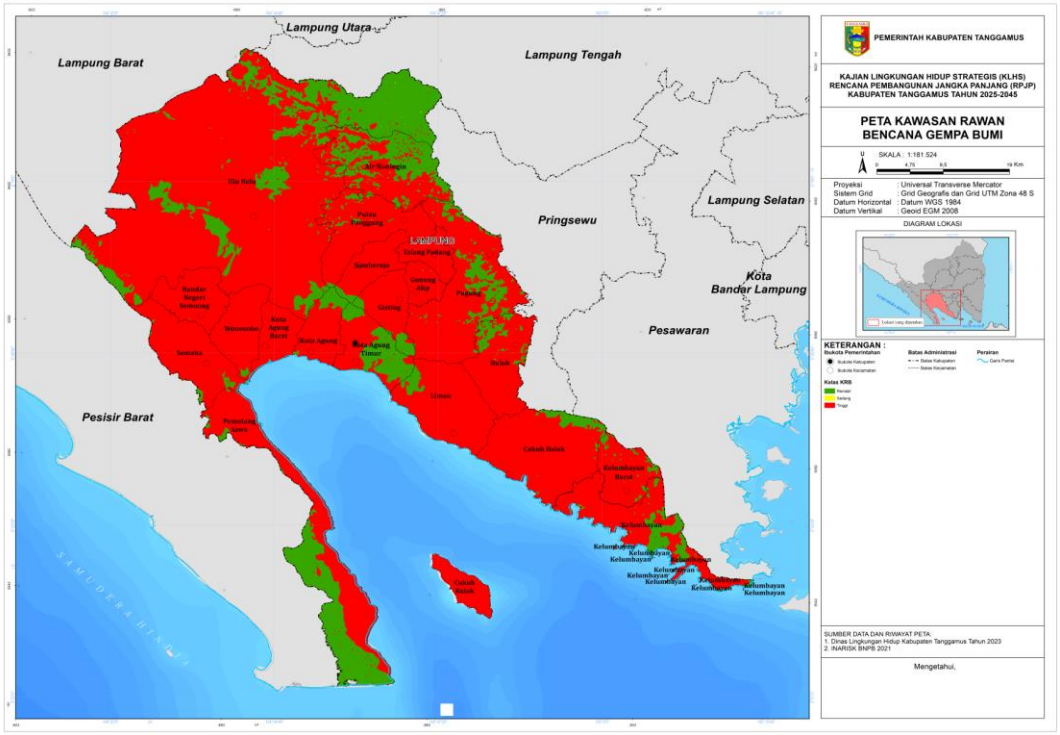

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.4 Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut dengan periode panjang yang menghantam daratan dan disebabkan adanya gangguan impulsif. Gangguan impulsif ini sendiri dipicu oleh beberapa sebab antaralain seperti gempa bumi dasar laut, dan erupsi vulkanik/gunung meletus, longsoran dan hantaman material dengan volume besar ke laut. Tsunami besar yang pernah menghantam daerah pesisir Kabupaten Tanggamus adalah ketika terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Beberapa daerah yang rawan terjadi bencana tsunami adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, dan Kelumbayan.

Gambar II.13. Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus

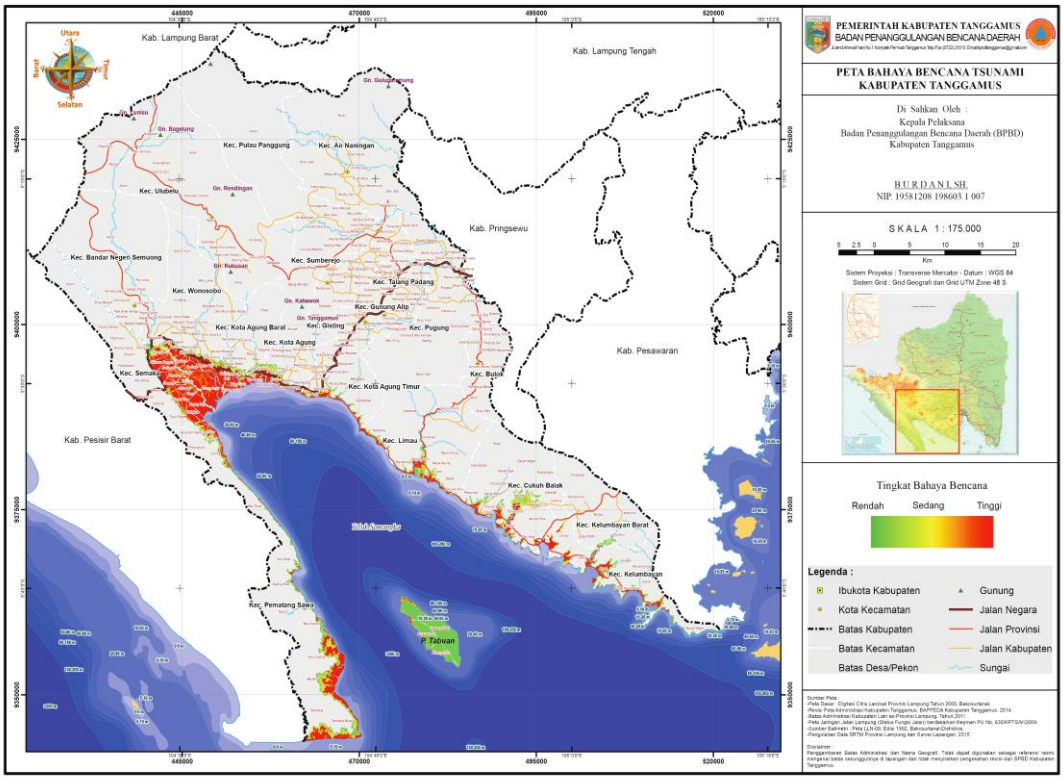

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.1.2.5 Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran yang mungkin menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah bencana kebakaran hutan dan bangunan. Untuk kebakaran hutan, potensi pencetus kebakaran paling mungkin disebabkan oleh kebakaran yang berasal dari lahan kritis/bongkor berisi semak/alang-alang yang berada di sekitar hutan. Untuk bencana kebarakaran bangunan/rumah, daerah yang paling potensial terjadi kebakaran adalah daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dengan pola tata letak bangunan yang rapat. Hal ini bisa terlihat di kecamatan perkotaan seperti Talang Padang, Kota Agung, dan Gisting, juga di kecamatan-kecamatan padat seperti Wonosobo dan Kota Agung Barat.

Berdasarkan Indeks Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus memiliki kelas kerentanan kebakaran hutan lindung dengan kelas resiko 1 yaitu rendah. Kemudian tingkat kerentanan kebakaran terhadap hutan alam dengan kelas resiko 2 yaitu sedang dan hutan bakau dengan kelas resiko 1 yaitu rendah.

Gambar II.14. Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus

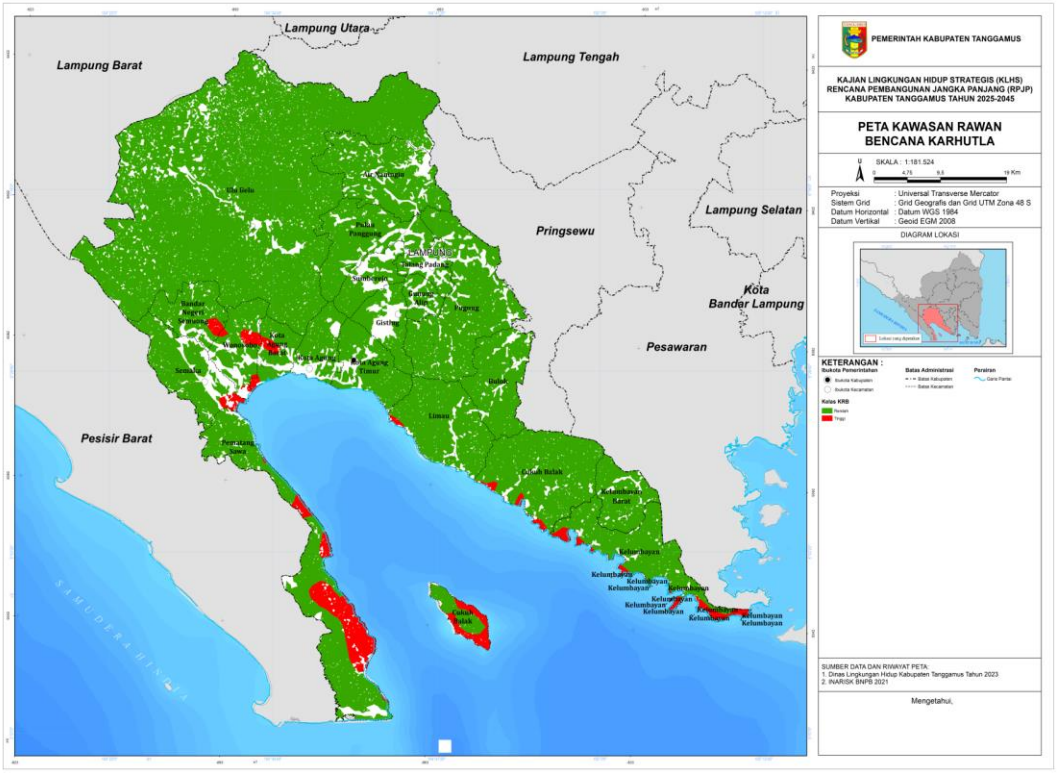

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2032, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.6 Bencana Gelombang Tinggi Air Laut

Potensi bencana gelombang tinggi air laut yang terjadi adalah akibat gelombang pasang laut yang menyebabkan beberapa wilayah sekitarnya mengalami gangguan akibat arus pasang laut. Kawasan rawan bencana gelombang pasang laut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Hanya beberapa kecamatan yang mengalami gelombang pasang laut, yaitu Kecamatan Kelumbayan, Cukuh Balak, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka serta Pematang Sawa.

2.1.1.3 Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 662.542 jiwa, dengan luas wilayah daratan 2.855,46 Km² maka kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 142 jiwa per km².

Tabel II.6. Persentase Penduduk dan Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS (Km2)	PERSENTASE PENDUDUK	KEPADATAN
1	Wonosobo	209.63	6,46	204.30
2	Semaka	170.90	6,10	236.33
3	Bandar Negeri Semuong	98.12	2,63	177.66
4	Kota Agung	76.93	7,36	633.74
5	Pematang Sawa	185.29	2,75	98.18
6	Kota Agung Timur	73.33	3,39	306.22
7	Kota Agung Barat	101.30	3,48	227.48
8	Pulau Panggung	437.21	6,39	96.84
9	Ulu Belu	323.08	6,72	137.90
10	Air Naningan	186.35	4,82	171.51
11	Talang Padang	45.13	8,40	1233.15
12	Sumberejo	56.77	5,57	650.40
13	Gisting	32.53	6,72	1367.66
14	Gunung Alip	25.68	3,53	909.97
15	Pugung	232.40	10,52	300.00
16	Bulok	51.68	3,80	487.44
17	Cukuh Balak	133.76	3,86	191.18
18	Kelumbayan	121.09	1,88	102.96
19	Limau	240.61	3,44	94.77
20	Kelumbayan Barat	53.67	2,18	268.57
	JUMLAH	**2,855.46**	**100**	**142.33**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa persentase Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pugung sebesar 10,52 persen dan yang paling sedikit di Kecamatan Kelumbayan, sedangkan Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Gisting dengan kepadatan 1.367,66 jiwa/Km^2, sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Limau dengan kepadatan sebesar 94,77 jiwa/Km^2.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat dua jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel II.7. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,413,190.50	41,46	4,323,364.55	39,64	4,426,393.00	38,78	4,482,590.00	38,33
B Pertambangan dan Penggalian	787,976.37	6,73	740,068.63	7,11	705,894.24	7,52	733,884.24	6,71
C Industri Pengolahan	690,048.44	6,95	721,039.93	7,01	716,253.00	6,61	721,780.00	6,33
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,277.40	0.08	8,352.37	0.07	8,930.24	0.07	9,030.24	0.06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,428.81	0.13	13,938.40	0.14	14,564.86	0.13	14,994.86	0.12
F Konstruksi	754,423.98	6,75	826,812.41	7,23	848,128.67	7,12	913,128.67	7,24
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,079,900.49	9,70	1,241,874.47	10,76	1,404,706.02	11,76	1,544,230.02	12,28
H Transportasi dan Pergudangan	538,508.85	5,15	569,373.49	5,25	694,036.12	6,31	800,036.12	7,51
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182,411.28	1,92	179,806.00	1,80	205,218.04	1,88	238,460.04	2,02
J Informasi dan Komunikasi	455,741.01	4,11	485,999.28	4,04	487,939.97	3,68	524,410.97	3,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	202,299.84	1,97	207,841.03	2,01	207,416.04	1,90	215,341.04	1,84
L Real Estate	319,097.31	2,96	324,276.66	2,87	336,513.74	2,75	338,421.74	2,60
M, N Jasa Perusahaan	8,494.93	0,09	8,536.83	0.08	10,062.75	0.09	10,620.75	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,695.44	4,97	491,260.42	4,92	485,631.64	4,47	492,461.64	4,24
P Jasa Pendidikan	476,849.83	4,43	484,545.08	4,35	498,133.53	4,17	508,313.53	4,06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,550.40	1,44	179,821.04	1,64	179,529.22	1,47	188,740.22	1,47
R,S,T,U Jasa Lainnya	124,925.82	1,16	122,313.38	1,08	154,984.40	1,27	182,334.40	1,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**10,679,820.71**	**100.00**	**10,929,223.96**	**100.00**	**11,384,335.47**	**100.00**	**11,919,460.04**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 mencapai Rp.11,919,460.04 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 11,384,335.47, dari distribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 38.33% sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,06%.

Tabel II.8. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,413,053.04	41.46	6,482,994.83	39.68	7,051,238.40	38.91	7,516,063.04	38.32
B Pertambangan dan Penggalian	1,041,414.04	6.73	1,159,436.04	7.10	1,361,696.54	7.51	1,315,344.04	6.70
C Industri Pengolahan	1,074,562.40	6.95	1,155,924.69	7.08	1,213,826.50	6.70	1,240,34.49	6.22
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,828.44	0.08	11,054.47	0.07	11,914.96	0.07	12,128.40	0.06

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,385.38	0.13	21,334.17	0.13	22,654.36	0.12	23,474.38	0.11
F Konstruksi	1,043,498.00	6.75	1,179,800.10	7.22	1,288,864.13	7.11	1,419,898.00	6.75
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,500,563.24	9.70	1,748,986.57	10.71	2,105,148.15	11.62	2,408,910.26	12,09
H Transportasi dan Pergudangan	795,881.91	5.15	856,768.66	5.24	1,141,965.85	6.30	1,471,981.91	7,38
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296,631.06	1.92	294,130.96	1.80	340,256.48	1.88	396,341.06	1,98
J Informasi dan Komunikasi	636,181.19	4.11	659,999.55	4.04	666,324.71	3.68	716,891.19	3,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	304,896.73	1.97	328,465.17	2.01	343,986.28	1.90	360,759.70	1,80
L Real Estate	458,004.33	2.96	468,936.00	2.87	498,292.79	2.75	510,730.33	2,56
M, N Jasa Perusahaan	13,444.75	0.09	13,632.75	0.08	16,682.50	0.09	18,130.75	0,09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	768,861.67	4.97	802,385.93	4.91	809,123.72	4.46	831,670.67	4,24
P Jasa Pendidikan	685,154.42	4.43	710,239.95	4.35	754,850.63	4.16	796,344.67	4.05
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	223,503.53	1.44	266,854.49	1.63	266,701.25	1.47	288,666.42	1.46
R,S,T,U Jasa Lainnya	178,791.73	1.16	176,230.14	1.08	230,232.17	1.27	281,541.73	1.13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**15,467,655.86**	**100.00**	**16,337,174.45**	**100.00**	**18,123,759.42**	**100.00**	**19,609,175.87**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp.19,609,175.87 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 18,123,759.42. Distribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 38.32 % sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,06 %.

Tabel II.9. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN (RUPIAH)							
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11,030,427.90	71.31	11,614,319.16	71.09	12,945,346.88	71.62	14,222,227.90	72.32
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	243,967.49	1.58	260,377.63	1.59	276,520.64	1.53	315,497.49	1.60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,650,484.14	10.67	1,667,846.53	10.21	1,615,877.12	8.92	1,690,234.14	8.16
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,853,351.27	24.91	4,104,179.23	25.12	4,428,387.29	24.99	4,762,981.27	24.28
Perubahan Inventori	52,072.09	0.34	39,040.94	0.24	50,184.44	0.28	32,302.09	0.16
Net Ekspor Barang dan Jasa	(1,362,647.04)	(8.81)	(1,348,589.05)	(8.25)	(1,220,586.95)	(7.32)	(1,414,057.04)	(7.21)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**15,467,655.86**	**100.00**	**16,337,174.45**	**100.00**	**18,095,749.42**	**100.00**	**19,609,170..86**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada tahun 2023 mencapai Rp.19,609,170.86 lebih tinggi dibandingkan

dengan tahun 2022 sebesar Rp.18,095,749.42. Distribusi Pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 72.32% sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -7.21%.

Tabel II.10. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN (RUPIAH)							
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,293,654.46	68.29	7,435,176.00	68.03	7,807,568.24	68.58	8,191,800.46	68.72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	155,859.69	1.46	162,942.50	1.49	165,022.75	1.45	181,910.65	1.51
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,037,071.18	9.71	1,040,330.40	9.52	992,810.60	8.72	1,010,150.19	8.47
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,668,717.68	24.99	2,769,935.27	25.34	2,852,396.43	25.06	2,961,521.68	24.84
Perubahan Inventori	18,028.83	0.17	9,437.50	0.09	8,600.02	0.08	7,040.73	0.06
Net Ekspor Barang dan Jasa	(493,511.14)	(4.62)	(488,597.71)	(4.47)	(442,050.57)	(3.88)	(432,961.99)	(3.62)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**10,679,820.71**	**100.00**	**10,929,223.96**	**100.00**	**11,384,345.47**	**100.00**	**11,919,460.12**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran pada tahun 2022 sebesar Rp.11,384,345.47 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.11,919,460.12. Distribusi pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu 68.72 % sedangkan distribusi pengeluaran yang paling rendah berasal dari Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -3.62 %.

Tabel II.11. Perkembangan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023

LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.46	41.32	39.64	39.56	38.78	38.59	38.33	38.32
B Pertambangan dan Penggalian	6.73	7.38	7.11	6.77	7.52	6.20	7.71	6.70
C Industri Pengolahan	6.95	6.46	7.01	6.60	6.61	6.41	6.33	6.22
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11
F Konstruksi	6.75	7.06	7.23	7.57	7.12	7.58	7.24	6.75
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.70	10.11	10.76	11.36	11.76	12.38	12.28	12,09
H Transportasi dan Pergudangan	5.15	5.04	5.25	5.21	6.31	6.10	7.51	7,38
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.92	1.71	1.80	1.65	1.88	1.80	2.02	1,98
J Informasi dan Komunikasi	4.11	4.27	4.04	4.45	3.68	4.29	3.66	3,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.97	1.89	2.01	1.90	1.90	1.82	1.84	1,80
L Real Estate	2.96	2.99	2.87	2.97	2.75	2.96	2.60	2,56

LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
M, N Jasa Perusahaan	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0,09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.97	4.40	4.92	4.49	4.47	4.27	4.24	4,24
P Jasa Pendidikan	4.43	4.46	4.35	4.43	4.17	4.38	4.06	4.05
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.44	1.44	1.64	1.65	1.47	1.58	1.47	1.46
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.16	1.17	1.08	1.12	1.27	1.36	1.44	1.13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Perkembangan distribusi sektor PDRB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif pada beberapa sektor sedangkan pada beberapa sektor yang lain mengalami perubahan yang tidak signifikan.

Tabel II.12. Laju Pertumbuhan riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN			
	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(2.17)	(2.04)	2.38	1.27
B Pertambangan dan Penggalian	2.50	(6.08)	(4.62)	3.97
C Industri Pengolahan	(3.59)	3.04	0.73	0.77
D Pengadaan Listrik dan Gas	3.93	(9.97)	6.92	1.10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.10	7.52	0.88	2.93
F Konstruksi	(2.51)	8.27	3.83	7.70
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(8.20)	16.80	11.36	9.93
H Transportasi dan Pergudangan	(5.05)	5.73	21.89	15.33
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(6.28)	(1.43)	14.13	16.20
J Informasi dan Komunikasi	8.54	6.64	0.40	7.47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.00	2.74	(0.20)	3.82
L Real Estate	(3.33)	1.62	3.77	0.57
M, N Jasa Perusahaan	(1.32)	0.49	17.87	5.50
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.89	4.59	(1.15)	1.41
P Jasa Pendidikan	2.53	1.61	2.80	2.04
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.59	17.11	(0.16)	5.13
R,S,T,U Jasa Lainnya	(5.53)	(2.09)	26.71	26.71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**(1.77)**	**2.34**	**4.16**	**4.70**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel II.13. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2023

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PERTUMBUHAN			
	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(1.38)	1.94	5.01	4.92
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(4.06)	4.54	1.28	10.28
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(1.46)	0.31	(4.57)	1,75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(6.00)	3.79	2.98	3.83
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**(1.77)**	**2.34**	**4.16**	**4.70**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,77 % selanjutnya menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 dengan berhasil tumbuh sebesar 2,34 % dan kembali menunjukkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 4,16 % pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,70 %.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Namun akibat adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,77%, hal ini selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang juga mengalami kontraksi pada angka -1,67% dan Nasional pada angka -2,07%.

Gambar II.15.Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

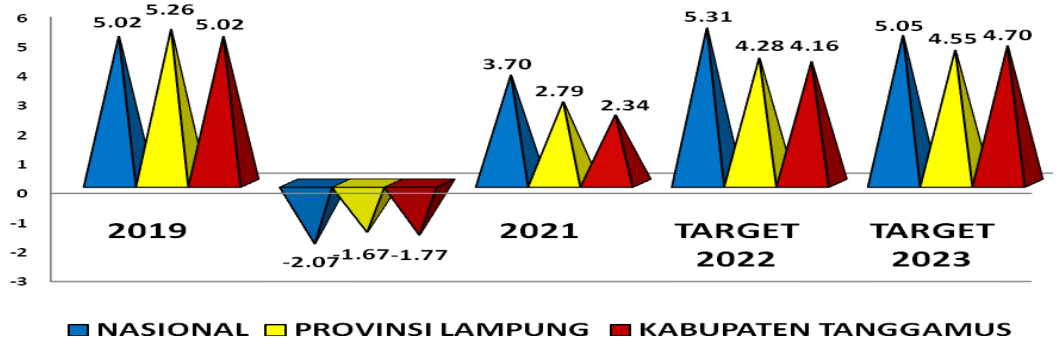

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami perbaikan menjadi 2,34% dan terus menunjukkan kinerja yang membaik dengan tumbuh 4,16% pada tahun 2022 serta pada tahun 2023 tumbuh menjadi 4,70 %, namun tingkat pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,55 % dan 5,05 %.

Gambar II.16.Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2019-2023

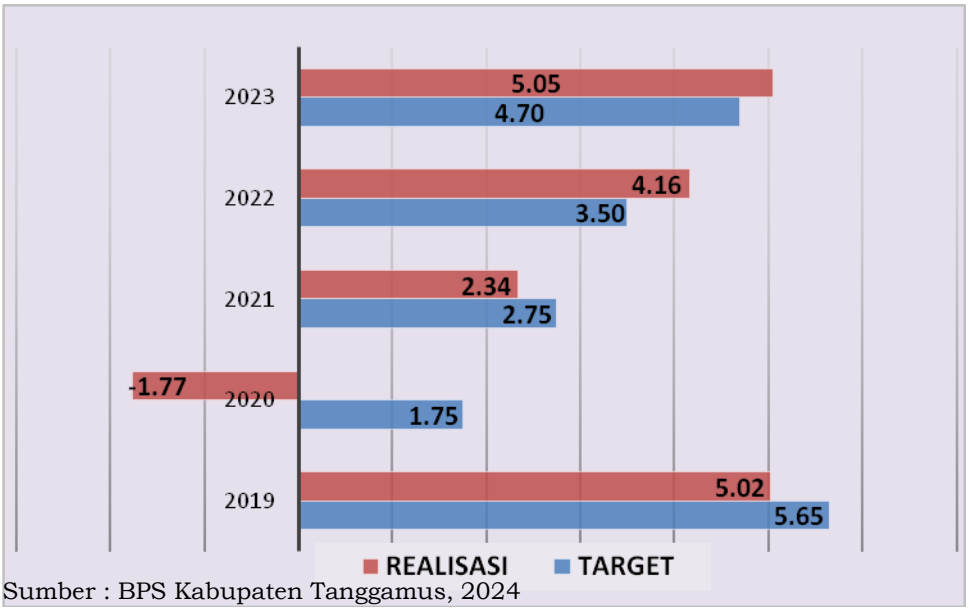

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Pada tahun 2019 dan 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren positif dengan berhasil tumbuh diatas angka 5 % meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Namun sejak tahun 2020, pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang signifikan sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Ekonomi Kabupaten Tanggamus tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,77 %, jauh lebih rendah dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,02 %, sedangkan pada tahun 2021 berhasil bangkit dengan tumbuh positif sebesar 2,34 % meskipun belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2,75 % Selanjutnya pada tahun 2023 berhasil tumbuh 4,70 % dengan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 4,55 % - 5,05 %.

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Selama tahun 2016 tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 2,51%, angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mencapai 3,71%. Inflasi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2016 berfluktuasi, hal ini terjadi karena terdapat beberapa indeks komoditas disektor makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, pendidikan, rekreasi, dan olah raga, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan. Dengan tingkat inflasi sebesar 2,51% ditahun 2016, maka tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Bandar Lampung sebesar 2,75% dan inflasi Nasional sebesar 3,02%. Sedangkan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, BPS Kabupaten Tanggamus tidak melakukan perhitungan inflasi.

Tabel II.14. Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2016-2023

TAHUN	INDONESIA	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	METRO	TANGGAMUS
2016	3.02	2.78	2.75	2.92	2.51
2017	3.61	3.02	3.14	2.32	-
2018	3.13	2.73	2.92	1.64	-
2019	2.72	3.44	3.53	2.97	-
2020	1.68	2.00	1.93	2.53	-
2021	1.87	2.19	2.13	2.74	-
2022	5.51	5.51	5.52	5.37	-
2023	2.61	3.47	3.52	3.05	-

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Keterangan : Mulai Tahun 2017 BPS tidak lagi melakukan perhitungan inflasi di Kabupaten Tanggamus.

Untuk melihat kondisi inflasi yang ada maka capaian inflasi Provinsi Lampung dijadikan pedoman dalam penentuan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selama kurun waktu 2018-2023, tingkat inflasi di Provinsi Lampung yang paling baik terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,00% sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 5,51% dan pada tahun 2023 sebesar 3.47%.

2.1.2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per

kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel II.15. PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

NO.	WILAYAH	PDRB PER KAPITA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tanggamus	26,034,307	25.515.871	25.621.173	27.758.945	29 .596 .873
2	Provinsi Lampung	42.172.315	39.346.531	41.208.386	44.983.672	48.194.215

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami kenaikan, pada tahun 2019 PDRB perkapita tercatat sebesar Rp.26.034.307,- mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 25.515.871,-. yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19* Pada tahun 2021, PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus menglami kenaikan menjadi Rp.25.621.173,-, namun berhasil bangkit dengan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp.27.758.945,- dan tahun 2023 kembali mengalami perbaikan menjadi Rp.29.596.873 atau meningkat sebesar 6.20%.

Tabel II.16. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2023

NO	TAHUN	PDRB ADHB	PERTUMBUHAN
1	2016	21,241,150.00	9.52
2	2017	22,868,022.00	7.66
3	2018	24,535,780.00	7.29
4	2019	26,034,307.00	6.11
5	2020	25,515,871.00	-1.99
6	2021	25,621,173.00	0.41
7	2022	27,758,945.00	8.34
8	2023	29 ,596 ,873.00	6.20

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable

tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gini rasio mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu daerah. Pendapatan dikatakan merata jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gininya adalah sama dengan nol (Gini Ratio = 0). Rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1. Jika Gini rasio mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut adalah arti nilai dari besaran gini rasio:

- Gini Rasio < 0.3 : artinya ketimpangan rendah.
- 0.3 ≤ Gini Rasio ≤ 0.5 : artinya ketimpangan sedang.
- Gini Rasio > 0.5 : artinya ketimpangan tinggi.

Tabel II.17. Perkembangan Nilai Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

NO	WILAYAH	GINI RATIO				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pesawaran	0.310	0.288	0.299	0.251	0.287
2	Lampung Selatan	0.331	0.299	0.268	0.260	0.257
3	**Tanggamus**	**0.314**	**0.293**	**0.265**	**0.261**	**0.256**
4	Tulang Bawang Barat	0.316	0.272	0.282	0.261	0.274
5	Pringsewu	0.295	0.310	0.277	0.272	0.306
6	Mesuji	0.286	0.308	0.272	0.280	0.285
7	Way Kanan	0.299	0.311	0.283	0.283	0.281
8	Lampung Timur	0.302	0.315	0.284	0.283	0.315
9	Lampung Utara	0.309	0.301	0.275	0.284	0.300
10	Lampung Barat	0.296	0.295	0.281	0.284	0.274
11	Tulang Bawang	0.322	0.279	0.292	0.287	0.284
12	Pesisir Barat	0.330	0.281	0.322	0.290	0.274
13	Lampung Tengah	0.308	0.304	0.291	0.299	0.285
14	Metro	0.342	0.299	0.309	0.299	0.289
	Provinsi Lampung	**0.329**	**0.327**	**0.323**	**0.314**	**0.324**
15	Bandar Lampung	0.316	0.359	0.344	0.369	0.381
	Indonesia	**0.380**	**0.385**	**0.381**	**0.381**	**0.388**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Perkembangan gini rasio Kabupaten Tanggamus terus menunjukan perbaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Tanggamus sebesar 0,256 yang merupakan ketimpangan rendah, pencapaian ini merupakan terbaik ketiga di Provinsi Lampung yang rata-rata 0,324 dan juga lebih baik dari pencapaian Nasional 0,388.

2.1.2.1.6 Indeks Ketimpangan Regional

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah/regional, umumnya digunakan Indeks Ketimpangan Regional. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Besarnya Indeks Ketimpangan Regional antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 0, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam katagori rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah cenderung merata. Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam kategori tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah cenderung tidak merata. Tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masih termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel II.18. Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	WILAYAH	2019
1	Kabupaten Lampung Barat	0,45
2	Kabupaten Tanggamus	0,58
3	Kabupaten Lampung Selatan	0,04
4	Kabupaten Lampung Timur	0,50
5	Kabupaten Lampung Tengah	1,93
6	Kabupaten Lampung Utara	0,49
7	Kabupaten Way Kanan	0,34
8	Kabupaten Tulang Bawang	0,25
9	Kabupaten Pesawaran	0,15
10	Kabupaten Pringsewu	0,40
11	Kabupaten Mesuji	0,16
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,02
13	Kabupaten Pesisir Barat	0,02
14	Kota Bandar Lampung	0,53
15	Kota Metro	0,09

Sumber : BPS, Data Diolah Hasil Analisis Kajian Resha Moniyana dan Ahmad Dhea Pratama, Universitas Lampung, 2021

2.1.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis karena sudah ada sejak peradaban kuno, karena sifatnya sangat dinamis

dan memerlukan penanganan dengan pendekatan insklusif untuk mencapai kesamaan persepsi diantara *stakeholder*. Demikian juga persoalan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar di 20 kecamatan dengan tingkat kemiskinan bervariasi sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam upaya penangannya. Pendekatan yang bisa digunakan hendaknya bersifat *local strategy*s melalui pelibatan *local stakeholder* sehingga permasalahan kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 65.18 jiwa, angka tersebut menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 67.43 jiwa.

Tabel II.19. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Metro	14.49	14.31	15.32	13.68	12.80
2	Mesuji	14.94	14.72	15.24	13.88	13.71
3	Tulang Bawang Barat	21.14	20.29	23.03	20.72	20.32
4	Pesisir Barat	22.38	22.24	23.23	21.85	21.45
5	Lampung Barat	39.05	38.12	39.36	36.20	34.73
6	Pringsewu	40.55	40.12	41.04	38.18	37.60
7	Tulang Bawang	42.06	42.43	44.53	39.19	37.83
8	Way Kanan	58.72	58.41	59.89	54.28	51.26
9	Pesawaran	67.36	66.04	68.31	63.17	59.29
10	**Tanggamus**	**71.90**	**70.37**	**71.89**	**67.43**	**65.18**
11	Bandar Lampung	91.24	93.74	98.76	90.51	87.08
12	Lampung Utara	122.65	119.35	121.91	114.67	107.21
13	Lampung Selatan	144.44	143.33	145.85	136.21	133.67
14	Lampung Tengah	153.84	152.28	155.77	143.34	140.29
15	Lampung Timur	158.90	153.57	159.79	149.12	148.26
	Provinsi Lampung	**1,063.66**	**1,049.32**	**1,083.92**	**1,002.43**	**970.67**
	Indonesia	**24,780.00**	**27,550.00**	**26,500.00**	**26,160.00**	**25.900**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 10,98% angka tersebut terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2023 yang hanya 10,52%.

Gambar II.17. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus

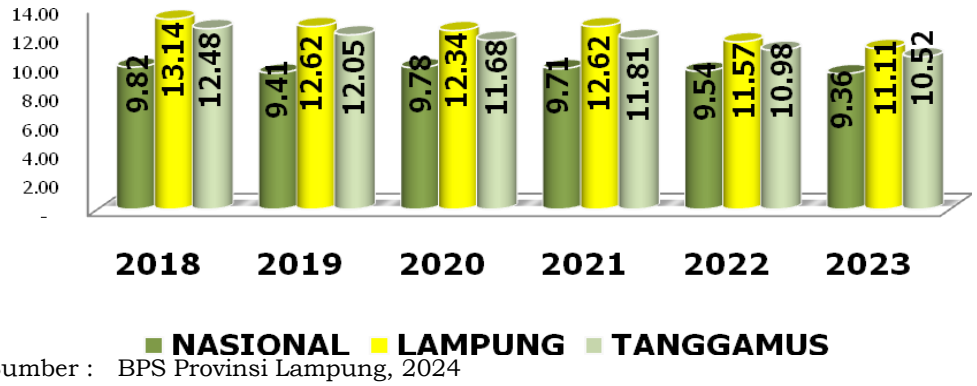

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Dengan tingkat kemiskinan 10,98% pada tahun 2022 maka saat ini Kabupaten Tanggamus berada pada peringkat kedelapan dari lima belas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Tabel II.20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mesuji	7.47	7.33	7.54	6.84	6.73
2	Tulang Bawang Barat	7.75	7.39	8.32	7.44	7.25
3	Metro	8.68	8.47	8.93	7.87	7.28
4	Bandar Lampung	8.71	8.81	9.11	8.21	7.77
5	Tulang Bawang	9.35	9.33	9.67	8.42	8.04
	Indonesia	**9.41**	**9.78**	**9.71**	**9.54**	**9.36**
6	Pringsewu	10.15	9.97	10.11	9.34	9.14
7	Lampung Tengah	12.03	11.82	11.99	10.96	10.65
8	**Tanggamus**	**12.05**	**11.68**	**11.81**	**10.98**	**10.52**
	Provinsi Lampung	**12.62**	**12.34**	**12.62**	**11.57**	**11.11**
9	Lampung Barat	12.92	12.52	12.82	11.71	11.71
10	Way Kanan	13.07	12.90	13.09	11.76	11.02
11	Lampung Selatan	14.31	14.08	14.19	13.14	12.79
12	Pesisir Barat	14.48	14.29	14.81	13.84	13.49

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)				
		2019	2020	2021	2022	2023
13	Pesawaran	15.19	14.76	15.11	13.85	12.89
14	Lampung Timur	15.24	14.62	15.08	13.98	13.80
15	Lampung Utara	19.90	19.30	19.63	18.41	17.17

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jikat tidak terjadi peningkatan pendapatan. Selama periode 2019 sampai dengan 2023, Garis Kemiskinan Kabupaten Tanggamus terus mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp.359.580,- per kapita per bulan menjadi Rp.463.925,- per kapita per bulan pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan belum mampu mengimbangi kenaikan harga pada saat garis kemiskinan mengalami kenaikan.

Gambar II.18. Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023 (Rupiah)

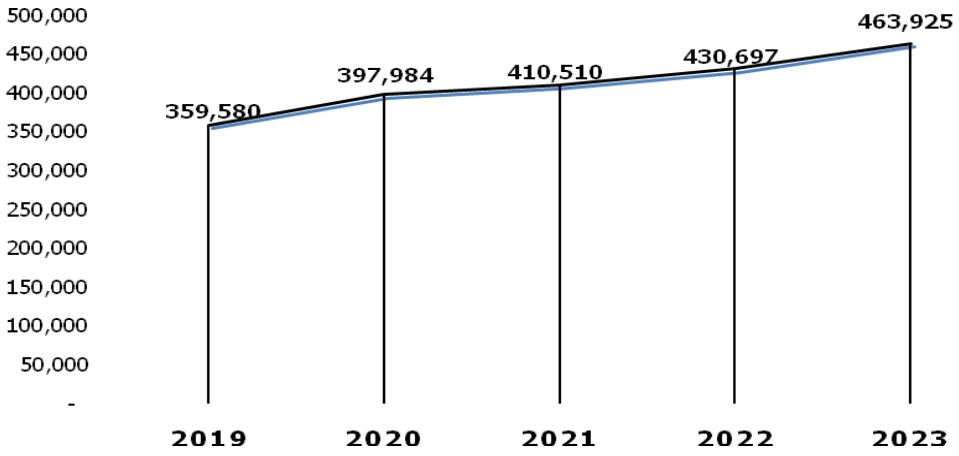

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah index kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan index keparahan kemiskinan (*distritutionally sensitive index*) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Indikator P1 mengukur kesenjangan (jarak) rata-rata antara pengeluaran masing-masing penduduk

miskin dan GK. Semakin tinggi P1 berarti semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 yang sama tetapi daerah A memiliki P1 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini menunjukkan bahwa walau persentase penduduk miskin dikedua daerah tersebut sama, penduduk miskin di daerah A secara rata-rata lebih miskin dibanding penduduk miskin di daerah B. Indikator P2 merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 berarti pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyebar dari nilai rata-ratanya. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 dan P1 yang sama tetapi daerah A memiliki P2 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini berarti persentase penduduk daerah miskin kedua daerah tersebut berarti sama dan secara rata-rata penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama miskinnya. Namun demikian tingkat kemiskinan penduduk miskin di daerah A lebih beragam dibanding daerah B. Dengan demikian P2 merupakan ukuran tingkat keparahan kemiskinan.

Tabel II.21. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

WILAYAH	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) (PERSEN)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tanggamus	1.81	2.36	1.24	1.36	1.26	1.42	1.21

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel II.22. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

WILAYAH	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) (PERSEN)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tanggamus	0.35	0.62	0.21	0.24	0.23	0.29	0.24

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengacu pada *Human Development Report* pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia di Kabupaten Tanggamus menunjukkan arah yang positif, selama lima tahun terakhir ini nilai IPM

Kabupaten Tanggamus terus mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada Tahun 2019 IPM Kabupaten Tanggamus mencapai 66.37 dan kemudian terus meningkat menjadi 67.86 pada tahun 2023 berdasarkan Usia Harapan Hidup hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Tanggamus masih lebih rendah, angka IPM Nasional pada tahun 2023 mencapai 74.39 sedangkan angka IPM Provinsi Lampung mencapai 71.15.

Gambar II.19. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2023

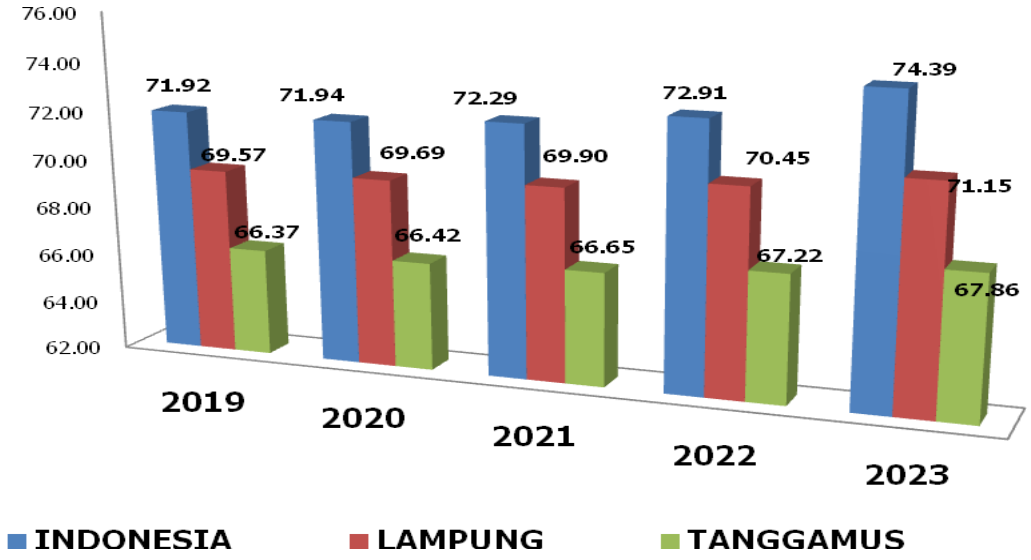

Sumber : BPS RI, 2024

Sebagaimana ditunjukkan oleh diagram diatas baik IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Tanggamus setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan status capaian pembangunan manusia, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2023 berada pada peringkat kesebelas dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang termasuk dalam kategori sedang (capaian 60 ≤ IPM < 70) yang tergabung dalam 10 kabupaten, sedangkan yang memiliki status pembangunan manusia berkategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) terdapat 5 Kabupaten/Kota yaitu adalah Kota Bandar Lampung (78,56), Kota Metro (78,36), Kabupaten Pringsewu (71,61), Kabupaten Lampung Tengah (71,60) dan Kabupaten Lampung Timur (71,21).

Diantara 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung yang tercatat memiliki nilai IPM tertinggi dengan nilai 78,56 sedangka yang terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan IPM sebesar 65,64.

Gambar II.20. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022-2023

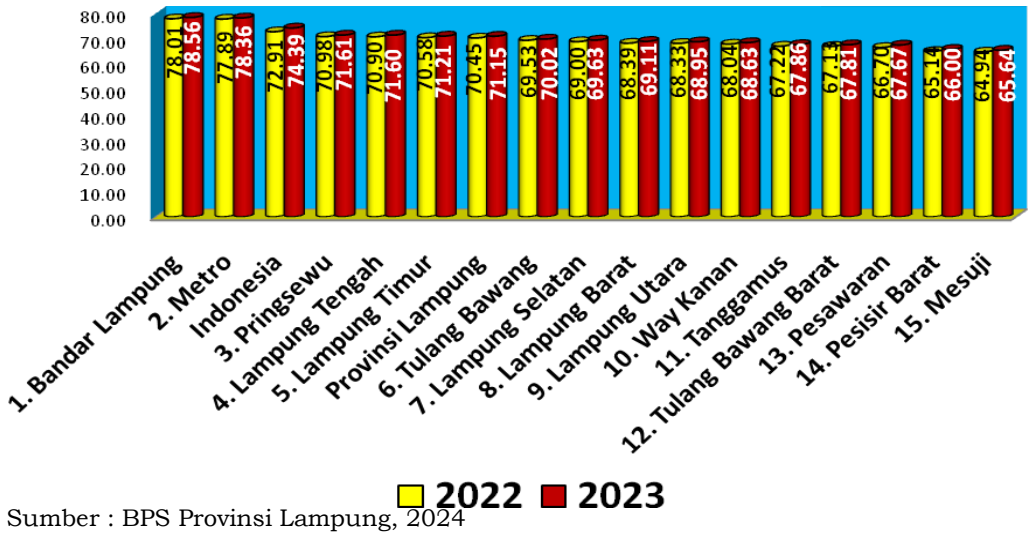

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pembangunan manusia yang terbentuk dari indikator-indikator pada tiga dimensi kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan, penghitungan dilakukan berdasarkan dua ukuran yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada dimensi kesehatan digunakan Angka Harapan hidup (AHH), adapun pada dimensi ekonomi, indikator yang digunakan adalah Pengeluaran Perkapita Penduduk.

Tabel II.23. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022 ke 2023

NO	WILAYAH	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA					PERTUMBUHAN 2022 KE 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Bandar Lampung	77.33	77.44	77.58	78.01	78.56	0.70
2	Metro	76.77	77.19	77.49	77.89	78.36	0.59
	Indonesia	**71.92**	**71.94**	**72.29**	**72.91**	**74.39**	**1.98**
3	Pringsewu	69.97	70.30	70.45	70.98	71.61	0.92
4	Lampung Tengah	70.04	70.16	70.23	70.80	71.60	1.11
5	Lampung Timur	69.34	69.37	69.66	70.58	71.21	0.88
	Provinsi Lampung	**69.57**	**69.69**	**69.90**	**70.45**	**71.15**	**0.98**
6	Tulang Bawang	68.23	68.52	68.73	69.53	70.02	0.69
7	Lampung Selatan	68.22	68.36	68.49	69.00	69.63	0.90

NO	WILAYAH	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA					PERTUMBUHAN 2022 KE 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
8	Lampung Barat	67.50	67.80	67.90	68.39	69.11	1.04
9	Lampung Utara	67.63	67.67	67.89	68.33	68.95	0.89
10	Way Kanan	67.19	67.44	67.57	68.04	68.63	0.85
11	**Tanggamus**	**66.37**	**66.42**	**66.65**	**67.22**	**67.86**	**0.94**
12	Tulang Bawang Barat	65.93	65.97	66.22	67.13	67.81	1.00
13	Pesawaran	65.75	65.79	66.14	66.70	67.67	1.43
14	Pesisir Barat	63.79	63.91	64.30	65.14	66.00	1.30
15	Mesuji	63.52	63.63	64.04	64.94	65.64	1.06

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Peningkatan IPM Kabupaten Tanggamus dari 2022 ke 2023 berhasil tumbuh sebesar 0,94% sama dengan pertumbuhan IPM Nasional yang juga tumbuh 1,98% hal tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Provinsi Lampung yang sebesar 0,98%.

2.1.2.1.9 Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus dari tahun 2019 ke tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, bila di tahun 2019 HLS Kabupaten Tanggamus masih 12,17 tahun maka pada tahun 2023 telah mencapai 12,31 tahun.

Dengan nilai HLS Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 12,31 tahun, hal ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Kabupaten Tanggamus baru mencapai tingkat 3 SLTA. Kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Lampung 12,77 tahun dan Nasional sebesar 13,15 tahun. Dengan demikian baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional harapan untuk bersekolah sudah sampai pada tingkat selesai SLTA.

Sebagaimana pula terlihat pada gambar, HLS Kabupaten Tanggamus semakin menyusul ketertinggalan dengan HLS Provinsi Lampung, hal ini menjadi indikasi perkembangan HLS Kabupaten Tanggamus yang meningkat lebih tinggi dari pada HLS Provinsi Lampung. Dalam periode ini memang HLS Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun sedangkan HLS Kabupaten Tanggamus meningkat 0,11 tahun sedangkan

HLS Nasional meningkat 0,02 tahun, hal ini dapat menjadi pacuan untuk terus meningkatkan HLS Kabupaten Tanggamus.

Gambar II.21. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

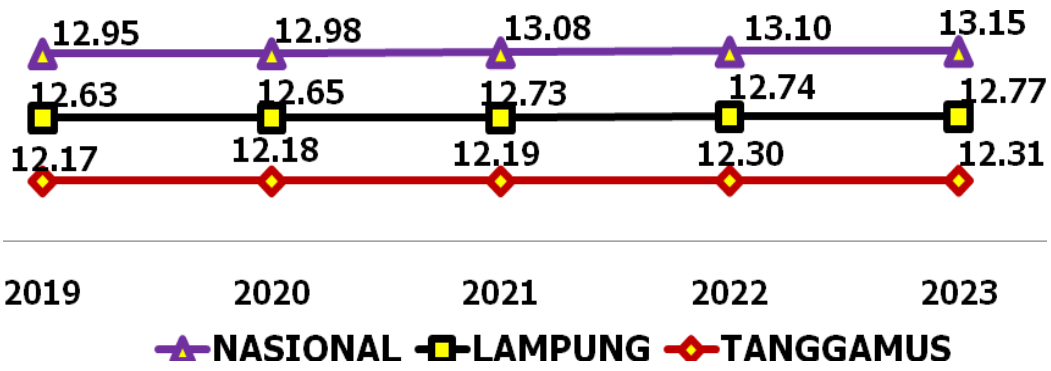

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.2.1.10 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk usia > 25 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus tahun 2023 baru mencapai 7,36 tahun meningkat dari tahun sebelumnya 7,35 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanggamus usia 25 tahun keatas masih cukup jauh dibawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun demikian kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Provinsi Lampung secara umum dimana angka RLS Provinsi Lampung baru mencapai 8,29 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, RLS di Kabupaten Tanggamus konstan menunjukkan peningkatan namun masih berada di bawah RLS Provinsi Lampung dan Nasional. Faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS dan belum terdapat akselerasi angka RLS yaitu masih terdapat siswa yang putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Gambar II.22. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

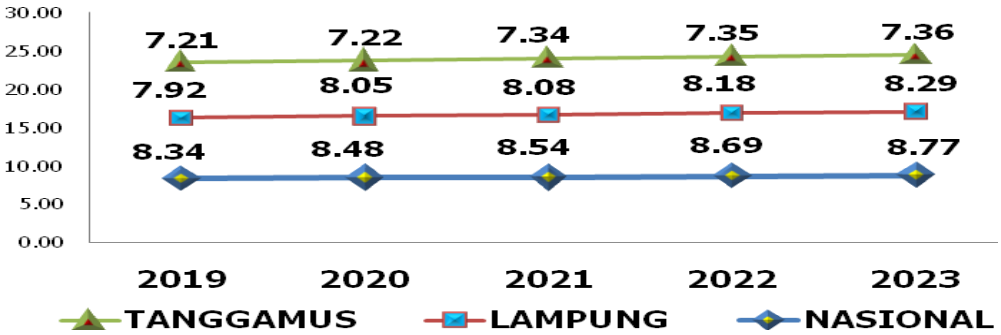

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.2.1.11 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2019-2023, capaian Angka Melek Huruf cukup mengalami penurunan. AMH pada tahun 2020 sebesar 96.84% dan tahun 2021 meningkat menjadi 97.00%. Di tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 96.62%, namun kembali meningkat menjadi 96,78% di tahun 2023.

Tabel II.24. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

WILAYAH	ANGKA MELEK HURUF (PERSEN)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tanggamus	97,00	96,84	97,00	96,62	96,78

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.12 Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, tingginya AHH mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 mencapai 69.23 tahun meningkat dibanding tahun 2022 yang mencapai 68,95 tahun, meskipun demikian capaian AHH ini masih dibawah capaian AHH Provinsi Lampung sebesar 71.25 tahun dan Nasional yang mencapai 73.93 tahun.

Gambar II.23. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

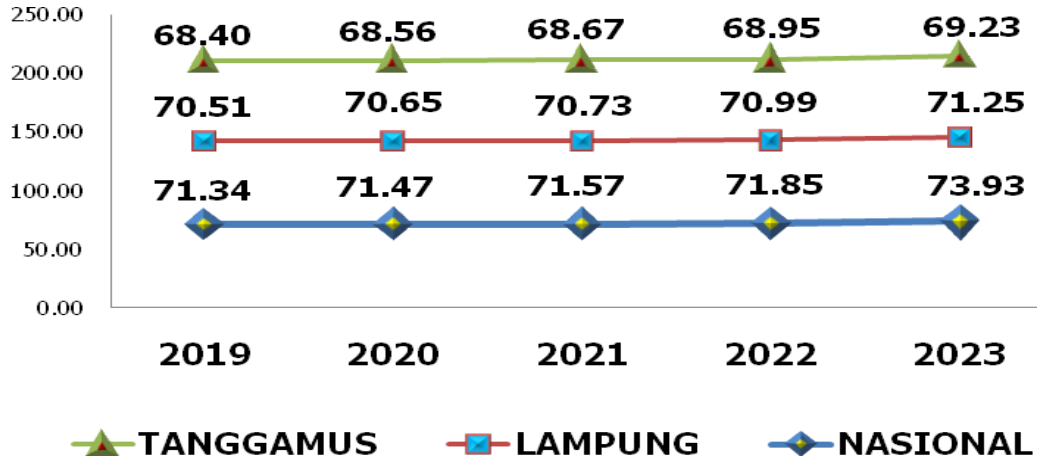

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.2.1.13 Balita Gizi Buruk

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dengan peningkatan status gizinya, terutama pada kelompok umur balita. Penentuan status gizi balita dibagi atas gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 terdapat 17,7% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan gizi kurang sebesar 13,8%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Tanggamus. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2023, pada tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tanggamus, namun di tahun 2020 dan 2021 ditemukan masing-masing 2 Kasus Gizi Buruk dan di tahun 2022 terdapat 4 Kasus Gizi Buruk sedangkan pada tahun 2023 1 Kasus, seluruh penderita gizi buruk tersebut telah mendapatkan penanganan 100% sesuai target SPM.

Tabel II.25. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

URAIAN	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Balita Gizi Buruk	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	1 Kasus
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	4 Kasus (100%)	1 Kasus (100%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus berjumlah 318.614 orang terdiri dari 209.241 laki-laki dan 109.373 perempuan sedangkan yang bukan angkata kerja sebanyak 143.732 orang yang terdiri dari 32.411 laki-laki dan 111.321 perempuan.

Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 96,30% dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 68,91%. Berdasarkan status pekerjaannya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Tanggamus 2023 mayoritas berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yakni sebanyak 76.409 orang. Jumlah pencari kerja di kabupaten tanggamus tahun 2023 ada sebanyak 3.616 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.649 orang. Mayoritas pencari kerja merupakan lulusan SMA/SMK/sederajat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 70,76% lebih rendah dari capaian TPAK Provinsi Lampung sebesar 70,04% dan lebih tinggi dari TPAK Nasional sebesar 70,76%, secara lebih lengkap, perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.24. Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

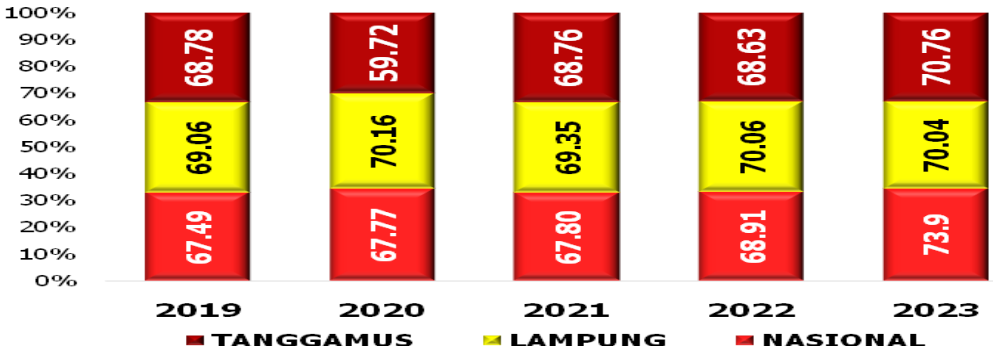

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.15 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu Penilaian terhadap Indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengggangguran Terbuka (TPT) yaitu merupakan ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sedangkan Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran.

TPT Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 3.35% mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang hanya 3,70%, angka tersebut juga lebih baik dari TPT Provinsi Lampung sebesar 4,23% dan TPT Nasional yang mencapai 4,28%.

Gambar II.25. Perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

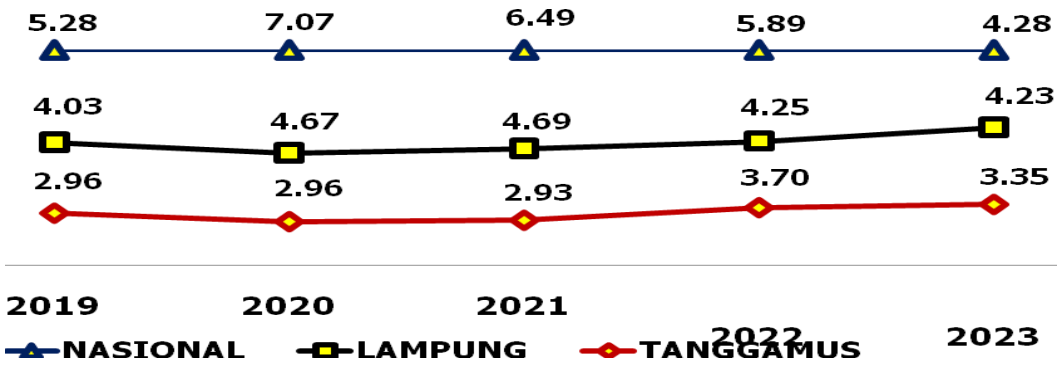

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.16 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan Hasil Survey pada Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus berada pada Indeks 83,44 dengan Kategori “B” mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan nilai 86,95.

Tabel II.26. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Tanggamus	73.47	77.14	75,27	70,93	86,43	86,95	83,44

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.17 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah dari tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 sedikit mengalami penuruan jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan sebagian besar realisasi PAD tidak tercapai.

Tabel II.27. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	4.65%	5.43%	5,76%	6.71%	6.27%	4,92%
2	Persentase Realisasi PAD	81.31%	78.14%	76.09%	76.91 %	48.01%	69,10%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.18 Opini BPK

Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu tahun 2016-2021 berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun di tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Tanggamus mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel II.28. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.2.1.19 Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kinerja Bidang Ketahanan Pangan difokuskan pada kegiatan peningkatan kesejahteraan petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk melihat capaian pembangunan Bidang Ketahanan Pangan maka disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus disusun untuk penyediaan data dan informasi tentang situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang akurat dan komprehensif yang dapat dinilai dari 3 aspek yaitu, 1) Ketersediaan Pangan; 2) Akses Terhadap Pangan; dan 3) Pemanfaatan Pangan (konsumsi pangan, kesehatan, dan gizi), sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan ketahanan pangan secara menyeluruh dan perencanaan program-program yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan dan gizi secara umum, kemiskinan dan stunting sehingga dapat dilakukan intervensi secara lebih tepat, efektif, dan efisien. Disamping itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini dapat dijadikan upaya deteksi dini (*Early Warning System*) untuk permasalahan kerawanan pangan dan gizi.

Dari 3 aspek selanjutnya dijabarkan menjadi 6 Indikator yaitu, 1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; 2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; 3) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; 4) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara; 5) Rasio jumlah ruamh tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa; 6) Rasio jumlah tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.

Pekon/Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Wilayah Rentan Pangan dengan klasifikasi :
    a) Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi;
    b) Prioritas 2 rentan pangan sedang; dan
    c) Priroritas 3 rentan pangan rendah.
2) Wilayah Tahan Pangan dengan klasifikasi :
    a) Prioritas 4 tahan pangan rendah;
    b) Prioritas 5 tahan pangan sedang; dan
    c) Prioritas 6 tahan pangan tinggi.

Berikut ini penjabaran Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 untuk masing-masing kecamatan dan desa sebagai berikut :

a. Desa Prioritas 1 sebanyak 1 desa di Pekon Penyandingan, Kecamatan Kelumbayan (0,33 %) .
b. Desa Prioritas 2 sebanyak 4 desa (1,32 %), tersebar di Pekon Napal, Pekon Umbar, Pekon Negeri Kelumbayan dan Pekon Paku, Kecamatan Kelumbayan (4 desa).
c. Desa Prioritas 3 sebanyak 9 desa (2,98 %), tersebar di Kecamatan Kota Agung Barat (Pekon Kandang Besi), Kecamatan Cukuh Balak (Pekon Suka Banjar dan Pekon Karang Buah), Kecamatan Kelumbayan (Pekon Unggak), Kecamatan Wonosobo (Pekon Sampang Turus), Kecamatan Pugung (Pekon Taman Sari, Pekon Sukamaju dan Pekon Tanjung Kemala), dan Gunung Alip (Pekon Banjar Negeri).
d. Desa Prioritas 4 sebanyak 82 desa (27,15 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (8 desa), Semaka (8 desa), Bandar Negeri Semuong (6 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (8 desa), Kota Agung Timur (1 desa), Kota Agung Barat (2 desa), Pulau Panggung (10 desa), Ulu Belu (5 desa), Air Naningan (4 desa), Talang Padang (6 desa), Sumberejo (1 desa), Gisting (2 desa), Gunung Alip (4 desa), Pugung (9 desa), Bulok (9 desa), Cukuh Balak (8 desa), Kelumbayan (2 desa), Limau (6 desa), Kelumbayan Barat (1 desa). vii
e. Desa Prioritas 5 sebanyak 204 desa (38,08 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (14 desa), Semaka (5 desa), Bandar Negeri semuong (5 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (3 desa), Kota Agung Timur (4 desa), Kota Agung Barat (11 desa), Pulau Panggung (6 desa), Ulu Belu (11 desa), Air Naningan (5 desa), Talang Padang (9 desa), Sumberejo (2 desa), Gisting (6 desa), Gunung Alip (6 desa), Pugung (6 desa), Bulok (1 desa), Cukuh Balak (8 desa), Limau (2 desa), Kelumbayan (4 desa).
f. Desa Prioritas 6 sebanyak 2 desa (0,66 %) tersebar di Kecamatan Pulau Panggung (1 desa) dan Pugung (1 desa).

Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan tingginya rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa, desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa, rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa, rendahnya rasio jumlah sarana

dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga dan Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dalam menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:

a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif / UMKM / padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah.
b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
c. Penyediaan tenaga kesehatan dan peralatan yang memadai.
d. Revitalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan.
e. Peningkatan Kestabilan dan Keseimbangan Penyediaan Pangan sehingga Meningkatkan Ketahanan Pangan .
f. Peningkatan Bantuan Sosial dan Daya Saing Ketenagakerjaan .
g. Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga Stabilitas sosial Masyarakat yang Religius dan Politik Daerah.
h. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan.
i. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata.
j. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
k. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan.
l. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri.
m. Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
n. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir.

o. Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

Gambar II.26. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel II.29. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program KOBER	10.5%	35,0 %	28,85%	47,07%	69,96%	45,5%
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program SPS	61%	2,0 %	2,70%	2,72%	69,20%	4,07%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 sebesar 45,5% mengalami

kenaikan dari tahun 2022 sebesar 69,96%, hal tersebut menandakan peningkatan minat masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menyekolahkan anak-anaknya sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2020). APK dapat mengambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang untuk jenjang SD mengalami penurunan dari 103,69% pada tahun 2022 menjadi 97,98% di tahun 2023. Meski demikian, APK jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Pada jenjang SMP/MTs, APK

meningkat sebesar 92,89 persen, dari 107,05% pada tahun 2022 menjadi 104,03% di tahun 2023. Sementara APK SMA/SMK/MA yang mengalami peningkatan dari 78,88% pada tahun 2022 menjadi 91,46% di tahun 2023.

Tabel II.30. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN		CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	113.63	108,80	107,80	105,93	104,69	103.69	97,93
2	SMP/MTs	91.67	92,95	90,09	92,78	92,89	107.05	104.03
3	SMA/SMK/MA	78.86	82,57	77,99	77,91	78,11	78.33	91,46

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

3) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah yang dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi.

Tabel II.31. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	102.1%	94,93 %	95,47%	73,23%	96,82%	98,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 98,00%, mengalami peningkatan dari 96,82% pada tahun 2022.

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat.

Tabel II.32. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	100.00	97,83	98,33	98,17	97,27	99,96	88,98

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	SMP/MTs	78.44	77,40	77,33	78,88	80,79	80.01	75,89
3	SMA/SMK/MA	53.87	57,94	57,17	56,96	56,34	55.72	61,61

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

APM Kabupaten Tanggamus untuk jenjang SD/MI pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2023 nilai APM SD/MI naik menjadi sebesar 88,98% dibanding tahun 2022 dengan APM sebesar 99,96. Peningkatan ini disinyalir karena daya tampung lembaga pendidikan di tingkat SD/MI yang lebih baik. Namun terjadi penurunan APM untuk jenjang SMP/MTs yakni dari 80,01% pada tahun 2022 menjadi 75,89% di tahun 2023. Demikian pula untuk jenjang SMA/SMK/MA yang mana di tahun 2022 APM sebesar 55,72% menjadi 61,61 di tahun 2023.

5) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah.

Tabel II.33. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	94.5%	98,58%	95,90%	94,41%	93,82%	99,96%
2	SMP	48.0%	88,00%	86,85%	87,08%	78,03%	91,53%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

6) Angka Putus Sekolah dan Mengulang

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yangputus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa padatingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dandinyatakan dalam persentase. Rumus APtS adalah jumlah siswa yang tidakmelajutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%. Siswa putus

sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang.

Tabel II.34. Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN PUTUS SEKOLAH					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	0,16%	0,12%	0,02%	0,17%	0,45%	0,00%
2	SMP	0,94%	1,00%	0,09%	0,49%	1,43%	0,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

Angka putus sekolah yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 terdapat pada jenjang SMP sebesar 1,43% sedangkan putus sekolah pada jenjang SD sebesar 0,45% dan tahun 2023 sebesar 0,00% pada semua tingkat pendidikan.

Tabel II.35. Angka Mengulang Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN MENGULANG					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	1,14%	0,96%	0,09%	0,30%	0,72%	0,22%
2	SMP	0,04%	0,33%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

Angka mengulang yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 terdapat pada jenjang SD sebesar 0,22% sedangkan pada jenjang SMP hanya sebesar 0,01%.

7) Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahan. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta pendidik. Pada tahun 2018 ruang kelas kondisi baik pada pendidikan dasar sebesar 52,54% dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 80,62%.

Tabel II.36. Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik	54%	66,86%	66,59%	33,35%	80,62%	86,37%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

8) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2018-2019, ketersedian jumlah ketersediaan sekolah SD tidak ada penambahan sekolah. Sejak tahun 2023, mengalami peningkatan hingga sebesar 66,49% di tahun 2023. Sedangkan jumlah ketersediaan sekolah untuk SMP, terjadi peningkatan di tahun 2018 dan 2019 menjadi 16%, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga di tahun 2023 Rasio Ketersediaan SMP mencapai 38,76%.

Tabel II.37. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	4%	4%	66,28%	66,66%	66,10%	66,49%
2	SMP	16%	16%	39,30%	39,67%	40,01%	38,76%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

9) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Khusus di Kabupaten Tanggamus, pemenuhan jumlah guru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat. Namun permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Tanggamus adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam

kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel II.38. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Guru/Murid	1:20	1:12	1:13	1:11	1:8	1:11
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:22	1:21	1:20	1:13	1:19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2019 Rasio Guru/Murid maupun Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus mengalami perubahan. Sejak tahun 2019 mengalami perbaikan sampai dengan tahun 2023 menjadi 1:11 dan 1:19.

10) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Tabel II.39. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Guru/Murid	1:20	1:11	1:12	1:11	1:8	1:11
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:29	1;28	1:29	1:32	1:27

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Rasio Guru/Murid sebesar 1:20, dan mengalami perbaikan sejak tahun 2019 sehingga menjadi 1:11 pada tahun 2023. Berbeda halnya dengan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2018 mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 dengan rasio 1:27.

2.1.3.1.2 Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah 1 tahun per 1.000 KH pada satu tahun tertentu, termasuk kematian neonatal. Pada Tahun 2023 terjadi 47 kasus kematian bayi termasuk neonatal, Yaitu

31 bayi laki-laki dan 16 bayi perempuan. Meningkat dibandingkan Tahun 2022 yaitu 36 kasus. Dari 10.090 sasaran bayi lahir hidup di dapat angka kematian bayi 4,7 per 1.000 KH.

Gambaran trend angka kematian bayi per 1.000 KH dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana grafik dibawah ini.

Gambar II.27. Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

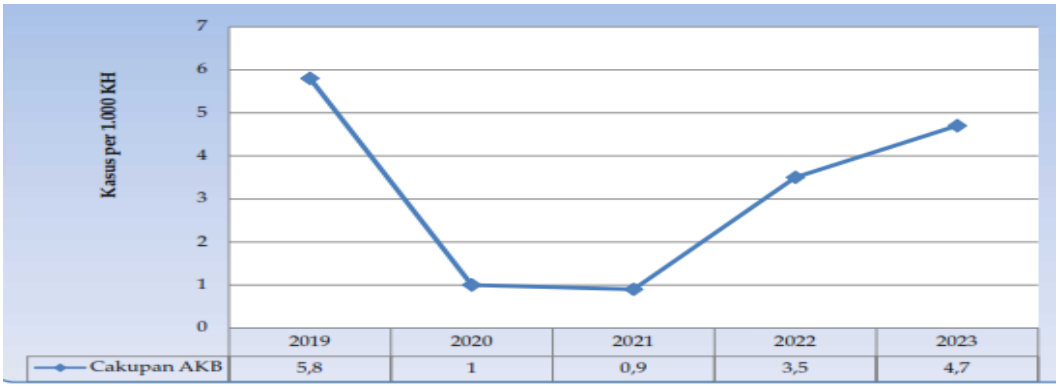

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2024

Beberapa penyebab kematian bayi adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O2) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (*neonatal*), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (*post neonatal*) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna dan diare.

Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKB di Kabupaten Tanggamus yaitu peningkatan pelayanan ANC (*Antenatal Care*/pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil), Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi, Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan, Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal dan pelaksanaan Program “Bumil Ceria” yang melibatkan lintas-sektor.

Bumil Ceria adalah layanan yang diberikan bukan hanya sebatas pelayanan ibu hamil sampai dengan melahirkan dengan selamat, akan tetapi diintegrasikan juga dengan upaya pencegahan *stunting* sejak ibu mengandung yang tumbuh kembangnya dipantau secara berkala, sehingga

dengan pelaksanaan program ini dapat mengoptimalkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan *prevelansi stunting*.

2) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita adalah jumlah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan dengan angka per 1.000 KH dalam satu tahun tertentu.

Pada Tahun 2023 terjadi 3kasus kematian balita yang terjadi pada 2 balita laki-laki dan 1 balita perempuan. Angka kematian balita sebesar 0,3 per1.000 KH. Gambaran angka kematian balita per 1.000 KH dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar II.28. Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

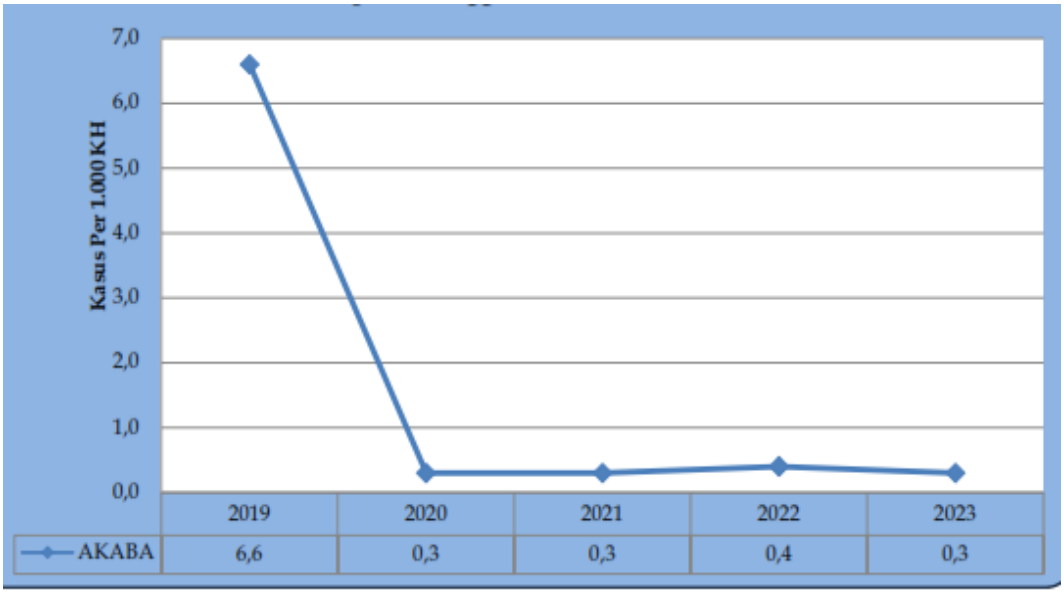

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2024

3) Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak akhir kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yaitu kematian yang disebabkan karena kehamilan nya atau penanganan nya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh. Biasanya kematian ibu di suatu wilayah digambarkan dengan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan pada perempuan. Dari hasil pencatatan dan pelaporan di wilayah Kabupaten Tanggamus, AKI telah menunjukkan penurunan dari

waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan kesehatan masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus.

Pada Tahun 2023 terjadi 9 kasus kematian ibu maternal yang masing-masing disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dan lain–lain. Melihat penyebab kematian ibu diatas, perlu peningkatan upaya promotif pencegahan perdarahan dan hipertensi pada ibu hamil, peningkatan kepatuhan minum tablet tambah darah (Fe), peningkatan kunjungan ibu bersalin dan ibu nifas, serta monitoring pada ibu pasca persalinan yang mempunyai penyakit penyulit yang memungkinkan resiko penyebab kematian ibu nifas.

Gambaran AKI antara Tahun 2019 sd 2023 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar II.29. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

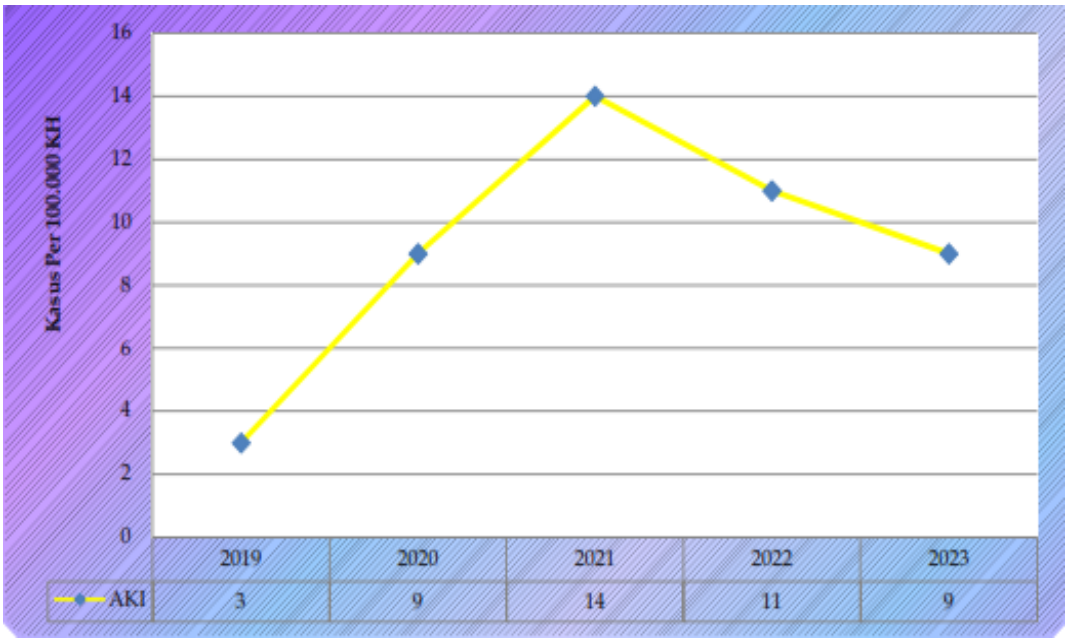

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2024

4) Cakupan P2M dan PTM

a) Tuberculosis

Salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah sangat serius di masyarakat sampai saat ini adalah tuberkulosis (TBC) atau yang lebih dikenal dengan TB Paru.TB Paru merupakan penyakit tropis yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.

Terduga Tuberkulosis adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk>2 minggu disertai dengan panas badan, selama tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus terdapat 12.344 orang terduga Tuberkulosis, dan 11.140 orang telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar atau cakupan 90,2%.

Jumlah seluruh penderita TB Paru sepanjang Tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus pada sebanyak 879 orang yang terdiri dari laki–laki sebanyak 579 kasus dan perempuan sebanyak 300 kasus. Kasus Tuberkulosis anak 0-14 tahun sebanyak 80 kasus.

Case Detection Rate (CDR) adalah merupakan persentase jumlah pasien TB (BTA+) yang diobati dan dilaporkan dibandingkan jumlah semua pasien TB(BTA+) yang diperkirakan ada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan perkiraan insiden tuberkulosis sebanyak 2.286 kasus, maka CDR di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2023 sebesar 38,5%.

Dari seluruh kasus Tuberkulosis yang terdaftar dan mendapat pengobatan, jumlah penderita yang sembuh sebanyak 216 orang dengan akan kesembuhan (*cure rate)* 34,0 % dan penderita yang melalukan pengobatan lengkap (*complete rate)* sebanyak 20,5 orang (23,3%). Sedangkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan mendapat pengobatan lengkap atau *Success rate* TB 421 orang (47,9%), sedangkan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis sebanyak18 jiwa (2,0%).

b) HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP).

Estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV sebanyak 14.231 orang, sebanyak 10.175 orang (71,5%) yang mendapat pelayanan standar meliputi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang HIV termasuk promosi kesehatan penggunaan alat pencegahan yang efektif (kondom, lubrikan (pelumas), alat suntik steril, dll); pelayanan pemeriksaan laboratorium berupa skrining (deteksi dini) HIV, dan pelayanan konfirmasi diagnosis rujukan ke layanan pengobatan Anti Retroviral (ARV).

Jumlah kasus HIV di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 berjumlah 19 kasus, sedangkan untuk jumlah kasus baru AIDS sebanyak 19 orang. Jumlah kematian akibat AIDS0 kasus.

c) Kusta

Pada Tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus ditemukan kasus baru yaitu 10 orang penderita kusta basah (Multi Basiler/MB). Penemuan kasus baru kusta termasuk sulit karena masih banyak penderita yang memilih bersembunyi atau disembunyikan oleh keluarga. Hal ini disebabkan adanya anggapan di masyarakat bahwa kusta adalah penyakit keturunan atau kutukan.

Sedangkan kasus lama kusta yang tercatat sebanyak 10 kasus, yang terdiri atas 7 laki-laki dan 3 perempuan. Seluruh kasus tersebut merupakan kusta basah (MB) 10 orang. Angka prevalensi kusta diKabupaten Tanggamus Tahun 2023 adalah 1,6 per 100.000 penduduk.

d) Demam Berdarah Dengue

Penyakit DBD di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh masih adanya daerah Endemis DBD, dan faktor mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi sehingga faktor penularan DBD akan semakin tinggi.Pada Tahun 2023 terjadi 131 kasus DBD, dimana 1 kasus diantaranya menyebabkan kematian. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kasus tertinggi DBD ada di Kecamatan Kota Agung 28 kasus, Kecamatan Sukaraja 13 kasus, Negara Batin 13 kasusdan Kecamatan Gisting 12 kasus. Kecamatan tersebut termasuk dalam kecamatan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi.

Angka kesakitan DBD dinyatakan dengan Incidence Rate (IR) per100.000 penduduk. Trend IR DBD antara Tahun 2019-2023

e) Malaria

Penyakit malaria di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh kondisi geografis dimana masih banyak tempat perindukan nyamuk penular malaria, disamping itu pencegahan dan penanggulangan malaria belum dilaksanakan secara komprehensif. Penanganan malaria hanya terbatas pada penemuan kasus secara pasif di Puskesmas dan pengobatan, belum melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit malaria tersebut diantaranya adalah intervensi terhadap tempat perindukan vektor dan perbaikan

perilaku masyarakat khususnya dalam pencegahan dan perilaku minum obat yang kurang terkontrol sehingga menyebabkan resistensi terhadap obat malaria.

Konfirmasi terhadap penderita dengan gejala klinis malaria (suspek) yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator pelaksanaan program malaria. Konfirmasi dilakukan secara mikroskopis dan rapid diagnost Test (RDT). Pada Tahun 2023 terdapat 1suspek yang dilakukan pemeriksaan sediaan darah tidak ada kasus positif malaria dan tidak ada kejadian kasus meninggal.

Kabupaten Tanggamus termasuk daerah endemis rendah dengan Angka kesakitan malaria (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk < 1.

f) Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan Edukasi.

Pada Tahun 2023 sasaran penderita hipertensi sebanyak 123.339 jiwa, pelayanan telah diberikan pada 113.283 jiwa (91,85%), sehingga masih ada kesenjangan. Belum tercapainya target pelayanan ini antara lain karena :

- Target/sasaran merupakan perkiraan/estimasi, belum ada sasaran riil penderita hipertensi.
- Belum terinventarisirnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Swasta/Klinik Swasta
- Tingkat kepatuhan Petugas dalam pencatatan dan pelaporan kurang.

Tabel II.40. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tb-Paru	725	822	577	795	11.140
2	HIV-AIDS	43	31	36	53	19
3	Kusta	-	4	12	8	10
4	DBD	257	167	124	212	131
5	Malaria	8	2	1	-	-
6	Hipertensi	33.894	24.220	42.295	75.605	113.283

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2024

5) Rasio Posyandu, Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang di lakukan melalui penimbangan balita.

Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor, dan kantor RW.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau semua sasaran.

Tabel II.41. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu	686	689	690	693	694	691
2	Jumlah Balita	54.742	53.966	44.445	43.043	49.950	39.997
3	Rasio Per 100 Balita	1.25	1,28	1,55	1,61	1,4	1,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

Rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 adalah 1,25 kemudian meningkat menjadi 1,28 pada tahun 2019. Rasio ini

terus meningkat sehingga pada tahun 2021 rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus menjadi 1 : 1,61. Pada tahun 2023, terjadi penurunan rasio Posyandu terhadap jumlah Balita dikarenakan meningkatnya jumlah balita yang cukup signifikan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Posyandu di Kabupaten Tanggamus.

b) Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Tabel II.42. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2018-2023 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	JumlahPuskesmas	23	24	24	24	24	26
2	Jumlah Klinik	18	16	17	17	21	27
3	Jumlah Pustu	54	54	54	54	54	53
4	Jumlah Penduduk	592.603	598,299	603.706	645.807	652.898	620.766
5	Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	1:25.765,3	1:24.929,1	1:25.154,4	1:26.908,6	1:27.204,1	1:25.111,46
6	Rasio Klinik per Jumlah Penduduk	1:32.922,4	1:37.393,7	1:35.512,1	1:30.752,7	1:31.090,4	1:22.991
7	Rasio Pustu per Jumlah Penduduk	1:10.974,1	1:11.079,6	1:11.179,7	1:11.959,4	1:12.318,8	1:11.712,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program kesehatan yang dilaksanakan puskesmas. Dengan demikian keberadaan puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar sudah tentu harus terpenuhi standar inputnya, standar proses diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh msyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu satu jenis fasilitas pelayanan tingkat pertama, penyelenggaraannya perlu penataan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tanggamus cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah Puskesmas dan Pustu. Berbeda halnya dengan rasio klinik terhadap jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel II.43. Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2023

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
I.	**Puskesmas Tidak Rawat Inap**	
	1.Puskesmas Wonosobo	Paripurna
	2. Puskesmas Sudimoro	Utama
	3. Puskesmas Kota Agung	Paripurna
	4. Puskesmas Pasar Simpang	Paripurna
	5. Puskesmas Negara Batin	Utama
	6. Puskesmas Kedaloman	Paripurna
	7. Puskesmas Sumberejo	Utama
	8. Puskesmas Martanda	Belum Terakreditasi
II.	**Puskesmas Rawat Inap**	
	1. Puskesmas Putihdoh	Utama
	2.Puskesmas Antabrak	Utama
	3. Puskesmas Talang Padang	Utama
	4. Puskesmas Gisting	Utama
	5. Puskesmas Ngarip	Paripurna
	6. Puskesmas Siring Betik	Utama
	7. Puskesmas Air Naningan	Paripurna
	8. Puskesmas Sukaraja	Utama
	9. Puskesmas Kelumbayan	Utama
	10. Puskesmas Kelumbayan Barat	Utama
	11. Puskesmas Bulok Sukamara	Paripurna
	12. Puskesmas Sumanda	Utama
	13. Puskesmas Rantau Tijang	Paripurna
	14. Puskesmas Pulau Panggung	Paripurna
	15. Puskesmas Margoyoso	Utama
	16. Puskesmas Sanggi	Paripurna
	17. Puskesmas Way Nipah	Paripurna
	18. Puskesmas Gunung Sari	Belum Terakreditasi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2023, terdapat 11 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Paripurna, 13 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Utama, dan 2 Puskesmas yang Belum Terakreditasi.

c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh

dibagi pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel II.44. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2018-2023 Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah Penduduk	592.603	598.299	603.706	645.807	652.898	662.542
7	Rasio per Jumlah Penduduk	1:296.301	1:299.149	1:301853	1:322.904	1:326.449	1 : 331.271

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

Kabupaten Tanggamus memiliki dua Rumah Sakit yang terdiri atas satu Rumah Sakit Pemerintah dan satu Rumah Sakit Swasta, angka Rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 1: 331.271 yang artinya satu Rumah Sakit melayani kurang lebih 331.271 jiwa, idealnya satu Rumah Sakit melayani 100.000 jiwa sehingga Kabupaten Tanggamus dengan penduduk sebesar 662.542 jiwa membutuhkan minimal 4-6 Rumah Sakit.

6) Rasio Dokter dan Tenaga Medis

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kabupaten Tanggamus belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk.

Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis yang tidak merata serta kualitas para dokter masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.45. Jumlah Tenaga Medis Dokter Sepesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter	83	80	75	91	97	106
2	Jumlah Penduduk	592.603	598.299	603.706	645.807	652.898	662.542
3	Rasio Per per Jumlah Penduduk	1:7139,8	1:7139,8	1:8049,4	1:7096,8	1:6730,9	1:6.250,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

Tenaga medis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga medis perlu terus menerus ditambahkan agar rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga medis. Keberadaan tenaga medis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel II.46. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	DOKTER SPESIALIS	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	2	2
2	Spesialis Kandungan	3	3	3	3	3	2
3	Spesialis Anak	2	2	1	1	1	1
4	Spesialis Bedah	1	1	1	1	1	2
5	Spesialis Anastesi	1	1	1	1	1	1
6	Specialis Radiologi	2	2	2	2	2	2
7	Specialis Orthopedi	1	1	1	0	0	0
8	Specialis Paru	1	1	1	1	1	1
9	Specialis Patologi klinik	0	1	1	1	1	1
10	Mata	0	0	0	0	1	1
11	Rehabilitasi Medik	0	0	0	1	1	1
12	THT KL	0	0	1	1	1	1

Sumber : RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel II.47. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2023 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TENAGA MEDIS	PER 100.000 PENDUDUK
1	Wonosobo	42,095	3	7.13
2	Semaka	40,277	2	4.97
3	Bandar Negeri Semuong	17,623	1	5.67
4	Kota Agung	48,077	39	81.12
5	Pematang Sawa	18,184	2	11.00
6	Kota Agung Timur	22,006	2	9.09
7	Kota Agung Barat	23,289	2	8.59
8	Pulau Panggung	41,105	5	12.16
9	Ulubelu	44,667	2	4.48
10	Air Naningan	31,853	4	12.56
11	Talang Padang	54,348	3	5.52
12	Sumberejo	36,767	3	8.16
13	Gisting	43,898	17	38.73
14	Gunung Alip	22,588	1	4.43
15	Pugung	67,487	4	5.93
16	Bulok	24,615	2	8.13
17	Cukuh Balak	25,336	2	7.89
18	Kelumbayan	12,477	3	24.04
19	Limau	22,092	3	13.58
20	Kelumbayan Barat	14,114	3	21.26
	JUMLAH	**652,898**	**103**	**15.78**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

7) Analisis Ketercukupan Fasilitas Kesehatan

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Berikut analisis ketercukupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2023

Tabel II.48. Ketercukupan Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Dokter Umum	1 : 2.500	1:8.479	Kurang
2	Dokter Spesialis	1 :16.000	1 : 32.645	Kurang
3	Rumah Sakit	>1	>1	Cukup
4	Puskesmas	1 : 16000	1:27.204	Kurang

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
5	Puskesmas Pembantu	1 : 1500	1:12.319	Kurang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

8) Prevalensi Balita Kurang Gizi *(underweight)*, Pendek *(stunting)*, Kurus *(wasting)* dan Gemuk

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 maka di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 terjadi penurunan Balita Kurang Gizi *(underweight)*, Pendek *(stunting),* Kurus *(wasting)* dan Gemuk tetapi angka masih cukup besar sehingga diperlukan kegiatan ***intervensi spesifik*** di bidang kesehatan yang hasilnya dapat dilihat dalam waktu relatif pendek dan kegiatan ***intervensi sensitif*** yang merupakan berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dalam mendukung penyelesaian masalah Balita Kurang Gizi *(underweight)*, Pendek *(stunting),* Kurus *(wasting)* dan Gemuk. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu melaksanakan Gerakan Bersama Atasi Pendek/*Stunting* Tanggamus (Gebrak Tanggamus) yang melibatkan seluruh sektor dalam mengatasi masalah tersebut.

Tabel II.49. Hasil Pemantauan Masalah Gizi Balita Tahun 2017-2023

TAHUN	WILAYAH	MASALAH GIZI BALITA				
		UNDERWEIGHT	*STUNTING*	*WASTING*	GEMUK	KATEGORI
2017	Tanggamus	19,20%	37,30%	6,80%	3,10%	Akut Kronis
2018	Tanggamus	15,50%	29,87%	2,40%	3,10%	Akut Kronis
2019	Tanggamus	2,13%	27,39%	1,29%	0,66%	Akut Kronis
2021	Tanggamus	14,20%	25,00%	5,70%	0,66%	Akut Kronis
2022	Tanggamus	16,70%	20,40%	7,80%	1,90%	Akut Kronis
2023	Tanggamus	3,56%	17,1%	2,2%	2%	Akut Kronis

Sumber : RISKESDAS, SSGBI, SSGI, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

SSGI merupakan sebuah riset yang dilakukan sebagai amanat yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk mempublikasikan data stunting per tahun yang merupakan salah satu bentuk pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting. Indikator dalam penentuan stunting yaitu TB/U atau PB/U.

Sedangkan EPPGBM merupakan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan menggambarkan tiap individu yang dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran balita di posyandu.

Hasil SSGI digunakan untuk pengambilan Kebijakan terkait stunting sedangkan hasil EPPGBM digunakan untuk intervensi stunting yang akan diberikan.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) dengan EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Berdasarkan data SSGI pada tahun 2023, prevalensi stunting masih tinggi yaitu 20,40% sedangkan berdasarkan EPPGBM, prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus sudah dibawah target penurunan stunting nasional yakni 3,31%.

Tabel II.50. Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2018-2023

NO	TAHUN LOKUS	JUMLAH BALITA	STATUS PENDEK + SANGAT PENDEK	PREVALANSI STUNTING
1	2018	53.892	2.089	4,87
2	2019	49.873	1.675	3,80
3	2020	43.430	2.019	5,18
4	2021	41.442	1.371	3,31
5	2022	37.945	1.128	3,00
6	2023	38.269	1.208	3,16

Sumber : Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

Strategi intervensi penurunan stunting yang telah dilakukan adalah :

- Pendataan cepat stunting di Pekon Lokus Stunting;
- Menjalin komitmen dan dukungan lintas program dan lintas sektor di tingkat kabupaten dan kecamatan ;
- Sosialisasi dan pelaksanaan 1.000 hari pertama kehidupan kepada lintas sektor dan masyarakat ;
- Program Jaminan Persalinan;
- Pelaksanaan Bulan Sayang Ibu dan Anak (BSIA);
- Pelaksanaan Inovasi Daerah penurunan stunting yang terintegrasi.

1.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

1) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum.

Tabel II.51. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

TAHUN	KONDISI JALAN (KM)				JUMLAH	JALAN KONDISI BAIK DAN SEDANG (KM)	PERSENTASE JALAN MANTAP (%)
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT			
2018	426.93	197.92	237.58	476.94	**1,339.37**	**624.85**	**46.65**
2019	381.91	271.22	160.48	525.76	**1,339.37**	**653.13**	**48.76**
2020	394.23	265.46	245.03	434.65	**1,339.37**	**659.69**	**49.25**
2021	412.75	251.67	315.63	359.31	**1,339.37**	**664.42**	**49.61**
2022	319.38	182.15	82.1	755.74	**1,339.37**	**501.53**	**37.45**
2023	293.40	212.04	108.02	725.91	**1,339.37**	**505.44**	**37.74**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten mengalami fluktuasi, persentase jalan mantap mengalami peningkatan dari 46,65% pada tahun 2018 menjadi 49,61% di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase jalan mantap yang menjadi 37,45% dan turun Kembali di tahun 2023 menjadi 37,74%, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan sebagai dampak dari *refocusing* anggaran akibat pandemi *Covid-19*, selain itu kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih sering terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelayakan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan total panjang jembatan Kabupaten.

Evaluasi terhadap 199 unit jembatan di Kabupaten Tanggamus, yang berkondisi baik pada tahun 2022 sebanyak 7 unit sedangkan yang rusak ringan dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin sebanyak 122 unit sehingga Persentase Jembatan Mantap sebesar 64,82%.

Tabel II.52. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	KONDISI JEMBATAN (UNIT)	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik dan Tanpa Kerusakan	59	9	9	7	7
2	Rusak Ringan, Hanya Memerlukan Pemelihaaraan Rutin	26	101	103	122	122
3	Kerusakan yang Memerlukan Pemantauan dan Pemeliharaan Berkala	47	12	12	26	26
4	Kerusakan yang Secara Struktur Memerlukan Tindakan Secepatnya	15	19	19	17	17
5	Kritis	7	3	3	14	14
6	Tidak Berfungsi atau Runtuh	1	11	9	13	13
	Jumlah	**155**	**155**	**155**	**199**	**199**
	Jembatan Mantap	**85**	**110**	**112**	**129**	**129**
	Persentase Jembatan Mantap	**54.84%**	**70.97%**	**72.26%**	**64.82%**	**64.82%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus,2024

2) Infrastruktur Irigasi

Pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dalam perkembangannya, kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan perawatan, perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda (*divert maintenance*), kerusakan karena ulah manusia dan bencana alam. Keterbatasan dana, fasilitas, petugas operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat juga berpotensi menjadi penyebab penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggungnya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air, tentunya kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi yang lebih mahal karena jaringan irigasi tersebut harus direhabilitasi.

Tabel II.53. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	KONDISI IRIGASI (M)	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	41,522.15	42,524.15	44,624.04	54,604.00	57,198.70	57,770.69
2	Sedang	49,453.42	49,941.42	48,510.38	39,690.00	37,694.10	38,071.04
3	Rusak	33,412.24	33,321.67	34,285.11	34,081.53	36,835.83	37,204.19

NO	KONDISI IRIGASI (M)	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ringan						
4	Rusak Berat	22,454.00	21,054.57	19,422.28	18,466.28	15,413.18	15,567.31
	Jumlah	**146,841.81**	**146,841.81**	**146,841.81**	**146,841.81**	**147,141.81**	**148,613.23**
	Irigasi Mantap	**90,975.57**	**92,465.57**	**93,134.42**	**94,294.00**	**94,892.80**	**95,841.73**
	Persentase Irigasi Mantap	**61.95%**	**62.97%**	**63.43%**	**64.21%**	**64.49%**	**64.49%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2024

Dari tabel di atas, terdata total panjang jaringan irigasi di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2023 sepanjang 148,613.23 meter. Pada tahun 2018, persentase irigasi mantap sebesar 61,59% terus mengalami peningkatan menjadi 64,49% pada tahun 2023. Namun demikian, meskipun terus mengalami peningkatan, irigasi dalam kondisi rusak ringan sampai berat masih cukup besar, yakni sepanjang 52.771,50 meter atau mencapai 35,51%.

1.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel II.54. Rumah Layak Huni Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	2019		2020		2021		2022		2023	
		UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%
1	Jumlah Rumah yang Ditangani	881	7,46	1.065	9.75	288	2,92	520	5,60	288	3,28

2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	10.922	92,53	9.857	90,24	9.569	97,07	8.767	94,40	8.479	96,71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 881 rumah yang ditangani. Persentase rumah yang tertangani terus mengalami trend yang meningkat pada Tahun 2020 dan mengalami penurunan sampai tahun 2023 ini telah mencapai 3,28% meskipun demikian dengan keterbatasan anggaran yang tersedia berdampak terhadap rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanggamus masih cukup banyak yang mencapai 96,71%.

Kegiatan penanganan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bentuk upaya untuk menekan dan mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan penanganan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Dalam aspek penyediaan sarana pemukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Tanggamus. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan pemukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama pada kawasan-kawasan pemukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar pemukiman khususnya kawasan pemukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar pemukiman yang ada di lingkungannya.

Tabel II.55. Perkembangan Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	56,2%	58,7%	60,0%	61,0%	61,5%
2	Rasio permukiman layak huni	76,7%	78,0%	78,5%	79,0%	79,7%
3	Persentase pemukiman yang tertata	74,0%	75,0%	75,5%	76,0%	76,5%
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	65,0%	67,0%	67,5%	68,0%	68,7%
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	72,1%	71,0%	70,2%	69,2%	69,9%
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	51,0%	50,5%	49,0%	48,0%	49,0%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2024

1.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen). Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah, bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Tabel II.56. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	85%	70%	80%	87%	88%	89%
2	Keberadaan Ancaman Terorisme dan Konflik SARA	0%	25%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2024

1.1.3.1.6 Sosial

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain yang ditangani dalam

urusan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kementerian Sosial telah mengganti sebutan bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

PPKS merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus hingga saat ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PPKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PPKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PPKS skala kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Tabel II.57. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	86	96,21	74,93	99,65	98,13
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	75	78	87,86	92,49	97,29

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan capaian kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Tanggamus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi diperlukan keterlibatan dan peranserta masyarakat secara umum mengingat kompleksnya permasalahan ini.

Tabel II.58. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	JENIS PPKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	7	0	0	0	0	Bidang Rehsos
2	Anak Telantar (AT)	67	300	466	420		Bidang Rehsos
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3	32	3	3	2	Bidang Rehsos
4	Anak Jalanan	23	0	0	0	0	Bidang Rehsos
5	Anak Dengan Kesabilitasan (ADK)	70	0	0	0	0	Bidang Rehsos
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan Salah	18	0	0	0	0	Bidang Rehsos

NO	JENIS PPKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	2023	
7	Anak yang Memerlukan kebutuhan khusus	10	0	0	0	0	Bidang Rehsos
8	Lanjut Usia Terlantar	1.903	1.806	1.792	1.650		Bidang Rehsos
9	Penyandang Disabilitas	2.086	744	1.528	1.380		Bidang Rehsos
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
11	Gelandangan	5	1	4	0	0	Bidang Rehsos
12	Pengemis	2	0	0	0	0	Bidang Rehsos
13	Pemulung	2	0	0	0	0	Bidang Rehsos
14	Kelompok Minoritas	1	0	0	0	0	Bidang Rehsos
15	Berkas warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	1	0	0	0	0	Bidang Rehsos
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
17	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	5	0	0	0	0	Bidang Rehsos
18	Korban Trafiking	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
19	Korban Tindak Kekerasan	10	0	0	0	0	Bidang Bansos
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	50	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
21	Korban Bencana alam	151	603	8	0		Bidang Bansos
22	Korban Bencana Sosial	7	69	76	0		Bidang Bansos
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
24	Fakir Miskin	81.325	82.675	82.675	82.217		Bidang Pengembangan
25	Komunitas Adat terpencil	0	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
26	Keluarga Bermasalah Sosial Pisikologis	60	100	60	60		Bidang Pemberdayaan
	Jumlah Jiwa	**85.806**	**86.330**	**86.612**	**85.730**		

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2024

1.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada

pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Laju pertumbuhan pembangunan ketenagakerjaan, merupakan bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta rasa percaya diri masyarakat melalui pendidikan dan latihan serta pembinaan tenaga kerja yang terprogram.

Tabel II.59. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pencari Kerja	4.758	4.007	3.031	3.649	3.616	3.711
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	95,50%	95,90%	59.72%	96,70%	97,50%	97,52%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100%	0%	0%	0%	0%
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 %	100%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanggamus selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebanyak 4.758 orang dan pada tahun 2019 mengalami penurunan

dan tahun 2020 sebanyak 4.007 orang (2019) dan 3.031 orang (2020). Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.649 orang dan tahun 2022 menjadi 3.616 orang. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2018 sebesar 95,50% dan terus meningkat hingga mencapai 97,52% pada tahun 2023. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 59,72%, hal ini merupakan dampak pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi serta besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020-2022 adalah 0%. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana terutama disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang memaksa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan refocusing APBD sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pelaksanaannya menjadi terhambat.

Tabel II.60. Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2022			2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	6	5	11	17	1	18
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	84	69	153	110	101	211
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	855	945	1.800	877	819	1.696
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK)	784	630	1.414	889	593	1.482
5	Diploma I, II/Akta I, II,III	13	25	38	23	26	49
6	Universitas	80	153	143	62	98	160
	JUMLAH	**1.822**	**1.827**	**3.649**	**1.978**	**1.638**	**3.616**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat tergambarkan bahwa para pencari kerja di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 didominasi oleh pencari kerja yang memiliki tingkat Pendidikan tertinggi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.696 orang atau 46,90%.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju

kesetaraan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi,dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang.

Tabel II.61. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	JUMLAH KASUS				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Terahadap Anak	23	22	33	38	42
2	Kekerasan Terahadap Perempuan	10	1	2	5	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus,2024

Tabel II.62. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	51.84%	53.63	55.45%	55.45%	56,58%
3	Nilai Kabupaten Layak Anak	-	-	563.95	736.15	740,82%
4	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56.97	56.80	56.39	56.54	56,54%
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.88	91.13	90.98	91.10	91,270%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani meningkat menjadi 100% pada tahun 2023. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah meningkat menjadi 56,58% pada tahun 2022. Nilai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2023 sebesar 740,82%. Sedangkan persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 serta nilai IPD dan IPG juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 56,54% dan 91,270%.

2.1.3.2.3 Pangan

Kecukupan pangan merupakan salah satu komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta kedaulatan suatu bangsa. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemenuhan hak atas pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pangan daerah merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang selalu meningkat dirasakan sangat perlu memperhatikan stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapatdikembangkan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.63. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR		CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	201.846	366.248	225.338	123.414	128.675	170.915
2	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	88.00%	82.30%	141.00%	157.61%	160.00%	157.61%
3	Pola Pangan Harapan (PPH)	83,50	84,40	85,20	86,40	83.90	91.10

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2024

Rasio ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai kemandirian pangan. Rasio ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan pangan utama (ton per tahun) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa). Dari tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama selalu meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 170.915. Peningkatan ini merupakan dampak dari dilaksanakannya Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi yang dimulai sejak tahun 2016. Sedangkan penurunan ketersediaan pangan utama sejak tahun 2020 disebabkan terjadinya pengurangan luas baku sawah berdasarkan data pengamatan segmen dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Terkait dengan persentase ketersediaan energi dan protein per Kapita pada tahun 2017 sebesar 85% dan terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2022 mencapai 160%. Demikian pula halnya dengan Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2018 Skor PPH di Kabupaten Tanggamus sebesar 83,50 dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 91.10 di tahun 2023.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Tabel II.64. Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase luas lahan bersertifikat	58%	62%	65%	66,5%	68,5%	69,11%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus ditahun 2017 sebesar 50% dan terus meningkat hingga mencapai 69,11% ditahun 2023.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009 yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihakdalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Selain IKLH, masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanggamus adalah masalah persampahan. Pemerintaah Kabupaten Tanggamus sebelumnya mengalami kesulitan dalam pengumpulan data timbulan dan komposisi sampah, pengurangan sampah di sumber dan penanganan oleh masyarakat. Hal ini tentuya mempengaruhi kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karena itu pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanggamus meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus Ramah Amanah Tangguh dan Unggul (SIPESTA RATU).

SIPESTA RATU merupakan Aplikasi yang dibangun untuk mengatasi permasalahan pengumpulan data sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu SIPESTA RATU juga bertujuan untuk mendapatkan

data sampah guna mengetahui persentase sampah terkelola yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan target dan strategi penanganan sampah kedepannya. Berikut data capaian pengurangan dan penanganan sampah dalam Aplikasi SIPESTA RATU.

Tabel II.65. Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	CAPAIAN		
		2021 (Ton/Tahun)	2022 (Ton/Tahun)	2023 (Ton/Tahun)
1	Timbulan Sampah	94.286,80	133.520,98	134.920,33
2	Sampah Terkelola	18.144,79	36.289,39	16.558,21
3	Sampah Termanfaatkan	5.558,93	16.380,38	24.220,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2024

Selain SIPESTA RATU, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga mengembangkan inovasi lain dalam rangka optimalisasi pengelolaan persampahan yakni Eco ENZYME. Eco ENZYME merupakan salah satu solusi pengolahan sampah organik menjadi produk yang sangat bermanfaat baik untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, air, udara dan tanah serta lahan pertanian dengan sistem pembuatan yang sangat mudah dan sederhana. 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik yang dapat menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan. Pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana, dengan Eco ENZYME, sebagian besar sampah dapat diolah dan mengurangi beban TPA.

Selain yang telah disebutkan di atas, capaian kinerja lingkungan hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.66. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerahkabupaten	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	55,27	62,50	63,76	64,27	62,06	64.75
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	60	50	53,33	57,92	51.54	53.75
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	0-50	0-50	83,11	84,22	86.78	86.97
7	Hasil Pengukuran Kualitas Tutupan Lahan .	30	30	53,37	34,42	34.42	42.57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Tabel II.67. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk	60.76%	63.50%	69.04%	70.03%	70.16%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	94.76%	97.01%	99.43%	99.00%	99.93%
3	Rasio pasangan berakte nikah	5.88%	9.58%	14.10%	17.16%	18,55%
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97.68%	99.88%	99.56%	98.84%	98.76%
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	264,710	277,241	289,734	309,423	323,614

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019, rasio penduduk berKTP per satuan penduduk di Kabupaten Tanggamus hanya mencapai 60.76%, rasio ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 70,16% pada tahun 2023.

Demikian pula halnya dengan rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah maupun cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang

setiap tahun mengalami trend positif (meningkat), sedangkan capaian untuk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah mencapai 98,76% dan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran mencapai 323.614.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Daerah Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengenai pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan. Karena desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa dan kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepadapihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran desa dan kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ditambah dengan pembangunan fisik yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel II.68. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayan masyarakat(LPM)	60%	65%	70%	85%	85%	87%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70%	78%	85%	90%	95%	100%
3	Persentase LSM aktif	70%	75%	78%	-	-	-
4	Persentase LPM Berprestasi	60%	78%	80%	-	-	-
5	Persentase PKK aktif	70%	75%	85%	90%	100%	100%
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayan masyarakat	65%	75%	78%	80%	80%	85%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum indikator terkait pemberdayaan masyarakat dan desa semakin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia, oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes seperti dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial yaitu pajak dan pendapatan asli desa tetapi juga manfaat ekonomi secara luas berupa lapangan kerja dan ekonomi berkelanjutan.

Tabel II.69. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUMDes MENURUT KATEGORI KEGIATAN USAHA					
		TOKO PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERBENGKELAN	SIMPAN PINJAM	HOME INDUSTRI	PARIWISATA	PENGELOLAAN SAMPAH	JUMLAH
1	Kota Agung	8					8
2	Talang Padang	5					5
3	Wonosobo	13					13
4	Pulau Panggung	3	1				4
5	Cukuh Balak						0
6	Pugung	19	1				20
7	Semaka	1	1				2
8	Sumberejo	3	1		1		5
9	Ulu Belu						0
10	Pematang Sawa	1					1
11	Kelumbayan				1		1
12	Kota Agung Barat	2					2
13	Kota Agung Timur	2					2
14	Gisting	2	1			2	5
15	Gunung Alip	2					2
16	Limau						0
17	Bandar Negeri Semuong			1			1
18	Air Naningan	2					2
19	Bulok	2					2
20	Kelumbayan Barat	2	1				3
	JUMLAH	**67**	**6**	**1**	**2**	**2**	**78**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2024

Disamping hal yang telah disebutkan di atas, keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel II.70. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pekon Sangat Tertinggal	25	37	4	0	0	0	0
2	Jumlah Pekon Tertinggal	173	174	53	24	6	3	0
3	Jumlah Pekon Berkembang	95	81	218	236	242	220	189
4	Jumlah Pekon Maju	6	7	24	39	51	76	108
5	Jumlah Pekon Mandiri	0	0	0	0	0	0	2
	Total Pekon	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**

Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 terdapat 25 desa/pekon sangat tertinggal namun kondisi tersebut terus mengalami perbaikan hingga tahun 2023 sudah tidak tersisa lagi pekon tertinggal, 189 pekon berkembang, telah memiliki 108 pekon maju dan sampai saat ini di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 2 pekon dengan status mandiri.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Tabel II.71. Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,5 %	2,4%	1,72%	1,15%	2,37%
2	Persentase akseptor KB MKJP	30,9 %	33.95%	34,26%	38,39%	18,88%
3	Persentase angka kelahiran pada remaja	32,09%	13,11%	0,0037%	0,0021%	0,0019%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunagan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.3.2.9 Perhubungan

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam Kabupaten Tanggamus, maka penyediaan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memperlancar arus barang, jasa dan orang.

Sistem transportasi haruslah dikembangkan dan dikelola secara terpadu untuk mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selain jalan dalam kondisi mantap, sarana dan prasarana perhubungan lainnya sangat berperan penting terhadap lancarnya mobilitas barang, penumpang dan jasa termasuk informasi antar kecamatan maupun antar daerah.

Tabel II.72. Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	6	9	9	9
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	4.30%	21.13%	74.20%	101,71%	102%
3	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1,450	1,570	1,730	1,800	1,900
4	Jumlah Kecelakaan Transportasi	232	70	89	75	73

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus dan Polres Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2023 jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 9 buah/lokasi yaitu 1). Pelabuhan Perikanan Badak, 2). Pelabuhan Perikanan Guring, 3). Pelabuhan Perikanan Karanganyar, 4). Pelabuhan Perikanan Kota Agung, 5). Pelabuhan Perikanan Penyandangan, 6). Pelabuhan Perikanan Putih Doh, 7). Pelabuhan Perikanan Tegineneng, 8). Landasan Pacu (*Runway*) di Balimbing, dan 9). Terminal Type C di Kota Agung.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan, pada tahun 2018 persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 73.00%, namun terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2019 menjadi 4,3%, hal ini disebabkan tidak beroperasinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di tahun 2019. Pada tahun 2020, persentase kepemilikan KIR

kembali meningkat menjadi 21,13% dan di tahun 2022 mencapai 101,71% dari Taman Kendaraan yang ditargetkan.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama tahun 2018 sebanyak 1.350 kemudian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2022 sebesar 1.800. Jumlah kejadian kecelakan transportasi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Kasus kejadian kecelakaana transportasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 232 kecelakaan dan yang terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 sebanyak 70 kejadian.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia.

Tabel II.73. Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	24%	26%	27%	28%	28%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	63%	66%	68%	70%	70%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Tanggamus memiliki trend positif. Pada tahun 2018 cakupan KIM hanya sebesr 63% dan meningkat menjadi 63% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 24%. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Cakupan Layanan Telekomunikasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa cakupan wilayah yang ter*coverage* oleh layanan telekomunikasi di Kabupaten Tanggamus semakin luas.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang biasa disingkat UMKM adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro kecil dan Menengah. UMKM aktif adalah UMKM yang melakukan kegiatan usaha secara rutin/kontinyu didukung dengan pengadministrasian dan manajemen usaha. Sasaran Revitalisasi Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi Aktif; dan Koperasi yang lebih besar.

Tabel II.74. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2020–2023

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023
1	Wonosobo	1	2	1	2
2	Semaka	3	4	3	5

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023
3	Bandar Negeri Semuong	2	3	1	1
4	Kota Agung	10	10	6	7
5	Pematang Sawa	1	3	3	4
6	Kota Agung Timur	9	11	7	10
7	Kota Agung Barat	3	3	4	4
8	Pulau Panggung	0	0	1	1
9	Ulu Belu	6	8	7	6
10	Air Naningan	3	6	4	6
11	Talang Padang	6	8	7	6
12	Sumberejo	8	9	4	6
13	Gisting	15	17	15	17
14	Gunung Alip	2	4	2	2
15	Pugung	0	1	1	1
16	Bulok	1	1	0	0
17	Cukuh Balak	2	2	1	3
18	Kelumbayan	0	0	0	2
19	Limau	1	5	4	5
20	Kelumbayan Barat	2	0	0	0
	JUMLAH	**75**	**97**	**71**	**88**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2024

Dari tabel di atas, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 mencapai 75 koperasi dan pada tahun 2023 hanya terdapat 88 koperasi.

Tabel II.75. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JENIS UMKM			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	Wonosobo	42	0	0	42
2	Semaka	382	0	0	382
3	Bandar Negeri Semuong	123	0	0	123
4	Kota Agung	598	0	0	598
5	Pematang Sawa	96	0	0	96
6	Kota Agung Timur	206	0	0	206
7	Kota Agung Barat	171	0	0	171
8	Pulau Panggung	995	0	0	995
9	Ulu Belu	619	0	0	619
10	Air Naningan	80	0	0	80
11	Talang Padang	403	0	0	403

NO	KECAMATAN	JENIS UMKM			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
12	Sumberejo	74	0	0	74
13	Gisting	194	0	0	194
14	Gunung Alip	115	0	0	115
15	Pugung	106	0	0	106
16	Bulok	59	0	0	59
17	Cukuh Balak	126	0	0	126
18	Kelumbayan	188	0	0	188
19	Limau	609	0	0	609
20	Kelumbayan Barat	57	0	0	57
		5.243	**0**	**0**	**5.243**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Tabel II.76. Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor PMDN	10	13	17	20	35
2	Jumlah Investor PMA	3	3	3	5	5
3	Nilai Investasi PMDN	5,719,142,560,182.00	5,696,702,632,992.00	10,568,993,266,988.00	15,060,486,707.00	293.947.850.404.00
4	Nilai Investasi PMA	3,448,616,492,782.00	3,945,758,789,401.30	3,889,381,740,131.00	45,279,620,435.00	95.893.971.346.00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah investor PMDN dan PMA pada tahun 2023 masing-masing sebanyak 20 dan 5 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.293.947.850.404.00 untuk PMDN dan Rp.95.893.971.346.00 untuk PMA.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

Tabel II.77. Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40%	42%	52%	52%	55%	60%
2	Cakupan pembinaan olahraga	78%	78%	80%	80%	83%	90%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2024

Data yang tersaji menggambarkan masih perlu dioptimalkannya kinerja dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tanggamus. Rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan masih kurang. Sedangkan dari segi cakupan pembinaan olahraga menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tanggamus sebesar 78% dan meningkat hingga 85% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa

jumlah cabang olahraga yang dibina di Kabupaten Tanggamus terhadap jumlah cabang olahraga yang terdaftar semakin banyak.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan membudayakan olahraga di kalangan masyarakat Kabupaten Tanggamus maka saat ini Kabupaten Tanggamus sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B yang berada di Kecamatan Kota Agung.

Gambar II.30. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.3.2.14 Statistik

Pengembangan statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel II.78. Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2024

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah

ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2018 s.d 2022 telah terpenuhi. Diharapkan keberadaan dua dokumen tersebut dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

2.1.3.2.15 Persandian

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan pada industri teknologi informasi mengklaim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

Tabel II.79. Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi

kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Tabel II.80. Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	-	-	-	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, peneitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Tabel II.81. Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	648	383	416	240	289	332
2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	330	1.188	226	561	31	47
3	Persentase pustakawan, tenaga teknis,dan penilai yang memiliki sertifikat	25%	25%	25%	25%	25%	25%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 mencapai 7.771 orang mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.879 orang hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menerapkan PPKM sehingga mengakibatkan jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.466 orang.

Demikian pula halnya dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun, jumlah koleksi judul buku perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan.

Setelah ditetapkannya Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.56/34/08/2020 dan sebagai Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor : 2675/1/PPM.00.00/III/2020 tentang Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka dalam rangka mendukung Program Gubernur Lampung, Kabupaten Tanggamus melaksanakan Program Literasi dan Program *Smart Village* yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2021 pada 5 (lima) pekon yaitu:

1. Perpustakaan Rumah Baca Berlian Pekon Kanoman Kecamatan Semaka;
2. Perpustakaan Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat;
3. Perpustakaan Pekon Suka Negeri Jaya Kecamatan Talangpadang;
4. Perpustakaan Jalosi Sanak Negeri Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan;
5. Perpustakaan Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting.

Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub system sosial dalam

sistem kemasyarakatan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perubahan paradigm perpustakaan berbasisi inklusi sosial adalah mentransformasikan fungsi-fungsi perpustakaan menjadi :

1. Koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tidak lagi menjadi koleksi yang usang dan jarang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat karena dalam proses pengadaan bahan pustaka tidak memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat yang dilayaninya, namun beralih menjadi wahana rujukan informasi untuk pencarian solusi permasalahan karena proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang mementingkan kebutuhan informasi pengguna dalam rumus pengadaanya.
2. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku-buku dalam rak-rak panjang karena perpustakaan hadir sebagai fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan.
3. Perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang sunyi karena jarang ada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan namun keberadaan perpustakaan sendiri sudahlah menjadi makerspace atau tempat masyarakat mengembangkan potensi diri (*makerspace*).
4. Perpustakaan berubah dari yang awalnya sebuah lembaga yang minim sentuhan teknologi informasi menjadi perpustakaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang berkedudukan jauh dari lokasi perpustakaan. Untuk bisa mengakses sumberdaya informasi yang ada diperpustakaan sudahlah bukan menjadi barang yang sulit karena perpustakaan bias melayani masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi perpustakaan dengan menggunakan internet sebagai media hubungnya.
5. Merubah paradigma pustakawan yang pasif menjadi perpustakaan aktif yang berperan sebagai agen informasi. Pustakawan dituntut untuk selalu bisa menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkannya (Konsep pustakawan bergerak). Pustakawan menjadi sosok sentral yang menjadi penentu berhasil ataupun tidaknya program ini. Ledakan informasi yang pesat menuntut pustakawan untuk

berkolaborasi atau bekerja tidak hanya dengan sesama pustakawan saja, melainkan menuntut pustakawan untuk bekerjasama dengan bidang profesi lain dalam mengelola informasi.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah melalui pengelolaan kearsipan secara baik dan efisien. Hal ini mengingat bahwa arsip sebagai sumber informasi otentik khususnya terkait dengan bukti kinerja pemerintah dalam melaksanaan pembangunan. Kinerja kearsipan ini terwakili oleh indikator persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukumdalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsup merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara.

Tabel II.82. Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	15%	20%	25%	30%	35%	37%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	10%	25%	30%	30%	35%	35%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa

pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang kelautan dan perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.83. Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	SUB SEKTOR PERIKANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA					PRODUKSI (TON)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Perikanan Tangkap**	**5,916**	**5,916**	**5,916**	**5,915**	**5,915**	**27,331.04**	**27,385.70**	**27,892.49**	**41,631.32**	**41,631.32**
1	Perikanan Laut	5,704	5,704	5,704	5,703	5,703	27,018.34	27,072.37	27,573.54	41,263.43	41,263.43
2	Perikanan Umum	212	212	212	212	212	312.70	313.33	318.95	367.89	367.89
II	**Perikanan Budidaya**	**2,805**	**2,805**	**2,805**	**2,808**	**2,696**	**4,982.96**	**4,982.98**	**4,799.52**	**4,740.63**	**4,196.50**
1	Tambak	202	202	202	205	93	2,356.90	2,356.90	2,401.59	2,314.02	1.900.00
2	Kolam	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,626.06	2,626.08	2,397.93	2,426.61	2.296.50

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebanyak 27.331,04 Ton menjadi 41.631,32 Ton, begitu juga dengan produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 telah mencapai 4.196,50 Ton.

Tabel II.84. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan bina kelompok nelayan	24%	26%	28%	27%	28%	28,5%
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	54%	57%	60%	62%	63%	65%
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	85	86%	87%	88%	88%	88,7%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian, namun demikian peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, dan keamanan.

Pariwisata menawarkan tempat istrihat, budaya, dan petualangan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.85. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisata	458.603	599.891	100.965	121.997	603.038	678.221
2	Jumlah Wisatawan Domestik	455.068	597.786	100.965	121.997	602.997	678.142
3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	3.535	2.105	-	-	41	79
4	Persentase PAD Sektor Pariwisata	0.006	0.006	0.003	0.003	0.008	0.24

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Tanggamus. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah Kabupaten Tanggamus, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Kunjungan wisata pada tahun 2018 sebanyak 458.603 orang dan terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi *Covid-19* dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat yang berimbas pada penurunan secara siginifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 100.965 orang. Namun di tahun 2021, kunjungan wisata sudah mulai kembali meningkat menjadi 121.997 orang dan mulai bangkit pada tahun 2022 menjadi 603.038 orang terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 678.221 orang. Demikian pula dengan PAD sektor pariwisata yang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah yang pada tahun 2023 hanya mencapai 0,024% hal tersebut dikarenakan obyek wisata yang langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya terdapat 3 obyek wisata yaitu Air Terjun Way Lalaan, Pantai Muara Indah dan Kiluan sedangkan obyek wisata yang lainnya dikelola oleh masyarakat secara pribadi dan adapula yang dikelola melalui Pokdarwis.

2.1.3.3.3 Partanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Ketersediaan pangan daerah merupakan salah satu perhatian pemerintah demi terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang cenderung terus meningkat, stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.86. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	2.37	1.03	-2.17	-2.04	1.60	0.45
2	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	57,50	57,31	55,87	57,30	57,00	58.40
3	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	60	65	65	68	68	88

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2024

Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 cenderung menurun, pada tahun 2018 pertumbuhan distribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 2,37% dan terus menurun hingga hanya mencapai -2,04% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan meningkatnya distribusi sektor lain terhadap PDRB, namun demikian, pertumbuhan distribusi sektor pertanian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,60% dan tahun 2023 menjadi 0,45%.

Pada tahun 2018 produktivitas padi sebesar 57,50 Ku/Ha dan mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2023 mencapai 58,40 Ku/Ha.

2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri atas sub urusan geologi, mineral dan batubara dan sub urusan energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan. Pembangunan bidang energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi danpeningkatan mutu serta pelayanannya. Begitu pula dengan pembangunan dan pengembangan energi kelistrikan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan sarana dan prasarana energi kelistrikan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Untuk tersedianya pelayanan kelistrikan sampai ke dusun-dusun di semua wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.87. Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	76,48	84,13	92,55	94,29	96,78	96,78
2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	89,75	95,60	95,65	96,65	97,50	97,50
3	Jumlah EBT yang Terbangun	0	271	0	180	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar 76,48% dan terus meningkat hingga mencapai angka 96,78% di tahun 2023. Persentase ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Demikian pula halnya dengan rasio ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat setiap tahun, pada tahun 2018 rasio daya listrik adalah 89,75% dan pada tahun 2023 rasionya meningkat menjadi 97,50%. Sedangkan pembangunan EBT terlaksana pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing sebanyak 271 dan 180 unit.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Majunya sistem perdagangan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, bidang ini diharapkan mampu bersaing, bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, berorientasi pasar global sehingga mampu bersaing baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, perdagangan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan pokok, dengan sistem distribusi yang efesien, efektif dan berkelanjutan, sehingga terbentuk harga yang wajar dan stabil, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku ekonomi lemah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Tabel II.88. Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	(1,263,315.89)	(1,362,647.04)	(1,348,589.05)	(1,327,556.95)	(1,414,050.00)
2	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)	(541,215.17)	(493,511.14)	(488,597.71)	(442,050.57)	(432,960.57)

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,952,881.98	11,030,427.90	11,614,319.16	12,980,346.88	14,222,222.00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tanggamus, 2024

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2019-2023, nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2019-2023 menunjukan nilai negatif sebesar Rp.-1,414,050.00 (PDRB ADHB) dan Rp.-432,960.57 (PDRB ADHK) yang berarti nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor.

2.1.3.3.6 Perindustrian

Pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi tidak terlepas dari peranan bidang industri, oleh sebab itu pembangunan bidang industri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya lapangan kerja baru, memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada di daerah serta mengembangkan potensi lokal.

Pembangunan bidang industri di Kabupaten Tanggamus diupayakan melalui pemberdayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia, di samping itu terus mengupayakan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan sektor ini bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu karena masih terbatasnya modal usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah maka perlu mengupayakan kemitraan, baik melalui BUMN maupun dengan bank penyandang dana serta antara produsen bahan baku dengan pelaku industri kecil dan menengah.

Tabel II.89. Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11,76%	12,50%	13,10%	14,21%	15,41%	18,75%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tanggamus, 2024

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah keseluruhan kelompok pengrajin. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebesar 11,76% dan terus meningkat hingga mencapai 18,75% pada tahun 2023.

2.1.3.3.7 Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi kedepan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.

Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Tabel II.90. Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Transmigran Swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	15 KK	5 KK	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di Kabupaten Tanggamus tidak pernah dilaksanakan transmigrasi secara swakarsa. Transmigrasi yang dilaksanakan adalah transmigrasi umum yang merupakan program dari pemerintah. Tingkat keikutsertaan transmigrasi di Kabupaten Tanggamus fluktuatif. Pada tahun 2016 masyarakat yang mengikuti program ini sebanyak 15 KK, pada tahun 2017 terdapat 5 KK yang mengikuti program transmigrasi sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2023 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi ini.

2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel II.91. Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD/RPD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, sedangkan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus juga telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah juga telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031. Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah Jumlah Program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 penjabaran mencapai persentase sebesar 100%. Demikian pula dengan penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100%.

2.1.3.4.2 Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Tabel II.92. Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	94,20	95,53	93,01	89,07	89,06	85,12
3	Persentase Realisasi Belanja Daerah	92,71	92,51	91,20	83,48	87,07	84,05
4	Persentase Realisasi Pembiayaan Daerah	99,60	98,91	104,56	29,29	90,46	101,59
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

Sejak tahun 2017-2021 Kabupaten Tanggamus telah memperoleh Opini BPK dengan predikat WTP lima kali berturut-turut dan tahun 2022 dan tahun 2023 mendapatkan WDP. Persentase Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebesar 94,20% menjadi 85,12% pada tahun 2023 begitu pula dengan Persentase Realisasi Belanja Daerah juga mengalami penurunan dari 92,71% pada tahun 2018 menjadi 84,05 pada tahun 2023. Sedangkan untuk Realisasi Pembiayaan Daerah mengalami fluktuatif dengan realisasi terrendah pada tahun 2021 yang hanya 29,29% hal tersebut dikarenakan Rencana Pinjaman Daerah melalui Program PEN pada tahun 2021 belum dapat terrealisasi dan baru terealisasi pada tahun 2022.

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran lansung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya

Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.93. Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	-	-	3,57 (B)	4,13 (A-)	3,06 (B-)
2	Nilai Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	5,92	7,40	8,49	8,05	8,05
3	Nilai Profesionalitas ASN	-	67,50	52,28	54,23	54,23
4	Nilai Merit System	-	-	136,50	173,5	173,5

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2024

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun *corporate*. Hal-hal yang menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 mendapatkan nilai 60,94 dengan Kategori Sangat Inovatif yang mengantarkan posisi Kabupaten Tanggamus berada peringkat 35 dari 415 Kabupaten se-Indonesia.

Terkait lndeks Daya Saing Daerah (IDSD), berdasarkan Pemetaan lndeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023, Kabupaten Tanggamus mendapatkan skor 2,90, skor tersebut meningkat dari tahun 2020, 2021 dan 2022 yang masing-masing sebesar 1,85055, 2,429 dan 2,53 meskipun demikian skor tersebut masih dibawah skor Provinsi Lampung yang telah mencapai 3,36 dan Nasional 3,44. Penilaian IDSD ini terdiri dari 4 aspek dan 12 pilar, yakni Aspek Lingkungan Pendukung dengan 4 pilar, Aspek

SDM dengan 2 pilar, Aspek Pasar dengan 4 pilar dan Aspek Ekosistem Inovasi dengan 2 pilar.

Tabel II.94. Rincian Aspek Penilaian lndeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	**Aspek Lingkungan Pendukung**	
	Pilar 1 Institusi	4,02
	Pilar 2 Infrastruktur	2,33
	Pilar 3 Adopsi TIK	3,81
	Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro	2,72
2	**Aspek SDM**	
	Pilar 5 Kesehatan	3,76
	Pilar 6 Keterampilan	3,08
	Pilar 7 Pasar Produk	2,69
	Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja	3,04
3	**Aspek Pasar**	
	Pilar 9 Sistem Keuangan	1,42
	Pilar 10 Ukuran Pasar	4,16
4	**Aspek Ekosistem Inovasi**	
	Pilar 11 Dinamisme Bisnis	2,73
	Pilar 12 Kapabilitas Inovasi	0,99
	Skor Indeks Daya Saing Daerah	**2,90**
	Predikat	**SEDANG**

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Selain IID dan IDSD, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. Hasil penilaian dikelompokan dalam 3 kategori yaitu :

- Kategori A : Baik
- Kategori B : Perlu Perbaikan
- Kategori C : Sangat perlu Perbaikan

Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.95. Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	TAHUN	IPKD	KATEGORI	KLASTER
1	2018	72,9389	Baik	Sedang
2	2019	67,8997	Baik	Sedang
3	2020	77,2524	Baik	Sedang
4	2021	48,3465	Sangat Perlu Perbaikan	Sedang
5	2022	64,6	Perlu Perbaikan	Sedang
6	2023	Masih proses perhitungan Gubernur	-	-

Sumber : Aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2022, nilai IPKD mengalami kenaikan dari 48,3465 di tahun 2021 menjadi 64,6 pada tahun 2022, dengan Kategori Perlu Perbaikan dan pada tahun 2023 masih proses perhitungan oleh Gubernur Lampung.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota, sampai dengan dokumen ini disusun Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023 belum diterima oleh Kabupaten Tanggamus.

Nilai IPKD untuk tahun 2023 berdasarkan nilai yang terdapat pada aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id Kabupaten Tanggamus mendapatkan nilai 64,6 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Prencanaan dan Penganggaran sebesar 4,721.
2. Dimensi 2 : Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD sebesar 19,31.
3. Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14.741.
4. Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran sebesar 15.
5. Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah sebesar 0,822.
6. Sedangkan untuk Dimensi 6 : Opini BPK sebesaar 10,005.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan IPKD dan IID antara lain yaitu :

1) Penyusunan dokumen penganggaran harus benar-benar mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;

2) Memastikan belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan anggaran untuk mendukung program prioritas;
3) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang akuntabel dan keterbukaan publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4) Mengotimalkan penyerapan anggaran dengan memaksimalkan peran tim percepatan penyerapan anggaran dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa;
5) Menjaga kapasitas fiskal daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
6) Mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan pembinaan dan pendampingan dari APIP, BPKP dan BPK;
7) Melaksanakan pendampingan kepada Peranglat Daerah dalam penyusunan inovasi daerah;
8) Melaksanakan program satu inovasi satu pekon.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang disingkat dengan Bappelitbang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 66 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

(1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.

(2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di brdang penelitian dan pengembangan daerah.

serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Kabupaten Tanggamus saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanggamus. Implikasi dari hal gtersebut maka mulai 4 Januari 2023 Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, dan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat dengan Bapperida.

Gambar II.31. Transformasi Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

Salah satu fokus utama yang dilaksanakan oleh Bapperida adalah mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Terkait dengan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk Kabupaten Tanggamus saat belum menyusun dan akan disusun pada periode RPJMD berikutnya termasuk juga dengan Rencana Prioritas Penelitian (RPP).
Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan Riset serta Pengendali Mutu Riset dan Pelaksana Riset untuk Kabupaten Tanggamus saat ini belum dibentuk.

Untuk jumlah SDM Peneliti berupa jabatan fungsional penelitian, saat ini di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 1 orang peneliti sedangkan untuk jabatan fungsional perencana berjumlah 12 orang.

Untuk Indikator Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (ITKPD), Kabupaten Tanggamus belum melakukan pengukuran dan akan mulai dilaksanakan pada tahun mendatang.

2.1.3.4.5 Pengawasan

Dalam upaya menuju terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kinerja pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.96. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Inspektorat dan BPK, Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	TAHUN	TEMUAN	STATUS		
			S	DP	B
I.	**APIP INSPEKTORAT**				
1	2017	614	539	53	22
2	2018	583	481	41	61
3	2019	711	524	34	153
4	2020	788	369	23	396
5	2021	1,198	674	17	507
6	2022	634	377	34	223
7	2023	1437	494	1	942
	JUMLAH I	**5,965**	**3,458**	**203**	**2,304**
II	**BPK**				
1	2017	46	45	1	-
2	2018	64	52	12	-
3	2019	58	44	14	-
4	2020	17	11	6	-
5	2021	84	23	61	-
6	2022	55	11	43	1
7	2023	1045	784	258	-
	JUMLAH II	**1,369**	**970**	**395**	**1**
	TOTAL	**7,334**	**4,428**	**598**	**1,305**

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel II.97. Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Inspektorat	96.42%	89.54%	78.48%	49.75%	57.68%	64.83%	85.00%
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.18%	70,85%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase tindak lanjut temuan APIP Inspektorat selama tahun 2017-2023 mengalami fluktuasi, tindak lanjut yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 49,75%, sedangkan tindak lanjut temuan tertinggi dilakukan pada tahun 2017 sebesar 96,42%. Sedangkan untuk persentase tindak lanjut temuan BPK selama tahun

2017-2023 tercatat telah ditindaklanjuti 100% kecuali di tahun 2022 yang baru mencapai 98,18% dan tahun 2023 sebesar 70,85% yang sisanya masih dalam proses tindak lanjut.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisai tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) merupakan salah satu instrumen pengawasan di Daerah, berikut disajikan data formasi Auditor dan PPUPD di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.98. Analisis Kebutuhan Auditor dan PPUPD Kabupaten Tanggamus

NO	JABATAN	JUMLAH SAAT INI	KEBUTUHAN HASIL ANALISA BEBAN KERJA	KEKURANGAN
I	**AUDITOR**			
1	Utama			-
2	Madya	2	7	5
3	Muda	9	15	6
4	Pertama	1	30	29
5	Pelaksana Lanjutan	1	1	-
	JUMLAH I	**13**	**53**	**40**
II	**PPUPD**			
1	Utama			-
2	Madya	15	26	11
3	Muda	27	30	3
4	Pertama	-	26	26
	JUMLAH II	**42**	**82**	**40**
	TOTAL	**55**	**135**	**80**

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa saat ini terdapat 55 jabatan fungsional yang sudah terisi terdiri dari 13 orang auditor dan 42 orang PPUPD, berdasarkan hasil analisis beban kerja, masih dibutuhkan sejumlah 40 orang auditor dan 40 orang PPUPD.

2.1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat Dewan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.99. Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten TanggamusTahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana KerjaTahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi Program- Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari dimensi ekonomi, capaian pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dari pada capaian dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar Rp.9.557.000,- meningkat menjadi Rp.10.038.000,- pada tahun 2023.

Gambar II.32. Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

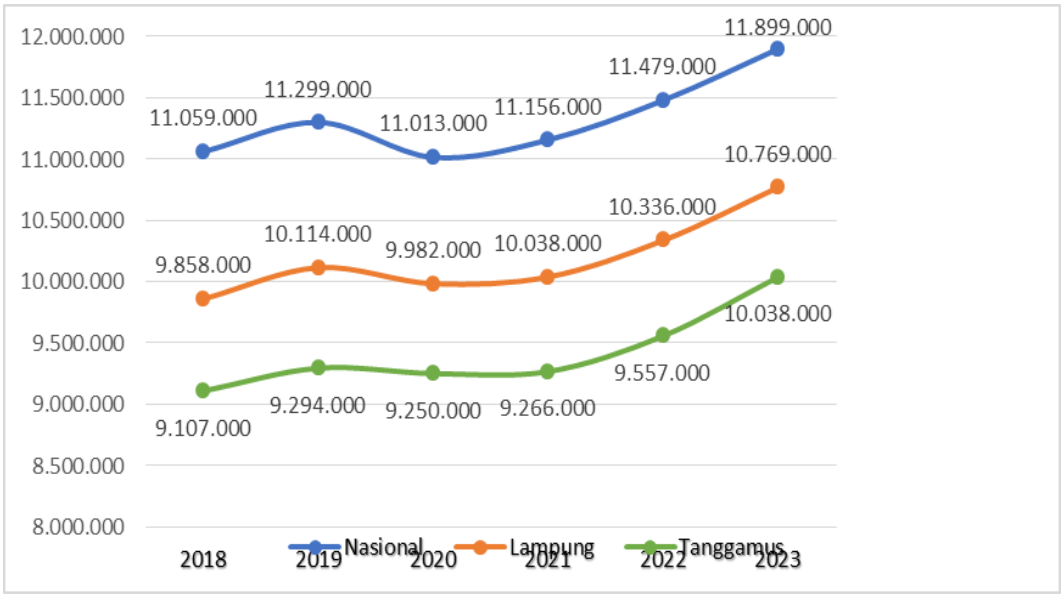

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat pengeluaran per kapita yang merupakan representasi dimensi standar hidup layak senantiasa mengalami tren peningkatan, pada tahun 2018 pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus mencapai Rp.9.107.000,- dan terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi sebesar Rp.10.038.000,- meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.9.250.000,- akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat. Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi nilai tersebut masih dibawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional**.**

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar *(term of trade)* antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP>100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP=100, berarti petani mengalami **impas/breakeven**. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

- NTP<100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel II.100. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	KECAMATAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cukuh Balak	195.87	165.74	46,83	64,10	91.80	104.83
2	Pugung	76.99	64.23	71,17	73,49	110.07	115.72
3	Talang Padang	181.57	174.03	77,09	78,95	106.04	113.25
4	Pulau Panggung	122.00	146.62	81,28	81,77	93.13	104.95
5	Kota Agung	221.26	204.41	39,50	78,95	100.93	109.80
6	Wonosobo	144.50	153.30	93,24	95,49	104.72	111.66
7	Kelumbayan	297.54	189.99	54,58	59,95	45.08	110.44
8	Sumberejo	200.77	181.71	37,72	75,57	103.63	111.36
9	Ulu Belu	413.17	303.41	32,62	80,97	107.92	112.72
10	Pematang Sawa	115.44	102.01	41,52	68,38	89.16	112.12
11	Semaka	53.89	60.25	95,65	95,98	99.25	104.02
12	Gisting	361.05	403.58	66,23	129,53	103.63	110.11
13	Kota Agung Timur	105.78	92.60	178,75	135,14	112.26	110.11
14	Kota Agung Barat	102.84	124.48	123,45	116,73	101.77	104.56
15	Air Naningan	698.23	442.22	23,77	89,69	102.24	109.68
16	Limau	555.50	404.24	17,00	80,97	46.30	114.78
17	Gunung Alip	120.80	103.30	125,51	131,69	114.26	113.38
18	Bandar Negeri Semong	120.16	181.02	69,06	73,86	90.14	109.65
19	Bulok	95.73	124.25	119,01	119,20	113.61	114.29
20	Kelumbayan Barat	496.99	275.97	47,57	81,63	88.70	114.20
	Jumlah Rata-Rata	**147.14**	**140.10**	**71,09**	**88,03**	**101.20**	**110.46**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai nilai yang lebih besar dari 100 (surplus). Namun pada tahun 2020, NTP

mengalami penurunan menjadi 71,09 (defisit), hal ini disebabkan adanya pandemi *Covid-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mempunyai dampak pada sektor ekonomi. Pada tahun 2021, nilai NTP kembali meningkat walaupun masih bernilai dibawah 100 yaitu 88,03. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 101,20 dan tahun 2023 sebesar 110,46.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 49 Pekon masuk dalam prioritas 1 (16.23 %), 24 Pekon prioritas 2 (7.95 %), 61 Pekon prioritas 3 (20.20 %), 81 Pekon prioritas 4 (28.82 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 43 Pekon prioritas 6 (14.24 %). Kecamatan yang memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Ulu Belu, Air Naningan, Pematang Sawa, Wonosobo, Semaka, Kotaagung Pusat, Gisting, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cuku Balak dan kecamatan lain yaitu sebanyak 134 Pekon.

Tabel II.101. Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2023

NO	PRIORITAS	RASIO LAHAN SAWAH	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	<=0.0804	49	16.23 %
2	2	>0.0804 – 0.1117	24	7.95 %
3	3	>0.1117 – 0.1721	61	20.20 %
4	4	>0.1117 – 0.1721	81	28.82 %

NO	PRIORITAS	RASIO LAHAN SAWAH	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
5	5	>0.2846 – 0.4573	44	14.57 %
6	6	>0.4573	43	14.24 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.4.2.2 Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 44 Pekon masuk dalam prioritas 1 (14.57 %), 42 Pekon prioritas 2 (13.91 %), 64 Pekon prioritas 3 (21.19 %), 61 Pekon priorias 4 (2020 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 47 Pekon prioritas 6 (15.56 %).

Tabel II.102. Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2023

NO	PRIORITAS	RASIO SARANA PRASARANA EKONOMI	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	<=0.0233	44	14.57 %
2	2	>0.0233 – 0.0321	42	13.91 %
3	3	>0.0321 – 0.0425	64	21.19 %
4	4	>0.0425 – 0.0544	61	20.20 %
5	5	>0.0544 – 0.0660	44	14.57 %
6	6	>0.0660	47	15.56 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.4.2.3 Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (farm gate price) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupaun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021 yang dipublish oleh BPS di Kabupaten Tanggamus, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 2 atau roda 4. Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Tanggamus, akan tetapi terdapat beberapa kecamatan

di mana moda transportasi air masih menjadi alternatif penting untuk memperpendek waktu tempuh dan trasportasi barang ke daerah lain. Masyarakat sebagian menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, seperti di wilayah Kacamatan Pematang Sawa (Tamang Tua, Kaur Gading, Tirom, Teluk Brak, Karang Brak, Way Asahan, Tamang Muda, dan Matanda) serta sebagian kecil Kecamatan Cukuh Balak (Kuta Kakhang, Karang Buah, Suka Banjar dan Sawang Balak).

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Salah satu penyumbang iklim berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum(kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.103. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Tanggamus	24.98	30.85	32.23	29.92	40.58	36.54	44.88

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Tanggamus terjadi secara fluktuatif, angka kriminalitas di tahun 2021 mengalami perbaikan dari tahun 2020 yang semula 40,58 menjadi 36,54 akan tetapi sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 44,88 yang berarti dalam setiap 100.000 penduduk terjadi 44 tindak kriminalitas.

2.1.4.3.2 Jenis Tindak Kriminal

Seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas, maka dipastikan jenis tindak kriminal yang terjadi juga semakin tinggi, hal tersebut tentu saja menjadi fokus perhatian untuk ditangani dalam upaya menciptakan
tasi yang kondusif.

Tabel II.104. Jenis Tindak Kriminal Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	JENIS TINDAK KRIMINAL	CAPAIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	78	79	105	89	103	104	104
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	2	1	-	2	0	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	17	21	8	36	22	28	28
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	36	35	13	41	40	18	18
5	Jumlah Kasus Pencurian	21	23	23	46	39	113	113
6	Jumlah Kasus Penipuan	27	30	29	32	30	30	30
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	1	-	1	-	-	-
	Jumlah Tindak Kriminal Selama Satu Tahun	**181**	**191**	**179**	**245**	**236**	**293**	**293**

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Tanggamus masih didominasi dengan tamatan SD/sederajat yang mencapai 30,17% sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi SMA/keatas baru mencapai 24,44%.

Tabel II.105. Persentase Penduduk Kabupaten Tanggamus Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2023

NO	KARAKTERISTIK	TIDAK PUNYA IJAZAH SD	SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ KEATAS
1	**Jenis Kelamin**				
	Laki-Laki	16.22	30.47	28.32	24.99
	Perempuan	21.46	29.84	24.87	23.83
2	**Kelompok Pengeluaran**				
	40 Persen Terbawah	21.19	31.20	23.15	24.45
	40 Persen Tengah	17.14	31.96	30.53	20.09
	20 Persen Teratas	16.91	25.03	25.58	32.48
	Kabupaten Tanggamus	**18.74**	**30.17**	**26.66**	**24.44**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel II.106. Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
1	Kabupaten Tanggamus	51,03	50,31	47,84	46,67	46,31	46,08	45,96

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Tanggamus terus menurun, apabila pada tahun 2010 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanggamus sebesar 51,03% maka pada tahun 2022 menjadi 45,96%. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Kabupaten Tanggamus mulai memasuki bonus demografi pada tahun 2014 pada saat RK di bawah 50%. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan kedepan.

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan data diatas maka dengan nilai RK tahun 2022 sebesar 45,96 berarti setiap 100 penduduk angkatan kerja (produktif) menanggung sebanyak 45 penduduk usia non produktif.

2.1.4.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan publik, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur memegang peranan yang sangat penting, sampai saat ini sumber daya apatur di Kabupaten Tanggamus sebanyak 10.544 orang yang terdiri dari 5.003 orang PNS, 1.418 orang PPPK dan 4.123 orang Non ASN.

Tabel II.107. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2023

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PNS	2,167	2,836	**5,003**	**47.45%**
2	PPPK	457	961	**1,418**	**13.45%**
3	NON ASN	2,047	2,076	**4,123**	**39.10%**
JUMLAH		**4,671**	**5,873**	**10,544**	**100.00%**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan data diatas, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 5.873 orang dan sisanya laki-laki sebanyak 4.671 orang.

Tabel II.108. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SUMBER DAYA APARATUR			JUMLAH	%
		PNS	PPPK	NON ASN		
1	S3	-	-		**-**	**0.00%**
2	S2	340	-	12	**352**	**3.34%**
3	S1	3,362	1,368	1,315	**6,045**	**57.33%**
4	D4	128	1	33	**162**	**1.54%**
5	D3	608	37	608	**1,253**	**11.88%**
6	D2	130	-	149	**279**	**2.65%**
7	D1	17	-	34	**51**	**0.48%**
8	SMA	401	12	1,687	**2,100**	**19.92%**
9	SMP	12	-	144	**156**	**1.48%**
10	SD	5	-	141	**146**	**1.38%**
JUMLAH		**5,003**	**1,418**	**4,123**	**10,544**	**100.00%**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2024

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berpendidikan setingkat S1 yang mencapai 57,33% dan yang paling sedikit berpendidikan setingkat D1 yang hanya 0,48%.

Tabel II.109. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	GOLONGAN	PNS	PPPK	JUMLAH	TOTAL	%
1	IV/d / XVI	1	-	1	**1.351**	**21,04%**
	IV/c / XV	33	-	33		
	IV/b / XIV	741	-	741		
	IV/a / XIII	576	-	576		
2	III/d / XII	813	-	813	**4.429**	**68,98%**
	III/c / XI	731	-	731		
	III/b / X	798	9	807		
	III/a / IX	719	1,359	2,078		
3	II/d / VIII	297	-	297	**627**	**9,76%**
	II/c / VII	202	37	239		
	II/b / VI	50	-	50		
	II/a / V	29	12	41		
4	I/d / IV	9	1	10	**14**	**0,22%**
	I/c / III	3	-	3		
	I/b /II	1	-	1		
	I/a / I	-	-	-		
JUMLAH		**5,003**	**1,418**	**6,421**	**6,421**	**100.00%**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan data diatas, apabila dilihat dari sisi golongan yang dimiliki maka komposisi terbanyak berada pada Golongan III/a – III/d atau IX – XII yang mencapai 68,98% sedangkan yang paling sedikit berada pada Golongan I/a – I/d atau I – IV yang hanya 0,22%.

Selain capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa capaian kinerja pembangunan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2023 dan realisasi RPJMD Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target-target kinerja yang berhasil dicapai. Telaahannya dilakukan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan realisasi Renstra-PD oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi tersebut mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2.1 Standar Pelayanan Minimal

Pada Sub Bab khusus Standar Pelayanan Minimal ini akan diuraikan terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa realisasi SPM yang telah dicapai pada tahun 2019-2020 serta target yang akan dicapai pada tahun 2021-2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 6 jenis SPM yaitu :

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

2.2.1.1 Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II.110. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PRATAMA**			**78.42%**
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**				**71.58%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**56.17%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*24,224*	*17,009*	*7,215*	**70,22%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**14.11%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Angka partisipasi sekolah	50.92	43.92	7	**86.25%**
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	40.00	37.21	2,79	**93.03%**
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	70.00	61.29	8.71	**87.56%**
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	1.00	1.08	-0,08	**100.00%**
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	3.00		3.00	**0.00%**
	6. Indeks distribusi guru	1.00	0.62	0.38	**62.00%**
	7. Proporsi PTK bersertifikat	30.00	27.40	2,60	**91.33%**
	8. Proporsi PTK penggerak	3.00		3.00	**0.00%**
	9. Pengalaman pelatihan guru	1.00	0.19	0.81	**19.00%**
	JUMLAH	**172**	**28**	**539,17 %**	**96.03%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2 .	**Pendidikan Dasar**				**95.21%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**78.02%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	*77.377*	*75.462*	*1.915*	**97.53%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**90.03%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	SD				
	1 . Angka partisipasi kasar	100.00	97.28	2.72	**97.28%**
	2 . Angka partisipasi sekolah	100.00	99.96	0.04	**99.96%**
	3 . Angka partisipasi murni	100.00	88.89	11.11	**88.89%**
	4 . Kemampuan literasi	50.00	49.79	0.21	**99.58%**
	5 . Kemampuan numerasi	40.00	36.38	3.62	**90.95%**
	6 . Perbedaan Skor Literasi	5.00	4.58	0.42	**91.60%**
	7 . Perbedaan Skor numerasi	3.00	2.02	0.98	**67.33%**
	8 . Indeks iklim keamanan	70.00	67.77	2.23	**96.81%**
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	70.00	66.32	3.68	**94.74%**
	10. Kecukupan formasi guru ASN	45.00	41.50	3.5	**92.22%**
	11. Indeks distribusi guru	0.49	0.39	0.1	**79.59%**
	12. Proporsi PTK bersertifikat	90.00	85.50	4.5	**95.00%**
	13. Proporsi PTK penggerak	0.20	0.04	0.16	**20.00%**
	14. Pengalaman pelatihan guru	20.00	18.70	1.3	**93.50%**
	SMP				
	1. Angka partisipasi kasar	100.00	101.55	-1.55	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2. Angka partisipasi sekolah	100.00	91.52	8.48	**91.52%**
	3. Angka partisipasi murni	100.00	71.74	28.26	**71.74%**
	4. Kemampuan literasi	50.00	48.12	1.88	**96.24%**
	5. Kemampuan numerasi	35.00	31.34	3.66	**89.54%**
	6. Perbedaan skor literasi	10.00	5.53	4.47	**55.30%**
	7. Perbedaan skor numerasi	2.00	1.18	0.82	**59.00%**
	8. Indeks iklim keamanan	70.00	67.25	2.75	**96.07%**
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	70.00	65.65	4.35	**93.79%**
	10. Kecukupan formasi guru ASN	60.00	58.00	2.00	**96.67%**
	11. Indeks distribusi guru	1.00	0.62	0.38	**62.00%**
	12. Proporsi PTK bersertifikat	30.00	27.40	2.60	**91.33%**
	13. Proporsi PTK penggerak	0.40	0.23	0.17	**57.50%**
	14. Pengalaman pelatihan guru	25.00	21.10	3.90	**84.40%**
	JUMLAH	**1,25**	**97**	**2,160.76 %**	**67.67%**
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**				**67.67%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**50.40%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*33.138*	*20.877*	*12.261*	**63%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17.37%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Angka partisipasi kasar	6329	-	6329	**0.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	14.86	12.89	1.97	**86.74 %**
	3 . Angka partisipasi murni	63.29	-	63.29	**0.00 %**
	4 . Kemampuan literasi	30.00	27.27	2.73	**90.90 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Kemampuan numerasi	20.00	18.18	1.82	**90.90 %**
	6 . Perbedaan skor literasi	20.00	15.05	4.95	**75.25 %**
	7 . Perbedaan skor numerasi	2.00	1.58	0.42	**79.00 %**
	8 . Indeks iklim keamanan	60.00	59.82	0.18	**99.70 %**
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	5.00	4.09	0.91	**81.80 %**
	10. Kecukupan formasi guru ASN				
	11. Indeks distribusi guru				
	12. Proporsi PTK bersertifikat				
	13. Proporsi PTK penggerak				
	14. Pengalaman pelatihan guru				
	JUMLAH	**139**	**6,405**	**604.29 %**	**95.41%**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.1.2 Target dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.111. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**BELUM TUNTAS**			**93.02%**
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**				**96.72%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**77.53%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*11,292*	*10,944*	348	**97.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.19%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1,129	1,129	0	**100.00%**
	2 . Tablet tambah darah	11,292	11,292	0	**100.00%**
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	11,292	10	11,282	**1..44%**
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	11,292	10	11,282	**1..44%**
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	11,292	10	11,282	**1..44%**
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11,292	10	11,282	**1..44%**
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	11,292	11,292	0	**100.00%**
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11,292	10.944	348	**96.92%**
	9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	26	26	0	**100%**
	10. Tenaga kesehatan : Bidan	326	326	0	**100%**
	11. Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	0	**100%**
	12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	11,292	11,292	0	**100%**
	JUMLAH	**86.325**	**22,031**	**35,080**	**38.58%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**				**93.74%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**73.74%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10,778	9,935	843	***92%***
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**9.61%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Formulir Partograf	10,778	10,778	**0**	**100.00%**
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	10,778	10,778	**0**	**100.00%**
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,778	10,778	**0**	**100.00%**
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	26	26	**0**	**100.00%**
	5 . Bidan	326	326	**0**	**100.00%**
	6 . Perawat	24	24	**0**	**100.00%**
	JUMLAH	**32,71**	**32,71**	**100.00%**	**100.00%**
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**				**97.54%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**77.73%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*10,265*	*9,974*	291	**97.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.81%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Vaksin Hepatitis B0	10,265	10,265	**0**	**100.00%**
	2 . Vitamin K1 injeksi	1,02	1,02	**0**	**100.00%**
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	10,265	10,265	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Formulir bayi baru lahir	10,265	9,974	**291**	**97.17%**
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10,265	9,974	**291**	**97.17%**
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,265	9,974	**291**	**97.17%**
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	26	26	**0**	**100.00%**
	8 . Bidan	326	326	**0**	**100.00%**
	9 . Perawat	24	24	**0**	**100.00%**
	JUMLAH	**52,721**	**51.848**	**99,06%**	**97.00%**
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**				**92.18%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**75.38%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*49,708*	*46,84*	2,868	**94.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.80%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	49,708	10,000	39,708	**20.12%**
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	49,708	10,000	39,708	**20.12%**
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	49,708	10,000	39,708	**20.12%**
	4 . Vitamin A Biru	49,708	10,265	39.443	**20.65%**
	5 . Vitamin A Merah	49,708	39,443	10.265	**79.35%**
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	10,265	10,265	0	**100.00%**
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	10,265	10,265	0	**100.00%**
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	35,656	35,656	0	**100.00%**
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	9,664	9,664	0	**100.00%**
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	28,992	28.000	992	**96.58%**
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	9,664	9,664	0	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	9,664	9,664	0	**100.00%**
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB –Hib	9,751	9,751	0	**100.00%**
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	9,751	9,751	0	**100.00%**
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	9,751	9,751	0	**100.00%**
	16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	59,733	59,733	0	**100.00%**
	17. Peralatan Anafilaktik	302	302	0	**100.00%**
	18. Tenaga kesehatan : Dokter	24	24	0	**100.00%**
	19. Tenaga kesehatan : Bidan	326	326	0	**100.00%**
	20. Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	0	**100.00%**
	21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	24	18	6	**75.00%**
	22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	1,239	1,239	0	**100.00%**
	23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	302	302	0	**100.00%**
	JUMLAH	**284,107**	**169,83**	**84,60%**	**84,60%**
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**				84.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**72.58 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*93,958*	*85,244*	**8,714**	**91%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.02 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	60.12 %
	1 . Buku raport kesehatanku	20,879	10	**10,879**	**47.90 %**
	2 . Buku pemantauan kesehatan	20,879	10	**10,879**	**47.90 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	20,879	10	**10,879**	**47.90 %**
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	20,879	10	**10,879**	**47.90 %**
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	20,879	10	**10,879**	**47.90 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	27	3	**24**	**11.11 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	326	326	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	24	18	**6**	**75.00 %**
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	24	11	**13**	**45.83 %**
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	2,4	1,2	**1,2**	**50.00 %**
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	4,963	4,963	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**56,545**	**55,638**	**721.44 %**	
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**				92.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**73.71 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*396,66*	*365,496*	**31,164**	**92%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.07 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	95.34 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	48	48	**0**	**100.00 %**
	2 . Alat ukur berat badan	48	48	**0**	**100.00 %**
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	48	48	**0**	**100.00 %**
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	48	48	**0**	**100.00 %**
	5 . Alat : Tensimeter	48	48	**0**	**100.00 %**
	6 . Alat : Glukometer	48	48	**0**	**100.00 %**
	7 . Alat : Tes strip gula darah	396,66	396,66	**0**	**100.00 %**
	8 . Alat : Lancet	396,66	396,66	**0**	**100.00 %**
	9 . Alat : Kapas alkohol	396,66	396,66	**0**	**100.00 %**
	10 . Alat : KIT IVA Tes	24	24	**0**	**100.00 %**
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	24	24	**0**	**100.00 %**
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	24	24	**0**	**100.00 %**
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	326	326	**0**	**100.00 %**
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	**0**	**100.00 %**
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	24	18	**6**	**75.00 %**
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	11	**13**	**45.83 %**
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	906	906	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**1,191,625**	**19**	**1,620.83 %**	
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				88.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total**	**Jumlah Total**	**Yang Belum**	**72.24 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Yang Harus Dilayani	**Yang Terlayani**	**Terlayani**	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*70,533*	*63,693*	**6,84**	**90%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.33 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	81.67 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	3,738	3,738	**0**	**100.00 %**
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	24	24	**0**	**100.00 %**
	3 . Buku kesehatan lansia	70,533	10	**60,533**	**14.18 %**
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	24	24	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	326	326	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	24	18	**6**	**75.00 %**
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	11	**13**	**45.83 %**
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1,293	1,293	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**15,458**	**60,552**	**735.01 %**	
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**				92.12 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**73.48 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*123,339*	*113,283*	**10,056**	**92%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18.65 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	93.23 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	48	48	**0**	**100.00 %**
	2 . Tensimeter	24	24	**0**	**100.00 %**
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	24	24	**0**	**100.00 %**
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	24	24	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	326	326	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	11	**13**	**45.83 %**
	8 . Obat Hipertensi	24	24	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**505**	**13**	**745.83 %**	
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**				97.10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**78.42 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*3,738*	*3,664*	**74**	**98%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18.68 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	93.40 %
	1 . Alat : Glukometer	48	48	**0**	**100.00 %**
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	3,738	3,738	**0**	**100.00 %**
	3 . Alat : Kapas Alkohol	3,738	3,738	**0**	**100.00 %**
	4 . Alat : Lancet	3,738	3,738	**0**	**100.00 %**
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	24	24	**0**	**100.00 %**
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	48	48	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	24	24	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	326	326	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	24	18	**6**	**75.00 %**
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	11	**13**	**45.83 %**
	12 . Obat Diabetes Melitus	24	24	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**11,761**	**19**	**1,120.83 %**	
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**				97.14 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*1,055*	*1,055*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17.14 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	85.71 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	24	24	**0**	**100.00 %**
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	48	0	**48**	**0%**
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	24	24	**0**	**100.00 %**
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	24	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	24	24	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	24	24	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	24	24	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**144**	**48**	**600.00 %**	
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**				91.26 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**72.20 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Dilayani			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*12,344*	*11,14*	**1,204**	**90%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.07 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	95.34 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	24	24	**0**	**100.00 %**
	2 . Reagen Zn TB	550	550	**0**	**100.00 %**
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	12,344	12,344	**0**	**100.00 %**
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	24	24	**0**	**100.00 %**
	5 . Catridge tes cepat molekuler	12,344	7,95	**4,394**	**64.40 %**
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	24	24	**0**	**100.00 %**
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	24	24	**0**	**100.00 %**
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	26	26	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	24	18	**6**	**75.00 %**
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	2	2	**0**	**100.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	24	24	**0**	**100.00 %**
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	48	48	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**21,082**	**4,4**	**1,239.40 %**	
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**				92.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**73.02 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*14,317*	*13,067*	**1,25**	**91%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.50 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	97.50 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	24	24	**0**	**100.00 %**
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	14,317	14,317	**0**	**100.00 %**
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	14,317	14,317	**0**	**100.00 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	24	24	**0**	**100.00 %**
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	26	26	**0**	**100.00 %**
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	24	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	24	24	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	24	18	**6**	**75.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	24	24	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	10	10	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**28,808**	**6**	**975.00 %**	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.1.3 Target dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.112. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PRATAMA**			70.77 %
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**				73.19 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**58.70 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*604,556*	*443,625*	**160,931**	**73%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**14.48 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	72.41 %
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	604,556	443,625	**160,931**	**73.38 %**
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	604,556	433,125	**171,431**	**71.64 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	604,556	443,125	**161,431**	**73.30 %**
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	604,556	431,125	**173,431**	**71.31 %**
	JUMLAH	**1,751,000**	**667,224**	**289.63 %**	
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**				68.35 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**58.67 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*604,556*	*443,385*	**161,171**	**73%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**9.68 %**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	48.40 %
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	604,556	511,892	**92,664**	**84.67 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	604,556	472,825	**131,731**	**78.21 %**
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	604,556	92,864	**511,692**	**15.36 %**
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	604,556	92,864	**511,692**	**15.36 %**
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	604,556	31,986	**572,57**	**5.29 %**
	JUMLAH	**1,202,431**	**1,820,349**	**198.89 %**	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel II.113. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			100.00 %
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				100.00 %
	Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	41	41	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	**0**	**0.00 % 0**
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	41	41	**0**	**100.00 % 100.00**
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	41	41	**0**	**100.00 % 100.00**
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	41	41	**0**	**100.00 % 100.00**
	JUMLAH	**123**	**0**	**300.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	10	10	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	15	15	**0**	**100.00 % 100.00**
	2 . Subsidi uang sewa	0	0	**0**	**0.00 % 0**
	3 . Penyediaan rumah layak huni	222	222	**0**	**100.00 % 100.00**
	JUMLAH	**237**	**0**	**100.00 %**	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.1.4 Target dan Realisasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Ketentrraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas tiga Sub Urusan yaitu, Sub Urusan Bencana Daerah, Sub Urusan Kebakaran Daerah dan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Bencana Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Kebakaran Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.114. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		**TUNTAS UTAMA**			94.08 %
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				94.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	45	45	**0**	**100.00 %**
					14.08 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	70.40 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	20	20	**0**	**100.00 %**
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	23	23	**0**	**100.00 %**
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	4,014	3,275	**739**	**81.59 %**
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0	0	**0**	**0%**

	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	**0**	**0%**
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	**0**	**0%**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		**TUNTAS PARIPURNA**			100.00 %
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,467	1,467	**0**	**100.00 %**
					20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	**0**	**100.00 %**
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	285,64	285,64	**0**	**100.00 %**
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	1,467	1,467	**0**	**100.00 %**

	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	27	27	**0**	**100.00 %**
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,467	1,467	**0**	**100.00 %**
					20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	95	95	**0**	**100.00 %**
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	55	55	**0**	**100.00 %**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				100.00 %
	ya				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	5,1	5,1	**0**	**100.00 %**
					20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00 %

	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	2	**0**	**100.00 %**
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	5,1	5,1	**0**	**100.00 %**
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	**0**	**100.00 %**
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	0	**0**	**0%**
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1	1	**0**	**100.00 %**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**TUNTAS UTAMA**			96.05 %
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				96.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	60	60	**0**	**100.00 %**
					16.05 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	80.25 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	21	21	**0**	**100.00 %**

	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	21	21	**0**	**100.00 %**
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	30	30	**0**	**100.00 %**
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	81	1	**80**	**1.23 %**
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	0	0	**0**	**0%**
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	42	42	**0**	**100.00 %**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penangguangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.1.5 Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.115. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			100.00 %
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	580	580	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	5	5	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	4	4	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan	121	121	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan sandang	227	227	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan alat bantu	206	206	**0**	**100.00 %**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	**0**	**100.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	4	4	**0**	**100.00 %**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	2	2	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	**0**	**100.00 %**
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	**0**	**100.00 %**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	**0**	**100.00 %**
	13 . Layanan rujukan	4	4	**0**	**100.00 %**
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	449	449	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	10	10	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	56	56	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan	189	189	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4 . Penyediaan sandang	3	3	**0**	**100.00 %**
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	**0**	**100.00 %**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	**0**	**100.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	1	1	**0**	**100.00 %**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	30	30	**0**	**100.00 %**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	150	150	**0**	**100.00 %**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	**0**	**100.00 %**
	12 . Layanan rujukan	7	7	**0**	**100.00 %**
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1633	1633	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	3	3	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan	1633	1633	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan sandang	7	7	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan alat bantu	203	203	**0**	**100.00 %**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	3	**0**	**100.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	**0**	**100.00 %**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	1	1	**0**	**100.00 %**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1	1	**0**	**100.00 %**
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	1	1	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	**0**	**100.00 %**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	13 . Layanan rujukan	2	2	**0**	**100.00 %**
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di** Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	4	4	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan	1	1	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan sandang	1	1	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	**0**	**100.00 %**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	4	4	**0**	**100.00 %**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	4	4	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	**0**	**100.00 %**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	**0**	**100.00 %**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	4	4	**0**	**100.00 %**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	**0**	**100.00 %**
	12 . Layanan rujukan	4	4	**0**	**100.00 %**
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				100.00 %
	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	195	195	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	195	195	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2 . Penyediaan sandang	195	195	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	**0**	**100.00 %**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	27	27	**0**	**100.00 %**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	195	195	**0**	**100.00 %**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.2 Sustainable Development Goals

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). 17 tujuan dari SDGs adalah, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan dan kesejahteraan;
4. Kualitas pendidikan yang baik;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Akses ke energi yang terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi;
9. Inovasi dan infrastruktur;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Pembangunan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mencegah dampak perubahan iklim;
14. Menjaga sumberdaya laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian dan keadilan; dan
17. Revitalisasi kemitraan global.

SDGs ditetapkan oleh PBB pada akhir September 2015 di New York dengan masa berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember 2030 dan ada sekitar 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk melaksanakan SDGs.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menetapkan Target, Indikator dan Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Tahun 2023 yang dapat dilihat sebagaimana berikut :

I. PILAR SOSIAL

Pilar Pembangunan Sosial mencakup beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu : Tujuan 1 (Tanpa kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender). Adapun Target, Indikator dan Realisasi Tahun 2023 sebagaimana Tabel berikut ini :

Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dinas Pendidikan	Ruang	4	3
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Dinas Pendidikan	Unit	25	22
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan	400	149
2.	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dinas Pendidikan	Unit	10	9
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	Unit	20	18
3.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	10,21%	10,52%
4.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	100%	100%
5.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	KPM	39.688	39.688

6.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	%	100%	100%
7.	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial	Orang	195	195
8.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial	Orang	284	224
9.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	98	99,93
10.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 orang	-	998
11.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	BPS	Rupiah	-	-
12.	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas PUPR	Dokumen	100%	96.41%
13.	Jumlah Penyusunan Dokumen Renacan,Kebijakan, Srategis dan Tenis Sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten tanggamus	Dinas PUPR	Dokumen	100%	92.08%
14.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Persentase	65%	72,50%
15.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	95%	96,61%
16.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	0,90	92,20%
17.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	%	100%	94,70%
18.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja	%	100%	91,64%
19.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Tenaga Kerja			

Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	12%	3,56%
2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan		16,00	2,94

3.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	%	3%	2,94%
4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan		3%	2,94%
5.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	20%	6,90%
6.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	60%	79,13%
7.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	5,00	5,00
8	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	0	0
9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	7,50	10,52
10	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	83,55	83,60
11	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp.	3.303.889	4.362.139

Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	%	70	68
2.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Kesehatan	%	100	93,4
3.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	90	92,1
4.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan			0,9

5.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan			2,8
6.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan		1	0,7
7.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	100	94,6
8.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%		0,00428
9.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan			142,25
10.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan			0,0016
11.	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan			86,2
12.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	kasus		10
13.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	%	193,698	885
14.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	123,339	113,283
15.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	%	64,954	12,852
16.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan		0	0
17.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan		26	26
18.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan			
19.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan		95	96,61
20.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	95	96,79
21.	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan		0	0
22.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan		467,19	413,97
23.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan		100	99,9
24.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan		891,00	1245

Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang insklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dinas Pendidikan	Ruang	4	3
2.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Dinas Pendidikan	Unit	25	22
3.	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidikan	peserta didik	21000	0
4.	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	peserta didik	250	0
5.	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Pendidik dan tenaga pendidikan	2231	1517
6.	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	orang	600	597
7.	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan	400	149
8.	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dinas Pendidikan	Unit	10	9
9.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	Unit	20	18
10.	JumlahPeserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidikan	peserta didik	900	0
11.	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	peserta didik	250	0
12.	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Pendidik dan tenaga pendidikan	1264	554
13.	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan	50	15
14.	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Dinas Pendidikan	peserta didik	16046	0
15.	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Pendidik dan tenaga pendidikan	1258	1255

16.	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan	488	0
17.	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan	488	235
18.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	Unit	10	9
19.	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Dinas Pendidikan	peserta didik	100	0
20.	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan	19	0
21.	JumlahPenyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Dinas Pendidikan	orang	50	0

Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB	Kebijakan	16	22
2.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (Simfoni)	Orang	50	30
3.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (Simfoni)	Orang	40	28
4.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (Simfoni)	Orang	50	30
5.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (Simfoni)	Persentase	100%	100%

6.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Rumah Tangga	21.300	21.043
7.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Usia Kawin	25	27
8.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	ASFR	33	21,3
9.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Orang	9	9
10.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Orang	9	9
11.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Orang	63.000	66.578
12.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Persentase	13%	6,10%
13.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB (PK 2023)	Persentase	30%	61,99%

II. PILAR EKONOMI

Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu : Tujuan 7 (Menjamin Akses Energi yang terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua), Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang layak untuk semua), Tujuan 9 (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi), Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara) dan Tujuan 17 (Menguatkan

Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan). Adapun Target, Indikator dan Realisasi Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Rasio elektrifikasi.	Dinas Tenaga Kerja	%	98	97,5
2.	Rasio elektrifikasi perdesaan	Dinas Tenaga Kerja	%	99	98

Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	0	0
2.	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang	50	79
3.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang	650.000	678.142
4.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rupiah	Rp 200.000.000	Rp 181.355.000
5.	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	0	0
6.	Peningkatan Koperasi dan UMKM yang berkualitas	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Orang	120	120
7.	Peningkatan UMKM yang dikembangkan dan di Berdayakan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	UMKM	120	0
8.	Produk Unggulan yang difasilitasi Pemasarannya	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Produk UMKM	100	25

9.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja			
10.	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja			
11.	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Tenaga Kerja			
12.	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja			
13.	Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja			
14.	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja			

Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Kajian Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	100	0
2.	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	5	2

Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	10,21	10,52
2.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Sosial dan Dinas PMD	Tahun 2023 sudah tidak ada Desa Tertinggal		
3.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinas Sosial dan Dinas PMD	Orang		
4.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD	Desa	3	3

5.	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa	3	3
6.	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas PMD	Desa	2	2
7.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja			

Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD	Rupiah	111.159.970.233	76.812.122.082

III. PILAR LINGKUNGAN

Pilar Pembangunan Lingkungan mencakup beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu : Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Laut) dan Tujuan 15 (Ekosustem Darat). Adapun Target, Indikator dan Realisasi Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	59,47	53,75
2.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan	1 WS	1 WS
3.	Jumlah Petani yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	Dinas PUPR	Orang	100%	0%
4.	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas PUPR	Dokumen	100%	96.41%
5.	Jumlah Penyusunan Dokumen Renacan,Kebijakan, Srategis dan Tenis Sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten tanggamus	Dinas PUPR	Dokumen	100%	92.08%

6.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan	Unit	100	52
7.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa	302	302
8.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa	90	200
9.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp.	0	0

Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

No.	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	72	39,72
2.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Per 100.000 orang	-	998
3.	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	BPS	-	-	-
4.	(a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana	Dinas PUPR, BPBD	-	-	-
5.	Jumlah RTRW Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan	Dinas PUPR	Dokumen	100%	74.35%
6.	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas PUPR	Unit	100%	96.29%

Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

No.	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi

1.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup	Kg	695.098	695.098
2.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	3.705	5.646
3.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Kesehatan	Unit	24	24

Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 orang	-	998

Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.				-	

Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.				-	

IV. PILAR HUKUM

Pilar Pembangunan Hukum mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Target, Indikator dan Realisasi TPB Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

No	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
1.	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK	Opini	WTP	WDP* (terhadap LKPD 2022)
2.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	KPK	Indeks	75	69,57
3.	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persen	5,7	5,7
4.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	BKPSDM	Orang	0,0	0,0
5.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tanggamus	Orang	100	98
6.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	98	100
7.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	98	99,93
8.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB	Rumah Tangga	0	0
9.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB	Orang	50	30

10.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB	Orang	50	30
11.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas PP,PA,Dalduk dan KB	Orang	6,67	6,67

Sumber : Analisis Data Diolah, 2024

Secara umum kondisi Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD di tabel berikut ini.

Tabel II.116 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2023 Kabupaten Tanggamus

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																								
			PENDIDIKAN																								
1			**DINAS PENDIDIKAN**																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**2.254.573.185.295**	**70,68** %	**2.193.322.113.013**	**%** 100	**438.567.566.260**	% 13,54	**79.360.959.193**	% 35,09	**93.447.650.334**	% 16,37	**89.836.300**	% 47,00	-	***112,00*** %	***172.898.445.827***	***112,00%***	***39,42%***	***182,68*** %	############	***91,34%***	***104,95%***	DINAS PENDIDIKAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**3.191.617.000**		**2.148.289.800**		**53.926.300**						**53.926.300**		-	- -	***53.926.300***		***100,00%***	- -	***2.202.216.100***		***69,00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	530 Dokumen	202.067.500	358 Dokumen	155.405.500	Dokumen 50	9.800.000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	20 Dokumen	9.800.000	30 Dokumen	-	*50 Dokumen*	*9.800.000*	***100,00%***	***100,00%***	*408 Dokumen*	*165.205.500*	***76,98%***	***81,76%***	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	530 Eksemplar Dokumen	661.436.000	338 Eksemplar Dokumen	451.665.800	Dokumen 60	10.800.000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	23 Dokumen	10.800.000	37 Dokumen	-	*60 Dokumen*	*10.800.000*	***100,00%***	***100,00%***	*398 Eksemplar Dokumen*	*462.465.800*	***75,09%***	***69,92%***	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	530 Buku/Dokumen	213.050.000	318 Buku/Dokumen	127.830.000	Dokumen 60	6.300.000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	15 Dokumen	6.300.000	45 Dokumen	-	*60 Dokumen*	*6.300.000*	***100,00%***	***100,00%***	*378 Buku/Dokum*	*134.130.000*	***71,32%***	*62,96%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	530 Buku/Dokumen	149.380.000	358 Buku/Dokumen	133.638.000	Dokumen 60	9.010.000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	22 Dokumen	9.010.000	38 Dokumen	-	*60 Dokumen*	*9.010.000*	***100,00%***	***100,00%***	*418 Buku/Dokum*	*142.648.000*	***78,87%***	*95,49%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	530 Eksemplar Dokumen	150.000.000	358 Eksemplar Dokumen	119.750.000	Eksemplar Dokumen 0	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	***0,00%***	***0,00%***	*358 Eksemplar Dokumen*	*119.750.000*	***67,55%***	*79,83%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ,PROFIL Perangkat Daerah	530 Eksemplar Dokumen	729.250.500	318 Eksemplar Dokumen	437.550.300	Dokumen 0	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	***0,00%***	***0,00%***	*318 Eksemplar Dokumen*	*437.550.300*	***60,00%***	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	300 Eksemplar Dokumen	1.086.433.000	220 Eksemplar Dokumen	722.450.200	Laporan 60	18.016.300	Laporan 0	-	Laporan -	-	4 Laporan	18.016.300	56 Laporan	-	*60 Laporan*	*18.016.300*	***100,00%***	***100,00%***	*280 Eksemplar Dokumen*	*740.466.500*	***93,33%***	*68,16%*	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**2.233.464.847.545**		**2.174.248.748.925**		**433.393.809.960**		**79.300.335.217**		**91.694.837.237**		############	############	- -	***403.319.568.487***		***93,06%***	- -	############		***115,41%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	2.069.597.447.545	48 Bulan	2.012.808.335.875	Bulan 12	431.181.298.460	Bulan 3	79.202.160.217	Bulan 3	90.800.490.337	3 Bulan	############	3 Bulan	############	*12 Bulan*	*401.252.206.987*	***100,00%***	***93,06%***	*60 Bulan*	############	***100,00%***	*116,64%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegaw ai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	51495 Orang	162.767.400.000	34117 Orang	160.450.100.000	Orang 3320	2.053.200.000	Orang 797	98.175.000	Orang 787	892.675.000	789 Orang	492.675.000	818 Orang	489.925.000	*3.191 Orang*	*1.973.450.000*	***96,11%***	***96,12%***	*37.308 Orang*	*162.423.550.000*	***72,45%***	*99,79%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	870.000.000	54 Kali	808.820.000	Dokumen 12	153.360.000	Dokumen 0	-	Dokumen 1	1.671.900	5 Dokumen	86.288.100	1 Dokumen	-	*7 Dokumen*	*87.960.000*	***58,33%***	***57,36%***	*61 Kali*	*896.780.000*	***101,67%***	*103,08%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Eksemplar Dokumen	230.000.000	745 Eksemplar Dokumen	181.493.050	Eksemplar Dokumen 12	5.951.500	Eksemplar Dokumen 0	-	Eksemplar Dokumen -	-	2 Eksemplar Dokumen	5.951.500	10 Eksemplar Dokumen	-	*12 Eksemplar Dokumen*	*5.951.500*	***100,00%***	***100,00%***	*757 Eksemplar Dokumen*	*187.444.550*	***63,08%***	*81,50%*	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persntase Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**		**994.000.000**		**723.372.350**		-		-		-		-		- -	-		***0,00%***	- -	***723.372.350***		***72,77%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1200 Eksemplar Dokumen	707.500.000	1080 Eksemplar Dokumen	529.819.850	Eksemplar Dokumen 0	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokum*	-	***0,00%***	***0,00%***	*1.080 Eksemplar Dokum*	*529.819.850*	***90,00%***	*74,89%*	DINAS PENDIDIKAN
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1200 Dokumen	286.500.000	1005 Dokumen	193.552.500	Dokumen 0	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	***0,00%***	***0,00%***	*1.005 Dokumen*	*193.552.500*	***83,75%***	*67,56%*	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**623.775.000**		**478.343.200**		**42.531.400**		-		**42.509.400**		-		- -	***42.509.400***		***99,95%***	- -	***520.852.600***		***83,50%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja	500 Stel	193.400.000	300 Stel	116.040.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- ***Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***300*** *Stel*	***116.040.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1200 Eksemplar	189.600.000	1200 Eksemplar	169.713.200	240 Eksemplar	42.531.400	0 Eksemplar	-	229 Eksemplar	42.509.400	0 Eksemplar	-	11 Eksemplar	-	*240 Eksemplar*	*42.509.400*	*100,00%*	*99,95%*	*1.440 Eksemplar*	*212.222.600*	*120,00%*	*111,93%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Orang	240.775.000	40 Orang	192.590.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*40 Orang*	*192.590.000*	*80,00%*	*79,99%*	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**4.557.010.750**		**4.339.005.760**		**782.308.600**		-		**248.578.800**		**115.204.000**		-	*- -*	*363.782.800*		*46,50%*	*- -*	*4.702.788.560*		*103,20%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 Unit	100.000.000	27 Unit	77.517.500	Paket 0	-	Paket		Paket		Paket		Paket		*- Paket*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*27 Unit*	*77.517.500*	*90,00%*	*77,52%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1750 Unit	193.207.000	1520 Unit	162.091.200	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*1.520 Unit*	*162.091.200*	*86,86%*	*83,90%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	600 Porsi	483.570.000	487 Porsi	317.973.650	Porsi 1832	9.852.000	Porsi 0	-	Porsi 155	8.272.000	29 Porsi	1.573.000	1.647 Porsi	-	*1.831 Porsi*	*9.845.000*	*99,95%*	*99,93%*	*2.318 Porsi*	*327.818.650*	*386,33%*	*67,79%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	6000 Eksemplar	557.593.750	5250 Eksemplar	745.932.850	Paket 1200	291.543.600	Paket 0	-	Paket 670	108.151.000	36 Paket	5.831.000	- Paket	-	*706 Paket*	*113.982.000*	*58,83%*	*39,10%*	*5.956 Eksemplar*	*859.914.850*	*99,27%*	*154,22%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1625 Buah	20.932.500	1480 Buah	296.163.100	Buah 325	272.387.000	Buah 0	-	Buah 198	114.155.800	4 Buah	2.650.000	- Buah	-	*202 Buah*	*116.805.800*	*62,15%*	*42,88%*	*1.682 Buah*	*412.968.900*	*103,51%*	*1972,86%*	DINAS PENDIDIKAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	140 Kali	90.000.000	84 Kali	54.000.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*84 Kali*	*54.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	1.000.707.500	252 Kali	657.656.460	12 Laporan	190.526.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	105.150.000	6 Laporan	-	*7 Laporan*	*105.150.000*	*58,33%*	*55,19%*	*259 Kali*	*762.806.460*	*86,33%*	*76,23%*	DINAS PENDIDIKAN
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Aplikasi	2.111.000.000	18 Aplikasi	2.027.671.000	20 Dokumen	18.000.000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	18.000.000	0 Dokumen	-	18 Dokumen	-	*20 Dokumen*	*18.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*38 Aplikasi*	*2.045.671.000*	*190,00%*	*96,91%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.937.700.000**		**1.816.320.811**		**225.320.000**		-		27.323.381		**117.695.191**		-	*- -*	*145.018.572*		*64,36%*	*- -*	*1.961.339.383*		*101,22%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	20 Unit	225.850.000	25 Unit	216.140.340	Unit 4	49.670.000	Unit 0	-	Unit 1	8.090.480	1 Unit	18.409.755	- Unit	-	*2 Unit*	*26.500.235*	*50,00%*	*53,35%*	*27 Unit*	*242.640.575*	*135,00%*	*107,43%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	120 Unit	763.050.000	89 Unit	692.328.583	Unit 4	121.510.000	Unit 0	-	Unit 1	19.232.901	1 Unit	45.485.436	- Unit	-	*2 Unit*	*64.718.337*	*50,00%*	*53,26%*	*91 Unit*	*757.046.920*	*75,83%*	*99,21%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	120 Unit	595.000.000	106 Unit	595.252.500	Unit 24	54.140.000	Unit 0	-	Unit -	-	8 Unit	53.800.000	16 Unit	-	*24 Unit*	*53.800.000*	*100,00%*	*99,37%*	*130 Unit*	*649.052.500*	*108,33%*	*109,08%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	211.300.000	24 Unit	202.719.388	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*24 Unit*	*202.719.388*	*80,00%*	*95,94%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	142.500.000	24 Unit	109.880.000	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*24 Unit*	*109.880.000*	*80,00%*	*77,11%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.593.475.000**		**5.104.640.978**		**3.782.490.000**		**60.623.976**		**1.006.901.516**		**385.933.378**		**1.028.026.141**	*- -*	*2.481.485.011*		*65,60%*	*-*	*7.586.125.989*		*292,51%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	725.975.000	51 Kali	3.480.146.030	12 Laporan	3.339.360.000	0 Laporan	60.623.976	6 Laporan	955.061.516	2 Laporan	321.836.385	- Laporan	1.008.028.461	*8 Laporan*	*2.345.550.338*	*66,67%*	*70,24%*	*59 Kali*	*5.825.696.368*	*98,33%*	*802,47%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Kali	1.867.500.000	57 Kali	1.624.494.948	12 Laporan	443.130.000	0 Laporan	-	1 Laporan	51.840.000	1 Laporan	64.096.993	2 Laporan	19.997.680	*4 Laporan*	*135.934.673*	*33,33%*	*30,68%*	*61 Kali*	*1.760.429.621*	*101,67%*	*94,27%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**9.148.460.000**		**6.279.712.000**		**512.500.000**		-		427.500.000		35.000.000		-	*-*	*462.500.000*		*90,24%*	*- -*	*6.742.212.000*		*73,70%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	2.215.000.000	3 Unit	1.329.000.000	Unit		Unit		Unit	-	0 Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*1.329.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	350.000.000	Unit	-	Unit		Unit		Unit	-	0 Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	5 Unit	248.710.000	1 Unit	49.742.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*1 Unit*	*49.742.000*	*20,00%*	*20,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115 Unit	310.000.000	169 Unit	417.550.000	Unit		Unit		Unit	-	0 Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*169 Unit*	*417.550.000*	*146,96%*	*134,69%*	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	6.024.750.000	21 Unit	4.483.420.000	65 Unit	512.500.000	0 Unit	-	19 Unit	427.500.000	1 Unit	35.000.000	39 Unit	-	*59 Unit*	*462.500.000*	***90,77%***	***90,24%***	*80 Unit*	*4.945.920.000*	***266,67%***	*82,09%*	DINAS PENDIDIKAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,14**	**18,10**	**0,35**	**21,31**	**0,16**	**0,02**	**0,47**	**-**	**1,12**	**39,42**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	***SR***	***SR***							
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP**	**200 %**	**987.800.204.245**	**60,29 %**	**630.575.068.370**	**100 %**	**186.207.369.368**	**0,41 %**	**5.915.883.310**	**0,35 %**	**2.071.007.220**	**50,61 %**	###########	**16,93 %**	###########	***68,30 %***	***108.836.685.243***	***68,30%***	***58,45%***	***128,59 %***	***739.411.753.613***	***64,30%***	***74,85%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**653.010.264.285**		**419.257.402.485**		**110.736.402.032**		**4.200.397.190**		**642.547.230**		###########		###########	**-**	***66.557.342.348***		***60,10%***	**-**	***485.814.744.833***		***74,40%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	125 Ruang/Unit/LS	45.671.420.060	82 Ruang/Unit/LS	36.965.365.416	4 Ruang	17.613.275.740	1 Ruang	4.200.397.190	- Ruang	-	1 Ruang	5.733.923.630	1 Ruang	4.026.004.920	*3 Ruang*	*13.960.325.740*	***75,00%***	***79,26%***	*85 Ruang/Unit/*	*50.925.691.156*	***68,00%***	*111,50%*	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	225 Paket/Ruang/Unit/LS	127.279.875.000	176 Paket/Ruang/Unit/LS	112.264.547.525	25 Unit	26.429.125.930	0 Unit	-	1 Unit	565.685.480	11 Unit	12.103.604.830	10 Unit	10.566.338.000	*22 Unit*	*23.235.628.310*	***88,00%***	***87,92%***	*198 Paket/Ruang/Unit/*	*135.500.175.835*	***0,00%***	*106,46%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Kegiatan	348.750.656.525	16 Kegiatan	261.495.007.024	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*16 Kegiatan*	*261.495.007.024*	***80,00%***	*74,98%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5 Ruang	878.591.100	3 Ruang	527.154.660	0 Ruang	-	Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		- *Ruang*	-	***0,00%***	***0,00%***	*3 Ruang*	*527.154.660*	***60,00%***	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	15 Kegiatan	1.033.109.500	9 Kegiatan	619.865.700	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*9 Kegiatan*	*619.865.700*	***60,00%***	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	45 Kegiatan	3.499.286.400	36 Kegiatan	2.107.604.840	0 Kegiatan	-	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*36 Kegiatan*	*2.107.604.840*	***80,00%***	*60,23%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasarh	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2231 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.460.600.000	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		2231 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.486.400.000	0 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	1201 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.781.425.000	316 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.068.325.000	*1.517 Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*9.849.750.000*	***68,00%***	***67,99%***	*1.517 Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*9.849.750.000*	***68,00%***	*68,11%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	60 Kegiatan	8.477.125.700	60 Kegiatan	5.277.857.320	12 Kegiatan	93.932.880	0 Kegiatan	-	6 Kegiatan	76.861.750	0 Kegiatan	16.578.650	5 Kegiatan	-	*11 Kegiatan*	*93.440.400*	***91,67%***	***99,48%***	*71 Kegiatan*	*5.371.297.720*	***118,33%***	*63,36%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24 Kegiatan	102.959.600.000	0 Kegiatan	-	12 Kegiatan	52.113.667.482	0 Kegiatan	-	Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	5 Kegiatan	19.418.197.898	*5 Kegiatan*	*19.418.197.898*	***41,67%***	***37,26%***	*5 Kegiatan*	*19.418.197.898*	***20,83%***	*18,86%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase Tepeneuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekoalah Menengah**		**242.224.519.210**		**163.123.103.623**		**51.016.544.036**		**1.715.486.120**		**1.384.047.690**		**9.181.787.760**		###########	**-**	***29.013.771.305***		***56,87%***	**-**	***192.136.874.928***		*79,32%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Tepeneuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekoalah Menengah Pertama	500 %	8.617.273.750	2500 %	6.933.320.350	100 %	7.471.750.950	20 %	1.715.486.120	10,00 %	413.036.520	20,00 %	1.547.625.560	40,00 %	2.798.522.720	*90 %*	*6.474.670.920*	***90,00%***	***86,66%***	*2.590 %*	*13.407.991.270*	***518,00%***	*155,59%*	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	255 Ruang	80.484.058.750	236 Ruang	77.203.920.625	20 Unit	15.098.606.699	0 Unit	-	1 Unit	971.011.170	7 Unit	5.291.517.200	10 Unit	7.063.344.860	*18 Unit*	*13.325.873.230*	***90,00%***	***88,26%***	*254 Ruang*	*90.529.793.855*	***99,61%***	*112,48%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	500 %	101.848.569.000	400 %	77.396.213.022	%		%		%		%		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	*400 %*	*77.396.213.022*	***80,00%***	*75,99%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	500 %	546.000.000	300 %	327.600.000	0 %	-	%		%	-	0 %		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	*300 %*	*327.600.000*	***60,00%***	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tercapainya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500 %	1.905.817.710	500 %	1.262.049.626	100 %	36.000.200	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	*500 %*	*1.262.049.626*	***100,00%***	*66,22%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1264 Pendidik dan Tenaga	7.107.300.000	Pendidik dan Tenaga		1264 Pendidik dan Tenaga	6.778.620.000	0 Pendidik dan Tenaga	-	Pendidik dan Tenaga	-	417 Pendidik dan Tenaga Kepen	2.342.645.000	137 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	628.750.000	*554 Pendidik dan Tenaga Kepend*	*2.971.395.000*	***43,83%***	***43,83%***	*554 Pendidik dan Tenaga*	*2.971.395.000*	***43,83%***	*41,81%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 %	41.715.500.000	100 %	-	100 %	21.631.566.187	0 %	-	% -	-	0,00 %	-	29,41 %	6.241.832.155	*29 %*	*6.241.832.155*	***29,41%***	***28,86%***	*129 %*	*6.241.832.155*	***64,71%***	*14,96%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			**79.465.703.500**		**40.744.139.100**		**17.194.800.000**		-		-		**5.085.900.000**		**6.691.933.000**	**-**	***11.777.833.000***		***68,50%***	**-**	***52.521.972.100***		***66,09%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1160 Peserta Didik	49.699.300.000	928 Peserta Didik	39.449.280.000	Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		- *Peserta Didik*	-	***0,00%***	***0,00%***	*928 Peserta Didik*	*39.449.280.000*	***80,00%***	*79,38%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20 Kegiatan Negeri	649.180.000	16 Kegiatan Negeri	428.445.000	0 Kegiatan Negeri	-	Kegiatan Nege		Kegiatan Nege		Kegiatan Negeri		Kegiatan Negeri		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*16 Kegiatan*	*428.445.000*	***80,00%***	*66,00%*	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1258 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.793.200.000	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1258 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.784.200.000	0 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	942 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.085.900.000	313 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.682.550.000	*1.255 Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*6.768.450.000*	***99,76%***	***99,77%***	*1.255 Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*6.768.450.000*	***99,76%***	*99,64%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	15 Kegiatan	1.444.023.500	12 Kegiatan	866.414.100	0 Kegiatan	-	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*12 Kegiatan*	*866.414.100*	***80,00%***	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	6 Kegiatan	20.880.000.000	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	10.410.600.000	0 Kegiatan	-	Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	5.009.383.000	*2 Kegiatan*	*5.009.383.000*	***50,00%***	***48,12%***	*6 Kegiatan*	*5.009.383.000*	***100,00%***	*23,99%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			**13.099.717.250**		**7.450.423.162**		**7.259.623.300**		**-**		**44.412.300**		**640.999.580**		**802.326.710**	**-**	***1.487.738.590***		***20,49%***	**-**	***8.938.161.752***		***68,23%***	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6 Ruang	1.237.396.250	5 Ruang	1.928.688.062	1 Ruang	1.697.528.300	0 Ruang	-	Ruang -	44.412.300	0 Ruang	640.999.580	1 Ruang	802.326.710	*1 Ruang*	*1.487.738.590*	***100,00%***	***87,64%***	*6 Ruang*	*3.416.426.652*	***100,00%***	*276,10%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	6 Kegiatan	3.745.600.000	4 Kegiatan	5.084.660.000	0 Kegiatan	-	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*4 Kegiatan*	*5.084.660.000*	***66,67%***	*135,75%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	225.001.000	6 Kegiatan	135.000.600	2 Kegiatan	28.495.000	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*6 Kegiatan*	*135.000.600*	***60,00%***	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	144.782.500	8 Kegiatan	110.832.000	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*8 Kegiatan*	*110.832.000*	***80,00%***	*76,55%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10 Kegiatan	318.737.500	6 Kegiatan	191.242.500	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*6 Kegiatan*	*191.242.500*	***60,00%***	*60,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	7.428.200.000	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	5.533.600.000	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- *Kegiatan*	-	***0,00%***	***0,00%***	*2 Kegiatan*	-	***100,00%***	*0,00%*	DINAS PENDIDIKAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,41**	**3,18**	**0,35**	**1,11**	**50,61**	**21,77**	**16,93**	**32,39**	**68,30**	***58,45***						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**R**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		500 %	**55.098.800**	**0,00 %**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- **%**	-	***0,00%***	***0,00%***	- %	-	***0,00%***	*0,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			**55.098.800**		-		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	-		*0,00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	275 Orang	55.098.800	Orang		0 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	- *Orang*	-	***0,00%***	*0,00%*	DINAS PENDIDIKAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		500 %	**326.632.500**	60,00 %	**195.979.500**		-		-		-		-		-	-	-	***0,00%***	***0,00%***	***60,00*** %	***195.979.500***	***12,00%***	***60,00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**326.632.500**		**195.979.500**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***195.979.500***		***60,00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah: Publikasi Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Paket	126.632.000	3 Paket	75.979.200	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- ***Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	*3 Paket*	***75.979.200***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Paket	200.000.500	3 Paket	120.000.300	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- ***Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	*3 Paket*	***120.000.300***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- ***Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	- *Paket*	-	***0,00%***	***0,00%***	DINAS PENDIDIKAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
2			**DINAS KESEHATAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**323.156.639.330**	**81,21** %	**385.534.156.247**	**100** %	**98.536.527.521**	**11,55** %	**15.865.710.494**	**4,00** %	**11.466.951.640**	**10,50** %	###########	**23,16** %	###########	***49,21*** *%*	***55.724.708.724***	***49,21%***	***56,55%***	***130,41*** *%*	***441.258.864.971***	***65,21%***	***136,55%***	DINAS KESEHATAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**1.424.056.000**		**975.032.950**		**149.195.000**		**600.000**		**12.450.000**		**7.395.000**		**3.996.000**	- -	***24.441.000***		***16,38%***	- -	***999.473.950***		***70,19%***	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja dan Perubahannya)	150 Buku	202.006.000	119 Buku	137.035.200	30 Buku	44.760.000	0 Buku	-	5 Buku	7.050.000	1 Buku	1.770.000	- Buku	3.996.000	***6 Buku***	***12.816.000***	***20,00%***	***28,63%***	***125 Buku***	***149.851.200***	***83,33%***	***74,18%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	200 Dokumen	161.100.000	142 Dokumen	130.965.000	60 Dokumen	18.750.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***- Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***142 Dokumen***	***130.965.000***	***71,00%***	***81,29%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	200 Dokumen	69.750.000	135 Dokumen	46.350.000	20 Dokumen	13.950.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***- Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***135 Dokumen***	***46.350.000***	***67,50%***	***66,45%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buah	37.500.000	90 Buah	33.900.000	20 Dokumen	9.000.000	12 Dokumen	600.000	- Dokumen	5.400.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***12 Dokumen***	***6.000.000***	***60,00%***	***66,67%***	***102 Buah***	***39.900.000***	***102,00%***	***106,40%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buah	37.500.000	65 Buah	25.040.000	20 Dokumen	9.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***- Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***65 Buah***	***25.040.000***	***65,00%***	***66,77%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Dokumen	91.200.000	33 Dokumen	58.102.500	20 Eksemplar	14.760.000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	***- Eksemplar***	-	***0,00%***	***0,00%***	***33 Dokumen***	***58.102.500***	***66,00%***	***63,71%***	DINAS KESEHATAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat daerah	600 Buku	825.000.000	410 Buku	543.640.250	120 Eksemplar	38.975.000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	7 Eksemplar	5.625.000	- Eksemplar	-	***7 Eksemplar***	***5.625.000***	***5,83%***	***14,43%***	***417 Buku***	***549.265.250***	***69,50%***	***66,58%***	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**272.709.697.065**		**282.938.654.662**		**58.951.013.696**		**15.616.925.482**		**10.354.882.892**		###########		###########	- -	***53.047.628.653***		***89,99%***	- -	***335.986.283.315***		***123,20%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	70 Bulan	227.309.097.065	66 Bulan	236.809.954.662	12 Bulan	58.618.103.696	3 Bulan	15.584.825.482	3 Bulan	10.332.042.892	3 Bulan	14.870.689.576	3 Bulan	12.026.260.703	***12 Bulan***	***52.813.818.653***	***100,00%***	***90,10%***	***78 Bulan***	***289.623.773.315***	***111,43%***	***127,41%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan Tugas ASN	3271 orang	44.064.300.000	3195 orang	44.911.060.000	639 orang	50.200.000	213 orang	7.560.000	0 orang	6.480.000	106 orang	14.940.000	267 orang	11.520.000	***586 orang***	***40.500.000***	***91,71%***	***80,68%***	***3.781 orang***	***44.951.560.000***	***115,59%***	***102,01%***	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	37 kali	1.276.850.000	30 kali	1.181.970.000	12 Dokumen	273.110.000	3 Dokumen	24.540.000	- Dokumen	16.360.000	3 Dokumen	53.970.000	6 Dokumen	98.440.000	***12 Dokumen***	***193.310.000***	***100,00%***	***70,78%***	***42 kali***	***1.375.280.000***	***113,51%***	***107,71%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Paket	59.450.000	3 Paket	35.670.000	1 Paket	9.600.000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	***- Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Paket***	***35.670.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**		**793.430.000**		**618.533.000**		**51.700.000**		-		**-**		**-**		**1.880.000**	- -	***1.880.000***		***3,64%***	- -	***620.413.000***		***78,19%***	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1500 Stel	326.750.000	1200 Stel	261.400.000	0 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		***- Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***1.200 Stel***	***261.400.000***	***80,00%***	***80,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas	195 Orang	466.680.000	142 Orang	357.133.000	10 Orang	51.700.000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	1 Orang	1.880.000	***1 Orang***	***1.880.000***	***10,00%***	***3,64%***	***143 Orang***	***359.013.000***	***73,33%***	***76,93%***	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**14.969.419.040**		**11.605.283.965**		**2.182.618.500**		**49.046.100**		**719.779.675**		**21.143.355**		**558.565.310**	- -	***1.348.534.440***		***61,79%***	- -	***12.953.818.405***		***86,54%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	25 Item	34.897.500	18 Item	27.818.000	5 Item	8.045.000	0 Item	-	- Item	-	0 Item	-	- Item	-	***- Item***	-	***0,00%***	***0,00%***	***18 Item***	***27.818.000***	***72,00%***	***79,71%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Item	341.853.750	22 Item	347.672.250	10 Unit	35.000.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***22 Item***	***347.672.250***	***88,00%***	***101,70%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	35 Unit	115.920.600	26 Unit	78.023.360	7 Unit	15.978.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***26 Unit***	***78.023.360***	***74,29%***	***67,31%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rutin kantor	65 Kegiatan	2.099.058.500	55 Kegiatan	1.616.422.050	10 Paket	446.975.000	1 Paket	40.256.100	- Paket	134.719.750	4 Paket	8.624.600	- Paket	8.318.000	***5 Paket***	***191.918.450***	***50,00%***	***42,94%***	***60 Kegiatan***	***1.808.340.500***	***92,31%***	***86,15%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan Rutin kantor	500 Dokumen	4.546.153.750	400 Dokumen	4.212.115.350	100 Paket	1.261.360.400	2 Paket	8.790.000	38 Paket	481.960.500	0 Paket	5.280.000	39 Paket	500.589.900	***79 Paket***	***996.620.400***	***79,00%***	***79,01%***	***479 Dokumen***	***5.208.735.750***	***95,80%***	***114,57%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat Tulis kantor dan bahan material lainnya untuk keperluan rutin kantor	1000 Item	567.507.940	735 Item	506.119.564	200 Item	93.585.100	0 Item	-	- Item	86.637.425	50 Item	1.000.000	150 Item	350.000	***200 Item***	***87.987.425***	***100,00%***	***94,02%***	***935 Item***	***594.106.989***	***93,50%***	***104,69%***	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	3155 perjalanan	7.035.690.000	2243 perjalanan	4.661.163.391	631 Kali	308.705.000	0 Kali	-	30 Kali	16.462.000	40 Kali	6.238.755	- Kali	49.307.410	***70 Kali***	***72.008.165***	***11,09%***	***23,33%***	***2.313 perjalanan***	***4.733.171.556***	***73,31%***	***67,27%***	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pertemuan ASPAK	10 Kali	228.337.000	12 Kali	155.950.000	Aplikasi 20	12.970.000	Aplikasi 0	-	Aplikasi -	-	0 Aplikasi	-	- Aplikasi	-	- *Aplikasi*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kali*	*155.950.000*	*120,00%*	*68,30%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**10.235.750.000**		**19.786.469.876**		-		**125.042.608**		-		-		-	-	*125.042.608*		*#DIV/0!*	- -	*19.911.512.484*		*194,53%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	3.493.500.000	19 Unit	2.780.800.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*19 Unit*	*2.780.800.000*	*76,00%*	*79,60%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja, kursi lemari dan mebel lainnya	385 Unit	359.000.000	255 Unit	283.850.000	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*255 Unit*	*283.850.000*	*66,23%*	*79,07%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan USG Puskesmas	30 Unit	6.383.250.000	30 Unit	16.721.819.876	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Unit*	*16.721.819.876*	*100,00%*	*261,96%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**7.960.526.225**		**6.462.131.031**		**1.066.350.000**		**50.946.304**		**282.989.073**		**104.434.051**		**390.780.075**		*829.149.503*		*77,76%*	- -	*7.291.280.534*		*91,59%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 Bulan	7.023.026.225	60 Bulan	5.662.011.031	Bulan 12	1.066.350.000	Bulan 3	50.946.304	Bulan 3	282.989.073	2 Bulan	104.434.051	4 Bulan	390.780.075	*12 Bulan*	*829.149.503*	*100,00%*	*77,76%*	*72 Bulan*	*6.491.160.534*	*120,00%*	*92,43%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor PSC-119	25 Unit	487.500.000	17 Unit	377.720.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*17 Unit*	*377.720.000*	*68,00%*	*77,48%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Operasional Mobil Combad Covid-19	5 Paket	450.000.000	5 Paket	422.400.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*5 Paket*	*422.400.000*	*100,00%*	*93,87%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**13.727.961.000**		**10.687.577.236**		**647.656.200**		**23.150.000**		**96.850.000**		**93.149.020**		**129.834.000**	- -	*342.983.020*		*52,96%*	- -	*11.030.560.256*		*80,35%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	115 Unit	3.447.266.000	107 Unit	2.637.543.236	Unit 23	366.837.200	Unit 3	23.150.000	Unit 2	53.200.000	2 Unit	63.446.020	4 Unit	-	*11 Unit*	*139.796.020*	*47,83%*	*38,11%*	*118 Unit*	*2.777.339.256*	*102,61%*	*80,57%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan baik	85 Unit	225.600.000	76 Unit	156.660.000	Unit 17	33.220.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*76 Unit*	*156.660.000*	*89,41%*	*69,44%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	20 Unit	10.055.095.000	17 Unit	7.893.374.000	Unit 4	247.599.000	Unit 0	-	Unit 2	43.650.000	0 Unit	29.703.000	2 Unit	129.834.000	*4 Unit*	*203.187.000*	*100,00%*	*82,06%*	*21 Unit*	*8.096.561.000*	*105,00%*	*80,52%*	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD**		**575.300.000**		**51.973.700.627**		**35.345.674.125**		**-**		**-**		**-**		**-**	- -	*-*		*0,00%*	- -	*51.973.700.627*		*100,0%*	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	10 Item	575.300.000	10 Item	51.973.700.627	Puskesmas 24	35.345.674.125	Puskesmas 0	-	Puskesmas -	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	- *Puskesmas*	-	*0,00%*	*0,00%*	*10 Item*	*51.973.700.627*	*100,00%*	*100,0%*	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan Medical Check up**		**30.000.000**		**19.300.100**		**6.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	- -	*-*		*0,00%*	- -	*19.300.100*		*64,33%*	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan	15 Orang	30.000.000	12 Orang	19.300.100	Orang 3	6.000.000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Orang*	*19.300.100*	*80,00%*	*64,33%*	DINAS KESEHATAN
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Anggota DPRD Mendapatkan Pelayanan Medical Check Up**		**730.500.000**		**467.472.800**		**136.320.000**		**-**		**-**		**-**		**5.049.500**	- -	*5.049.500*		*3,70%*	- -	*472.522.300*		*64,68%*	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up	235 Orang	730.500.000	242 Orang	467.472.800	Orang 47	136.320.000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	5 Orang	5.049.500	*5 Orang*	*5.049.500*	*10,64%*	*3,70%*	*247 Orang*	*472.522.300*	*105,11%*	*64,68%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**11,55**	**16,10**	**4,00**	**11,64**	**10,50**	**15,39**	**23,16**	**13,42**	**49,21**	**56,55**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**								
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk**	**200 %**	**309.397.003.150**	**74,81 %**	**299.834.760.504**	**% 100**	**53.978.996.233**	**% 0,72**	**5.015.830.284**	**% 0,76**	**3.419.214.584**	**% 1,65**	###########	**% 8,37**	###########	*11,50 %*	*36.651.158.445*	*11,50%*	*67,90%*	*86,31 %*	*336.485.918.949*	*43,16%*	*108,76%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**		**71.200.590.210**		**77.246.043.046**		**20.160.561.525**		**2.098.706.584**		**2.794.279.234**		**8.133.720.347**		**5.087.510.930**	- -	*18.114.217.095*		*89,85%*	- -	*95.360.260.141*		*133,93%*	DINAS KESEHATAN
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik	20 Unit	7.549.922.000	17 Unit	5.874.950.200	Unit 4	1.312.722.880	Unit 0	-	Unit 1	49.800.000	3 Unit	1.125.856.800	- Unit	-	*4 Unit*	*1.175.656.800*	*100,00%*	*89,56%*	*21 Unit*	*7.050.607.000*	*105,00%*	*93,39%*	DINAS KESEHATAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan	20 Item	34.344.911.500	15 Item	29.616.070.617	Item		Item		Item		Item		Item	- *Item*	-	*0,00%*	*0,00%*	*15 Item*	*29.616.070.617*	*75,00%*	*86,23%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	50 Unit	1.523.369.500	42 Unit	9.561.545.181	Unit 10	4.730.801.267	Unit 0	-	Unit -	-	5 Unit	2.753.873.413	5 Unit	1.788.681.106	*10 Unit*	*4.542.554.519*	*100,00%*	*96,02%*	*52 Unit*	*14.104.099.700*	*104,00%*	*925,85%*	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	200 item	24.732.412.210	200 item	25.800.547.689	40 Paket	9.796.014.779	15 Paket	-	20 Paket	2.744.479.234	5 Paket	3.817.910.952	- Paket	2.999.974.020	***40 Paket***	***9.562.364.206***	***100,00%***	***97,61%***	***240 item***	***35.362.911.895***	***120,00%***	***142,98%***	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang diadakan	50 Item	3.049.975.000	47 Item	6.392.929.359	10 Item	4.321.022.599	0 Item	2.098.706.584	1 Item	-	0 Item	436.079.182	4 Item	298.855.804	***5 Item***	***2.833.641.570***	***50,00%***	***65,58%***	***52 Item***	***9.226.570.929***	***104,00%***	***302,51%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat tingkat daerah**		**237.464.818.940**		**222.080.715.958**		**33.328.939.708**		**2.509.845.200**		**621.935.350**		**5.256.970.100**		**9.728.312.200**	- -	***18.117.062.850***		***54,36%***	- -	***240.197.778.808***		***101,15%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Puskesmas yang memenuhi target dalam cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	500 Persen	5.324.375.000	370 Persen	4.441.965.600	100 Persen	2.143.080.000	0 Persen	-	- Persen	-	53,05 Persen	236.398.700	- Persen	82.727.000	***53 Persen***	***319.125.700***	***53,05%***	***14,89%***	***423 Persen***	***4.761.091.300***	***84,61%***	***89,42%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang menggunakan pembiayaan jaminan persalinan	6900 Bulin	7.040.470.000	5014 Bulin	5.321.390.356	1.079 Bulin	175.660.000	0 Bulin	-	- Bulin	-	0 Bulin	-	500 Bulin	86.900.000	***500 Bulin***	***86.900.000***	***46,34%***	***49,47%***	***5.514 Bulin***	***5.408.290.356***	***79,91%***	***76,82%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah nakes yang mendapat orientasi tentang MTBS dan MTBM	240 Tenaga Kesehatan	215.125.000	144 Tenaga Kesehatan	129.075.000	48 Tenaga Kesehatan	110.000.000	0 Tenaga Kesehata	-	- Tenaga Kesehatan	-	0 Tenaga Kesehatan	-	48 Tenaga Kesehatan	71.275.400	***48 Tenaga Kesehatan***	***71.275.400***	***100,00%***	***64,80%***	***192 Tenaga Kesehatan***	***200.350.400***	***80,00%***	***93,13%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Petugas Puskesmas yang dibina pelayanan SDIDTK	240 Tenaga Kesehatan	80.425.000	144 Tenaga Kesehatan	48.255.000	24 Puskesmas	637.280.000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	- ***Puskesmas***	-	***0,00%***	***0,00%***	***144 Tenaga Kesehatan***	***48.255.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah petugas puskesmas yang mendapat orientasi tata laksana pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar terintegrasi	240 Tenaga Kesehatan	99.650.000	144 Tenaga Kesehatan	59.790.000	48 Tenaga Kesehatan	861.596.000	0 Tenaga Kesehatan	-	- Tenaga Kesehatan	-	0 Tenaga Kesehatan	-	- Tenaga Kesehatan	-	- ***Tenaga Kesehatan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***144 Tenaga Kesehatan***	***59.790.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase puskesmas yang meningkatkan pelayanan pada usia produktif	500 Persen	139.825.000	300 Persen	83.895.000	100 Persen	38.070.000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	- Persen	-	- ***Persen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***300 Persen***	***83.895.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah nakes mengikuti sosialisasi care giver berkualitas dan jumlah kartu lansia tanggamus yang di cetak	30000 Lembar	1.070.250.000	23000 Lembar	1.899.148.700	6000 Lembar	166.220.000	0 Lembar	-	- Lembar	-	0 Lembar	-	- Lembar	-	- ***Lembar***	-	***0,00%***	***0,00%***	***23.000 Lembar***	***1.899.148.700***	***76,67%***	***177,45%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Petugas Puskesmas yang dibina deteksi dini faktor resiko hipertensi	500 Persen	98.550.000	370 Persen	75.963.900	0 Persen	-	Persen		Persen		Persen		Persen		- ***Persen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***370 Persen***	***75.963.900***	***74,00%***	***77,08%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase petugas puskesmas yang dibina deteksi dini faktor resiko Diabetes Melitus	500 Persen	78.275.000	310 Persen	48.870.750	100 Persen	1.925.000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	- Persen	-	- ***Persen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***310 Persen***	***48.870.750***	***62,00%***	***62,43%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Puskesmas yang memenuhi target cakupan pelayanan orang terduga TB	500 Persen	99.375.000	300 Persen	59.625.000	100 Persen	1.145.260.900	0 Persen	-	- Persen	-	35,17 Persen	3.592.400	55,08 Persen	-	***90 Persen***	***3.592.400***	***90,25%***	***0,31%***	***390 Persen***	***63.217.400***	***78,05%***	***63,61%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Puskesmas yang memenuhi target cakupan pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai standar	500 Persen	99.375.000	300 Persen	59.625.000	100 Persen	40.445.000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	3.306.500	86,80 Persen	-	***87 Persen***	***3.306.500***	***86,80%***	***8,18%***	***387 Persen***	***62.931.500***	***77,36%***	***63,33%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase spesimen kasus penyakit potensial wabah/KLB yang dikirim	500 Persen	171.750.000	330 Persen	108.130.000	100 Persen	273.180.000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	- Persen	-	- ***Persen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***330 Persen***	***108.130.000***	***66,00%***	***62,96%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan	500 Persen	341.140.000	473 Persen	7.811.149.115	100 Persen	57.155.800	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	- Persen	-	- ***Persen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***473 Persen***	***7.811.149.115***	***94,60%***	***100,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga pelaksana gizi Puskesmas yang mendapatkan pembinaan	120 Orang	123.500.000	96 Orang	4.926.429.600	24 Orang	591.120.000	0 Orang	-	12 Org	14.100.000	0 Orang	26.700.000	- Orang	26.400.000	***12 Orang***	***67.200.000***	***50,00%***	***11,37%***	***108 Orang***	***4.993.629.600***	***90,00%***	***100,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah petugas Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	120 Puskesmas	278.625.000	72 Puskesmas	167.175.000	24 Puskesmas	19.890.000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	- ***Puskesmas***	-	***0,00%***	***0,00%***	***72 Puskesmas***	***167.175.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah petugas Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan Kesehatan	120 Puskesmas	401.850.000	120 Puskesmas	951.348.825	24 Puskesmas	924.793.200	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	15.450.000	12 Puskesmas	20.550.000	12 Puskesmas	-	***24 Puskesmas***	***36.000.000***	***100,00%***	***3,89%***	***144 Puskesmas***	***987.348.825***	***120,00%***	***245,70%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah SBH, KPM (Kader Pembangunan Manusia), Ponpes, dan Sekolah yang menerapkan promosi	100 Sekolah	1.528.575.000	140 Sekolah	4.370.795.502	20 Dokumen	3.693.260.308	1 Dokumen	9.845.200	9 Dokumen	459.064.550	0 Dokumen	29.922.400	10 Dokumen	211.117.200	***20 Dokumen***	***709.949.350***	***100,00%***	***19,22%***	***160 Sekolah***	***5.080.744.852***	***160,00%***	***332,38%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya yang mendapatkan pembinaan	120 Fasyankes	183.200.000	96 Fasyankes	114.864.500	24 Fasyankes	35.750.000	0 Fasyankes	-	- Fasyankes	-	0 Fasyankes	-	- Fasyankes	-	- ***Fasyankes***	-	***0,00%***	***0,00%***	***96 Fasyankes***	***114.864.500***	***80,00%***	***62,70%***	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Petugas Kesehatan yang dilatih tentang Sistem Kewspadaan Dini Dan Respon serta penanggulangan KLB/Wabah	360 Orang	155.500.000	312 Orang	377.404.000	24 Orang	2.062.220.000	0 Orang	-	12 Org	49.710.000	0 Orang	63.150.000	Orang	72.900.000	***12 Orang***	***185.760.000***	***50,00%***	***9,01%***	***324 Orang***	***563.164.000***	***90,00%***	***362,16%***	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	16
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Petugas Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan jiwa	500 Persen	250.300.000	300 Persen	150.180.000	Persen 100	32.420.000	Persen 0	-	Persen -	-	0 Persen	-	- Persen	-	- Persen	-	0,00%	0,00%	300 Persen	150.180.000	60,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase CJH mendapatkan pelayanan kesehatan haji tahap 1,lanjutan dan vaksinasi meningitis meningococus	500 %	838.450.000	315 %	533.413.200	% 100	303.145.000	% 0	-	% -	1.410.000	25,00 %	-	- %	-	25 %	1.410.000	25,00%	0,47%	340 %	534.823.200	68,00%	63,79%	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Puskesmas yang di bina dalam pelayanan penyakit menular dan tidak menular	120 Puskesmas	426.600.000	96 Puskesmas	262.560.000	24 Puskesmas	2.651.543.000	0 Puskesmas	-	12 Puskesmas	81.750.000	0 Puskesmas	109.200.000	6 Puskesmas	192.640.000	18 Puskesmas	383.590.000	75,00%	14,47%	114 Puskesmas	646.150.000	95,00%	151,47%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD)	120 Puskesmas	74.792.856.500	120 Puskesmas	69.575.670.700	24 Puskesmas	16.011.473.500	24 Puskesmas	2.500.000.000	- Puskesmas	450.800	0 Puskesmas	4.685.750.100	- Puskesmas	8.825.272.600	24 Puskesmas	16.011.473.500	100,00%	100,00%	144 Puskesmas	85.587.144.200	120,00%	114,43%	DINAS KESEHATAN
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase spesimen kasus penyakit potensial wabah/KLB yang dikirim	500 Persen	492.950.000	315 Persen	311.250.000	Persen 100	35.640.000	Persen 0	-	Persen -	-	0,00 Persen	-	- Persen	-	- Persen	0,00%	0,00%	315 Persen	311.250.000	63,00%	63,14%	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Forum Kab/Kota Sehat	5 Kelompok	494.800.000	3 Kelompok	296.880.000	Forum 0	-	Forum		Forum		Forum		Forum		- Forum	-	0,00%	0,00%	3 Kelompok	296.880.000	60,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan telemedicine	500 Persen	269.650.000	300 Persen	161.790.000	Persen 100	42.630.000	Persen 0	-	Persen -	-	0,00 Persen	-	- Persen	-	- Persen	0,00%	0,00%	300 Persen	161.790.000	60,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana bantuan operasional puskesmas	120 Puskesmas	132.799.016.780	120 Puskesmas	103.551.182.206	24 Puskesmas	702.504.000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	- Puskesmas	0,00%	0,00%	120 Puskesmas	103.551.182.206	100,00%	77,98%	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi puskesmas	120 Puskesmas	8.348.573.010	96 Puskesmas	5.680.941.666	24 Puskesmas	274.558.000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	8 Puskesmas	78.400.000	16 Puskesmas	159.080.000	24 Puskesmas	237.480.000	100,00%	86,50%	120 Puskesmas	5.918.421.666	100,00%	70,89%	DINAS KESEHATAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase KIPI yang dilakukan pelacakan dan penanganan kurang dari 24 jam	500 %	496.975.000	310 %	305.418.000	% 100	121.790.000	% 0	-	% -	-	0,00 %	-	- %	-	- %	0,00%	0,00%	310 %	305.418.000	62,00%	61,46%	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase kejadian/kasus potensial wabah yang dilakukan PE dan enanggulangan kurang dari 24	500 Persen	724.812.650	400 Persen	10.196.529.338	Persen 100	176.330.000	Persen 0	-	Persen -	-	0,00 Persen	-	- Persen	-	- Persen	0,00%	0,00%	400 Persen	10.196.529.338	80,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Presentase kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah**		**731.594.000**		**508.001.500**		**489.495.000**		**407.278.500**		**3.000.000**		**6.000.000**		**3.600.000**	- -	*419.878.500*		*85,78%*	- -	*927.880.000*		*126,83%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menggunakan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	24 Puskesmas	2.298.000	Puskesmas		24 Puskesmas	2.298.000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	-	-	0,00%	0,00%	- Puskesmas	-	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menggunakan Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SIKDA	120 Puskesmas	727.100.000	96 Puskesmas	508.001.500	24 Puskesmas	485.001.000	24 Puskesmas	407.278.500	- Puskesmas	3.000.000	0 Puskesmas	6.000.000	- Puskesmas	3.600.000	24 Puskesmas	419.878.500	100,00%	86,57%	120 Puskesmas	927.880.000	100,00%	127,61%	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	24 Puskesmas	2.196.000	Puskesmas		24 Puskesmas	2.196.000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0,00%	0,00%	- Puskesmas	-	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
											Rata-rata capaian kinerja (%)								*3,13*	*40,44*						
											Predikat kinerja								SR	SR						
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	**200 %**	**853.145.000**	**70,37 %**	**30.378.263.065**	**% 100**	**16.354.273.004**	**% 0,00**		**% 54,17**	**313.955.696**	**% 0,00**	**8.135.747.304**	**% 45,83**	**2.971.688.874**	*100 %*	*11.421.391.874*	*10000%*	*69,84%*	*170,37 %*	*41.799.654.939*	*85,19%*	*100,00%*	DINAS KESEHATAN
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Praktik tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin**		**166.900.000**		**100.140.000**		-		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*100.140.000*		*60,00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan sosialisasi perizinan	120 Orang	166.900.000	72 Orang	100.140.000	Orang 0	-	Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*72 Orang*	*100.140.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS KESEHATAN
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar**		**127.300.000**		**30.242.756.065**		**11.835.300.000**				**15.610.196**		**7.671.714.804**		**2.377.725.000**	- -	*10.065.050.000*		*85,04%*	- -	*40.307.806.065*		*100,00%*	DINAS KESEHATAN
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	288 Orang	127.300.000	240 Orang	30.242.756.065	Orang 48	11.835.300.000	Orang 0	-	Orang 48	15.610.196	0 Orang	7.671.714.804	- Orang	2.377.725.000	*48 Orang*	*10.065.050.000*	*100,00%*	*85,04%*	*288 Orang*	*40.307.806.065*	*100,00%*	*100,00%*	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peserta yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan perkesmas**		**558.945.000**		**35.367.000**		**4.518.973.004**		-		**298.345.500**		**464.032.500**		**593.963.874**	- -	***1.356.341.874***		***30,01%***	- -	***1.391.708.874***		***248,99%***	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	240 Orang	558.945.000	144 Orang	35.367.000	Orang 48	4.518.973.004	Orang 0	-	Orang 4	298.345.500	0 Orang	464.032.500	44 Orang	593.963.874	***48 Orang***	***1.356.341.874***	***100,00%***	***30,01%***	***192 Orang***	***1.391.708.874***	***80,00%***	***248,99%***	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**54,17**	**1,92**	-	**49,75**	**45,83**	**18,17**	***100,00***	***69,84***						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**						
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan Yang Berizin Serta Produksi Pangan Pada P-IRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) Yang Bersertifikat**	**200 %**	**3.010.920.000**	**60,08 %**	**2.398.389.700**	**% 100**	**457.296.000**	**% 0,00**	-	**% 39,69**	**16.860.000**	**% 7,93**	**205.217.600**	**% 31,74**	**145.846.400**	***79,36 %***	***367.924.000***	***79,36%***	***80,46%***	***139,44 %***	***2.766.313.700***	***69,72%***	***91,88%***	DINAS KESEHATAN
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase jumlah Penertiban Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**2.602.920.000**		**2.153.589.700**		**410.496.000**		-		**16.860.000**		**205.217.600**		**145.846.400**	- -	***367.924.000***		***89,63%***	- -	***2.521.513.700***		***96,87%***	DINAS KESEHATAN
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapatkan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	500 Persen	2.602.920.000	320 Persen	2.153.589.700	Persen 100	410.496.000	Persen 0	-	Persen 41,67	16.860.000	8,33 Persen	205.217.600	33,33 Persen	145.846.400	***83,33 Persen***	***367.924.000***	***83,33%***	***89,63%***	***403 Persen***	***2.521.513.700***	***80,67%***	***96,87%***	DINAS KESEHATAN
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Presentase Jumlah Penertiban Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**		**174.000.000**		**104.400.000**		-		-		-		-		-	- -	-		***0,00%***	- -	***104.400.000***		***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	25000 Stiker	174.000.000	15000 Stiker	104.400.000	Stiker		Stiker		Stiker		Stiker		- ***Stiker***	-	***0,00%***	***0,00%***	***15.000 Stiker***	***104.400.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Pemeriksa dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makan dan minuman Industri Rumah Tangga**		**234.000.000**		**140.400.000**		**46.800.000**		-		-		-		-	- -	-		***0,00%***	- -	***140.400.000***		***60,00%***	DINAS KESEHATAN
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	25 Item	234.000.000	15 Item	140.400.000	Item 5	46.800.000	0 Item	-	Item -	-	0 Item	-	- Item	-	- ***Item***	-	***0,00%***	***0,00%***	***15 Item***	***140.400.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**39,69**	**3,69**	**7,93**	**44,88**	**31,74**	**31,89**	***79,36***	***80,46***						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Kader Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan**	**200 %**	**16.516.475.000**	**80,38 %**	**16.500.587.100**	**% 100**	**535.398.325**	**% 99,80**	**138.758.325**	**% 0,00**	**1.910.000**	**% 0,02**	**75.000.000**	**% 0,02**	-	***99,84 %***	***215.668.325***	***99,84%***	***40,28%***	***180,22 %***	***16.716.255.425***	***90,11%***	***101,21%***	DINAS KESEHATAN
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lomba- lomba dan kebijakan kesehatan tingkat kabupaten yang disusun**		**97.975.000**		**218.785.000**		**34.000.000**		-		-		-		-	- -	-		***0,00%***	- -	***218.785.000***		***223,31%***	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lomba-Lomb yang diikuti	35 Event	97.975.000	26 Event	218.785.000	Event 6	34.000.000	0 Event	-	- Event	-	0 Event	-	- Event	-	- ***Event***	-	***0,00%***	***0,00%***	***26 Event***	***218.785.000***	***74,29%***	***223,31%***	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		**398.425.000**		**246.505.250**		**355.000.000**		-		-		**75.000.000**		-	-	***75.000.000***		***21,13%***	-	***321.505.250***		***80,69%***	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah event kegiaatan promosi kesehatan dan Germas yang dilaksanakan	30 Event	398.425.000	19 Event	246.505.250	4 Event	355.000.000	0 Event	-	- Event	-	1 Event	75.000.000	1 Event	-	***2 Event***	***75.000.000***	***50,00%***	***21,13%***	***21 Event***	***321.505.250***	***70,00%***	***80,69%***	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**		**16.020.075.000**		**16.035.296.850**		**146.398.325**		**138.758.325**		**1.910.000**		-		-	***140.668.325***		***96,09%***	-	***16.175.965.175***		***100,97%***	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader kesehatan yang mendapatkan intensif dalam setahun	24415 Kader	16.020.075.000	19632 Kader	16.035.296.850	4.883 Dokumen	146.398.325	4883 Dokumen	138.758.325	- Dokumen	1.910.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***4.883 Dokumen***	***140.668.325***	***100,00%***	***96,09%***	***24.515 Kader***	***16.175.965.175***	***100,41%***	***100,97%***	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**99,80**	**25,92**	**0,00**	**0,36**	**0,02**	**14,01**	**0,02**	-	***99,84***	***40,28***						
										Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**						
3			**RSUD BATIN MANGUNANG**			-																					
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-																					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**195.601.825.715**	**49,73 %**	**181.104.211.408**	**% 100**	**42.122.679.483**	**% 0,01**	**3.670.512.080**	**% 6,22**	**9.169.941.626**	**% 0,68**	**9.488.628.367**	**% 60,65**	###########	***67,56 %***	***35.847.778.685***	***67,56%***	***85,10%***	***117,29 %***	***216.951.990.093***	***58,64%***	***110,92%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Menjadi Acuan Dalam Meningkatkan Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja**		**601.906.000**		**417.477.800**		**14.124.500**		-		-		**7.257.400**		**414.000**	-	***7.671.400***		***54,31%***	-	***425.149.200***		***70,63%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	450 Buku	406.251.000	380 Buku	285.726.800	90 Buku	5.777.500	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	3.331.200	90 Buku	-	***90 Buku***	***3.331.200***	***100,00%***	***57,66%***	***470 Buku***	***289.058.000***	***104,44%***	***71,15%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	600 Eksemplar Dokumen	45.400.000	520 Eksemplar Dokumen	30.540.000	120 Eksemplar Dokumen	1.800.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	60 Eksemplar Dokumen	1.800.000	60 Eksemplar Dokumen	-	***120 Eksemplar Dokumen***	***1.800.000***	***100,00%***	***100,00%***	***640 Eksemplar Dokumen***	***32.340.000***	***106,67%***	***71,23%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600 Eksemplar Dokumen	45.400.000	585 Eksemplar Dokumen	31.740.000	120 Eksemplar Dokumen	1.800.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	60 Eksemplar Dokumen	1.346.200	60 Eksemplar Dokumen	-	***120 Eksemplar Dokumen***	***1.346.200***	***100,00%***	***74,79%***	***705 Eksemplar Dokumen***	***33.086.200***	***117,50%***	***72,88%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	150 Eksemplar Dokumen	6.000.000	90 Eksemplar Dokumen	3.600.000	30 Eksemplar Dokumen	540.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***90 Eksemplar Dokumen***	***3.600.000***	***60,00%***	***60,00%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	150 Eksemplar Dokumen	6.000.000	110 Eksemplar Dokumen	4.140.000	25 Eksemplar Dokumen	540.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***110 Eksemplar Dokumen***	***4.140.000***	***73,33%***	***69,00%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	125 Eksemplar Dokumen	39.110.000	96 Eksemplar Dokumen	27.834.000	50 Eksemplar Dokumen	1.440.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokumen	414.000	***50 Eksemplar Dokumen***	***414.000***	***100,00%***	***28,75%***	***146 Eksemplar Dokumen***	***28.248.000***	***116,80%***	***72,23%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	250 Eksemplar Dokumen	53.745.000	175 Eksemplar Dokumen	33.897.000	50 Eksemplar Dokumen	2.227.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	780.000	38 Eksemplar Dokumen	-	***50 Eksemplar Dokumen***	***780.000***	***100,00%***	***35,02%***	***225 Eksemplar Dokumen***	***34.677.000***	***90,00%***	***64,52%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan RSUD Batin Mangunang**		**87.838.866.715**		**86.314.590.654**		**13.669.840.795**		**3.158.131.442**		**3.461.580.214**		**3.612.773.396**		**3.125.609.804**	-	***13.358.094.856***		***97,72%***	-	***99.672.685.510***		***113,47%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	69.791.967.715	60 Bulan	68.090.734.654	12 Bulan	13.535.675.995	3 Bulan	3.158.131.442	3 Bulan	3.432.842.114	3 Bulan	3.592.123.396	3 Bulan	3.125.609.804	***12 Bulan***	***13.308.706.756***	***100,00%***	***98,32%***	***72 Bulan***	***81.399.441.410***	***120,00%***	***116,63%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	975 Orang	17.224.500.000	970 Orang	17.526.125.000	7 Orang	1.867.200	0 Orang	-	- Orang	498.100	5 Orang	-	2 Orang	-	***7 Orang***	***498.100***	***100,00%***	***26,68%***	***977 Orang***	***17.526.623.100***	***100,21%***	***101,75%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60 Kali	697.200.000	60 Kali	612.480.000	12 Kali	128.550.000	0 Kali	-	- Kali	28.240.000	3 Kali	20.650.000	3 Kali	-	***12 Kali***	***48.890.000***	***100,00%***	***38,03%***	***72 Kali***	***661.370.000***	***120,00%***	***94,86%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200 Buku	47.739.000	153 Buku	31.513.200	40 Buku	287.800	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	-	***0,00%***	***0,00%***	***153 Buku***	***31.513.200***	***76,50%***	***66,01%***	RSUD BATIN MANGUNANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	75 Eksemplar Dokumen	77.460.000	67 Eksemplar Dokumen	53.737.800	15 Eksemplar Dokumen	3.459.800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***67*** *Eksemplar Dokumen*	***53.737.800***	***89,33%***	***69,37%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**920.850.000**		**683.508.000**		**6.415.400**		-		-		-		-	- -	-		***0,00%***	- -	***683.508.000***		***74,23%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1236 Stel	721.800.000	842 Stel	551.638.000	394 Stel	1.500.000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	- Stel	-	- ***Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***842*** *Stel*	***551.638.000***	***68,12%***	***76,43%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas	50 Orang	199.050.000	31 Orang	131.870.000	10 Orang	4.915.400	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***31*** *Orang*	***131.870.000***	***62,00%***	***66,25%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum RSUD Batin Mangunang**		**5.316.680.000**		**4.140.147.446**		**110.747.550**		-		**6.300.000**		**16.990.900**		-	- -	***23.290.900***		***21,03%***	- -	***4.163.438.346***		***78,31%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1481 Unit	154.750.000	1245 Unit	126.505.000	373 Unit	10.480.000	0 Unit	-	- Unit	-	186 Unit	10.440.000	187 Unit	-	***373 Unit***	***10.440.000***	***100,00%***	***99,62%***	***1.618*** *Unit*	***136.945.000***	***109,25%***	***88,49%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Unit	835.245.000	43 Unit	758.449.700	12 Unit	262.500	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***43*** *Unit*	***758.449.700***	***71,67%***	***90,81%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	335 Unit	164.500.000	158 Unit	148.750.000	67 Unit	1.450.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***158*** *Unit*	***148.750.000***	***47,16%***	***90,43%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	20510 Porsi	477.270.000	4421 Porsi	341.951.300	4102 Porsi	31.115.000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	2.000.000	264 Porsi	-	***264 Porsi***	***2.000.000***	***6,44%***	***6,43%***	***4.685*** *Porsi*	***343.951.300***	***22,84%***	***72,07%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Kantor	##### Eksemplar	855.138.500	#### Eksemplar	774.327.146	246750 Eksemplar	7.616.000	0 Eksemplar	-	15965 Eksemplar	4.740.000	1307 Eksemplar	600.000	##### Eksemplar	-	***173.020 Eksemplar***	***5.340.000***	***70,12%***	***70,12%***	###### *Eksemplar*	***779.667.146***	***66,77%***	***91,17%***	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Kantor	27250 Buah	1.048.231.000	20840 Buah	848.287.100	5450 Buah	49.162.300	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	-	- Buah	-	- ***Buah***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20.840*** *Buah*	***848.287.100***	***76,48%***	***80,93%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	962 Kali	1.781.545.500	466 Kali	1.141.877.200	192 Kali	10.661.750	0 Kali	-	4 Kali	1.560.000	56 Kali	3.950.900	39 Kali	-	***99 Kali***	***5.510.900***	***51,56%***	***51,69%***	***565*** *Kali*	***1.147.388.100***	***58,73%***	***64,40%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**168.000.000**		**110.800.000**		**12.700.000**		-		**-**		**8.755.000**		-	- -	***8.755.000***		***68,94%***	- -	***119.555.000***		***71,16%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	40 Unit	168.000.000	5 Unit	110.800.000	34 Unit	12.700.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	8.755.000	34 Unit	-	***34 Unit***	***8.755.000***	***100,00%***	***68,94%***	***39*** *Unit*	***119.555.000***	***97,50%***	***71,16%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**15.267.576.000**		**13.441.483.419**		**3.095.481.800**		**512.380.638**		**750.209.444**		**671.848.302**		**1.003.420.176**	-	***2.937.858.560***		***94,91%***	-	***16.379.341.979***		***107,28%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Persentase Jasa Surat Menyurat	500 %	135.210.000	#### %	113.310.000	100 %	7.786.000	0 %	-	32,68 %	2.946.000	0,00 %	968.000	17,32 %	-	***50,0 %***	***3.914.000***	***50,00%***	***50,27%***	***471*** *%*	***117.224.000***	***94,17%***	***86,70%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	60 Kali	3.423.600.000	60 Kali	3.132.898.325	12 Kali	922.542.000	3 Kali	157.415.842	3 Kali	209.766.250	3 Kali	133.618.108	3 Kali	293.490.584	***12 Kali***	***794.290.784***	***100,00%***	***86,10%***	***72*** *Kali*	***3.927.189.109***	***120,00%***	***114,71%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520 Kali/Unit	345.000.000	353 Kali	240.125.000	105 Kali	13.830.000	0 Kali	-	10 Kali	3.140.000	32 Kali	4.815.000	18 Kali	-	***60 Kali***	***7.955.000***	***57,14%***	***57,52%***	***413*** *Kali*	***248.080.000***	***0,00%***	***71,91%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Pelayanan Umum Kantor	500 %	11.363.766.000	483 %	9.955.150.094	100 %	2.151.323.800	16,42 %	354.964.796	24,73 %	534.357.194	33,85 %	532.447.194	25,00 %	709.929.592	***100 %***	***2.131.698.776***	***100,00%***	***99,09%***	***583*** *%*	***12.086.848.870***	***116,67%***	***106,36%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD Batin Mangunang**		**2.987.947.000**		**2.088.709.100**		**792.258.450**		-		**29.285.000**		**394.726.500**		-	- -	***424.011.500***		***53,52%***	-	***2.512.720.600***		***84,10%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	225 Unit	2.101.122.000	225 Unit	1.437.294.100	22 Unit	166.741.400	0 Unit	-	3 Unit	29.285.000	1 Unit	99.012.000	18 Unit	-	***22 Unit***	***128.297.000***	***100,00%***	***76,94%***	***247*** *Unit*	***1.565.591.100***	***109,78%***	***74,51%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	25 Unit	886.825.000	4 Unit	651.415.000	4 Unit	625.517.050	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	295.714.500	4 Unit	-	***4 Unit***	***295.714.500***	***100,00%***	***47,28%***	***8*** *Unit*	***947.129.500***	***32,00%***	***106,80%***	RSUD BATIN MANGUNANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD dengan Baik		**82.500.000.000**		**73.907.494.989**		**24.421.110.988**		-		**4.922.566.968**		**4.776.276.869**		**9.389.252.632**	- -	***19.088.096.469***		***78,16%***	- -	***92.995.591.458***		***112,72%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60 Kali	82.500.000.000	48 Kali	73.907.494.989	12 Kali	24.421.110.988	0 Kali	-	4 Kali	4.922.566.968	5 Kali	4.776.276.869	3 Kali	9.389.252.632	***12 Kali***	***19.088.096.469***	***100,00%***	***78,16%***	***60 Kali***	***92.995.591.458***	***100,00%***	***112,72%***	RSUD BATIN MANGUNANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,01**	**8,71**	**6,22**	**21,77**	**0,68**	**22,53**	**60,65**	**32,09**	***67,56***	***85,10***							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SD**	**T**							
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk**	**200 %**	**25.346.904.000**	**83,69 %**	**35.854.606.581**	**100 %**	**15.593.145.919**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	**121.557.900**	**2,70 %**	**413.423.271**	**96,49 %**	############	***99,19 %***	***14.995.478.401***	***99,19%***	***96,17%***	***182,87 %***	***50.850.084.982***	***91,44%***	***200,62%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan di RSUD Batin Mangunang**		**17.737.554.000**		**29.974.123.920**		**15.265.494.719**		-		-		**400.529.580**		############	- -	***14.807.130.760***		***97,00%***	- -	***44.781.254.680***		***252,47%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	25 Unit	5.282.889.500	19 Unit	3.572.231.100	5 Unit	46.114.600	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	34.780.000	***5 Unit***	***34.780.000***	***100,00%***	***75,42%***	***24 Unit***	***3.607.011.100***	***96,00%***	***68,28%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	10 Unit	99.900.000	6 Unit	59.940.000	2 Unit	6.410.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***6 Unit***	***59.940.000***	***60,00%***	***60,00%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240 Unit	12.036.264.500	165 Unit	26.117.052.820	57 Unit	15.126.742.419	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	345.896.080	57 Unit	14.371.821.180	***57 Unit***	***14.717.717.260***	***100,00%***	***97,30%***	***222 Unit***	***40.834.770.080***	***92,50%***	***339,26%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	130 Unit	318.500.000	64 Unit	224.900.000	26 Unit	86.227.700	0 Unit	-	- Unit	-	7 Unit	54.633.500	19 Unit	-	***26 Unit***	***54.633.500***	***100,00%***	***63,36%***	***90 Unit***	***279.533.500***	***69,23%***	***87,77%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan di RSUD Batin Mangunang**		**7.076.063.500**		**5.454.835.411**		**256.762.600**		-		**52.950.900**		**12.893.691**		**53.896.050**	- -	***119.740.641***		***46,63%***	- -	***5.574.576.052***		***78,78%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	4.378.538.000	4 Dokumen	3.710.871.881	1 Dokumen	217.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	37.950.900	1 Dokumen	-	- Dokumen	53.896.050	***1 Dokumen***	***91.846.950***	***100,00%***	***42,33%***	***5 Dokumen***	***3.802.718.831***	***100,00%***	***86,85%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Kali	204.875.000	4 Kali	132.925.000	1 Kali	15.000.000	0 Kali	-	- Kali	15.000.000	1 Kali	-	- Kali	-	***1 Kali***	***15.000.000***	***100,00%***	***100,00%***	***5 Kali***	***147.925.000***	***100,00%***	***72,20%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	400.101.000	4 Dokumen	251.954.400	1 Dokumen	3.541.200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Dokumen***	***251.954.400***	***80,00%***	***62,97%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1545 Dokumen/ Unit	327.018.500	1384 Dokumen	299.765.530	276 Dokumen	21.221.400	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	12.893.691	276 Dokumen	-	***276 Dokumen***	***12.893.691***	***100,00%***	***60,76%***	***1.660 Dokumen***	***312.659.221***	***107,44%***	***95,61%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Kesehatan di RSUD Batin Mangunang	65 Pokja	1.765.531.000	48 Pokja	1.059.318.600	0 Pokja	-	Pokja		Pokja		Pokja		Pokja		- ***Pokja***	-	***0,00%***	***0,00%***	***48 Pokja***	***1.059.318.600***	***73,85%***	***60,00%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**533.286.500**		**425.647.250**		**70.888.600**		-		**68.607.000**		-		-	- -	***68.607.000***		***96,78%***	- -	***494.254.250***		***92,68%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen	533.286.500	5 Dokumen	425.647.250	1 Dokumen	70.888.600	0 Dokumen	-	- Dokumen	68.607.000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***68.607.000***	***100,00%***	***96,78%***	***6 Dokumen***	***494.254.250***	***120,00%***	***92,68%***	RSUD BATIN MANGUNANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**0,78**	**2,70**	**2,65**	**96,49**	**92,74**	***99,19***	***96,17***							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya**	**200 %**	**21.302.874.545**	**70,91 %**	**16.260.425.425**	**100 %**	**4.223.857.409**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	**310.375.000**	**0,00 %**	**2.774.406.231**	**9,09 %**	**927.725.000**	***9,09 %***	***4.012.506.231***	***9,09%***	***95,00%***	***80,00 %***	***20.272.931.656***	***40,00%***	***95,17%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**		**21.110.174.545**		**16.132.805.425**		**4.222.034.909**		-		**310.375.000**		**2.774.406.231**		**927.725.000**	- -	***4.012.506.231***		***95,04%***	- -	***20.145.311.656***		***95,43%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	5 Dokumen	21.110.174.545	4 Dokumen	16.132.805.425	1 Dokumen	4.222.034.909	0 Dokumen	-	- Dokumen	310.375.000	0 Dokumen	2.774.406.231	1 Dokumen	927.725.000	***1 Dokumen***	***4.012.506.231***	***100,00%***	***95,04%***	***5 Dokumen***	***20.145.311.656***	***100,00%***	***95,43%***	RSUD BATIN MANGUNANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pengembangan dan Peningkatan Teknis SDM Kesehatan di RSUD Batin Mangunang**		**192.700.000**		**127.620.000**		**1.822.500**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**		**127.620.000**		**66,23%**	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM (Fungsional) di RSUD Batin Mangunang	50 Orang	192.700.000	35 Orang	127.620.000	Orang 10	1.822.500	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	**0,00%**	**0,00%**	*35 Orang*	**127.620.000**	**70,00%**	**66,23%**	RSUD BATIN MANGUNANG
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-		**7,35**	-	**65,68**	**9,09**	**21,96**	**9,09**		**95,00**						
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**		**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SD**	**SR**		**ST**						
4			**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**			-		-																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		-																			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-		-																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**86.120.480.405**	**71,45 %**	**76.058.033.511**	**% 100**	**14.848.496.028**	**% 11,34**	**3.032.648.882**	**% 7,22**	**4.070.434.368**	**% 67,27**	**3.802.630.823**	**% 8,51**	**2.722.449.433**	***94,33 %***	***13.628.163.506***	***94,33%***	***91,78%***	***165,78 %***	***89.686.197.017***	***82,89%***	***104,14%***	DINAS PUPR
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**2.013.547.000**		**1.500.632.500**		**186.752.904**		**11.140.000**		**38.337.104**		**7.940.000**		**14.290.200**	- -	***71.707.304***		***38,40%***	- -	***1.572.339.804***		***78,09%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	125.000.000	20 Dokumen	132.311.000	4 Dokumen	47.151.504	1 Dokumen	10.800.000	1 Dokumen	18.831.504	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	-	*4 Dokumen*	***36.831.504***	***100,00%***	***78,11%***	*24 Dokumen*	***169.142.504***	***120,00%***	***135,31%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	253.209.000	8 Dokumen	223.490.200	2 Dokumen	25.440.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	19.105.600	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	***19.105.600***	***100,00%***	***75,10%***	*10 Dokumen*	***242.595.800***	***100,00%***	***95,81%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	10 Dokumen	241.710.000	8 Dokumen	197.298.000	2 Dokumen	19.440.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	14.290.200	*2 Dokumen*	***14.690.200***	***100,00%***	***75,57%***	*10 Dokumen*	***211.988.200***	***100,00%***	***87,70%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	10 Dokumen	90.142.500	8 Dokumen	74.113.600	2 Dokumen	4.440.000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	200.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	***200.000***	***100,00%***	***4,50%***	*10 Dokumen*	***74.313.600***	***100,00%***	***82,44%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	10 Dokumen	89.683.500	8 Dokumen	61.394.300	2 Dokumen	4.440.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	***0,00%***	***0,00%***	*8 Dokumen*	***61.394.300***	***80,00%***	***68,46%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Pemerintah Daerah yang disusun	40 Dokumen	223.802.000	32 Dokumen	152.151.900	8 Dokumen	20.711.400	2 Dokumen	340.000	- Dokumen	-	4 Dokumen	540.000	2 Dokumen	-	*8 Dokumen*	***880.000***	***100,00%***	***4,25%***	*40 Dokumen*	***153.031.900***	***100,00%***	***68,38%***	DINAS PUPR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	30 Dokumen	990.000.000	26 Dokumen	659.873.500	4 Dokumen	65.130.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	-	*4 Dokumen*	-	***100,00%***	***0,00%***	*30 Dokumen*	***659.873.500***	***100,00%***	***66,65%***	DINAS PUPR
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**57.214.228.355**		**54.722.603.792**		**10.196.753.024**		**2.363.579.206**		**3.250.343.673**		**1.862.479.207**		**2.298.692.206**	- -	***9.775.094.292***		***95,86%***	- -	***64.497.698.084***		***112,73%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	41.515.253.355	66 Bulan	39.629.252.792	12 Bulan	7.114.103.024	3 Bulan	1.678.959.206	3 Bulan	2.237.113.673	3 Bulan	1.476.479.207	3 Bulan	1.511.992.206	*12 Bulan*	***6.904.544.292***	***100,00%***	***97,05%***	*78 Bulan*	***46.533.797.084***	***111,43%***	***112,09%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	60 Bulan	12.126.600.000	48 Bulan	11.724.960.000	12 Bulan	2.407.800.000	3 Bulan	579.000.000	3 Bulan	772.000.000	3 Bulan	386.000.000	3 Bulan	575.300.000	*12 Bulan*	***2.312.300.000***	***100,00%***	***96,03%***	*60 Bulan*	***14.037.260.000***	***100,00%***	***115,76%***	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd yang disusun	60 Bulan	3.572.375.000	60 Bulan	3.368.391.000	12 Bulan	674.850.000	3 Bulan	105.620.000	3 Bulan	241.230.000	3 Bulan	-	3 Bulan	211.400.000	*12 Bulan*	***558.250.000***	***100,00%***	***82,72%***	*72 Bulan*	***3.926.641.000***	***120,00%***	***109,92%***	DINAS PUPR
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Pekerjaan Umum danPerumahan**		**642.375.000**		**423.585.000**		**32.040.000**		**680.000**		**1.360.000**		**30.000.000**		-	- -	***32.040.000***		***100,00%***	- -	***455.625.000***		***70,93%***	DINAS PUPR
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	25 Orang	642.375.000	18 Orang	423.585.000	Orang 1	32.040.000	Orang 0	680.000	Orang 1	1.360.000	0 Orang	30.000.000	- Orang	-	*1 Orang*	***32.040.000***	***100,00%***	***100,00%***	*19 Orang*	***455.625.000***	***76,00%***	***70,93%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**8.604.526.550**		**6.700.533.235**		**1.249.710.100**		**301.906.498**		**393.159.925**		**175.736.229**		**167.341.740**	- -	***1.038.144.392***		***83,07%***	- -	***7.738.677.627***		***89,94%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	2.278.936.950	50 Unit	1.777.509.550	Unit 8	538.663.500	Unit 3	58.971.200	Unit -	273.006.500	3 Unit	-	2 Unit	103.072.972	***8 Unit***	***435.050.672***	***100,00%***	***80,76%***	***58 Unit***	***2.212.560.222***	***96,67%***	***97,09%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	1.138.750.000	48 Bulan	985.416.000	Bulan 12	170.250.000	Bulan 3	46.269.500	Bulan -	69.472.000	6 Bulan	12.870.000	3 Bulan	35.732.500	***12 Bulan***	***164.344.000***	***100,00%***	***96,53%***	***60 Bulan***	***1.149.760.000***	***100,00%***	***100,97%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	558.693.000	48 Bulan	533.174.300	Bulan 12	115.158.800	Bulan 3	99.004.800	Bulan 3	1.360.000	3 Bulan	-	3 Bulan	14.794.000	***12 Bulan***	***115.158.800***	***100,00%***	***100,00%***	***60 Bulan***	***648.333.100***	***100,00%***	***116,04%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	479.071.600	48 Bulan	456.582.560	Bulan 12	62.041.800	Bulan 3	48.263.800	Bulan 3	11.738.000	3 Bulan	-	3 Bulan	340.000	***12 Bulan***	***60.341.800***	***100,00%***	***97,26%***	***60 Bulan***	***516.924.360***	***100,00%***	***107,90%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi urusan pemerintah daerah	60 Bulan	4.149.075.000	48 Bulan	2.947.850.825	Bulan 12	363.596.000	Bulan 3	49.397.198	Bulan -	37.583.425	4 Bulan	162.866.229	5 Bulan	13.402.268	***12 Bulan***	***263.249.120***	***100,00%***	***72,40%***	***60 Bulan***	***3.211.099.945***	***100,00%***	***77,39%***	DINAS PUPR
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**3.628.400.000**		**1.337.040.000**		**1.400.300.000**		**-**		**-**		**1.240.425.000**		**-**	- -	***1.240.425.000***		***88,58%***	- -	***2.577.465.000***		***71,04%***	DINAS PUPR
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	10 Unit	2.228.400.000	6 Unit	1.337.040.000	Unit 3	300.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***6 Unit***	***1.337.040.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PUPR
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	100 %	1.400.000.000	%		% 100	1.400.000.000	% 0	-	% -	-	100 %	1.240.425.000	- %	-	***100 %***	***1.240.425.000***	***100,00%***	***88,60%***	***100 %***	***1.240.425.000***	***100,00%***	***88,60%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**5.390.603.500**		**4.599.200.006**		**1.143.485.000**		**128.482.778**		**175.134.813**		**486.050.387**		**119.307.595**	- -	***908.975.573***		***79,49%***	- -	***5.508.175.579***		***102,18%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD	60 Bulan	410.880.000	48 Bulan	292.928.000	Bulan 12	50.400.000	Bulan 3	8.100.000	Bulan -	18.900.000	6 Bulan	-	- Bulan	4.050.000	***9 Bulan***	***31.050.000***	***75,00%***	***61,61%***	***57 Bulan***	***323.978.000***	***95,00%***	***78,85%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	1.312.575.000	48 Bulan	1.276.019.206	Bulan 12	379.365.000	Bulan 3	66.339.778	Bulan -	67.871.313	6 Bulan	65.973.387	- Bulan	66.316.595	***9 Bulan***	***266.501.073***	***75,00%***	***70,25%***	***57 Bulan***	***1.542.520.279***	***95,00%***	***117,52%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pameran dan Expo Hasil Pembangunan SKPD	20 Kali	3.667.148.500	16 Kali	3.030.252.800	Kali 4	713.720.000	Kali 1	54.043.000	Kali -	88.363.500	2 Kali	420.077.000	- Kali	48.941.000	***3 Kali***	***611.424.500***	***75,00%***	***85,67%***	***19 Kali***	***3.641.677.300***	***95,00%***	***99,31%***	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**8.626.800.000**		**6.774.438.978**		**639.455.000**		**226.860.400**		**212.098.853**		**-**		**122.817.692**	- -	***561.776.945***		***87,85%***	- -	***7.336.215.923***		***85,04%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor yang dipelihara	360 Unit	4.313.400.000	292 Unit	4.156.468.478	Unit 40	538.880.000	Unit 10	226.860.400	Unit -	122.800.853	20 Unit	-	- Unit	112.895.692	***30 Unit***	***462.556.945***	***75,00%***	***85,84%***	***322 Unit***	***4.619.025.423***	***89,44%***	***107,09%***	DINAS PUPR
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500 %	4.313.400.000	300 %	2.617.970.500	% 100	100.575.000	% 0	-	% 10	89.298.000	90 %	-	- %	9.922.000	***100 %***	***99.220.000***	***100,00%***	***98,65%***	***400 %***	***2.717.190.500***	***80,00%***	***62,99%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**11,34**	**20,42**	**7,22**	**27,41**	**67,27**	**25,61**	**8,51**	**18,33**	**94,33**	**91,78**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**200 %**	**304.914.414.330**	**70,24 %**	**240.161.821.860**	**% 100**	**19.725.650.615**	**% 6,19**	**3.116.913.300**	**% 0,00**	**-**	**0,94 %**	**4.791.002.285**	**8,58 %**	**1.492.271.000**	***15,71 %***	***9.400.186.585***	***15,71%***	***47,65%***	***85,94 %***	***249.562.008.445***	***42,97%***	***81,85%***	DINAS PUPR
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**		**46.895.759.895**		**36.709.089.637**		**6.103.585.209**		**2.360.000**		**-**		**-**		**-**	-	***2.360.000***		***0,04%***	-	***36.711.449.637***		***78,28%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5 Dokumen	924.300.000	4 Dokumen	572.179.500	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	***- Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Dokumen***	***572.179.500***	***80,00%***	***61,90%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Penyusunan Rencana Air Tanah dan Air Baku	5 Dokumen	1.024.300.000	5 Dokumen	623.400.200	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	***- Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***5 Dokumen***	***623.400.200***	***100,00%***	***60,86%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Drainase dan Pengaman Pantai	5 Dokumen	1.303.900.000	5 Dokumen	791.966.700	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	***- Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***5 Dokumen***	***791.966.700***	***100,00%***	***60,74%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan SDA WS Kab.Tanggamus	5 Dokumen	2.495.100.000	4 Dokumen	2.570.280.100	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- Dokumen	-	0,00%	0,00%	4 Dokumen	2.570.280.100	80,00%	103,01%	DINAS PUPR
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Persentase Perkuatan Tebing	500 %	39.269.527.395	400 %	31.024.083.637	% 100	5.938.428.709	5,00 %	2.360.000	- %	-	20,00 %	-	- %	-	25,00 %	2.360.000	25,00%	0,04%	425 %	31.026.443.637	85,00%	79,01%	DINAS PUPR
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A) dan GP3A	15 Kali	1.878.632.500	9 Kali	1.127.179.500	Kali 3	165.156.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0,00%	0,00%	9 Kali	1.127.179.500	60,00%	60,00%	DINAS PUPR
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha**		**258.018.654.435**		**203.452.732.223**		**13.622.065.406**		**3.114.553.300**		-		**4.791.002.285**		**1.492.271.000**	- -	9.397.826.585		68,99%	- -	212.850.558.808	0,00%	82,49%	DINAS PUPR
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Persentase Pembangunan Infrastruktur Irigasi yang menggunakan	500 %	20.503.938.525	400 %	18.859.731.619	%		%		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	400 %	18.859.731.619	80,00%	91,98%	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	500 %	226.486.402.910	400 %	175.189.885.466	%		%		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	400 %	175.189.885.466	80,00%	77,35%	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	30 Hibah Unit	7.175.000.000	24 Hibah Unit	5.640.000.000	Hibah Unit		Hibah Unit		Hibah Unit		Hibah Unit		HibahUnit		- Hibah Unit	-	0,00%	0,00%	24 Hibah Unit	5.640.000.000	80,00%	78,61%	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Rehabilitas Jaringan Irigasi Kabupaten	12500 M2	1.450.000.000	8610 M2	1.834.408.038	M2 2000	13.433.595.006	M2 125	3.114.303.300	M2 -	-	0 M2	4.791.002.285	175 M2	1.492.271.000	300 M2	9.397.576.585	15,00%	69,96%	8.910 M2	11.231.984.623	71,28%	774,62%	DINAS PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Perawatan Jaringan irigasi Kabupaten	150 Daerah Irigasi	2.403.313.000	123 Daerah Irigasi	1.928.707.100	Daerah 30 Irigasi	188.470.400	Daerah 2 Irigasi	250.000	Daerah - Irigasi	-	0 Daerah Irigasi	-	8 Daerah Irigasi	-	10 Daerah	250.000	33,33%	0,13%	133 Daerah	1.928.957.100	88,67%	80,26%	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**6,19**		**15,80**	**-**	**-**	**0,94**	**24,29**	**8,58**	**7,57**	*15,71*	*47,65*					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten**	**200 %**	**90.862.303.000**	**80,19 %**	**74.155.413.780**	**% 100**	**1.486.480.000**	**% 5,00**	-	**% 0,00**	**74.297.000**	**% 61,67**	**648.255.100**	**% 0,00**	**710.518.100**	*66,67 %*	*1.433.070.200*	*66,67%*	*96,41%*	*147 %*	*75.588.483.980*	*73,43%*	*83,19%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan KK Beraksses Sanitasi Baik**		**90.862.303.000**		**74.155.413.780**		**1.486.480.000**		-		**74.297.000**		**648.255.100**		**710.518.100**	- -	*1.433.070.200*		*96,41%*	- -	*75.588.483.980*		*83,19%*	DINAS PUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih	4250 Unit	17.324.461.000	3409 Unit	11.547.188.879	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0,00%	0,00%	3.409 Unit	11.547.188.879	80,21%	66,65%	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Persentase Tersedianya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	200 %	1.587.163.000	100 %	100.683.000	% 100	1.486.480.000	% 5	-	% -	74.297.000	61,67 %	648.255.100	- %	710.518.100	*66,67 %*	*1.433.070.200*	*66,67%*	*96,41%*	*167 %*	*1.533.753.200*	*83,34%*	*96,63%*	DINAS PUPR
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Jaringan Air Minum yang menggunakan Dana DAK	6000 Unit	71.950.679.000	4871 Unit	62.507.541.901	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0,00%	0,00%	4.871 Unit	62.507.541.901	81,18%	86,88%	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**5,00**		**-**	**-**	**5,00**	**61,67**	**43,61**	**-**	**47,80**	*66,67*	*96,41*					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**ST**					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten**	**200 %**	**79.668.740.000**	**76,00 %**	**64.650.681.550**	**% 100**	**1.610.081.000**	**% 10,00**	**199.764.000**	**% 0,00**	**324.583.500**	**% 56,67**	**1.780.000**	**% 0,00**	**956.491.000**	*66,67 %*	*1.482.618.500*	*66,67%*	*92,08%*	*143 %*	*66.133.300.050*	*71,34%*	*83,01%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan KK Beraksses Sanitasi Baik**		**79.668.740.000**		**64.650.681.550**		**1.610.081.000**		**199.764.000**		**324.583.500**		**1.780.000**		**956.491.000**	- -	*1.482.618.500*		*92,08%*	- -	*66.133.300.050*		*83,01%*	DINAS PUPR
			Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Sanitasi/Sistem PengelolaanAir Limbah)	550 Unit	12.407.925.000	440 Unit	9.203.297.200	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0,00%	0,00%	440 Unit	9.203.297.200	80,00%	74,17%	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Tersedianya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200 %	1.709.831.000	100 %	99.750.000	% 100	1.610.081.000	% 10	199.764.000	% -	324.583.500	56,67 %	1.780.000	- %	956.491.000	*66,67 %*	*1.482.618.500*	*66,67%*	*92,08%*	*167 %*	*1.582.368.500*	*83,34%*	*92,55%*	DINAS PUPR
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Sistem Air Limbah yang menggunakan Dana DAK	750 KK	65.550.984.000	600 KK	55.347.634.350	KK		KK		KK		KK		KK		- KK	-	0,00%	0,00%	600 KK	55.347.634.350	80,00%	84,43%	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
				Rata-rata capaian kinerja (%)							10,00	12,41	-	20,16	56,67	0,11	-	59,41	66,67	92,08							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	R	SD	ST							
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Percentase Pembangunan,Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	200 %	47.772.293.590	61,00 %	83.401.038.262	% 100	20.215.400.332	% 90,00	17.524.438.440	% 0,00	-	% 10,00	-	% 0,00	2.064.710.800	*100,00 %*	*19.589.149.240*	*100,00%*	*96,90%*	*161,00 %*	*102.990.187.502*	*80,50%*	*215,59%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan Daerah Genangan Banjir		47.772.293.590		83.401.038.262		20.215.400.332		17.524.438.440		-		-		2.064.710.800	- -	*19.589.149.240*		*96,90%*	- -	*102.990.187.502*		*215,59%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Pembangunan Talud/Bronjong/Saluran Drainase dan Gorong- gorong	5000 Meter	47.772.293.590	3050 Meter	83.401.038.262	Meter 1000	20.215.400.332	Meter 900	17.524.438.440	Meter -	-	100 Meter	-	- Meter	2.064.710.800	*1.000 Meter*	*19.589.149.240*	*100,00%*	*96,90%*	*4.050 Meter*	*102.990.187.502*	*81,00%*	*215,59%*	DINAS PUPR
				Rata-rata capaian kinerja (%)							90,00	86,69	-	-	10,00	-	-	10,21	100,00	96,90							
				Predikat kinerja							T	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Percentase Pembangunan dan Pengembangan Permukiman**	**200 %**	**261.757.110.005**	**79,72 %**	**216.361.203.479**	**100 %**	**36.665.723.422**	**5,00 %**	**7.930.000**	**0,00 %**	**218.277.000**	**16,25 %**	**-**	**0,00 %**	**2.302.408.598**	***21,25 %***	***2.528.615.598***	***21,25%***	***6,90%***	***100,98 %***	***218.889.819.077***	***50,49%***	***83,62%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		**261.757.110.005**		**216.361.203.479**		**36.665.723.422**		**7.930.000**	-	**218.277.000**		**-**		**2.302.408.598**	***- -***	***2.528.615.598***		***6,90%***	***- -***	***218.889.819.077***		***83,62%***	DINAS PUPR
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Infrastruktur Permukiman	##### Meter	247.513.638.505	#### Meter	200.640.644.253	Meter 29.000	36.665.723.422	Meter 1.450	7.930.000	Meter -	218.277.000	4.713 Meter	-	- Meter	2.302.408.598	***6.163 Meter***	***2.528.615.598***	***21,25%***	***6,90%***	***###### Meter***	***203.169.259.851***	***83,98%***	***82,08%***	DINAS PUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman	1375 M	14.243.471.500	1090 M	15.720.559.226	M		M		M		M		M		***- M***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***1.090 M***	***15.720.559.226***	***79,27%***	***110,37%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5,00**	**0,02**	**-**	**0,60**	**16,25**	**-**	**-**	**6,28**	**21,25**	**6,90**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Percentase Bangunan Gedung Kabupaten**	**200 %**	**68.986.129.620**	**78,86 %**	**55.913.094.773**	**100 %**	**8.325.349.600**	**5,03 %**	**294.419.800**	**0,00 %**	**740.401.300**	**20,00 %**	**730.233.500**	**0,00 %**	**690.805.800**	***25,03 %***	***2.455.860.400***	***25,03%***	***29,50%***	***103,89 %***	***58.368.955.173***	***51,94%***	***84,61%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Percentase Bangunan Gedung Kabupaten**		**68.986.129.620**		**55.913.094.773**		**8.325.349.600**		**294.419.800**		**740.401.300**		**730.233.500**		**690.805.800**	***- -***	***2.455.860.400***		***29,50%***	***- -***	***58.368.955.173***		***84,61%***	DINAS PUPR
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah	8750 M2	68.986.129.620	6900 M2	55.913.094.773	M2 1.750	8.325.349.600	M2 88	294.419.800	M2 -	740.401.300	350 M2	730.233.500	- M2	690.805.800	***438 M2***	***2.455.860.400***	***25,03%***	***29,50%***	***7.338 M2***	***58.368.955.173***	***83,86%***	***84,61%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5,03**	**3,54**	**-**	**8,89**	**20,00**	**8,77**	**-**	**8,30**	**25,03**	**29,50**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten**	**200 %**	**22.269.581.995**	**#### %**	**15.036.312.797**	**100 %**	**920.137.600**	**14,29 %**	**2.910.000**	**0,00 %**	**129.932.800**	**28,57 %**	**395.125.000**	**0,00 %**	**143.562.900**	***42,86 %***	***671.530.700***	***42,86%***	***72,98%***	***302 %***	***15.707.843.497***	***150,84%***	***70,53%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan Penataan Bangunan dan Lingkungannya**		**22.269.581.995**		**15.036.312.797**		**920.137.600**		**2.910.000**		**129.932.800**		**395.125.000**		**143.562.900**	***- -***	***671.530.700***		***72,98%***	***- -***	***15.707.843.497***		***70,53%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten yang disusun	14 Dokumen	3.061.902.500	72 Dokumen	2.819.886.900	Dokumen 3	685.680.000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	2 Dokumen	395.125.000	- Dokumen	99.111.900	***2 Dokumen***	***494.236.900***	***66,67%***	***72,08%***	***74 Dokumen***	***3.314.123.800***	***528,57%***	***108,24%***	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan secara	20 Dokumen	19.207.679.495	16 Dokumen	12.216.425.897	Dokumen 4	234.457.600	Dokumen 1	2.910.000	Dokumen -	129.932.800	0 Dokumen	-	- Dokumen	44.451.000	***1 Dokumen***	***177.293.800***	***25,00%***	***75,62%***	***17 Dokumen***	***12.393.719.697***	***85,00%***	***64,52%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**14,29**	**0,32**	**-**	**14,12**	**28,57**	**42,94**	**-**	**15,60**	**42,86**	**72,98**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)**	**200 %**	**466.846.015.540**	**74,20 %**	**345.914.976.067**	**100 %**	**69.652.164.824**	**9,43 %**	**6.814.045.249**	**0,00 %**	**1.934.455.900**	**17,14 %**	**8.541.930.000**	**0,00 %**	**5.169.224.230**	***26,57 %***	***22.459.655.379***	***26,57%***	***32,25%***	***100,77 %***	***368.374.631.446***	***50,39%***	***78,91%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Infrastruktur Jalan Kabupaten Kondisi Baik Jalan Kabupaten**		**466.846.015.540**		**345.914.976.067**		**69.652.164.824**		**6.814.045.249**		**1.934.455.900**		**8.541.930.000**		**5.169.224.230**	***- -***	***22.459.655.379***		***32,25%***	***- -***	***368.374.631.446***		***78,91%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Penyusunan Rencana Telnis Sistem Pengembangan Jalan Kab.Tanggamus	5 Dokumen	3.362.093.000	4 Dokumen	3.081.368.600	Dokumen 1	260.680.000	Dokumen 0	1.410.000	Dokumen -	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	248.836.000	***1 Dokumen***	***250.246.000***	***100,00%***	***96,00%***	***5 Dokumen***	***3.331.614.600***	***100,00%***	***99,09%***	DINAS PUPR
			Pembangunan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan Kabupaten	##### Meter	118.032.935.360	#### Meter	77.663.296.016	Meter 35000	24.430.694.091	Meter 3500	6.800.505.249	Meter -	-	3.500 Meter	8.481.480.000	Meter -	2.361.977.600	***7.000 Meter***	***17.643.962.849***	***20,00%***	***72,22%***	***###### Meter***	***95.307.258.865***	***70,82%***	***80,75%***	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jalan	Jumlah Rehabilitas Jalan Kabupaten Tanggamus	85000 Meter	83.348.814.285	65491 Meter	62.573.826.391	Meter 17000	18.906.701.835	Meter 850	5.460.000	Meter -	-	5.525 Meter	14.680.000	Meter -	1.171.429.400	***6.375 Meter***	***1.191.569.400***	***37,50%***	***6,30%***	***71.866 Meter***	***63.765.395.791***	***84,55%***	***76,50%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Melalui DAK Bidang Jalan	50000 Meter	204.063.609.040	45500 Meter	166.854.749.197	Meter		Meter		Meter		Meter		Meter		- Meter	-	0,00%	0,00%	45.500 Meter	166.854.749.197	91,00%	81,77%	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten yang dilakukan secara swakelola	32500 Meter	11.929.572.000	26200 Meter	7.797.925.700	10000 Meter	4.150.104.000	1500 Meter	2.660.000	- Meter	288.733.200	1.600 Meter	34.880.000	- Meter	341.395.930	3.100 Meter	667.669.130	31,00%	16,09%	0,02% Meter	8.465.594.830	0,00%	70,96%	DINAS PUPR
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jembatan Kabupaten	25 Unit	46.108.991.855	21 Unit	27.943.810.163	5 Unit	21.903.984.898	0 Unit	4.010.000	- Unit	1.645.722.700	0 Unit	10.890.000	1 Unit	1.045.585.300	1 Unit	2.706.208.000	20,00%	12,35%	22 Unit	30.650.018.163	88,00%	66,47%	DINAS PUPR
								Rata-rata capaian kinerja (%)			9,43		9,78	-	2,78	17,14		12,26	0,00	7,42	26,57		32,25							
								Predikat kinerja			SR		SR	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR		SR							
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus	200 %	2.260.062.500	69,16 %	1.460.770.900	100 %	379.340.000	14,00 %	3.220.000	0,00 %	99.317.000	26,00 %		0,00 %		40,00 %	102.537.000	40,00%	27,03%	109,16 %	1.563.307.900	54,58%	69,17%	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pengembangan Jasa Konstruksi		1.603.335.000		1.171.994.900		162.920.000		2.910.000		-		-		-	- -	2.910.000		1,79%	- -	1.174.904.900		73,28%	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1200 Orang	1.603.335.000	870 Orang	1.171.994.900	50 Orang	162.920.000	7 Orang	2.910.000	- Orang	-	3 Orang	-	- Orang	-	***10 Orang***	***2.910.000***	***20,00%***	***1,79%***	***880 Orang***	***1.174.904.900***	***73,33%***	***73,28%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan dan Tertib Pemanfaata Jasa Konstruksi**		**656.727.500**		**288.776.000**		**216.420.000**		**310.000**		**99.317.000**		**130.000**		-	- -	***99.757.000***		***46,09%***	- -	***388.533.000***		***59,16%***	DINAS PUPR
			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya Rehab Papan Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	30 Unit	453.307.500	19 Unit	287.016.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***19 Unit***	***287.016.000***	***63,33%***	***63,32%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	200 %	203.420.000	100 %	1.760.000	% 100	216.420.000	% 14,00	310.000	% -	99.317.000	36,00 %	130.000	- %	-	***50,00 %***	***99.757.000***	***50,00%***	***46,09%***	***150 %***	***101.517.000***	***75,00%***	***49,91%***	DINAS PUPR
											14,00	**0,85**	**-**	**26,18**	**26,00**	**-**	**-**	**-**	**40,00**	**27,03**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**	**200 %**	**12.095.460.000**	**87,50 %**	**9.579.922.510**	**100 %**	**2.832.119.000**	**0,00 %**	**92.256.000**	**0,00 %**	**538.478.286**	**50,00 %**	**1.075.376.714**	**0,00 %**	**235.125.000**	***50,00 %***	***1.941.236.000***	***50,00%***	***68,54%***	***137,50 %***	***11.521.158.510***	***68,75%***	***95,25%***	DINAS PUPR
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Wilayahnya**		**8.950.160.000**		**7.077.016.360**		**2.532.469.000**		**87.946.000**		**538.478.286**		**1.048.376.714**		**208.125.000**	- -	***1.882.926.000***		***74,35%***	- -	***8.959.942.360***		***100,11%***	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan	10 Dokumen	8.950.160.000	8 Dokumen	7.077.016.360	2 Dokumen	2.532.469.000	0 Dokumen	87.946.000	- Dokumen	538.478.286	1 Dokumen	1.048.376.714	- Dokumen	208.125.000	***1 Dokumen***	***1.882.926.000***	***50,00%***	***74,35%***	***9 Dokumen***	***8.959.942.360***	***90,00%***	***100,11%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**		**1.598.550.000**		**1.091.401.850**		**221.090.000**		**4.310.000**		**-**		**27.000.000**		**27.000.000**	- -	***58.310.000***		***26,37%***	- -	***1.149.711.850***		***71,92%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten Tanggamus	15 Kali	1.598.550.000	13 Kali	1.091.401.850	1 Kali	221.090.000	0 Kali	4.310.000	- Kali	-	1 Kali	27.000.000	- Kali	27.000.000	***1 Kali***	***58.310.000***	***100,00%***	***26,37%***	***14 Kali***	***1.149.711.850***	***93,33%***	***71,92%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sistem Informasi dan Publikasi Pemerintah Daerah**		**1.546.750.000**		**1.411.504.300**		**78.560.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**-**		***0,00%***	- -	***1.411.504.300***		***91,26%***	DINAS PUPR
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem /Teknologi Informas dan Pameran Hasil Pembangunan Pelaksaan Umum dan	15 Aplikasi	1.546.750.000	14 Aplikasi	1.411.504.300	1 Aplikasi	78.560.000	0 Aplikasi	-	- Aplikasi	-	0 Aplikasi	-	- Aplikasi	-	- ***Aplikasi***	-	***0,00%***	***0,00%***	***14 Aplikasi***	***1.411.504.300***	***93,33%***	***91,26%***	DINAS PUPR
											-	**3,26**	**-**	**19,01**	**50,00**	**37,97**	**-**	**8,30**	**50,00**	**68,54**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Luasan RTH Publik**	**200 %**	**2.906.275.000**	**50,37 %**	**1.566.111.000**	**100 %**	**1.243.080.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**32,00 %**	**589.836.100**	**0,00 %**	**442.500.000**	***32,00 %***	***1.032.336.100***	***32,00%***	***83,05%***	***82 %***	***2.598.447.100***	***41,19%***	***89,41%***	DINAS PUPR
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Pendataan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**873.875.000**		**566.111.000**		**210.680.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	- -	**-**		***0,00%***	- -	***566.111.000***		***64,78%***	DINAS PUPR
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendataan dan Verifikasi RTLH se- Kabupaten Tanggamus	5 Dokumen	365.860.000	4 Dokumen	268.776.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Dokumen***	***268.776.000***	***80,00%***	***73,46%***	DINAS PUPR
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	200 %	508.015.000	100 %	297.335.000	% 100	210.680.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***100 %***	***297.335.000***	***50,00%***	***58,53%***	DINAS PUPR
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**2.032.400.000**		**1.000.000.000**		**1.032.400.000**		**-**		**-**		**589.836.100**		**442.500.000**	- -	***1.032.336.100***		***99,99%***	- -	***2.032.336.100***		***100,00%***	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200 %	2.032.400.000	100 %	1.000.000.000	% 100	1.032.400.000	% 0	-	% -	-	64,00 %	589.836.100	- %	442.500.000	***64 %***	***1.032.336.100***	***64,00%***	***99,99%***	***164 %***	***2.032.336.100***	***82,00%***	***100,00%***	DINAS PUPR
											-	**-**	**-**	**-**	**32,00**	**47,45**	**-**	**35,60**	**32,00**	**83,05**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**						
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Percentase Pembangunan Kawasan Permukiman**	**200 %**	**43.320.460.000**	**98,95 %**	**36.282.811.630**	**100 %**	**5.170.678.000**	**0,00 %**	**-**	**13,50 %**	**3.487.705.999**	**71,31 %**	**308.596.000**	**0,00 %**	**1.182.782.000**	***84,81 %***	***4.979.083.999***	***84,81%***	***96,29%***	***184 %***	***41.261.895.629***	***91,88%***	***95,25%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**1.098.137.500**		**855.174.500**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	**855.174.500**		**77,87%**	DINAS PUPR
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	5 Dokumen	1.098.137.500	4 Dokumen	855.174.500	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4*** *Dokumen*	***855.174.500***	***80,00%***	***77,87%***	DINAS PUPR
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**42.222.322.500**		**35.427.637.130**		**5.170.678.000**		-		**3.487.705.999**		**308.596.000**		**1.182.782.000**	-	**4.979.083.999**		**96,29%**	-	***40.406.721.129***		**95,70%**	DINAS PUPR
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 Kali	27.166.655.000	4 Kali	21.516.695.500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4*** *Kali*	***21.516.695.500***	***80,00%***	***79,20%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	5 Kali	875.939.500	4 Kali	533.193.700	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4*** *Kali*	***533.193.700***	***80,00%***	***60,87%***	DINAS PUPR
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Tersedianya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	270 Unit	6.015.322.000	270 Unit	5.700.931.430	237 Unit	5.170.678.000	0 Unit	-	32 Unit	3.487.705.999	169 Unit	308.596.000	- Unit	1.182.782.000	***201 Unit***	***4.979.083.999***	***84,81%***	***96,29%***	***471*** *Unit*	***10.680.015.429***	***174,44%***	***177,55%***	DINAS PUPR
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	8.164.406.000	1 Dokumen	7.676.816.500	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***1*** *Dokumen*	***7.676.816.500***	***100,00%***	***94,03%***	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)								**84,81**	**96,29**							
											Predikat kinerja								**T**	**ST**							
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Percentase Penyelesaian Sengketa Tanah**	**200 %**	**513.327.500**	**60,00 %**	**307.996.500**		-		-		-		-		-	-	-	***0,00%***	***0,00%***	***60,00*** *%*	***307.996.500***	***30,00%***	***60,00%***	DINAS PUPR
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Kabupaten**		**513.327.500**		**307.996.500**		-		-		-		-		-	-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	***307.996.500***		***60,00%***	DINAS PUPR
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	5 Kali	513.327.500	3 Kali	307.996.500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3*** *Kali*	***307.996.500***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)								-	-							
											Predikat kinerja								**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Percentase Penanganan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**200 %**	**48.335.792.500**	**92,00 %**	**33.975.030.750**	%	-	%	-	%	-		-		-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***92,00*** *%*	***33.975.030.750***	***46,00%***	***70,29%***	DINAS PUPR
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**		**48.335.792.500**		**33.975.030.750**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***33.975.030.750***		***70,29%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus	25 Dokumen/Paket	48.335.792.500	23 Dokumen/ Paket	33.975.030.750	Dokumen/Paket		Dokumen/ Paket		Dokumen/Paket		Dokumen/Paket	- ***Dokumen/Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	***23*** *Dokumen/Paket*	***33.975.030.750***	***92,00%***	***70,29%***	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)								-	-							
											Predikat kinerja								**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Percentase Pengelolaan Tanah Kabupaten**	200 %	**2.276.792.500**	**80,00 %**	**1.552.204.400**		-		-		-		-		-	-	-	***0,00%***	***0,00%***	***80,00*** *%*	***1.552.204.400***	***40,00%***	***68,18%***	DINAS PUPR
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**		**2.276.792.500**		**1.552.204.400**		-		-		-		-		-	-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	***1.552.204.400***		***68,18%***	DINAS PUPR
			Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Penataan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun	5 Dokumen	2.276.792.500	4 Dokumen	1.552.204.400	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4*** *Dokumen*	***1.552.204.400***	***80,00%***	***68,18%***	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)								-	-							
											Predikat kinerja								**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**Percentase Inventarisir Izin Tanah Kabupaten**	200 %	**659.292.500**	**60,10 %**	**405.680.000**		-		-		-		-		-	-	-	***0,00%***	***0,00%***	***60,10*** *%*	***405.680.000***	***30,05%***	***61,53%***	DINAS PUPR
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	**Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah**		**659.292.500**		**405.680.000**		-		-		-		-		-	-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	***405.680.000***		***61,53%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pembuatan Legalistas Tanah Milik Pemkab	1000 Legalitas	659.292.500	601 Legalitas/Dokumen	405.680.000	Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		- ***Legalitas/Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***601*** *Legalitas/Dokumen*	***405.680.000***	***60,10%***	***61,53%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**										
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Percentase Penataan Tanah Kabupaten**	**200 %**	**596.942.500**	**80,00 %**	**364.715.000**		-		-		-		-			- -	-	***0,00%***	***0,00%***	***80,00*** %	***364.715.000***	***40,00%***	***61,10%***	DINAS PUPR
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penatagunaan Tanah**		**596.942.500**		**364.715.000**		-		-		-		-			- -	-	***0,00%***	***0,00%***	- -	***364.715.000***		***61,10%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Data Pertanahan	5 Dokumen	596.942.500	4 Dokumen	364.715.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4*** *Dokumen*	***364.715.000***	***80,00%***	***61,10%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**										
5			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**60.090.361.330**	**73,58 %**	**58.778.817.750**	**% 100**	**11.344.657.422**	**% 11,17**	**3.012.689.741**	**% 9,22**	-	**% 24,27**	**5.162.024.456**	**% 24,76**	**2.250.331.181**	***69,42 %***	***10.425.045.378***	***69,42%***	***91,89%***	***143,00*** %	***69.203.863.128***	***71,50%***	***115,17%***	SATPOL PP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**113.342.000**		**93.247.200**		**45.601.500**		-		-		**9.289.000**		-	-	***9.289.000***		***20,37%***	-	***102.536.200***		***90,47%***	SATPOL PP
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	40 Buku	63.092.000	29 Buku	60.965.200	8 Dokumen	29.121.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	5.430.000	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	***5.430.000***	***0,00%***	***18,65%***	***29*** *Buku*	***66.395.200***	***72,50%***	***105,24%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10 Dokumen	11.100.000	6 Dokumen	6.660.000	2 Dokumen	4.509.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***6*** *Dokumen*	***6.660.000***	***60,00%***	***60,00%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	11.100.000	7 Dokumen	7.660.000	2 Dokumen	3.861.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	3.859.000	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	***3.859.000***	***0,00%***	***99,95%***	***7*** *Dokumen*	***11.519.000***	***70,00%***	***103,77%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	2.505.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3*** *Dokumen*	***4.500.000***	***60,00%***	***60,00%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	5 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	5.632.000	1 Dokumen	2.145.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3*** *Dokumen*	***5.632.000***	***60,00%***	***75,09%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	38 Eksemplar Dokumen	3.000.000	19 Eksemplar Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	1.311.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***19*** *Eksemplar Dokumen*	***1.800.000***	***50,00%***	***60,00%***	SATPOL PP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	10.050.000	9 Eksemplar Dokumen	6.030.000	3 Dokumen	2.149.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9*** *Eksemplar Dokum*	***6.030.000***	***60,00%***	***60,00%***	SATPOL PP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**56.106.114.960**		**55.592.538.628**		**11.102.991.150**		**3.000.745.661**		-		**5.063.254.780**		**2.221.380.077**	-	***10.285.380.518***		***92,64%***	-	***65.877.919.146***		***117,42%***	SATPOL PP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	355 Orang/Bulan	31.117.854.960	237 Orang/Bulan	31.060.480.628	67 Orang/Bulan	6.064.411.150	17 Orang/Bulan	1.704.212.499	16 Orang/Bulan	-	17 Orang/Bulan	2.889.122.942	17 Orang/Bulan	1.311.155.077	***67 Orang/Bulan***	***5.904.490.518***	***100,00%***	***97,36%***	***304*** *Orang/Bulan*	***36.964.971.146***	***85,63%***	***118,79%***	SATPOL PP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	60 Bulan	24.540.300.000	48 Bulan	24.137.978.000	12 Bulan	4.942.940.000	3 Bulan	1.296.533.162	3 Bulan	-	3 Bulan	2.121.871.838	3 Bulan	880.585.000	***12 Bulan***	***4.298.990.000***	***100,00%***	***86,97%***	***60*** *Bulan*	***28.436.968.000***	***100,00%***	***115,88%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan	60 Bulan	418.200.000	48 Bulan	364.320.000	Bulan		Bulan		3 Bulan	-	Bulan		Bulan		- ***Bulan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***48*** *Bulan*	***364.320.000***	***80,00%***	***87,12%***	SATPOL PP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Bulan	29.760.000	12 Bulan	29.760.000	12 Bulan	95.640.000	0 Bulan	-	3 Bulan	-	6 Bulan	52.260.000	6 Bulan	29.640.000	***12 Bulan***	***81.900.000***	***100,00%***	***85,63%***	***24*** *Bulan*	***111.660.000***	***100,00%***	***375,20%***	SATPOL PP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**564.691.000**		**701.007.690**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***701.007.690***		***124,14%***	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja	617 Stell	252.000.000	546 Stell	513.393.090	Stell		Stell		Stell		Stell		Stell		- Stell	-	0,00%	0,00%	546 Stell	513.393.090	88,49%	203,73%	SATPOL PP
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	205 Orang	312.691.000	123 Orang	187.614.600	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0,00%	0,00%	123 Orang	187.614.600	60,00%	60,00%	SATPOL PP
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- Kegiatan	-	0,00%	0,00%	- Kegiatan	-	0,00%	0,00%	SATPOL PP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**1.056.113.870**		**869.957.572**		**41.058.772**		-		-		**20.088.100**		**184.200**	-	*20.272.300*		*49,37%*	-	*890.229.872*		*84,29%*	SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	318.797.500	48 Bulan	313.738.500	12 Bulan	1.295.000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	436.000	4 Bulan	-	*4 Bulan*	*436.000*	*33,33%*	*33,67%*	*52 Bulan*	*314.174.500*	*86,67%*	*98,55%*	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bulan	81.000.000	48 Bulan	50.679.000	12 Bulan	5.780.000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	660.000	- Bulan	-	*- Bulan*	*660.000*	*0,00%*	*11,42%*	*48 Bulan*	*51.339.000*	*80,00%*	*63,38%*	SATPOL PP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	37.500.000	48 Bulan	40.768.750	12 Bulan	11.596.800	0 Bulan	-	- Bulan	-	2 Bulan	2.160.000	9 Bulan	184.200	*11 Bulan*	*2.344.200*	*91,67%*	*20,21%*	*59 Bulan*	*43.112.950*	*98,33%*	*114,97%*	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	196.546.370	48 Bulan	159.422.822	12 Bulan	22.386.972	0 Bulan	-	- Bulan	-	6 Bulan	16.832.100	3 Bulan	-	*9 Bulan*	*16.832.100*	*75,00%*	*75,19%*	*57 Bulan*	*176.254.922*	*95,00%*	*89,68%*	SATPOL PP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsultasidan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	290 Kali	422.270.000	198 Kali	305.348.500	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	198 Kali	305.348.500	68,28%	72,31%	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**317.752.500**		**290.780.950**		**60.454.000**		**11.944.080**		-		**21.195.976**		**23.616.904**	- -	*56.756.960*		*93,88%*	- -	*347.537.910*		*109,37%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	-	Bulan	-	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	0,00%	0,00%	- Bulan	-	0,00%	0,00%	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	60 Bulan	311.752.500	47 Bulan	285.380.950	12 Bulan	59.554.000	3 Bulan	11.944.080	Bulan -	-	6 Bulan	20.520.976	2 Bulan	23.616.904	*11 Bulan*	*56.081.960*	*91,67%*	*94,17%*	*58 Bulan*	*341.462.910*	*96,67%*	*109,53%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kanto	60 Bulan	6.000.000	36 Bulan	5.400.000	12 Bulan	900.000	0 Bulan	-	- Bulan	-	3 Bulan	675.000	- Bulan	-	*3 Bulan*	*675.000*	*25,00%*	*75,00%*	*39 Bulan*	*6.075.000*	*65,00%*	*101,25%*	SATPOL PP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**2.497.038.000**		**1.932.293.400**		**94.552.000**		-		-		**48.196.600**		**5.150.000**	-	*53.346.600*		*56,42%*	-	*1.985.640.000*		*79,52%*	SATPOL PP
			PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajakKendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Asert/Inventaris Kantor	12 Bulan	32.206.000	0 Bulan	-	12 Bulan	24.512.000	0 Bulan	-	Bulan -	-	5 Bulan	14.080.000	2 Bulan	-	*7 Bulan*	*14.080.000*	*58,33%*	*57,44%*	*7 Bulan*	*14.080.000*	*58,33%*	*43,72%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Asert/Inventaris Kantor	60 Bulan	2.194.832.000	39 Bulan	1.704.293.400	12 Bulan	70.040.000	0 Bulan	-	Bulan -	-	2 Bulan	34.116.600	5 Bulan	5.150.000	*7 Bulan*	*39.266.600*	*58,33%*	*56,06%*	*46 Bulan*	*1.743.560.000*	*76,67%*	*79,44%*	SATPOL PP
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	270.000.000	36 Bulan	228.000.000	Bulan 0	-	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	0,00%	0,00%	36 Bulan	228.000.000	60,00%	84,44%	SATPOL PP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**11,17**	**26,56**	**9,22**	-	**24,27**	**45,50**	**24,76**	**19,84**	69,42	91,89						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	SD	ST						
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keteriban Umum**	**200 %**	**1.883.332.000**	**58,22 %**	**1.200.740.750**	**% 100**	**452.942.700**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**27,34 %**	**354.238.450**	**35,94 %**	**11.725.000**	*63,28 %*	*365.963.450*	*63,28%*	*80,80%*	*121,50 %*	*1.566.704.200*	*60,75%*	*83,19%*	SATPOL PP
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**1.883.332.000**		**1.200.740.750**		**452.942.700**		-		-		**354.238.450**		**11.725.000**	-	*365.963.450*		*80,80%*	-	*1.566.704.200*		*83,19%*	SATPOL PP
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase pengendalian gangguan kententraman dan ketertiban umum	55 Bulan	491.420.000	45 Bulan	245.710.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		*- Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*45 Bulan*	*245.710.000*	*81,82%*	*50,00%*	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah HUT Polisi Pamong Praja Jumlah Operasional Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset Daerah Jumlah Operasional Penertiban Pasar PKL dan	5 Kegiatan	587.375.000	4 Kegiatan	471.096.550	Kegiatan 90	89.455.000	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	17 Kegiatan	31.567.750	44 Kegiatan	11.725.000	**61 Kegiatan**	***43.292.750***	***67,78%***	***48,40%***	***65 Kegiatan***	***514.389.300***	***1300,00%***	***87,57%***	SATPOL PP
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Kantibmas Satlinmas	10 Hari	429.507.000	6 Hari	257.704.200	Hari 2	363.487.700	Hari 0	-	Hari -	-	0 Hari	322.670.700	2 Hari	-	***2 Hari***	***322.670.700***	***100,00%***	***88,77%***	***8 Hari***	***580.374.900***	***80,00%***	***135,13%***	SATPOL PP
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Operasional Korps Musik Pemda Kabupaten Tanggamus	60 Bulan	372.000.000	36 Bulan	223.200.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		***- Bulan***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***36 Bulan***	***223.200.000***	***60,00%***	***60,00%***	SATPOL PP
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum"	200 %	3.030.000	100 %	3.030.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***100 %***	***3.030.000***	***50,00%***	***100,00%***	SATPOL PP
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**178.975.000**		**123.076.500**		**60.899.900**		-		-		**24.900.250**		-	-	***24.900.250***		***40,89%***	-	***147.976.750***		***82,68%***	SATPOL PP
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasional Penertiban Pelanggaran Perda	60 Bulan	155.500.000	45 Bulan	108.658.500	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		***- Bulan***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***45 Bulan***	***108.658.500***	***75,00%***	***69,88%***	SATPOL PP
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 Kegiatan	23.475.000	12 Kegiatan	14.418.000	Kegiatan 36	60.899.900	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	18 Kegiatan	24.900.250	- Kegiatan	-	***18 Kegiatan***	***24.900.250***	***50,00%***	***40,89%***	***30 Kegiatan***	***39.318.250***	***83,33%***	***167,49%***	SATPOL PP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	**27,34**	**78,21**	**35,94**	**2,59**	**63,28**	**80,80**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**SR**	**R**	**T**							
6			**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**5.600.396.400**	**71,97 %**	**8.968.258.990**	**% 100**	**4.702.328.676**	**% 5,63**	**960.608.657**	**% 6,70**	**1.153.015.742**	**% 37,00**	**1.244.865.175**	**% 40,75**	**1.219.779.810**	***90,08 %***	***4.578.269.384***	***90,08%***	***97,36%***	***162,05 %***	***13.546.528.374***	***81,03%***	***241,89%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**37.276.000**		**61.075.100**		**26.891.300**		**2.400.000**		**7.686.000**		**6.658.900**		**4.519.400**	-	***21.264.300***		***79,08%***	-	***82.339.400***		***220,89%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	50 Buku	12.100.000	57 Buku	34.665.500	18 Dokumen	18.415.300	2 Dokumen	2.400.000	4 Dokumen	6.714.000	8 Dokumen	4.390.900	4 Dokumen	2.510.400	***18 Dokumen***	***16.015.300***	***100,00%***	***86,97%***	***75 Buku***	***50.680.800***	***150,00%***	***418,85%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	11 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	4.560.000	6 Dokumen	972.000	0 Dokumen	-	6 Dokumen	972.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***6 Dokumen***	***972.000***	***100,00%***	***100,00%***	***10 Dokumen***	***5.532.000***	***90,91%***	***122,93%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	5 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	4.560.000	1 Dokumen	2.172.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	965.000	***1 Dokumen***	***965.000***	***100,00%***	***44,43%***	***5 Dokumen***	***5.525.000***	***100,00%***	***122,78%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan DPA SKPD	5 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.660.000	1 Dokumen	1.020.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.020.000	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***1.020.000***	***100,00%***	***100,00%***	***5 Dokumen***	***4.680.000***	***100,00%***	***156,00%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan DPA Perubahan SKPD	5 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.660.000	1 Dokumen	2.020.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***- Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***4 Dokumen***	***3.660.000***	***80,00%***	***122,00%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pelaporan Keuangan SKPD Secara Berkala	500 Persen	2.250.000	400 Persen	3.246.000	Persen 100	1.248.000	Persen 0	-	Persen -	-	100 Persen	1.248.000	- Persen	-	***100 Persen***	***1.248.000***	***100,00%***	***100,00%***	***500 Persen***	***4.494.000***	***100,00%***	***199,73%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Evalusi SKPD Secara Tepat Waktu	500 Persen	7.926.000	380 Persen	6.723.600	Persen 100	1.044.000	Persen 0	-	Persen -	-	0 Persen	-	100 Persen	1.044.000	***100 Persen***	***1.044.000***	***100,00%***	***100,00%***	***480 Persen***	***7.767.600***	***96,00%***	***98,00%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**		**4.600.166.800**		**7.969.134.281**		**4.165.474.116**		**917.378.057**		**1.010.492.342**		**1.099.014.625**		**1.082.222.895**	-	***4.109.107.919***		***98,65%***	-	***12.078.242.200***		***262,56%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	135 Orang	3.508.286.800	121 Orang	4.078.555.681	Orang 27	1.542.453.516	Orang 6	350.218.057	Orang 6	439.372.342	8 Orang	371.774.625	7 Orang	353.012.295	***27 Orang***	***1.514.377.319***	***100,00%***	***98,18%***	***148 Orang***	***5.592.933.000***	***109,63%***	***159,42%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak Non- PNSD	60 Bulan	705.000.000	48 Bulan	3.618.725.000	Bulan 12	2.574.000.000	Bulan 3	558.500.000	Bulan 3	552.000.000	3 Bulan	720.000.000	3 Bulan	720.000.000	***12 Bulan***	***2.550.500.000***	***100,00%***	***99,09%***	***60 Bulan***	***6.169.225.000***	***100,00%***	***875,07%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	122.280.000	5 Dokumen	55.410.000	Dokumen 5	47.050.000	Dokumen 1	8.660.000	Dokumen 1	19.120.000	1 Dokumen	7.240.000	1 Dokumen	7.240.000	***4 Dokumen***	***42.260.000***	***80,00%***	***89,82%***	***9 Dokumen***	***97.670.000***	***90,00%***	***79,87%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Penyedian Jasa Admintrasi Keuangang	60 Bulan	264.600.000	47 Bulan	216.443.600	Bulan 12	1.970.600	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	1.970.600	***12 Bulan***	***1.970.600***	***100,00%***	***100,00%***	***59 Bulan***	***218.414.200***	***98,33%***	***82,55%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**212.174.100**		**103.879.950**		**70.371.060**		**1.190.000**		**154.000**		**45.971.100**		**970.000**	-	***48.285.100***		***68,61%***	- -	***152.165.050***		***71,72%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156 Unit	167.400.000	125 Unit	88.904.750	Paket 15	48.320.000	Paket 2	240.000	Paket 1	154.000	6 Paket	38.820.000	3 Paket	420.000	***12 Paket***	***39.634.000***	***80,00%***	***82,02%***	***137 Unit***	***128.538.750***	***87,82%***	***76,79%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	144 Porsi	1.584.000	93 Porsi	2.842.400	Porsi		Porsi		Porsi		Porsi		Porsi		- ***Porsi***	-	***0,00%***	***0,00%***	***93 Porsi***	***2.842.400***	***64,58%***	***179,44%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	30 Eksemplar/Paket	2.803.500	13 Eksemplar/Paket	1.230.800	Eksemplar/Paket		Eksemplar/Paket		Eksemplar/Paket		Eksemplar/Paket		Eksemplar/Paket	- ***Eksemplar/Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	***13 Eksemplar/Paket***	***1.230.800***	***43,33%***	***43,90%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	561 Buah/Paket	13.386.600	307 Buah/Paket	10.902.000	Paket 30	13.051.060	Paket 2	950.000	Paket -	-	6 Paket	2.651.100	2 Paket	550.000	***10 Paket***	***4.151.100***	***33,33%***	***31,81%***	***317 Buah/Paket***	***15.053.100***	***56,51%***	***112,45%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasi SKPD	20 Laporan	27.000.000	Laporan		Laporan 20	9.000.000	Laporan 0	-	Laporan -	-	3 Laporan	4.500.000	7 Laporan	-	***10 Laporan***	***4.500.000***	***50,00%***	***50,00%***	***10 Laporan***	***4.500.000***	***50,00%***	***16,67%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**263.217.500**		**187.460.059**		**13.350.000**		**1.890.600**		**1.843.400**		**1.270.550**		**8.217.515**	-	***13.222.065***		***99,04%***	-	***200.682.124***		***76,24%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	228.000.000	53 Bulan	159.997.559	Bulan 12	13.350.000	Bulan 2	1.890.600	Bulan 2	1.843.400	1 Bulan	1.270.550	6 Bulan	8.217.515	***11 Bulan***	***13.222.065***	***91,67%***	***99,04%***	***64 Bulan***	***173.219.624***	***106,67%***	***75,97%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	35.217.500	46 Bulan	27.462.500	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- ***Bulan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***46 Bulan***	***27.462.500***	***76,67%***	***77,98%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**437.562.000**		**616.709.600**		**426.242.200**		**37.750.000**		**132.840.000**		**91.950.000**		**123.850.000**	-	***386.390.000***		***90,65%***	-	***1.003.099.600***		***229,25%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan aset/inventaris kantor	60 Bulan	417.312.000	47 Bulan	598.709.600	Bulan 12	405.992.200	Bulan 3	37.750.000	Bulan 2	132.840.000	1 Bulan	91.950.000	5 Bulan	103.600.000	***11 Bulan***	***366.140.000***	***91,67%***	***90,18%***	***58 Bulan***	***964.849.600***	***96,67%***	***231,21%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara denganBaik	2 Unit	20.250.000	1 Unit	18.000.000	Unit 1	20.250.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit	20.250.000	***1 Unit***	***20.250.000***	***100,00%***	***100,00%***	***2 Unit***	***38.250.000***	***100,00%***	***188,89%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penataan Organisasi	**Tersedianya Jasa Publikasi**		**50.000.000**		**30.000.000**		-				-		-			-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	***30.000.000***		***60,00%***	DISDAMKAR & PENYELAMATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi	60 Bulan	50.000.000	36 Bulan	30.000.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*36 Bulan*	*30.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	5,63	20,43	6,70	24,52	37,00	26,47	40,75	25,94	90,08	97,36							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	ST							
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani**	**200 %**	**5.305.635.000**	**79,38 %**	**4.197.756.726**	**% 100**	**115.615.500**	**% 8,33**	**1.200.000**	**% 8,33**	**4.191.258**	**% 41,67**	**55.351.637**	**% 16,67**	**19.283.545**	*75,00 %*	*80.026.440*	*75,00%*	*69,22%*	*154,38 %*	*4.277.783.166*	*77,19%*	*80,63%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Oprasiona Pemadam Kebakaran**		**5.226.810.000**		**4.150.461.726**		**115.615.500**		**1.200.000**		**4.191.258**		**55.351.637**		**19.283.545**	-	*80.026.440*		*69,22%*	-	*4.230.488.166*		*80,94%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Oprasional Pemadam Kebakaran	60 Bulan	5.136.680.000	48 Bulan	4.085.691.726	Bulan 12	115.615.500	Bulan 1	1.200.000	Bulan 1	4.191.258	5 Bulan	55.351.637	2 Bulan	19.283.545	*9 Bulan*	*80.026.440*	*75,00%*	*69,22%*	*57 Bulan*	*4.165.718.166*	*95,00%*	*81,10%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	24 Unit	61.000.000	24 Unit	61.000.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*24 Unit*	*61.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	8 Dokumen	29.130.000	2 Dokumen	3.770.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2 Dokumen*	*3.770.000*	*25,00%*	*12,94%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Terberdayakannya Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**78.825.000**		**47.295.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*47.295.000*		*60,00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran	5 Bulan	78.825.000	3 Bulan	47.295.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Bulan*	*47.295.000*	*60,00%*	*60,00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	8,33	1,04	8,33	3,63	41,67	47,88	16,67	16,68	75,00	69,22							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SD							
7			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**22.437.367.635**	**67,99 %**	**19.022.132.017**	**% 100**	**2.588.118.049**	**% 1,08**	**566.531.338**	**% 5,83**	**651.367.448**	**% 34,28**	**641.986.865**	**% 31,88**	**570.119.998**	*73,07 %*	*2.430.005.649*	*73,07%*	*93,89%*	*141,06 %*	*21.452.137.666*	*70,53%*	*95,61%*	BPBD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**168.190.000**		**131.068.000**		**6.900.000**		-		-		-		**3.338.100**	-	*3.338.100*		*48,38%*	-	*134.406.100*		*79,91%*	BPBD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra , Renja dan Perubahannya	75 Buku/Eksemplar Dokumen	54.200.000	50 Buku/Eksemplar Dokumen	42.111.000	3 Buku/Eksemplar Dokumen	450.000	0 Buku/Eksemplar Dokumen	-	1 Buku/Eksemplar Dokumen	-	0 Buku/Eksemplar Dokumen	-	2 Buku/Eksemplar Dokumen	-	*3 Buku/Eksemplar Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*53 Buku/Eksemplar Dokumen*	*42.111.000*	*70,67%*	*77,70%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	25 Buku/Eksemplar Dokumen	89.500.000	20 Buku/Eksemplar Dokumen	71.874.000	6 Buku/Eksemplar Dokumen	2.400.000	0 Buku/Eksemplar Dokumen	-	1 Buku/Eksemplar Dokumen	-	0 Buku/Eksemplar Dokumen	-	5 Buku/Eksemplar Dokumen	1.838.100	*6 Buku/Eksemplar Dokumen*	*1.838.100*	*100,00%*	*76,59%*	*26 Buku/Eksemplar Dokumen*	*73.712.100*	*104,00%*	*82,36%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Buku/Eksemplar Dokumen	7.000.000	17 Buku/Eksemplar Dokumen	5.889.000	6 Buku/Eksemplar Dokumen	3.000.000	0 Buku/Eksemplar Dokumen	-	1 Buku/Eksemplar Dokumen	-	1 Buku/Eksemplar Dokumen	-	4 Buku/Eksemplar Dokumen	1.500.000	*6 Buku/Eksemplar Dokumen*	*1.500.000*	*100,00%*	*50,00%*	*23 Buku/Eksemplar Dokumen*	*7.389.000*	*92,00%*	*105,56%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Buku/Eksemplar Dokumen	2.500.000	20 Buku/Eksemplar Dokumen	1.800.000	Buku/Eksemplar Dokumen		Buku/Eksemplar Dokumen		Buku/Eksemplar Dokumen		Buku/Eksemplar Dokumen		Buku/Eksemplar Dokumen		- *Buku/Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*20 Buku/Eksemplar Dokumen*	*1.800.000*	*80,00%*	*72,00%*	BPBD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Buku/ Eksemplar Dokumen	2.500.000	17 Buku/ Eksemplar Dokumen	1.500.000	Buku/ Eksemplar Dokumen		Buku /Eksemplar Dokumen		Buku /Eksemplar Dokumen		Buku/ Eksemplar Dokumen		Buku/Eksemplar Dokumen		- ***Buku/ Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***17*** *Buku/ Eksemplar Dokumen*	***1.500.000***	***68,00%***	***60,00%***	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian kinerja dan laporan kinerja triwulan	60 Buku/ Eksemplar/Laporan	6.000.000	40 Buku/ Eksemplar/Laporan	3.600.000	3 Buku/ Eksemplar/Laporan	450.000	0 Buku /Eksemplar/Laporan	-	1 Buku /Eksemplar/Laporan	-	2 Buku/ Eksemplar/Laporan	-	- Buku/Eksemplar/Laporan	-	***3 Buku/ Eksemplar/Laporan***	-	***100,00%***	***0,00%***	***43*** *Buku/ Eksemplar/Laporan*	***3.600.000***	***71,67%***	***60,00%***	BPBD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD,LKIP,LKPJ Perangkat Daerah	60 Buku/ Eksemplar/Laporan	6.490.000	43 Buku/ Eksemplar/Laporan	4.294.000	5 Buku/ Eksemplar/Laporan	600.000	3 Buku /Eksemplar/Laporan	-	2 Buku /Eksemplar/Laporan	-	2 Buku/ Eksemplar/Laporan	-	2 Buku/Eksemplar/Laporan	-	***5 Buku/ Eksemplar/Laporan***	-	***100,00%***	***0,00%***	***48*** *Buku/ Eksemplar/Laporan*	***4.294.000***	***80,00%***	***66,16%***	BPBD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**13.199.162.135**		**12.839.529.499**		**2.290.497.049**		**543.138.123**		**587.124.407**		**602.728.863**		**523.690.240**	-	***2.256.681.633***		***98,52%***	-	***15.096.211.132***		***114,37%***	BPBD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10.139.762.135	93 Orang	9.845.869.499	13 Orang	1.662.897.049	4 Orang	386.238.123	5 Orang	430.224.407	1 Orang	445.828.863	3 Orang	366.790.240	***13 Orang***	***1.629.081.633***	***100,00%***	***97,97%***	***106*** *Orang*	***11.474.951.132***	***106,00%***	***113,17%***	BPBD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	150 Orang	2.724.000.000	120 Orang	2.762.000.000	30 Orang	627.600.000	7 Orang	156.900.000	8 Orang	156.900.000	8 Orang	156.900.000	7 Orang	156.900.000	***30 Orang***	***627.600.000***	***100,00%***	***100,00%***	***150*** *Orang*	***3.389.600.000***	***100,00%***	***124,43%***	BPBD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifi Keuangan	60 Kali/Dokumen	335.400.000	53 Kali/Dokumen	231.660.000	Kali/Dokumen		Kali/ Dokumen		Kali/ Dokumen		Kali/Dokumen		Kali/Dokumen		- ***Kali/Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***53*** *Kali/Dokumen*	***231.660.000***	***88,33%***	***69,07%***	BPBD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-				-		-			-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	-			BPBD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	260 Stel	-	156 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- ***Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***156*** *Stel*	-	***60,00%***		BPBD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**1.068.265.500**		**693.181.950**		**53.793.700**				**10.232.027**		**13.730.500**		**4.865.000**	-	***28.827.527***		***53,59%***	-	***722.009.477***		***67,59%***	BPBD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit/Paket	12.100.000	11 Unit/Paket	-	Unit/Paket		Unit/ Paket		Unit/ Paket		Unit/Paket		Unit/Paket		- ***Unit/Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	***11*** *Unit/Paket*	-	***73,33%***	***0,00%***	BPBD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	5000 Kotak	87.500.000	3000 Kotak	52.500.000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- ***Kotak***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3.000*** *Kotak*	***52.500.000***	***60,00%***	***60,00%***	BPBD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1560 Buah	68.361.000	1256 Buah	44.184.600	570 Paket	5.500.000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	200 Paket	1.980.000	***200 Paket***	***1.980.000***	***35,09%***	***36,00%***	***1.456*** *Buah*	***46.164.600***	***93,33%***	***67,53%***	BPBD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor	3420 Buah	102.438.500	2107 Buah	74.513.650	292 Buah	6.097.200	0 Buah	-	18 Buah	2.569.200	0 Buah	-	222 Buah	2.385.000	***240 Buah***	***4.954.200***	***82,19%***	***81,25%***	***2.347*** *Buah*	***79.467.850***	***68,63%***	***77,58%***	BPBD
			Penyediaan Bahan Material	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1660 Orang kali/Paket	398.933.000	1614 Orang kali/Paket	265.905.900	616 Paket	15.206.500	0 Paket	-	41 Paket	976.000	525 Paket	13.730.500	50 Paket	500.000	***616 Paket***	***15.206.500***	***100,00%***	***100,00%***	***2.230*** *Orang kali/P*	***281.112.400***	***134,34%***	***70,47%***	BPBD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1660 Orang kali/Laporan	398.933.000	999 Orang kali/Laporan	256.077.800	4 Laporan	26.990.000	0 Laporan	-	1 Laporan	6.686.827	0 Laporan	-	- Laporan	-	***1 Laporan***	***6.686.827***	***25,00%***	***24,78%***	***1.000*** *Orang kali/La*	***262.764.627***	***60,24%***	***65,87%***	BPBD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**5.465.550.000**		**3.279.330.000**		-				-		-			- -	-	***0,00%***	***0,00%***	- -	***3.279.330.000***		***60,00%***	BPBD
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	2.675.000.000	6 Unit	1.605.000.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***6*** *Unit*	***1.605.000.000***	***60,00%***	***60,00%***	BPBD
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	5 Unit	2.790.550.000	3 Unit	1.674.330.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3*** *Unit*	***1.674.330.000***	***60,00%***	***60,00%***	BPBD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**895.749.000**		**735.660.688**		**95.044.500**		**23.393.215**		**9.770.214**		**22.711.502**		**17.462.258**	- -	***73.337.189***		***77,16%***	- -	***808.997.877***		***90,32%***	BPBD
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	813.999.000	48 Bulan	686.610.688	12 Bulan	95.044.500	3 Bulan	23.393.215	3 Bulan	9.770.214	2 Bulan	22.711.502	4 Bulan	17.462.258	***12 Bulan***	***73.337.189***	***100,00%***	***77,16%***	***60*** *Bulan*	***759.947.877***	***100,00%***	***93,36%***	BPBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Daerah	15 Kali	81.750.000	9 Kali	49.050.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9*** *Kali*	***49.050.000***	***60,00%***	***60,00%***	BPBD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**1.640.451.000**		**1.343.361.880**		**141.882.800**		-		**44.240.800**		**2.816.000**		**20.764.400**	-	***67.821.200***		***47,80%***	-	***1.411.183.080***		***86,02%***	BPBD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya emeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5 Unit	200.850.000	4 Unit	174.633.280	Unit 1	23.274.000	Unit 0	-	Unit 1	8.448.000	0 Unit	-	- Unit	-	***1 Unit***	***8.448.000***	***100,00%***	***36,30%***	***5 Unit***	***183.081.280***	***100,00%***	***91,15%***	BPBD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Daerah	65 Unit	1.384.606.000	60 Unit	1.129.558.600	Unit 13	117.148.800	Unit 0	-	Unit 13	35.792.800	0 Unit	2.816.000	- Unit	19.304.400	***13 Unit***	***57.913.200***	***100,00%***	***49,44%***	***73 Unit***	***1.187.471.800***	***112,31%***	***85,76%***	BPBD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik		-		-											-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	-			BPBD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	95 Unit	51.350.000	69 Unit	39.170.000	Unit 4	1.460.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	4 Unit	1.460.000	***4 Unit***	***1.460.000***	***100,00%***	***100,00%***	***73 Unit***	***40.630.000***	***76,84%***	***79,12%***	BPBD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	3.645.000	0 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	BPBD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**1,08**	**21,89**	**5,83**	**25,17**	**34,28**	**24,81**	**31,88**	**22,03**	**73,07**	**93,89**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**ST**						
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Kawasan Rawan Bencana yang dibina**	**200 %**	**25.921.202.500**	**69,97 %**	**25.555.229.800**	**100 %**	**684.288.000**	2,27 %	**44.160.000**	2,27 %	-	2,27 %	**44.640.000**	**93,18 %**	**301.240.000**	***100,00 %***	***390.040.000***	***100,00%***	***57,00%***	***169,97 %***	***25.945.269.800***	***84,98%***	***100,09%***	BPBD
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			**15.487.500**		**15.479.300**		-				-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***15.479.300***		***99,95%***	BPBD
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana	76 Kali	15.487.500	76 Kali	15.479.300	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***76 Kali***	***15.479.300***	***100,00%***	***99,95%***	BPBD
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana**		**25.515.795.000**		**25.297.938.500**		**659.040.000**		**44.160.000**		-		**44.640.000**		**289.240.000**	-	***378.040.000***		***57,36%***	-	***25.675.978.500***		***100,63%***	BPBD
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapat Pelatihan Desa Tangguh Bencana	5 Pekon	317.995.000	3 Pekon	190.797.000	Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		- ***Pekon***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Pekon***	***190.797.000***	***60,00%***	***60,00%***	BPBD
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Operasional Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60 Bulan	1.031.250.000	48 Bulan	976.070.000	Bulan 12	659.040.000	Bulan 3	44.160.000	Bulan 3	-	3 Bulan	44.640.000	3 Bulan	289.240.000	***12 Bulan***	***378.040.000***	***100,00%***	***57,36%***	***60 Bulan***	***1.354.110.000***	***100,00%***	***131,31%***	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Unit	55.000.000	0 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	BPBD
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen Kegiatan	24.111.550.000	4 Dokumen Kegiatan	24.131.071.500	Dokumen Kegiatan		Dokumen Kegiatan		Dokumen Kegiatan		Dokumen Kegiatan		Dokumen Kegiatan		- ***Dokumen Kegiatan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Dokumen Kegiatan***	***24.131.071.500***	***33,33%***	***100,08%***	BPBD
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban**		**389.920.000**		**241.812.000**		**25.248.000**		-		-		-		**12.000.000**	-	***12.000.000***		***47,53%***	-	***253.812.000***		***65,09%***	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan operasional dalam pencarian,pertolongan	65 Kejadian	278.920.000	49 Kejadian	171.852.000	Orang 15	12.000.000	Orang 0	-	- Orang	-	0 Orang	-	15 Orang	12.000.000	***15 Orang***	***12.000.000***	***100,00%***	***100,00%***	***64 Kejadian***	***183.852.000***	***98,46%***	***65,92%***	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik korban bencana	750 Paket Logistik	111.000.000	498 Paket Logistik	69.960.000	Orang 105	13.248.000	Orang 0	-	- Orang	-	0 Orang	-	105 Orang	-	***105 Orang***	-	***100,00%***	***0,00%***	***603 Paket Logistik***	***69.960.000***	***80,40%***	***63,03%***	BPBD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**2,27**	**6,45**	**2,27**	-	**2,27**	**6,52**	**93,18**	**44,02**	**100,00**	**57,00**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**R**						
8			**DINAS SOSIAL**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**18.982.948.900**	**98,13 %**	**17.964.802.132**	**100 %**	**3.199.535.883**	**18,95 %**	**688.623.566**	**29,00 %**	**635.726.197**	**2,72 %**	**489.493.805**	**49,34 %**	**1.033.402.629**	***100,00 %***	***2.847.246.197***	***100,00%***	***88,99%***	***198,13 %***	***20.812.048.329***	***99,07%***	***109,64%***	DINAS SOSIAL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**		**450.575.500**		**386.391.250**		**24.736.200**		**6.340.500**		**2.020.000**		**3.354.000**		**6.836.400**	-	***18.550.900***		***74,99%***	-	***404.942.150***		***89,87%***	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	150 Buku	192.442.000	120 Buku	158.363.350	30 Buku	5.220.000	0 Buku	1.800.000	10 Buku	-	0 Buku	690.000	20 Buku	840.000	***30 Buku***	***3.330.000***	***100,00%***	***63,79%***	***150 Buku***	***161.693.350***	***100,00%***	***84,02%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	50 Eksemplar Dokumen	81.525.000	340 Eksemplar Dokumen	71.805.000	10 Eksemplar Dokumen	3.697.500	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	2.161.500	- Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokumen***	***2.161.500***	***100,00%***	***58,46%***	***350 Eksemplar Dokumen***	***73.966.500***	***700,00%***	***90,73%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	50 Eksemplar Dokumen	76.125.000	40 Eksemplar Dokumen	67.911.000	10 Eksemplar Dokumen	3.257.400	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	2.106.900	***10 Eksemplar Dokumen***	***2.106.900***	***100,00%***	***64,68%***	***50 Eksemplar Dokumen***	***70.017.900***	***100,00%***	***91,98%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	100 Eksemplar Dokumen	10.950.000	80 Eksemplar Dokumen	12.765.000	20 Eksemplar Dokumen	2.625.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	2.625.000	***20 Eksemplar Dokumen***	***2.625.000***	***100,00%***	***100,00%***	***100 Eksemplar Dokumen***	***15.390.000***	***100,00%***	***140,55%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Eksemplar Dokumen	10.650.000	70 Eksemplar Dokumen	12.270.000	10 Eksemplar Dokumen	2.625.000	10 Eksemplar Dokumen	2.625.000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokumen***	***2.625.000***	***100,00%***	***100,00%***	***80 Eksemplar Dokumen***	***14.895.000***	***80,00%***	***139,86%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Eksemplar Dokumen	12.900.000	40 Eksemplar Dokumen	10.524.000	10 Eksemplar Dokumen	1.767.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	502.500	5 Eksemplar Dokumen	1.264.500	***10 Eksemplar Dokumen***	***1.767.000***	***100,00%***	***100,00%***	***50 Eksemplar Dokumen***	***12.291.000***	***100,00%***	***95,28%***	DINAS SOSIAL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	100 Buku	65.983.500	70 Buku	52.752.900	10 Buku	5.544.300	0 Buku	1.915.500	10 Buku	2.020.000	0 Buku	-	- Buku	-	***10 Buku***	***3.935.500***	***100,00%***	***70,98%***	***80 Buku***	***56.688.400***	***80,00%***	***85,91%***	DINAS SOSIAL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keungan Yang Disusun Tepat Waktu**		**15.247.755.200**		**14.892.825.525**		**2.777.650.588**		**612.411.318**		**550.157.783**		**455.487.947**		**963.162.606**	-	***2.581.219.654***		***92,93%***	-	***17.474.045.179***		***114,60%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	125 Orang	12.887.255.200	99 Orang	12.542.175.525	25 Orang	2.310.360.488	6 Orang	507.061.318	7 Orang	470.457.783	5 Orang	386.377.947	7 Orang	780.023.806	***25 Orang***	***2.143.920.854***	***100,00%***	***92,80%***	***124 Orang***	***14.686.096.379***	***99,20%***	***113,96%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	125 Orang	1.952.900.000	99 Orang	1.998.410.000	25 Orang	415.980.000	6 Orang	102.560.000	7 Orang	69.110.000	5 Orang	69.110.000	7 Orang	168.518.700	***25 Orang***	***409.298.700***	***100,00%***	***98,39%***	***124 Orang***	***2.407.708.700***	***99,20%***	***123,29%***	DINAS SOSIAL
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Orang	381.600.000	42 Orang	335.940.000	8 Orang	49.560.000	0 Orang	2.790.000	3 Orang	10.590.000	2 Orang	-	3 Orang	12.870.000	***8 Orang***	***26.250.000***	***100,00%***	***52,97%***	***50 Orang***	***362.190.000***	***166,67%***	***94,91%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Buku	26.000.000	15 Buku	16.300.000	5 Buku	1.750.100	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	5 Buku	1.750.100	***5 Buku***	***1.750.100***	***100,00%***	***100,00%***	***20 Buku***	***18.050.100***	***100,00%***	***69,42%***	DINAS SOSIAL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyusunan Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat Waktu**		**1.265.269.700**		**1.048.392.503**		**115.929.095**		**19.815.825**		**35.845.150**		**13.171.050**		**18.548.674**	-	***87.380.699***		***75,37%***	-	***1.135.773.202***		***89,77%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275 Unit	71.635.000	223 Unit	61.147.000	3 Unit	8.104.000	0 Unit	1.034.000	- Unit	-	0 Unit	855.000	3 Unit	3.177.500	***3 Unit***	***5.066.500***	***100,00%***	***62,52%***	***226 Unit***	***66.213.500***	***82,18%***	***92,43%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	3250 Kotak	123.750.000	3250 Kotak	100.470.150	650 Kotak	12.250.000	150 Kotak	1.485.000	150 Kotak	2.574.000	0 Kotak	450.450	350 Kotak	4.455.000	***650 Kotak***	***8.964.450***	***100,00%***	***73,18%***	***3.900 Kotak***	***109.434.600***	***120,00%***	***88,43%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600 Buku	133.148.000	600 Buku	107.843.900	120 Buku	10.007.900	21 Buku	750.000	20 Buku	963.500	0 Buku	2.274.000	79 Buku	3.853.000	***120 Buku***	***7.840.500***	***100,00%***	***78,34%***	***720 Buku***	***115.684.400***	***120,00%***	***86,88%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	369.141.700	48 Bulan	282.445.679	12 Bulan	18.049.195	3 Bulan	4.268.825	3 Bulan	2.801.250	0 Bulan	1.929.600	6 Bulan	7.063.174	***12 Bulan***	***16.062.849***	***100,00%***	***88,99%***	***60 Bulan***	***298.508.528***	***100,00%***	***80,87%***	DINAS SOSIAL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	500 Kali	567.595.000	400 Kali	496.485.774	200 Kali	67.518.000	25 Kali	12.278.000	125 Kali	29.506.400	0 Kali	7.662.000	50 Kali	-	***200 Kali***	***49.446.400***	***100,00%***	***73,23%***	***600 Kali***	***545.932.174***	***120,00%***	***96,18%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**655.564.500**		**504.415.694**		**122.415.200**		**34.638.865**		**2.232.419**		**17.480.808**		**27.427.969**	-	***81.780.061***		***66,81%***	-	***586.195.755***		***89,42%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	488.650.000	48 Bulan	374.867.774	12 Bulan	87.180.000	3 Bulan	11.781.480	1 Bulan	2.232.419	4 Bulan	16.216.808	4 Bulan	21.434.569	***12 Bulan***	***51.665.276***	***100,00%***	***59,26%***	***60 Bulan***	***426.533.050***	***100,00%***	***87,29%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	166.914.500	48 Bulan	129.547.920	12 Bulan	35.235.200	3 Bulan	22.857.385	1 Bulan	-	2 Bulan	1.264.000	6 Bulan	5.993.400	***12 Bulan***	***30.114.785***	***100,00%***	***85,47%***	***60 Bulan***	***159.662.705***	***100,00%***	***95,66%***	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.363.784.000**		**1.132.777.160**		**158.804.800**		**15.417.058**		**45.470.845**		**-**		**17.426.980**	-	***78.314.883***		***49,32%***	-	***1.211.092.043***		***88,80%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	220.850.000	24 Bulan	214.810.500	12 Bulan	44.170.000	2 Bulan	5.632.000	4 Bulan	11.531.245	0 Bulan	-	6 Bulan	7.207.760	***12 Bulan***	***24.371.005***	***100,00%***	***55,18%***	***36 Bulan***	***239.181.505***	***60,00%***	***108,30%***	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35 Unit/ Bulan	940.934.000	45 Unit/ Bulan	747.246.660	Bulan 12	100.269.800	Bulan 1	9.785.058	Bulan 5	24.139.600	0 Bulan	-	6 Bulan	9.169.220	*12 Bulan*	*43.093.878*	*100,00%*	*42,98%*	*57 Unit/ Bulan*	*790.340.538*	*162,86%*	*84,00%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	85 Unit	50.750.000	75 Unit/ Bulan	50.420.000	Unit 17	6.130.000	Unit 0	-	Unit 6	2.800.000	0 Unit	-	11 Unit	1.050.000	*17 Unit*	*3.850.000*	*100,00%*	*62,81%*	*92 Unit/ Bulan*	*54.270.000*	*108,24%*	*106,94%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Unit	151.250.000	4 Unit	120.300.000	Unit 1	8.235.000	Unit 0	-	Unit -	7.000.000	0 Unit	-	1 Unit	-	*1 Unit*	*7.000.000*	*100,00%*	*85,00%*	*5 Unit*	*127.300.000*	*100,00%*	*84,17%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**18,95**	**21,52**	**29,00**	**19,87**	**2,72**	**15,30**	**49,34**	**32,30**	**100,00**	**88,99**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**	**200 %**	**2.862.687.500**	**81,97 %**	**2.484.079.000**	**% 100**	**84.659.100**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**-**	**0,00 %**	**-**	**79,59 %**	**40.500.000**	*79,59 %*	*40.500.000*	*79,59%*	*47,84%*	*161,56 %*	*2.524.579.000*	*80,78%*	*88,19%*	DINAS SOSIAL
			Pengmpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan**		**36.172.500**		**21.703.500**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*21.703.500*		*60,00%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 Orang	36.172.500	60 Orang	21.703.500	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Orang*	*21.703.500*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS SOSIAL
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**2.826.515.000**		**2.462.375.500**		**84.659.100**		-		-		-		**40.500.000**	-	*40.500.000*		*47,84%*	-	*2.502.875.500*		*88,55%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Aktif	150 Orang	320.427.500	120 Orang	288.836.500	Orang 30	10.300.500	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	30 Orang	9.000.000	*30 Orang*	*9.000.000*	*100,00%*	*87,37%*	*150 Orang*	*297.836.500*	*100,00%*	*92,95%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Aktif	150 Orang	619.352.500	98 Orang	564.531.500	Orang 20	21.227.800	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	-	-	- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*98 Orang*	*564.531.500*	*65,33%*	*91,15%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	825 Orang	1.570.965.000	742 Orang	1.361.615.500	Orang 126	47.430.800	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	126 Orang	31.500.000	*126 Orang*	*31.500.000*	*100,00%*	*66,41%*	*868 Orang*	*1.393.115.500*	*105,21%*	*88,68%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	315.770.000	189 Orang	247.392.000	Orang 20	5.700.000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	*- Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*189 Orang*	*247.392.000*	*75,60%*	*78,35%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,59**	**47,84**	**79,59**	**47,84**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**T**	**SR**							
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani**	**200 %**	**69.247.500**	**60,00 %**	**41.548.500**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*41.548.500*	*30,00%*	*60,00%*	DINAS SOSIAL
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		**69.247.500**		**41.548.500**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*		*41.548.500*		*60,00%*	DINAS SOSIAL
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100 Orang	69.247.500	60 Orang	41.548.500	Orang 0	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	- *Orang*	-	*0*	*0,00%*	*60 Orang*	*41.548.500*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**	**200 %**	**9.193.069.100**	**79,63 %**	**6.970.167.560**	**100 %**	**48.761.000**	**0,00 %**	-	**14,47 %**	**16.020.000**	**0,00 %**	**1.056.000**	**0,28 %**	**14.000.000**	*14,75 %*	*31.076.000*	*14,75%*	*63,73%*	*94,38 %*	*7.001.243.560*	*47,19%*	*76,16%*	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**5.428.072.000**		**4.224.962.700**		**13.105.000**		-		**2.020.000**		-		-	-	**2.020.000**		**15,41%**	-	**4.226.982.700**		**77,87%**	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	17415 Orang	4.179.654.500	13932 Orang	3.319.285.200	700 Orang	13.105.000	0 Orang	-	100 Orang	2.020.000	0 Orang	-	- Orang	-	***100 Orang***	***2.020.000***	***14,29%***	***15,41%***	***14.032 Orang***	***3.321.305.200***	***80,57%***	***79,46%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	500 Orang	774.830.000	400 Orang	549.277.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***400 Orang***	***549.277.000***	***80,00%***	***70,89%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Penyediaan Alat Bantu	600 Orang	411.757.500	474 Orang	314.011.500	0 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***474 Orang***	***314.011.500***	***79,00%***	***76,26%***	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Pelayanan dan Rujukan	25 Orang	61.830.000	20 Orang	42.389.000	0 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20 Orang***	***42.389.000***	***80,00%***	***68,56%***	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**		**3.764.997.100**		**2.745.204.860**		**35.656.000**		-		**14.000.000**		**1.056.000**		**14.000.000**	-	***29.056.000***		***81,49%***	-	***2.774.260.860***		***73,69%***	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	400 Orang	1.573.944.600	300 Orang	1.080.366.760	0 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***300 Orang***	***1.080.366.760***	***75,00%***	***68,64%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	400 Orang	360.200.000	320 Orang	300.770.900	0 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***320 Orang***	***300.770.900***	***80,00%***	***83,50%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	400 Orang	220.875.000	320 Orang	149.168.100	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***320 Orang***	***149.168.100***	***80,00%***	***67,54%***	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150 Orang	195.785.000	90 Orang	117.471.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***90 Orang***	***117.471.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS SOSIAL
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150 Orang	81.187.500	90 Orang	48.712.500	0 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***90 Orang***	***48.712.500***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS SOSIAL
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang	1.333.005.000	91 Orang	1.048.715.600	5 Orang	35.656.000	0 Orang	-	2 Orang	14.000.000	0 Orang	1.056.000	2 Orang	14.000.000	***4 Orang***	***29.056.000***	***80,00%***	***81,49%***	***95 Orang***	***1.077.771.600***	***95,00%***	***80,85%***	DINAS SOSIAL
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**14,47**	**32,85**	-	**2,17**	**0,28**	**28,71**	**14,75**	**63,73**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**							
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**200 %**	**4.314.118.900**	**76,90 %**	**3.436.987.300**	**100 %**	**51.998.700**	**8,33 %**	**1.304.700**	**41,67 %**	**3.465.300**	**0,00 %**	-	**50,00 %**	**2.477.800**	***100,00 %***	***7.247.800***	***100,00%***	***13,94%***	***176,90 %***	***3.444.235.100***	***88,45%***	***79,84%***	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Terlaksananya Pemeliharaan Anak Terlantar**		**413.398.000**		**250.598.800**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***250.598.800***		***60,62%***	DINAS SOSIAL
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	250 Orang	174.248.000	150 Orang	107.108.800	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***150 Orang***	***107.108.800***	***60,00%***	***61,47%***	DINAS SOSIAL
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak- Anak Terlantar	150 Kali	97.750.000	90 Kali	58.650.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***90 Kali***	***58.650.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS SOSIAL
			Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	100 Kali	141.400.000	60 Kali	84.840.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***60 Kali***	***84.840.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Valid**		**3.900.720.900**		**3.186.388.500**		**51.998.700**		**1.304.700**		**3.465.300**		-		**2.477.800**	-	***7.247.800***		***13,94%***	-	***3.193.636.300***		***81,87%***	DINAS SOSIAL
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Bulan	633.365.000	48 Bulan	420.870.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		***- Bulan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***48 Bulan***	***420.870.000***	***80,00%***	***66,45%***	DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Bulan	2.132.010.000	48 Bulan	1.941.108.600	12 Bulan	51.998.700	1 Bulan	1.304.700	5 Bulan	3.465.300	0 Bulan	-	6 Bulan	2.477.800	***12 Bulan***	***7.247.800***	***100,00%***	***13,94%***	***60 Bulan***	***1.948.356.400***	***100,00%***	***91,39%***	DINAS SOSIAL
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1393 Orang	1.135.345.900	1152 Orang	824.409.900	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***1.152 Orang***	***824.409.900***	***82,70%***	***72,61%***	DINAS SOSIAL
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**8,33**	**2,51**	**41,67**	**6,66**	-	-	**50,00**	**4,77**	**100,00**	**13,94**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani**	**200 %**	**3.630.260.000**	**87,47 %**	**2.979.663.000**	**% 100**	**77.529.000**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**-**	**69,51 %**	**55.000.000**	**30,49 %**	**9.225.000**	***100,00 %***	***64.225.000***	***100,00%***	***82,84%***	***187,47 %***	***3.043.888.000***	***93,73%***	***83,85%***	DINAS SOSIAL
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**1.927.060.000**		**1.406.783.000**		**20.029.000**		**-**		**-**		**-**		**9.225.000**	**-**	***9.225.000***		***46,06%***	**-**	***1.416.008.000***		***73,48%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	2500 Paket	1.127.760.000	2000 Paket	885.625.000	Paket 25	20.029.000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	Paket 25	9.225.000	***25 Paket***	***9.225.000***	***100,00%***	***46,06%***	***2.025 Paket***	***894.850.000***	***81,00%***	***79,35%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	1250 Paket	284.300.000	1250 Paket	207.158.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		***- Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	***1.250 Paket***	***207.158.000***	***100,00%***	***72,87%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5 Paket	388.750.000	3 Paket	233.250.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		***- Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Paket***	***233.250.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Peserta Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kelompok	126.250.000	8 Kelompok	80.750.000	Orang 0	-	Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***8 Kelompok***	***80.750.000***	***80,00%***	***63,96%***	DINAS SOSIAL
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**1.703.200.000**		**1.572.880.000**		**57.500.000**		**-**		**-**		**55.000.000**		**-**	**-**	***55.000.000***		***95,65%***	**-**	***1.627.880.000***		***95,58%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	305 Orang	1.703.200.000	299 Orang	1.572.880.000	Orang 57	57.500.000	Orang 0	-	Orang -	-	57 Orang	55.000.000	Orang -	-	***57 Orang***	***55.000.000***	***100,00%***	***95,65%***	***356 Orang***	***1.627.880.000***	***116,72%***	***95,58%***	DINAS SOSIAL
											-	**-**	**-**	**-**	**69,51**	**70,94**	**30,49**	**11,90**	**100,00**	**82,84**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SD**	**SR**	**R**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**200 %**	**600.483.800**	**80,00 %**	**483.728.579**	**% 100**	**28.602.300**	**% 0,00**	**-**	**% 50,00**	**6.763.063**	**0,00 %**	**1.093.367**	**50,00 %**	**3.357.296**	***100,00 %***	***11.213.726***	***100,00%***	***39,21%***	***180,00 %***	***494.942.305***	***90,00%***	***82,42%***	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Terpeliharanya aman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**600.483.800**		**483.728.579**		**28.602.300**		**-**		**6.763.063**		**1.093.367**		**3.357.296**	**-**	***11.213.726***		***39,21%***	**-**	***494.942.305***		***82,42%***	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 Unit	372.800.000	4 Unit	294.170.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Unit***	***294.170.000***	***80,00%***	***78,91%***	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60 Bulan	227.683.800	48 Bulan	189.558.579	Bulan 12	28.602.300	Bulan 0	-	Bulan 6	6.763.063	0 Bulan	1.093.367	Bulan 6	3.357.296	***12 Bulan***	***11.213.726***	***100,00%***	***39,21%***	***60 Bulan***	***200.772.305***	***100,00%***	***88,18%***	DINAS SOSIAL
											-	**-**	**50,00**	**23,65**	**-**	**3,82**	**50,00**	**11,74**	**100,00**	**39,21**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**							
9			**DINAS TENAGA KERJA**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**19.108.625.865**	**85,58 %**	**18.793.636.946**	**% 100**	**3.508.418.326**	***% 6,57***	***1.041.785.064***	***% 1,23***	***749.590.904***	***% 0,06***	***642.006.932***	***% 0,07***	***829.376.538***	***7,93 %***	***3.262.759.438***	***7,93%***	***93,00%***	***93,51 %***	***22.056.396.384***	***46,76%***	***115,43%***	DINAS TENAGA KERJA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Renja dan Perubahannya**		**390.156.500**		**344.664.550**		**36.091.800**		***1.610.000***		***8.225.600***		***6.518.900***		**8.824.000**	**-**	***25.178.500***		***69,76%***	**-**	***369.843.050***		***94,79%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	150 Buku	228.121.000	124 Buku	226.448.150	Buku 30	34.822.700	Buku 10	1.610.000	Buku -	8.225.600	0 Buku	6.518.900	Buku -	8.824.000	***10 Buku***	***25.178.500***	***33,33%***	***72,30%***	***134 Buku***	***251.626.650***	***89,33%***	***110,30%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300 Eksmplar Dokumen	39.844.500	205 Eksmplar Dokumen	30.823.500	Eksmplar Dokumen 60	369.100	Eksmplar Dokumen 40	-	Eksmplar Dokumen -	-	0 Eksmplar Dokumen	-	Eksmplar Dokumen -	-	***40 Eksmplar Dokumen***	-	***66,67%***	***0,00%***	***245 Eksmplar Dokumen***	***30.823.500***	***81,67%***	***77,36%***	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300 Eksmplar Dokumen	37.566.000	188 Eksmplar Dokumen	23.817.500	10 Eksmplar Dokumen	300.000	Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	188 Eksmplar Dokumen	23.817.500	62,67%	63,40%	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500 Eksmplar Dokumen	6.750.000	360 Eksmplar Dokumen	5.400.000	20 Eksmplar Dokumen	300.000	Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	360 Eksmplar Dokumen	5.400.000	72,00%	80,00%	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500 Eksmplar Dokumen	6.750.000	365 Eksmplar Dokumen	5.049.900	10 Eksmplar Dokumen	300.000	Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	365 Eksmplar Dokumen	5.049.900	73,00%	74,81%	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Triwulan	500 Eksmplar Dokumen	24.706.000	324 Eksmplar Dokumen	17.996.300	Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen		Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	324 Eksmplar Dokumen	17.996.300	64,80%	72,84%	DINAS TENAGA KERJA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan, LAKIP,LKPJ, LPPD	125 Buku	46.419.000	104 Buku	35.129.200	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- Buku	-	0,00%	0,00%	104 Buku	35.129.200	83,20%	75,68%	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu**		**16.006.531.645**		**15.513.862.711**		**2.954.351.174**		**955.197.942**		**687.900.380**		**596.021.117**		**590.109.596**	-	-	**2.829.229.035**		**95,76%**	-	-	**18.343.091.746**		**114,60%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10.291.566.945	98 Orang	10.015.153.171	20 Orang	1.860.343.604	5 Orang	680.787.977	5 Orang	429.345.055	5 Orang	346.597.857	5 Orang	333.989.161	**20 Orang**	**1.790.720.050**	**100,00%**	**96,26%**	**118 Orang**	**11.805.873.221**	**118,00%**	**114,71%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi pelaksana tugas ASN, Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	60 Bulan	5.388.564.700	57 Bulan	5.188.759.540	12 Bulan	1.009.027.570	3 Bulan	271.859.965	3 Bulan	238.745.325	3 Bulan	236.463.260	3 Bulan	234.980.435	**12 Bulan**	**982.048.985**	**100,00%**	**97,33%**	**69 Bulan**	**6.170.808.525**	**115,00%**	**114,52%**	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan da PengujianVeraifikasi Keuangan SKPD	40 Orang	326.400.000	35 Orang	309.950.000	Orang 8	84.980.000	Orang 3	2.550.000	Orang -	19.810.000	0 Orang	12.960.000	Orang -	21.140.000	**3 Orang**	**56.460.000**	**37,50%**	**66,44%**	**38 Orang**	**366.410.000**	**95,00%**	**112,26%**	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100.250.000**		**80.200.000**		-		-		-		-			-	-			-	**80.200.000**		**80,00%**	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kerlengkapannya	230 Stel	100.250.000	184 Stel	80.200.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		**- Stel**	-	**0,00%**	**0,00%**	**184 Stel**	**80.200.000**	**80,00%**	**80,00%**	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang di susun Tepat Waktu**		**1.045.065.000**		**1.068.356.216**		**63.529.800**		**500.000**		**5.101.200**		**3.300.000**		**52.880.000**	-	**61.781.200**		**97,25%**	-	**1.130.137.416**		**108,14%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	750 Buah	62.750.000	606 Buah	54.540.000	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		**- Buah**	-	**0,00%**	**0,00%**	**606 Buah**	**54.540.000**	**80,80%**	**86,92%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	199.800.000	4 Unit	384.793.250	Unit 1	52.200.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	810.000	Unit 1	51.000.000	**1 Unit**	**51.810.000**	**100,00%**	**99,25%**	**5 Unit**	**436.603.250**	**100,00%**	**218,52%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan minuman untukkeperluan Rutin Kantor	2500 Kotak	85.000.000	2100 Kotak	83.259.650	Kotak 500	1.000.000	Kotak 0	-	Kotak 150	-	0 Kotak	990.000	Kotak -	-	**150 Kotak**	**990.000**	**30,00%**	**99,00%**	**2.250 Kotak**	**84.249.650**	**90,00%**	**99,12%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan rutin Kantor	45000 Eksemplar	57.529.000	38000 Eksemplar	55.682.300	9000 Eksemplar	1.714.800	0 Eksemplar	-	3 Eksemplar	1.101.200	0 Eksemplar	500.000	- Eksemplar	-	**3 Eksemplar**	**1.601.200**	**0,03%**	**93,38%**	**38.003 Eksemplar**	**57.283.500**	**84,45%**	**99,57%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan / Material Lainnya untuk keperluan rutin Kantor	17500 Buah	122.131.000	16000 Buah	122.695.300	Buah 3.500	7.535.000	Buah 800	500.000	Buah -	4.000.000	0 Buah	1.000.000	Buah -	1.880.000	**800 Buah**	**7.380.000**	**22,86%**	**97,94%**	**16.800 Buah**	**130.075.300**	**96,00%**	**106,50%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350 Kali	517.855.000	235 Kali	367.385.716	Kali 70	1.080.000	Kali 5	-	Kali -	-	0 Kali	-	Kali -	-	**5 Kali**	-	**7,14%**	**0,00%**	**240 Kali**	**367.385.716**	**68,57%**	**70,94%**	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**186.733.750**		**187.061.800**		-		-		-		-			-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	**187.061.800**		**100,18%**	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan Meja,Kursi,Lemari dan Mebel laiinnya	5 Unit	186.733.750	4 Unit	187.061.800	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		**- Unit**	-	**0,00%**	**0,00%**	**4 Unit**	**187.061.800**	**80,00%**	**100,18%**	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**461.756.970**		**417.403.905**		**126.134.952**		**58.295.722**		**13.909.024**		**12.912.715**		**15.587.782**	-	***100.705.243***		**79,84%**	-	***518.109.148***		***112,20%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	251.411.570	45 Bulan	246.923.345	Bulan 12	110.549.272	Bulan 3	47.295.722	Bulan -	10.473.344	0 Bulan	12.912.715	Bulan -	14.987.782	**3 Bulan**	***85.669.563***	**25,00%**	**77,49%**	**48 Bulan**	***332.592.908***	**80,00%**	***132,29%***	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan /Kali	210.345.400	47 Bulan /Kali	170.480.560	12 Bulan /Kali	15.585.680	2 Bulan/Kali	11.000.000	Bulan - /Kali	3.435.680	0 Bulan/ Kali	-	Bulan/ - Kali	600.000	*2 Bulan/ Kali*	*15.035.680*	*16,67%*	*96,47%*	*49 Bulan /Kali*	*185.516.240*		*88,20%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**918.132.000**		**1.182.087.764**		**328.310.600**		**26.181.400**		**34.454.700**		**23.254.200**		**161.975.160**	*-*	*245.865.460*		*74,89%*	*-*	*1.427.953.224*		*155,53%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan baik	35 Unit	710.552.000	29 Unit	702.942.480	Unit 7	175.541.600	Unit 2	26.181.400	Unit -	34.454.700	0 Unit	23.254.200	Unit -	14.141.160	*2 Unit*	*98.031.460*	*28,57%*	*55,85%*	*31 Unit*	*800.973.940*	*88,57%*	*112,73%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	60 Unit	49.950.000	47 Unit	40.480.000	Unit 12	2.069.000	Unit 0	-	Unit 3	-	0 Unit	-	Unit -	1.000.000	*3 Unit*	*1.000.000*	*25,00%*	*48,33%*	*50 Unit*	*41.480.000*	*83,33%*	*83,04%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	157.630.000	5 Unit	438.665.284	Unit 1	150.700.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	Unit -	146.834.000	*- Unit*	*146.834.000*	*0,00%*	*97,43%*	*5 Unit*	*585.499.284*	*100,00%*	*371,44%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**6,57**	**29,69**	**1,23**	**21,37**	**0,06**	**18,30**	**0,07**	**23,64**	**7,93**	**93,00**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**							
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang ditindaklanjuti dan**	**200 %**	**66.331.500**	**60,00 %**	**39.798.900**	**% 100**	**135.097.500**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*39.798.900*	*30,00%*	*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**		**66.331.500**		**39.798.900**		**135.097.500**				-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*39.798.900*		*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah penyusunan rencana tenaga kerja makro	25 Buku	66.331.500	15 Buku	39.798.900	Buku 5	135.097.500	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*15 Buku*	*39.798.900*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan**	**200 %**	**258.678.500**	**60,00 %**	**155.207.100**	**% 100**	**8.275.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*155.207.100*	*30,00%*	*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Tersedianya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi**		**170.621.000**		**102.372.600**		-				-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*102.372.600*		*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pendidikan an Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	250 Orang	170.621.000	150 Orang	102.372.600	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*150 Orang*	*102.372.600*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**63.057.500**		**37.834.500**		**8.275.000**		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*37.834.500*		*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	5 LPK	63.057.500	3 LPK	37.834.500	LPK 1	8.275.000	LPK 0	-	LPK -	-	0 LPK	-	- LPK	-	*- LPK*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 LPK*	*37.834.500*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**25.000.000**		**15.000.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	*0,00%*	-	*15.000.000*		*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penerima hibah	500 %	25.000.000	300 %	15.000.000	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*15.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar**	**200 %**	**214.572.500**	**86,71 %**	**165.767.100**	**% 100**	**22.649.020**	**% 0,00**	-	**% 53,85**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	*53,85 %*	-	*53,85%*	*0,00%*	*140,56 %*	*165.767.100*	*70,28%*	*77,25%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Jumlah Pelayanan Antar Kerja**		**136.067.500**		**118.664.100**		**22.649.020**		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*118.664.100*		*87,21%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	32500 Orang	136.067.500	28850 Orang	118.664.100	Orang 6500	22.649.020	Orang 0	-	Orang 3.500	-	0 Orang	-	- Orang	-	*3.500 Orang*	-	*53,85%*	*0,00%*	*32.350 Orang*	*118.664.100*	*99,54%*	*87,21%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**		**78.505.000**		**47.103.000**		-		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*47.103.000*		*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	2500 Orang	78.505.000	1500 Orang	47.103.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1.500 Orang*	*47.103.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**53,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	53,85	-							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**							
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial**	**200 %**	**409.810.000**	**62,35 %**	**269.974.400**	**% 100**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*62,35 %*	*269.974.400*	*31,18%*	*65,88%*	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis**		**299.489.500**		**203.782.100**		-		-		-		-		- -	-		**0,00%**	- -	***203.782.100***		**68,04%**	DINAS TENAGA KERJA
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	10 Buku	160.614.500	8 Buku	110.516.150	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- ***Buku***	-	***0,00%***	***0,00%***	***8 Buku***	***110.516.150***	***80,00%***	***68,81%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrialdan jaminan sosial tenaga kerja	10 Buku	138.875.000	8 Buku	93.265.950	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- ***Buku***	-	***0,00%***	***0,00%***	***8 Buku***	***93.265.950***	***80,00%***	***67,16%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis**		**110.320.500**		**66.192.300**		-		-		-		-		- -	-		**0,00%**	- -	***66.192.300***		**60,00%**	DINAS TENAGA KERJA
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	110.320.500	90 Orang	66.192.300	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***90 Orang***	***66.192.300***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-			-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan**	**200 %**	**185.327.000**	**60,00 %**	**111.196.200**	**% 100**	**5.345.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***60,000 %***	***111.196.200***	***30,00%***	***60,00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**		**185.327.000**		**111.196.200**		**5.345.000**		-		-		-		-	- -	-			- -	***111.196.200***		**60,00%**	DINAS TENAGA KERJA
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan dalamPelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	5 Dokumen	185.327.000	3 Dokumen	111.196.200	Dokumen 1	5.345.000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Dokumen***	***111.196.200***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-		-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**							
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Berasal Dari Kabupaten Tanggamus**	**200 %**	**323.250.000**	**80,00 %**	**183.693.250**	**% 100**	**178.840.500**	% 0,00	**172.500.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	- %	**172.500.000**	***0,00%***	***96,45%***	***80,00 %***	***356.193.250***	***40,00%***	***110,19%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Minat Keikutsertaan Masyarakat Bertransmigrasi**		**323.250.000**		**183.693.250**		**178.840.500**		**172.500.000**		-		-		- -	***172.500.000***		***96,45%***	- -	***356.193.250***		***110,19%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	193.250.000	80 Orang	80.915.750	Orang 20	177.621.100	Orang 0	172.500.000	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- ***Orang***	***172.500.000***	***0,00%***	***97,12%***	***80 Orang***	***253.415.750***	***80,00%***	***131,13%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 KK	130.000.000	20 KK	102.777.500	KK 5	1.219.400	KK 0	-	KK -	-	0 KK	-	- KK	-	- ***KK***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20 KK***	***102.777.500***	***80,00%***	***79,06%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	**96,45**	-	-	-	-	-		-	**96,45**							
									Predikat kinerja		**SR**	**T**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**T**							
			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																									
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Ratio Elektrifikasi**	**200 %**	**4.648.095.640**	**70,00 %**	**3.771.283.547**	**% 100**	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***70,00 %***	***3.771.283.547***	***35,00%***	***81,14%***	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Meningkatnya Rumah Tangga Pengguna Listrik**		**4.648.095.640**		**3.771.283.547**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	***3.771.283.547***		***81,14%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25 Dokumen	73.600.000	15 Dokumen	44.160.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***15 Dokumen***	***44.160.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanEnergi Air	25 Dokumen	4.574.495.640	20 Dokumen	3.727.123.547	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20 Dokumen***	***3.727.123.547***	***80,00%***	***81,48%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
10			**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																								
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**25.870.168.250**	**96,44 %**	**24.127.398.991**	**100 %**	**4.647.657.714**	**27,46 %**	**1.248.880.142**	**0,39 %**	**759.906.764**	**62,36 %**	**1.140.751.137**	**8,28 %**	**904.426.061**	***98,49 %***	***4.053.964.104***	***98,49%***	***87,23%***	***194,93 %***	***28.181.363.095***	***97,47%***	***108,93%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**387.343.750**		**313.835.000**		**18.145.500**		**7.500.000**		**1.955.000**		-		**2.000.000**	-	***11.455.000***		***63,13%***	-	***325.290.000***		***83,98%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan perubahannyaan	20 Dokumen	154.724.250	21 Dokumen	126.264.050	5 Dokumen	2.009.900	2 Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	***5 Dokumen***	-	***100,00%***	***0,00%***	***26 Dokumen***	***126.264.050***	***130,00%***	***81,61%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	62.485.000	4 Lembar/ Dokumen	48.135.400	1 Dokumen	999.900	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	-	***100,00%***	***0,00%***	***5 Lembar/ Dokumen***	***48.135.400***	***100,00%***	***77,04%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	62.485.000	4 Lembar/ Dokumen	44.924.350	1 Dokumen	999.900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	711.900	***1 Dokumen***	***711.900***	***100,00%***	***71,20%***	***5 Lembar/ Dokumen***	***45.636.250***	***100,00%***	***73,04%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	9.966.000	4 Lembar/ Dokumen	10.772.700	1 Dokumen	4.367.700	1 Dokumen	1.863.300	- Dokumen	945.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***2.808.300***	***100,00%***	***64,30%***	***5 Lembar/ Dokumen***	***13.581.000***	***100,00%***	***136,27%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	9.966.000	4 Lembar/ Dokumen	9.841.800	1 Dokumen	999.900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	-	***100,00%***	***0,00%***	***5 Lembar/ Dokumen***	***9.841.800***	***100,00%***	***98,75%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen PK dan Laporan Kinerja Triwulan	20 Dokumen	32.667.500	16 Lembar/ Dokumen	27.529.300	4 Dokumen	1.288.100	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1.288.100	***4 Dokumen***	***1.288.100***	***100,00%***	***100,00%***	***20 Lembar/ Dokumen***	***28.817.400***	***100,00%***	***88,21%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD, Lakip, LKPJ perangkat daerah	12 Lembar/ Dokumen	55.050.000	11 Lembar/ Dokumen	46.367.400	5 Dokumen	7.480.100	3 Dokumen	5.636.700	- Dokumen	1.010.000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	-	***5 Dokumen***	***6.646.700***	***100,00%***	***88,86%***	***16 Lembar/ Dokumen***	***53.014.100***	***133,33%***	***96,30%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa**		**22.174.791.250**		**20.988.256.341**		**4.371.227.714**		**1.214.169.740**		**713.707.143**		**1.133.176.004**		**854.386.047**	-	***3.915.438.934***		***89,57%***	-	***24.903.695.275***		***112,31%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	17.254.341.250	108 Orang	16.219.842.441	24 Orang	3.448.788.314	6 Orang	903.799.740	6 Orang	560.543.243	6 Orang	913.951.004	6 Orang	661.581.547	***24 Orang***	***3.039.875.534***	***100,00%***	***88,14%***	***132 Orang***	***19.259.717.975***	***110,00%***	***111,62%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	270 Orang	4.341.000.000	270 Orang	4.249.165.000	54 Orang	886.770.000	14 Orang	296.530.000	13 Orang	147.560.000	13 Orang	219.225.000	14 Orang	187.895.000	***54 Orang***	***851.210.000***	***100,00%***	***95,99%***	***324 Orang***	***5.100.375.000***	***120,00%***	***117,49%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	60 Kali	579.450.000	48 Kali	519.248.900	12 Kali	35.669.400	3 Kali	13.840.000	- Kali	5.603.900	6 Kali	-	3 Kali	4.909.500	***12 Kali***	***24.353.400***	***100,00%***	***68,28%***	***60 Kali***	***543.602.300***	***100,00%***	***93,81%***	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**148.125.000**		**118.500.000**		-		-		-		-		-							**80,00%**	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	5 Orang	148.125.000	4 Orang	118.500.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Orang*	*118.500.000*	*80,00%*	*80,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1.282.539.250**		**860.291.350**		**11.786.600**		**1.240.000**		**3.012.750**		**-**		**5.920.400**	-	*10.173.150*		*86,31%*	-	*870.464.500*		*67,87%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	230.403.250	45 Unit	161.908.750	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*45 Unit*	*161.908.750*	*75,00%*	*70,27%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1550 Kotak	50.000.000	1236 Kotak	41.414.250	Kotak 310	1.825.000	Kotak 0	-	Kotak -	1.212.750	35 Kotak	-	240 Kotak	-	*275 Kotak*	*1.212.750*	*88,71%*	*66,45%*	*1.511 Kotak*	*42.627.000*	*97,48%*	*85,25%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan Rutin Kantor	24765 Lembar	65.001.000	24515 Lembar	45.140.600	Lembar 4.953	4.791.400	Lembar 1500	740.000	Lembar -	1.400.000	3423 Lembar	-	- Lembar	2.590.200	*4.923 Lembar*	*4.730.200*	*99,39%*	*98,72%*	*29.438 Lembar*	*49.870.800*	*118,87%*	*76,72%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan /Material Lainnya untuk keperluan Rutin	155 Buah	9.000.000	139 Buah	8.100.000	Buah 31	1.800.000	Buah 8	500.000	Buah -	400.000	7 Buah	-	- Buah	-	*15 Buah*	*900.000*	*48,39%*	*50,00%*	*154 Buah*	*9.000.000*	*99,35%*	*100,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	965 Kali	928.135.000	610 Kali	603.727.750	Kali 193	3.370.200	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	193 Kali	3.330.200	*193 Kali*	*3.330.200*	*100,00%*	*98,81%*	*803 Kali*	*607.057.950*	*83,21%*	*65,41%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**421.940.000**		**375.936.818**		**106.644.800**		**25.970.402**		**22.292.981**		**7.575.133**		**42.119.614**	-	*97.958.130*		*91,85%*	-	*473.894.948*		*112,31%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	342.950.000	48 Bulan	303.986.368	Bulan 12	76.830.000	Bulan 2	8.873.002	Bulan -	12.142.981	7 Bulan	7.575.133	3 Bulan	41.894.614	*12 Bulan*	*70.485.730*	*100,00%*	*91,74%*	*60 Bulan*	*374.472.098*	*100,00%*	*109,19%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	78.990.000	53 Bulan	71.950.450	Bulan 12	29.814.800	Bulan 3	17.097.400	Bulan 3	10.150.000	3 Bulan	-	3 Bulan	225.000	*12 Bulan*	*27.472.400*	*100,00%*	*92,14%*	*65 Bulan*	*99.422.850*	*108,33%*	*125,87%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1.455.429.000**		**1.470.579.482**		**139.853.100**		**-**		**18.938.890**		**-**		**-**	-	*18.938.890*		*13,54%*	-	*1.489.518.372*		*102,34%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dengan baik	40 Unit	1.455.429.000	40 Unit	1.470.579.482	Unit 8	139.853.100	Unit 1	-	Unit -	18.938.890	3 Unit	-	- Unit	-	*4 Unit*	*18.938.890*	*50,00%*	*13,54%*	*44 Unit*	*1.489.518.372*	*110,00%*	*102,34%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**27,46**	**26,87**	**0,39**	**16,35**	**62,36**	**24,54**	**8,28**	**19,46**	98,49	87,23							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	DT	T							
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase peningkatan anggaran responsif gender terhadap belanja daerah**	**200 %**	**1.327.593.500**	**74,69 %**	**863.894.900**	**% 100**	**10.163.800**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	**498.900**	**24,00 %**	-	**0,00 %**	-	*24 %*	*498.900*	*24,00%*	*4,91%*	*98,69 %*	*864.393.800*	*49,35%*	*65,11%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**386.496.000**		**268.809.400**		**10.163.800**		**-**		**498.900**		**-**		**-**	-	*498.900*		*4,91%*	-	*269.308.300*		*69,68%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sinkronisasi pelaksanaan PUG	425 Orang	125.062.500	334 Orang	106.949.300	Orang 50	10.163.800	Orang 0	-	Orang -	498.900	12 Orang	-	- Orang	-	*12 Orang*	*498.900*	*24,00%*	*4,91%*	*346 Orang*	*107.448.200*	*81,41%*	*85,92%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG	250 Orang	261.433.500	165 Orang	161.860.100	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*165 Orang*	*161.860.100*	*66,00%*	*61,91%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**161.632.500**		**127.406.500**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	*0,00%*	-	*127.406.500*		*78,82%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	300 Orang	161.632.500	230 Orang	127.406.500	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*230 Orang*	*127.406.500*	*76,67%*	*78,82%*	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan**		**779.465.000**		**467.679.000**		-				-		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	**467.679.000**		**60,00%**	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga	Jumlah pendampingan pada korban kekerasan perempuan	5 Kali	779.465.000	3 Kali	467.679.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Kali***	***467.679.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	**4,91**	**24,00**	-	-	-	**24,00**	**4,91**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan**	**200 %**	**1.424.647.950**	**86,08 %**	**1.178.112.484**	**100 %**	**230.679.200**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	**21.600.000**	**59,62 %**	**109.479.500**	**19,23 %**	**60.400.000**	***78,85 %***	***191.479.500***	***78,85%***	***83,01%***	***164,92 %***	***1.369.591.984***	***82,46%***	***96,14%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**1.372.099.500**		**1.146.034.034**		**210.209.200**		-		**21.600.000**		**109.479.500**		**60.400.000**	-	***191.479.500***		***91,09%***	-	***1.337.513.534***		***97,48%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	150 Kasus	564.750.000	140 Kasus	452.579.500	20 Orang	109.700.000	0 Orang	-	- Orang	-	20 Orang	109.479.500	- Orang	-	***20 Orang***	***109.479.500***	***100,00%***	***99,80%***	***160 Kasus***	***562.059.000***	***106,67%***	***99,52%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya advokasi kebijakan dan pendampingan	60 Bulan	807.349.500	47 Bulan	693.454.534	20 Bulan	100.509.200	0 Bulan	-	- Bulan	21.600.000	7 Bulan	-	10 Bulan	60.400.000	***17 Bulan***	***82.000.000***	***85,00%***	***81,58%***	***64 Bulan***	***775.454.534***	***106,67%***	***96,05%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			**41.725.150**		**21.255.150**		**20.470.000**		-		-		-		-	-	-			-	***21.255.150***		***50,94%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan bgi perempuan korban kekerasan	150 Kasus	41.725.150	132 Kasus	21.255.150	12 Kasus	20.470.000	0 Kasus	-	- Kasus	2.669.750	4 Kasus	-	- Kasus	-	***4 Kasus***	***2.669.750***	***33,33%***	***13,04%***	***136 Kasus***	***23.924.900***	***90,67%***	***57,34%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**10.823.300**		**10.823.300**		-		-		-		-			-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	***10.823.300***		***100,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	150 Kasus	10.823.300	120 Kasus	10.823.300	Kasus		Kasus		Kasus		Kasus		Kasus		- ***Kasus***	-	***0,00%***	***0,00%***	***120 Kasus***	***10.823.300***	***80,00%***	***100,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	**9,36**	**59,62**	**47,46**	**19,23**	**26,18**	**78,85**	**83,01**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase cakupan anggota keluarga UPPKS**	**200 %**	**187.711.500**	**82,22 %**	**286.108.230**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- **%**	-	***0,00%***	***0,00%***	***82,22 %***	***286.108.230***	***41,11%***	***152,42%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan jejaring antar lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota**		**187.711.500**		**286.108.230**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***286.108.230***		***152,42%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penguatan jejaring antar lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	450 Orang	187.711.500	370 Orang	286.108.230	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***370 Orang***	***286.108.230***	***82,22%***	***152,42%***	DINAS PPPA DALDUK KB
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-			-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Peningkatan Fasilitas Hak Anak Pada Klaster Pendidikan**	**200 %**	**802.252.500**	**79,13 %**	**646.837.950**	**100 %**	**18.800.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**9.452.600**	**50,00 %**	**-**	**50,00 %**	**9.259.900**	***100,00 %***	***18.712.500***	***100,00%***	***99,53%***	***179,13 %***	***665.550.450***	***89,57%***	***82,96%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**435.208.500**		**378.889.650**		**18.800.000**		**-**		**9.452.600**		**-**		**9.259.900**	**-**	***18.712.500***		***99,53%***	**-**	***397.602.150***		***91,36%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	500 Orang	302.274.500	445 Orang	269.389.450	Orang 100	18.800.000	Orang 0	-	Orang -	9.452.600	50 Orang	-	50 Orang	9.259.900	***100 Orang***	***18.712.500***	***100,00%***	***99,53%***	***545 Orang***	***288.101.950***	***109,00%***	***95,31%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kordinasi dan Sinkronisasi	325 Orang	132.934.000	260 Orang	109.500.200	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***260 Orang***	***109.500.200***	***80,00%***	***82,37%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**367.044.000**		**267.948.300**		-				**-**		**-**			**-**	***-***	***0,00%***	***0,00%***	**-**	***267.948.300***		***73,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Jambore dan Forum Anak	900 Orang	367.044.000	660 Orang	267.948.300	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***660 Orang***	***267.948.300***	***73,33%***	***73,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**-**	**50,28**	**50,00**	**-**	**50,00**	**49,25**	**100,00**	**99,53**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak**	**200 %**	**10.072.313.500**	**66,92 %**	**6.297.722.150**	**100 %**	**594.655.999**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**138.018.050**	**32,97 %**	**36.763.450**	**19,78 %**	**104.339.000**	***52,75 %***	***279.120.500***	***52,75%***	***46,94%***	***119,67 %***	***6.576.842.650***	***59,84%***	***65,30%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**532.808.500**		**319.685.100**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	***-***	***0,00%***	***0,00%***	**-**	***319.685.100***		***60,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan	825 Orang	420.234.000	495 Orang	252.140.400	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***495 Orang***	***252.140.400***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak	200 Orang	112.574.500	120 Orang	67.544.700	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***120 Orang***	***67.544.700***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**9.155.475.000**		**5.904.333.050**		**520.059.999**				**138.018.050**		**36.763.450**		**104.339.000**	**-**	***279.120.500***	***0,00%***	***0,00%***	**-**	***6.183.453.550***		***67,54%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasillitas penanganan tindakan kekerasan anak	500 %	1.152.000.000	300 %	691.200.000	%		%		%		%		%		***- %***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***300 %***	***691.200.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya pendampingan terhadaap kasus anak	150 Kasus	1.175.975.000	153 Kasus	81.633.050	Kasus 3	234.034.000	Kasus 0	-	Kasus -	13.018.050	1 Kasus	26.763.450	1 Kasus	54.339.000	***2 Kasus***	***94.120.500***	***66,67%***	***40,22%***	***155 Kasus***	***175.753.550***	***103,33%***	***14,95%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerima hibah	63 Kegiatan	6.827.500.000	39 Kegiatan	5.131.500.000	Lembaga 8	286.025.999	Lembaga 0	-	Lembaga -	125.000.000	6 Lembaga	10.000.000	- Lembaga	50.000.000	***6 Lembaga***	***185.000.000***	***75,00%***	***64,68%***	***45 Kegiatan***	***5.316.500.000***	***71,43%***	***77,87%***	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**384.030.000**		**73.704.000**		**74.596.000**				-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*73.704.000*		*19,19%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan SDM pada lembaga penanganan korban kekerasan pada anak	200 Peserta	384.030.000	190 Peserta	73.704.000	Peserta 80	74.596.000	Peserta 0	-	Peserta -	-	23 Peserta	18.348.000	17 Peserta	12.930.000	*40 Peserta*	*31.278.000*	*50,00%*	*41,93%*	*230 Peserta*	*104.982.000*	*115,00%*	*27,34%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	23,21	32,97	6,18	19,78	17,55	52,75	46,94						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**99.753.500**	**80,00 %**	**79.802.800**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*79.802.800*	*40,00%*	*80,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**99.753.500**		**79.802.800**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*79.802.800*		*80,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	99.753.500	4 Unit	79.802.800	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*79.802.800*	*80,00%*	*80,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Total Fertility Rate (TFR)**	**200 %**	**519.950.000**	**96,14 %**	**242.036.840**	**% 100**	**396.600.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	**27.270.830**	**15,38 %**	**27.000.000**	**7,69 %**	**219.193.000**	*23,08 %*	*273.463.830*	*23,08%*	*68,95%*	*119,22 %*	*515.500.670*	*59,61%*	*99,14%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota**		**77.390.000**		**47.034.000**		-				-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*47.034.000*		*60,78%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100 Dokumen	77.390.000	80 Dokumen	47.034.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Dokumen*	*47.034.000*	*80,00%*	*60,78%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**442.560.000**		**195.002.840**		**396.600.000**		-		**27.270.830**		**27.000.000**		**219.193.000**	-	*273.463.830*		*68,95%*	-	*468.466.670*		*105,85%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2272 Blanko	11.360.000	2272 Blanko	11.348.640	Blanko		Blanko		Blanko		Blanko		Blanko		- *Blanko*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2.272 Blanko*	*11.348.640*	*100,00%*	*99,90%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan peembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	4 Dokumen	64.200.000	Dokumen		4 Dokumen	64.200.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	27.270.830	4 Dokumen	27.000.000	- Dokumen	9.393.000	*4 Dokumen*	*63.663.830*	*100,00%*	*99,16%*	*4 Dokumen*	*63.663.830*	*100,00%*	*99,16%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	2 Dokumen	212.400.000	Dokumen		2 Dokumen	212.400.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	209.800.000	*2 Dokumen*	*209.800.000*	*100,00%*	*98,78%*	*2 Dokumen*	*209.800.000*	*100,00%*	*98,78%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Tersedianya Buku Pelaporan Data	125 Buku	100.000.000	96 Buku	150.894.200	20 Dokumen	120.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*96 Buku*	*150.894.200*	*76,80%*	*150,89%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan	115 Orang	54.600.000	69 Orang	32.760.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*69 Orang*	*32.760.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	6,88	15,38	6,81	7,69	55,27	23,08	68,95						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SD						
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase Partisipasi Keluarga Dalam Program KB**	**200 %**	**39.070.566.750**	**54,19 %**	**29.543.072.049**	**% 100**	**4.189.865.000**	**% 14,57**	**291.885.000**	**% 0,00**	**541.161.100**	**50,79 %**	**924.501.350**	**14,78 %**	**1.368.423.621**	*80,14 %*	*3.125.971.071*	*80,14%*	*74,61%*	*134,33 %*	*32.669.043.120*	*67,17%*	*83,62%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Menurunnya Presentase Stunting Kab. Tanggamus**		**3.441.375.000**		**2.261.105.000**		**1.533.000.000**		**108.000.000**		**223.448.350**		**215.739.000**		**535.315.821**	- -	*1.082.503.171*		*70,61%*	- -	*3.343.608.171*		*97,16%*	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Dokumen	4.375.000	0 Dokumen	-	20 Kecamatan	80.000.000	0 Kecamatan	-	- Kecamatan	-	5 Kecamatan	19.964.000	15 Kecamatan	46.892.000	*20 Kecamatan*	*66.856.000*	*100,00%*	*83,57%*	*20 Dokumen*	*66.856.000*	*66,67%*	*1528,14%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuaiKearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuaiKearifan Budaya Lokal	50 Lembar	25.000.000	50 Lembar	24.975.000	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar		Lembar	- *Lembar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*50 Lembar*	*24.975.000*	*100,00%*	*99,90%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Unit KIT anti Stunting	160 Unit	2.170.000.000	131 Unit	1.804.290.000	Unit 50	150.000.000	Unit 0	-	Unit -	115.448.350	50 Unit	-	- Unit	26.794.596	*50 Unit*	*142.242.946*	*100,00%*	*94,83%*	*181 Unit*	*1.946.532.946*	*113,13%*	*89,70%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2400 Peserta	312.000.000	700 Peserta	51.840.000	Peserta 20	260.000.000	Peserta 0	-	Peserta -	-	10 Peserta	123.775.000	10 Peserta	123.000.000	*20 Peserta*	*246.775.000*	*100,00%*	*94,91%*	*720 Peserta*	*298.615.000*	*30,00%*	*95,71%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	400 Penyuluhan	810.000.000	230 Penyuluhan	360.000.000	Penyuluhan 400	963.000.000	Penyuluhan 50	108.000.000	Penyuluhan -	108.000.000	100 Penyuluhan	72.000.000	100 Penyuluhan	261.391.725	*250 Penyuluhan*	*549.391.725*	*62,50%*	*57,05%*	*480 Penyuluhan*	*909.391.725*	*120,00%*	*112,27%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Audit kasus stunting	20 Kecamatan	80.000.000	Kecamatan		Kecamatan 20	80.000.000	Kecamatan 0	-	Kecamatan -	-	0 Kecamatan	-	20 Kecamatan	77.237.500	*20 Kecamatan*	*77.237.500*	*100,00%*	*96,55%*	*20 Kecamatan*	*77.237.500*	*100,00%*	*96,55%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	20 Kecamatan	40.000.000	20 Kecamatan	20.000.000	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		- *Kecamatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*20 Kecamatan*	*20.000.000*	*100,00%*	*50,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Tercapainya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**3.499.215.500**		**3.608.031.015**		**888.000.000**		-		**241.600.000**		**294.800.000**		**351.600.000**	-	*888.000.000*		*100,00%*	-	*4.496.031.015*		*128,49%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Peserta Pembinaan IMP	250 Orang	75.312.500	150 Orang	45.187.500	Pekon 142	284.000.000	Pekon 0	-	Pekon -	-	72 Pekon	113.600.000	70 Pekon	170.400.000	*142 Pekon*	*284.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*292 Orang*	*329.187.500*	*116,80%*	*437,10%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah unit Sarana dan Prasarana	385 Unit	1.798.700.000	381 Unit	1.997.623.215	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*381 Unit*	*1.997.623.215*	*98,96%*	*111,06%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	302 Pekon	1.449.600.000	302 Pekon	1.449.600.000	Pekon 302	604.000.000	Pekon 0	-	Pekon -	241.600.000	203 Pekon	181.200.000	99 Pekon	181.200.000	*302 Pekon*	*604.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*604 Pekon*	*2.053.600.000*	*200,00%*	*141,67%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah kegiatan harganas	10 Kegiatan	175.603.000	8 Kegiatan	115.620.300	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Kegiatan*	*115.620.300*	*80,00%*	*65,84%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Terkendalinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**31.034.226.250**		**23.483.175.634**		**783.365.000**		**165.485.000**		-		**266.029.350**		**15.262.800**	-	*446.777.150*		*57,03%*	-	*23.929.952.784*		*77,11%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan Kb	50 Unit	102.778.000	30 Unit	61.666.800	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Unit*	*61.666.800*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Promosi dan Konseing KesproPengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 KKB	22.500.000	25 KKB	21.300.000	Tempat 25	27.000.000	Tempat 0	-	Tempat -	-	14 Tempat	17.700.000	11 Tempat	9.300.000	*25 Tempat*	*27.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*50 KKB*	*48.300.000*	*200,00%*	*214,67%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)	298 Aksektor	528.835.000	287 Aksektor	334.328.000	Aksektor 1.294	739.265.000	Aksektor 290	165.485.000	Aksektor -	-	697 Aksektor	248.329.350	- Aksektor	-	*987 Aksektor*	*413.814.350*	*76,28%*	*55,98%*	*1.274 Aksektor*	*748.142.350*	*427,52%*	*141,47%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Faskes	10.800.000	6 Faskes	3.000.000	Faskes 10	17.100.000	Faskes 0	-	Faskes -	-	0 Faskes	-	5 Faskes	5.962.800	*5 Faskes*	*5.962.800*	*50,00%*	*34,87%*	*11 Faskes*	*8.962.800*	*84,62%*	*82,99%*	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta Promosi dan Konseing Kespro	500 Peserta	204.128.250	300 Peserta	122.476.950	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		- Peserta	-	0,00%	0,00%	300 Peserta	122.476.950	60,00%	60,00%	DINAS PPPA DALDUK KB
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Pelayanan KB	100 Kecamatan	30.165.185.000	80 Kecamatan	22.940.403.884	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		- Kecamatan	-	0,00%	0,00%	80 Kecamatan	22.940.403.884	80,00%	76,05%	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			**1.095.750.000**		**190.760.400**		**985.500.000**		**18.400.000**		**76.112.750**		**147.933.000**		**466.245.000**	-	*708.690.750*	0,00%	0,00%	-	*899.451.150*		82,09%	DINAS PPPA DALDUK KB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	1 Dokumen	9.000.000	Dokumen		1 Dokumen	9.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	63 Kampung KB	1.086.750.000	51 Kampung KB	190.760.400	63 Kampung KB	976.500.000	2 Kampung KB	18.400.000	- Kampung KB	76.112.750	41 Kampung KB	147.933.000	17 Kampung KB	466.245.000	*60 Kampung KB*	*708.690.750*	*95,24%*	*72,57%*	*111 Kampung KB*	*899.451.150*	*176,19%*	*82,77%*	DINAS PPPA DALDUK KB
											14,57	**6,97**	**-**	**12,92**	**50,79**	**22,07**	**14,78**	**32,66**	**80,14**	**74,61**						
											Predikat kinerja															
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SD**						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribina**	**200 %**	**4.341.006.500**	**58,02 %**	**1.858.438.900**	**% 100**	**3.369.900.000**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**327.796.500**	**95,56 %**	**1.704.606.200**	**4,44 %**	**1.201.119.200**	*100,00 %*	*3.233.521.900*	*100,00%*	*95,95%*	*158,02 %*	*5.091.960.800*	*79,01%*	*117,30%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**4.341.006.500**		**1.858.438.900**		**3.369.900.000**		**-**		**327.796.500**		**1.704.606.200**		**1.201.119.200**	-	*3.233.521.900*		*95,95%*	-	*5.091.960.800*		*117,30%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	500 Warga binaan	1.297.515.500	300 Warga binaan	778.509.300	Warga binaan 20	360.000.000	Warga binaan 0	-	Warga binaan -	-	20 Warga binaan	232.840.000	- Warga binaan	-	*20 Warga binaan*	*232.840.000*	*100,00%*	*64,68%*	*320 Warga binaan*	*1.011.349.300*	*64,00%*	*77,95%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Kecamatan	2.918.200.000	20 Kecamatan	1.004.755.000	Kecamatan 20	2.979.900.000	Kecamatan 0	-	Kecamatan -	297.900.000	16 Kecamatan	1.471.766.200	4 Kecamatan	1.201.119.200	*20 Kecamatan*	*2.970.785.400*	*100,00%*	*99,69%*	*40 Kecamatan*	*3.975.540.400*	*66,67%*	*136,23%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	250 Orang	125.291.000	150 Orang	75.174.600	Orang 50	30.000.000	Orang 0	-	Orang -	29.896.500	50 Orang	-	- Orang	-	*50 Orang*	*29.896.500*	*100,00%*	*99,66%*	*200 Orang*	*105.071.100*	*80,00%*	*83,86%*	DINAS PPPA DALDUK KB
											-	**-**	**-**	**9,73**	**95,56**	**50,58**	**4,44**	**35,64**	**100,00**	**95,95**						
											Predikat kinerja															
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**R**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
11			**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**			-		-																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN			-		-																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERTANIAN			-		-																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** **%**	**101.768.164.315**	**91,21 %**	**90.029.518.644**	**100 %**	**12.346.212.020**	**16,64 %**	**2.627.387.015**	**9,88 %**	**3.849.519.596**	**39,47 %**	**2.279.880.254**	**21,69 %**	**2.369.557.497**	***87,68 %***	***11.126.344.362***	***87,68%***	***90,12%***	***178,89 %***	***101.155.863.006***	***89,44%***	***99,40%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**362.227.500**		**327.315.300**		**50.618.300**		**-**		**5.400.000**		**2.499.900**		**-**	***-***	***7.899.900***		***15,61%***	***-***	***335.215.200***		***92,54%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja	150 Eksemplar Dokumen	51.915.000	135 Eksemplar Dokumen	38.442.000	20 Eksemplar Dokumen	5.950.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***135 Eksemplar Dokumen***	***38.442.000***	***90,00%***	***74,05%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	375 Eksemplar Dokumen	213.982.500	375 Eksemplar Dokumen	205.128.300	75 Eksemplar Dokumen	26.454.300	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	5.400.000	5 Eksemplar Dokumen	2.499.900	- Eksemplar Dokumen	-	***15 Eksemplar Dokumen***	***7.899.900***	***20,00%***	***29,86%***	***390 Eksemplar Dokumen***	***213.028.200***	***104,00%***	***99,55%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	38.640.000	250 Eksemplar Dokumen	34.464.000	50 Eksemplar Dokumen	9.300.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***250 Eksemplar Dokumen***	***34.464.000***	***100,00%***	***89,19%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	105 Eksemplar Dokumen	15.600.000	98 Eksemplar Dokumen	15.600.000	21 Eksemplar Dokumen	4.620.000,	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***98 Eksemplar Dokumen***	***15.600.000***	***93,33%***	***100,00%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15.600.000	40 Eksemplar Dokumen	11.580.000	10 Eksemplar Dokumen	4.620.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***40 Eksemplar Dokumen***	***11.580.000***	***80,00%***	***74,23%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	150 Eksemplar Dokumen	8.250.000	122 Eksemplar Dokumen	6.600.000	30 Laporan	1.650.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	***- Laporan***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***122 Eksemplar Dokumen***	***6.600.000***	***81,33%***	***80,00%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahanya	50 Eksemplar Dokumen	18.240.000	52 Eksemplar Dokumen	15.501.000	10 Laporan	2.644.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	***- Laporan***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***52 Eksemplar Dokumen***	***15.501.000***	***104,00%***	***84,98%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa**		**96.564.037.565**		**84.238.536.901**		**11.531.460.920**		**2.543.845.011**		**3.755.784.046**		**2.237.742.539**		**2.269.218.477**	***-***	***10.806.590.073***		***93,71%***	***-***	***95.045.126.974***		***98,43%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	665 Orang	85.615.537.565	687 Orang	74.687.296.901	146 Orang	10.545.320.920	33 Orang	2.267.545.011	34 Orang	3.487.784.046	33 Orang	2.103.742.539	46 Orang	2.072.343.477	***146 Orang***	***9.931.415.073***	***100,00%***	***94,18%***	***833 Orang***	***84.618.711.974***	***125,26%***	***98,84%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	725 Orang	10.126.500.000	713 Orang	8.807.300.000	131 Orang	861.000.000	33 Orang	201.000.000	33 Orang	268.000.000	33 Orang	134.000.000	32 Orang	196.875.000	***131 Orang***	***799.875.000***	***100,00%***	***92,90%***	***844 Orang***	***9.607.175.000***	***116,41%***	***94,87%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	350 Orang /Kali	822.000.000	289 Orang /Kali	743.940.000	12 Kali	125.140.000	2 Kali	75.300.000	4 Kali	-	3 Kali	-	- Kali	-	***9 Kali***	***75.300.000***	***75,00%***	***60,17%***	***298 Orang /Kali***	***819.240.000***	***85,14%***	***99,66%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan**		**144.400.000**		**40.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**			***-***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***-***	***40.000.000***		***27,70%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	605 Stel	144.400.000	463 Stel	40.000.000	Stel		Stel 0		Stel		Stel				***- Stel***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***463 Stel***	***40.000.000***	***76,53%***	***27,70%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**2.098.669.250**		**3.199.333.004**		**155.127.800**		**22.491.254**		**4.931.250**		**9.437.115**		**12.600.720**	***-***	***49.460.339***		***31,88%***	***-***	***3.248.793.343***		***154,80%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Unit	457.988.000	91 Unit	2.025.653.400	1 Paket	13.888.000	0 Paket	1.052.000	- Paket	470.000	0 Paket	-	- Paket	-	***- Paket***	***1.522.000***	***0,00%***	***10,96%***	***91 Unit***	***2.027.175.400***	***91,00%***	***442,63%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	16750 Kotak	361.250.000	16254 Kotak	327.902.250	1 Paket	62.618.000	0 Paket	6.682.500	- Paket	3.341.250	1 Paket	6.682.500	- Paket	12.600.720	***1 Paket***	***29.306.970***	***100,00%***	***46,80%***	***16.255 Kotak***	***357.209.220***	***97,04%***	***98,88%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6000 Buah	77.919.500	5390 Buah	69.722.750	1.200 Buah	16.891.400	200 Buah	1.229.600	100 Buah	1.120.000	600 Buah	720.000	300 Buah	-	***1.200 Buah***	***3.069.600***	***100,00%***	***18,17%***	***6.590 Buah***	***72.792.350***	***109,83%***	***93,42%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	10355 Buah	322.281.750	8599 Buah	231.503.150	1 Paket	13.011.400	0 Paket	2.826.500	- Paket	-	0 Paket	1.948.200	1 Paket	-	***1 Paket***	***4.774.700***	***100,00%***	***36,70%***	***8.600 Buah***	***236.277.850***	***83,05%***	***73,31%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	960 Kali	879.230.000	781 Kali	544.551.454	12 Laporan	48.719.000	2 Laporan	10.700.654,00	- Laporan	-	1 Laporan	86.415	- Laporan	-	***3 Laporan***	***10.787.069***	***25,00%***	***22,14%***	***784 Kali***	***555.338.523***	***81,67%***	***63,16%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**936.375.000**		**831.327.156**		**328.905.000**		**29.133.150**		**61.377.300**		**9.489.300**		**87.738.300**	-	*187.738.050*		*57,08%*	-	*1.019.065.206*		*108,83%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	389.250.000	57 Bulan	369.217.156	12 Laporan	148.750.000	3 Laporan	9.888.150	- Laporan	9.217.300	6 Laporan	9.339.300	3 Laporan	36.238.300	*12 Laporan*	*64.683.050*	*100,00%*	*43,48%*	*69 Bulan*	*433.900.206*	*115,00%*	*111,47%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	40 Kali	547.125.000	36 Kali	462.110.000	12 Laporan	180.155.000	3 Laporan	19.245.000	3 Laporan	52.160.000	3 Laporan	150.000	- Laporan	51.500.000	*9 Laporan*	*123.055.000*	*75,00%*	*68,31%*	*45 Kali*	*585.165.000*	*112,50%*	*106,95%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**1.662.455.000**		**1.393.006.283**		**280.100.000**		**31.917.600**		**22.027.000**		**20.711.400**		-	-	*74.656.000*		*26,65%*	-	*1.467.662.283*		*88,28%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	10 Unit	376.700.000	8 Unit	386.442.240	Unit 2	85.940.000	Unit 2	15.448.000	Unit -	10.563.600	Unit -	8.712.800	- Unit	-	*2 Unit*	*34.724.400*	*100,00%*	*40,41%*	*10 Unit*	*421.166.640*	*100,00%*	*111,80%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan baik	65 Unit	1.009.900.000	52 Unit	812.880.043	Unit 15	194.160.000	Unit 15	16.469.600	Unit - 10	11.463.400	Unit 10	11.998.600	- Unit	-	*15 Unit*	*39.931.600*	*100,00%*	*20,57%*	*67 Unit*	*852.811.643*	*103,08%*	*84,45%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara dengan baik	M	275.855.000	0 M	193.684.000	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *M*	*193.684.000*		*70,21%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**16,64**	**21,28**	**9,88**	**31,18**	**39,47**	**18,47**	**21,69**	**19,19**	**87,68**	**90,12**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari**	**200 %**	**3.013.230.500**	**60,01 %**	**2.537.760.350**	**% 100**	**707.560.000**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**6.920.000**	**0,00 %**	**4.759.650**	**0,00 %**	**74.000.000**	- %	*85.679.650*	*0,00%*	*12,11%*	*60,01 %*	*2.623.440.000*	*30,01%*	*87,06%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok**		**1.725.000.000**		**1.544.359.800**		**360.000.000**		**-**		**-**		**-**		**60.000.000**	-	*60.000.000*		*16,67%*	-	*1.604.359.800*		*93,01%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pangan Pokok Lokal	10 Kelompok	1.725.000.000	8 Kelompok	1.544.359.800	1 Laporan	360.000.000	0 Laporan	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	60.000.000	- *Laporan*	*60.000.000*	*0,00%*	*16,67%*	*8 Kelompok*	*1.604.359.800*	*80,00%*	*93,01%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sudah Terpenuhi**		**317.912.500**		**196.401.900**		-		**-**		**-**		**-**			-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*196.401.900*		*61,78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	25000 Kg	317.912.500	15000 Kg	196.401.900	Kg		Kg		Kg		Kg		Kg		- *Kg*	-	*0,00%*	*0,00%*	*15.000 Kg*	*196.401.900*	*60,00%*	*61,78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Tencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**970.318.000**		**796.998.650**		**347.560.000**		**-**		**6.920.000**		**4.759.650**		**14.000.000**	-	*25.679.650*		*7,39%*	-	*822.678.300*		*84,78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi dan Pemanfaatan Pekarangan Masayarakat	10 Kali	970.318.000	7 Kali	796.998.650	1 Laporan	347.560.000	0 Laporan	-	Laporan -	6.920.000	0 Laporan	4.759.650	- Laporan	14.000.000	- *Laporan*	*25.679.650*	*0,00%*	*7,39%*	*7 Kali*	*822.678.300*	*70,00%*	*84,78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**-**	**0,98**	**-**	**0,67**	**-**	**10,46**	-	**12,11**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**200 %**	**862.806.500**	**84,41 %**	**1.104.146.400**	**% 100**	**29.365.500**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**2.420.000**	**0,00 %**	**2.500.000**	**0,00 %**	-	- %	*4.920.000*	*0,00%*	*16,75%*	*84,41 %*	*1.109.066.400*	*42,20%*	*128,54%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**		**862.806.500**		**1.104.146.400**		**29.365.500**		**-**		**2.420.000**		**2.500.000**		**-**	-	*4.920.000*		*16,75%*	-	*1.109.066.400*		*128,54%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bimtek dan pemberian bantuan bibit komoditas hortikultura kepada petani	28800 Batang	862.806.500	24310 Batang	1.104.146.400	Dokumen 1	29.365.500	Dokumen 0	-	Dokumen -	2.420.000	0 Dokumen	2.500.000	- Dokumen	-	- *Dokumen*	*4.920.000*	*0,00%*	*16,75%*	*24.310 Batang*	*1.109.066.400*	*84,41%*	*128,54%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-	8,24	-	8,51	-	-	-	16,75					
											Predikat kinerja		SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian**	**200 %**	**18.417.768.230**	**79,17 %**	**15.624.309.778**	**% 100**	**3.613.269.560**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	96,15 %	884.107.860	*96,15 %*	*884.107.860*	*96,15%*	*24,47%*	*175,32 %*	*16.508.417.638*	*87,66%*	*89,63%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengembangan Prasarana Pertanian	**Terlaksnanya Pengembangan Prasarana Pertanian secara maksimal**		**7.247.213.730**		**4.607.871.888**		**209.161.700**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*4.607.871.888*		*63,58%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	5 Peta	7.247.213.730	4 Peta	4.607.871.888	1 Dokumen	209.161.700	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Peta*	*4.607.871.888*	*80,00%*	*63,58%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian**		**11.170.554.500**		**11.016.437.890**		**3.404.107.860**		-		-		-	884.107.860	-	*884.107.860*		*0,00%*	-	*11.900.545.750*		*106,53%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 Unit	75.250.000	1 Unit	75.250.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1 Unit*	*75.250.000*	*0,00%*	*0,00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Hortikultura, dan Perkebunan	15 Unit	1.829.622.500	13 Unit	1.546.698.000	Unit 24	3.240.000.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	24 Unit	720.000.000	*24 Unit*	*720.000.000*	*100,00%*	*22,22%*	*37 Unit*	*2.266.698.000*	*246,67%*	*123,89%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dana, jumlah pembangunan dan perbaikan DAM Parit	10 Unit	1.222.000.000	8 Unit	974.556.500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Unit*	*974.556.500*	*80,00%*	*79,75%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah dana dan pembangunan Sumur dalam	65 Unit	8.043.682.000	50 Unit	8.419.933.390	Unit 1	164.107.860	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit	164.107.860	*1 Unit*	*164.107.860*	*100,00%*	*100,00%*	*51 Unit*	*8.584.041.250*	*78,46%*	*106,72%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-	-	-	-	96,15	24,47	96,15	24,47					
											Predikat kinerja		SR		SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SR					
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian**	**200 %**	**2.844.146.500**	#### %	**2.530.155.835**	**% 100**	**586.248.700**	% 0,00	-	% 0,00	3.999.700	0,00 %	**4.403.000**	0,00 %	-	- %	*8.402.700*	*0,00%*	*1,43%*	*321,80 %*	*2.538.558.535*	*160,90%*	*89,26%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dapat dilaksnakan dengan**		**2.844.146.500**		**2.530.155.835**		**586.248.700**		-		**3.999.700**		**4.403.000**		-	-	*8.402.700*		*1,43%*	-	*2.538.558.535*		*89,26%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	250 Orang	2.696.319.500	1359 Orang	2.340.791.485	50 Ha	51.513.700	Ha 0	-	Ha -	2.420.000	0 Ha	2.499.700	- Ha	-	*- Ha*	*4.919.700*	*0,00%*	*9,55%*	*1.359 Orang*	*2.345.711.185*	*543,60%*	*87,00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah petani yang mengikuti program AUTP dan asuransi ternak	250 Orang	147.827.000	250 Orang	189.364.350	Laporan 1	534.735.000	Laporan 0	-	Laporan -	1.579.700	0 Laporan	1.903.300	- Laporan	-	*- Laporan*	*3.483.000*	*0,00%*	*0,65%*	*250 Orang*	*192.847.350*	*100,00%*	*130,45%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-	0,68	-	0,75	-	-	-	1,43					
											Predikat kinerja		SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang dibina**	**200 %**	**31.085.250.000**	**81,92 %**	**22.109.892.474**	**% 100**	**1.788.616.600**	% 0,00	-	% 0,00	**3.220.000**	0,00 %	**2.507.200**	0,00 %	-	- %	*5.727.200*	*0,00%*	*0,32%*	*81,92 %*	*22.115.619.674*	*40,96%*	*71,15%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terwujudnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**31.085.250.000**		**22.109.892.474**		**1.788.616.600**		-		**3.220.000**		**2.507.200**		-	-	*5.727.200*		*0,32%*	-	*22.115.619.674*		*71,15%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang mendapatkan Biaya Operasional	645 Orang	2.185.250.000	522 Orang	2.252.165.174	Unit 1	538.616.600	Unit 0	-	Unit -	3.220.000	0 Unit	2.507.200	- Unit	-	*- Unit*	*5.727.200*	*0,00%*	*1,06%*	*522 Orang*	*2.257.892.374*	*80,93%*	*103,32%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Hibah	500 %	2.400.000.000	425 %	1.605.900.300	% 0	-	%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*425 %*	*1.605.900.300*	*85,00%*	*66,91%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan sekolah lapang peningkatan di 13 DI daerah irigasi pertanian IPDMIP	160 DI	26.500.000.000	122 DI	18.251.827.000	DI 31	1.250.000.000	DI 0	-	DI -	-	0 DI	-	- DI	-	*- DI*	-	*0,00%*	*0,00%*	*122 DI*	*18.251.827.000*	*76,25%*	*68,87%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-	0,18	-	0,14	-	-	-	0,32					
											Predikat kinerja		SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
12			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**																								
			LINGKUNGAN HIDUP																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**47.453.782.600**	**54,10 %**	**41.173.559.692**	**% 100**	**4.441.373.452**	% 28,14	**1.028.754.551**	% 2,27	**1.371.729.469**	% 7,35	**881.686.408**	% 5,08	**770.565.353**	*42,83 %*	*4.052.735.781*	*0,43*	*91,25%*	*96,94 %*	*45.226.295.473*	*48,47%*	*95,31%*	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**178.900.000**		**119.192.000**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	**119.192.000**		**66,62%**	DINAS LH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahannya	15 Dokumen	53.100.000	12 Dokumen	38.810.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	12 *Dokumen*	*38.810.000*	*80,00%*	*73,09%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	20 Eksemplar Dokumen	60.600.000	14 Eksemplar Dokumen	37.350.000	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	14 *Eksemplar Dokumen*	*37.350.000*	*70,00%*	*61,63%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15.000.000	4 Eksemplar Dokumen	9.900.000	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	4 *Eksemplar Dokumen*	*9.900.000*	*80,00%*	*66,00%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15.000.000	4 Eksemplar Dokumen	9.900.000	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	4 *Eksemplar Dokumen*	*9.900.000*	*80,00%*	*66,00%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15.000.000	4 Eksemplar Dokumen	9.900.000	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	4 *Eksemplar Dokumen*	*9.900.000*	*80,00%*	*66,00%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan	10 Eksemplar Dokumen	10.100.000	8 Eksemplar Dokumen	7.272.000	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	8 *Eksemplar Dokumen*	*7.272.000*	*80,00%*	*72,00%*	DINAS LH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	15 Dokumen	10.100.000	9 Dokumen	6.060.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	9 *Dokumen*	*6.060.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS LH
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**22.400.223.350**		**20.665.995.274**		**3.953.214.302**		**891.584.372**		**1.286.416.881**		**838.234.391**		**713.489.741**	-	*3.729.725.385*		*94,35%*	-	*24.395.720.659*		*108,91%*	DINAS LH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	771 ASN	17.916.923.350	145 ASN	16.204.901.274	ASN 25	2.975.174.302	ASN 6	659.589.372	ASN 6	962.776.881	7 ASN	675.184.391	ASN 6	492.744.741	*25 ASN*	*2.790.295.385*	*100,00%*	*93,79%*	*170 ASN*	*18.995.196.659*	*22,05%*	*106,02%*	DINAS LH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	770 Orang	3.942.300.000	229 Orang	4.005.020.000	Orang 46	893.400.000	Orang 11	219.225.000	Orang 12	292.300.000	13 Orang	146.150.000	Orang 10	214.825.000	*46 Orang*	*872.500.000*	*100,00%*	*97,66%*	*275 Orang*	*4.877.520.000*	*35,71%*	*123,72%*	DINAS LH
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pentausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	60 Bulan	541.000.000	54 Bulan	456.074.000	Bulan 12	84.640.000	Bulan 3	12.770.000	Bulan 3	31.340.000	2 Bulan	16.900.000	Bulan -	5.920.000	*8 Bulan*	*66.930.000*	*66,67%*	*79,08%*	*62 Bulan*	*523.004.000*	*103,33%*	*96,67%*	DINAS LH
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan baik**		**347.875.000**		**241.150.000**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	**241.150.000**		**69,32%**	DINAS LH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	380 Stell	199.750.000	228 Stell	119.850.000	Stell		Stell		Stell		Stell		Stell		- *Stell*	-	*0,00%*	*0,00%*	228 *Stell*	*119.850.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS LH
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	5 Orang	148.125.000	4 Orang	121.300.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	4 *Orang*	*121.300.000*	*80,00%*	*81,89%*	DINAS LH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**2.932.779.250**		**2.126.641.645**		**194.067.300**		**83.751.800**		**9.100.000**		**26.097.800**		**9.631.000**	-	*128.580.600*		*66,26%*	-	*2.255.222.245*		*76,90%*	DINAS LH
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	625 Buah	35.300.000	472 Buah	28.031.000	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		- *Buah*	-	*0,00%*	*0,00%*	472 *Buah*	*28.031.000*	*75,52%*	*79,41%*	DINAS LH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	205 Buah	684.366.250	146 Buah	606.691.500	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		- *Buah*	-	*0,00%*	*0,00%*	146 *Buah*	*606.691.500*	*71,22%*	*88,65%*	DINAS LH
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1010 Buah	45.350.000	749 Buah	35.688.000	Paket 194	97.830.000	Paket 20	69.375.000	Paket -	950.000	0 Paket	2.987.000	- Paket	-	*20 Paket*	*73.312.000*	*10,31%*	*74,94%*	*769 Buah*	*109.000.000*	*76,14%*	*240,35%*	DINAS LH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk keperluan rutin kantor	8900 Porsi	154.000.000	5340 Porsi	96.074.000	Paket 480	9.300.000	Paket 109	2.111.200	Paket -	-	0 Paket	-	48 Paket	2.342.400	*157 Paket*	*4.453.600*	*32,71%*	*47,89%*	*5.497 Porsi*	*100.527.600*	*61,76%*	*65,28%*	DINAS LH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan rutin kantor	66625 Eksemplar	109.555.500	34165 Eksemplar	82.315.500	Paket 125	30.770.500	Paket 9	2.265.600	Paket 6	7.700.000	38 Paket	8.456.300	- Paket	3.708.000	*53 Paket*	*22.129.900*	*42,40%*	*71,92%*	*34.218 Eksemplar*	*104.445.400*	*51,36%*	*95,34%*	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor yang disediakan	2750 Eksemplar	214.492.500	2297 Eksemplar	171.568.400	Paket 469	15.181.800	Paket 311	10.000.000	Paket -	-	4 Paket	831.500	10 Paket	2.758.600	*325 Paket*	*13.590.100*	*69,30%*	*89,52%*	*2.622 Eksemplar*	*185.158.500*	*95,35%*	*86,32%*	DINAS LH
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	8265 Orang kali hari	1.689.715.000	5140 Orang kali hari	1.106.273.245	281 Laporan	40.985.000	0 Laporan	-	2 Laporan	450.000	52 Laporan	13.823.000	4 Laporan	822.000	*58 Laporan*	*15.095.000*	*20,64%*	*36,83%*	*5.198 Orang kali*	*1.121.368.245*	*62,89%*	*66,36%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**853.280.000**		**748.214.753**		**294.091.850**		**53.418.379**		**76.212.588**		**17.354.217**		**47.444.612**	*-*	*194.429.796*		*66,11%*	*-*	*942.644.549*		*110,47%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	678.280.000	48 Bulan	568.834.753	12 Bulan	294.091.850	0 Bulan	53.418.379	5 Bulan	76.212.588	3 Bulan	17.354.217	- Bulan	47.444.612	*8 Bulan*	*194.429.796*	*66,67%*	*66,11%*	*56 Bulan*	*763.264.549*	*93,33%*	*112,53%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor yang disediakan	20 Kali	175.000.000	10 Kali	179.380.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*10 Kali*	*179.380.000*	*50,00%*	*102,50%*	DINAS LH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan penerintahdaerah yang**		**21.088.600.000**		**17.513.516.020**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	*-*	*-*		*0,00%*	*-*	*17.513.516.020*		*83,05%*	DINAS LH
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang diaadakan	79 Unit	1.330.000.000	43 Unit	1.713.336.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*43 Unit*	*1.713.336.000*	*54,43%*	*128,82%*	DINAS LH
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	5 Unit	17.750.000.000	4 Unit	14.190.900.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*14.190.900.000*	*80,00%*	*79,95%*	DINAS LH
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	2.008.600.000	17 Unit	1.609.280.020	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*17 Unit*	*1.609.280.020*	*85,00%*	*80,12%*	DINAS LH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**3.089.265.000**		**2.552.353.244**		**708.763.935**		**148.918.135**		**93.094.600**		**51.103.200**		**80.746.600**	*-*	*373.862.535*		*52,75%*	*-*	*2.926.215.779*		*94,72%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dengan baik	20 Unit	220.850.000	5 Unit	200.062.000	Unit 1	44.170.000	Unit 0	5.632.000	Unit -	20.142.000	1 Unit	5.632.000	- Unit	2.816.000	*1 Unit*	*34.222.000*	*100,00%*	*77,48%*	*6 Unit*	*234.284.000*	*30,00%*	*106,08%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan oprasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik	400 Unit	2.544.940.000	66 Unit	2.111.106.244	Unit 19	532.599.200	Unit 1	22.066.400	Unit 4	72.952.600,00	1 Unit	41.311.200	2 Unit	77.930.600	*8 Unit*	*214.260.800*	*42,11%*	*40,23%*	*74 Unit*	*2.325.367.044*	*18,50%*	*91,37%*	DINAS LH
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan baik	205 Unit	172.950.000	152 Unit	120.970.000	Unit 10	131.994.735	Unit 1	121.219.735	Unit -	-	2 Unit	4.160.000	5 Unit	-	*8 Unit*	*125.379.735*	*80,00%*	*94,99%*	*160 Unit*	*246.349.735*	*78,05%*	*142,44%*	DINAS LH
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	150.525.000	4 Unit	120.215.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*120.215.000*	*80,00%*	*79,86%*	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**28,14**	**23,16**	**2,27**	**30,89**	**7,35**	**19,85**	**5,08**	**17,35**	**42,83**	**91,25**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**						
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai**	**200 %**	**3.842.050.000**	**81,82 %**	**3.039.614.000**	**100 %**	**767.850.000**	**0,00 %**	**22.423.110**	**0,00 %**	**252.390.690**	**66,67 %**	**214.243.320**	**0,00 %**	**-**	*67 %*	*489.057.120*	*66,67%*	*63,69%*	*148,48 %*	*3.528.671.120*	*74,24%*	*91,84%*	DINAS LH
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			**80.350.000**		**76.819.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	*-*	*-*		*0,00%*	*-*	*76.819.000*			DINAS LH
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.350.000	1 Dokumen	76.819.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		*- Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*1 Dokumen*	*76.819.000*	*100,00%*	*95,61%*	DINAS LH
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Persetase KLHS kabupaten yang terlaksana**		**3.761.700.000**		**2.962.795.000**		**767.850.000**		**22.423.110**		**252.390.690**		**214.243.320**		**-**	*-*	*489.057.120*		*63,69%*	*-*	*3.451.852.120*		*91,76%*	DINAS LH
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHs Tata Ruang yang tersusun	5 Dokumen	1.906.250.000	4 Dokumen	1.505.052.500	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		*- Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Dokumen*	*1.505.052.500*	*80,00%*	*78,95%*	DINAS LH
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	5 Dokumen	1.855.450.000	4 Dokumen	1.457.742.500	3 Dokumen	767.850.000	0 Dokumen	22.423.110	- Dokumen	252.390.690	2 Dokumen	214.243.320	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*489.057.120*	*66,67%*	*63,69%*	*6 Dokumen*	*1.946.799.620*	*120,00%*	*104,92%*	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**2,92**	**-**	**32,87**	**66,67**	**27,90**	**-**	**-**	**66,67**	**63,69**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**R**						
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**200 %**	**1.118.745.500**	**86,74 %**	**1.054.806.700**	**100 %**	**88.820.000**	**0,00 %**	**-**	**80,56 %**	**33.495.000**	**0,00 %**	**-**	**19,44 %**	**38.940.000**	*100,00 %*	*72.435.000*	*100,00%*	*81,55%*	*186,74 %*	*1.127.241.700*	*93,37%*	*100,76%*	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan informasi pencegahan pencemaran dan atau/ kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota**		**571.300.500**		**528.030.400**		**88.820.000**		-		**33.495.000**		-		**38.940.000**	-	***72.435.000***		***81,55%***	-	***600.465.400***		***105,11%***	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air	385 Sampl e	422.933.500	327 Sampl e	344.996.100	Dokumen 36	88.820.000	Dokumen 0	-	Dokumen 29	33.495.000	0 Dokumen	-	7 Dokumen	38.940.000	***36 Dokumen***	***72.435.000***	***100,00%***	***81,55%***	***363 Sampl e***	***417.431.100***	***94,29%***	***98,70%***	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca , mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	10 Pekon	148.367.000	9 Pekon	183.034.300	Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		***- Pekon***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9 Pekon***	***183.034.300***	***90,00%***	***123,37%***	DINAS LH
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilaksanakan**		**242.422.500**		**230.894.500**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***230.894.500***		***95,24%***	DINAS LH
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran / atau kerusakan lingkungan hidup	75 Dokumen Analisa	242.422.500	72 Dokumen Analisa	230.894.500	Dokumen Analisa		Dokumen Analisa		Dokumen Analisa		Dokumen Analisa		Dokumen Analisa	-	***- Dokumen Analisa***	-	***0,00%***	***0,00%***	***72 Dokumen Analisa***	***230.894.500***	***96,00%***	***95,24%***	DINAS LH
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Luasan lahan yang dilakukan pemulihan**		**305.022.500**		**295.881.800**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***295.881.800***		***97,00%***	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Luas Lahan Pemulihan	5 Ha	305.022.500	4 Ha	295.881.800	Ha		Ha		Ha		Ha		Ha		***- Ha***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Ha***	***295.881.800***	***80,00%***	***97,00%***	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**80,56**	**37,71**	-	-	**19,44**	**43,84**	**100,00**	**81,55**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**T**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**						
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam**	**200 %**	**1.395.271.500**	**86,67 %**	**1.268.377.669**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***86,67 %***	***1.268.377.669***	***43,33%***	***90,91%***	DINAS LH
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah luasan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan yang dikonservasi**		**1.395.271.500**		**1.268.377.669**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***1.268.377.669***		***90,91%***	DINAS LH
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah luasan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan yang dikonservasi	5 Ha	497.421.500	4 Ha	476.819.500	Ha		Ha		Ha		Ha		Ha		***- Ha***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Ha***	***476.819.500***	***80,00%***	***95,86%***	DINAS LH
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah taman keanekaragaman hayati lainnya yang dipelihara	10 Lokasi Pengelolaan	897.850.000	9 Lokasi Pengelolaan	791.558.169	Lokasi Pengelolaan		Lokasi Pengelola		Lokasi Pengelola		Lokasi Pengelolaan		Lokasi Pengelolaan		***- Lokasi Pengelolaan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9 Lokasi Pengelolaan***	***791.558.169***	***90,00%***	***88,16%***	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase jumlah TPS limbah B3 di Kabupaten Tanggamus**	**200 %**	**91.329.000**	**71,33 %**	**220.582.450**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***71,33 %***	***220.582.450***	***35,67%***	***241,53%***	DINAS LH
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase kegiatan usaha yang memiliki TPS Limbah**		**91.329.000**		**220.582.450**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***220.582.450***		***241,53%***	DINAS LH
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sarana dan prasarana limbah B3	150 Usaha	45.664.500	90 Usaha	27.398.700	Usaha		Usaha	-	Usaha		Usaha		Usaha		***- Usaha***	-	***0,00%***	***0,00%***	***90 Usaha***	***27.398.700***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS LH
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang terverifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3	150 Usaha	45.664.500	124 Usaha	193.183.750	Usaha		Usaha		Usaha		Usaha		Usaha		***- Usaha***	-	***0,00%***	***0,00%***	***124 Usaha***	***193.183.750***	***82,67%***	***423,05%***	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**200** %	**914.150.000**	**62,61** %	**717.921.000**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	**0,00%**	**0,00%**	***62,61*** %	***717.921.000***	***31,30%***	***78,53%***	DINAS LH
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan usaha yang patuh terhadap undang undang lingkungan hidup dan peraturan peraturan lingkungan hidup**		**914.150.000**		**717.921.000**		-		-		-		-	-	-	**0,00%**	-	***717.921.000***		***78,53%***	DINAS LH
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Kegiatan Usaha Yang difasilitasi terkait pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan / izin PPLH	55 Usaha Kegiatan	863.700.000	33 Usaha Kegiatan	682.485.000	Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan	- ***Usaha Kegiatan***	-	**0,00%**	**0,00%**	***33 Usaha Kegiatan***	***682.485.000***	***60,00%***	***79,02%***	DINAS LH
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Mempunyai Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	175 Usaha Kegiatan	50.450.000	111 Usaha Kegiatan	35.436.000	Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan		Usaha Kegiatan	- ***Usaha Kegiatan***	-	**0,00%**	**0,00%**	***111 Usaha Kegiatan***	***35.436.000***	***63,43%***	***70,24%***	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		**200** %	**197.264.500**	**80,00** %	**193.187.400**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	**0,00%**	**0,00%**	***80,00*** %	***193.187.400***	***40,00%***	***97,93%***	DINAS LH
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Persentase tersedianya informasi kearifan lokal terkait dengan PPLH**		**197.264.500**		**193.187.400**		-		-		-		-	-	-	**0,00%**	-	***193.187.400***		***97,93%***	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	197.264.500	4 Dokumen	193.187.400	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	**0,00%**	**0,00%**	***4 Dokumen***	***193.187.400***	***80,00%***	***97,93%***	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**200** %	**637.350.000**	**71,11** %	**440.052.400**	%	**60.000.220**	%	-	%	-		**20.000.000**		-	***100*** %	***20.000.000***	***100,00%***	***33,33%***	***171,11*** %	***460.052.400***	***85,56%***	***72,18%***	DINAS LH
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan pendidikan,pelatiha dan penyuluhan lingkungan hidup**		**637.350.000**		**440.052.400**		**60.000.220**		-		-		**20.000.000**		-	-	***20.000.000***		***33,33%***	-	***460.052.400***		***72,18%***	DINAS LH
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dankompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	25 Lembaga	325.000.000	18 Lembaga	230.000.000	Lembaga 1	60.000.220	Lembaga 0	-	Lembaga -	-	1 Lembaga	20.000.000	- Lembaga	-	***1 Lembaga***	***20.000.000***	**100,00%**	**33,33%**	***19 Lembaga***	***250.000.000***	***76,00%***	***76,92%***	DINAS LH
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Unit Barang Yang Akan Diserahkan Dalam Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan yang dilaksanakan	20 Pendamping an	312.350.000	14 Pendamping an	210.052.400	Pendamping an		Pendampingan		Pendampingan		Pendamping an		Pendampingan	- ***Pendamping an***	-	**0,00%**	**0,00%**	***14 Pendamping an***	***210.052.400***	***70,00%***	***67,25%***	DINAS LH
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	**100,0**	**33,33**	-	-	**100,00**	**33,33**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**200 %**	**382.187.500**	**80,00 %**	**315.625.110**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**- %**	**-**	***0,00%***	***0,00%***	***80,00 %***	***315.625.110***	***40,00%***	***82,58%***	DINAS LH
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kemitraan lingkungan hidup yang mendapat pengahargaan**		**382.187.500**		**315.625.110**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**		***0,00%***	**-**	***315.625.110***		***82,58%***	DINAS LH
			Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Penilaian kinerja	382.187.500	8 Penilaian kinerja	315.625.110	Penilaian kinerja		Penilaian kinerja		Penilaian kinerja		Penilaian kinerja		Penilaian kinerja		**-** ***Penilaian kinerja***	**-**	***0,00%***	***0,00%***	***8 Penilaian kinerja***	***315.625.110***	***80,00%***	***82,58%***	DINAS LH
											-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		**200 %**	**88.434.500**	**60,00 %**	**56.310.700**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**- %**	**-**	***0,00%***	***0,00%***	***60,00 %***	***56.310.700***	***30,00%***	***63,68%***	DINAS LH
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase penanganan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan**		**88.434.500**		**56.310.700**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**		***0,00%***	**-**	***56.310.700***		***63,68%***	DINAS LH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindaklanjuti	40 Pengaduan	88.434.500	24 Pengaduan	56.310.700	Pengaduan		Pengaduan		Pengaduan		Pengaduan		Pengaduan		**-** ***Pengaduan***	**-**	***0,00%***	***0,00%***	***24 Pengaduan***	***56.310.700***	***60,00%***	***63,68%***	DINAS LH
											-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		**200 %**	**6.707.962.455**	**87,18 %**	**6.270.454.478**	**% 100**	**1.174.831.495**	**% 9,12**	**76.435.295**	**% 1,46**	**383.971.159**	**0,00 %**	**118.201.875**	**0,00 %**	**81.425.000**	***10,59 %***	***660.033.329***	***10,59%***	***56,18%***	***97,77 %***	***6.930.487.807***	***48,89%***	***103,32%***	DINAS LH
			Pengelolaan Sampah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan hidup yang sesuai SPM**		**6.707.962.455**		**6.270.454.478**		**1.174.831.495**		**76.435.295**		**383.971.159**		**118.201.875**		**81.425.000**	**-**	***660.033.329***		***56,18%***	**-**	***6.930.487.807***		***103,32%***	DINAS LH
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Disusun	5 Dokumen	2.376.300.000	4 Dokumen	2.158.246.005	1 Dokumen	542.980.295	0 Dokumen	24.960.295	- Dokumen	192.939.149	0 Dokumen	35.923.875	1 Dokumen	-	***1 Dokumen***	***253.823.319***	***100,00%***	***46,75%***	***5 Dokumen***	***2.412.069.324***	***100,00%***	***101,51%***	DINAS LH
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengadaan Sarana Untuk Pengurangan Samapah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	7500 Buah	169.650.000	6994 Buah	206.420.000	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		**-** ***Buah***	**-**	***0,00%***	***0,00%***	***6.994 Buah***	***206.420.000***	***93,25%***	***121,67%***	DINAS LH
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah daya Tampung TPA	##### Kurang Dari Pertahun	3.262.012.455	#### Kurang Dari Pertahun	3.050.748.473	37084 Kurang Dari Pertahun	631.851.200	3384 Kurang Dari Pertahun	51.475.000	541 Kurang Dari Pertahun	191.032.010	0 Kurang Dari Pertahun	82.278.000	- Kurang Dari Pertahun	81.425.000	***3.925 Kurang Dari Pertahun***	***406.210.010***	***10,58%***	***64,29%***	###### ***Kurang Dari Pertahun***	***3.456.958.483***	***89,06%***	***105,98%***	DINAS LH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	25 Unit	900.000.000	20 Unit	855.040.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		**-** ***Unit***	**-**	***0,00%***	***0,00%***	***20 Unit***	***855.040.000***	***80,00%***	***95,00%***	DINAS LH
											9,12	**6,51**	**1,46**	**32,68**	**-**	**10,06**	**0,00**	**6,93**	**10,59**	**56,18**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**						
13			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**-**		**-**																			
			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**-**		**-**																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**57.569.857.800**	**89,82 %**	**58.341.082.304**	**% 100**	**12.727.351.272**	**% 14,81**	**1.528.155.390**	**% 31,48**	**1.725.929.042**	**% 24,69**	**1.845.053.190**	**% 14,20**	**1.372.236.786**	***85,19 %***	***6.471.374.408***	***85,19%***	***50,85%***	***175,00 %***	***64.812.456.712***	***87,50%***	***112,58%***	DISDUK CAPIL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**23.180.395.550**		**22.943.970.380**		**4.654.671.316**		**-**		**1.010.000**		**-**		**-**	**-**	***1.010.000***		***0,02%***	**-**	***22.944.980.380***		***98,98%***	DISDUK CAPIL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahannya	15 Buku	159.399.500	12 Buku	120.654.700	3 Dokumen	2.151.700	2 Dokumen	-	- Dokumen	1.010.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*1.010.000*	*66,67%*	*46,94%*	*14 Buku*	*121.664.700*	*93,33%*	*76,33%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5.550.000	92 Eksemplar/Dokumen	4.878.750	1 Dokumen	375.000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*93 Eksemplar/Dokumen*	*4.878.750*	*62,00%*	*87,91%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5.550.000	91 Eksemplar Dokumen	3.330.000	1 Dokumen	375.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*92 Eksemplar Dokumen*	*3.330.000*	*61,33%*	*60,00%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	2.250.000	92 Eksemplar/Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	375.000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*93 Eksemplar/Dokumen*	*2.100.000*	*62,00%*	*93,33%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	2.250.000	91 Eksemplar Dokumen	1.553.700	1 Dokumen	600.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*92 Eksemplar Dokumen*	*1.553.700*	*61,33%*	*69,05%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan	30 Eksemplar Dokumen	1.725.000	30 Eksemplar/Dokumen	1.230.000	6 Dokumen	225.000	1 Dokumen	-	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	-	*6 Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*36 Eksemplar/Dokumen*	*1.230.000*	*120,00%*	*71,30%*	DISDUK CAPIL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	30 Eksemplar Dokumen	12.979.500	24 Eksemplar Dokumen	85.576.150	3 Dokumen	375.000	3 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*3 Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*27 Eksemplar Dokumen*	*85.576.150*	*90,00%*	*659,32%*	DISDUK CAPIL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**29.049.546.450**		**28.861.721.607**		**6.055.085.116**		**1.391.095.511**		**1.506.073.408**		**1.543.907.063**		**1.262.144.434**	-	*5.703.220.416*		*94,19%*	-	*34.564.942.023*		*118,99%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan/Kali	20.864.195.450	48 Bulan/Kali	20.757.310.707	12 Bulan/Kali	4.415.915.116	3 Bulan/Kali	1.006.745.511	6 Bulan/Kali	1.119.888.408	0 Bulan/Kali	1.162.982.063	3 Bulan/Kali	883.619.434	*12 Bulan/Kali*	*4.173.235.416*	*100,00%*	*94,50%*	*60 Bulan/Kali*	*24.930.546.123*	*100,00%*	*119,49%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	460 Orang	7.666.832.500	374 Orang	7.682.973.500	12 Dokumen	1.624.310.000	3 Dokumen	384.350.000	6 Dokumen	382.835.000	0 Dukoumen	380.925.000	3 Dukoumen	378.525.000	*12 Dukumen*	*1.526.635.000*	*100,00%*	*93,99%*	*386 Orang*	*9.209.608.500*	*83,91%*	*120,12%*	DISDUK CAPIL
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	518.518.500	348 Kali	421.437.400	12 Kali	14.860.000	0 Kali	-	6 Kali	3.350.000	3 Kali	-	3 Kali	-	*12 Kali*	*3.350.000*	*100,00%*	*22,54%*	*360 Kali*	*424.787.400*	*600,00%*	*81,92%*	DISDUK CAPIL
			Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah			**30.000.000**		**30.000.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*30.000.000*		*100,00%*	DINAS LH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		*- Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1 Paket*	*30.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	DINAS LH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**2.456.136.300**		**2.542.048.739**		**303.853.440**		**34.555.724**		**45.988.959**		**65.320.100**		**24.785.827**	-	*170.650.610*		*56,16%*	-	*2.712.699.349*		*110,45%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	1.358.895.600	2 Unit	1.337.961.700	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2 Unit*	*1.337.961.700*	*100,00%*	*98,46%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman untuk keperluan Rutin kantor	3750 Porsi	135.875.000	3151 Porsi/Kotak	111.177.000	1 Paket	39.093.000	0 Paket	-	1 Paket	2.700.000	0 Paket	-	- Paket	1.500.000	*1 Paket*	*4.200.000*	*100,00%*	*10,74%*	*3.152 Porsi/Kotak*	*115.377.000*	*84,05%*	*84,91%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	25 Eksemplar/Paket	233.023.000	21 Eksemplar/Paket	228.236.600	1 Paket	25.311.400	1 Paket	13.311.400	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	*1 Paket*	*13.311.400*	*100,00%*	*52,59%*	*22 Eksemplar/Paket*	*241.548.000*	*88,00%*	*103,66%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	4635 Buah/Paket	289.992.700	4349 Buah/Paket	271.775.100	1 Paket	88.021.040	0 Paket	-	1 Paket	1.000.000	0 Paket	55.046.100	- Paket	-	*1 Paket*	*56.046.100*	*100,00%*	*63,67%*	*4.350 Buah/Paket*	*327.821.200*	*93,85%*	*113,04%*	DISDUK CAPIL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	520 Kali/Laporan	438.350.000	432 Kali/Laporan	592.898.339	27 Laporan	151.428.000	1 Laporan	21.244.324	13 Laporan	42.288.959	2 Laporan	10.274.000	5 Laporan	23.285.827	*21 Laporan*	*97.093.110*	*77,78%*	*64,12%*	*453 Kali/Laporan*	*689.991.449*	*87,12%*	*157,41%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.709.179.500**		**2.876.365.868**		**1.491.466.600**		**89.178.155**		**65.819.675**		**202.133.027**		**79.061.440**	-	*436.192.297*		*29,25%*	-	*3.312.558.165*		*193,81%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	597.055.000	48 Kali	527.401.308	12 Kali	202.066.500	3 Kali	26.246.155	3 Kali	52.005.675	3 Kali	26.807.127	3 Kali	50.022.440	*12 Kali*	*155.081.397*	*100,00%*	*76,75%*	*60 Kali*	*682.482.705*	*100,00%*	*114,31%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130 Unit	837.139.500	107 Unit	2.086.161.050	10 Laporan	1.190.877.100	1 Laporan	28.577.300	4 Laporan	3.775.000	0 Laporan	169.533.400	1 Laporan	790.000	*6 Laporan*	*202.675.700*	*60,00%*	*17,02%*	*113 Unit*	*2.288.836.750*	*86,92%*	*273,41%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Kali	274.985.000	48 Kali	262.803.510	12 Laporan	98.523.000	3 Laporan	34.354.700	3 Laporan	10.039.000	3 Laporan	5.792.500	3 Laporan	28.249.000	*12 Laporan*	*78.435.200*	*100,00%*	*79,61%*	*60 Kali*	*341.238.710*	*100,00%*	*124,09%*	DISDUK CAPIL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**1.174.600.000**		**1.116.975.710**		**222.274.800**		**13.326.000**		**107.037.000**		**33.693.000**		**6.245.085**	-	***160.301.085***		***72,12%***	-	***1.277.276.795***		***108,74%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan Baik	5 Unit	200.850.000	4 Unit	200.641.965	1 Unit	34.538.000	1 Unit	13.326.000	- Unit	7.132.000	0 Unit	2.816.000	- Unit	-	***1 Unit***	***23.274.000***	***100,00%***	***67,39%***	***5 Unit***	***223.915.965***	***100,00%***	***111,48%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	20 Unit	703.400.000	16 Unit	676.833.745	5 Unit	122.603.800	0 Unit	-	5 Unit	78.092.000	0 Unit	12.337.000	- Unit	6.245.085	***5 Unit***	***96.674.085***	***100,00%***	***78,85%***	***21 Unit***	***773.507.830***	***105,00%***	***109,97%***	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	170.450.000	89 Unit	121.580.000	39 Unit	43.320.000	0 Unit	-	- Unit	-	26 Unit	18.540.000	- Unit	-	***26 Unit***	***18.540.000***	***66,67%***	***42,80%***	***115 Unit***	***140.120.000***	***143,75%***	***82,21%***	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dengan Baik	5 Gedung	99.900.000	4 Gedung	117.920.000	1 Gedung	21.813.000	0 Gedung	-	1 Gedung	21.813.000,00	0 Gedung	-	-	-	***1 Gedung***	***21.813.000***	***100,00%***	***100,00%***	***5 Gedung***	***139.733.000***	***100,00%***	***139,87%***	DISDUK CAPIL
											14,81	**12,01**	**31,48**	**13,56**	**24,69**	**14,50**	**14,20**	**10,78**	**85,19**	**50,85**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)															
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**R**						
											Predikat kinerja															
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**200 %**	**11.892.300**	**75,00 %**	-	**100 %**	**348.900**	**25,00 %**	-	**25,00 %**	-	**25,00 %**	-	**25,00 %**	-	***100,00 %***	-	***100,00%***	***0,00%***	***175,00 %***	-	***87,50%***	***0,00%***	DISDUK CAPIL
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk			**11.892.300**		-		**348.900**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	-		***0,00%***	DISDUK CAPIL
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	11.892.300	3 Laporan	-	12 Laporan	348.900	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	***12 Laporan***	-	***100,00%***	***0,00%***	***15 Laporan***	-	***375,00%***	***0,00%***	DISDUK CAPIL
											25,00	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**100,00**	-						
											Rata-rata capaian kinerja (%)															
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**						
											Predikat kinerja															
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**200 %**	**186.063.000**	**84,33 %**	**141.995.400**	**100 %**	**1.011.500**	**23,45 %**	-	**26,52 %**	-	**31,67 %**	-	**36,07 %**	-	***117,71 %***	-	***117,71%***	***0,00%***	***202,04 %***	***141.995.400***	***101,02%***	***76,32%***	DISDUK CAPIL
			Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**		**186.063.000**		**141.995.400**		**1.011.500**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***141.995.400***		***76,32%***	DISDUK CAPIL
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (5S Aksi)	21000 Akta	186.063.000	17709 Akta	141.995.400	4200 Akta	1.011.500	985 Akta	-	1.114 Akta	-	1330 Akta	-	1.515 Akta	-	***4.944 Akta***	-	***117,71%***	***0,00%***	***22.653 Akta***	***141.995.400***	***107,87%***	***76,32%***	DISDUK CAPIL
											23,45	-	**26,52**	-	**31,67**	-	**36,07**	-	**117,71**	-						
											Rata-rata capaian kinerja (%)															
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**						
											Predikat kinerja															
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**200 %**	**135.344.300**	**82,52 %**	**122.651.045**	**% 100**	**1.604.300**	**% 0,00**	-	**% 69,23**	-	**15,38 %**	-	**0,00 %**	**150.000**	***84,62 %***	***150.000***	***84,62%***	***9,35%***	***167,14 %***	***122.801.045***	***83,57%***	***90,73%***	DISDUK CAPIL
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Buku Laporan Data Kependudukan Pada Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil**		**55.344.300**		**45.904.000**		**1.604.300**		-		-		-	**150.000**	-	***150.000***		***9,35%***	-	***46.054.000***		***83,21%***	DISDUK CAPIL
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Buku Pengolahan Data Kependudukan	10 Semester	53.740.000	8 Semester	45.904.000	Semester		Semester		Semester		Semester		Semester		- ***Semester***	-	***0,00%***	***0,00%***	***8 Semester***	***45.904.000***	***80,00%***	***85,42%***	DISDUK CAPIL
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	13 Dokumen	1.604.300	Dokumen		13 Dokumen	1.604.300	0 Dokumen	-	9 Dokumen	-	2 Dokumen	-	- Dokumen	150.000	***11 Dokumen***	***150.000***	***84,62%***	***9,35%***	***11 Dokumen***	***150.000***	***84,62%***	***9,35%***	DISDUK CAPIL
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi**		**80.000.000**		**76.747.045**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	***0,00%***	-	***76.747.045***		***95,93%***	DISDUK CAPIL
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Penyajian Data Informasi yang disajikan melalui Website dan Sosial Media	80 Dokumen	80.000.000	77 Dokumen	76.747.045	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***77 Dokumen***	***76.747.045***	***96,25%***	***95,93%***	DISDUK CAPIL
											-	-	**69,23**	-	**15,38**	-	-	**9,35**	**84,62**	**9,35**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)															
											SR	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**						
											Predikat kinerja															
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		**200 %**	**37.630.000**	**#### %**	-	**100 %**	**1.860.000**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	**0 %**	-	**0 %**	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***100,00 %***	-	***50,00%***	***0,00%***	DISDUK CAPIL
			Penyusunan Profil Kependudukan			**37.630.000**		-		**1.860.000**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	-		***0,00%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	37.630.000	2 Dokumen	-	6 Dokumen	1.860.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***2 Dokumen***	-	***100,00%***	***0,00%***	DISDUK CAPIL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											Rata-rata capaian kinerja (%)																
											Predikat kinerja																
14			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**19.457.759.475**	**67,48** %	**17.777.150.509**	**100** %	**3.501.974.191**	**0,25** %	**633.478.656**	**0,00** %	**717.959.821**	**2,49** %	**579.179.099**	**2,93** %	**950.497.512**	*5,68* %	*2.881.115.088*	*5,68%*	*82,27%*	*73,16* %	*20.658.265.597*	*36,58%*	*106,17%*	DINAS PMD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**226.646.500**		**176.631.000**		**44.301.600**		**859.200**		**1.760.500**		**1.500.000**		**1.537.100**	*-*	*5.656.800*		*12,77%*	*-*	*182.287.800*		*80,43%*	DINAS PMD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	15 Buku	141.726.500	12 Buku	119.372.500	4 Dokumen	11.371.100	0 Dokumen	859.200	- Dokumen	-	2 Dokumen	1.500.000	- Dokumen	1.537.100	*2 Dokumen*	*3.896.300*	*50,00%*	*34,26%*	*14 Buku*	*123.268.800*	*93,33%*	*86,98%*	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1000 Eksemplar Dokumen	15.915.000	700 Eksemplar Dokumen	9.549.000	1 Dokumen	6.367.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*-*	*100,00%*	*0,00%*	*701 Eksemplar Doku*	*9.549.000*	*70,10%*	*60,00%*	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	750 Eksemplar Dokumen	15.915.000	550 Eksemplar Dokumen	9.549.000	1 Dokumen	3.627.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*-*	*100,00%*	*0,00%*	*551 Eksemplar Doku*	*9.549.000*	*73,47%*	*60,00%*	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Dokumen	10.680.000	20 Dokumen	6.544.000	1 Dokumen	3.624.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*-*	*100,00%*	*0,00%*	*21 Dokumen*	*6.544.000*	*84,00%*	*61,27%*	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	10.680.000	20 Dokumen	8.544.000	1 Dokumen	3.660.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*-*	*100,00%*	*0,00%*	*21 Dokumen*	*8.544.000*	*84,00%*	*80,00%*	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Eksemplar Dokumen	14.115.000	78 Eksemplar Dokumen	10.211.250	4 Laporan	11.817.000	0 Laporan	-	- Laporan	1.760.500	2 Laporan	-	2 Laporan	-	*4 Laporan*	*1.760.500*	*100,00%*	*14,90%*	*82 Eksemplar Dokumen*	*11.971.750*	*82,00%*	*84,82%*	DINAS PMD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	15 Dokumen	17.615.000	12 Dokumen	12.861.250	3 Laporan	3.835.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	2 Laporan	-	1 Laporan	-	*3 Laporan*	*-*	*100,00%*	*0,00%*	*15 Dokumen*	*12.861.250*	*100,00%*	*73,01%*	DINAS PMD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa**		**16.527.049.730**		**15.544.853.104**		**2.777.348.541**		**623.100.870**		**685.906.305**		**516.944.153**		**878.849.932**	*-*	*2.704.801.260*		*97,39%*	*-*	*18.249.654.364*		*110,42%*	DINAS PMD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	13.981.024.730	115 Orang	13.024.578.104	20 Orang	2.217.998.541	6 Orang	493.685.870	6 Orang	559.211.305	3 Orang	428.854.153	5 Orang	690.059.932	*20 Orang*	*2.171.811.260*	*100,00%*	*97,92%*	*135 Orang*	*15.196.389.364*	*112,50%*	*108,69%*	DINAS PMD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administras Pelaksanaan Tugas ASN	140 Orang	2.134.500.000	134 Orang	2.184.775.000	25 Orang	495.900.000	6 Orang	123.975.000	7 Orang	123.975.000	0 Orang	82.650.000	12 Orang	165.300.000	*25 Orang*	*495.900.000*	*100,00%*	*100,00%*	*159 Orang*	*2.680.675.000*	*113,57%*	*125,59%*	DINAS PMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	60 Kali	411.525.000	50 Kali	335.500.000	10 Kali	63.450.000	0 Kali	5.440.000	- Kali	2.720.000	4 Kali	5.440.000	4 Kali	23.490.000	*8 Kali*	*37.090.000*	*80,00%*	*58,46%*	*58 Kali*	*372.590.000*	*96,67%*	*90,54%*	DINAS PMD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**32.625.000**		-		-		-		-		-			-	-	*0,00%*	-	-			DINAS PMD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	32.625.000	Orang	-	0 Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	*- Orang*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*- Orang*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	DINAS PMD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1.154.726.750**		**817.430.283**		**334.496.250**		**3.170.250**		**4.275.000**		**10.902.595**		**1.720.700**	*-*	*20.068.545*		*6,00%*	*-*	*837.498.828*		*72,53%*	DINAS PMD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	35 Unit	209.500.000	33 Unit	149.371.800	3 Unit	206.235.400	0 Unit	470.250	- Unit	2.295.000	0 Unit	1.141.895	2 Unit	1.720.700	*2 Unit*	*5.627.845*	*66,67%*	*2,73%*	*35 Unit*	*154.999.645*	*100,00%*	*73,99%*	DINAS PMD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Kantor	2000 Porsi	20.000.000	1201 Porsi	13.485.000	400 Porsi	4.000.000	0 Porsi	-	- Porsi	1.980.000	100 Porsi	-	100 Porsi	-	*200 Porsi*	*1.980.000*	*50,00%*	*49,50%*	*1.401 Porsi*	*15.465.000*	*70,05%*	*77,33%*	DINAS PMD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	25000 Eksemplar	48.354.250	16569 Eksemplar	36.034.454	4000 Paket	6.916.850	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	*- Paket*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*16.569 Eksemplar*	*36.034.454*	*66,28%*	*74,52%*	DINAS PMD
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	2015 Buah	60.062.500	1542 Buah	46.838.700	150 Buah	6.426.000	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	-	- Buah	-	*- Buah*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*1.542 Buah*	*46.838.700*	*76,53%*	*77,98%*	DINAS PMD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelengara urusan Pemerintah Daerah	1250 Perjalanan Dinas	816.810.000	929 Perjalanan Dinas	571.700.329	150 Perjalanan Dinas	110.918.000	0 Perjalanan Dinas	2.700.000	- Perjalanan Dinas	9.760.700	11 Perjalanan Dinas	-	*16 Perjalanan Dinas*	*12.460.700*	*10,67%*	*11,23%*	*945 Perjalanan Dinas*	*584.161.029*	*75,60%*	*71,52%*	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**561.679.995**		**449.527.147**		**177.255.000**		**6.348.336**		**26.018.016**		**3.743.696**		**36.347.380**	*-*	*72.457.428*		*40,88%*	*-*	*521.984.575*		*92,93%*	DINAS PMD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Kali	361.679.995	48 Kali	324.527.147	12 Kali	145.435.000	0 Kali	6.348.336	3 Kali	17.018.016	6 Kali	3.743.696	3 Kali	26.347.380	12 Kali	53.457.428	100,00%	36,76%	60 Kali	377.984.575	100,00%	104,51%	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	15 Kali Pameran	200.000.000	10 Kali Pameran	125.000.000	3 Kali Pameran	31.820.000	0 Kali Pameran	-	- Kali Pameran	9.000.000	1 Kali Pameran	-	1 Kali Pameran	10.000.000	2 Kali Pameran	19.000.000	66,67%	59,71%	12 Kali Pameran	144.000.000	80,00%	72,00%	DINAS PMD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**955.031.500**		**788.708.975**		**168.572.800**		-		-		**46.088.655**		**32.042.400**	-	78.131.055		46,35%	-	866.840.030		90,77%	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik	26 Unit	955.031.500	22 Unit	788.708.975	Unit 6	168.572.800	Unit 0	-	Unit -	-	3 Unit	46.088.655	- Unit	32.042.400	3 Unit	78.131.055	50,00%	46,35%	25 Unit	866.840.030	96,15%	90,77%	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,25	18,09	0,33	20,50	2,69	16,54	3,00	27,14	6,27	82,27						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T						
			PROGRAM PENATAAN DESA		**200 %**	**1.449.905.000**	**3,85 %**	**1.378.602.500**	**100 %**	**1.452.443.800**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	0,00%	0,00%	3,85 %	1.378.602.500	1,92%	95,08%	DINAS PMD
			Penyelenggraan Penataan Desa			**1.449.905.000**		**1.378.602.500**		**1.452.443.800**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-		0,00%	-	1.378.602.500		95,08%	DINAS PMD
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	25 Desa	57.482.000	0 Desa	-	23 Desa	50.227.800	0 Desa	-	Desa -	-	0 Desa	-	- Desa	-	- Desa	-	0,00%	0,00%	- Desa	-	0,00%	0,00%	DINAS PMD
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	1.392.423.000	1 Unit	1.378.602.500	1 Unit	1.402.216.000	0 Unit	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00%	0,00%	1 Unit	1.378.602.500	100,00%	99,01%	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		**200 %**	**60.077.100**	**0,00 %**	-	**100 %**	**100.000.000**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	**100,00 %**	**9.900.000**	*100 %*	*9.900.000*	*100,00%*	*9,90%*	*100 %*	*9.900.000*	*50,00%*	*16,48%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa			**60.077.100**		-		**100.000.000**		-		-		-		**9.900.000**	-	*9.900.000*		9,90%	-	*9.900.000*		*16,48%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	60.077.100	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	9.900.000	*1 Dokumen*	*9.900.000*	*100,00%*	*9,90%*	*1 Dokumen*	*9.900.000*	*10,00%*	*16,48%*	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	####	9,90	100,00	9,90						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SR						
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**200 %**	**7.725.353.200**	**51,95 %**	**5.529.235.352**	**100 %**	**4.054.578.700**	**0,00 %**	**19.930.550**	**0,00 %**	**1.419.880.474**	**0,87 %**	**408.525.352**	**1,30 %**	**1.071.619.353**	*2,17 %*	*2.919.955.729*	*2,17%*	*72,02%*	*54,12 %*	*8.449.191.081*	*27,06%*	*109,37%*	DINAS PMD
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan**		**7.725.353.200**		**5.529.235.352**		**4.054.578.700**		**19.930.550**		**1.419.880.474**		**408.525.352**		**1.071.619.353**	-	*2.919.955.729*		*72,02%*	-	*8.449.191.081*		*109,37%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BPJS Pekon	897 Pekon	3.900.000.000	48 Pekon	802.518.760	4 Dokumen	2.485.527.700	0 Dokumen	-	Dokumen -	880.259.524	1 Dokumen	388.251.752	1 Dokumen	980.030.224	*2 Dokumen*	*2.248.541.500*	*50,00%*	*90,47%*	*50 Pekon*	*3.051.060.260*	*5,57%*	*78,23%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	60 Dokumen	212.112.500	31 Dokumen	131.167.500	10 Dokumen	58.727.000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*31 Dokumen*	*131.167.500*	*51,67%*	*61,84%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon yang termonitor dalam menggunakan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Tanggamus	299 Dokumen	121.962.500	299 Dokumen	14.927.500	2 Dokumen	19.654.000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*299 Dokumen*	*14.927.500*	*100,00%*	*12,24%*	DINAS PMD
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	1495 Pekon	440.250.000	897 Pekon	275.150.000	Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		- *Pekon*	-	*0,00%*	*0,00%*	*897 Pekon*	*275.150.000*	*60,00%*	*62,50%*	DINAS PMD
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1495 Pekon	483.500.000	897 Pekon	291.882.000	Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		- *Pekon*	-	*0,00%*	*0,00%*	*897 Pekon*	*291.882.000*	*60,00%*	*60,37%*	DINAS PMD
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	1495 Pekon	291.925.000	963 Pekon /Workshop	208.376.700	200 Dokumen	24.545.000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*963 Pekon /Workshop*	*208.376.700*	*64,41%*	*71,38%*	DINAS PMD
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	15 Dokumen	1.111.400.000	9 Dokumen	3.084.153.092	13 Laporan	1.446.302.000	0 Laporan	19.930.550	Laporan -	539.620.950	1 Laporan	20.273.600	2 Laporan	91.589.129	*3 Laporan*	*671.414.229*	*23,08%*	*46,42%*	*12 Dokumen*	*3.755.567.321*	*80,00%*	*337,91%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	299 Dokumen	52.803.200	0 Dokumen	-	1 Dokumen	19.823.000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa atau Keluarahan	5 Dokumen	1.111.400.000	4 Dokumen	721.059.800	0 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Dokumen*	*721.059.800*	*80,00%*	*64,88%*	DINAS PMD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											Rata-rata capaian kinerja (%)																
											Predikat kinerja																
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan pekon	200 %	18.203.820.250	88,48 %	17.419.715.200	% 100	6.301.222.300	% 0,00	-	% 0,00	-	33,33 %	131.457.198	46,67 %	2.325.380.000	*80,00 %*	*2.456.837.198*	*80,00%*	*38,99%*	*168,48 %*	*19.876.552.398*	*84,24%*	*109,19%*	DINAS PMD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**		**18.137.020.250**		**17.379.635.200**		**6.301.222.300**		-		-		**131.457.198**		**2.325.380.000**	-	*2.456.837.198*		*38,99%*	-	*19.836.472.398*		*109,37%*	DINAS PMD
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PKK,Posyandu dan LPM)	125 Sosialisasi/Lembaga	205.000.000	119 Sosialisasi/Lembaga	123.000.000	Lembaga 7	6.095.925.000	Lembaga 0	-	Lembaga -	-	0 Lembaga	-	7 Lembaga	2.325.380.000	*7 Lembaga*	*2.325.380.000*	*100,00%*	*38,15%*	*126 Sosialisasi/Lembaga*	*2.448.380.000*	*100,80%*	*1194,33%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	14 Sosialisasi/Unit	15.916.500.000	9 Sosialisasi/Unit	14.679.900.000	Unit 6	46.020.000	Unit 0	-	Unit -	-	4 Unit	-	- Unit	-	*4 Unit*	-	*66,67%*	*0,00%*	*13 Sosialisasi/Unit*	*14.679.900.000*	*92,86%*	*92,23%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Simpan pinjam Khusus Perempuan (SPP)	5 Sosialisasi	66.800.000	3 Sosialisasi	40.080.000	Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi	- *Sosialisasi*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Sosialisasi*	*40.080.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Inovatif dan Aplikatif	15 Workshop	1.518.354.500	10 Workshop	928.052.700	Laporan 2	159.277.300	Laporaan 0	-	Laporaan -	-	1 Laporaan	131.457.198	- Laporaan	-	*1 Laporaan*	*131.457.198*	*50,00%*	*82,53%*	*11 Workshop*	*1.059.509.898*	*73,33%*	*69,78%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	32.790.750	1 Laporan	-	Laporaan 0	-	Laporaan		Laporaan		Laporaan		Laporaan	- *Laporaan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1 Laporan*	-	*100,00%*	*0,00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Melalui Program Karya Bhakti TNI	5 Kecamatan	397.575.000	4 Kecamatan	1.608.602.500	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan	- *Kecamatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kecamatan*	*1.608.602.500*	*80,00%*	*404,60%*	DINAS PMD
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-		33,33	2,09	46,67	36,90	80,00	38,99					
											Predikat kinerja										T						
15			**DINAS PERHUBUNGAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**29.082.505.085**	**86,13 %**	**26.308.033.317**	**% 100**	**4.343.532.001**	**% 9,89**	**1.224.780.073**	**% 26,37**	**1.139.177.643**	**% 36,26**	**760.111.907**	**% 14,29**	**1.008.226.001**	*86,81 %*	*4.132.295.624*	*86,81%*	*95,14%*	*172,94 %*	*30.440.328.941*	*86,47%*	*104,67%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**269.798.780**		**219.769.346**		**13.269.900**		-		**2.420.100**		**1.029.900**		**3.190.000**	-	*6.640.000*		*50,04%*	-	*226.409.346*		*83,92%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja dan Perubahan Renja Jumlah Dokumen RKA RKPA DPA DPPA	12 Dokumen	4.060.500	10 Dokumen	3.548.400	Dokumen 2	620.100	Dokumen 0	-	Dokumen 1	620.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*620.100*	*50,00%*	*100,00%*	*11 Dokumen*	*4.168.500*	*91,67%*	*102,66%*	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah DOkumen RKA- SKPD	75 Dokumen	6.000.000	48 Eksamplar/Dokumen	5.100.000	2 Dokumen	50.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	48 Eksamplar/Dokumen	5.100.000	64,00%	85,00%	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DOkumen RKA- SKPD	50 Dokumen	6.335.000	33 Eksamplar/Dokumen	5.301.000	2 Dokumen	50.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	33 Eksamplar/Dokumen	5.301.000	66,00%	83,68%	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA -SKPD	150 Dokumen	7.500.000	93 Eksamplar/Dokumen	6.900.000	2 Dokumen	50.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	93 Eksamplar/Dokumen	6.900.000	62,00%	92,00%	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	150 Dokumen	7.681.500	92 Eksamplar/Dokumen	5.508.900	2 Dokumen	900.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	900.000	2 Dokumen	900.000	100,00%	100,00%	94 Eksamplar/Dokumen	6.408.900	62,67%	83,43%	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja triwulan	25 Dokumen	3.025.500	22 Dokumen	2.630.400	3 Dokumen	1.029.900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	3 Dokumen	1.029.900	- Dokumen	-	3 Dokumen	1.029.900	100,00%	100,00%	25 Dokumen	3.660.300	100,00%	120,98%	DINAS PERHUBUNGAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD LAKIP LKPJ Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan	20 Dokumen	235.196.280	16 Dokumen	190.780.646	2 Dokumen	10.569.600	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.800.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	2.290.000	1 Dokumen	4.090.000	50,00%	38,70%	17 Dokumen	194.870.646	85,00%	82,85%	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa**		**20.871.243.305**		**20.160.888.927**		**3.940.624.796**		**1.198.976.032**		**1.005.705.225**		**704.866.412**		**934.783.976**	-	**3.844.331.645**		**97,56%**	-	**24.005.220.572**		**115,02%**	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tunjangan Gaji dan ASN	60 Bulan	11.928.693.305	48 Bulan	11.166.878.927	12 Bulan	1.988.774.796	3 Bulan	594.576.032	3 Bulan	519.415.225	3 Bulan	397.876.412	3 Bulan	430.478.976	12 Bulan	1.942.346.645	100,00%	97,67%	60 Bulan	13.109.225.572	100,00%	109,90%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Non PNS, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	60 Bulan	8.521.350.000	48 Bulan	8.613.380.000	12 Bulan	1.920.850.000	3 Bulan	604.400.000	3 Bulan	481.500.000	3 Bulan	302.200.000	3 Bulan	501.385.000	12 Bulan	1.889.485.000	100,00%	98,37%	60 Bulan	10.502.865.000	100,00%	123,25%	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan	60 Bulan	421.200.000	48 Bulan	380.630.000	12 Bulan	31.000.000	0 Bulan	-	6 Bulan	4.790.000	3 Bulan	4.790.000	3 Bulan	2.920.000	12 Bulan	12.500.000	100,00%	40,32%	60 Bulan	393.130.000	100,00%	93,34%	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahYang di Susun Tepat Waktu**		**75.150.000**		**62.370.000**		-		-		-		-			-	-		**0,00%**	-	**62.370.000**			DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	75.150.000	1 Paket	62.370.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- Paket	-	0,00%	0,00%	1 Paket	62.370.000	100,00%	82,99%	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1.572.393.000**		**1.257.582.498**		**66.965.300**		-		**18.810.300**		**3.480.100**		**4.100.000**	-	**26.390.400**		**39,41%**	-	**1.283.972.898**		**81,66%**	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	456.740.000	4 Paket	431.945.000	1 Paket	5.482.000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	1.980.100	- Paket	1.000.000	- Paket	2.980.100	0,00%	54,36%	4 Paket	434.925.100	80,00%	95,22%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minu	25 Kali/Paket	259.860.000	20 Kali/Paket	175.922.188	1 Paket	6.150.000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	1.100.000	- Paket	1.100.000	0,00%	17,89%	20 Kali/Paket	177.022.188	80,00%	68,12%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	50000 Eksampler	256.250.000	43300 Eksampler	216.023.293	1 Paket	18.186.300	0 Paket	-	1 Paket	2.789.900	0 Paket	1.500.000	- Paket	2.000.000	1 Paket	6.289.900	100,00%	34,59%	43.301 Eksampler	222.313.193	86,60%	86,76%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	204.113.000	46 Bulan	190.711.700	1 Paket	16.183.000	0 Paket	-	1 Paket	16.020.400	0 Paket	-	- Paket	-	1 Paket	16.020.400	100,00%	99,00%	47 Bulan	206.732.100	78,33%	101,28%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinas dan Konsultasi Luar Daerah	500 Kali	395.430.000	310 Kali	242.980.317	1 Paket	20.964.000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0,00%	0,00%	310 Kali	242.980.317	62,00%	61,45%	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**2.121.000.000**		**1.272.600.000**		-		-		-		-			-	-		**0,00%**	**0,00%**	-	**1.272.600.000**		**60,00%**	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	5 Unit	2.121.000.000	3 Unit	1.272.600.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0,00%	0,00%	3 Unit	1.272.600.000	60,00%	60,00%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.053.995.000**		**898.586.131**		**236.598.005**		**25.804.041**		**100.242.018**		**25.935.495**		**48.412.825**	-	**200.394.379**		**84,70%**	-	**1.098.980.510**		**104,27%**	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	753.495.000	48 Bulan	718.286.131	12 Bulan	236.598.005	3 Bulan	25.804.041	3 Bulan	100.242.018	3 Bulan	25.935.495	2 Bulan	48.412.825	11 Bulan	200.394.379	91,67%	84,70%	59 Bulan	918.680.510	98,33%	121,92%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	5 Kali	300.500.000	3 Kali	180.300.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	3 Kali	180.300.000	60,00%	60,00%	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**3.118.925.000**		**2.436.236.415**		**86.074.000**		-		**12.000.000**		**24.800.000**		**17.739.200**	-	**54.539.200**		**63,36%**	-	**2.490.775.615**		**79,86%**	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	83 Gedung/Unit	2.322.545.000	81 Gedung/Unit	1.816.568.415	Unit 23	86.074.000	Unit 0	-	Unit 5	12.000.000	18 Unit	24.800.000	- Unit	17.739.200	*23 Unit*	*54.539.200*	*100,00%*	*63,36%*	*104 Gedung/Unit*	*1.871.107.615*	*125,30%*	*80,56%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung PKB	5 Unit	796.380.000	4 Unit	619.668.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*619.668.000*	*80,00%*	*77,81%*	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**9,89**	**28,20**	**26,37**	**26,23**	**36,26**	**17,50**	**14,29**	**23,21**	**86,81**	**95,14**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Tersedia**	**200 %**	**6.878.314.750**	**81,63 %**	**6.874.971.362**	**% 100**	**1.071.690.600**	% 0,00	-	% 29,76	481.884.350	% 33,34	-	% 29,15	320.330.800	*92,25 %*	*802.215.150*	*92,25%*	*74,86%*	*173,88 %*	*7.677.186.512*	*86,94%*	*111,61%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Perlengkapan Jalan**		**2.968.113.250**		**2.533.157.812**		**253.560.000**		-		150.880.000		-		97.640.000	*-*	*248.520.000*		*98,01%*	*-*	*2.781.677.812*		*93,72%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lampu Jalan	125 Unit	2.007.500.000	98 Unit	1.550.967.262	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*98 Unit*	*1.550.967.262*	*78,40%*	*77,26%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pemeliharaan Trafic dan Warning	10 Paket	170.081.250	31 Paket	130.300.050	Unit 21	24.720.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	21 Unit	22.200.000	*21 Unit*	*22.200.000*	*100,00%*	*89,81%*	*52 Paket*	*152.500.050*	*520,00%*	*89,66%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan lampu jalan	3928 Lampu/Unit	790.532.000	3303 Lampu/Unit	851.890.500	Unit 1200	228.840.000	Unit 0	-	Unit 560	150.880.000	0 Unit	-	635 Unit	75.440.000	*1.195 Unit*	*226.320.000*	*99,58%*	*98,90%*	*4.498 Lampu/Uni*	*1.078.210.500*	*114,51%*	*136,39%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**2.001.910.000**		**1.820.518.500**		**320.070.000**		-		261.975.350		-		45.000.000	*-*	*306.975.350*		*95,91%*	*-*	*2.127.493.850*		*106,27%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	5 Perda	293.544.500	4 Perda	178.146.700	Perda		Perda a		Perda		Perda		Perda		*- Perda*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Perda*	*178.146.700*	*80,00%*	*60,69%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Berkala PKB	20000 Uji	305.302.500	16210 Uji	415.794.000	Uji 4000	320.070.000	Uji 0	-	Uji 1.000	261.975.350	1750 Uji	-	850 Uji	45.000.000	*3.600 Uji*	*306.975.350*	*90,00%*	*95,91%*	*19.810 Uji*	*722.769.350*	*99,05%*	*236,74%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	43 Unit	1.403.063.000	41 Unit	1.226.577.800	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*41 Unit*	*1.226.577.800*	*95,35%*	*87,42%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Manajemen Pelaksanakan Rekayasa Lalu Lintas**		**795.470.500**		**595.092.350**		**421.700.800**		-		-		-		177.690.800	*-*	*177.690.800*		*42,14%*	*-*	*772.783.150*		*97,15%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Pemasangan RPPJ	50 Unit	572.650.000	36 Unit	444.610.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*36 Unit*	*444.610.000*	*72,00%*	*77,64%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengepaman	60 Bulan	197.820.500	48 Bulan	135.482.350	Bulan 12	217.840.800	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	176.680.800	*12 Bulan*	*176.680.800*	*100,00%*	*81,11%*	*60 Bulan*	*312.163.150*	*100,00%*	*157,80%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Hibah	5 Kali	25.000.000	3 Kali	15.000.000	Laporan 1	203.860.000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	1.010.000	*- Laporan*	*1.010.000*	*0,00%*	*0,50%*	*3 Kali*	*16.010.000*	*60,00%*	*64,04%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Penyediaan Angkutan Sekolah**		**1.112.821.000**		**1.926.202.700**		**76.359.800**		-		69.029.000		-		-	*-*	*69.029.000*		*90,40%*	*-*	*1.995.231.700*		*179,29%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Angkutan Sekola	60 Bulan	521.774.500	51 Bulan	1.463.914.600	Bulan 12	5.944.800	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	-	*12 Bulan*	-	*100,00%*	*0,00%*	*63 Bulan*	*1.463.914.600*	*105,00%*	*280,56%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Angkutan Darat	15 Kali	591.046.500	12 Kali	462.288.100	Laporan 3	70.415.000	Laporan 0	-	Laporan 2	69.029.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	*2 Laporan*	*69.029.000*	*66,67%*	*98,03%*	*14 Kali*	*531.317.100*	*93,33%*	*89,89%*	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**29,76**	**44,96**	**33,34**	**-**	**29,15**	**29,89**	**92,25**	**74,86**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**						
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani Oleh Angkutan Pelayaran**	**200 %**	**1.661.000.000**	**80,00 %**	**1.258.730.000**	**% 100**	**1.010.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	*- %*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*1.258.730.000*	*40,00%*	*75,78%*	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Terselenggaranya Pengoprasian dan Pemeliharaan Kapal**		**1.661.000.000**		**1.258.730.000**		**1.010.000**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**		**1.258.730.000**		**75,78%**	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Kapal	60 Bulan	1.661.000.000	48 Bulan	1.258.730.000	12 Bulan	1.010.000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*1.258.730.000*	*80,00%*	*75,78%*	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
16			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**21.376.593.700**	**77,23 %**	**20.112.268.074**	**100 %**	**3.944.599.771**	**2,42 %**	**705.085.132**	**7,40 %**	**878.237.461**	**16,50 %**	**979.160.268**	**9,67 %**	**759.533.220**	*35,99 %*	*3.322.016.081*	*35,99%*	*84,22%*	*113,22 %*	*23.434.284.155*	*56,61%*	*109,63%*	DINAS KOMINFO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**119.500.000**		**108.811.400**		**22.298.200**		-		**3.600.000**		-		**6.000.000**	-	*9.600.000*		*43,05%*	-	*118.411.400*		*99,09%*	DINAS KOMINFO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan perubahannya	15 Buku/Dokumen	86.500.000	12 Buku/Dokumen	78.340.100	3 Buku/Dokumen	15.709.200	0 Buku/Dokume	-	- Buku/Dokumen	3.600.000	0 Buku/Dokumen	-	1 Buku/Dokumen	6.000.000	*1 Buku/Doku*	*9.600.000*	*33,33%*	*61,11%*	*13 Buku/Doku*	*87.940.100*	*86,67%*	*101,66%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5.500.000	4 Eksemplar Dokumen	5.500.000	1 Eksemplar Dokumen	1.100.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Eksemplar Dokumen*	*5.500.000*	*80,00%*	*100,00%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5.500.000	4 Eksemplar Dokumen	5.500.000	1 Eksemplar Dokumen	1.100.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Eksemplar Dokumen*	*5.500.000*	*80,00%*	*100,00%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5.500.000	4 Eksemplar Dokumen	5.500.000	1 Eksemplar Dokumen	1.100.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Eksemplar Dokumen*	*5.500.000*	*80,00%*	*100,00%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5.500.000	4 Eksemplar Dokumen	4.400.000	1 Eksemplar Dokumen	1.100.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Eksemplar Dokumen*	*4.400.000*	*80,00%*	*80,00%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	10 Eksemplar Dokumen	5.500.000	8 Eksemplar Dokumen	4.071.300	2 Eksemplar Dokumen	1.089.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Eksemplar Dokumen*	*4.071.300*	*80,00%*	*74,02%*	DINAS KOMINFO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ, Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	5.500.000	12 Eksemplar Dokumen	5.500.000	3 Eksemplar Dokumen	1.100.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Doku	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Doku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Eksemplar Doku*	*5.500.000*	*80,00%*	*100,00%*	DINAS KOMINFO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**17.298.645.845**		**16.668.326.833**		**3.370.511.871**		**678.413.932**		**821.149.921**		**897.274.240**		**700.158.376**	- -	*3.096.996.469*		*91,89%*	- -	*19.765.323.302*		*114,26%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130 ASN	14.986.770.845	130 ASN	14.474.266.833	26 ASN	2.904.671.871	7 ASN	558.293.932	6 ASN	730.569.921	6 ASN	809.974.240	7 ASN	622.928.376	*26 ASN*	*2.721.766.469*	*100,00%*	*93,70%*	*156 ASN*	*17.196.033.302*	*120,00%*	*114,74%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan tugas ASN	115 Orang	1.856.625.000	90 Orang	1.790.500.000	23 Orang	395.400.000	6 Orang	116.400.000	5 Orang	87.300.000	6 Orang	87.300.000	6 Orang	58.200.000	*23 Orang*	*349.200.000*	*100,00%*	*88,32%*	*113 Orang*	*2.139.700.000*	*98,26%*	*115,25%*	DINAS KOMINFO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/vertivikasi Keuangan SKPD	60 Kali	455.250.000	48 Kali	403.560.000	12 Kali	70.440.000	1 Kali	3.720.000	1 Kali	3.280.000	0 Kali	-	3 Kali	19.030.000	*5 Kali*	*26.030.000*	*41,67%*	*36,95%*	*53 Kali*	*429.590.000*	*88,33%*	*94,36%*	DINAS KOMINFO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.719.721.250**		**1.400.932.915**		**249.644.500**		-		**12.509.000**		**72.590.000**		**18.567.500**	-	*103.666.500*		*41,53%*	-	*1.504.599.415*		*87,49%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Mebeleur Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570 Unit/Bulan	402.761.250	370 Unit/Bulan	300.391.250	114 Unit/Bulan	82.891.200	0 Unit/Bulan	-	- Unit/Bulan	-	100 Unit/Bulan	72.590.000	- Unit/Bulan	-	*100 Unit/Bulan*	*72.590.000*	*87,72%*	*87,57%*	*470 Unit/Bulan*	*372.981.250*	*82,46%*	*92,61%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk keperlun rutin kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	160 Porsi	140.650.000	160 Porsi	117.775.250	80 Porsi	38.480.500	0 Porsi	-	- Porsi	2.173.000	0 Porsi	-	13 Porsi	6.187.500	*18 Porsi*	*8.360.500*	*22,50%*	*21,73%*	*178 Porsi*	*126.135.750*		*89,68%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan rutin kantor	250 Eksemplar	362.110.000	200 Eksemplar	291.302.500	50 Eksemplar	32.062.800	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	3.136.000	0 Eksemplar	-	13 Eksemplar	8.780.000	*19 Eksemplar*	*11.916.000*	*38,00%*	*37,16%*	*219 Eksemplar*	*303.218.500*	*87,60%*	*83,74%*	DINAS KOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah	1750 Kali	814.200.000	1400 Kali	691.463.915	350 Kali	96.210.000	0 Kali	-	25 Kali	7.200.000	0 Kali	-	15 Kali	3.600.000	*40 Kali*	*10.800.000*	*11,43%*	*11,23%*	*1.440 Kali*	*702.263.915*	*82,29%*	*86,25%*	DINAS KOMINFO
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-		-		-		-		-		-			-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	-			DINAS KOMINFO
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Mesin Absensi	5 Unit	-	3 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	-	*60,00%*		DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.359.026.605**		**1.102.392.171**		**128.730.200**		**1.000.000**		**40.978.540**		**9.296.028**		**18.742.344**	-	*70.016.912*		*54,39%*	-	*1.172.409.083*		*86,27%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Persediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	60 Kali	549.578.805	48 Kali	556.111.591	12 Kali	100.329.000	3 Kali	1.000.000	3 Kali	39.178.540	3 Kali	9.296.028	3 Kali	6.973.844	*12 Kali*	*56.448.412*	*100,00%*	*56,26%*	*60 Kali*	*612.560.003*	*100,00%*	*111,46%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Perbaikan Peralatan Kantor	100 Unit	295.355.100	60 Unit	176.013.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Unit*	*176.013.000*	*60,00%*	*59,59%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	175 Kali	514.092.700	140 Kali	370.267.580	12 Kali	28.401.200	0 Kali	-	- Kali	1.800.000	1 Kali	-	5 Kali	11.768.500	*6 Kali*	*13.568.500*	*50,00%*	*47,77%*	*146 Kali*	*383.836.080*	*83,43%*	*74,66%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**879.700.000**		**831.804.755**		**173.415.000**		**25.671.200**		-		-		**16.065.000**	-	*41.736.200*		*24,07%*	-	*873.540.955*		*99,30%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	330 Unit	737.700.000	210 Unit	728.694.755	Unit 6	133.860.000	Unit 0	25.671.200	Unit 1	-	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*25.671.200*	*16,67%*	*19,18%*	*211 Unit*	*754.365.955*	*63,94%*	*102,26%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Unit	-	0 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara dengan baik	100 Unit	56.800.000	80 Unit	36.990.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Unit*	*36.990.000*	*80,00%*	*65,12%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Papan Reklame Terpeliharanya Rumah Jabatan	Unit	-	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana grdung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara dengan baik, Terpeliharanya Gedung Kantor dan Papan Reklame	30 Unit	85.200.000	21 Unit	66.120.000	Unit 6	39.555.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	16.065.000	*2 Unit*	*16.065.000*	*33,33%*	*40,61%*	*23 Unit*	*82.185.000*	*76,67%*	*96,46%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2,42**	**17,87**	**7,40**	**22,26**	**16,50**	**24,82**	**9,67**	**19,26**	35,99	84,22							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**							
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik**	**200 %**	**32.443.163.150**	**87,40 %**	**30.964.387.840**	**100 %**	**6.714.240.250**	**15,30 %**	**522.750.000**	**49,31 %**	**1.669.610.000**	**8,82 %**	**502.500.000**	**1,59 %**	**2.031.157.500**	*75,03 %*	*4.726.017.500*	*75,03%*	*70,39%*	*162,43 %*	*35.690.405.340*	*81,21%*	*110,01%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang baik**		**32.443.163.150**		**30.964.387.840**		**6.714.240.250**		**522.750.000**		**1.669.610.000**		**502.500.000**		**2.031.157.500**	-	*4.726.017.500*		*70,39%*	-	*35.690.405.340*		*110,01%*	DINAS KOMINFO
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	terciptaya Perumusan Kebijakan	5	-	3	-						-		-			-	-	*0,00%*	*0,00%*	*3*	-	*60,00%*	*0,00%*	DINAS KOMINFO
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Kecamatan	-	Kecamatan	-	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		- *Kecamatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Kecamatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	DINAS KOMINFO
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Monitoring yang menjadi prioritas	1200 Kali	336.212.500	744 Kali	217.130.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*744 Kali*	*217.130.000*	*62,00%*	*64,58%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah yang akan dilaksanakan	960 Kali	300.320.000	960 Kali	210.156.000	Kali 192	7.500.000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*960 Kali*	*210.156.000*	*100,00%*	*69,98%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media yang akan dibayar atau jumlah dokumen yang akan menjadi	3400 Kali	16.681.200.000	3400 Kali	18.450.606.550	Kali 680	6.027.570.000	Kali 143	505.000.000	Kali 460	1.627.610.000	47 Kali	165.000.000	- Kali	1.791.090.000	*650 Kali*	*4.088.700.000*	*95,59%*	*67,83%*	*4.050 Kali*	*22.539.306.550*	*119,12%*	*135,12%*	DINAS KOMINFO
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Waktu Pelayanan	60 Bulan	340.688.750	60 Bulan	241.403.250	Bulan 12	10.540.250	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Bulan*	*241.403.250*	*100,00%*	*70,86%*	DINAS KOMINFO
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Masa	1045 Media	270.000.000	627 Media	162.000.000	Media		Media		Media		Media		Media		- *Media*	-	*0,00%*	*0,00%*	*627 Media*	*162.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS KOMINFO
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Penerima Hibah	225 Lembaga	13.625.000.000	227 Lembaga	11.097.010.900	45 Lembaga	420.000.000	0 Lembaga	-	4 Lembaga	40.000.000	36 Lembaga	337.500.000	5 Lembaga	26.000.000	*45 Lembaga*	*403.500.000*	*100,00%*	*96,07%*	*272 Lembaga*	*11.500.510.900*	*120,89%*	*84,41%*	DINAS KOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terciptanya hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Publik	60 Bulan	668.591.900	60 Bulan	430.111.140	Bulan 12	248.630.000	Bulan 1	17.750.000	Bulan -	2.000.000	0 Bulan	-	10 Bulan	214.067.500	*11 Bulan*	*233.817.500*	*91,67%*	*94,04%*	*71 Bulan*	*663.928.640*	*118,33%*	*99,30%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi	15 Unit	221.150.000	11 Unit	155.970.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*11 Unit*	*155.970.000*	*73,33%*	*70,53%*	DINAS KOMINFO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**15,30**	**7,79**	**49,31**	**24,87**	**8,82**	**7,48**	**1,59**	**30,25**	75,03	70,39					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SD**					
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Government**	**200 %**	**4.922.950.000**	**80,00 %**	**4.453.364.332**	**100 %**	**933.890.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**20.000.000**	**45,96 %**	**226.386.300**	*45,96 %*	*246.386.300*	*45,96%*	*26,38%*	*125,96 %*	*4.699.750.632*	*62,98%*	*95,47%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Adanya Domain dan Sub Domain di Tanggamus**		**484.650.000**		**347.046.240**		**44.030.000**		**-**		**-**		**20.000.000**		**-**	*- -*	*20.000.000*		*45,42%*	*- -*	*367.046.240*		*75,73%*	DINAS KOMINFO
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain	5 website	484.650.000	4 website	347.046.240	website 1	44.030.000	website 0	-	website -	-	0 website	20.000.000	1 website	-	*1 website*	*20.000.000*	*100,00%*	*45,42%*	*5 website*	*367.046.240*	*100,00%*	*75,73%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Informasi Pemerintah Daerah**		**4.438.300.000**		**4.106.318.092**		**889.860.000**		**-**		**-**		**-**		**226.386.300**	*-*	*226.386.300*		*25,44%*	*-*	*4.332.704.392*		*97,62%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Persentase Tersedianya Internet Benwich	500 %	3.487.750.000	400 %	3.060.770.000	% 100	889.860.000	% 0	-	% -	-	0,00 %	-	45,42 %	226.386.300	*45 %*	*226.386.300*	*45,42%*	*25,44%*	*445 %*	*3.287.156.300*	*89,08%*	*94,25%*	DINAS KOMINFO
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Jaringan Fiber Optik SPBE	500 %	950.550.000	400 %	1.045.548.092	%		%		%		%		%		*- %*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*1.045.548.092*	*80,00%*	*109,99%*	DINAS KOMINFO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,14**	**45,96**	**24,24**	45,96	26,38					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral**	**200 %**	**252.750.000**	**80,00 %**	**194.239.600**	**% 100**	**46.510.000**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**1.010.000**	**0,00 %**	**19.850.000**	**44,00 %**	**-**	*44,00 %*	*20.860.000*	*44,00%*	*44,85%*	*124,00 %*	*215.099.600*	*62,00%*	*85,10%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Data Statistik sektoral**		**252.750.000**		**194.239.600**		**46.510.000**		**-**		**1.010.000**		**19.850.000**		**-**	*-*	*20.860.000*		*44,85%*	*-*	*215.099.600*		*85,10%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis s dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik sektoral	125 Buku	140.650.000	100 Buku	115.549.600	Buku 25	46.510.000	Buku 0	-	Buku -	1.010.000	0 Buku	19.850.000	11 Buku	-	*11 Buku*	*20.860.000*	*44,00%*	*44,85%*	*111 Buku*	*136.409.600*	*88,80%*	*96,99%*	DINAS KOMINFO
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	5 Jaringan	112.100.000	4 Jaringan	78.690.000	Jaringan		Jaringan		Jaringan		Jaringan		Jaringan		*- Jaringan*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Jaringan*	*78.690.000*	*80,00%*	*70,20%*	DINAS KOMINFO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**-**	**2,17**	**-**	**42,68**	**44,00**	**-**	44,00	44,85					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah**	**200 %**	**150.000.000**	**80,00 %**	**198.711.951**	**% 100**	**114.846.000**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**1.010.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	*- %*	*1.010.000*	*0,00%*	*0,88%*	*80,00 %*	*199.721.951*	*40,00%*	*133,15%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terciptanya Keamanan Informasi Persandian**		**150.000.000**		**198.711.951**		**114.846.000**		**-**		**1.010.000**		**-**		**-**	*-*	*1.010.000*		*0,88%*	*-*	*199.721.951*		*133,15%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Keamanan Informasi Persandian	5 Unit	150.000.000	4 Unit	198.711.951	Unit 1	114.846.000	Unit 0	-	Unit -	1.010.000	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*1.010.000*	*0,00%*	*0,88%*	*4 Unit*	*199.721.951*	*80,00%*	*133,15%*	DINAS KOMINFO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**-**	**0,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	0,88					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
17			**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**34.203.271.975**	**77,85 %**	**31.472.749.371**	**100 %**	**6.393.761.170**	**5,52 %**	**1.649.081.129**	**5,28 %**	**1.188.995.548**	**17,51 %**	**1.753.961.954**	**3,12 %**	**963.361.201**	***31,41 %***	***5.555.399.832***	***31,41%***	***86,89%***	***109,26 %***	***37.028.149.203***	***54,63%***	***108,26%***	DINAS KOPERINDAG
			Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu**		**214.315.000**		**169.350.500**		**26.724.800**	-	-		**6.966.500**	-	-		**2.444.400**	-	***9.410.900***		***35,21%***	-	***178.761.400***		***83,41%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	150 Buku/ Dokumen	39.275.000	136 Buku/ Dokumen	39.992.000	30 Buku/ Dokumen	5.595.000	0 Buku /Dokumen	-	- Buku /Dokumen	1.995.000	0 Buku/ Dokumen	-	3 Buku/Dokumen	-	***3 Buku/ Dokumen***	***1.995.000***	***10,00%***	***35,66%***	***139 Buku/ Dokumen***	***41.987.000***	***92,67%***	***106,91%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang tersusun	100 Buku/ Dokumen	36.137.500	96 Buku/ Dokumen	27.750.000	20 Buku/ Dokumen	3.450.000	0 Buku /Dokumen	-	- Buku /Dokumen	-	0 Buku/ Dokumen	-	- Buku/Dokumen	-	- ***Buku/ Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***96 Buku/ Dokumen***	***27.750.000***	***96,00%***	***76,79%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersedia	50 Buku/ Dokumen	27.012.500	40 Buku/ Dokumen	18.007.500	10 Buku/ Dokumen	5.159.300	0 Buku /Dokumen	-	- Buku /Dokumen	-	0 Buku/ Dokumen	-	- Buku/Dokumen	2.444.400	- ***Buku/ Dokumen***	***2.444.400***	***0,00%***	***47,38%***	***40 Buku/ Dokumen***	***20.451.900***	***80,00%***	***75,71%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	225 Eksemplar Dokumen	20.250.000	200 Eksemplar Dokumen	15.437.700	45 Eksemplar Dokumen	3.450.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***200 Eksemplar Dokumen***	***15.437.700***	***88,89%***	***76,24%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersedia	225 Eksemplar Dokumen	20.250.000	179 Eksemplar Dokumen	14.803.800	45 Eksemplar Dokumen	4.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***179 Eksemplar Dokumen***	***14.803.800***	***79,56%***	***73,11%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	5 Dokumen	12.975.000	4 Dokumen	12.400.000	7 Dokumen	2.260.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	2.260.000	7 Dokumen	-	- Dokumen	-	***7 Dokumen***	***2.260.000***	***100,00%***	***100,00%***	***11 Dokumen***	***14.660.000***	***220,00%***	***112,99%***	DINAS KOPERINDAG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	25 Dokumen	58.415.000	21 Dokumen	40.959.500	7 Dokumen	2.760.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	2.711.500	6 Dokumen	-	- Dokumen	-	***6 Dokumen***	***2.711.500***	***85,71%***	***98,22%***	***27 Dokumen***	***43.671.000***	***108,00%***	***74,76%***	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**		**29.871.550.200**		**27.921.168.354**		**5.134.126.870**		**1.485.219.698**		**912.515.025**		**1.688.587.539**		**807.214.970**	-	***4.893.537.232***		***95,31%***	-	***32.814.705.586***		***109,85%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	24.474.900.200	52 Bulan	22.530.443.354	12 Bulan	3.929.066.870	3 Bulan	1.129.669.698	3 Bulan	716.930.025	3 Bulan	1.310.737.539	1 Bulan	617.834.970	***10 Bulan***	***3.775.172.232***	***83,33%***	***96,08%***	***62 Bulan***	***26.305.615.586***	***88,57%***	***107,48%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis	330 Orang	5.036.500.000	274 Orang	5.063.350.000	66 Orang	1.110.400.000	17 Orang	355.550.000	16 Orang	181.595.000	17 Orang	356.350.000	5 Orang	178.250.000	***55 Orang***	***1.071.745.000***	***83,33%***	***96,52%***	***329 Orang***	***6.135.095.000***	***99,70%***	***121,81%***	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	70 Orang	360.150.000	59 Orang	327.375.000	14 Dokumen	94.660.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	13.990.000	8 Dokumen	21.500.000	- Dokumen	11.130.000	***8 Dokumen***	***46.620.000***	***57,14%***	***49,25%***	***67 Orang***	***373.995.000***	***95,71%***	***103,84%***	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**240.750.000**		**144.450.000**		-		-		-		-			-	-			-	***144.450.000***		***60,00%***	DINAS KOPERINDAG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	475 Stel	240.750.000	285 Stel	144.450.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- ***Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***285 Stel***	***144.450.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi**		**1.654.541.000**		**1.251.591.470**		**356.939.400**		-		**41.152.900**		**7.348.700**		**93.963.384**	-	***142.464.984***		***39,91%***	-	***1.394.056.454***		***84,26%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	60 Jenis	25.600.000	50 Jenis/ Bulan	19.825.000	1 Paket	1.790.000	0 Paket	-	- Paket	440.000	0 Paket	-	- Paket	-	- ***Paket***	***440.000***	***0,00%***	***24,58%***	***50 Jenis/ Bulan***	***20.265.000***	***83,33%***	***79,16%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 Unit	235.775.000	38 Unit	185.085.000	9 Paket	120.143.600	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	24.600.000	- ***Paket***	***24.600.000***	***0,00%***	***20,48%***	***38 Unit***	***209.685.000***	***84,44%***	***88,93%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	65 Bulan	29.388.000	51 Bulan	26.360.720	12 Bulan	3.088.000	0 Bulan	-	- Bulan	1.334.000	9 Bulan	912.000	1 Bulan	-	***10 Bulan***	***2.246.000***	***83,33%***	***72,73%***	***61 Bulan***	***28.606.720***	***93,85%***	***97,34%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan logistik kantor	60 Bulan	161.970.000	48 Bulan	120.065.650	12 Bulan	17.065.000	0 Bulan	-	- Bulan	2.138.000	4 Bulan	2.671.000	- Bulan	-	***4 Bulan***	***4.809.000***	***33,33%***	***28,18%***	***52 Bulan***	***124.874.650***	***86,67%***	***77,10%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Triwulan/Paket	179.824.500	16 Triwulan/Paket	184.032.500	4 Paket	34.743.200	0 Paket	-	- Paket	22.829.000	3 Paket	2.886.900	- Paket	-	***3 Paket***	***25.715.900***	***75,00%***	***74,02%***	***19 Triwulan/Paket***	***209.748.400***	***95,00%***	***116,64%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Material Lainnya Untuk Keperluan kantor	60 Bulan	234.203.500	48 Bulan	169.314.600	12 Bulan	43.787.600	0 Bulan	-	- Bulan	14.411.900	8 Bulan	878.800	- Bulan	15.290.700	***8 Bulan***	***30.581.400***	***66,67%***	***69,84%***	***56 Bulan***	***199.896.000***	***93,33%***	***85,35%***	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	900 Kali	787.780.000	685 Kali	546.908.000	75 Laporan	136.322.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	54.072.684	- *Laporan*	*54.072.684*	*0,00%*	*39,67%*	*685 Kali*	*600.980.684*	*76,11%*	*76,29%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran perangkat daerah**		**1.049.101.275**		**897.194.677**		**678.028.000**		**163.861.431**		**209.566.723**		**19.227.915**		**25.856.625**	-	*418.512.694*		*61,72%*	-	*1.315.707.371*		*125,41%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	331.701.275	48 Bulan	326.799.177	12 Bulan	119.858.000	3 Bulan	13.861.431	3 Bulan	9.566.723	0 Bulan	19.227.915	- Bulan	25.856.625	*6 Bulan*	*68.512.694*	*50,00%*	*57,16%*	*54 Bulan*	*395.311.871*	*90,00%*	*119,18%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Set	717.400.000	4 Set	570.395.500	1 Set	558.170.000	0 Set	150.000.000	- Set	200.000.000	0 Set	-	1 Set	-	*1 Set*	*350.000.000*	*100,00%*	*62,70%*	*5 Set*	*920.395.500*	*100,00%*	*128,30%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran perangkat daerah**		**1.173.014.500**		**1.088.994.370**		**197.942.100**		**-**		**18.794.400**		**38.797.800**		**33.881.822**	-	*91.474.022*		*46,21%*	-	*1.180.468.392*		*100,64%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	5 Unit	193.350.000	4 Unit	202.347.000	1 Unit	45.670.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	16.896.000	1 Unit	9.632.000	*1 Unit*	*26.528.000*	*100,00%*	*58,09%*	*5 Unit*	*228.875.000*	*100,00%*	*118,37%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang	50 Unit Mobil /Motor	748.052.000	41 Unit Mobil /Motor	696.651.120	10 Unit	135.609.600	0 Unit	-	- Unit	18.104.400	4 Unit	19.871.800	- Unit	24.249.822	*4 Unit*	*62.226.022*	*40,00%*	*45,89%*	*45 Unit Mobil/ Motor*	*758.877.142*	*90,00%*	*101,45%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpeliharan/ terawat	35 Unit	50.750.000	29 Unit	44.050.000	7 Unit	7.480.000	0 Unit	-	- Unit	690.000	4 Unit	2.030.000	1 Unit	-	*5 Unit*	*2.720.000*	*71,43%*	*36,36%*	*34 Unit*	*46.770.000*	*97,14%*	*92,16%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	25 Unit	180.862.500	17 Unit	145.946.250	5 Unit	9.182.500	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*17 Unit*	*145.946.250*	*68,00%*	*80,69%*	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	5,52	25,79	5,28	18,60	17,51	27,43	3,12	15,07	31,41	86,89						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T						
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase Peningkatan Pembentukan Koperasi Baru**	**200 %**	**79.950.000**	**80,00 %**	**61.940.000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**		**-**		**-**	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*61.940.000*	*40,00%*	*77,47%*	DINAS KOPERINDAG
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi Baru yangmedapatkan akta pendirian koperasi**		**79.950.000**		**61.940.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	- -	-	*0,00%*	*0,00%*	- -	*61.940.000*		*77,47%*	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	25 Akta Koperasi	79.950.000	20 Akta Koperasi	61.940.000	Akta Koperasi		Akta Koperasi		Akta Koperasi		Akta Koperasi		Akta Koperasi		- *Akta Koperasi*	-	*0,00%*	*0,00%*	*20 Akta Koperasi*	*61.940.000*	*80,00%*	*77,47%*	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		**200 %**	**305.845.000**	**16,22 %**	**209.270.000**	**% 100**	**10.199.800**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	- %	-		*0,00%*	*16,22 %*	*209.270.000*	*8,11%*	*68,42%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah koperasi yang dapat melaksanakan penyehatan kelembagaan dan usahanya**		**305.845.000**		**209.270.000**		**10.199.800**		**-**		**-**		**-**		**-**	- -	-		*0,00%*	- -	*209.270.000*		*68,42%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	14 Dokumen	299.700.000	12 Dokumen/ Lokasi	209.270.000	Unit Usaha 20	10.199.800	0 Unit Usaha	-	- Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	-	- Unit Usaha	-	- *Unit Usaha*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Dokumen/ Lokasi*	*209.270.000*	*85,71%*	*69,83%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	6.145.000	0 Unit Usaha	-	Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		- *Unit Usaha*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Unit Usaha*	-	*0,00%*	*0,00%*	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas**	**200 %**	**419.325.000**	**60,00 %**	**251.595.000**	**% 100**	**417.922.000**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**-**	**50,00 %**	**200.455.750**	**0,00 %**	**117.460.000**	*50 %*	*317.915.750*	*0,00%*	*0,00%*	*110,00 %*	*569.510.750*	*55,00%*	*135,82%*	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terbentuknya Koperasi Baru**		**419.325.000**		**251.595.000**		**417.922.000**		-		-		**200.455.750**		**117.460.000**	- -	***317.915.750***	***0,00%***	***0,00%***	- -	***569.510.750***		***135,82%***	DINAS KOPERINDAG
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanPerkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	600 Peserta	419.325.000	360 Peserta	251.595.000	Peserta 120	417.922.000	Peserta 0	-	Peserta -	-	60 Peserta	200.455.750	- Peserta	**117.460.000**	***60 Peserta***	***317.915.750***	***50,00%***	***76,07%***	***420 Peserta***	***569.510.750***	***70,00%***	***135,82%***	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**50,00**	**47,96**	-	**28,11**	**50,00**	**76,07**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**						
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		**200 %**	**5.325.000**	**#### %**	**5.325.000**	**% 100**	-	%	-	%	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***100,00 %***	***5.325.000***	***50,00%***	***100,00%***	DINAS KOPERINDAG
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**5.325.000**		**5.325.000**		-		-		-		-	- -	-	***0,00%***	***0,00%***	- -	***5.325.000***		***100,00%***	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	5.325.000	20 Unit Usaha	5.325.000	Unit Usaha		Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	- ***Unit Usaha***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20 Unit Usaha***	***5.325.000***	***100,00%***	***100,00%***	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		**200 %**	**2.971.175.000**	**77,48 %**	**2.947.268.500**	**%**	-	%	-	%	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***77,48 %***	***2.947.268.500***	***38,74%***	***99,20%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Meningkatnya daya saing UMKM**		**2.971.175.000**		**2.947.268.500**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***2.947.268.500***		***99,20%***	DINAS KOPERINDAG
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Belanja Hibah	13 Paket	2.725.000.000	8 Paket	2.405.000.000	Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		- ***Unit Usaha***	-	***0,00%***	***0,00%***	***8 Paket***	***2.405.000.000***	***61,54%***	***88,26%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta/ UMKM yang mengikuti Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200 UMKM	126.437.500	192 UMKM	470.426.000	UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		- ***UMKM***	-	***0,00%***	***0,00%***	***192 UMKM***	***470.426.000***	***96,00%***	***372,06%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Kali	119.737.500	120 Kali	71.842.500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***120 Kali***	***71.842.500***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		**200 %**	**107.860.000**	**84,40 %**	**451.260.000**	**% 100**	**1.010.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	**%**	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***84,40 %***	***451.260.000***	***42,20%***	***418,38%***	DINAS KOPERINDAG
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Meningkatnya daya saing UMKM**		**107.860.000**		**451.260.000**		**1.010.000**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***451.260.000***		***418,38%***	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	250 UMKM	107.860.000	211 UMKM/Paket	451.260.000	Paket 1	1.010.000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	- Paket	-	- ***Paket***	-	***0,00%***	***0,00%***	***211 UMKM/Paket***	***451.260.000***	***84,40%***	***418,38%***	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**200 %**	**768.950.000**	**80,00 %**	**603.753.450**	**% 100**	**140.000.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	80,00 %	**79.990.000**	***80 %***	***79.990.000***	***0,00%***	***0,00%***	***160,00 %***	***683.743.450***	***80,00%***	***88,92%***	DINAS KOPERINDAG
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			**768.950.000**		**603.753.450**		**140.000.000**		-		-		-		**79.990.000**	-	***79.990.000***		***57,14%***	-	***683.743.450***		***88,92%***	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distibusi Perdagangan	500 %	768.950.000	400 %	603.753.450	%		%		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	400 %	603.753.450	80,00%	78,52%	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Lokasi	140.000.000	0 Lokasi	-	Lokasi 5	140.000.000	Lokasi 0	-	Lokasi -	-	0 Lokasi	-	4 Lokasi	79.990.000	*4 Lokasi*	*79.990.000*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Lokasi*	*79.990.000*	*80,00%*	*57,14%*	DINAS KOPERINDAG
																			80,00	57,14							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	80,00	57,14							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	R	T	R							
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting**	**200 %**	**669.800.000**	**82,67 %**	**1.541.199.000**	**% 100**	**557.020.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	**79.990.000**	**40,00 %**	-	**0,00 %**	-	*40,00 %*	*79.990.000*	*40,00%*	*14,36%*	*122,67 %*	*1.621.189.000*	*61,33%*	*242,04%*	DINAS KOPERINDAG
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar dan Agen dalam tahun berjalan**		**599.300.000**		**1.485.059.000**		**221.300.000**		-		**79.990.000**		-		-	-	*79.990.000*		*36,15%*	-	*1.565.049.000*		*261,15%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Lokasi Pengendalian Harga Pokok dan barang Penting Ditingkat Agen dan Pasar Rakyat	50 Lokasi	599.300.000	40 Lokasi	1.485.059.000	Lokasi 5	221.300.000	Lokasi 0	-	Lokasi -	79.990.000	4 Lokasi	-	- Lokasi	-	*4 Lokasi*	*79.990.000*	*80,00%*	*36,15%*	*44 Lokasi*	*1.565.049.000*	*88,00%*	*261,15%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kesetabilan harga barang pokok dan penting di Kabupaten Tanggamus**		**70.500.000**		**56.140.000**		**335.720.000**		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	-	*56.140.000*		*79,63%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Lokasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (7 Pasar Pemda x	25 Lokasi	70.500.000	22 Lokasi	56.140.000	Lokasi 5	335.720.000	Lokasi 0	-	Lokasi -	-	0 Lokasi	-	- Lokasi	-	*- Lokasi*	-	*0,00%*	*0,00%*	*22 Lokasi*	*56.140.000*	*88,00%*	*79,63%*	DINAS KOPERINDAG
																			40,00	14,36							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	14,36	40,00	-	-	-								
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		**200 %**	**443.827.500**	**74,48 %**	**302.235.400**	**% 100**	**45.253.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**30,00 %**	**13.467.500**	**0,00 %**	-	*30,00 %*	*13.467.500*	*30,00%*	*29,76%*	*104,48 %*	*315.702.900*	*52,24%*	*71,13%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Presentase kepuasan masyarakat terhadap pelayananan perlindungan konsumen**		**443.827.500**		**302.235.400**		**45.253.000**		-		-		**13.467.500**		-	-	*13.467.500*		*29,76%*	-	*315.702.900*		*71,13%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	35 Lokasi	365.352.500	23 Lokasi	248.335.400	Unit 1000	35.173.000	Unit 0	-	Unit -	-	300 Unit	10.467.500	- Unit	-	*300 Unit*	*10.467.500*	*30,00%*	*29,76%*	*323 Lokasi*	*258.802.900*	*922,86%*	*70,84%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	110 Kali	78.475.000	85 Kali	53.900.000	Orang 400	10.080.000	Orang 0	-	Orang -	-	120 Orang	3.000.000	- Orang	-	*120 Orang*	*3.000.000*	*30,00%*	*29,76%*	*205 Kali*	*56.900.000*	*186,36%*	*72,51%*	DINAS KOPERINDAG
																			30,00	29,76							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	30,00	29,76	-	-								
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR							
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		**200 %**	**1.714.062.500**	**76,00 %**	**1.323.041.500**	**% 100**	**146.687.500**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	**9.918.300**	**20,00 %**	-	**0,00 %**	**41.000.000**	*20,00 %*	*50.918.300*	*20,00%*	*34,71%*	*96,00 %*	*1.373.959.800*	*48,00%*	*80,16%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Presentase UMKM yang difasilitasi promosi melalui pameran meningkat volume usahanya melalui penjualan dan atau kerja sama**		**1.714.062.500**		**1.323.041.500**		**146.687.500**		-		**9.918.300**		-		**41.000.000**	-	*50.918.300*		*34,71%*	-	*1.373.959.800*		*80,16%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	25 Pameran	1.714.062.500	19 Pameran	1.323.041.500	Pameran 5	146.687.500	Pameran 0	-	Pameran -	9.918.300	1 Pameran	-	- Pameran	41.000.000	*1 Pameran*	*50.918.300*	*20,00%*	*34,71%*	*20 Pameran*	*1.373.959.800*	*80,00%*	*80,16%*	DINAS KOPERINDAG
																			20,00	34,71							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	6,76	20,00	-	-	27,95								
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI		**200 %**	**355.575.000**	**60,10 %**	**263.071.500**	**% 100**	**2.020.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,10 %*	*263.071.500*	*30,05%*	*73,98%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatkan volume usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Tanggamus**		**355.575.000**		**263.071.500**		**2.020.000**		-		-		-		-	-	*263.071.500*		*73,98%*	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	400 Peserta	242.575.000	240 Peserta	151.435.000	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		- Peserta	-	0,00%	0,00%	240 Peserta	151.435.000	60,00%	62,43%	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	113.000.000	1 Dokumen	111.636.500	1 Dokumen	2.020.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	1 Dokumen	111.636.500	100,00%	98,79%	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	12.350.000	4 Eksemplar Dokumen	12.083.600	1 Eksemplar Dokumen	4.380.000	1 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	3.763.800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*1 Eksemplar Dokumen*	*3.763.800*	*100,00%*	*85,93%*	*5 Eksemplar Dokumen*	*15.847.400*	*100,00%*	*128,32%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	11.254.000	4 Eksemplar Dokumen	11.207.000	1 Eksemplar Dokumen	3.994.500	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	-	*1 Eksemplar Dokumen*	-	*100,00%*	*0,00%*	*5 Eksemplar Dokumen*	*11.207.000*	*100,00%*	*99,58%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	10 Eksemplar Dokumen	104.550.000	8 Eksemplar Dokumen	101.826.100	2 Laporan	20.942.000	1 Laporan	2.540.000	- Laporan	2.540.000	1 Laporan	2.540.000	- Laporan	5.032.900	*2 Laporan*	*12.652.900*	*100,00%*	*60,42%*	*10 Eksemplar Dokumen*	*114.479.000*	*100,00%*	*109,50%*	DPMPTSP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	20.701.000	11 Eksemplar Dokumen	17.386.650	3 Laporan	3.607.700	3 Laporan	-	- Laporan	1.132.400	0 Laporan	-	- Laporan	-	*3 Laporan*	*1.132.400*	*100,00%*	*31,39%*	*14 Eksemplar Dokumen*	*18.519.050*	*93,33%*	*89,46%*	DPMPTSP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Keuanganyang disusun tepat waktu**		**14.050.026.895**		**13.105.125.885**		**2.224.501.402**		**494.454.130**		**520.633.830**		**540.219.802**		**448.937.373**	-	*2.004.245.135*	*#DIV/0!*	*90,10%*	-	*15.109.371.020*		*107,54%*	DPMPTSP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	10.712.101.395	48 Bulan	9.737.866.685	12 Bulan	1.488.732.302	3 Bulan	324.494.130	3 Bulan	350.373.830,00	3 Bulan	531.359.802	3 Bulan	170.817.373	*12 Bulan*	*1.377.045.135*	*100,00%*	*92,50%*	*60 Bulan*	*11.114.911.820*	*100,00%*	*103,76%*	DPMPTSP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	190 Orang	2.956.500.000	164 Orang /Bulan	3.029.100.000	38 Orang	675.600.000	10 Orang	161.100.000	3 Orang	161.100.000,00	10 Orang	-	9 Orang	257.000.000	*38 Orang*	*579.200.000*	*100,00%*	*85,73%*	*202 Orang /Bula*	*3.608.300.000*	*106,32%*	*122,05%*	DPMPTSP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	365.525.000	48 Kali	327.440.000	12 Kali	58.990.000	3 Kali	8.860.000	3 Kali	9.160.000,00	3 Kali	8.860.000	3 Kali	21.120.000	*12 Kali*	*48.000.000*	*100,00%*	*81,37%*	*60 Kali*	*375.440.000*	*100,00%*	*102,71%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Buku	15.900.500	4 Buku	10.719.200	1 Laporan	1.179.100	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	-	*1 Laporan*	-	*100,00%*	*0,00%*	*5 Buku*	*10.719.200*	*100,00%*	*67,41%*	DPMPTSP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**413.125.000**		**180.000.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*180.000.000*		*43,57%*	DPMPTSP
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Stel	-	0 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	DPMPTSP
			Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah	5 Perda	250.000.000	4 Perda	180.000.000	Perda		Perda		Perda		Perda		Perda		- *Perda*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Perda*	*180.000.000*	*80,00%*	*72,00%*	DPMPTSP
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	163.125.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	DPMPTSP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu**		**2.133.313.500**		**1.735.091.380**		**190.439.450**		**8.625.000**		**4.525.500**		**10.371.300**		**39.772.250**	-	*63.294.050*		*33,24%*	-	*1.798.385.430*		*84,30%*	DPMPTSP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	347.871.500	27 Unit	314.446.440	1 Paket	63.917.150	0 Paket	1.855.000	- Paket	-	1 Paket	3.490.000	- Paket	20.792.000	*1 Paket*	*26.137.000*	*100,00%*	*40,89%*	*28 Unit*	*340.583.440*	*140,00%*	*97,90%*	DPMPTSP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	3035 Porsi	136.575.000	1991 Porsi	90.021.150	280 Paket	6.750.000	0 Paket	-	- Paket	-	50 Paket	2.227.500	100 Paket	1.113.750	*150 Paket*	*3.341.250*	*53,57%*	*49,50%*	*2.141 Porsi*	*93.362.400*	*70,54%*	*68,36%*	DPMPTSP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	825 Eksemplar	171.923.500	651 Eksemplar	152.325.550	165 Eksemplar	22.671.300	41 Eksemplar	2.500.000	42 Eksemplar	2.250.000	41 Eksemplar	1.701.300	41 Eksemplar	13.257.000	*165 Eksemplar*	*19.708.300*	*100,00%*	*86,93%*	*816 Eksemplar*	*172.033.850*	*98,91%*	*100,06%*	DPMPTSP
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	60 Bulan	117.583.500	48 Bulan	108.588.240	12 Bulan	15.559.000	0 Bulan	3.000.000	6 Bulan	1.005.500	3 Bulan	2.172.500	3 Bulan	2.589.500	*12 Bulan*	*8.767.500*	*100,00%*	*56,35%*	*60 Bulan*	*117.355.740*	*100,00%*	*99,81%*	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	200 Kali	1.359.360.000	153 Kali	1.069.710.000	30 Laporan	81.542.000	0 Laporan	1.270.000	- Laporan	1.270.000	15 Laporan	780.000	- Laporan	2.020.000	*15 Laporan*	*5.340.000*	*50,00%*	*6,55%*	*168 Kali*	*1.075.050.000*	*84,00%*	*79,09%*	DPMPTSP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah**		**42.446.000**		**33.667.600**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*33.667.600*		*79,32%*	DPMPTSP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Lainnya	40 Unit	42.446.000	32 Unit	33.667.600	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*32 Unit*	*33.667.600*	*80,00%*	*79,32%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**798.027.500**		**785.230.636**		**180.100.000**		**34.811.918**		**30.898.541**		**49.342.997**		**32.137.508**	-	*147.190.964*		*81,73%*	-	*932.421.600*		*116,84%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	745.475.000	48 Kali	733.699.136	12 Laporan	180.100.000	3 Laporan	34.811.918	- Laporan	30.898.541	6 Laporan	49.342.997	3 Laporan	32.137.508	*12 Laporan*	*147.190.964*	*100,00%*	*81,73%*	*60 Kali*	*880.890.100*	*100,00%*	*118,16%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	52.552.500	4 Kali	51.531.500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*51.531.500*	*80,00%*	*98,06%*	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**591.717.000**		**522.185.320**		**242.080.000**		**600.000**		**21.536.400**		**26.928.200**		**53.974.455**	-	*103.039.055*		*42,56%*	-	*625.224.375*		*105,66%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Unit	223.350.000	4 Unit	222.492.665	Unit 1	44.670.000	Unit 0	-	Unit 1	5.632.000	0 Unit	17.326.000	- Unit	14.080.000	*1 Unit*	*37.038.000*	*100,00%*	*82,91%*	*5 Unit*	*259.530.665*	*100,00%*	*116,20%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	15 Unit	236.850.000	14 Unit	261.752.655	Unit 5	109.123.000	Unit 0	-	Unit -	15.904.400	5 Unit	9.602.200	- Unit	38.944.455	*5 Unit*	*64.451.055*	*100,00%*	*59,06%*	*19 Unit*	*326.203.710*	*126,67%*	*137,73%*	DPMPTSP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70 Unit	47.900.000	57 Unit	37.940.000	10 Unit	4.670.000	1 Unit	600.000	Unit -	-	2 Unit	-	2 Unit	950.000	*5 Unit*	*1.550.000*	*50,00%*	*33,19%*	*62 Unit*	*39.490.000*	*88,57%*	*82,44%*	DPMPTSP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	83.617.000	Unit		1 Unit	83.617.000	0 Unit	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**11,15**	**4,89**	**10,98**	**16,29**	**23,82**	**7,77**	**28,55**	**18,48**	**74,49**	**47,43**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**						
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi**	**200 %**	**739.218.000**	**60,00 %**	**443.530.800**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*443.530.800*	*30,00%*	*60,00%*	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya promosi investasi**		**739.218.000**		**443.530.800**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*443.530.800*		*60,00%*	DPMPTSP
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran Investasi	20 Kali	739.218.000	12 Kali	443.530.800	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kali*	*443.530.800*	*60,00%*	*60,00%*	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelayanan Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu**	**200 %**	**1.221.674.000**	**80,00 %**	**1.212.632.300**	**%** **100**	**390.021.260**	**%** **0,00**	-	**%** **0,00**	**21.600.000**	**50,00 %**	**51.568.004**	**0,00 %**	**21.600.000**	*50,00 %*	*94.768.004*	*50,00%*	*24,30%*	*130,00 %*	*1.307.400.304*	*65,00%*	*107,02%*	DPMPTSP
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Perizinan yang terbit tepat waktu dan sesuai SOP**		**1.221.674.000**		**1.212.632.300**		**390.021.260**		-		**21.600.000**		**51.568.004**		**21.600.000**	-	*94.768.004*		*24,30%*	-	*1.307.400.304*		*107,02%*	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Implementasi Sistem Perizinan Terpadu melalui Online Single Submission (OSS)	60 Bulan	749.847.000	48 Bulan	877.909.700	Pelaku Usaha 300	390.021.260	Pelaku Usaha 0	-	Pelaku Usaha -	21.600.000	150 Pelaku Usaha	51.568.004	- Pelaku Usaha	21.600.000	*150 Pelaku Usaha*	*94.768.004*	*50,00%*	*24,30%*	*198 Bulan*	*972.677.704*	*330,00%*	*129,72%*	DPMPTSP
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Plat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3585 Buah	89.625.000	2868 Buah	71.700.000	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		- *Buah*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2.868 Buah*	*71.700.000*	*80,00%*	*80,00%*	DPMPTSP
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	60 Bulan	382.202.000	48 Bulan	263.022.600	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*263.022.600*	*80,00%*	*68,82%*	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	**5,54**	**50,00**	**13,22**	-	**5,54**	**50,00**	**24,30**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah**	**200 %**	**1.630.610.000**	**92,86 %**	**1.660.740.592**	**%** **100**	**365.200.000**	**%** **0,00**	-	**%** **0,00**	**164.641.900**	**57,74 %**	**17.100.000**	**0,00 %**	**183.386.100**	*58 %*	*365.128.000*	*57,74%*	*99,98%*	*150,60 %*	*2.025.868.592*	*75,30%*	*124,24%*	DPMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal**		**1.630.610.000**		**1.660.740.592**		**365.200.000**		-		**164.641.900**		**17.100.000**		**183.386.100**	-	*365.128.000*		*99,98%*	-	*2.025.868.592*		*124,24%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaua Penanaman Modal	265 Kali	241.500.000	238 Kali	215.700.000	Pelaku Usaha 210	275.980.000	Pelaku Usaha 0	-	Pelaku Usaha -	124.554.400	120 Pelaku Usaha	-	90 Pelaku Usaha	151.398.600	*210 Pelaku Usaha*	*275.953.000*	*100,00%*	*99,99%*	*448 Kali*	*491.653.000*	*169,06%*	*203,58%*	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	40 Kali	906.110.000	31 Kali	969.465.592	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	31 Kali	969.465.592	77,50%	106,99%	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisas Pengawasan Penanaman Modal	535 Kali	483.000.000	511 Kali	475.575.000	100 Kegiatan Usaha	89.220.000	0 Kegiatan Usaha	-	- Kegiatan Usaha	40.087.500	59 Kegiatan Usaha	17.100.000	41 Kegiatan Usaha	31.987.500	100 Kegiatan Usaha	89.175.000	100,00%	99,95%	611 Kali	564.750.000	114,21%	116,93%	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	45,08	57,74	4,68	31,95	50,22	89,69	99,98					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	T	ST					
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		200 %	234.375.880	73,81 %	180.623.604	% 100	209.450.000	% 50,00	25.560.000	% 0,00	1.270.000	0,00 %	-	50,00 %	174.568.590	100,00 %	201.398.590	100,00%	96,16%	173,81 %	382.022.194	86,90%	163,00%	DPMPTSP
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			234.375.880		180.623.604		209.450.000		25.560.000		1.270.000		-		174.568.590	-	201.398.590		96,16%	-	382.022.194		163,00%	DPMPTSP
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Investasi Tanggamus	3165 Eksemplar	234.375.880	2336 Eksemplar	180.623.604	Dokumen 2	209.450.000	Dokumen 1	25.560.000	Dokumen -	1.270.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	174.568.590	2 Dokumen	201.398.590	100,00%	96,16%	2.338 Eksemplar	382.022.194	73,87%	163,00%	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	12,20	-	0,61	-	-	50,00	83,35	100,00	96,16					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	ST	ST					
19			**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	200 %	6.287.217.150	64,21 %	7.456.192.056	% 100	3.212.687.943	% 18,95	847.965.707	% 24,21	641.389.110	% 17,89	852.182.519	% 24,21	600.701.230	85,26 %	2.942.238.566	85,26%	91,58%	149,47 %	10.398.430.622	74,74%	165,39%	DISPORA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu**		177.423.500		178.732.100		14.333.400		4.529.800		3.552.700		3.482.200		2.620.200	-	14.184.900		98,96%	-	192.917.000		108,73%	DISPORA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Peruahan Renja	15 Dokumen	60.247.500	12 Dokumen	54.117.500	3 Dokumen	5.600.200	2 Dokumen	4.090.200	- Dokumen	1.509.800	1 Dokumen	-	- Dokumen	200	3 Dokumen	5.600.200	100,00%	100,00%	15 Dokumen	59.717.700	100,00%	99,12%	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	20 Dokumen	33.508.000	28 Dokumen	44.081.200	1 Dokumen	5.250.200	0 Dokumen	439.600	1 Dokumen	1.171.100	0 Dokumen	2.620.000	- Dokumen	2.620.000	1 Dokumen	6.850.700	100,00%	130,48%	29 Dokumen	50.931.900	145,00%	152,00%	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	14.683.000	4 Dokumen	17.197.400	1 Dokumen	684.600	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	4 Dokumen	17.197.400	80,00%	117,12%	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	16.144.500	4 Dokumen	16.676.700	1 Dokumen	499.600	0 Dokumen	-	1 Dokumen	499.600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	499.600	100,00%	100,00%	5 Dokumen	17.176.300	100,00%	106,39%	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	16.494.500	4 Dokumen	17.182.200	1 Dokumen	800.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100,00%	0,00%	5 Dokumen	17.182.200	100,00%	104,17%	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	30.444.500	4 Dokumen	29.477.100	4 Laporan	862.200	0 Laporan	-	2 Laporan	372.200	0 Laporan	490.000	2 Laporan	-	4 Laporan	862.200	100,00%	100,00%	8 Dokumen	30.339.300	160,00%	99,65%	DISPORA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Eksemplar	5.901.500	0 Eksemplar	-	3 Laporan	636.600	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	372.200	3 Laporan	-	3 Laporan	372.200	100,00%	58,47%	3 Eksemplar	372.200	100,00%	6,31%	DISPORA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**		4.654.634.150		5.878.067.020		2.837.151.443		817.937.571		490.592.538		805.366.583		564.510.400	-	2.678.407.092		94,40%	-	8.556.474.112		183,83%	DISPORA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Pegawai	3.980.634.150	176 Pegawai	5.218.947.020	23 Pegawai	2.363.191.443	6 Pegawai	679.717.571	6 Pegawai	427.042.538	5 Pegawai	678.381.583	6 Pegawai	463.185.400	23 Pegawai	2.248.327.092	100,00%	95,14%	199 Pegawai	7.467.274.112	84,68%	187,59%	DISPORA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Pegawai	405.300.000	24 Pegawai	405.300.000	23 Pegawai	405.300.000	6 Pegawai	127.100.000	6 Pegawai	63.550.000	6 Pegawai	113.325.000	5 Pegawai	101.325.000	23 Pegawai	405.300.000	100,00%	100,00%	47 Pegawai	810.600.000	195,83%	200,00%	DISPORA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	40 Orang	268.700.000	35 Orang	253.820.000	12 Kali	68.660.000	3 Kali	11.120.000	- Kali	-	0 Kali	13.660.000	2 Kali	-	5 Kali	24.780.000	41,67%	36,09%	40 Orang	278.600.000	100,00%	103,68%	DISPORA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-		-	- -	-		0,00%	- -	-			DISPORA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	- Kali	-	0,00%	0,00%	DISPORA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**528.647.500**		**395.583.246**		**48.769.300**		-		**1.000.000**		**1.280.000**		**14.625.900**	-	*16.905.900*		*34,67%*	-	*412.489.146*		*78,03%*	DISPORA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	20.680.000	2 Unit	16.630.000	Unit 1	7.140.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	*0,00%*	*0,00%*	*2 Unit*	*16.630.000*	*50,00%*	*80,42%*	DISPORA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bulan	32.000.000	48 Bulan	25.063.000	Bulan		Bula n		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*25.063.000*	*80,00%*	*78,32%*	DISPORA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	25.758.500	48 Bulan	34.000.300	Paket 1	11.534.900	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	- Paket	-	- Paket	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*34.000.300*	*80,00%*	*132,00%*	DISPORA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	29.744.000	48 Bulan	41.090.946	1 Paket	15.714.400	0 Paket	-	- Paket	1.000.000	0 Paket	-	1 Paket	12.605.900	*1 Paket*	*13.605.900*	*100,00%*	*86,58%*	*49 Bulan*	*54.696.846*	*81,67%*	*183,89%*	DISPORA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	3000 Kali	420.465.000	1823 Kali	278.799.000	Lapor an 3	14.380.000	Lapo ran 0	-	Lapo ran -	-	1 Lapora n	1.280.000	- Lapora n	2.020.000	*1 Laporan*	*3.300.000*	*33,33%*	*22,95%*	*1.824 Kali*	*282.099.000*	*60,80%*	*67,09%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**387.800.000**		**520.904.990**		**218.273.000**		**4.364.736**		**146.243.872**		**29.247.936**		**18.944.730**	-	*198.801.274*		*91,08%*	-	*719.706.264*		*185,59%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	337.800.000	48 Bulan	306.106.420	Bulan 12	88.838.000	Bula n 0	4.364.736	Bulan 6	24.323.872	3 Bulan	26.547.936	3 Bulan	18.944.730	*12 Bulan*	*74.181.274*	*100,00%*	*83,50%*	*60 Bulan*	*380.287.694*	*100,00%*	*112,58%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan, Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kali	50.000.000	20 Kali	214.798.570	Lapor an 1	129.435.000	Lapo ran 0	-	Lapo ran -	121.920.000	1 Lapora n	2.700.000	- Lapora n	-	*1 Laporan*	*124.620.000*	*100,00%*	*96,28%*	*21 Kali*	*339.418.570*	*84,00%*	*678,84%*	DISPORA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**538.712.000**		**482.904.700**		**94.160.800**		**21.133.600**		-		**12.805.800**		-	-	*33.939.400*		*36,04%*	-	*516.844.100*		*95,94%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	534.452.000	8 Unit	482.904.700	Unit 2	89.900.800	Unit 1	21.133.600	Unit 1	-	0 Unit	12.805.800	- Unit	-	*2 Unit*	*33.939.400*	*100,00%*	*37,75%*	*10 Unit*	*516.844.100*	*100,00%*	*96,71%*	DISPORA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	4.260.000	0 Unit	-	Unit 2	4.260.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	*0,00%*	*0,00%*	- Unit	-	*0,00%*	*0,00%*	DISPORA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**18,95**	**26,39**	**24,21**	**19,96**	**17,89**	**26,53**	**24,21**	**18,70**	**85,26**	**91,58**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan**	**200 %**	**3.908.108.700**	**62,96 %**	**2.740.624.680**	**% 100**	**454.842.200**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	**48.368.000**	**50,00 %**	**208.844.800**	**0,00 %**	**33.803.400**	*50 %*	*291.016.200*	*50,00%*	*63,98%*	*112,96 %*	*3.031.640.880*	*56,48%*	*77,57%*	DISPORA
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Terbinanya Pemuda Pelopor**		**1.042.834.200**		**767.808.580**		**332.415.300**		-		**48.368.000**		**208.844.800**		**33.803.400**	- -	*291.016.200*		*87,55%*	- -	*1.058.824.780*		*101,53%*	DISPORA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	5 Kali	106.815.000	3 Kali	64.089.000	Bulan		Bula n		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*64.089.000*	*60,00%*	*60,00%*	DISPORA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah	5 Kali	307.275.000	3 Kali	184.365.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*184.365.000*	*60,00%*	*60,00%*	DISPORA
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	5 Kali	117.057.000	3 Kali	70.234.200	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*70.234.200*	*60,00%*	*60,00%*	DISPORA
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kali	109.644.000	3 Kali	65.786.400	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*65.786.400*	*60,00%*	*60,00%*	DISPORA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2 Kali	402.043.200	1 Kali	383.333.980	Kali 1	332.415.300	Kali 0	-	Kali -	48.368.000	1 Kali	208.844.800	- Kali	33.803.400	*1 Kali*	*291.016.200*	*100,00%*	*87,55%*	*2 Kali*	*674.350.180*	*100,00%*	*167,73%*	DISPORA
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota**		**2.865.274.500**		**1.972.816.100**		**122.426.900**		-		-		-		-		-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*1.972.816.100*		*68,85%*	DISPORA
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	5 Kali	2.865.274.500	4 Kali	1.972.816.100	Dokumen 1	122.426.900	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	-	*Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*1.972.816.100*	*80,00%*	*68,85%*	DISPORA
											-	-	-	10,63	50,00	45,92	-	7,43	50,00	63,98							
											SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah Atlet Berprestasi**	**200 %**	**10.844.052.000**	**80,18 %**	**10.916.895.335**	% 100	**3.755.776.800**	% 0,00	-	% 32,36	**1.500.000.000**	**0,00 %**	**147.748.220**	**32,37 %**	**1.025.683.400**	*64,73 %*	*2.673.431.620*	*64,73%*	*71,18%*	*144,90 %*	*13.590.326.955*	*72,45%*	*125,33%*	DISPORA
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Atlet yang Berprestasi**		**700.000.000**		**424.927.400**		-		-		-		-		-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*424.927.400*		*60,70%*	DISPORA
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	15 Cabang Olahraga	700.000.000	12 Cabang Olahraga	424.927.400	Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		-	*Cabang Olahraga*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Cabang Olahraga*	*424.927.400*	*80,00%*	*60,70%*	DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**91.357.000**		**86.881.000**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*86.881.000*		*95,10%*	DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	20 Kecamatan	91.357.000	20 Kecamatan	86.881.000	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		-	*Kecamatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*20 Kecamatan*	*86.881.000*	*100,00%*	*95,10%*	DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Peningkatan Atlet Berprestasi**		**400.000.000**		**449.251.150**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*449.251.150*		*112,31%*	DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	15 Cabang Olahraga	250.000.000	12 Cabang Olahraga	359.251.150	Evevt		Evevt		Evevt		Evevt		Evevt		-	*Evevt*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Cabang Olahraga*	*359.251.150*	*80,00%*	*143,70%*	DISPORA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Peyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10 Kali	150.000.000	6 Kali	90.000.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		-	*Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*90.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			**7.650.000.000**		**8.401.457.785**		**3.317.956.800**		-		**1.500.000.000**		**147.748.220**		**1.025.683.400**	-	*2.673.431.620*		*80,57%*	-	*11.074.889.405*		*144,77%*	DISPORA
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Persentase Hibah yang tersalurkan	500 %	7.650.000.000	400 %	8.401.457.785	% 100	3.317.956.800	% 0	-	% 33,33	1.500.000.000	0,00 %	147.748.220	33,34 %	1.025.683.400	*66,67 %*	*2.673.431.620*	*66,67%*	*80,57%*	*467 %*	*11.074.889.405*	*93,33%*	*144,77%*	DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase peningkatan Atlet Berprestasi**		**2.002.695.000**		**1.554.378.000**		**437.820.000**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*1.554.378.000*		*77,61%*	DISPORA
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Sepeda Santai)	5 Event	350.000.000	4 Event	562.761.000	Event 3	437.820.000	Event 0	-	Event -	-	0,00 Event	-	- Event	-	-	*Event*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Event*	*562.761.000*	*80,00%*	*160,79%*	DISPORA
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	5 Gedung	1.652.695.000	3 Gedung	991.617.000	Gedung		Gedung		Gedung		Gedung		Gedung		-	*Gedung*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Gedung*	*991.617.000*	*60,00%*	*60,00%*	DISPORA
											-	-	32,36	39,94	-	3,93	32,37	27,31	64,73	71,18							
											SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SD							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		**100 %**	**53.969.800**	**0,00 %**	-	% 100	**52.020.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	**100,00 %**	**50.000.000**		-	*100 %*	*50.000.000*	*100,00%*	*96,12%*	*100,00 %*	*50.000.000*	*100,00%*	*92,64%*	DISPORA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**53.969.800**		-		**52.020.000**	**0**	-	*0,00*	-		**50.000.000**		-	-	*50.000.000*		*96,12%*	-	*50.000.000*		*92,64%*	DISPORA
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	1 Organisasi	53.969.800	Organisasi		1 Organisasi	52.020.000	0 Organisasi	-	- Organisasi	-	1 Organisasi	50.000.000	- Organisasi	-	*1 Organisasi*	*50.000.000*	*100,00%*	*96,12%*	*1 Organisasi*	*50.000.000*	*100,00%*	*92,64%*	DISPORA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	-	**0,00**	-	**100,00**	**96,12**	**0,00**	-	100,00	96,12							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	ST	ST							
20			**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	200 %	**18.558.203.615**	80,40 %	**17.368.379.601**	100 %	**3.499.992.921**	54,97 %	**686.748.068**	3,69 %	**1.107.955.491**	16,62 %	**809.126.527**	2,70 %	**580.713.286**	*77,98 %*	*3.184.543.372*	*77,98%*	*90,99%*	*158,39 %*	*20.552.922.973*	*79,19%*	*110,75%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**422.275.500**		**320.141.800**		**41.397.600**		**3.600.000**		**8.150.000**		**7.200.000**		**1.800.000**	-	*20.750.000*		*50,12%*	-	*340.891.800*		*80,73%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	200 Dokumen	184.100.000	127 Dokumen	160.960.000	5 Dokumen	27.150.000	2 Dokumen	3.600.000	- Dokumen	5.300.000	0 Dokumen	7.200.000	- Dokumen	1.800.000	*2 Dokumen*	*17.900.000*	*40,00%*	*65,93%*	*129 Dokumen*	*178.860.000*	*64,50%*	*97,15%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	25 Dokumen	42.100.000	22 Dokumen	34.310.000	5 Dokumen	1.852.100	2 Dokumen	-	- Dokumen	950.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*950.000*	*40,00%*	*51,29%*	*24 Dokumen*	*35.260.000*	*96,00%*	*83,75%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	25 Dokumen	24.100.000	17 Dokumen	16.610.000	5 Dokumen	1.972.200	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*20,00%*	*0,00%*	*18 Dokumen*	*16.610.000*	*72,00%*	*68,92%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	37.600.000	4 Dokumen	23.386.500	5 Dokumen	1.980.000	1 Dokumen	-	- Dokumen	1.900.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*1.900.000*	*20,00%*	*95,96%*	*5 Dokumen*	*25.286.500*	*100,00%*	*67,25%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	25.025.000	4 Dokumen	15.965.000	6 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*16,67%*	*0,00%*	*5 Dokumen*	*15.965.000*	*100,00%*	*63,80%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaa	30 Dokumen	59.150.000	19 Dokumen	37.090.000	5 Dokumen	2.218.400	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*20,00%*	*0,00%*	*20 Dokumen*	*37.090.000*	*66,67%*	*62,70%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	30 Dokumen	50.200.500	19 Dokumen	31.820.300	6 Dokumen	3.224.900	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*16,67%*	*0,00%*	*20 Dokumen*	*31.820.300*	*66,67%*	*63,39%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia**		**14.396.450.515**		**14.270.198.943**		**3.030.037.521**		**655.694.584**		**970.545.747**		**753.399.767**		**488.931.464**	-	*2.868.571.562*		*94,67%*	-	*17.138.770.505*		*119,05%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10.606.572.015	80 Orang	10.505.672.943	21 Orang	2.220.955.421	5 Orang	471.174.584	5 Orang	710.599.147	5 Orang	562.694.767	4 Orang	369.491.464	*19 Orang*	*2.113.959.962*	*90,48%*	*95,18%*	*99 Orang*	*12.619.632.905*	*99,00%*	*118,98%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Tugas ASN	195 Orang	3.245.931.000	158 Orang	3.303.218.000	39 Orang	730.896.900	10 Orang	179.950.000	10 Orang	236.750.000	9 Orang	174.525.000	12 Orang	113.600.000	*41 Orang*	*704.825.000*	*105,13%*	*96,43%*	*199 Orang*	*4.008.043.000*	*102,05%*	*123,48%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengiola Administrasi	50 Orang	543.947.500	44 Orang	461.308.000	12 Orang	78.185.200	12 Orang	4.570.000	- Orang	23.196.600	0 Orang	16.180.000	- Orang	5.840.000	*12 Orang*	*49.786.600*	*100,00%*	*63,68%*	*56 Orang*	*511.094.600*	*112,00%*	*93,96%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**25.800.000**		**25.800.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*25.800.000*		*100,00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta atribut Kelengkapannya	295 Buah	25.800.000	177 Buah	25.800.000	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		- *Buah*	-	*0,00%*	*0,00%*	*177 Buah*	*25.800.000*	*60,00%*	*100,00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.219.963.600**		**832.283.390**		**119.004.200**		**3.414.000**		**9.833.400**		**26.803.200**		**6.335.231**	-	*46.385.831*		*38,98%*	-	*878.669.221*		*72,02%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	109 Unit	453.046.600	98 Unit	301.884.660	50 Unit	44.190.000	40 Unit	-	- Unit	2.343.400	0 Unit	15.800.000	- Unit	1.940.000	*40 Unit*	*20.083.400*	*80,00%*	*45,45%*	*138 Unit*	*321.968.060*	*126,61%*	*71,07%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Mi	1500 Orang	51.750.000	1430 Orang	34.350.000	300 Porsi	12.135.000	265 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	2.002.000	- Porsi	-	*265 Porsi*	*2.002.000*	*88,33%*	*16,50%*	*1.695 Orang*	*36.352.000*	*113,00%*	*70,25%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	100 Eksemplar	34.710.000	80 Eksemplar	30.389.300	20 Eksemplar	18.384.900	20 Eksemplar	3.414.000	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	3.800.000	- Eksemplar	-	*20 Eksemplar*	*7.214.000*	*100,00%*	*39,24%*	*100 Eksemplar*	*37.603.300*	*100,00%*	*108,34%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor dan Bahan Material Lainnya Untuk Keperluan Kantor	100 Buah	125.207.000	80 Buah	106.386.430	20 Buah	15.901.300	10 Buah	-	- Buah	2.640.000	0 Buah	5.201.200	- Buah	4.395.231	*10 Buah*	*12.236.431*	*50,00%*	*76,95%*	*90 Buah*	*118.622.861*	*90,00%*	*94,74%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Luar Daerah dalam Ranga konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan urusan	375 Kali	555.250.000	245 Kali	359.273.000	75 Kali	28.393.000	10 Kali	-	- Kali	4.850.000	0 Kali	-	- Kali	-	*10 Kali*	*4.850.000*	*13,33%*	*17,08%*	*255 Kali*	*364.123.000*	*68,00%*	*65,58%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**39.353.200**		-		**39.353.200**		-		**16.080.000**		**7.632.000**		**8.448.000**	-	*32.160.000*		*81,72%*	-	*32.160.000*		*81,72%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	39.353.200	%		100 %	39.353.200	0 %	-	- %	16.080.000	100 %	7.632.000	- %	8.448.000	*100 %*	*32.160.000*	*100,00%*	*81,72%*	*100 %*	*32.160.000*	*100,00%*	*81,72%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**664.495.000**		**552.947.713**		**168.523.000**		**24.039.484**		**59.537.144**		**16.788.760**		**30.033.822**	-	*130.399.210*		*77,38%*	-	*683.346.923*		*102,84%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	505.010.000	48 Bulan	447.042.413	12 Bulan	122.792.000	3 Bulan	14.539.484	3 Bulan	46.212.144	3 Bulan	16.788.760	3 Bulan	26.608.822	*12 Bulan*	*104.149.210*	*100,00%*	*84,82%*	*60 Bulan*	*551.191.623*	*100,00%*	*109,14%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pameran Jumlah Penyedian Jasa Kantor	60 Bulan	159.485.000	53 Bulan	105.905.300	12 Bulan	45.731.000	3 Bulan	9.500.000	2 Bulan	13.325.000	0 Bulan	-	- Bulan	3.425.000	*5 Bulan*	*26.250.000*	*41,67%*	*57,40%*	*58 Bulan*	*132.155.300*	*96,67%*	*82,86%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.829.219.000**		**1.367.007.755**		**141.030.600**		-		**59.889.200**		**4.934.800**		**53.612.769**	-	*118.436.769*		*83,98%*	-	*1.485.444.524*		*81,21%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Meningkatnya penyediiaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	500 %	199.676.000	400 %	61.966.000	%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*61.966.000*	*80,00%*	*31,03%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	50 Unit	1.385.868.000	42 Unit	1.110.331.755	Unit 6	141.030.600	Unit 0	-	Unit 6	59.889.200	0 Unit	4.934.800	- Unit	53.612.769	*6 Unit*	*118.436.769*	*100,00%*	*83,98%*	*48 Unit*	*1.228.768.524*	*96,00%*	*88,66%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung	5 Unit	243.675.000	4 Unit	194.710.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*194.710.000*	*80,00%*	*79,91%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**54,97**	**19,62**	**3,69**	**31,66**	**16,62**	**23,12**	**2,70**	**16,59**	77,98	90,99							
									Predikat kinerja		**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	T	ST							
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Peningkatan Perpustakaan Yang Dibin**	**200 %**	**3.926.428.200**	**68,85 %**	**2.894.414.350**	**100 %**	**308.729.500**	**0,00 %**	-	**97,88 %**	**2.044.000**	**0,00 %**	-	**0,79 %**	**10.958.450**	*98,68 %*	*13.002.450*	*98,68%*	*4,21%*	*167,53 %*	*2.907.416.800*	*83,77%*	*74,05%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan jumlah Perpustakaan Pekon di Kabupaten Tanggamus**		**1.117.190.000**		**843.781.250**		**187.629.500**		-		**544.000**		-		**10.958.450**	-	*11.502.450*		*6,13%*	-	*855.283.700*		*76,56%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Elektronik	3750 Orang	221.850.000	2990 Orang	177.151.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2.990 Orang*	*177.151.000*	*79,73%*	*79,85%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Perpuskanaan Tingkat Kabupaten Kota	30 Perpustakaan	169.355.000	48 Perpustakaan/Pekon	127.086.950	Perpustakaan/Pekon		Perpustakaan/Pekon		Perpustakaan/Pekon		Perpustakaan/Pekon		- *Perpustakaan/Pekon*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Perpustakaan/Pekon*	*127.086.950*	*160,00%*	*75,04%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Antologi	500 Eksemplar	195.950.000	304 Eksemplar/Unit	150.668.800	Eksemplar/Unit		Eksemplar/Unit		Eksemplar/Unit		Eksemplar/Unit		- *Eksemplar/Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*304 Eksemplar/Unit*	*150.668.800*	*60,80%*	*76,89%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Perpustakaan Pekon	150 Pekon	145.627.000	90 Pekon/Paket	106.233.700	Pekon/Paket		Pekon/Paket		Pekon/Paket		Pekon/Paket		- *Pekon/Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*90 Pekon/Paket*	*106.233.700*	*60,00%*	*72,95%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	30 Perpustakaan	384.408.000	24 Perpustakaan	282.640.800	6 Perpustakaan	187.629.500	0 Perpustakaan	-	- Perpustakaan	544.000	0 Perpustakaan	-	6 Perpustakaan	10.958.450	*6 Perpustakaan*	*11.502.450*	*100,00%*	*6,13%*	*30 Perpustakaan*	*294.143.250*	*100,00%*	*76,52%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan sarana perpustakaan**		**2.809.238.200**		**2.050.633.100**		**121.100.000**			-		**1.500.000**		-		-		**1.500.000**		**1,24%**	-	**2.052.133.100**		**73,05%**	
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasana	1155 Unit	2.750.000.000	703 Unit	2.000.205.600	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*703 Unit*	*2.000.205.600*	*60,87%*	*72,73%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Jumlah Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1500 Orang	59.238.200	740 Orang	50.427.500	Orang 750	121.100.000	Orang 0	-	Orang 740	1.500.000	0 Orang	-	- Orang	-	*740 Orang*	*1.500.000*	*98,67%*	*1,24%*	*1.480 Orang*	*51.927.500*	*98,67%*	*87,66%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	-	**97,88**	**0,66**	-	-	**0,79**	**3,55**	98,68	4,21							
				Predikat kinerja							**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	ST	SR							
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Peningkatan Arsip Yang Di Kelola Melalui JIKN**	**200 %**	**502.835.000**	**77,50 %**	**356.237.700**	**% 100**	**28.852.100**	**% 0,00**	-	**% 28,34**	**1.650.000**	**2,24 %**	**1.200.000**	**0,00 %**	-	*30,57 %*	*2.850.000*	*30,57%*	*9,88%*	*108,07 %*	*359.087.700*	*54,04%*	*71,41%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis**		**278.176.250**		**188.576.050**		**8.676.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*188.576.050*		*67,79%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis	500 %	128.126.250	450 %	88.836.050	% 100	8.676.000	% 0	-	% 50,00	-	0,00 %	-	- %	-	*50 %*	-	*50,00%*	*0,00%*	*500 %*	*88.836.050*	*100,00%*	*69,33%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis	500 %	150.050.000	400 %	99.740.000	% 0	-	%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*99.740.000*	*80,00%*	*66,47%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Statis**		**104.385.000**		**95.497.400**		**20.176.100**		-		**1.650.000**		**1.200.000**		-	-	*2.850.000*		*14,13%*	-	*98.347.400*		*94,22%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Penyerahan arsip Statis dari pencipta arsip (OPD) dan akuisisi oleh lembaga kearsipan daerah (Dinas Perpustakaan)	500 %	104.385.000	400 %	95.497.400	% 100	20.176.100	% 0	-	% 6,67	1.650.000	4,47 %	1.200.000	0,00 %	-	*11 %*	*2.850.000*	*11,14%*	*14,13%*	*411 %*	*98.347.400*	*82,23%*	*94,22%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**120.273.750**		**72.164.250**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*72.164.250*		*60,00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	500 %	120.273.750	300 %	72.164.250	%		%	-	%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*72.164.250*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	-	**28,34**	**5,72**	**2,24**	**4,16**	-	-	30,57	9,88							
				Predikat kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR							
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Dokumen/Arsip Daerah Yang Di Selamatkan**	**200 %**	**145.210.000**	**60,00 %**	**87.126.000**	**%**	-	**%**	-	**%**	-				-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*87.126.000*	*30,00%*	*60,00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Persentase Perangkat daerah yang melakukan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**		**145.210.000**		**87.126.000**		-	**0**	-	*0,00*	-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*87.126.000*		*60,00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Penetapan Arsip OPD yang akan dimusnahkan	500 %	145.210.000	300 %	87.126.000	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*87.126.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
				Rata-rata capaian kinerja (%)							**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-							
				Predikat kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR							
21			**DINAS PERIKANAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERIKANAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**20.542.793.645**	**87,30 %**	**18.601.607.268**	**% 100**	**3.250.535.626**	**% 0,34**	**646.848.191**	**% 24,24**	**697.507.026**	**25,10 %**	**707.514.681**	**48,69 %**	**670.412.889**	*98,38 %*	*2.722.282.787*	*98,38%*	*83,75%*	*185,69 %*	*21.323.890.055*	*92,84%*	*103,80%*	DINAS PERIKANAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**		**137.650.000**		**103.010.000**		**16.538.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*103.010.000*		*74,83%*	DINAS PERIKANAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	80 Eksemplar Dokumen	110.650.000	76 Eksemplar Dokumen	81.110.000	Eksemplar 20 Dokumen	10.250.000	Eksemplar 0 Dokumen	-	Eksemplar - Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*76 Eksemplar Dokumen*	*81.110.000*	*95,00%*	*73,30%*	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3.750.000	48 Eksemplar Dokumen	4.050.000	12 Eksemplar Dokumen	1.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*4.050.000*	*80,00%*	*108,00%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3.750.000	48 Eksemplar Dokumen	2.762.000	12 Eksemplar Dokumen	1.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*2.762.000*	*80,00%*	*73,65%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3.750.000	48 Eksemplar Dokumen	3.000.000	12 Eksemplar Dokumen	1.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*3.000.000*	*80,00%*	*80,00%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3.750.000	48 Eksemplar Dokumen	2.250.000	12 Eksemplar Dokumen	1.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*2.250.000*	*80,00%*	*60,00%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	60 Eksemplar Dokumen	3.750.000	48 Eksemplar Dokumen	2.250.000	12 Eksemplar Dokumen	1.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*2.250.000*	*80,00%*	*60,00%*	DINAS PERIKANAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	60 Eksemplar Dokumen	8.250.000	48 Eksemplar Dokumen	7.588.000	12 Eksemplar Dokumen	1.038.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*7.588.000*	*80,00%*	*91,98%*	DINAS PERIKANAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu**		**16.570.122.300**		**15.523.035.919**		**2.708.764.955**		**635.620.029**		**588.174.784**		**651.617.022**		**609.611.813**	*- -*	*2.485.023.648*		*91,74%*	*- -*	*18.008.059.567*		*108,68%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang	12.574.022.300	130 Orang	11.592.044.574	26 Orang	1.942.084.955	6 Orang	382.357.725	7 Orang	489.697.088,4	6 Orang	481.942.022	7 Orang	444.155.613	*26 Orang*	*1.798.152.448*	*100,00%*	*92,59%*	*156 Orang*	*13.390.197.022*	*120,00%*	*106,49%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	210 Orang	3.433.950.000	168 Orang	3.468.265.000	42 Orang	707.640.000	11 Orang	253.262.304	10 Orang	93.197.696	10 Orang	169.675.000	11 Orang	154.975.000	*42 Orang*	*671.110.000*	*100,00%*	*94,84%*	*210 Orang*	*4.139.375.000*	*100,00%*	*120,54%*	DINAS PERIKANAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Orang	562.150.000	100 Orang	462.726.345	25 Orang	59.040.000	0 Orang	-	6 Orang	5.280.000	12 Orang	-	7 Orang	10.481.200	*25 Orang*	*15.761.200*	*100,00%*	*26,70%*	*125 Orang*	*478.487.545*	*100,00%*	*85,12%*	DINAS PERIKANAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daereah yang disusun dengan baik**		**820.518.200**		**638.897.895**		**82.197.000**		**-**		**13.196.000**		**10.305.600**		**7.839.064**	*- -*	*31.340.664*		*38,13%*	*- -*	*670.238.559*		*81,68%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	150.565.950	27 Unit	128.922.870	Unit 7	10.433.500	Unit 0	-	Unit 2	3.916.000	1 Unit	2.125.000	4 Unit	2.000.000	*7 Unit*	*8.041.000*	*100,00%*	*77,07%*	*34 Unit*	*136.963.870*	*97,14%*	*90,97%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	12600 Kotak	92.825.000	12600 Kotak	66.916.000	Kotak 1400	8.091.000	Kotak 0	-	Kotak 350	330.000	350 Kotak	2.130.000	700 Kotak	330.000	*1.400 Kotak*	*2.790.000*	*100,00%*	*34,48%*	*14.000 Kotak*	*69.706.000*	*111,11%*	*75,09%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	3445 Eksemplar	108.418.750	2756 Eksemplar	92.259.468	Eksemplar 689	11.086.300	Eksemplar 0	-	Eksemplar 172	970.000	173 Eksemplar	-	344 Eksemplar	1.599.891	*689 Eksemplar*	*2.569.891*	*100,00%*	*23,18%*	*3.445 Eksemplar*	*94.829.359*	*100,00%*	*87,47%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	16945 Buah	165.423.500	13556 Buah	133.175.300	Buah 3389	22.223.200	Buah 0	-	Buah 848	7.980.000	847 Buah	2.068.100	1.694 Buah	2.909.173	*3.389 Buah*	*12.957.273*	*100,00%*	*58,31%*	*16.945 Buah*	*146.132.573*	*100,00%*	*88,34%*	DINAS PERIKANAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	400 Kali	303.285.000	300 Kali	217.624.257	Kali 80	30.363.000	Kali 0	-	Kali -	-	40 Kali	3.982.500	40 Kali	1.000.000	*80 Kali*	*4.982.500*	*100,00%*	*16,41%*	*380 Kali*	*222.606.757*	*95,00%*	*73,40%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**		**577.521.145**		**481.274.005**		**305.321.671**		**11.228.162**		**58.622.242**		**30.787.659**		**16.502.276**	*- -*	*117.140.339*		*38,37%*	*- -*	*598.414.344*		*103,62%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	487.001.145	48 Bulan	411.358.005	Bulan 12	120.571.671	Bulan 3	11.228.162	Bulan 3	49.022.242	3 Bulan	28.287.659	3 Bulan	6.502.276	*12 Bulan*	*95.040.339*	*100,00%*	*78,82%*	*60 Bulan*	*506.398.344*	*100,00%*	*103,98%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	90.520.000	48 Bulan	69.916.000	Bulan 12	184.750.000	Bulan 0	-	Bulan 3	9.600.000	6 Bulan	2.500.000	3 Bulan	10.000.000	*12 Bulan*	*22.100.000*	*100,00%*	*11,96%*	*60 Bulan*	*92.016.000*	*100,00%*	*101,65%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.436.982.000**		**1.855.389.449**		**137.714.000**		**-**		**37.514.000**		**14.804.400**		**36.459.736**	*- -*	*88.778.136*		*64,47%*	*- -*	*1.944.167.585*		*79,78%*	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	15 Unit	418.532.000	12 Unit	323.616.400	Unit 3	16.009.200	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	3 Unit	8.451.733	*3 Unit*	*8.451.733*	*100,00%*	*52,79%*	*15 Unit*	*332.068.133*	*100,00%*	*79,34%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan baik	135 Unit	1.817.200.000	112 Unit	1.369.913.049	Unit 29	106.494.800	Unit 0	-	Unit 7	34.024.000	7 Unit	14.804.400	15 Unit	26.788.003	*29 Unit*	*75.616.403*	*100,00%*	*71,00%*	*141 Unit*	*1.445.529.452*	*104,44%*	*79,55%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	60 Bulan	47.300.000	38 Bulan	29.110.000	Bulan 12	4.710.000	Bulan 0	-	Bulan 3	3.490.000	6 Bulan	-	3 Bulan	1.220.000	*12 Bulan*	*4.710.000*	*100,00%*	*100,00%*	*50 Bulan*	*33.820.000*	*83,33%*	*71,50%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara dengan Baik	10 Unit	153.950.000	8 Unit	132.750.000	Unit 2	10.500.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Unit*	*132.750.000*	*80,00%*	*86,23%*	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,34	19,90	24,24	21,46	25,10	21,77	48,69	20,62	98,38	83,75						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi**	**200 %**	**2.678.595.000**	**81,48 %**	**2.611.291.300**	**% 100**	**105.399.600**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00 %	-	100,00 %	**2.420.000**	*100 %*	*2.420.000*	*100,00%*	*2,30%*	*181,48 %*	*2.613.711.300*	*90,74%*	*97,58%*	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah**		**2.145.000.000**		**1.608.528.000**		-		-		-		-	- -	-	*0,00%*	*0,00%*	- -	*1.608.528.000*		*74,99%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Peningkatan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2680 Unit	2.145.000.000	2144 Unit	1.608.528.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2.144 Unit*	*1.608.528.000*	*80,00%*	*74,99%*	DINAS PERIKANAN
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil yang menjadi Kewenangan Daerah**		**533.595.000**		**1.002.763.300**		**105.399.600**		-		-		-		**2.420.000**	- -	*2.420.000*		*2,30%*	- -	*1.005.183.300*		*188,38%*	DINAS PERIKANAN
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan / Jaminan Jiwa Keselamatan Nelayan	1900 Orang	533.595.000	1620 Orang	1.002.763.300	% 100	105.399.600	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	2.420.000	*100 %*	*2.420.000*	*100,00%*	*2,30%*	*1.720 Orang*	*1.005.183.300*	*90,53%*	*188,38%*	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	-	*0,00%*	*0,00%*	DINAS PERIKANAN
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal PerikananBerukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Penangkapan Ikan	150 Orang	-	90 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*90 Orang*	-	*60,00%*	*0,00%*	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	2,30	100,00	2,30						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SR						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**200 %**	**3.136.850.100**	**80,00 %**	**2.405.221.005**	**% 100**	**45.125.100**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	**980.000**	0,00 %	-	- %	*980.000*	*0,00%*	*2,17%*	*80,00 %*	*2.406.201.005*	*40,00%*	*76,71%*	DINAS PERIKANAN
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**		**1.314.850.000**		**868.497.000**		**33.215.000**		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*868.497.000*		*66,05%*	DINAS PERIKANAN
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Cara Berbudidaya Ikan Yang Baik	##### Ekor	1.000.000.000	#### Ekor	633.150.000	% 100	3.215.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*###### Ekor*	*633.150.000*	*80,00%*	*63,32%*	DINAS PERIKANAN
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	500 %	175.000.000	400 %	124.230.000	% 100	30.000.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*124.230.000*	*80,00%*	*70,99%*	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Balai Benih Ikan	10 Paket	139.850.000	8 Paket	111.117.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- Paket	-	0,00%	0,00%	8 Paket	111.117.000	80,00%	79,45%	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**1.802.500.000**		**1.536.724.005**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	1.536.724.005		85,26%	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Prasarana Pembudidaya Ikan yang menjadi Kewenangan Daerah	30 Paket	1.802.500.000	24 Paket	1.536.724.005	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- Paket	-	0,00%	0,00%	24 Paket	1.536.724.005	80,00%	85,26%	DINAS PERIKANAN
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti kegiatan yang mendukung peningkatan produksi ikan	175 Orang	-	105 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0,00%	0,00%	105 Orang	-	60,00%	0,00%	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**11.870.000**		-		**4.280.000**		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	-		0,00%	DINAS PERIKANAN
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Paket	11.870.000	0 Paket	-	Paket 9	4.280.000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0,00%	0,00%	- Paket	-	0,00%	0,00%	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			**7.630.100**		-		**7.630.100**		-		-		**980.000**		-	-	**980.000**		12,84%	-	**980.000**		12,84%	DINAS PERIKANAN
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	7.630.100	Paket	-	Paket 9	7.630.100	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	980.000	- Paket	-	- Paket	**980.000**	0,00%	12,84%	- Paket	**980.000**	0,00%	12,84%	DINAS PERIKANAN
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**2,17**	**0,00**	-	-	**2,17**							
																		Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**200 %**	**470.850.000**	**67,76 %**	**309.675.000**	**% 100**	**20.137.500**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 10,81 %**	**5.010.000**	**% 2,70 %**	-	***14 %***	***5.010.000***	***13,51%***	***24,88%***	***81,27 %***	***314.685.000***	***40,64%***	***66,83%***	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Persentase Peningkatan Informasi dan Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**252.000.000**		**179.580.000**		**13.497.500**		-		-		**5.010.000**		-	-	***5.010.000***		***37,12%***	-	***184.590.000***		***73,25%***	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah	45 Paket	252.000.000	33 Paket	179.580.000	Paket 9	13.497.500	Paket 0	-	Paket -	-	4 Paket	5.010.000	1 Paket	-	***5 Paket***	***5.010.000***	***55,56%***	***37,12%***	***38 Paket***	***184.590.000***	***84,44%***	***73,25%***	DINAS PERIKANAN
			KegiatanPembinaanMutudanKeamananHasilPerikanbagiUsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase PembinaanMutudanKeamanan HasilPerikananbagiUsaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**12.800.000**		-		**3.130.000**		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	-		0,00%	DINAS PERIKANAN
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Kegiatan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	2 Kegiatan	12.800.000	Kegiatan	-	Kegiatan 2	3.130.000	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- ***Kegiatan***	-	0,00%	0,00%	- ***Kegiatan***	-	0,00%	0,00%	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang menjadi Kewenangan Daerah**		**206.050.000**		**130.095.000**		**3.510.000**		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	***130.095.000***		***63,14%***	DINAS PERIKANAN
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Intensifikasi dan Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah	220 Orang	89.000.000	132 Orang	53.400.000	Orang 26	3.510.000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- ***Orang***	-	0,00%	0,00%	***132 Orang***	***53.400.000***	***60,00%***	***60,00%***	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) / Intervensi Pencegahan Stunting yang menjadi	130 Orang	117.050.000	104 Orang	76.695.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*104 Orang*	*76.695.000*	*80,00%*	*65,52%*	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	0,00	-	10,81	24,88	2,70	-	13,51	24,88							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
22			**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																							
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																							
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Kelompok Kesenian dan Budaya Lokal ya Difasilitasi Pengembangan**	**200 %**	**5.722.106.500**	**98,18 %**	**3.971.272.000**	**% 100**	**308.500.000**	**% 0,00**	-	**% 100,00**	**50.000.000**	**0,00 %**	**45.000.000**	**0,00 %**	**48.500.000**	*100 %*	*143.500.000*	*100,00%*	*46,52%*	*198,18 %*	*4.114.772.000*	*99,09%*	*71,91%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**4.811.466.500**		**3.308.888.000**		**308.500.000**		-		**50.000.000**		**45.000.000**		**48.500.000**	-	*143.500.000*		*46,52%*	-	*3.452.388.000*		*71,75%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	100 %	23.966.500	100 %	23.888.000	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*100 %*	*23.888.000*	*100,00%*	*99,67%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Hibah Keuangan	5 Paket	4.787.500.000	4 Paket	3.285.000.000	Paket 1	308.500.000	Paket 0	-	Paket 1	50.000.000	0 Paket	45.000.000	- Paket	48.500.000	*1 Paket*	*143.500.000*	*100,00%*	*46,52%*	*5 Paket*	*3.428.500.000*	*100,00%*	*71,61%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase meningkatnya pemajuan lembaga adat**		**910.640.000**		**662.384.000**											-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*662.384.000*		*72,74%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, nPgemanfaatan Objek nPyeamajuan Lembaga Adat	5 Kali	910.640.000	4 Kali	662.384.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*662.384.000*	*80,00%*	*72,74%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	100,00	16,21	0,00	14,59	0,00	15,72	100,00	46,52							
										Predikat kinerja	SR	SR	ST	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR							
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kelompok Kesenian Tradisional yang Difasilitasi Pengembangan**	**200 %**	**2.234.254.000**	**70,00 %**	**1.594.323.350**		-		-		-		-		-	- -	-	*0,00%*	*0,00%*	*70,00 %*	*1.594.323.350*	*35,00%*	*71,36%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dibina**		**2.234.254.000**		**1.594.323.350**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*1.594.323.350*		*71,36%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradision	Jumlah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yKaesenian Tradisional	250 SDM	2.034.254.000	200 SDM	1.474.323.350	SDM		SDM		SDM		SDM		SDM		- *SDM*	-	*0,00%*	*0,00%*	*200 SDM*	*1.474.323.350*	*80,00%*	*72,47%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga yKaesenian Tradisional	250 Kesenian Tradisional	200.000.000	150 Kesenian Tradisional	120.000.000	Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisional	-	- *Kesenian Tradisional*	-	*0,00%*	*0,00%*	*150 Kesenian Tradisional*	*120.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Objek Diduga Cagar Budaya yang Teregister**	**200 %**	**190.000.000**	**60,00 %**	**114.000.000**	%	-	%	-	%	-		-		-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*114.000.000*	*30,00%*	*60,00%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan**		**190.000.000**		**114.000.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*114.000.000*		*60,00%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelindungan Cagar Budaya	25 Cagar Budaya	190.000.000	15 Cagar Budaya	114.000.000	Cagar Budaya		Cagar Budaya		Cagar Budaya		Cagar Budaya		Cagar Budaya		- *Cagar Budaya*	-	*0,00%*	*0,00%*	*15 Cagar Budaya*	*114.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		**200 %**	**32.955.300**	**#### %**	**30.000.000**	**%**	**150.000.000**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-		**0,00%**	***100,00 %***	***30.000.000***	***50,00%***	***91,03%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**32.955.300**		**30.000.000**	**%**	**150.000.000**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-		**0,00%**	- -	***30.000.000***		***91,03%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	12 Bulan	32.955.300	12 Bulan	30.000.000	Bulan 12	150.000.000	Bula n 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- ***Bulan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***12 Bulan***	***30.000.000***	***100,00%***	***91,03%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**41.462.719.500**	**77,83 %**	**34.945.067.487**	**% 100**	**4.651.428.926**	**% 7,58**	**881.740.752**	**% 48,20**	**1.243.524.916**	**37,84 %**	**945.770.759**	**5,09 %**	**969.271.769**	***98,70 %***	***4.040.308.196***	***98,70%***	***86,86%***	***176,53 %***	***38.985.375.683***	***88,27%***	***94,03%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**489.110.000**		**388.880.000**		**51.296.000**		**10.000.000**		**1.800.000**		-		**1.000.000**	-	***12.800.000***		***24,95%***	-	***401.680.000***		***82,12%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200 Dokumen	78.297.500	124 Dokumen	65.420.100	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***124 Dokumen***	***65.420.100***	***62,00%***	***83,55%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	143.374.000	4 Dokumen	117.154.250	1 Dokumen	27.364.100	0 Dokumen	10.000.000	- Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	***1 Dokumen***	***11.800.000***	***100,00%***	***43,12%***	***5 Dokumen***	***128.954.250***	***100,00%***	***89,94%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	101.132.500	4 Dokumen	77.815.600	1 Dokumen	9.602.400	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	699.000	- ***Dokumen***	***699.000***	***0,00%***	***7,28%***	***4 Dokumen***	***78.514.600***	***80,00%***	***77,64%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	36.305.500	4 Dokumen	31.693.650	1 Dokumen	9.414.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	301.000	- ***Dokumen***	***301.000***	***0,00%***	***3,20%***	***4 Dokumen***	***31.994.650***	***80,00%***	***88,13%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	36.133.000	4 Dokumen	24.229.800	1 Dokumen	4.915.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Dokumen***	***24.229.800***	***80,00%***	***67,06%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	40.660.000	4 Laporan	31.700.000	Laporan		Lapo ran		Lapora n		Lapora n		Lapora n		- ***Laporan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Laporan***	***31.700.000***	***80,00%***	***77,96%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	53.207.500	4 Laporan	40.866.600	Laporan		Lapo ran		Lapora n		Lapora n		Lapora n		- ***Laporan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Laporan***	***40.866.600***	***80,00%***	***76,81%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**34.577.272.600**		**29.180.133.891**		**3.678.401.026**		**802.964.308**		**908.588.828**		**896.065.491**		**737.723.385**	-	***3.345.342.012***		***90,95%***	-	***32.525.475.903***		***94,07%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Pegawai	28.208.721.600	165 Pegawai/Bulan	23.214.293.091	47 Pegawai/Bulan	2.696.971.026	12 Pegawai/Bulan	586.739.308	11 Pegawai/Bulan	670.043.828	11 Pegawai/Bulan	657.520.491	13 Pegawai/Bulan	514.058.385	***47 Pegawai/Bulan***	***2.428.362.012***	***100,00%***	***90,04%***	***212 Pegawai/Bulan***	***25.642.655.103***	***90,21%***	***90,90%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	375 Orang	5.799.000.000	290 Orang/Bulan	5.459.500.000	53 Orang/Bulan	897.900.000	19 Orang/Bulan	216.225.000	17 Orang/Bulan	216.225.000	17 Orang/Bulan	216.225.000	- Orang/Bulan	216.225.000	***53 Orang/Bulan***	***864.900.000***	***100,00%***	***96,32%***	***343 Orang/Bulan***	***6.324.400.000***	***91,47%***	***109,06%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	40 Orang	540.600.000	37 Orang/Bulan	483.180.000	9 Orang/Bulan	83.530.000	0 Orang/Bulan	-	8 Orang/Bulan	22.320.000	0 Orang/Bulan	22.320.000	1 Orang/Bulan	7.440.000	***9 Orang/Bulan***	***52.080.000***	***100,00%***	***62,35%***	***46 Orang/Bulan***	***535.260.000***	***115,00%***	***99,01%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen/Laporan	28.951.000	4 Dokumen/Laporan	23.160.800	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		- ***Dokumen/Laporan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Dokumen/Lapor***	***23.160.800***	***80,00%***	***80,00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**296.250.000**		**262.125.000**		-		-		-		-			-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	***262.125.000***		***88,48%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7 Orang	296.250.000	6 Orang	262.125.000	Orang		Oran g		Oran g		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***6 Orang***	***262.125.000***	***85,71%***	***88,48%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**2.840.430.500**		**2.319.290.323**		**238.561.300**		**59.496.000**		**58.310.000**		**18.021.300**		**24.275.400**	-	***160.102.700***		***67,11%***	-	***2.479.393.023***		***87,29%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kanto	60 Bulan	25.417.750	48 Bulan	22.332.650	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	0,00%	0,00%	48 Bulan	22.332.650	80,00%	87,86%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	403.212.750	48 Bulan	341.169.550	12 Bulan	67.548.000	3 Bulan	59.496.000	3 Bulan	4.500.000	3 Bulan	-	Bulan	-	9 Bulan	63.996.000	75,00%	94,74%	57 Bulan	405.165.550	95,00%	100,48%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	105.150.000	48 Bulan	90.254.100	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	0,00%	0,00%	48 Bulan	90.254.100	80,00%	85,83%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	94.850.000	48 Bulan	78.965.067	12 Bulan	7.413.300	0 Bulan	-	6 Bulan	-	3 Bulan	195.000	3 Bulan	777.000	12 Bulan	972.000	100,00%	13,11%	60 Bulan	79.937.067	100,00%	84,28%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	60 Bulan	123.950.000	48 Bulan	104.003.600	12 Bulan	15.020.000	0 Bulan	-	6 Bulan	154.000	3 Bulan	11.009.300	3 Bulan	843.000	12 Bulan	12.006.300	100,00%	79,94%	60 Bulan	116.009.900	100,00%	93,59%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraa Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	800 Kali	2.087.850.000	641 Kali	1.682.565.356	200 Kali	148.580.000	0 Kali	-	100 Kali	53.656.000	100 Kali	6.817.000	- Kali	22.655.400	200 Kali	83.128.400	100,00%	55,95%	841 Kali	1.765.693.756	105,13%	84,57%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**56.000.000**		**44.730.000**		-		-		-		-			-	-	0,00%	0,00%	-	44.730.000		79,88%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	56.000.000	4 Unit	44.730.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0,00%	0,00%	4 Unit	44.730.000	80,00%	79,88%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.097.902.500**		**1.040.546.643**		**473.620.000**		**9.280.444**		**252.619.488**		**9.477.368**		**183.018.584**	-	454.395.884		95,94%	-	1.494.942.527		136,16%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	919.725.000	48 Bulan	903.940.143	12 Bulan	473.620.000	1 Bulan	9.280.444	5 Bulan	252.619.488	3 Bulan	9.477.368	3 Bulan	183.018.584	12 Bulan	454.395.884	100,00%	95,94%	60 Bulan	1.358.336.027	100,00%	147,69%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	178.177.500	48 Bulan	136.606.500	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	0,00%	0,00%	48 Bulan	136.606.500	80,00%	76,67%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.105.753.900**		**1.709.361.630**		**209.550.600**		-		**22.206.600**		**22.206.600**		**23.254.400**	-	67.667.600		32,29%	-	1.777.029.230		84,39%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	500 %	658.100.000	400 %	520.275.850	% 100	110.265.600	% 0	-	% 66,67	22.206.600	33,33 %	22.206.600	- %	22.804.400	100 %	67.217.600	0,00%	0,00%	500 %	587.493.450	100,00%	89,27%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3 Kendaraan	101.966.400	3 Kendaraan	95.566.780	Kendaraan		Kendaraan		Kendaraan		Kendaraan		Kendaraan	-	Kendaraan	-	0,00%	0,00%	3 Kendaraan	95.566.780	100,00%	93,72%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemelihara an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50 Bulan	35.500.000	44 Bulan	29.310.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- Bulan	-	0,00%	0,00%	44 Bulan	29.310.000	88,00%	82,56%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemelihara an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainn	5 Unit	1.310.187.500	4 Unit	1.064.209.000	Unit 1	99.285.000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	-	- Unit	450.000	1 Unit	450.000	100,00%	0,45%	5 Unit	1.064.659.000	100,00%	81,26%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	7,58	18,96	48,20	26,73	37,84	20,33	5,09	20,84	98,70	86,86							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T							
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Pembangunan Sarpras Destinasi Pariwisata**	**200 %**	**19.497.381.500**	**58,59 %**	**15.910.848.769**	**% 100**	**1.277.609.500**	**% 0,00**	**419.599.210**	**% 0,00**	**121.393.690**	**100,00 %**	**44.883.396**	**0,00 %**	**408.654.462**	100,00 %	994.530.758	100,00%	77,84%	158,59 %	16.905.379.527	79,30%	86,71%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**		**411.861.000**		**323.380.600**		-		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	323.380.600		78,52%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Paket	411.861.000	4 Paket	323.380.600	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- Paket	-	0,00%	0,00%	4 Paket	323.380.600	80,00%	78,52%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**3.621.731.000**		**3.159.140.138**		**426.769.500**		**10.520.394**		**121.393.690**		**44.883.396**		**174.759.233**	-	351.556.713		82,38%	-	3.510.696.851		96,93%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	2.757.647.500	4 Paket	2.666.809.538	Paket 1	426.769.500	Paket 0	10.520.394	Paket -	121.393.690	1 Paket	44.883.396	- Paket	174.759.233	*1 Paket*	*351.556.713*	*100,00%*	*82,38%*	*5 Paket*	*3.018.366.251*	*100,00%*	*109,45%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	500 %	317.425.000	200 %	164.335.500	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*200 %*	*164.335.500*	*40,00%*	*51,77%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penerapan Destinasi Pariwisata	Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan	5 Paket	546.658.500	3 Paket	327.995.100	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Paket*	*327.995.100*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**15.463.789.500**		**12.428.328.031**		**850.840.000**		**409.078.816**		-		-		**233.895.229**	-	*642.974.045*		*75,57%*	-	*13.071.302.076*		*84,53%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6000 Orang	13.013.921.500	3604 Orang /Paket	10.161.965.860	Orang /Paket		Orang/Paket		Orang/Paket		Orang/ Paket		Orang/ Paket		- *Orang /Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3.604 Orang /Pake*	*10.161.965.860*	*60,07%*	*78,09%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan/Pem /Rehabilitasi Sar Prasarana dalam Pengelolaan Des Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	2.004.580.000	4 Paket	1.884.823.171	Paket 1	850.840.000	Paket 0	409.078.816	Paket -	-	1 Paket	-	- Paket	233.895.229	*1 Paket*	*642.974.045*	*100,00%*	*75,57%*	*5 Paket*	*2.527.797.216*	*100,00%*	*126,10%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	445.288.000	4 Paket	381.539.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Paket*	*381.539.000*	*80,00%*	*85,68%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**32,84**	**0,00**	**9,50**	**100,00**	**3,51**	**0,00**	**31,99**	**100,00**	**77,84**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti**	**200 %**	**2.876.273.500**	**66,32 %**	**2.294.090.350**	**% 100**	**175.330.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**100,00 %**	-	*100 %*	-	*0,00%*	*0,00%*	*166,32 %*	*2.294.090.350*	*83,16%*	*79,76%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatann kerjasam dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri**		**2.876.273.500**		**2.294.090.350**		**175.330.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*2.294.090.350*		*79,76%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Paket	572.287.000	4 Paket	653.508.550	Paket 1	175.330.000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	1 Paket	-	*1 Paket*	-	*100,00%*	*0,00%*	*5 Paket*	*653.508.550*	*100,00%*	*114,19%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Desa/ Paket	789.402.000	19 Desa/ Paket	529.209.850	Desa/ Paket		Desa /Paket		Desa /Paket		Desa/ Paket		Desa/Paket		- *Desa/ Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*19 Desa/ Paket*	*529.209.850*	*63,33%*	*67,04%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Desa/ Paket	322.287.000	19 Desa/ Paket	254.682.200	Desa/ Paket		Desa /Paket		Desa /Paket		Desa/ Paket		Desa/Paket		- *Desa/ Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*19 Desa/ Paket*	*254.682.200*	*63,33%*	*79,02%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30 Desa/ Paket	1.192.297.500	21 Desa/ Paket	856.689.750	Desa/ Paket		Desa /Paket		Desa /Paket		Desa/ Paket		Desa/Paket		- *Desa/ Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*21 Desa/ Paket*	*856.689.750*	*70,00%*	*71,85%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**100,00**	-	*100,00*	-							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**							
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**200 %**	**250.907.100**	**61,29 %**	**151.990.100**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*61,29 %*	*151.990.100*	*30,65%*	*60,58%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**250.907.100**		**151.990.100**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	*0,00%*	-	*151.990.100*		*60,58%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengemban gan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	30 Desa	247.292.500	18 Desa	148.375.500	Desa		Desa		Desa		Desa		Desa		- *Desa*	-	*0,00%*	*0,00%*	*18 Desa*	*148.375.500*	*60,00%*	*60,00%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisat aan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1 Kali	3.614.600	1 Kali	3.614.600	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1 Kali*	*3.614.600*	*100,00%*	*100,00%*	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		**200 %**	**10.264.000**	**87,49 %**	**7.299.500**		-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-		***0,00%***	***87,49 %***	***7.299.500***	***43,74%***	***71,12%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			**10.264.000**		**7.299.500**		-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-		***0,00%***	- -	***7.299.500***		***71,12%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Sosialisasi	10.264.000	1 Sosialisasi	7.299.500	Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi		- ***Sosialisasi***	-	***0,00%***	***0,00%***	***1 Sosialisasi***	***7.299.500***	***100,00%***	***71,12%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	-	-							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
23			**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**11.560.489.350**	**86,15 %**	**12.883.370.119**	**% 100**	**7.529.847.623**	**% 4,99**	**1.206.074.501**	**% 3,66**	**1.364.788.674**	**42,81 %**	**2.629.946.431**	**8,35 %**	**1.363.411.853**	***59,81 %***	***6.564.221.459***	***59,81%***	***87,18%***	***145,96 %***	***19.447.591.578***	***72,98%***	***168,22%***	DINAS BUNNAK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**341.827.500**		**294.188.000**		**63.833.500**		**3.650.000**		**4.169.600**		**2.897.850**		-	-	***10.717.450***		***16,79%***	-	***304.905.450***		***89,20%***	DINAS BUNNAK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan PerubahanRenja	250 Eksemplar Dokumen	46.155.000	213 Eksemplar Dokumen	38.574.000	10 Dokumen	6.325.000	2 Dokumen	1.100.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	8 Dokumen	-	***10 Dokumen***	***1.100.000***	***100,00%***	***17,39%***	***223 Eksemplar Dokumen***	***39.674.000***	***89,20%***	***85,96%***	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	105 Eksemplar Dokumen	208.102.500	87 Eksemplar Dokumen	185.559.600	50 Dokumen	40.877.100	0 Dokumen	1.200.000	7 Dokumen	4.169.600	3 Dokumen	2.777.850	40 Dokumen	-	***50 Dokumen***	***8.147.450***	***100,00%***	***19,93%***	***137 Eksemplar Dokumen***	***193.707.050***	***130,48%***	***93,08%***	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	35.760.000	87 Eksemplar Dokumen	29.742.000	27 Dokumen	7.348.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	27 Dokumen	-	***27 Dokumen***	-	***100,00%***	***0,00%***	***114 Eksemplar Dokumen***	***29.742.000***	***108,57%***	***83,17%***	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	14.100.000	94 Eksemplar Dokumen	12.125.900	27 Dokumen	2.820.000	13 Dokumen	1.350.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	120.000	12 Dokumen	-	***27 Dokumen***	***1.470.000***	***100,00%***	***52,13%***	***121 Eksemplar Dokumen***	***13.595.900***	***115,24%***	***96,42%***	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	14.100.000	84 Eksemplar Dokumen	11.280.000	27 Dokumen	2.820.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	27 Dokumen	-	***27 Dokumen***	-	***100,00%***	***0,00%***	***111 Eksemplar Dokumen***	***11.280.000***	***105,71%***	***80,00%***	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105 Eksemplar Dokumen	8.250.000	85 Eksemplar Dokumen	7.095.000	8 Laporan	1.650.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	8 Laporan	-	***8 Laporan***	-	***100,00%***	***0,00%***	***93 Eksemplar Dokumen***	***7.095.000***	***88,57%***	***86,00%***	DINAS BUNNAK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105 Eksemplar Dokumen	15.360.000	73 Eksemplar Dokumen	9.811.500	10 Laporan	1.992.900	0 Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	10 Laporan	-	***10 Laporan***	-	***100,00%***	***0,00%***	***83 Eksemplar Dokumen***	***9.811.500***	***79,05%***	***63,88%***	DINAS BUNNAK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.535.539.000**		**10.270.426.501**		**5.356.713.123**		**1.180.990.501**		**1.324.388.906**		**1.376.392.339**		**1.138.947.625**	-	***5.020.719.371***		***93,73%***	-	***15.291.145.872***		***179,15%***	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang	6.889.946.500	207 Orang	8.654.954.901	53 Orang	3.892.598.823	13 Orang	847.588.401	13 Orang	997.596.206	13 Orang	1.057.517.339	14 Orang	819.872.625	***53 Orang***	***3.722.574.571***	***100,00%***	***95,63%***	***260 Orang***	***12.377.529.472***	***98,11%***	***179,65%***	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160 Orang	1.310.400.000	80 Orang	1.282.900.000	79 Orang	1.367.700.000	20 Orang	316.325.000	20 Orang	313.575.000	20 Orang	313.575.000	19 Orang	319.075.000	***79 Orang***	***1.262.550.000***	***100,00%***	***92,31%***	***159 Orang***	***2.545.450.000***	***99,38%***	***194,25%***	DINAS BUNNAK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	265 Orang	335.192.500	183 Orang/Bulan	332.571.600	12 Bulan	96.414.300	2 Bulan	17.077.100	2 Bulan	13.217.700	1 Bulan	5.300.000	- Bulan	-	***5 Bulan***	***35.594.800***	***41,67%***	***36,92%***	***188 Orang/Bulan***	***368.166.400***	***70,94%***	***109,84%***	DINAS BUNNAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**1.266.035.750**		**1.182.028.244**		**1.361.238.400**		**4.455.000**		**6.331.000**		**1.188.582.750**		-	-	*1.199.368.750*		*88,11%*	-	*2.381.396.994*		*188,10%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1765 Unit	112.615.000	1607 Unit	248.860.000	75 Paket	1.203.975.000	0 Paket	-	1 Paket	810.000	72 Paket	1.156.750.000	- Paket	-	*73 Paket*	*1.157.560.000*	*97,33%*	*96,14%*	*1.680 Unit*	*1.406.420.000*	*95,18%*	*1248,9%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8750 Kotak	250.000.000	7842 Kotak	213.236.250	1355 Paket	55.705.000	100 Paket	4.455.000	43 Paket	1.386.000	37 Paket	1.212.750	- Paket	-	*180 Paket*	*7.053.750*	*13,28%*	*12,66%*	*8.022 Kotak*	*220.290.000*	*91,68%*	*88,12%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	500 Eksemplar	40.233.000	457 Eksemplar	35.238.000	50 Paket	11.924.400	0 Paket	-	11 Paket	1.629.000	9 Paket	-	10 Paket	-	*30 Paket*	*1.629.000*	*60,00%*	*13,66%*	*487 Eksemplar*	*36.867.000*	*97,40%*	*91,63%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Mat erial	7420 Buah	188.192.750	6235 Buah	188.121.050	1124 Paket	30.620.000	0 Paket	-	- Paket	-	1.124 Paket	30.620.000	- Paket	-	*1.124 Paket*	*30.620.000*	*100,00%*	*100,00%*	*7.359 Buah*	*218.741.050*	*99,18%*	*116,23%*	DINAS BUNNAK
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311 Kali	674.995.000	176 Kali	496.572.944	72 Laporan	59.014.000	0 Laporan	-	3 Laporan	2.506.000	2 Laporan	-	67 Laporan	-	*72 Laporan*	*2.506.000*	*100,00%*	*4,25%*	*248 Kali*	*499.078.944*	*79,74%*	*73,94%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**		**763.419.500**		**624.584.534**		**637.675.000**		**14.163.000**		**17.213.568**		**53.554.942**		**224.464.228**	-	*309.395.738*		*48,52%*	-	*933.980.272*		*122,34%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	322.650.000	48 Bulan	285.009.844	12 Bulan	141.060.000	0 Bulan	-	5 Bulan	13.838.568	4 Bulan	50.734.942	3 Bulan	18.404.536	*12 Bulan*	*82.978.046*	*100,00%*	*58,82%*	*60 Bulan*	*367.987.890*	*100,00%*	*114,05%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	440.769.500	48 Bulan	339.574.690	12 Bulan	496.615.000	0 Bulan	14.163.000	2 Bulan	3.375.000	- Bulan	2.820.000	6 Bulan	206.059.692	*8 Bulan*	*226.417.692*	*66,67%*	*45,59%*	*56 Bulan*	*565.992.382*	*93,33%*	*128,41%*	DINAS BUNNAK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**653.667.600**		**512.142.840**		**110.387.600**		**2.816.000**		**12.685.600**		**8.518.550**		-	-	*24.020.150*		*21,76%*	-	*536.162.990*		*82,02%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	407.600.000	8 Unit	294.792.310	1 Unit	40.170.000	0 Unit	2.816.000	1 Unit	2.816.000	- Unit	2.816.000	- Unit	-	*1 Unit*	*8.448.000*	*100,00%*	*21,03%*	*9 Unit*	*303.240.310*	*90,00%*	*74,40%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	246.067.600	8 Unit	217.350.530	2 Unit	70.217.600	0 Unit	-	2 Unit	9.869.600	- Unit	5.702.550	- Unit	-	*2 Unit*	*15.572.150*	*100,00%*	*22,18%*	*10 Unit*	*232.922.680*	*100,00%*	*94,66%*	DINAS BUNNAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	4,99	16,02	3,66	18,13	42,81	34,93	8,35	18,11	59,81	87,18						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	T						
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan**	**200 %**	**3.551.996.100**	**16,71 %**	**3.051.374.880**	**100 %**	**1.753.446.750**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	**11.480.150**	**33,33 %**	**56.711.000**	**0,00 %**	**28.500.000**	*33,33 %*	*96.691.150*	*33,33%*	*5,51%*	*50,04 %*	*3.148.066.030*	*25,02%*	*88,63%*	DINAS BUNNAK
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			**81.942.600**		**49.100.600**		**237.875.200**		-		**1.385.200**		-		**-**	-	*1.385.200*		*0,58%*	-	*50.485.800*			DINAS BUNNAK
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Belanja Hibah	3 Kali	81.942.600	1 Kali	49.100.600	3 Laporan	237.875.200	0 Laporan	-	- Laporan	1.385.200	- Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	*1.385.200*	*0,00%*	*0,58%*	*1 Kali*	*50.485.800*	*33,33%*	*61,61%*	DINAS BUNNAK
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pendapatan Petani/Masyarak**		**1.036.011.000**		**621.606.600**		**468.418.300**		-		**6.449.700**		**56.711.000**		-	-	*63.160.700*		*13,48%*	-	*684.767.300*		*66,10%*	DINAS BUNNAK
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tan aman	Pelaksanaan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tan aman	##### Bibit	508.768.500	24550 Bibit	470.465.300	VUB 3	73.430.400	VUB 0	-	VUB -	1.990.200	0 VUB	-	- VUB	-	- *VUB*	*1.990.200*	*0,00%*	*2,71%*	*24.550 Bibit*	*472.455.500*	*16,37%*	*92,86%*	DINAS BUNNAK
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	375 Orang	527.242.500	78 Orang	563.206.300	5 Dokumen	394.987.900	0 Dokumen	-	- Dokumen	4.459.500	5 Dokumen	56.711.000	- Dokumen	-	*5 Dokumen*	*61.170.500*	*100,00%*	*15,49%*	*83 Orang*	*624.376.800*	*22,13%*	*118,42%*	DINAS BUNNAK
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			**850.000.000**		**545.000.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*545.000.000*		*64,12%*	DINAS BUNNAK
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Hibah Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30 Paket	850.000.000	6 Paket	545.000.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Paket*	*545.000.000*	*20,00%*	*64,12%*	DINAS BUNNAK
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan**		**1.584.042.500**		**1.835.667.680**		**1.047.153.250**		-		**3.645.250**		-		**28.500.000**	-	*32.145.250*		*3,07%*	-	*1.867.812.930*		*117,91%*	DINAS BUNNAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1508 Ekor	1.584.042.500	748 Ekor	1.835.667.680	Ton 4	1.047.153.250	Ton 0	-	Ton -	3.645.250	0 Ton	-	- Ton	28.500.000	- Ton	32.145.250	0,00%	3,07%	748 Ekor	1.867.812.930	49,60%	117,91%	DINAS BUNNAK
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	0,00	0,65	33,33	3,23	0,00	1,63	33,33	5,51					
											Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**200 %**	**2.945.997.900**	**29,43 %**	**2.901.670.800**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	0,00%	0,00%	29,43 %	2.901.670.800	14,72%	98,50%	DINAS BUNNAK
			Pembangunan Prasarana Pertanian			**2.945.997.900**		**2.901.670.800**	**0**	-	**0**	-	*0,00*	-		-		-	- -	-		0,00%	- -	2.901.670.800		98,50%	DINAS BUNNAK
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5 Lokasi	1.414.417.800	5 Lokasi	1.408.885.000	Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi		- *Lokasi*	-	0,00%	0,00%	*5 Lokasi*	*1.408.885.000*	100,00%	99,61%	DINAS BUNNAK
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3 Lokasi	472.392.800	3 Lokasi	464.730.000	Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi		- *Lokasi*	-	0,00%	0,00%	*3 Lokasi*	*464.730.000*	100,00%	98,38%	DINAS BUNNAK
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5 Lokasi	1.059.187.300	5 Lokasi	1.028.055.800	Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi		- *Lokasi*	-	0,00%	0,00%	*5 Lokasi*	*1.028.055.800*	100,00%	97,06%	DINAS BUNNAK
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-					
											Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**200 %**	**299.297.100**	**39,10 %**	**94.276.900**	**% 100**	**293.025.200**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	**4.588.200**	**0,00 %**	**1.210.000**	**100,00 %**	**147.780.000**	*100 %*	*153.578.200*	*100,00%*	*52,41%*	*139 %*	*247.855.100*	*69,55%*	*82,81%*	DINAS BUNNAK
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			**141.462.100**		**94.276.900**	**0**	**135.190.200**	**0**	-	*0,00*	**4.588.200**		**1.210.000**		-	*5.798.200*		*4,29%*	- -	*100.075.100*		*70,74%*	DINAS BUNNAK
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	32 Kecamatan/Lapora	141.462.100	20 Kecamatan/Lapor	94.276.900	12 Laporan	135.190.200	0 Laporan	-	- Laporan	4.588.200	2 Laporan	1.210.000	- Laporan	-	*2 Laporan*	*5.798.200*	*16,67%*	*4,29%*	*22 Kecamatan*	*100.075.100*	*68,75%*	*70,74%*	DINAS BUNNAK
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			**157.835.000**		-	**0**	**157.835.000**	**0**	-	*0,00*	-		-		**147.780.000**	- -	*147.780.000*		*93,63%*	- -	*147.780.000*		*93,63%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	157.835.000	Laporan		12 Laporan	157.835.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	147.780.000	*12 Laporan*	*147.780.000*	*100,00%*	*93,63%*	*12 Laporan*	*147.780.000*	*100,00%*	*93,63%*	DINAS BUNNAK
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-	0,00	1,57	1,61	0,41	90,32	50,43	91,94	52,41					
											Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	R					
24			**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**																							
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**231.577.768.262**	**75,41 %**	**207.172.727.331**	**% 100**	**34.921.525.233**	**% 0,71**	**4.848.597.610**	**% 0,05**	**7.182.187.494**	**41,25 %**	**7.787.429.066**	**38,34 %**	**8.868.970.835**	*80,35 %*	*28.687.185.005*	*80,35%*	*82,15%*	*155,77 %*	*235.859.912.336*	*77,88%*	*101,85%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**		**1.372.106.500**		**797.862.000**		**81.725.700**		-		**15.780.600**		-		**32.945.000**	-	*48.725.600*		*59,62%*	-	*846.587.600*		*61,70%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA dan Perubahannya	100 Buku	589.800.000	82 Buku	373.959.000	20 Dokumen	10.360.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	7 Dokumen	3.345.000	*7 Dokumen*	*3.345.000*	*35,00%*	*32,29%*	*89 Buku*	*377.304.000*	*89,00%*	*63,97%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD	300 Buku	188.310.000	244 Buku	130.812.000	60 Dokumen	10.495.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	3.349.000	20 Dokumen	-	20 Dokumen	3.695.000	*40 Dokumen*	*7.044.000*	*66,67%*	*67,12%*	*284 Buku*	*137.856.000*	*94,67%*	*73,21%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300 Buku	186.670.000	218 Buku	124.366.000	60 Dokumen	11.695.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	40 Dokumen	7.660.000	*40 Dokumen*	*7.660.000*	*66,67%*	*65,50%*	*258 Buku*	*132.026.000*	*86,00%*	*70,73%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD	300 Buku	75.110.500	73 Buku	15.323.000	60 Dokumen	11.695.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	4.982.000	25 Dokumen	-	10 Dokumen	1.500.000	*35 Dokumen*	*6.482.000*	*58,33%*	*55,42%*	*108 Buku*	*21.805.000*	*36,00%*	*29,03%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	300 Buku	75.110.500	83 Buku	16.907.000	60 Dokumen	11.695.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	40 Dokumen	7.280.000	*40 Dokumen*	*7.280.000*	*66,67%*	*62,25%*	*123 Buku*	*24.187.000*	*41,00%*	*32,20%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Buku	85.280.500	20 Buku	14.029.000	20 Laporan	12.860.800	0 Laporan	-	- Laporan	7.449.600	11 Laporan	-	2 Laporan	1.140.000	*13 Laporan*	*8.589.600*	*65,00%*	*66,79%*	*33 Buku*	*22.618.600*	*33,00%*	*26,52%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	100 Buku	171.825.000	88 Buku	122.466.000	20 Laporan	12.924.500	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	13 Laporan	8.325.000	*13 Laporan*	*8.325.000*	*65,00%*	*64,41%*	*101 Buku*	*130.791.000*	*101,00%*	*76,12%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**85.223.496.650**		**83.048.134.023**		**16.040.130.395**		**3.635.277.199**		**3.682.200.047**		**3.901.767.777**		**3.499.889.337**	-	*14.719.134.360*		*91,76%*	-	*97.767.268.383*		*114,72%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	50.566.230.825	52 Bulan	51.324.284.046	12 Bulan	10.699.437.942	3 Bulan	2.287.048.647	3 Bulan	2.426.878.951	3 Bulan	2.768.616.681	3 Bulan	2.387.524.037	*12 Bulan*	*9.870.068.316*	*100,00%*	*92,25%*	*64 Bulan*	*61.194.352.362*	*91,43%*	*121,02%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	23.914.000.000	48 Bulan	23.653.005.000	12 Bulan	4.468.448.000	3 Bulan	1.175.275.000	3 Bulan	1.081.500.000	3 Bulan	911.100.000	3 Bulan	912.850.000	*12 Bulan*	*4.080.725.000*	*100,00%*	*91,32%*	*60 Bulan*	*27.733.730.000*	*100,00%*	*115,97%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	6.775.200.000	48 Kali	4.367.144.500	17 Dokumen	127.033.300	0 Dokumen	15.920.000	- Dokumen	29.510.000	11 Dokumen	34.260.000	3 Dokumen	24.780.000	*14 Dokumen*	*104.470.000*	*82,35%*	*82,24%*	*62 Kali*	*4.471.614.500*	*103,33%*	*66,00%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Buku	185.080.000	78 Buku	121.463.000	20 Laporan	12.584.800	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	7.244.400	*12 Laporan*	*7.244.400*	*60,00%*	*57,56%*	*90 Buku*	*128.707.400*	*90,00%*	*69,54%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	200 Eksemplar	157.525.000	146 Eksemplar	98.649.590	40 Laporan	7.534.000	0 Laporan	-	- Laporan	2.670.000	14 Laporan	-	6 Laporan	1.084.400	*20 Laporan*	*3.754.400*	*50,00%*	*49,83%*	*166 Eksemplar*	*102.403.990*	*83,00%*	*65,01%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	3.625.460.825	52 Bulan	3.483.587.887	12 Bulan	725.092.353	3 Bulan	157.033.552	3 Bulan	141.641.096	3 Bulan	187.791.096	3 Bulan	166.406.500	*12 Bulan*	*652.872.244*	*100,00%*	*90,04%*	*64 Bulan*	*4.136.460.131*	*91,43%*	*114,09%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik**		**167.305.000**		**107.920.000**		**7.476.500**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	*0,00%*	-	*107.920.000*		*64,50%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Eksamplar	167.305.000	77 Eksamplar	107.920.000	20 Laporan	7.476.500	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*77 Eksemplar*	*107.920.000*	*77,00%*	*64,50%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**3.191.970.400**		**2.801.163.797**		**623.015.355**		**-**		**11.516.000**		**210.418.000**		**106.183.000**	-	*328.117.000*		*52,67%*	-	*3.129.280.797*		*98,04%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	680 Stel	1.603.000.000	556 Stel/Bulan	1.700.704.297	110 Paket	369.600.000	0 Paket	-	- Paket	-	48 Paket	199.930.000	37 Paket	85.183.000	*85 Paket*	*285.113.000*	*77,27%*	*77,14%*	*641 Stel/Bulan*	*1.985.817.297*	*94,26%*	*123,88%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340 Orang	1.317.100.000	228 Orang/Bulan	976.977.100	12 Dokumen	130.602.115	0 Dokumen	-	- Dokumen	11.516.000	4 Dokumen	5.778.000	8 Dokumen	21.000.000	*12 Dokumen*	*38.294.000*	*100,00%*	*29,32%*	*240 Orang/Bulan*	*1.015.271.100*	*70,59%*	*77,08%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Peserta	183.775.000	60 Peserta	111.765.000	68 Orang	102.598.000	0 Orang	-	- Orang	-	12 Orang	4.710.000	- Orang	-	*12 Orang*	*4.710.000*	*17,65%*	*4,59%*	*72 Peserta*	*116.475.000*	*72,00%*	*63,38%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Peserta	88.095.400	30 Peserta	11.717.400	23 Peserta	20.215.240	0 Peserta	-	- Peserta	-	0 Peserta	-	- Peserta	-	- *Peserta*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Peserta*	*11.717.400*	*25,00%*	*13,30%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**52.873.381.592**		**45.311.715.140**		**8.619.634.130**		**545.651.658**		**1.975.227.759**		**1.512.522.466**			-	*4.033.401.883*		*46,79%*	-	*49.345.117.023*		*93,33%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14811 Gedung/Bulan/Unit	6.731.705.742	14285 Gedung/Bulan/Unit	6.557.321.352	14.776 Unit	1.136.687.242	16 Unit	7.800.000	- Unit	386.372.000	5834 Unit	70.434.230	6.237 Unit	465.173.200	*12.087 Unit*	*929.779.430*	*81,80%*	*81,80%*	*26.372 Gedung/Bulan/Un*	*7.487.100.782*	*178,06%*	*111,22%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	565 Unit/Bulan	1.292.531.250	351 Unit/Bulan	894.488.750	Unit/Bulan		Unit/Bulan		Unit/Bulan		Unit/Bulan		Unit/Bulan		- *Unit/Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*351 Unit/Bulan*	*894.488.750*	*62,12%*	*69,20%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	500 %	19.586.580.000	400 %	18.973.205.350	% 100	4.115.808.988	% 12,23	441.463.000	% -	1.209.523.500	68,16 %	946.483.050	8,65 %	3.664.814.950	*89,04 %*	*6.262.284.500*	*89,04%*	*152,15%*	*489 %*	*25.235.489.850*	*97,81%*	*128,84%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	71550 Eksemplar/Paket	1.342.763.000	51984 Eksemplar/Paket	1.124.099.500	Paket 5	102.041.600	Paket 0	-	Paket -	30.755.000	2 Paket	867.000	3 Paket	68.198.400	*5 Paket*	*99.820.400*	*100,00%*	*97,82%*	*51.989 Eksemplar/Paket*	*1.223.919.900*	*72,66%*	*91,15%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	90475 Buah/Paket	1.085.187.000	66789 Buah/Paket	837.877.020	Paket 4	120.771.800	Paket 0	-	Paket -	-	1 Paket	67.765.000	3 Paket	35.462.500	*4 Paket*	*103.227.500*	*100,00%*	*85,47%*	*66.793 Buah/Paket*	*941.104.520*	*73,82%*	*86,72%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1450 Kali/Laporan	22.781.420.000	1233 Kali/Laporan	16.892.806.408	Laporan 633	3.144.324.500	Laporan 59	96.388.658	Laporan -	348.577.259	406 Laporan	426.973.186	- Laporan	690.365.068	*465 Laporan*	*1.562.304.171*	*73,46%*	*49,69%*	*1.698 Kali/Laporan*	*18.455.110.579*	*117,10%*	*81,01%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	5 Dokumen	53.194.600	3 Dokumen	31.916.760	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Dokumen*	*31.916.760*	*60,00%*	*60,00%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**41.135.043.600**		**32.613.916.577**		**1.922.600.000**		-		-		**694.900.000**		**687.700.000**	*-*	*1.382.600.000*		*71,91%*	*-*	*33.996.516.577*		*82,65%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	36 Unit	19.628.887.600	31 Unit	15.872.117.460	Unit 15	1.921.600.000	Unit 0	-	Unit -	-	4 Unit	693.900.000	- Unit	687.700.000	*4 Unit*	*1.381.600.000*	*26,67%*	*71,90%*	*35 Unit*	*17.253.717.460*	*97,22%*	*87,90%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	135 Unit	14.518.943.750	93 Unit	11.480.506.250	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*93 Unit*	*11.480.506.250*	*68,89%*	*79,07%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	75 Unit	6.697.839.750	57 Unit	4.978.051.555	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*57 Unit*	*4.978.051.555*	*76,00%*	*74,32%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	42 Unit	289.372.500	42 Unit	283.241.312	Unit 42	1.000.000	Unit 0	-	Unit -	-	42 Unit	1.000.000	- Unit	-	*42 Unit*	*1.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*84 Unit*	*284.241.312*	*200,00%*	*98,23%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**16.583.425.500**		**15.985.373.903**		**3.323.863.847**		**667.668.753**		**836.000.304**		**570.491.158**		**3.380.836.245**	*-*	*5.454.996.460*		*164,12%*	*-*	*21.440.370.363*		*129,29%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	14.588.872.500	48 Bulan	12.037.505.290	Bulan 12	813.169.500	Bulan 3	158.232.753	Bulan -	152.570.254	6 Bulan	183.348.428	3 Bulan	887.448.565	*12 Bulan*	*1.381.600.000*	*100,00%*	*169,90%*	*60 Bulan*	*13.419.105.290*	*100,00%*	*91,98%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	500 %	1.994.553.000	400 %	3.947.868.613	% 100	2.510.694.347	% 25	509.436.000	% -	683.430.050	50 %	387.142.730	25 %	2.493.387.680	*100 %*	*4.073.396.460*	*100,00%*	*162,24%*	*500 %*	*8.021.265.073*	*100,00%*	*402,16%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**25.142.911.700**		**21.497.661.599**		**3.614.036.900**		-		**585.882.237**		**734.243.355**		**1.081.917.753**	*-*	*2.402.043.345*		*66,46%*	*-*	*23.899.704.944*		*95,06%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dengan Baik	500 %	14.004.684.500	400 %	12.699.669.153	% 100	2.428.649.700	% 0	-	% -	491.634.237	51,12 %	706.378.355	48,88 %	767.425.953	*100 %*	*1.965.438.545*	*100,00%*	*80,93%*	*500 %*	*14.665.107.698*	*100,00%*	*104,72%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	218.287.200	22 Unit	152.499.590	Unit 22	232.287.200	Unit 0	-	Unit -	19.250.000	8 Unit	19.865.000	7 Unit	42.525.000	*15 Unit*	*81.640.000*	*68,18%*	*35,15%*	*37 Unit*	*234.139.590*	*168,18%*	*107,26%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46 Unit	376.560.000	23 Unit	182.437.850	Unit 23	230.500.000	Unit 0	-	Unit -	74.998.000	11 Unit	6.000.000	4 Unit	27.210.000	*15 Unit*	*108.208.000*	*65,22%*	*46,94%*	*38 Unit*	*290.645.850*	*82,61%*	*77,18%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara Dengan Baik	60 Bulan	9.634.442.500	48 Bulan	7.603.012.313	Unit 64	340.200.000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	1.000.000	42 Unit	224.976.600	*43 Unit*	*225.976.600*	*67,19%*	*66,42%*	*91 Bulan*	*7.828.988.913*	*151,67%*	*81,26%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	908.937.500	2 Unit	860.042.693	Unit 12	382.400.000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	19.780.200	*2 Unit*	*20.780.200*	*16,67%*	*5,43%*	*4 Unit*	*880.822.893*	*200,00%*	*96,91%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penataan Organisasi	**Indeks Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah**		**3.252.220.000**		**2.812.629.219**		**259.136.806**		-		**29.542.547**		**30.131.920**		**3.152.500**	-	***62.826.967***		***24,24%***	-	***2.875.456.186***		***88,42%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Evaluasi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Jumlah Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus tersusunnya Perubahan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada SKPD seKabupaten Tanggamus Tersusunya Evaluasi Jabatan Kabupaten Tanggamus	375 Buku/ PD	725.000.000	328 Buku/ PD	632.253.950	Dokumen 30	35.000.800	Dokumen 0	-	Dokumen -	5.364.000	0 Dokumen	1.336.500	6 Dokumen	-	***6 Dokumen***	***6.700.500***	***20,00%***	***19,14%***	***334 Buku/ PD***	***638.954.450***	***89,07%***	***88,13%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Peraturan Tata laksana Tersedianya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) RATU	300 Buku/ Paket/ PD	588.809.500	248 Buku/ Paket/ PD	516.589.069	Laporan 15	39.175.000	Laporan 0	-	Laporan -	4.290.840	15 Laporan	4.736.420	- Laporan	3.152.500	***15 Laporan***	***12.179.760***	***100,00%***	***31,09%***	***263 Buku/ Paket /PD***	***528.768.829***	***87,67%***	***89,80%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Buku Penyusunan Evaluasi Perjanjian Kinerja SKPD se-Kabupaten Tanggamus, Jumlah Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan	205 PD	239.700.000	177 PD	262.795.000	Dokumen 15	73.933.500	Dokumen 0	-	Dokumen -	1.800.000	15 Dokumen	2.998.000	- Dokumen	-	***15 Dokumen***	***4.798.000***	***100,00%***	***6,49%***	***192 PD***	***267.593.000***	***93,66%***	***111,64%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Operasional Tim Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan (saber pekan) Kabupaten Tanggamus	100 Buku	778.810.500	80 Buku	655.512.300	Dokumen 15	52.778.500	Dokumen 0	-	Dokumen -	10.465.707	15 Dokumen	13.168.000	- Dokumen	-	***15 Dokumen***	***23.633.707***	***100,00%***	***44,78%***	***95 Buku***	***679.146.007***	***95,00%***	***87,20%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus Pendampingan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	270 Buku/ Paket/ PD	919.900.000	230 Buku/ Paket/ PD	745.478.900	Dokumen 12	58.249.006	Dokumen 0	-	Dokumen -	7.622.000	12 Dokumen	7.893.000	- Dokumen	-	***12 Dokumen***	***15.515.000***	***100,00%***	***26,64%***	***242 Buku/ Paket /PD***	***760.993.900***	***89,63%***	***82,73%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Presentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terfasilitasi Dengan Baik**		**2.635.907.320**		**2.196.351.073**		**429.905.600**		-		**46.038.000**		**132.954.390**		**76.347.000**	-	***255.339.390***		***59,39%***	-	***2.451.690.463***		***93,01%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Resmi, Kunjungan Resmi dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga	1200 Acara	1.290.667.320	1080 Acara	1.084.944.364	Laporan 240	156.031.900	Laporan 0	-	Laporan -	46.038.000	120 Laporan	22.831.100	60 Laporan	27.747.000	***180 Laporan***	***96.616.100***	***75,00%***	***61,92%***	***1.260 Acara***	***1.181.560.464***	***105,00%***	***91,55%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1020 Kunjungan	626.850.500	846 Kunjungan	505.287.000	Laporan 420	130.653.200	Laporan 0	-	Laporan -	-	350 Laporan	80.123.295	- Laporan	-	***350 Laporan***	***80.123.295***	***83,33%***	***61,33%***	***1.196 Kunjungan***	***585.410.295***	***117,25%***	***93,39%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2100 Naskah	718.389.500	1755 Naskah	606.119.709	Laporan 240	143.220.500	Laporan 0	-	Laporan -	-	70 Laporan	29.999.995	70 Laporan	48.600.000	***140 Laporan***	***78.599.995***	***58,33%***	***54,88%***	***1.895 Naskah***	***684.719.704***	***90,24%***	***95,31%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,71**	**13,88**	**0,05**	**20,57**	**41,25**	**22,30**	**38,34**	**25,40**	**80,35**	**82,15**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**							
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**200 %**	**90.046.118.505**	**82,33 %**	**65.477.721.413**	**100 %**	**9.368.055.126**	**0,00 %**	**15.620.000**	**0,00 %**	**352.251.850**	**8,70 %**	**932.375.274**	**85,09 %**	**803.814.074**	***93,79 %***	***2.104.061.198***	***93,79%***	***22,46%***	***176,12 %***	***67.581.782.611***	***88,06%***	***75,05%***	SEKRETRIT DAERAH
			Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan Dengan Baik**		**13.441.590.880**		**10.058.362.275**		**800.115.078**		**7.800.000**		**82.295.100**		**125.821.000**		**198.768.500**	-	***414.684.600***		***51,83%***	-	***10.473.046.875***		***77,92%***	SEKRETRIT DAERAH
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah penataan administrasi pemerintahan	30 Kegiatan	4.957.674.380	27 Kegiatan	3.758.143.304	Dokumen 2	366.074.300	Dokumen 0	-	Dokumen -	20.110.000	1 Dokumen	119.266.900	1 Dokumen	194.790.000	***2 Dokumen***	***334.166.900***	***100,00%***	***91,28%***	***29 Kegiatan***	***4.092.310.204***	***96,67%***	***82,54%***	BAGIAN TAPEM SEKRETDA
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan administrasi kewilayahan	30 Kegiatan	2.484.994.500	22 Kegiatan	2.140.406.864	Dokumen 3	42.904.778	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	3.978.500	***2 Dokumen***	***3.978.500***	***66,67%***	***9,27%***	***24 Kegiatan***	***2.144.385.364***	***80,00%***	***86,29%***	BAGIAN TAPEM SEKRETDA
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan	20 Kegiatan	5.998.922.000	18 Kegiatan	4.159.812.107	Dokumen 4	391.136.000	Dokumen 0	7.800.000	Dokumen -	62.185.100	1 Dokumen	6.554.100	2 Dokumen	-	***3 Dokumen***	***76.539.200***	***75,00%***	***19,57%***	***21 Kegiatan***	***4.236.351.307***	***105,00%***	***70,62%***	BAGIAN TAPEM SEKRETDA
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan yang aktif dan Bina Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan**		**48.816.383.125**		**32.948.844.125**		**3.893.496.948**		-		**215.541.892**		**651.469.400**		**464.514.700**	-	***1.331.525.992***		***34,20%***	-	***34.280.370.117***		***70,22%***	BAGIAN KESRAK SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Persentase kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	500 Persen	11.550.375.000	400 Persen	6.974.529.250	100 Persen	3.893.496.948	0 Persen	-	- Persen	215.541.892	0 Persen	651.469.400	100 Persen	464.514.700	*100 Persen*	*1.331.525.992*	*100,00%*	*34,20%*	*500 Persen*	*8.306.055.242*	*100,00%*	*71,91%*	BAGIAN KESRAK SEKRETDA
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	500 Persen	639.750.000	300 Persen	383.850.000	Persen 0	-	Persen		Persen		Persen		Persen		*- Persen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 Persen*	*383.850.000*	*60,00%*	*60,00%*	BAGIAN KESRAK SEKRETDA
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan yang aktif dan Bina Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan	500 Persen	36.626.258.125	#### Persen	25.590.464.875	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen		*- Persen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*331 Persen*	*25.590.464.875*	*66,28%*	*69,87%*	BAGIAN KESRAK SEKRETDA
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Presentase Capaian Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah**		**3.011.344.500**		**2.708.385.413**		**362.735.100**		-		**34.452.458**		**31.141.874**		**64.135.874**	*-* -	*129.730.206*		*35,76%*	*-* -	*2.838.115.619*		*94,25%*	BAGIAN HUKUM SEKRETDA
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan kajian hukum di daerah	45 Dokumen	698.465.500	43 Dokumen	622.408.850	8 Dokumen	128.821.200	0 Dokumen	-	- Dokumen	2.783.850	2 Dokumen	1.640.000	1 Dokumen	-	*3 Dokumen*	*4.423.850*	*37,50%*	*3,43%*	*46 Dokumen*	*626.832.700*	*102,22%*	*89,74%*	BAGIAN HUKUM SEKRETDA
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen penyelesaian perkara, perdata dan pelaporan BANHAM	45 Dokumen	1.972.400.500	45 Dokumen	1.720.769.650	6 Dokumen	136.113.900	0 Dokumen	-	- Dokumen	15.053.950	2 Dokumen	27.816.000	1 Dokumen	2.000.000	*3 Dokumen*	*44.869.950*	*50,00%*	*32,97%*	*48 Dokumen*	*1.765.639.600*	*106,67%*	*89,52%*	BAGIAN HUKUM SEKRETDA
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dalam bentuk lembaran/berita daerah dan teruploadnya produk hukum daerah	2700 Buku	340.478.500	2400 Buku	365.206.913	30 Dokumen	97.800.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	16.614.658	6 Dokumen	1.685.874	24 Dokumen	62.135.874	*30 Dokumen*	*80.436.406*	*100,00%*	*82,25%*	*2.430 Buku*	*445.643.319*	*90,00%*	*130,89%*	BAGIAN HUKUM SEKRETDA
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan**		**24.776.800.000**		**19.762.129.600**		**4.311.708.000**		**7.820.000**		**19.962.400**		**123.943.000**		**76.395.000**	-	*228.120.400*		*5,29%*	-	*19.990.250.000*		*80,68%*	BAGIAN KERJASAMA SEKRETDA
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Terlaksananya MoU/PKS	100 Buku	24.086.046.000	95 Buku	19.277.191.000	6 Dokumen	4.240.452.400	0 Dokumen	4.650.000	- Dokumen	14.458.600	1 Dokumen	122.217.000	5 Dokumen	76.395.000	*6 Dokumen*	*217.720.600*	*100,00%*	*5,13%*	*101 Buku*	*19.494.911.600*	*101,00%*	*80,94%*	BAGIAN KERJASAMA SEKRETDA
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	10 Laporan	690.754.000	7 Laporan	484.938.600	2 Laporan	71.255.600	0 Laporan	3.170.000	- Laporan	5.503.800	1 Laporan	1.726.000	1 Laporan	-	*2 Laporan*	*10.399.800*	*100,00%*	*14,60%*	*9 Laporan*	*495.338.400*	*90,00%*	*71,71%*	BAGIAN KERJASAMA SEKRETDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0,17**	-	**3,76**	**8,70**	**9,95**	**85,09**	**8,58**	93,79	22,46						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR	ST	SR						
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah**	**200 %**	**11.083.237.130**	**79,19 %**	**9.101.381.877**	**100 %**	**2.087.360.029**	**2,17 %**	**112.060.000**	**0,00 %**	**630.003.896**	**45,11 %**	**453.442.000**	**37,50 %**	**699.270.800**	*84,78 %*	*1.894.776.696*	*84,78%*	*90,77%*	*163,98 %*	*10.996.158.573*	*81,99%*	*99,21%*	SEKRETDA
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase BUMD dan BLUD yang dimonitoring**		**416.103.000**		**336.647.349**		**85.274.063**		-		**7.500.000**		-		-	*-*	*7.500.000*		*8,80%*	*-*	*344.147.349*		*82,71%*	SEKRETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang di Monitoring dan Evaluasi	65 BLUD BUMD	141.298.000	47 BLUD BUMD	122.195.049	Dokumen 4	42.517.663	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*47 BLUD BUMD*	*122.195.049*	*72,31%*	*86,48%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah dan Distribusi	20 Laporan	91.590.000	16 Laporan	71.872.700	Laporan 4	19.707.700	Laporan 0	-	Laporan -	7.500.000	1 Laporan	-	- Laporan	-	*1 Laporan*	*7.500.000*	*25,00%*	*38,06%*	*17 Laporan*	*79.372.700*	*85,00%*	*86,66%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Pengawasan KUR	30 Monitoring	183.215.000	26 Monitoring	142.579.600	4 Dokumen	23.048.700	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*26 Monitoring*	*142.579.600*	*86,67%*	*77,82%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah**		**2.736.715.830**		**1.240.125.598**		**411.839.666**		-		**330.720.916**		-		**38.920.000**	-	*369.640.916*		*89,75%*	-	*1.609.766.514*		*58,82%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pameran yang diikuti/dilaksanakan	12 Pameran	775.241.500	7 Pameran	63.241.000	4 Dokumen	411.839.666	0 Dokumen	-	- Dokumen	330.720.916	2 Dokumen	-	1 Dokumen	38.920.000	*3 Dokumen*	*369.640.916*	*75,00%*	*89,75%*	*10 Pameran*	*432.881.916*	*83,33%*	*55,84%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Fasilitas Pameran Promosi Produk Unggulan di dalam Daerah dan Luar Daerah	20 Pameran	1.961.474.330	12 Pameran	1.176.884.598	Pameran		Pameran		Pameran		Pameran		Pameran		*- Pameran*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Pameran*	*1.176.884.598*	*60,00%*	*60,00%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik Yang Diterapkan**		**7.778.611.300**		**7.407.346.380**		**1.529.581.400**		**112.060.000**		**291.782.980**		**434.170.000**		**660.350.800**	*-* -	*1.498.363.780*		*97,96%*	-	*8.905.710.160*		*114,49%*	BPBJ SEKRETDA
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan dan Operasional Kelompok Kerja	625 Paket	3.626.601.000	490 Paket	3.047.161.050	124 Dokumen	476.160.000	2 Dokumen	2.820.000	- Dokumen	62.220.000	65 Dokumen	187.740.000	57 Dokumen	222.009.300	*124 Dokumen*	*474.789.300*	*100,00%*	*99,71%*	*614 Paket*	*3.521.950.350*	*98,24%*	*97,11%*	BPBJ SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	750 Paket	3.681.000.000	595 Paket	3.955.870.730	12 Dokumen	1.030.100.000	1 Dokumen	107.220.000	- Dokumen	221.051.980	6 Dokumen	246.430.000	5 Dokumen	435.389.300	*12 Dokumen*	*1.010.091.280*	*100,00%*	*98,06%*	*607 Paket*	*4.965.962.010*	*80,93%*	*134,91%*	BPBJ SEKRETDA
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	250 Paket	471.010.300	210 Paket	404.314.600	24 Orang	23.321.400	1 Orang	2.020.000	- Orang	8.511.000	9 Orang	-	4 Orang	2.952.200	*14 Orang*	*13.483.200*	*58,33%*	*57,81%*	*224 Paket*	*417.797.800*	*89,60%*	*88,70%*	BPBJ SEKRETDA
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Alam**		**151.807.000**		**117.262.550**		**60.664.900**		-		-		**19.272.000**		-	- -	*19.272.000*		*31,77%*	-	*136.534.550*		*89,94%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	20 Laporan	79.540.000	16 Laporan	59.176.250	4 Dokumen	30.803.200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*16 Laporan*	*59.176.250*	*80,00%*	*74,40%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg Bersubsidi	20 Laporan	72.267.000	16 Laporan	58.086.300	4 Dokumen	29.861.700	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	19.272.000	2 Dokumen	-	*2 Dokumen*	*19.272.000*	*50,00%*	*64,54%*	*18 Laporan*	*77.358.300*	*90,00%*	*107,05%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2,17**	**5,37**	**-**	**30,18**	**45,11**	**21,72**	**37,50**	**33,50**	**84,78**	**90,77**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**						
25			**SEKRETARIAT DPRD**																								
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**443.808.387.245**	**93,99 %**	**435.779.714.439**	**100 %**	**85.008.261.872**	**3,44 %**	**19.211.349.214**	**40,83 %**	**24.378.153.105**	**21,52 %**	############	**30,34 %**	############	*96,12 %*	*70.922.597.836*	*96,12%*	*83,43%*	*190,12 %*	*506.702.312.275*	*95,06%*	*114,17%*	SEKRETARIAT DPRD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**275.584.800**		**204.009.060**		**67.309.600**		-		**8.080.000**		-		**26.823.400**	-	*34.903.400*		*51,86%*	-	*238.912.460*		*86,69%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100 Eksamplar Dokumen	104.014.000	75 Eksamplar Dokumen	69.978.900	20 Eksamplar Dokumen	18.100.200	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	6.810.000	0 Eksamplar Dokumen	-	20 Eksamplar Dokumen	5.565.200	*20 Eksamplar Dokumen*	*12.375.200*	*100,00%*	*68,37%*	*95 Eksamplar Dokumen*	*82.354.100*	*95,00%*	*79,18%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	350 Buku	47.935.300	245 Buku	35.350.160	10 Dokumen	10.148.600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	10 Dokumen	7.418.600	*10 Dokumen*	*7.418.600*	*100,00%*	*73,10%*	*255 Buku*	*42.768.760*	*72,86%*	*89,22%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP	100 Eksamplar Dokumen	12.900.000	80 Eksamplar Dokumen	13.838.800	20 Eksamplar Dokumen	10.837.100	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	20 Eksamplar Dokumen	6.548.900	*20 Eksamplar Dokumen*	*6.548.900*	*100,00%*	*60,43%*	*100 Eksamplar Dokumen*	*20.387.700*	*100,00%*	*158,04%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	300 Eksamplar Dokumen	22.500.000	240 Eksamplar Dokumen	18.000.000	60 Eksamplar Dokumen	7.495.000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	1.270.000	0 Eksamplar Dokumen	-	60 Eksamplar Dokumen	1.725.000	*60 Eksamplar Dokumen*	*2.995.000*	*100,00%*	*39,96%*	*300 Eksamplar Dokumen*	*20.995.000*	*100,00%*	*93,31%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	300 Eksamplar Dokumen	22.500.000	240 Eksamplar Dokumen	20.147.100	25 Eksamplar Dokumen	7.825.400	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	25 Eksamplar Dokumen	2.510.000	*25 Eksamplar Dokumen*	*2.510.000*	*100,00%*	*32,08%*	*265 Eksamplar Dokumen*	*22.657.100*	*88,33%*	*100,70%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Eksamplar Dokumen	5.700.000	80 Eksamplar Dokumen	5.033.600	20 Laporan	4.040.300	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Eksamplar Dokumen*	*5.033.600*	*80,00%*	*88,31%*	SEKRETARIAT DPRD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Lakip, LPPD dan lainya Daerah	150 Eksamplar Dokumen	60.035.500	105 Eksamplar Dokumen	41.660.500	20 Laporan	8.863.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	20 Laporan	3.055.700	*20 Laporan*	*3.055.700*	*100,00%*	*34,48%*	*125 Eksamplar Dokumen*	*44.716.200*	*83,33%*	*74,48%*	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan**		**32.461.350.605**		**32.757.519.409**		**7.123.737.447**		**1.529.457.405**		**1.732.671.367**		**1.782.759.051**		**1.637.858.366**	-	*6.682.746.189*		*93,81%*	-	*39.440.265.598*		*121,50%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Orang	19.881.992.105	236 Orang	19.813.380.109	43 Orang	4.141.754.847	11 Orang	909.532.405	11 Orang	1.063.216.367	10 Orang	1.165.584.051	11 Orang	839.203.366	*43 Orang*	*3.977.536.189*	*100,00%*	*96,04%*	*279 Orang*	*23.790.916.298*	*118,72%*	*119,66%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	830 Orang	11.760.300.000	692 Orang	12.148.496.400	138 Orang	2.734.106.400	35 Orang	619.925.000	34 Orang	657.175.000	34 Orang	617.175.000	35 Orang	666.245.000	*138 Orang*	*2.560.520.000*	*100,00%*	*93,65%*	*830 Orang*	*14.709.016.400*	*100,00%*	*125,07%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	35 Orang	712.756.000	31 Orang	709.009.200	7 Dokumen	230.991.200	0 Dokumen	-	7 Dokumen	12.280.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	132.410.000	*7 Dokumen*	*144.690.000*	*100,00%*	*62,64%*	*38 Orang*	*853.699.200*	*108,57%*	*119,77%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	145 Eksamplar	41.302.500	115 Eksamplar	30.961.100	20 Laporan	6.679.200	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	10 Laporan	-	*10 Laporan*	-	*50,00%*	*0,00%*	*125 Eksamplar*	*30.961.100*	*86,21%*	*74,96%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan /Semestera n SKPD	Jumlah Penyusu Laporan Keuang Bulanan/Semest	340 Eksamplar	65.000.000	280 Eksamplar	55.672.600	40 Laporan	10.205.800	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	20 Laporan	-	*20 Laporan*	-	*50,00%*	*0,00%*	*300 Eksamplar*	*55.672.600*	*88,24%*	*85,65%*	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**		**46.123.310.000**		**47.803.616.188**		**7.807.222.500**		**-**		**4.269.102.000**		**-**		**231.438.446**	-	*4.500.540.446*		*57,65%*	-	*52.304.156.634*		*113,40%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	450 Stell/Paket	199.250.000	271 Stell/Paket	133.000.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		*- Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	*271 Stell/Paket*	*133.000.000*	*60,22%*	*66,75%*	SEKRETARIAT DPRD
			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	60 Kali	44.377.200.000	48 Kali	46.424.818.500	17 Kali	7.546.922.500	0 Kali	-	- Kali	4.269.102.000	7 Kali	-	- Kali	-	*7 Kali*	*4.269.102.000*	*41,18%*	*56,57%*	*55 Kali*	*50.693.920.500*	*91,67%*	*114,23%*	SEKRETARIAT DPRD
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	82 Orang	1.546.860.000	69 Orang	1.245.797.688	44 Orang	260.300.000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	44 Orang	231.438.446	*44 Orang*	*231.438.446*	*100,00%*	*88,91%*	*113 Orang*	*1.477.236.134*	*137,80%*	*95,50%*	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**97.477.967.510**		**106.503.579.644**		**22.044.983.848**		**3.791.541.926**		**6.111.154.171**		**1.599.403.089**		**3.109.747.709**	-	*14.611.846.895*		*66,28%*	-	*121.115.426.539*		*124,25%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	830 Unit/Paket	2.650.142.000	676 Unit/Paket	2.449.418.281	12 Paket	924.775.000	3 Paket	447.764.250	3 Paket	298.140.855	3 Paket	22.808.000	3 Paket	82.480.000	*12 Paket*	*851.193.105*	*100,00%*	*92,04%*	*688 Unit/Paket*	*3.300.611.386*	*82,89%*	*124,54%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200 Buah/Unit/Paket	2.490.489.160	112 %/Buah/Unit	2.481.278.262	12 Paket	693.102.000	3 Paket	51.676.900	3 Paket	113.139.900	3 Paket	119.525.100	3 Paket	255.596.944	*12 Paket*	*539.938.844*	*100,00%*	*77,90%*	*124 %/Buah/Unit*	*3.021.217.106*	*62,00%*	*121,31%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60165 Porsi	1.891.080.000	55727 Porsi	1.619.426.500	1 Paket	275.761.000	0 Paket	-	1 Paket	39.807.500	0 Paket	21.912.900	- Paket	135.998.550	*1 Paket*	*197.718.950*	*100,00%*	*71,70%*	*55.728 Porsi*	*1.817.145.450*	*92,63%*	*96,09%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11205 Eksamplar	1.480.290.000	11544 Eksamplar	1.401.378.200	2241 Paket	102.033.700	0 Paket	10.108.500	1120 Paket	16.500.000	560 Paket	1.980.000	561 Paket	43.981.000	*2.241 Paket*	*72.569.500*	*100,00%*	*71,12%*	*13.785 Eksamplar*	*1.473.947.700*	*123,03%*	*99,57%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	89825 Buah	693.000.750	85333 Buah	591.279.850	1 Paket	166.258.830	0 Paket	20.703.145	1 Paket	14.400.000	0 Paket	6.500.000	- Paket	82.409.400	*1 Paket*	*124.012.545*	*100,00%*	*74,59%*	*85.334 Buah*	*715.292.395*	*95,00%*	*103,22%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi ke	255 Kali	88.272.965.600	160 Kali	97.960.798.551	32 Laporan	19.883.053.318	3 Laporan	3.261.289.131	8 Laporan	5.629.165.916	2 Laporan	1.426.677.089	9 Laporan	2.509.281.815	*22 Laporan*	*12.826.413.951*	*68,75%*	*64,51%*	*182 Kali*	*110.787.212.502*	*71,37%*	*125,51%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**		**17.540.683.750**		**12.288.027.250**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	-	*-*		*0,00%*	-	*12.288.027.250*		*70,05%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional DPRD	30 Unit	14.810.000.000	21 Unit	10.025.700.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*21 Unit*	*10.025.700.000*	*70,00%*	*67,70%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	625 Unit	1.608.800.000	478 Unit	1.279.492.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*478 Unit*	*1.279.492.000*	*76,48%*	*79,53%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	55 Unit	1.121.883.750	41 Unit	982.835.250	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*41 Unit*	*982.835.250*	*74,55%*	*87,61%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum**		**54.282.363.000**		**61.835.055.405**		**19.471.581.000**		**7.859.948.735**		**5.444.638.304**		**1.099.076.814**		**3.535.932.748**	-	*17.939.596.601*		*92,13%*	-	*79.774.652.006*		*146,96%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	54.282.363.000	48 Kali	61.835.055.405	12 Laporan	19.471.581.000	3 Laporan	7.859.948.735	3 Laporan	5.444.638.304	3 Laporan	1.099.076.814	3 Laporan	3.535.932.748	*12 Laporan*	*17.939.596.601*	*100,00%*	*92,13%*	*60 Kali*	*79.774.652.006*	*100,00%*	*146,96%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umumal**		**12.006.625.000**		**9.677.592.502**		**1.126.245.000**		**-**		**157.215.200**		**192.429.499**		**339.380.800**	-	*689.025.499*		*61,18%*	-	*10.366.618.001*		*86,34%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan	40 Unit	284.500.000	11 Unit	271.613.000	Unit 4	261.600.000	Unit 0	-	Unit 4	29.928.000	0 Unit	41.944.000	- Unit	109.626.000	*4 Unit*	*181.498.000*	*100,00%*	*69,38%*	*15 Unit*	*453.111.000*	*37,50%*	*159,27%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan	330 Unit	6.917.950.000	284 Unit	5.423.096.925	Unit 22	728.420.000	Unit 0	-	Unit 6	120.247.200	6 Unit	103.454.200	10 Unit	211.034.800	*22 Unit*	*434.736.200*	*100,00%*	*59,68%*	*306 Unit*	*5.857.833.125*	*92,73%*	*84,68%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Per Rumah Jabatan/Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	715 Unit/Buah	309.000.000	617 Unit/Buah	292.267.000	89 Unit	81.800.000	0 Unit	-	8 Unit	7.040.000	0 Unit	22.241.300	42 Unit	18.720.000	*50 Unit*	*48.001.300*	*56,18%*	*58,68%*	*667 Unit/Buah*	*340.268.300*	*93,29%*	*110,12%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	125 Buah	254.375.000	90 Buah	199.782.577	1 Unit	54.425.000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	24.789.999	- Unit	-	*1 Unit*	*24.789.999*	*100,00%*	*45,55%*	*91 Buah*	*224.572.576*	*72,80%*	*88,28%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Jabatan, dan Rehabilitasi Sedang/Berat	80 Unit/Buah	4.240.800.000	65 Unit/Buah	3.490.833.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*65 Unit/Buah*	*3.490.833.000*	*81,25%*	*82,32%*	SEKRETARIAT DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**181.236.748.080**		**162.746.764.756**		**26.763.527.077**		**6.030.401.148**		**6.509.145.881**		**7.046.264.465**		**6.497.686.230**	*-*	*26.083.497.724*		*97,46%*	*-*	*188.830.262.480*		*104,19%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penyelenggaraa administrasi keuangan DPRD Jumlah Pimpina dan Anggota DPRD Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	450 Orang	178.073.748.080	405 Orang	159.700.702.112	45 Orang	26.359.262.077	45 Orang	6.030.401.148	- Orang	6.509.145.881	0 Orang	6.660.418.590	- Orang	6.497.686.230	*45 Orang*	*25.697.651.849*	*100,00%*	*97,49%*	*450 Orang*	*185.398.353.961*	*100,00%*	*104,11%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1355 Stel	3.163.000.000	1309 Stel	3.046.062.644	5 Paket	404.265.000	0 Paket	-	- Paket	-	5 Paket	385.845.875	- Paket	-	*5 Paket*	*385.845.875*	*100,00%*	*95,44%*	*1.314 Stel*	*3.431.908.519*	*96,97%*	*108,50%*	SEKRETARIAT DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD**		**2.403.754.500**		**1.963.550.225**		**603.655.400**		-		**146.146.182**		**29.964.000**		**204.330.900**	*-*	*380.441.082*		*63,02%*	*-*	*2.343.991.307*		*97,51%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	35 Kali	364.423.000	21 Kali	218.653.800	7 Laporan	62.831.600	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	*- Laporan*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*21 Kali*	*218.653.800*	*60,00%*	*60,00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD	150 Kali	1.860.769.000	138 Kali	1.576.808.900	18 Laporan	374.553.800	0 Laporan	-	10 Laporan	55.626.000	6 Laporan	29.964.000	2 Laporan	148.470.900	*18 Laporan*	*234.060.900*	*100,00%*	*62,49%*	*156 Kali*	*1.810.869.800*	*104,00%*	*97,32%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	115 Unit	178.562.500	111 Unit	168.087.525	7 Paket	166.270.000	0 Paket	-	3 Paket	90.520.182	4 Paket	-	- Paket	55.860.000	*7 Paket*	*146.380.182*	*100,00%*	*88,04%*	*118 Unit*	*314.467.707*	*102,61%*	*176,11%*	SEKRETARIAT DPRD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**3,44**	**22,60**	**40,83**	**28,68**	**21,52**	**13,82**	**30,34**	**18,33**	**96,12**	**83,43**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**						
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**200 %**	**68.107.306.300**	**45,38 %**	**60.785.577.004**	**100 %**	**12.056.575.988**	**23,59 %**	**1.013.789.488**	**23,53 %**	**2.025.164.655**	**22,22 %**	**828.970.169**	**25,15 %**	**4.229.112.394**	*95,49 %*	*8.097.036.706*	*95,49%*	*67,16%*	*140,87 %*	*68.882.613.710*	*70,43%*	*101,14%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**2.292.825.500**		**1.703.626.350**		**542.916.100**		-		**20.400.000**		**400.000.000**		**60.744.500**	*-*	*481.144.500*		*88,62%*	*-*	*2.184.770.850*		*95,29%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	40 Dokumen	267.500.500	32 Dokumen	170.061.700	20 Dokumen	117.115.100	0 Dokumen	-	10 Dokumen	20.400.000	0 Dokumen	-	10 Dokumen	49.100.000	*20 Dokumen*	*69.500.000*	*100,00%*	*59,34%*	*52 Dokumen*	*239.561.700*	*130,00%*	*89,56%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	60 Ranperda	305.325.000	43 Ranperda	213.564.650	20 Dokumen	25.801.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	20 Dokumen	11.644.500	*20 Dokumen*	*11.644.500*	*100,00%*	*45,13%*	*63 Ranperda*	*225.209.150*	*105,00%*	*73,76%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Penyelenggaraa Kajian Perundang- Undangan	12 Dokumen	1.200.000.000	10 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	200.000.000	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*200.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*12 Dokumen*	*1.200.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	14 Ranperda	520.000.000	10 Ranperda	320.000.000	4 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	4 Dokumen	200.000.000	- Dokumen	-	*4 Dokumen*	*200.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*14 Ranperda*	*520.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**1.590.625.500**		**1.202.958.800**		**307.428.800**		-		-		**17.822.750**		**108.682.750**	*-*	*126.505.500*		*41,15%*	*-*	*1.329.464.300*		*83,58%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah pembahasan KUA dan PPAS	25 Kali	316.814.000	20 Kali	243.081.900	4 Dokumen	61.452.800	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	19.971.750	*4 Dokumen*	*19.971.750*	*100,00%*	*32,50%*	*24 Kali*	*263.053.650*	*96,00%*	*83,03%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	25 Kali	317.632.500	20 Kali	225.956.500	4 Dokumen	61.456.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	27.868.500	*4 Dokumen*	*27.868.500*	*100,00%*	*45,35%*	*24 Kali*	*253.825.000*	*96,00%*	*79,91%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	25 Kali	318.557.500	20 Kali	256.230.500	5 Dokumen	61.456.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	5 Dokumen	22.335.500	*5 Dokumen*	*22.335.500*	*100,00%*	*36,34%*	*25 Kali*	*278.566.000*	*100,00%*	*87,45%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	25 Kali	319.507.500	20 Kali	219.009.500	5 Dokumen	61.606.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	5 Dokumen	22.397.500	*5 Dokumen*	*22.397.500*	*100,00%*	*36,36%*	*25 Kali*	*241.407.000*	*100,00%*	*75,56%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembah Pertanggungjaw APBD	25 Kali	318.114.000	20 Kali	258.680.400	5 Dokumen	61.456.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	17.822.750	5 Dokumen	16.109.500	*5 Dokumen*	*33.932.250*	*100,00%*	*55,21%*	*25 Kali*	*292.612.650*	*100,00%*	*91,98%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraa Pemerintahan**		**846.747.500**		**575.676.250**		**140.596.000**		-		-		-		**19.934.600**	*-*	*19.934.600*		*14,18%*	*-*	*595.610.850*		*70,34%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	75 Kali	195.855.000	62 Kali	133.893.750	15 Laporan	36.984.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	5 Laporan	5.297.500	*5 Laporan*	*5.297.500*	*33,33%*	*14,32%*	*67 Kali*	*139.191.250*	*89,33%*	*71,07%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	75 Kali	198.030.000	62 Kali	127.919.250	15 Laporan	30.458.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0,00%	0,00%	62 Kali	127.919.250	82,67%	64,60%	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	75 Kali	196.305.000	62 Kali	141.905.250	15 Laporan	30.683.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	5 Laporan	10.392.650	5 Laporan	10.392.650	33,33%	33,87%	67 Kali	152.297.900	89,33%	77,58%	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	75 kali	196.655.000	62 kali	136.016.500	15 Laporan	30.383.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	5 Laporan	4.244.450	5 Laporan	4.244.450	33,33%	13,97%	67 kali	140.260.950	89,33%	71,32%	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	25 Kali	59.902.500	15 Kali	35.941.500	15 Laporan	12.088.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0,00%	0,00%	15 Kali	35.941.500	60,00%	60,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD**		**18.614.681.800**		**16.663.560.725**		**5.031.428.200**		**870.000.000**		**349.929.100**		**294.320.159**		**1.129.366.705**	-	**2.643.615.964**		**52,54%**	-	**19.307.176.689**		**103,72%**	SEKRETARIAT DPRD
			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis DPRD	675 Orang	6.719.099.000	649 Orang	6.641.057.325	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0,00%	0,00%	649 Orang	6.641.057.325	96,15%	98,84%	SEKRETARIAT DPRD
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis DPRD	7 Dokumen	1.765.286.800	Dokumen		7 Dokumen	1.765.286.800	0 Dokumen	-	1 Dokumen	34.878.700	3 Dokumen	278.570.159	3 Dokumen	859.366.705	7 Dokumen	1.172.815.564	100,00%	66,44%	7 Dokumen	1.172.815.564	100,00%	66,44%	SEKRETARIAT DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan Dalam Rangka HUT Tangamus	16205 Eks/Kali	3.530.284.000	6480 Eks/Kali	3.972.496.200	3240 Dokumen	1.900.789.000	810 Dokumen	600.000.000	810 Dokumen	45.050.400	810 Dokumen	15.750.000	810 Dokumen		3.240 Dokumen	660.800.400	100,00%	34,76%	9.720 Eks/Kali	4.633.296.600	59,98%	131,24%	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55 Orang	3.300.000.000	44 Orang	3.135.000.000	11 Orang	825.000.000	11 Orang	165.000.000	- Orang	165.000.000	0 Orang	-	- Orang	165.000.000	11 Orang	495.000.000	100,00%	60,00%	55 Orang	3.630.000.000	100,00%	110,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	35 Orang	2.100.000.000	28 Orang	1.995.000.000	7 Orang	525.000.000	7 Orang	105.000.000	- Orang	105.000.000	0 Orang	-	- Orang	105.000.000	7 Orang	315.000.000	100,00%	60,00%	35 Orang	2.310.000.000	100,00%	110,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Hibah	5 Kali	1.125.000.000	4 Kali	875.000.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	4 Kali	875.000.000	80,00%	77,78%	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD	50 Eksamplar	75.012.000	30 Eksamplar	45.007.200	10 Dokumen	15.352.400	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	30 Eksamplar	45.007.200	60,00%	60,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terlaksananyan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**		**20.886.592.000**		**20.622.277.650**		**4.083.813.400**		-		**1.312.109.600**		-		**2.620.101.800**	-	**3.932.211.400**		**96,29%**	-	**24.554.489.050**		**117,56%**	SEKRETARIAT DPRD
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	35 Kali	577.500.000	24 Kali	392.400.000	Kali		Kali		Kali		Kali				- Kali	-	0,00%	0,00%	24 Kali	392.400.000	68,57%	67,95%	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	225 Eksamplar	279.747.500	180 Eksamplar	182.256.750	45 Dokumen	55.949.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	180 Eksamplar	182.256.750	80,00%	65,15%	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15 Kali	20.029.344.500	12 Kali	20.047.620.900	3 Dokumen	4.027.863.900	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.312.109.600	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.620.101.800	3 Dokumen	3.932.211.400	100,00%	97,63%	15 Kali	23.979.832.300	100,00%	119,72%	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Terlaksanannya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**354.756.000**		**212.853.600**		**104.610.700**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	**212.853.600**		**60,00%**	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	60 Bulan	354.756.000	36 Bulan	212.853.600	6 Dokumen	104.610.700	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00%	0,00%	36 Bulan	212.853.600	60,00%	60,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Tugas DPRD	**Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**		**23.521.078.000**		**19.804.623.629**		**1.845.782.788**		**143.789.488**		**342.725.955**		**116.827.260**		**290.282.039**	-	**893.624.742**		**48,41%**	-	**20.698.248.371**		**88,00%**	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	185 Kali	15.613.120.000	156 Kali	12.029.074.979	3 Dokumen	252.372.948	1 Dokumen	55.648.948	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	55.648.948	33,33%	22,05%	157 Kali	12.084.723.927	84,86%	77,40%	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	125 Buku	39.715.500	100 Buku	28.662.200	25 Laporan	7.943.100	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0,00%	0,00%	100 Buku	28.662.200	80,00%	72,17%	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Memfasilitasi Pimpinan DPRD	186 Kali	7.868.242.500	166 Kali	7.746.886.450	26 Dokumen	1.585.466.740	3 Dokumen	88.140.540	8 Dokumen	342.725.955	0 Dokumen	116.827.260	4 Dokumen	290.282.039	15 Dokumen	837.975.794	57,69%	52,85%	181 Kali	8.584.862.244	97,31%	109,11%	SEKRETARIAT DPRD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**23,59**	**8,41**	**23,53**	**16,80**	**23,22**	**6,88**	**25,15**	**35,08**	**95,49**	**67,16**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**							
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN																								
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																								
26			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**65.762.174.410**	**81,77 %**	**57.883.158.239**	**% 100**	**9.603.792.878**	**% 9,50**	**1.293.302.467**	**% 24,42**	**2.846.701.560**	**% 8,72**	**2.067.236.937**	**% 31,59**	**2.054.202.334**	***74,22 %***	***8.261.443.298***	***74,22%***	***86,02%***	***155,99 %***	***66.144.601.537***	***78,00%***	***100,58%***	BAPPERIDA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**		**1.050.002.980**		**919.244.306**		**29.461.636**		**4.868.936**		**9.001.564**		**3.098.936**		**6.068.800**	-	***23.038.236***		***78,20%***	-	***942.282.542***		***89,74%***	BAPPERIDA
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	160 Buku/ Laporan	260.719.800	132 Buku/ Laporan	230.568.980	4 Laporan	3.972.500	2 Laporan	-	- Laporan	3.072.500	0 Laporan	-	2 Laporan	-	***4 Laporan***	***3.072.500***	***100,00%***	***77,34%***	***136 Buku/ Laporan***	***233.641.480***	***85,00%***	***89,61%***	BAPPERIDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penysunan Dokumen RKA-SKPD	250 Dokumen	138.352.500	201 Dokumen	116.944.100	1 Dokumen	1.001.100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.001.100	***1 Dokumen***	***1.001.100***	***100,00%***	***100,00%***	***202 Dokumen***	***117.945.200***	***80,80%***	***85,25%***	BAPPERIDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	134.550.000	4 Dokumen	106.804.000	1 Dokumen	7.439.800	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.067.700	***1 Dokumen***	***5.067.700***	***100,00%***	***68,12%***	***5 Dokumen***	***111.871.700***	***100,00%***	***83,15%***	BAPPERIDA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	48.340.000	4 Dokumen	42.799.750	1 Dokumen	4.768.000	1 Dokumen	-	- Dokumen	4.768.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***4.768.000***	***100,00%***	***100,00%***	***5 Dokumen***	***47.567.750***	***100,00%***	***98,40%***	BAPPERIDA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	45.065.500	4 Dokumen	40.234.600	1 Dokumen	951.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	***1 Dokumen***	-	***100,00%***	***0,00%***	***5 Dokumen***	***40.234.600***	***100,00%***	***89,28%***	BAPPERIDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Capian Kinerja	80 Buku/ Laporan	248.795.500	70 Buku/ Laporan	236.083.500	3 Laporan	4.219.800	1 Laporan	2.467.000	- Laporan	- 447.000	0 Laporan	-	2 Laporan	-	***3 Laporan***	***2.020.000***	***100,00%***	***47,87%***	***73 Buku/ Laporan***	***238.103.500***	***91,25%***	***95,70%***	BAPPERIDA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	120 Buku/ Laporan	174.179.680	97 Buku/ Laporan	145.809.376	1 Laporan	7.108.936	1 Laporan	2.401.936	- Laporan	1.608.064	Laporan	3.098.936	- Laporan	-	***1 Laporan***	***7.108.936***	***100,00%***	***100,00%***	***98 Buku/ Lapor***	***152.918.312***	***81,67%***	***87,79%***	BAPPERIDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**		**41.625.837.980**		**38.781.778.963**		**7.317.683.827**		**1.133.484.794**		**2.283.766.185**		**1.798.601.014**		**1.666.516.720**	- -	***6.882.368.713***		***94,05%***	- -	***45.664.147.676***		***109,70%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	33.672.087.980	230 Orang	31.330.366.413	46 Orang	5.954.669.827	12 Orang	709.634.794	11 Orang	2.090.536.185	11 Orang	1.502.935.314	12 Orang	1.344.341.020	***46 Orang***	***5.647.447.313***	***100,00%***	***94,84%***	***276 Orang***	***36.977.813.726***	***120,00%***	***109,82%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290 Orang	6.983.550.000	290 Orang	6.611.640.000	58 Orang	1.216.200.000	15 Orang	416.290.000	14 Orang	150.760.000	14 Orang	277.970.000	15 Orang	285.250.000	***58 Orang***	***1.130.270.000***	***100,00%***	***92,93%***	***348 Orang***	***7.741.910.000***	***120,00%***	***110,86%***	BAPPERIDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula /Semester SKPD	60 Bulan	970.200.000	48 Bulan	839.772.550	12 Bulan	146.814.000	3 Bulan	7.560.000	3 Bulan	42.470.000	3 Bulan	17.695.700	3 Bulan	36.925.700	***12 Bulan***	***104.651.400***	***100,00%***	***71,28%***	***60 Bulan***	***944.423.950***	***100,00%***	***97,34%***	BAPPERIDA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Pendidikan ndan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur**		**765.650.000**		**569.647.400**		**14.500.000**		-		-		-		**4.075.500**	- -	***4.075.500***		***28,11%***	- -	***573.722.900***		***74,93%***	BAPPERIDA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115 Stel/Buah	7.100.000	3 Stel/Buah	6.500.000	0 Stel/Buah	-	Stel/ Buah		Stel/ Buah		Stel/Buah		Stel/Buah	-	***Stel/Buah***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Stel/Buah***	***6.500.000***	***2,61%***	***91,55%***	BAPPERIDA
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kursus- Kursus Singkat/Pelatiha Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas	15 Kali/Orang	758.550.000	13 Kali/Orang	563.147.400	4 Kali/Orang	14.500.000	0 Kali/ Orang	-	- Kali/ Orang	-	0 Kali/Orang	-	- Kali/Orang	4.075.500	***- Kali/Orang***	***4.075.500***	***0,00%***	***28,11%***	***13 Kali/Orang***	***567.222.900***	***86,67%***	***74,78%***	BAPPERIDA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik**		**10.150.849.450**		**7.846.200.195**		**593.648.800**		**39.836.683**		**113.626.390**		**86.927.608**		**59.616.825**	- -	***300.007.506***		***50,54%***	- -	***8.146.207.701***		***80,25%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 Unit/Paket	1.087.842.250	148 Unit/Paket	1.121.157.400	33 Paket	58.041.100	3 Paket	7.757.800	1 Paket	17.162.200	1 Paket	2.000.000	28 Paket	5.100.000	***33 Paket***	***32.020.000***	***100,00%***	***55,17%***	***181 Unit/ Paket***	***1.153.177.400***	***103,43%***	***106,01%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	1.180.900.000	48 Bulan	871.461.000	12 Bulan	135.506.000	0 Bulan	3.775.000	6 Bulan	17.642.000	0 Bulan	20.306.000	6 Bulan	11.400.400	***12 Bulan***	***53.123.400***	***100,00%***	***39,20%***	***60 Bulan***	***924.584.400***	***100,00%***	***78,29%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	60 Bulan	1.583.918.000	48 Bulan	1.249.191.487	12 Bulan	45.834.600	1 Bulan	3.234.000	3 Bulan	6.731.000	1 Bulan	2.011.600	7 Bulan	4.955.000	***12 Bulan***	***16.931.600***	***100,00%***	***36,94%***	***60 Bulan***	***1.266.123.087***	***100,00%***	***79,94%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	60 Bulan	709.582.200	48 Bulan	583.233.035	12 Bulan	34.943.100	1 Bulan	10.499.500	5 Bulan	3.600.860	1 Bulan	625.000	5 Bulan	10.920.000	***12 Bulan***	***25.645.360***	***100,00%***	***73,39%***	***60 Bulan***	***608.878.395***	***100,00%***	***85,81%***	BAPPERIDA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumJumlah Konsultasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah	1705 Kali	5.588.607.000	1383 Kali	4.021.157.273	341 Laporan	319.324.000	5 Laporan	14.570.383	70 Laporan	68.490.330	5 Laporan	61.985.008	13 Laporan	27.241.425	***93 Laporan***	***172.287.146***	***27,27%***	***53,95%***	***1.476 Kali***	***4.193.444.419***	***86,57%***	***75,04%***	BAPPERIDA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		**2.641.000.000**		**1.584.600.000**		-		-		-		-		-	- -	-		***0,00%***	***0,00%***	- -	***1.584.600.000***		***60,00%***	BAPPERIDA
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10 Unit	2.641.000.000	6 Unit	1.584.600.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***6 Unit***	***1.584.600.000***	***60,00%***	***60,00%***	BAPPERIDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Expo/Pameran Pembangunan Kabupaten, Pameran Pembangunan Provinsi dan Luar Daerah dan sinergi Peogram Pembangunan Luar Daerah**		**5.613.405.000**		**4.577.761.080**		**1.093.714.015**		**98.314.654**		**297.068.093**		**116.229.878**		**191.809.136**	- -	***703.421.761***		***64,31%***	- -	***5.281.182.841***		***94,08%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	4.503.780.000	48 Bulan	3.874.746.644	Bulan 12	1.057.164.015	Bulan 3	98.199.004	Bulan 3	296.808.743	3 Bulan	108.579.878	3 Bulan	186.484.136	***12 Bulan***	***690.071.761***	***100,00%***	***65,28%***	***60 Bulan***	***4.564.818.405***	***100,00%***	***101,36%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Expo/Pameran Pembangunan Kabupaten, Terselenggaranya Expo/Pameran Pembangunan Provinsi dan LuaDaerah Terselenggarany Rapat Sinergitas Program	102 Kali	1.109.625.000	92 Kali	703.014.436	Dokumen 10	36.550.000	Dokumen 0	115.650	Dokumen 5	259.350	3 Dokumen	7.650.000	2 Dokumen	5.325.000	***10 Dokumen***	***13.350.000***	***100,00%***	***36,53%***	***102 Kali***	***716.364.436***	***100,00%***	***64,56%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan**		**3.915.429.000**		**3.603.926.295**		**554.784.600**		**16.797.400**		**143.239.328**		**62.379.501**		**126.115.353**	- -	***348.531.582***		***62,82%***	- -	***3.952.457.877***		***100,95%***	BAPPERIDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60 Bulan	3.210.254.000	48 Bulan	2.957.767.395	Bulan 12	459.014.600	Bulan 1	12.683.600	Bulan 5	118.110.128	3 Bulan	55.079.501	3 Bulan	118.068.353	***12 Bulan***	***303.941.582***	***100,00%***	***66,22%***	***60 Bulan***	***3.261.708.977***	***100,00%***	***101,60%***	BAPPERIDA
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/ Berkala Rumah Dinas Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	15 Paket/ Unit	194.475.000	13 Paket/ Unit	186.143.900	Unit 58	57.410.000	Unit 0	2.838.800	Unit -	15.224.200	0 Unit	5.200.000	58 Unit	7.000.000	***58 Unit***	***30.263.000***	***100,00%***	***52,71%***	***71 Paket /Unit***	***216.406.900***	***473,33%***	***111,28%***	BAPPERIDA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Paket	510.700.000	4 Paket	460.015.000	Paket 1	38.360.000	Paket 0	1.275.000	Paket -	9.905.000	0 Paket	2.100.000	1 Paket	1.047.000	***1 Paket***	***14.327.000***	***100,00%***	***37,35%***	***5 Paket***	***474.342.000***	***100,00%***	***92,88%***	BAPPERIDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**9,50**	**13,47**	**24,42**	**29,64**	**8,72**	**21,53**	**31,59**	**21,39**	**74,22**	**86,02**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**						
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat**	**200 %**	**15.307.089.500**	**56,64 %**	**13.373.995.822**	**% 100**	**1.778.943.750**	**% 14,17**	**215.051.250**	**% 0,83**	**896.722.160**	**15,00 %**	**129.509.040**	**18,33 %**	**32.045.000**	***48,33 %***	***1.273.327.450***	***48,33%***	***71,58%***	***104,97 %***	***14.647.323.272***	***52,49%***	***95,69%***	BAPPERIDA
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu**		**8.780.368.500**		**7.359.338.722**		**1.000.386.450**		**122.170.850**		**573.448.910**		**124.131.840**		**29.545.000**	-	***849.296.600***		***84,90%***	-	***8.208.635.322***		***93,49%***	BAPPERIDA
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalah an, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	40 Kali/Dokumen	2.063.740.750	33 Kali/Dokumen	1.757.126.522	Dokumen 4	194.892.700	Dokumen 1	33.622.100	Dokumen 1	48.352.900	0 Dokumen	51.037.500	2 Dokumen	4.300.000	***4 Dokumen***	***137.312.500***	***100,00%***	***70,46%***	***37 Kali/Dokumen***	***1.894.439.022***	***92,50%***	***91,80%***	BAPPERIDA
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Penerapan Integrasi E-Planning dan E-Budgeting	60 Bulan	682.835.000	48 Bulan	576.603.700	Bulan 12	29.565.500	Bulan 3	-	Bulan 3	922.160	3 Bulan	15.494.340	3 Bulan	-	***12 Bulan***	***16.416.500***	***100,00%***	***55,53%***	***60 Bulan***	***593.020.200***	***100,00%***	***86,85%***	BAPPERIDA
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forgab SKPD	5 Kali/Berita Acara	138.225.000	4 Kali/Berita Acara	103.336.050	1 Kali/Berita Acara	11.125.000	1 Kali/Berita Acar	8.075.000	Kali/Berita Acara	1.948.750	0 Kali/Berita Acara	-	- Kali/Berita Acara	-	***1 Kali/Berita Acara***	***10.023.750***	***100,00%***	***90,10%***	***5 Kali/Berita Acara***	***113.359.800***	***100,00%***	***82,01%***	BAPPERIDA
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	5 Kali/Berita Acara	3.502.609.250	4 Kali/Berita Acara	3.098.924.150	1 Kali/Berita Acara	583.713.750	1 Kali/Berita Acar	38.159.950	Kali/Berita Acara	507.087.900	0 Kali/Berita Acara	-	- Kali/Berita Acara	25.245.000	***1 Kali/Berita Acara***	***570.492.850***	***100,00%***	***97,74%***	***5 Kali/Berita Acara***	***3.669.417.000***	***100,00%***	***104,76%***	BAPPERIDA
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Executive Summary RKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKPD	1870 Buku/Dokumen	2.392.958.500	1094 Buku/Dokumen	1.823.348.300	Dokumen 210	181.089.500	Dokumen 60	42.313.800	Dokumen -	15.137.200	68 Dokumen	57.600.000	82 Dokumen	-	***210 Dokumen***	***115.051.000***	***100,00%***	***63,53%***	***1.304 Buku/Dokumen***	***1.938.399.300***	***69,73%***	***81,00%***	BAPPERIDA
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan pada kegiatan analisis data dan informasi daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**		**5.431.546.000**		**4.865.782.500**		**651.456.900**		**84.396.600**		**286.681.350**		**-**		**-**	- -	***371.077.950***		***56,96%***	- -	***5.236.860.450***		***96,42%***	BAPPERIDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Analisis Ekonomi Mikro Sektor Pertanian Kabupaen Tanggamus Jumlah Dokumen Kajian Analisis Potensi Desa/Pekon Perbatasan Kabupaten Tanggamus Jumlah Dokumen Kajian Recovery dan Fasilitasi Pemulihan Sektor Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus Penyusuna Peta Aset	2200 Buku/ Dokumen	4.921.152.500	180 Buku/ Dokumen	4.534.730.900	Dokumen 5	647.052.200	Dokumen 0	84.396.600	Dokumen -	286.681.350	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	*371.077.950*	*0,00%*	*57,35%*	*180 Buku/ Dokumen*	*4.905.808.850*	*8,18%*	*99,69%*	BAPPERIDA
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokemen Informasi Pembangunan Kecamatan Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1150 Buku/ Orang	510.393.500	810 Buku/ Orang	331.051.600	Orang 230	4.404.700	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*810 Buku/ Orang*	*331.051.600*	*70,43%*	*64,86%*	BAPPERIDA
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya lapo keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, evaluasi capaian kinerja serta tersusunnya lap evaluasi**		**1.095.175.000**		**1.148.874.600**		**127.100.400**		**8.483.800**		**36.591.900**		**5.377.200**		**2.500.000**	- -	*52.952.900*		*41,66%*	- -	*1.201.827.500*		*109,74%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Capaian Kinerja APBD Kabupaten Tanggamus Tersusunnya Laporan Evaluasi	3375 Buku	419.150.000	2534 Buku	669.517.500	Buku 15	35.656.600	Buku 1	6.404.400	Buku -	2.425.000	1 Buku	5.377.200	1 Buku	-	*3 Buku*	*14.206.600*	*20,00%*	*39,84%*	*2.537 Buku*	*683.724.100*	*75,17%*	*163,12%*	BAPPERIDA
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Monitoring dan Pengendalian Kegiatan di Kabupaten Tanggamus Jumlah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten	1950 Buku	676.025.000	1328 Buku	479.357.100	Laporan 2	91.443.800	Laporan 1	2.079.400	Laporan -	34.166.900	0 Laporan	-	- Laporan	2.500.000	*1 Laporan*	*38.746.300*	*50,00%*	*42,37%*	*1.329 Buku*	*518.103.400*	*68,15%*	*76,64%*	BAPPERIDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**14,17**	**12,09**	**0,83**	**50,41**	**15,00**	**7,28**	**18,33**	**1,80**	48,33	71,58						
										Predikat kinerja	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SD						
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**200 %**	**26.910.924.000**	**46,33 %**	**21.629.267.438**	**% 100**	**2.548.046.400**	**% 19,23**	**218.757.600**	**% 15,38**	**995.401.210**	**% 3,85**	**651.873.795**	**% 34,62**	**297.545.500**	*73,08 %*	*2.163.578.105*	*73,08%*	*84,91%*	*119,40 %*	*23.792.845.543*	*59,70%*	*88,41%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			**4.639.651.200**		**3.622.286.650**		**945.033.700**		**101.670.000**		**155.422.600**		**493.473.810**		**141.857.000**	- -	*892.423.410*		*94,43%*	- -	*4.514.710.060*		*97,31%*	BAPPERIDA
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	50 Buku	910.450.000	40 Buku	579.869.200	Laporan 2	1.397.200	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	1 Laporan	-	*1 Laporan*	-	*50,00%*	*0,00%*	*41 Buku*	*579.869.200*	*82,00%*	*63,69%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Aplikasi Silumba	60 Bulan	291.000.000	48 Bulan	210.163.000	Laporan 1	138.338.900	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	1 Laporan	127.317.000	*1 Laporan*	*127.317.000*	*100,00%*	*92,03%*	*49 Bulan*	*337.480.000*	*81,67%*	*115,97%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Kajian	13.544.200	Kajian		Dokumen 1	4.453.100	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Kajian*	-	*0,00%*	*0,00%*	BAPPERIDA
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Kajian	693.611.400	4 Kajian	687.543.500	Laporan 2	4.454.400	Laporan 0	-	Laporan 2	1.871.100	0 Laporan	-	- Laporan	-	*2 Laporan*	*1.871.100*	*100,00%*	*42,01%*	*6 Kajian*	*689.414.600*	*150,00%*	*99,39%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD	2 Kajian	10.293.400	Kajian		Dokumen 1	3.277.100	Dokumen 0	-	Dokumen 1	712.800	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*712.800*	*100,00%*	*21,75%*	*1 Kajian*	*712.800*	*50,00%*	*6,92%*	BAPPERIDA
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Kajian	396.652.200	2 Kajian	198.443.200	Laporan 2	201.163.900	Laporan 2	99.710.000	Laporan -	93.403.900	0 Laporan	-	- Laporan	-	*2 Laporan*	*193.113.900*	*100,00%*	*96,00%*	*4 Kajian*	*391.557.100*	*0,00%*	*0,00%*	BAPPERIDA
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monev CSR dan PKH	50 Buku/ Laporan	241.200.000	42 Buku/ Laporan	192.390.700	Laporan 3	3.979.700	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*42 Buku/ Laporan*	*192.390.700*	*84,00%*	*79,76%*	BAPPERIDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Kabupaten Layak Anak dan Kajian Inovasi Kebijakan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	100 Buku/Laporan	2.082.900.000	83 Buku/Laporan	1.753.877.050	Laporan 2	587.969.400	Laporan 0	1.960.000	Laporan -	59.434.800	0 Laporan	493.473.810	2 Laporan	14.540.000	*2 Laporan*	*569.408.610*	*100,00%*	*96,84%*	*85 Buku/Laporan*	*2.323.285.660*	*85,00%*	*111,54%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			**6.645.102.800**		**4.335.641.499**		**372.955.200**				**189.340.800**		**147.630.000**		**9.581.500**	- -	*346.552.300*		*92,92%*	- -	*4.682.193.799*		*70,46%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Sumber Sumber Ekonomi Baru dan Kajian Pengaruh Keberadaan Pasar Terhadap sosial EKonomi Pedagang pada Era New Normal di Kabupaten	100 Buku	2.410.150.000	60 Buku	1.446.090.000	Buku 1	3.207.900	Buku 0	-	Buku 1	623.700	Buku	-	- Buku	-	*1 Buku*	*623.700*	*100,00%*	*19,44%*	*61 Buku*	*1.446.713.700*	*61,00%*	*60,03%*	BAPPERIDA
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	849.447.400	4 Laporan	644.753.999	Laporan 2	198.362.400	Laporan 2	1.254.600	Laporan -	188.717.100	0 Laporan	-	- Laporan	-	*2 Laporan*	*189.971.700*	*100,00%*	*95,77%*	*6 Laporan*	*834.725.699*	*150,00%*	*98,27%*	BAPPERIDA
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen	7.866.700	Dokumen		Dokumen 0	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Kajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kab. Tanggamus dan Kajian Pengaruh KUR dan UMKM Terhadap Sustainability Profit dengan Lokasi Usaha sebagai Variabel dan Penyusunan E Katalog	150 Buku/Dokumen	2.826.650.000	92 Buku/Dokumen	1.701.456.200	Dokumen 1	171.384.900	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	147.630.000	1 Dokumen	9.581.500	*1 Dokumen*	*157.211.500*	*100,00%*	*91,73%*	*93 Buku/Dokumen*	*1.858.667.700*	*62,00%*	*65,76%*	BAPPERIDA
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	550.988.700	3 Laporan	543.341.300	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Laporan*	*543.341.300*	*100,00%*	*98,61%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Tersusunya Dokumen Kajian Pendukung di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**		**15.626.170.000**		**13.671.339.289**		**1.230.057.500**		**117.087.600**		**650.637.810**		**10.769.985**		**146.107.000**	- -	*924.602.395*		*75,17%*	- -	*14.595.941.684*		*93,41%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Tanggamus	100 Buku/Kali	644.587.500	84 Buku/Kali	391.170.400	Kali 2	7.340.600	Kali 0	340.600	Kali -	2.443.700	0 Kali	-	2 Kali	-	*2 Kali*	*2.784.300*	*100,00%*	*37,93%*	*86 Buku/Kali*	*393.954.700*	*86,00%*	*61,12%*	BAPPERIDA
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Kajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kab. Tanggamus dan Kajian Pengaruh KUR dan UMKM Terhadap Sustainability Profit dengan Lokasi Usaha sebagai Variabel dan Penyusunan E Katalog	300 Buku/Laporan	6.215.442.500	244 Buku/Laporan	5.520.615.530	Buku/Laporan		Buku/Laporan		Buku/Laporan		Buku/Laporan		Buku/Laporan		- *Buku/Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*244 Buku/Laporan*	*5.520.615.530*	*81,33%*	*88,82%*	BAPPERIDA
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Tanggamus	1000 Kali/Buku/Laporan	2.912.216.000	17 Kali/Buku/Laporan	2.507.644.359	Laporan 2	230.246.000	Laporan 1	30.246.000	Laporan -	182.769.660	1 Laporan	10.769.985	- Laporan	-	*2 Laporan*	*223.785.645*	*100,00%*	*97,19%*	*19 Kali/Buku/Laporan*	*2.731.430.004*	*1,90%*	*93,79%*	BAPPERIDA
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Kegiatan Percepatan Kawasan Industri Tanggamus (KIT)	90 Kali/Dokumen	250.003.000	82 Kali/Dokumen	187.470.800	Dokumen 1	6.731.600	Dokumen 0	761.700	Dokumen -	1.449.700	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*2.211.400*	*100,00%*	*32,85%*	*83 Kali/Dokumen*	*189.682.200*	*92,22%*	*75,87%*	BAPPERIDA
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Penyusunan RAD AMPL, SPKP, Studi Pemetaan Potensi Infrastruktur Peternakan dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten	375 Buku/Laporan	5.603.921.000	305 Buku/Laporan	5.064.438.200	Laporan 3	985.739.300	Laporan 0	85.739.300	Laporan -	463.974.750	0 Laporan	-	1 Laporan	146.107.000	*1 Laporan*	*695.821.050*	*33,33%*	*70,59%*	*306 Buku/Laporan*	*5.760.259.250*	*81,60%*	*102,79%*	BAPPERIDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**19,23**	**8,59**	**15,38**	**39,07**	**3,85**	**25,58**	**34,62**	**11,68**	73,08	84,91						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**						
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**	**200 %**	**11.663.411.500**	**75,87 %**	**10.552.258.070**	**100 %**	**1.563.264.900**	**0,00 %**	**108.319.950**	**14,29 %**	**189.724.530**	**0,00 %**	**-**	**85,71 %**	**779.273.490**	*100,00 %*	*1.077.317.970*	*100,00%*	*68,91%*	*175,87 %*	*11.629.576.040*	*87,93%*	*99,71%*	BAPPERIDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**3.107.525.000**		**2.544.460.472**		**274.000.000**		**8.000.000**		**88.865.260**		-		-	-	**96.865.260**		**35,35%**	-	**2.641.325.732**		**85,00%**	BAPPERIDA
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	Jumlah Penerimaan/Pen Mahasiswa KKN di Kabupaten Tanggamus	20 Perguruan Tinggi	260.100.000	12 Perguruan Tinggi	156.060.000	Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		- *Perguruan Tinggi*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Perguruan Tinggi*	*156.060.000*	*60,00%*	*60,00%*	BAPPERIDA
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Indeks Inovasi Daerah (IID), SIDa, dan Sinovic Kabupaten Tanggamus	50 Buku/Dokumen	1.169.125.000	41 Buku/Dokumen	1.063.048.172	Buku/Dokumen		Buku/Dokumen		Buku/Dokumen		Buku/Dokumen		Buku/Dokumen		- *Buku/Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*41 Buku/Dokumen*	*1.063.048.172*	*82,00%*	*90,93%*	BAPPERIDA
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	50 Buku	1.167.300.000	40 Buku	921.484.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Buku*	*921.484.000*	*80,00%*	*78,94%*	BAPPERIDA
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen	313.000.000	1 Dokumen	209.539.000	1 Dokumen	274.000.000	0 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	88.865.260	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	**96.865.260**	*100,00%*	*35,35%*	*2 Dokumen*	*306.404.260*	*200,00%*	*97,89%*	BAPPERIDA
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Dokumen	198.000.000	1 Dokumen	194.329.300	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1 Dokumen*	*194.329.300*	*100,00%*	*98,15%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**3.673.900.000**		**3.641.018.364**		**195.000.000**		**95.000.000**		**99.196.720**		-		-		**194.196.720**		**99,59%**	-	**3.835.215.084**		**104,39%**	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus	50 Buku/Kajian	800.000.000	42 Buku/Kajian	1.195.783.261	Buku/Kajian		Buku/Kajian		Buku/Kajian		Buku/Kajian		Buku/Kajian		- *Buku/Kajian*	-	*0,00%*	*0,00%*	*42 Buku/Kajian*	*1.195.783.261*	*84,00%*	*149,47%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Pola Alternatif Pembelajaran di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanggamus dalam masa New	50 Buku/Kajian	803.950.000	42 Buku/Kajian	634.669.600	Buku/Kajian		Buku/Kajian		Buku/Kajian		Buku/Kajian		Buku/Kajian		- *Buku/Kajian*	-	*0,00%*	*0,00%*	*42 Buku/Kajian*	*634.669.600*	*84,00%*	*78,94%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Roadmap Wisata Kuliner Kota Agung dan Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pariwisata Kab.Tanggamus berbasis	100 Buku/Dokumen	2.069.950.000	82 Buku/Dokumen	1.810.565.503	1 Dokumen	195.000.000	0 Dokumen	95.000.000	- Dokumen	99.196.720	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	**194.196.720**	*100,00%*	*99,59%*	*83 Buku/Dokumen*	*2.004.762.223*	*83,00%*	*96,85%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembagan Bidang**		**3.122.900.000**		**2.711.632.400**		**1.036.000.000**		-		-		-		**764.273.490**	-	***764.273.490***		**73,77%**	-	**3.475.905.890**		**111,30%**	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Peran serta	50 Buku/Dokumen	931.200.000	43 Buku/Dokumen	1.093.162.700	1 Dokumen	446.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	179.256.120	*1 Dokumen*	***179.256.120***	*100,00%*	*40,19%*	*44 Buku/Dokumen*	*1.272.418.820*	*88,00%*	*136,64%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Roadmap Pengelolaan Jumlah Dokumen Roadmap Pengelolaan Produk komoditas unggulan Kabupaten	50 Buku	948.000.000	10 Buku	746.968.000	1 Dokumen	181.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	179.043.000	*1 Dokumen*	***179.043.000***	*100,00%*	*98,92%*	*11 Buku*	*926.011.000*	*22,00%*	*97,68%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	50 Buku	639.700.000	40 Buku	504.565.900	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Buku*	*504.565.900*	*80,00%*	*78,88%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	375.000.000	2 Dokumen	366.935.800	1 Dokumen	180.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	178.654.500	*1 Dokumen*	***178.654.500***	*100,00%*	*99,25%*	*3 Dokumen*	*545.590.300*	*150,00%*	*145,49%*	BAPPERIDA
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	229.000.000	Dokumen		1 Dokumen	229.000.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	227.319.870	*1 Dokumen*	***227.319.870***	*100,00%*	*99,27%*	*1 Dokumen*	*227.319.870*	*50,00%*	*99,27%*	BAPPERIDA
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			**1.759.086.500**		**1.655.146.834**		**58.264.900**		**5.319.950**		**1.662.550**		-		**15.000.000**	- -	***21.982.500***		**37,73%**	- -	**1.677.129.334**		**95,34%**	BAPPERIDA
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tanggamus	50 Buku	921.889.000	40 Buku	726.172.600	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Buku*	*726.172.600*	*80,00%*	*78,77%*	BAPPERIDA
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus	50 Buku/Dokumen	837.197.500	41 Buku/Dokumen	928.974.234	1 Dokumen	58.264.900	0 Dokumen	5.319.950	- Dokumen	1.662.550	0 Dokumen	-	1 Dokumen	15.000.000	*1 Dokumen*	***21.982.500***	*100,00%*	*37,73%*	*42 Buku/Dokumen*	*950.956.734*	*84,00%*	*113,59%*	BAPPERIDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**6,93**	**14,29**	**12,14**	-	-	**85,71**	**49,85**	**100,00**	**68,91**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**	**SD**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																								
27			**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**200 %**	**150.525.363.815**	**84,31 %**	**136.191.789.843**	**100 %**	**32.984.508.379**	**7,78 %**	**6.625.895.658**	**43,33 %**	**8.362.546.615**	**12,41 %**	**6.872.528.800**	**36,48 %**	**7.216.554.504**	***100,00 %***	***29.077.525.577***	***100,00%***	***88,16%***	***184,31 %***	***165.269.315.420***	***92,16%***	***109,79%***	BPKD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja**		**325.437.500**		**285.116.300**		**57.536.800**		**10.000.000**		**-**		**-**			**26.004.400**	**-**	***36.004.400***		***62,58%***	**-**	***321.120.700***		***98,67%***	BPKD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daaerah	200 Buku	86.815.000	160 Buku	78.378.500	4 Dokumen	13.710.300	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	9.788.400	***4 Dokumen***	***9.788.400***	***100,00%***	***71,39%***	***164 Buku***	***88.166.900***	***82,00%***	***101,56%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	20 Dokumen	34.190.000	17 Dokumen	32.675.250	1 Dokumen	8.493.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4.399.000	***1 Dokumen***	***4.399.000***	***100,00%***	***51,80%***	***18 Dokumen***	***37.074.250***	***90,00%***	***108,44%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	34.190.000	4 Dokumen	32.075.250	1 Dokumen	8.493.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	4.399.000	***1 Dokumen***	***4.399.000***	***100,00%***	***51,80%***	***5 Dokumen***	***36.474.250***	***100,00%***	***106,68%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	17.315.000	4 Dokumen	14.903.750	1 Dokumen	2.663.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.715.000	***1 Dokumen***	***1.715.000***	***100,00%***	***64,40%***	***5 Dokumen***	***16.618.750***	***100,00%***	***95,98%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	17.315.000	4 Dokumen	14.903.750	1 Dokumen	2.663.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.715.000	***1 Dokumen***	***1.715.000***	***100,00%***	***64,40%***	***5 Dokumen***	***16.618.750***	***100,00%***	***95,98%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen LPPD, LKIP dan LKPJ yamg tersusun tepat waktu	20 Laporan/Dokumen	45.874.500	10 Laporan/Dokumen	35.834.100	3 Laporan/Dokumen	7.899.500	0 Laporan/Dokumen	-	- Laporan/Dokumen	-	2 Laporan/Dokumen	-	1 Laporan/Dokumen	3.988.000	***3 Laporan/Dokumen***	***3.988.000***	***100,00%***	***50,48%***	***13 Laporan/Dokumen***	***39.822.100***	***65,00%***	***86,81%***	BPKD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	89.738.000	4 Dokumen	76.345.700	1 Dokumen	13.615.000	0 Dokumen	10.000.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***10.000.000***	***100,00%***	***73,45%***	***5 Dokumen***	***86.345.700***	***100,00%***	***96,22%***	BPKD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik**		**79.648.192.815**		**73.968.186.905**		**19.586.745.041**		**3.948.881.242**		**4.501.395.945**		**3.963.841.730**		**3.667.295.636**	**-**	***16.081.414.553***		***82,10%***	**-**	***90.049.601.458***		***113,06%***	BPKD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	255 PNS	40.677.510.315	253 PNS	40.804.830.953	49 PNS	11.049.706.941	12 PNS	1.912.750.641	13 PNS	2.305.441.281	12 PNS	2.070.393.066	12 PNS	1.807.323.080	***49 PNS***	***8.095.908.068***	***100,00%***	***73,27%***	***302 PNS***	***48.900.739.021***	***118,43%***	***120,22%***	BPKD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		512 Non PNS/Dokumen	26.968.400.000	435 Non PNS/Dokumen	22.991.950.000	77 Non PNS/Dokumen	3.015.900.000	19 Non PNS/Dokumen	709.264.000	19 Non PNS/Dokumen	615.156.000	19 Non PNS/Dokumen	680.030.000	20 Non PNS/Dokumen	627.690.000	***77 Non PNS/Dokumen***	***2.632.140.000***	***100,00%***	***87,28%***	***512 Non PNS/Dokumen***	***25.624.090.000***	***100,00%***	***95,02%***	BPKD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah SPJ yang Diverifikasi	60 Bulan	11.834.810.000	48 Bulan	10.030.150.752	12 Bulan	5.503.724.000	2 Bulan	1.326.866.601	3 Bulan	1.580.798.664	4 Bulan	1.213.418.664	3 Bulan	1.215.964.556	***12 Bulan***	***5.337.048.485***	***100,00%***	***96,97%***	***60 Bulan***	***15.367.199.237***	***100,00%***	***129,85%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	60 Dokumen/Laporan	50.880.000	56 Dokumen/Laporan	44.743.000	2 Dokumen/Laporan	5.248.000	0 Dokumen/Laporan	-	- Dokumen/Laporan	-	0 Dokumen/Laporan	-	2 Dokumen/Laporan	5.164.000	***2 Dokumen/Laporan***	***5.164.000***	***100,00%***	***98,40%***	***58 Dokumen/Laporan***	***49.907.000***	***96,67%***	***98,09%***	BPKD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang Disiapkan Sebagai Tanggapan Pemeriksaan	15 Dokumen	32.067.500	12 Dokumen	28.500.500	3 Dokumen	6.413.600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	5.504.000	***3 Dokumen***	***5.504.000***	***100,00%***	***85,82%***	***15 Dokumen***	***34.004.500***	***100,00%***	***106,04%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokume Laporan Keuang Bulanan/Semester	39 Dokumen/Laporan	84.525.000	35 Dokumen/Laporan	68.011.700	18 Dokumen/Laporan	5.752.500	0 Dokumen/Laporan	-	- Dokumen/Laporan	-	2 Dokumen/Laporan	-	16 Dokumen/Laporan	5.650.000	***18 Dokumen/Laporan***	***5.650.000***	***100,00%***	***98,22%***	***53 Dokumen/Laporan***	***73.661.700***	***135,90%***	***87,15%***	BPKD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**904.340.000**		**680.325.000**		**77.792.000**		**-**		**3.000.000**		**-**		**2.650.000**	**-**	***5.650.000***		***7,26%***	**-**	***685.975.000***		***75,85%***	BPKD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat/Kursus Pelatihan yang Diikuti Aparatur	34 Kali/Orang	904.340.000	29 Kali/Orang	680.325.000	9 Kali/Orang	77.792.000	0 Kali/Orang	-	- Kali/Orang	3.000.000	0 Kali/Orang	-	9 Kali/Orang	2.650.000	***9 Kali/Orang***	***5.650.000***	***100,00%***	***7,26%***	***38 Kali/Orang***	***685.975.000***	***111,76%***	***75,85%***	BPKD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**14.327.747.250**		**13.755.479.191**		**1.922.388.138**		**88.000.000**		**869.791.412**		**261.816.285**		**537.878.370**	**-**	***1.757.486.067***		***91,42%***	**-**	***15.512.965.258***		***108,27%***	BPKD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	1.917.543.500	48 Bulan	2.376.804.700	12 Bulan	304.113.938	3 Bulan	88.000.000	3 Bulan	32.920.000	3 Bulan	-	3 Bulan	177.100.000	***12 Bulan***	***298.020.000***	***100,00%***	***98,00%***	***60 Bulan***	***2.674.824.700***	***100,00%***	***139,49%***	BPKD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bulan	852.150.000	48 Bulan	738.330.200	12 Bulan	134.625.000	0 Bulan	-	6 Bulan	53.905.950	3 Bulan	28.091.250	3 Bulan	52.017.900	***12 Bulan***	***134.015.100***	***100,00%***	***99,55%***	***60 Bulan***	***872.345.300***	***100,00%***	***102,37%***	BPKD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	2.476.474.250	48 Bulan	2.436.968.300	12 Bulan	321.507.200	0 Bulan	-	6 Bulan	177.541.700	3 Bulan	70.918.000	3 Bulan	73.047.500	***12 Bulan***	***321.507.200***	***100,00%***	***100,00%***	***60 Bulan***	***2.758.475.500***	***100,00%***	***111,39%***	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	1.166.374.500	48 Bulan	1.141.087.100	12 Bulan	307.209.300	0 Bulan	-	6 Bulan	168.869.100	3 Bulan	59.463.100	3 Bulan	78.812.100	*12 Bulan*	*307.144.300*	*100,00%*	*99,98%*	*60 Bulan*	*1.448.231.400*	*100,00%*	*124,17%*	BPKD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Aparatu	1250 Kali/Laporan	7.915.205.000	1050 Kali/Laporan	7.062.288.891	250 Kali/Laporan	854.932.700	0 Kali/Laporan	-	161 Kali/Laporan	436.554.662	0 Kali/Laporan	103.343.935	89 Kali/Laporan	156.900.870	*250 Kali/Laporan*	*696.799.467*	*100,00%*	*81,50%*	*1.300 Kali/Laporan*	*7.759.088.358*	*104,00%*	*98,03%*	BPKD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**		**122.500.000**		**129.558.130**		-		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	*129.558.130*		*105,76%*	BPKD
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	122.500.000	4 Unit	129.558.130	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*129.558.130*	*80,00%*	*105,76%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja**		**51.203.481.250**		**43.241.350.508**		**10.386.326.400**		**2.579.014.416**		**2.677.866.958**		**2.545.997.385**		**2.527.394.863**	-	*10.330.273.622*		*99,46%*	-	*53.571.624.130*		*104,62%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan/Laporan	50.411.343.000	48 Bulan/Laporan	42.619.397.535	12 Bulan/Laporan	10.158.236.000	3 Bulan/Laporan	2.503.014.416	3 Bulan/Laporan	2.621.065.958	3 Bulan/Laporan	2.540.177.385	3 Bulan/Laporan	2.442.538.263	*12 Bulan/Laporan*	*10.106.796.022*	*100,00%*	*99,49%*	*60 Bulan/Laporan*	*52.726.193.557*	*100,00%*	*104,59%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36 Kali/Bulan/Laporan	792.138.250	24 Kali/Bulan/Laporan	621.952.973	12 Kali/Bulan/Laporan	228.090.400	3 Kali/Bulan/Laporan	76.000.000	3 Kali/Bulan/Laporan	56.801.000	3 Kali/Bulan/Laporan	5.820.000	3 Kali/Bulan/Laporan	84.856.600	*12 Kali/Bulan/Laporan*	*223.477.600*	*100,00%*	*97,98%*	*36 Kali/Bulan/Laporan*	*845.430.573*	*100,00%*	*106,73%*	BPKD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan**		**3.993.665.000**		**4.131.773.809**		**953.720.000**		-		**310.492.300**		**100.873.400**		**455.331.235**	- -	*866.696.935*		*90,88%*	- -	*4.998.470.744*		*125,16%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio	45 Unit	1.895.150.000	36 Unit	1.829.909.362	Unit 9	407.030.000	Unit 0	-	Unit 3	168.257.450	3 Unit	86.723.400	3 Unit	98.639.335	*9 Unit*	*353.620.185*	*100,00%*	*86,88%*	*45 Unit*	*2.183.529.547*	*100,00%*	*115,22%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio	55 Unit	326.250.000	48 Unit	269.340.607	Unit 15	68.250.000	Unit 0	-	Unit 2	5.834.850	1 Unit	7.150.000	12 Unit	22.279.900	*15 Unit*	*35.264.750*	*100,00%*	*51,67%*	*63 Unit*	*304.605.357*	*114,55%*	*93,37%*	BPKD
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasio	20 Unit	178.750.000	16 Unit	206.998.520	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*16 Unit*	*206.998.520*	*80,00%*	*115,80%*	BPKD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	1.132.315.000	48 Bulan	1.104.759.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*1.104.759.000*	*80,00%*	*97,57%*	BPKD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	461.200.000	48 Bulan	720.766.320	Bulan 12	478.440.000	0 Bulan	-	6 Bulan	136.400.000	3 Bulan	7.000.000	3 Bulan	334.412.000	*12 Bulan*	*477.812.000*	*100,00%*	*99,87%*	*60 Bulan*	*1.198.578.320*	*100,00%*	*259,88%*	BPKD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**7,78**	**20,09**	**43,33**	**25,35**	**12,41**	**20,84**	**36,48**	**21,88**	**100,00**	**88,16**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**					
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**200 %**	**2.039.927.633.595**	**84,51 %**	**1.689.244.152.406**	**100 %**	**394.418.656.916**	**7,76 %**	**23.637.334.650**	**17,69 %**	**17.553.162.202**	**35,26 %**	##########	**39,28 %**	##########	*100,00 %*	*368.208.648.011*	*100,00%*	*93,35%*	*184,51 %*	##########	*92,26%*	*100,86%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Tersusunya APBD dengan tepat waktu**		**4.824.703.000**		**4.377.967.001**		**847.521.000**		**50.600.000**		**138.595.000**		**146.901.500**		**362.992.120**	-	*699.088.620*		*82,49%*	-	*5.077.055.621*		*105,23%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1400 Buku	798.820.000	1240 Buku	641.423.472	280 Dokumen	84.884.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	110 Dokumen	24.463.500	170 Dokumen	45.840.250	*280 Dokumen*	*70.303.750*	*100,00%*	*82,82%*	*1.520 Buku*	*711.727.222*	*108,57%*	*89,10%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS	1400 Buku	598.820.000	1240 Buku	503.093.746	280 Dokumen	84.884.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	240 Dokumen	39.278.000	40 Dokumen	29.225.000	*280 Dokumen*	*68.503.000*	*100,00%*	*80,70%*	*1.520 Buku*	*571.596.746*	*108,57%*	*95,45%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen PERDA dan PERBUP tentang APBD	1400 Buku	732.635.000	1240 Buku	637.168.512	280 Dokumen	145.343.000	0 Dokumen	-	94 Dokumen	48.950.000	0 Dokumen	-	186 Dokumen	86.549.870	*280 Dokumen*	*135.499.870*	*100,00%*	*93,23%*	*1.520 Buku*	*772.668.382*	*108,57%*	*105,46%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD	1775 Buku	1.075.745.000	1540 Buku	945.726.431	355 Dokumen	164.547.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	165 Dokumen	31.350.000	190 Dokumen	103.200.000	*355 Dokumen*	*134.550.000*	*100,00%*	*81,77%*	*1.895 Buku*	*1.080.276.431*	*106,76%*	*100,42%*	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus	300 Dokumen	1.545.045.000	280 Dokumen	1.650.554.840	60 Dokumen	330.225.000	15 Dokumen	50.600.000	4 Dokumen	53.645.000	18 Dokumen	51.810.000	23 Dokumen	98.177.000	*60 Dokumen*	*254.232.000*	*100,00%*	*76,99%*	*340 Dokumen*	*1.904.786.840*	*113,33%*	*123,28%*	BPKD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran	100 %	73.638.000	%		100 %	37.638.000	0 %	-	48,89 %	36.000.000	0 %	-	51,11 %	-	*100 %*	*36.000.000*	*100,00%*	*95,65%*	*100 %*	*36.000.000*	*100,00%*	*48,89%*	BPKD
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**1.621.087.100**		**1.542.036.250**		**307.832.050**		-		**113.944.200**		**95.405.300**		**183.997.500**	-	*393.347.000*		*127,78%*	-	*1.935.383.250*		*119,39%*	BPKD
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	255 Perangkat Daerah/Dokumen	255.538.500	219 Perangkat Daerah/Dokumen	223.689.850	36 Perangkat Daerah/Dokumen	33.115.150	0 Perangkat Daerah/Dokumen	-	27 Perangkat Daerah/Dokumen	21.855.750	0 Perangkat Daerah/Dokumen	-	9 Perangkat Daerah/Dokumen	11.259.400	*36 Perangkat Daerah/Dokumen*	*33.115.150*	*100,00%*	*100,00%*	*255 Perangkat Daerah/Dokumen*	*256.805.000*	*100,00%*	*100,50%*	BPKD
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	120 Buku/Dokumen	219.167.000	108 Buku/Dokumen	190.189.200	24 Buku/Dokumen	9.370.800	0 Buku/Dokumen	-	10 Buku/Dokumen	9.000.000	0 Buku/Dokumen	-	14 Buku/Dokumen	370.800	*24 Buku/Dokumen*	*9.370.800*	*100,00%*	*100,00%*	*132 Buku/Dokumen*	*199.560.000*	*110,00%*	*91,05%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan n Pemunguta n/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitunga n Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SP Gaji dan Non Gaji Serta	60 Buku/Bulan/Laporan	374.146.500	24 Buku/Bulan/Laporan	491.961.850	8 Buku/Bulan/Laporan	100.519.000	0 Buku/Bulan/Laporan	-	2 Buku/Bulan/Laporan	14.198.700	6 Buku/Bulan/Laporan	-	- Buku/Bulan/Laporan	36.565.900	*8 Buku/Bulan/Laporan*	*50.764.600*	*100,00%*	*50,50%*	*32 Buku/Bulan/Laporan*	*542.726.450*	*53,33%*	*145,06%*	BPKD
			Koordinasi Pelaksanaa n Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	250 Buku/Dokumen	567.025.100	172 Buku/Dokumen	461.046.400	40 Buku/Dokumen	150.000.100	0 Buku/Dokumen	-	18 Buku/Dokumen	68.889.750	12 Buku/Dokumen	81.110.350	10 Buku/Dokumen	135.801.400	*40 Buku/Dokumen*	*285.801.500*	*100,00%*	*190,53%*	*212 Buku/Dokumen*	*746.847.900*	*84,80%*	*131,71%*	BPKD
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Jumlah Pemotongan dan Penyetoran PFK	250 Perangkat Daerah	205.210.000	183 Perangkat Daerah	175.148.950	8 Perangkat Daerah	14.827.000	0 Perangkat Daerah	-	- Perangkat Daerah	-	6 Perangkat Daerah	14.294.950	2 Perangkat Daerah	-	*8 Perangkat Daerah*	*14.294.950*	*100,00%*	*96,41%*	*191 Perangkat Daerah*	*189.443.900*	*76,40%*	*92,32%*	BPKD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**3.327.515.500**		**3.057.950.650**		**386.827.200**		-		**149.330.900**		**81.344.900**		**38.800.000**	-	*269.475.800*		*69,66%*	-	*3.327.426.450*		*100,00%*	BPKD
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	5 Dokumen	1.398.270.000	4 Dokumen	1.277.780.500	1 Dokumen	182.179.800	0 Dokumen	-	- Dokumen	116.330.900	1 Dokumen	41.900.000	- Dokumen	6.600.000	*1 Dokumen*	*164.830.900*	*100,00%*	*90,48%*	*5 Dokumen*	*1.442.611.400*	*100,00%*	*103,17%*	BPKD
			Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusu Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300 OPD/Dokumen	1.069.448.000	260 OPD/Dokumen	943.075.900	24 OPD/Dokumen	74.785.000	0 OPD/Dokumen	-	24 OPD/Dokumen	33.000.000	0 OPD/Dokumen	-	- OPD/Dokumen	14.500.000	*24 OPD/Dokumen*	*47.500.000*	*100,00%*	*63,52%*	*284 OPD/Dokumen*	*990.575.900*	*94,67%*	*92,62%*	BPKD
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	50 Buku	292.360.000	40 Buku	232.359.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Buku*	*232.359.000*	*80,00%*	*79,48%*	BPKD
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah tersusun	50 Buku	292.360.000	40 Buku	232.359.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Buku*	*232.359.000*	*80,00%*	*79,48%*	BPKD
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	250 OPD/Orang	275.077.500	201 OPD/Orang	372.376.250	50 OPD/Orang	129.862.400	0 OPD/Orang	-	- OPD/Orang	-	50 OPD/Orang	39.444.900	- OPD/Orang	17.700.000	*50 OPD/Orang*	*57.144.900*	*100,00%*	*44,00%*	*251 OPD/Orang*	*429.521.150*	*100,40%*	*156,15%*	BPKD
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus yang Dilaksanakan Tepat Waktu**		**2.030.154.327.995**		**1.680.266.198.505**		**392.876.476.666**		**23.586.734.650**		**17.151.292.102**		##########		##########	-	*366.846.736.591*		*93,37%*	-	##########		*100,84%*	BPKD
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus yang Dilaksanakan Tepat Sasaran	1049 Organisasi/Pekon	58.865.675.000	899 Organisasi/Pekon	58.244.188.500	299 Pekon	10.304.200.000	74 Pekon	-	75 Pekon	3.547.214.532	75 Pekon	2.621.643.000	75 Pekon	2.519.000.000	*299 Pekon*	*8.687.857.532*	*100,00%*	*84,31%*	*1.198 Organisasi/Pekon*	*66.932.046.032*	*114,20%*	*113,70%*	BPKD (SKPKD)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Tidak Terduga	100 Kegiatan	50.000.000.000	80 Kegiatan	49.331.006.575	20 Kegiatan	9.000.000.000	5 Kegiatan	2.803.430.000	5 Kegiatan	597.295.072	5 Kegiatan	303.200.000	5 Kegiatan	3.798.457.784	*20 Kegiatan*	*7.502.382.856*	*100,00%*	*83,36%*	*100 Kegiatan*	*56.833.389.431*	*100,00%*	*113,67%*	BPKD (SKPKD)
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pekon yang Mendapatkan Dana Bagi Hasil	1495 Pekon	1.921.288.652.995	1196 Pekon	1.572.691.003.430	299 Pekon	373.572.276.666	74 Pekon	20.783.304.650	75 Pekon	13.006.782.498	75 Pekon	###########	75 Pekon	###########	*299,00 Pekon*	*350.656.496.203*	*100,00%*	*93,87%*	*1.495 Pekon*	*###########*	*100,00%*	*100,11%*	BPKD (SKPKD)
											7,76	**5,99**	**17,69**	**4,45**	**35,26**	**55,15**	**39,28**	**27,76**	**100,00**	**93,35**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**200 %**	**9.573.310.300**	**82,30 %**	**7.326.136.631**	**% 100**	**952.200.000**	**% 0,00**	**-**	**% 9,00**	**70.125.700**	**49,50 %**	**280.826.300**	**26,50 %**	**107.565.600**	*85,00 %*	*458.517.600*	*85,00%*	*48,15%*	*167,30 %*	*7.784.654.231*	*83,65%*	*81,32%*	BPKD
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik**		**9.573.310.300**		**7.326.136.631**		**952.200.000**		**-**		**70.125.700**		**280.826.300**		**107.565.600**	-	*458.517.600*		*48,15%*	-	*7.784.654.231*		*81,32%*	BPKD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	250 OPD/Laporan	340.800.000	201 OPD/Laporan	301.732.781	3 Laporan	181.980.000	0 Laporan	-	- Laporan	31.098.400	0 Laporan	-	3 Laporan	-	*3 Laporan*	*31.098.400*	*100,00%*	*17,09%*	*204 OPD/Laporan*	*332.831.181*	*81,60%*	*97,66%*	BPKD
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Barang Milik Daerah	315 Buah/Laporan	592.150.000	263 Buah/Laporan	545.415.000	48 Buah/Laporan	61.616.700	0 Buah/Laporan	-	- Buah/Laporan	-	48 Buah/Laporan	52.840.000	- Buah/Laporan	-	*48 Buah/Laporan*	*52.840.000*	*100,00%*	*85,76%*	*311 Buah/Laporan*	*598.255.000*	*98,73%*	*101,03%*	BPKD
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan, Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum	5 Dokumen	5.297.718.000	4 Dokumen	3.595.456.280	1 Dokumen	353.877.700	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	96.109.500	1 Dokumen	30.609.600	*1 Dokumen*	*126.719.100*	*100,00%*	*35,81%*	*5 Dokumen*	*3.722.175.380*	*100,00%*	*70,26%*	BPKD
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang Daerah yang dinilai/akan dihapuskan	125 Buku/Laporan	552.006.750	100 Buku/Laporan	576.946.100	25 Buku/Laporan	48.812.500	0 Buku/Laporan	-	17 Buku/Laporan	34.087.100	8 Buku/Laporan	9.152.800	- Buku/Laporan	451.000	*25 Buku/Laporan*	*43.690.900*	*100,00%*	*89,51%*	*125 Buku/Laporan*	*620.637.000*	*100,00%*	*112,43%*	BPKD
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang Dihapuskan	500 Kendaraan/Dokumen	441.849.000	425 Kendaraan/Dokumen	433.725.200	25 Kendaraan/Dokumen	39.498.400	0 Kendaraan/Dokumen	-	- Kendaraan/Dokumen	-	0 Kendaraan/Dokumen	33.804.000	25 Kendaraan/Dokumen	3.155.000	*25 Kendaraan/Dokumen*	*36.959.000*	*100,00%*	*93,57%*	*450 Kendaraan/Dokumen*	*470.684.200*	*90,00%*	*106,53%*	BPKD
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	250 OPD/Laporan	1.913.903.800	201 OPD/Laporan	1.411.557.620	48 OPD/Laporan	165.163.100	0 OPD/Laporan	-	1 OPD/Laporan	4.940.200	23 OPD/Laporan	52.282.000	24 OPD/Laporan	39.030.000	*48 OPD/Laporan*	*96.252.200*	*100,00%*	*58,28%*	*249 OPD/Laporan*	*1.507.809.820*	*99,60%*	*78,78%*	BPKD
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	250 OPD/Orang	434.882.750	201 OPD/Orang	461.303.650	50 OPD/Orang	101.251.600	0 OPD/Orang	-	- OPD/Orang	-	20 OPD/Orang	36.638.000	OPD/Orang	34.320.000	*20 OPD/Orang*	*70.958.000*	*40,00%*	*70,08%*	*221 OPD/Orang*	*532.261.650*	*88,40%*	*122,39%*	BPKD
											-	**-**	**9,00**	**7,36**	**49,50**	**29,49**	**26,50**	**11,30**	**85,00**	**48,15**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**							
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Ratio PAD terhadap total pendapatan daerah**	**200 %**	**4.271.963.800**	**92,17 %**	**3.671.452.360**	**% 100**	**805.220.200**	**% 0,00**	**-**	**% 20,48**	**237.258.450**	**66,44 %**	**200.703.100**	**13,08 %**	**230.204.400**	*100,00 %*	*668.165.950*	*100,00%*	*82,98%*	*192,17 %*	*4.339.618.310*	*96,09%*	*101,58%*	BPKD
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah Analisa Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Retribusi dan Pajak Daerah**		**4.271.963.800**		**3.671.452.360**		**805.220.200**		**-**		**237.258.450**		**200.703.100**		**230.204.400**	-	*668.165.950*		*82,98%*	-	*4.339.618.310*		*101,58%*	BPKD
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Analisa Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Retribusi dan Pajak Daerah	60 Bulan	2.995.600.000	48 Bulan	2.694.240.250	12 Bulan	192.484.400	0 Bulan	-	- Bulan	-	9 Bulan	187.174.000	3 Bulan	2.026.400	*12 Bulan*	*189.200.400*	*100,00%*	*98,29%*	*60 Bulan*	*2.883.440.650*	*100,00%*	*96,26%*	BPKD
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Admininistrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10 Dokumen/Laporan	664.412.800	8 Dokumen/Laporan	316.810.550	1 Dokumen/Laporan	417.065.800	0 Dokumen/Laporan	-	- Dokumen/Laporan	200.000.000	1 Dokumen/Laporan	-	- Dokumen/Laporan	190.044.800	*1 Dokumen/Laporan*	*390.044.800*	*100,00%*	*93,52%*	*9 Dokumen/Laporan*	*706.855.350*	*90,00%*	*106,39%*	BPKD
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60 Bulan	257.231.000	48 Bulan	374.401.800	12 Bulan	111.305.700	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	10.825.700	*12 Bulan*	*10.825.700*	*100,00%*	*9,73%*	*60 Bulan*	*385.227.500*	*100,00%*	*149,76%*	BPKD
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Pemeriksaan Objek Pajak Daerah	1500 Dokumen	77.095.000	1400 Dokumen	71.642.000	100 %	14.335.300	0 %	-	% 24,63	3.530.800	75,37 %	-	(0,00) %	4.864.500	*100,00 %*	*8.395.300*	*100,00%*	*58,56%*	*1.500 Dokumen*	*80.037.300*	*100,00%*	*103,82%*	BPKD
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah	39 Laporan/Dokumen	216.162.500	35 Laporan/Dokumen	159.852.450	4 Laporan/Dokumen	60.736.500	0 Laporan/Dokumen	-	2 Laporan/Dokumen	27.491.400	0 Laporan/Dokumen	13.529.100	2 Laporan/Dokumen	19.404.000	*4 Laporan/Dokumen*	*60.424.500*	*100,00%*	*99,49%*	*39 Laporan/Dokume*	*220.276.950*	*100,00%*	*101,90%*	BPKD
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan Tentang Intisifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 Dokumen	61.462.500	4 Dokumen	54.505.310	1 Dokumen	9.292.500	0 Dokumen	-	- Dokumen	6.236.250	1 Dokumen	-	- Dokumen	3.039.000	*1 Dokumen*	*9.275.250*	*100,00%*	*99,81%*	*5 Dokumen*	*63.780.560*	*100,00%*	*103,77%*	BPKD
											-	**-**	**20,48**	**29,47**	**66,44**	**24,93**	**13,08**	**28,59**	**100,00**	**82,98**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**							
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																								
28			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**22.139.134.635**	**60,99 %**	**21.409.949.280**	**% 100**	**4.653.770.595**	**% 4,24**	**903.407.376**	**% 44,07**	**1.159.131.615**	**% 23,16**	**1.170.466.227**	**% 11,02**	**950.397.012**	***82,49 %***	***4.183.402.230***	***82,49%***	***89,89%***	***143,47 %***	***25.593.351.510***	***71,74%***	***115,60%***	BKPSDM
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan		**58.497.600**		**54.081.900**		**12.920.700**		**-**		**2.400.000**		**-**		**1.554.600**	**-**	***3.954.600***		***30,61%***	**-**	***58.036.500***		***99,21%***	BKPSDM
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	25 Buku/ Dokumen	27.297.600	21 Buku/ Dokumen	24.655.800	5 Buku/ Dokumen	9.775.200	0 Buku /Dokumen	-	1 Buku /Dokumen	2.400.000	0 Buku/ Dokumen	-	- Buku/Dokumen	-	***1 Buku/ Dokumen***	***2.400.000***	***20,00%***	***24,55%***	***22 Buku/ Dokumen***	***27.055.800***	***88,00%***	***99,11%***	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	250 Eksemplar Dokumen	4.800.000	202 Eksemplar Dokumen	4.698.000	1 Eksemplar Dokumen	210.600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	210.600	***1 Eksemplar Dokumen***	***210.600***	***100,00%***	***100,00%***	***203 Eksemplar Dokumen***	***4.908.600***	***81,20%***	***102,26%***	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250 Eksemplar Dokumen	5.100.000	202 Eksemplar Dokumen	4.953.000	1 Eksemplar Dokumen	450.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	450.000	***1 Eksemplar Dokumen***	***450.000***	***100,00%***	***100,00%***	***203 Eksemplar Dokumen***	***5.403.000***	***81,20%***	***105,94%***	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-RKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.850.000	52 Eksemplar Dokumen	5.787.000	20 Eksemplar Dokumen	525.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	525.000	***- Eksemplar Dokumen***	***525.000***	***0,00%***	***100,00%***	***52 Eksemplar Dokumen***	***6.312.000***	***104,00%***	***107,90%***	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6.600.000	45 Eksemplar Dokumen	6.145.500	1 Eksemplar Dokumen	600.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	369.000	***1 Eksemplar Dokumen***	***369.000***	***100,00%***	***61,50%***	***46 Eksemplar Dokumen***	***6.514.500***	***92,00%***	***98,70%***	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	40 Eksemplar Dokumen/Laporan	4.800.000	33 Eksemplar Dokumen/Laporan	4.257.000	3 Laporan	789.900	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	***- Laporan***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***33 Eksemplar Dokumen/Laporan***	***4.257.000***	***82,50%***	***88,69%***	BKPSDM
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangakat Daerah	500 Eksemplar Dokumen/Laporan	4.050.000	403 Eksemplar Dokumen/Laporan	3.585.600	3 Laporan	570.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	3 Laporan	-	***3 Laporan***	***-***	***100,00%***	***0,00%***	***406 Eksemplar Dokumen/Laporan***	***3.585.600***	***81,20%***	***88,53%***	BKPSDM
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**16.777.478.485**		**16.897.975.935**		**3.808.753.745**		**837.221.962**		**974.559.531**		**1.037.207.426**		**740.992.228**	**-**	***3.589.981.147***		***94,26%***	**-**	***20.487.957.082***		***122,12%***	BKPSDM
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang	13.817.978.485	161 Orang	14.421.170.935	34 Orang	3.278.031.745	9 Orang	719.996.962	8 Orang	832.914.531	9 Orang	909.242.426	8 Orang	610.467.228	***34 Orang***	***3.072.621.147***	***100,00%***	***93,73%***	***195 Orang***	***17.493.792.082***	***103,17%***	***126,60%***	BKPSDM
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksana Tugas ASN	125 Orang	2.534.400.000	101 Orang	2.113.600.000	25 Orang	468.900.000	6 Orang	117.225.000	6 Orang	117.225.000	6 Orang	117.225.000	7 Orang	117.225.000	***25 Orang***	***468.900.000***	***100,00%***	***100,00%***	***126 Orang***	***2.582.500.000***	***100,80%***	***101,90%***	BKPSDM
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifi Keuangan SKPD	60 Kali/Dokumen	420.000.000	48 Kali/Dokumen	358.900.000	12 Kali	61.300.000	0 Kali	-	4 Kali	24.420.000	1 Kali	10.740.000	5 Kali	13.300.000	***10 Kali***	***48.460.000***	***83,33%***	***79,05%***	***58 Kali/Dokumen***	***407.360.000***	***96,67%***	***96,99%***	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Buku/ Laporan	5.100.000	21 Buku/ Laporan	4.305.000	1 Laporan	522.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	-	***1 Laporan***	***-***	***100,00%***	***0,00%***	***22 Buku/ Laporan***	***4.305.000***	***88,00%***	***84,41%***	BKPSDM
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik**		**126.000.000**		**99.621.800**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	***99.621.800***		***79,06%***	BKPSDM
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	610 Stel	126.000.000	427 Stel	99.621.800	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		***- Stel***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***427 Stel***	***99.621.800***	***70,00%***	***79,06%***	BKPSDM
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik**		**2.635.592.300**		**2.212.203.925**		**394.818.350**		**22.466.000**		**96.764.595**		**59.766.330**		**130.719.272**	**-**	***309.716.197***		***78,45%***	**-**	***2.521.920.122***		***95,69%***	BKPSDM
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	5190 Unit/Paket	66.978.000	3332 Unit/Paket	58.121.200	Unit/Paket		Unit/Paket		Unit/Paket		Unit/Paket		Unit/Paket		***- Unit/Paket***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***3.332 Unit/Paket***	***58.121.200***	***64,20%***	***86,78%***	BKPSDM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Unit/Paket	184.981.300	23 Unit/Paket	164.068.640	4 Paket	81.307.500	0 Paket	225.000	1 Paket	9.523.000	0 Paket	18.230.500	- Paket	4.675.000	***1 Paket***	***32.653.500***	***25,00%***	***40,16%***	***24 Unit/Paket***	***196.722.140***	***96,00%***	***106,35%***	BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minumanuntuk Keperluan Rutin	8950 Porsi/ Paket	197.000.000	5931 Porsi/ Paket	144.282.000	4 Paket	27.495.000	0 Paket	2.930.000	1 Paket	2.990.000	1 Paket	5.615.000	1 Paket	6.228.500	*3 Paket*	*17.763.500*	*75,00%*	*64,61%*	*5.934 Porsi/ Paket*	*162.045.500*	*66,30%*	*82,26%*	BKPSDM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	7500 Eksemplar	309.755.500	4682 Eksemplar	270.878.600	4 Paket	49.531.350	0 Paket	-	1 Paket	17.879.713	1 Paket	5.600.000	1 Paket	15.545.500	*3 Paket*	*39.025.213*	*75,00%*	*78,79%*	*4.685 Eksemplar*	*309.903.813*	*62,47%*	*100,05%*	BKPSDM
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	##### Buah/ Paket	259.567.500	#### Buah/ Paket	236.732.040	4 Paket	50.552.500	0 Paket	-	1 Paket	22.807.799	1 Paket	5.400.000	1 Paket	12.688.700	*3 Paket*	*40.896.499*	*75,00%*	*80,90%*	*###### Buah/ Paket*	*277.628.539*	*60,42%*	*106,96%*	BKPSDM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1735 Kali/Laporan	1.617.310.000	1145 Kali/Laporan	1.338.121.445	200 Laporan	185.932.000	0 Laporan	19.311.000	123 Laporan	43.564.083	57 Laporan	24.920.830	- Laporan	91.581.572	*180 Laporan*	*179.377.485*	*90,00%*	*96,47%*	*1.325 Kali/Laporan*	*1.517.498.930*	*76,37%*	*93,83%*	BKPSDM
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersusunya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**238.631.250**		**174.186.250**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*174.186.250*		*72,99%*	BKPSDM
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	238.631.250	25 Unit	174.186.250	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*25 Unit*	*174.186.250*	*71,43%*	*72,99%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**1.027.585.000**		**889.327.166**		**234.024.000**		**30.819.414**		**37.406.954**		**27.730.921**		**35.163.212**	-	*131.120.501*		*56,03%*	-	*1.020.447.667*		*99,31%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	375 Buah/ Unit	20.250.000	235 Buah/ Unit	13.697.500	Buah/ Unit		Buah /Unit		Buah /Unit		Buah/ Unit		Buah/Unit		- *Buah/ Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*235 Buah/ Unit*	*13.697.500*	*62,67%*	*67,64%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan /Laporan	779.785.000	48 Bulan /Laporan	719.299.666	12 Laporan	218.464.000	0 Laporan	20.156.154	6 Laporan	34.048.954	3 Laporan	27.730.921	3 Laporan	35.163.212	*12 Laporan*	*117.099.241*	*100,00%*	*53,60%*	*60 Bulan /Laporan*	*836.398.907*	*100,00%*	*107,26%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	227.550.000	4 Kali	156.330.000	1 Laporan	15.560.000	0 Laporan	10.663.260	- Laporan	3.358.000	1 Laporan	-	- Laporan	-	*1 Laporan*	*14.021.260*	*100,00%*	*90,11%*	*5 Kali*	*170.351.260*	*100,00%*	*74,86%*	BKPSDM
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik		**1.275.350.000**		**1.082.552.304**		**203.253.800**		**12.900.000**		**48.000.535**		**45.761.550**		**41.967.700**	-	*148.629.785*		*73,13%*	-	*1.231.182.089*		*96,54%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	5 Unit	223.350.000	4 Unit	190.812.021	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*190.812.021*	*80,00%*	*85,43%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	25 Unit	635.300.000	19 Unit	581.293.525	Unit 12	183.878.800	Unit 0	12.900.000	Unit 3	32.368.915	2 Unit	44.761.550	4 Unit	41.967.700	*9 Unit*	*131.998.165*	*75,00%*	*71,79%*	*28 Unit*	*713.291.690*	*112,00%*	*112,28%*	BKPSDM
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	137.950.000	21 Unit	92.165.000	Unit 6	4.390.000	Unit 0	-	Unit -	655.500	0 Unit	1.000.000	2 Unit	-	*2 Unit*	*1.655.500*	*33,33%*	*37,71%*	*23 Unit*	*93.820.500*	*76,67%*	*68,01%*	BKPSDM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dengan Baik	10 Unit	278.750.000	9 Unit	218.281.758	Unit 1	14.985.000	Unit 0	-	Unit 1	14.976.120	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*14.976.120*	*100,00%*	*99,94%*	*10 Unit*	*233.257.878*	*100,00%*	*83,68%*	BKPSDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**4,24**	**19,41**	**44,07**	**24,91**	**23,16**	**25,15**	**11,02**	**20,42**	**82,49**	**89,89**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik**	**200**	**14.010.783.240**	**73,42 %**	**10.158.609.344**	**100 %**	**1.021.939.300**	**0,00 %**	**4.935.000**	**2,38 %**	**4.527.000**	**0,60 %**	**285.409.000**	**3,57 %**	**5.580.300**	*6,55 %*	*300.451.300*	*6,55%*	*29,40%*	*79,96 %*	*10.459.060.644*	*39,98%*	*74,65%*	BKPSDM
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Terlaksanannya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**8.142.487.000**		**5.802.363.400**		**222.920.800**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*5.802.363.400*		*71,26%*	BKPSDM
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	40000 Pelamar/Dokumen	6.687.203.000	28513 Pelamar/Dokumen	4.806.327.500	2 Dokumen	40.163.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*28.513 Pelamar/Dokumen*	*4.806.327.500*	*71,28%*	*71,87%*	BKPSDM
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Buku Profil/ Dokumen	471.160.000	9 Buku Profil/ Dokumen	314.187.200	1 Dokumen	1.440.200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Buku Profil/ Dokumen*	*314.187.200*	*90,00%*	*66,68%*	BKPSDM
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Penyelenggara Negara Pemerintah Kab.Tanggamus yang Melapor Harta Kekayaannya	750 Penyelengara Negara/Dokumen	114.199.000	597 Penyelengara Negara/Dokumen	87.933.700	146 Dokumen	16.086.900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	Dokumen		*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*597 Penyelengara Negara/Dok*	*87.933.700*	*79,60%*	*77,00%*	BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	10000 Dokumen/Laporan	869.925.000	8000 Dokumen/Laporan	593.915.000	2 Laporan	165.230.700	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	-	*2 Laporan*	*-*	*100,00%*	*0,00%*	*8.002 Dokumen/Laporan*	*593.915.000*	*80,02%*	*68,27%*	BKPSDM
			Mutasi dan Promosi ASN	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi PNS sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja**		**4.780.935.400**		**3.519.662.340**		**791.766.000**		**-**		**4.527.000**		**285.409.000**		**5.580.300**	*-*	*295.516.300*		*37,32%*	*-*	*3.815.178.640*		*79,80%*	BKPSDM
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS	50 Kali	273.314.000	40 Kali	174.137.200	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		*- Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*40 Kali*	*174.137.200*	*80,00%*	*63,71%*	BKPSDM
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6500 SK	189.508.300	4851 SK	127.710.980	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		*- Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4.851 SK*	*127.710.980*	*74,63%*	*67,39%*	BKPSDM
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan PTP dan Penataan Jabatan PTP	32 Selter dan Penataan/Dokumen	4.318.113.100	27 Selter dan Penataan/Dokumen	3.217.814.160	Dokumen 2	791.766.000	Dokumen 0	-	Dokumen -	4.527.000	1 Dokumen	285.409.000	- Dokumen	5.580.300	*1 Dokumen*	*295.516.300*	*50,00%*	*37,32%*	*28 Selter dan Penataan/Dokumen*	*3.513.330.460*	*87,50%*	*81,36%*	BKPSDM
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksanannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS dalam Jabatan Administrator, Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten**		**1.087.360.840**		**836.583.604**		**7.252.500**		**4.935.000**		**-**		**-**		**-**	*-*	*4.935.000*		*68,05%*	*-*	*841.518.604*		*77,39%*	BKPSDM
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3000 ASN/Dokumen	492.000.000	2261 ASN/Dokumen	378.434.400	ASN/Dokumen		ASN/Dokumen		ASN/Dokumen		ASN/Dokumen		ASN/Dokumen	*- ASN/Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*2.261 ASN/Dokumen*	*378.434.400*	*75,37%*	*76,92%*	BKPSDM
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan Disiplin ASN	45 Kali/Orang	595.360.840	36 Kali/Orang	458.149.204	15 Orang	7.252.500	0 Orang	4.935.000	4 Orang	-	0 Orang	-	4 Orang	-	*8 Orang*	*4.935.000*	*53,33%*	*68,05%*	*44 Kali/Orang*	*463.084.204*	*97,78%*	*77,78%*	BKPSDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**0,48**	**2,38**	**0,44**	**0,60**	**27,93**	**3,57**	**0,55**	**6,55**	**29,40**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang berperidikat Memuaskan**	**200 %**	**13.680.849.750**	**79,22 %**	**10.780.845.600**	**100 %**	**520.042.800**	**0,00 %**	**-**	**50,00 %**	**343.470.000**	**0,00 %**	**5.050.000**	**50,00 %**	**164.915.000**	*100,00 %*	*513.435.000*	*100,00%*	*98,73%*	*179,22 %*	*11.294.280.600*	*89,61%*	*82,56%*	BKPSDM
			Pengembangan Kompetensi Teknis			**107.135.000**		**21.375.000**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	*-*	*-*		*0,00%*	*-*	*21.375.000*		*19,95%*	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5 Orang	107.135.000	1 Orang	21.375.000	CPNS dan PNS		CPNS dan PNS		CPNS dan PNS		CPNS dan PNS		CPNS dan PNS		*- CPNS dan PNS*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*1 Orang*	*21.375.000*	*20,00%*	*19,95%*	BKPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Terlaksanannya Pengembangan Kompetensi ASN dan Sertifikasi Kompetensi**		**13.573.714.750**		**10.759.470.600**		**520.042.800**		**-**		**343.470.000**		**5.050.000**		**164.915.000**	*-*	*513.435.000*		*98,73%*	*-*	*11.272.905.600*		*83,05%*	BKPSDM
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengiriman Peserta Pengembangan Kompetensi Kabupaten Tanggamus	25 PNS	98.691.000	15 PNS	59.214.600	PNS		PNS		PNS		PNS		PNS		*- PNS*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*15 PNS*	*59.214.600*	*60,00%*	*60,00%*	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Penyelenggaraa Pengembangan Kompetensi Bag Pimpinan yang berperidikat Memuaskan	1385 CPNS dan PNS	13.475.023.750	1105 CPNS dan PNS	10.700.256.000	Laporan 2	520.042.800	Laporan 0	-	Laporan 1	343.470.000	0 Laporan	5.050.000	1 Laporan	164.915.000	*2 Laporan*	*513.435.000*	*100,00%*	*98,73%*	*1.107 CPNS dan PNS*	*11.213.691.000*	*79,93%*	*83,22%*	BKPSDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	**-**	**50,00**	**66,05**	**-**	**0,97**	**50,00**	**31,71**	**100,00**	**98,73**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
29			**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**			-		-																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**2.555.611.000**	**74,49 %**	**2.320.286.894**	**100 %**	**314.662.868**	**4,88 %**	**61.755.112**	**24,39 %**	**89.201.092**	**14,63 %**	**57.331.506**	**34,15 %**	**91.992.733**	*78,05 %*	*300.280.443*	*78,05%*	*95,43%*	*152,54 %*	*2.620.567.337*	*76,27%*	*102,54%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**61.631.000**		**45.251.000**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	*-*	*-*		*0,00%*	*-*	*45.251.000*		*73,42%*	SEKRETRIAT DP KORPRI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra , Renja dan Perubahannya	80 Buku/ Dokumen	16.992.500	64 Buku/ Dokumen	11.704.600	0 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*64 Buku/ Dokumen*	*11.704.600*	*80,00%*	*68,88%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	150 Eksemplar Dokumen	29.006.500	120 Eksemplar Dokumen	21.640.200	0 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*120 Eksemplar Dokumen*	*21.640.200*	*80,00%*	*74,60%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	150 Eksemplar Dokumen	3.953.000	120 Eksemplar Dokumen	3.162.400	0 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*120 Eksemplar Dokumen*	*3.162.400*	*80,00%*	*80,00%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2.643.000	60 Eksemplar Dokumen	1.585.800	0 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*1.585.800*	*80,00%*	*60,00%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2.553.000	60 Eksemplar Dokumen	1.909.800	0 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*1.909.800*	*80,00%*	*74,81%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	90 Eksemplar Dokumen	1.446.000	72 Eksemplar Dokumen	1.263.000	0 Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*72 Eksemplar Dokumen*	*1.263.000*	*80,00%*	*87,34%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	45 Eksemplar Dokumen	5.037.000	33 Eksemplar Dokumen	3.985.200	0 Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*33 Eksemplar Dokumen*	*3.985.200*	*73,33%*	*79,12%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**1.535.818.000**		**1.494.993.480**		**261.068.568**		**61.755.112**		**60.712.556**		**45.056.792**		**82.378.983**	-	*249.903.443*		*95,72%*	-	*1.744.896.923*		*113,61%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	982.800.000	16 Orang	959.058.080	4 Orang	186.438.568	1 Orang	45.855.112	1 Orang	37.502.556	1 Orang	30.736.792	1 Orang	61.178.983	*4 Orang*	*175.273.443*	*100,00%*	*94,01%*	*20 Orang*	*1.134.331.523*	*100,00%*	*115,42%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	25 Orang	340.500.000	20 Orang	364.550.000	5 Orang	64.250.000	1 Orang	15.900.000	2 Orang	16.290.000	1 Orang	10.860.000	1 Orang	21.200.000	*5 Orang*	*64.250.000*	*100,00%*	*100,00%*	*25 Orang*	*428.800.000*	*100,00%*	*125,93%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60 Kali/Dokumen	200.450.000	46 Kali/Dokumen	160.410.000	12 Dokumen	10.380.000	0 Dokumen	-	3 Dokumen	6.920.000	0 Dokumen	3.460.000	- Dokumen	-	*3 Dokumen*	*10.380.000*	*25,00%*	*100,00%*	*49 Kali/Dokumen*	*170.790.000*	*81,67%*	*85,20%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Buku/ Laporan	12.068.000	12 Buku/ Laporan	10.975.400	0 Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Buku/ Laporan*	*10.975.400*	*80,00%*	*90,95%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**544.653.500**		**454.303.376**		**4.608.300**		-		**2.018.000**		**498.200**		**1.758.900**	-	*4.275.100*		*92,77%*	-	*458.578.476*		*84,20%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 Unit/Paket	19.522.000	23 Unit/Paket	23.413.900	1 Paket	1.040.000	0 Paket	-	1 Paket	1.040.000	0 Paket	-	Paket		*1 Paket*	*1.040.000*	*100,00%*	*100,00%*	*24 Unit/ Paket*	*24.453.900*	*88,89%*	*125,26%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	480 Porsi/ Paket	21.600.000	352 Porsi/ Paket	16.167.600	0 Paket	-	Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*352 Porsi/ Paket*	*16.167.600*	*73,33%*	*74,85%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1115 Eksemplar/Paket	41.078.000	791 Eksemplar/Paket	35.641.000	1 Paket	596.400	0 Paket	-	- Paket	-	1 Paket	498.200	- Paket	-	*1 Paket*	*498.200*	*100,00%*	*83,53%*	*792 Eksemplar/Paket*	*36.139.200*	*71,03%*	*87,98%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya	870 Buah/ Paket	31.038.500	684 Buah/ Paket	28.398.000	4 Paket	2.971.900	0 Paket	-	1 Paket	978.000	0 Paket	-	3 Paket	1.758.900	*4 Paket*	*2.736.900*	*100,00%*	*92,09%*	*688 Buah/ Paket*	*31.134.900*	*79,08%*	*100,31%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali/Laporan	431.415.000	190 Kali/Laporan	350.682.876	0 Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*190 Kali/Laporan*	*350.682.876*	*63,33%*	*81,29%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penerintah Daerah**		**164.213.500**		**124.257.938**		**35.649.000**		-		**21.535.736**		**6.419.114**		**5.287.450**	- -	*33.242.300*		*93,25%*	- -	*157.500.238*		*95,91%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	60 Kali/Laporan	58.173.500	48 Kali/Laporan	48.833.938	12 Laporan	13.685.000	0 Laporan	-	- Laporan	1.261.450	3 Laporan	6.004.400	9 Laporan	5.176.850	*12 Laporan*	*12.442.700*	*100,00%*	*90,92%*	*60 Kali/Laporan*	*61.276.638*	*100,00%*	*105,33%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	106.040.000	4 Kali	75.424.000	1 Laporan	21.964.000	0 Laporan	-	1 Laporan	20.274.286	0 Laporan	414.714	- Laporan	110.600	*1 Laporan*	*20.799.600*	*100,00%*	*94,70%*	*5 Kali*	*96.223.600*	*100,00%*	*90,74%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**249.295.000**		**201.481.100**		**13.337.000**		-		**4.934.800**		**5.357.400**		**2.567.400**	-	*12.859.600*		*96,42%*	-	*214.340.700*		*85,98%*	SEKRETRIAT DP KORPRI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit Mobil	210.520.000	4 Unit Mobil	171.976.600	1 Unit Mobil	13.337.000	0 Unit Mobil	-	1 Unit Mobil	4.934.800	0 Unit Mobil	5.357.400	- Unit Mobil	2.567.400	*1 Unit Mobil*	*12.859.600*	*100,00%*	*96,42%*	*5 Unit Mobil*	*184.836.200*	*100,00%*	*87,80%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Bulan	17.850.000	42 Bulan	13.014.500	0 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*42 Bulan*	*13.014.500*	*70,00%*	*72,91%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	20.925.000	4 Unit	16.490.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*16.490.000*	*80,00%*	*78,81%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**4,88**	**19,63**	**24,39**	**28,35**	**14,63**	**18,22**	**34,15**	**29,24**	**78,05**	**95,43**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**						
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik**	**200 %**	**698.461.000**	**97,29 %**	**433.982.850**	**%**	-	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	*- %*	-	*0,00%*	*0,00%*	*97,29 %*	*433.982.850*	*48,64%*	*62,13%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi**		**698.461.000**		**433.982.850**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-		*0,00%*	-	*433.982.850*		*62,13%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	221 Kali	698.461.000	215 Kali	433.982.850	Orang 0	-	Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*215 Kali*	*433.982.850*	*97,29%*	*62,13%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH			-		-																		
30			**INSPEKTORAT**			-		-																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**52.729.698.270**	**#### %**	**52.426.523.465**	**100 %**	**11.982.519.674**	**25,09 %**	**2.411.879.792**	**14,38 %**	**2.823.276.354**	**25,40 %**	**2.732.714.924**	**15,31 %**	**2.609.384.428**	*80,18 %*	*10.577.255.498*	*80,18%*	*88,27%*	*217,45 %*	*63.003.778.963*	*108,73%*	*119,48%*	INSPEKTORAT
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu**		**196.403.000**		**182.710.900**		**39.454.900**		**1.800.000**		**5.158.500**		**1.492.500**		**5.100.000**	-	*13.551.000*		*34,35%*	-	*196.261.900*		*99,93%*	INSPEKTORAT
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	50 Dokumen	117.028.000	40 Dokumen	113.535.000	10 Dokumen	24.013.200	0 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	3.600.000	0 Dokumen	-	5 Dokumen	3.500.100	*7 Dokumen*	*8.900.100*	*70,00%*	*37,06%*	*47 Dokumen*	*122.435.100*	*94,00%*	*104,62%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	33.822.000	116 Eksemplar Dokumen	28.185.000	29 Dokumen	5.637.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	7 Dokumen	1.492.500	1 Dokumen	107.400	*8 Dokumen*	*1.599.900*	*27,59%*	*28,38%*	*124 Eksemplar Dokumen*	*29.784.900*	*85,52%*	*88,06%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	28.185.000	116 Eksemplar Dokumen	25.538.400	29 Dokumen	5.637.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	7 Dokumen	1.492.500	*7 Dokumen*	*1.492.500*	*24,14%*	*26,48%*	*123 Eksemplar Dokumen*	*27.030.900*	*84,83%*	*95,91%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	4.440.000	87 Eksemplar Dokumen	3.552.000	29 Dokumen	888.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*87 Eksemplar Dokumen*	*3.552.000*	*60,00%*	*80,00%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	4.440.000	87 Eksemplar Dokumen	3.145.500	29 Dokumen	888.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*87 Eksemplar Dokumen*	*3.145.500*	*60,00%*	*70,84%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Eksemplar Dokumen	4.166.000	45 Eksemplar Dokumen	3.738.900	10 Dokumen	833.200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*45 Eksemplar Dokumen*	*3.738.900*	*90,00%*	*89,75%*	INSPEKTORAT
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	45 Eksemplar Dokumen	4.322.000	36 Eksemplar Dokumen	5.016.100	12 Laporan	1.558.500	0 Laporan	-	12 Laporan	1.558.500	0 Laporan	-	- Laporan	-	*12 Laporan*	*1.558.500*	*100,00%*	*100,00%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*6.574.600*	*106,67%*	*152,12%*	INSPEKTORAT
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum Tersusunnya Laporan Administasi Umum Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Tersusunnya Laporan**		**45.100.232.470**		**45.868.984.803**		**10.547.420.474**		**2.310.893.161**		**2.377.719.931**		**2.600.030.894**		**2.343.450.490**	-	*9.632.094.476*		*91,32%*	-	*55.501.079.279*		*123,06%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	43.066.113.470	200 Orang	43.877.003.403	56 Orang	10.113.036.674	21 Orang	2.220.463.161	7 Orang	2.282.666.131	14 Orang	2.507.320.894	14 Orang	2.246.130.490	*56 Orang*	*9.256.580.676*	*100,00%*	*91,53%*	*256 Orang*	*53.133.584.079*	*111,30%*	*123,38%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	80 Orang	1.479.900.000	64 Orang	1.501.970.000	16 Orang	319.980.000	4 Orang	79.950.000	4 Orang	79.950.000	4 Orang	79.950.000	4 Orang	79.950.000	*16 Orang*	*319.800.000*	*100,00%*	*99,94%*	*80 Orang*	*1.821.770.000*	*100,00%*	*123,10%*	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	554.219.000	47 Kali	490.011.400	Kali 12	114.403.800	Kali 1	10.480.000	Kali 2	15.103.800	2 Kali	12.760.000	3 Kali	17.370.000	*8 Kali*	*55.713.800*	*66,67%*	*48,70%*	*55 Kali*	*545.725.200*	*91,67%*	*98,47%*	INSPEKTORAT
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Kasus Disiplin Aparatur Inspektorat Daerah Kab.Tanggamus**		**1.041.125.000**		**853.228.005**		**290.713.000**		**7.067.600**		**78.111.600**		**63.060.854**		**58.883.500**	*- -*	*207.123.554*		*71,25%*	*- -*	*1.060.351.559*		*101,85%*	INSPEKTORAT
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Seragam Batik	670 Stel/pcs	218.625.000	536 Stel/pcs	176.425.000	Stel/pcs		Stel/pcs		Stel/pcs		Stel/pcs		Stel/pcs	*- Stel/pcs*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*536 Stel/pcs*	*176.425.000*	*80,00%*	*80,70%*	INSPEKTORAT
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230 ASN	822.500.000	196 ASN	676.803.005	ASN 56	290.713.000	ASN 0	7.067.600	ASN 4	78.111.600	9 ASN	63.060.854	43 ASN	58.883.500	*56 ASN*	*207.123.554*	*100,00%*	*71,25%*	*252 ASN*	*883.926.559*	*109,57%*	*107,47%*	INSPEKTORAT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**		**3.173.037.800**		**2.604.686.395**		**651.352.900**		**73.982.400**		**234.250.242**		**46.573.100**		**77.430.000**	*-*	*432.235.742*		*66,36%*	*-*	*3.036.922.137*		*95,71%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180 Unit	1.508.839.300	171 Unit	1.124.686.635	Paket 4	342.962.300	Paket 3	25.154.000	Paket -	167.868.942	0 Paket	6.953.700	1 Paket	20.746.000	*4 Paket*	*220.722.642*	*100,00%*	*64,36%*	*175 Unit*	*1.345.409.277*	*97,22%*	*89,17%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	5000 Kotak	315.250.000	14458 Kotak	262.502.000	Paket 1.000	73.545.000	Paket 360	25.632.200	Paket 40	18.472.300	350 Paket	12.620.300	150 Paket	10.527.000	*900 Paket*	*67.251.800*	*90,00%*	*91,44%*	*15.358 Kotak*	*329.753.800*	*307,16%*	*104,60%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	2040 Eksemplar	150.593.500	1920 Eksemplar	146.859.375	Paket 120	32.167.700	Paket 30	6.420.100	Paket 30	9.169.200	0 Paket	6.419.200	44 Paket	6.075.400	*104 Paket*	*28.083.900*	*86,67%*	*87,30%*	*2.024 Eksemplar*	*174.943.275*	*99,22%*	*116,17%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	11900 Buah	223.709.000	11200 Buah	228.320.398	Paket 700	52.447.300	Paket 140	7.850.300	Paket 210	17.784.800	175 Paket	9.941.700	63 Paket	8.629.000	*588 Paket*	*44.205.800*	*84,00%*	*84,29%*	*11.788 Buah*	*272.526.198*	*99,06%*	*121,82%*	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	974.646.000	241 Kali	842.317.987	Kali 60	150.230.600	Kali 1	8.925.800	Kali 2	20.955.000	1 Kali	10.638.200	- Kali	31.452.600	*4 Kali*	*71.971.600*	*6,67%*	*47,91%*	*245 Kali*	*914.289.587*	*81,67%*	*93,81%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**		**923.910.000**		**912.899.812**		**230.842.000**		**18.136.631**		**72.459.181**		**19.627.576**		**66.395.438**	*-*	*176.618.826*		*76,51%*	*-*	*1.089.518.638*		*117,92%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	923.910.000	48 Kali	912.899.812	Kali 12	230.842.000	Kali 2	18.136.631	Kali 4	72.459.181	3 Kali	19.627.576	3 Kali	66.395.438	*12 Kali*	*176.618.826*	*100,00%*	*76,51%*	*60 Kali*	*1.089.518.638*	*100,00%*	*117,92%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	56.090.000	4 Laporan	40.072.000	Laporan 1	6.338.000	Laporan 0	-	Laporan -	300.000	0 Laporan	225.000	- Laporan	375.000	*- Laporan*	*900.000*	*0,00%*	*14,20%*	*4 Laporan*	*40.972.000*	*80,00%*	*73,05%*	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**		**2.294.990.000**		**2.004.013.550**		**222.736.400**		**-**		**55.576.900**		**1.930.000**		**58.125.000**	*-*	*115.631.900*		*51,91%*	*-*	*2.119.645.450*		*92,36%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara Secara Rutin	5 Unit	596.640.000	4 Unit	469.482.700	Unit 1	49.670.000	Unit 0	-	Unit -	12.464.000	Unit 1	-	- Unit	5.632.000	*1 Unit*	*18.096.000*	*100,00%*	*36,43%*	*5 Unit*	*487.578.700*	*100,00%*	*81,72%*	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	102 Unit	1.402.900.000	96 Unit	1.259.936.850	Unit 9	123.376.400	Unit 0	-	Unit -	9.972.900	Unit 2	550.000	3 Unit	51.273.000	*5 Unit*	*61.795.900*	*55,56%*	*50,09%*	*101 Unit*	*1.321.732.750*	*99,02%*	*94,21%*	INSPEKTORAT
			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Yang Dipelihara Secara Rutin	68 Unit	110.100.000	64 Unit	108.520.000	Unit 20	16.220.000	Unit 0	-	Unit 5	3.170.000	Unit -	1.380.000	2 Unit	1.220.000	*7 Unit*	*5.770.000*	*35,00%*	*35,57%*	*71 Unit*	*114.290.000*	*104,41%*	*103,81%*	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	5 Unit	149.850.000	4 Unit	140.880.000	Unit 1	29.970.000	Unit 0	-	Unit -	29.970.000	Unit 1	-	- Unit	-	*1 Unit*	*29.970.000*	*100,00%*	*100,00%*	*5 Unit*	*170.850.000*	*100,00%*	*114,01%*	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	51 Unit	35.500.000	24 Unit	25.194.000	Unit 24	3.500.000	Unit 0	-	Unit -	-	Unit -	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*24 Unit*	*25.194.000*	*47,06%*	*70,97%*	INSPEKTORAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**25,09**	**20,13**	**14,38**	**23,56**	**25,40**	**22,81**	**15,31**	**21,78**	**80,18**	**88,27**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**200 %**	**5.407.920.000**	**#### %**	**5.859.660.000**	**% 100**	**1.191.906.600**	**% 0,00**	**3.670.000**	**% 6,89**	**144.843.700**	**3,08 %**	**244.921.000**	**41,93 %**	**198.270.000**	*51,90 %*	*591.704.700*	*51,90%*	*49,64%*	*169,01 %*	*6.451.364.700*	*84,51%*	*119,29%*	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Sesuai Standar**		**4.151.670.000**		**4.726.710.000**		**829.386.600**		**3.410.000**		**115.523.700**		**167.601.000**		**137.490.000**	*- -*	*424.024.700*		*51,13%*	*- -*	*5.150.734.700*		*124,06%*	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Keuanganumlah Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Keuangan	55 Kali	1.683.000.000	51 Kali	2.108.645.000	12 Laporan	328.620.000	0 Laporan	1.610.000	4 Laporan	86.400.000	0 Laporan	86.400.000	3 Laporan	97.500.000	*7 Laporan*	*271.910.000*	*58,33%*	*82,74%*	*58 Kali*	*2.380.555.000*	*105,45%*	*141,45%*	INSPEKTORAT
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Review Kinerja dan Keuangan	20 Kali	318.750.000	17 Kali	371.100.000	15 Laporan	139.800.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	4 Laporan	55.200.000	7 Laporan	6.000.000	*11 Laporan*	*61.200.000*	*73,33%*	*43,78%*	*28 Kali*	*432.300.000*	*140,00%*	*135,62%*	INSPEKTORAT
			Pengawasan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapat Pengawasan Oleh APIP	300 Pekon	792.000.000	529 Pekon	899.400.000	15 Dokumen	187.200.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*529 Pekon*	*899.400.000*	*176,33%*	*113,56%*	INSPEKTORAT
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Keuangan	60 Pemantauan	1.357.920.000	55 Pemantauan	1.347.565.000	20 Dokumen	173.766.600	0 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	29.123.700	1 Dokumen	26.001.000	1 Dokumen	33.990.000	*3 Dokumen*	*90.914.700*	*15,00%*	*52,32%*	*58 Pemantauan*	*1.438.479.700*	*96,67%*	*105,93%*	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Yang Sesuai Standar**	**1.256.250.000**		**1.132.950.000**		**362.520.000**			**260.000**		**29.320.000**		**77.320.000**		**60.780.000**	-	*167.680.000*		*46,25%*	-	*1.300.630.000*		*103,53%*	INSPEKTORAT
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diaudit	430 %	1.256.250.000	361 %	1.132.950.000	100 %	362.520.000	0,00 %	260.000	6,15 %	29.320.000	0,00 %	77.320.000	56,93 %	60.780.000	*63,08 %*	*167.680.000*	*63,08%*	*46,25%*	*424 %*	*1.300.630.000*	*98,62%*	*103,53%*	INSPEKTORAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**		**6,89**		**3,08**		**41,93**		**51,90**							
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**R**							
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**200 %**	**2.566.650.035**	**86,12 %**	**2.287.881.271**	**100 %**	**359.655.000**	**0,00 %**	**-**	**29,41 %**	**99.600.000**	**5,88 %**	**21.000.000**	**0,00 %**	**7.500.000**	*35,29 %*	*128.100.000*	*35,29%*	*35,62%*	*121,41 %*	*2.415.981.271*	*60,71%*	*94,13%*	INSPEKTORAT
			Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Pemberantasan Tipikor dan Gratifikasi**		**2.566.650.035**		**2.287.881.271**		**359.655.000**		**-**		**99.600.000**		**21.000.000**		**7.500.000**	-	*128.100.000*		*35,62%*	-	*2.415.981.271*		*94,13%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pekon dan OPD Yang di Lakukan Pendampingan Oleh Fungsional	425 %	2.566.650.035	366 %	2.287.881.271	85 %	359.655.000	0 %	-	25 %	99.600.000	5 %	21.000.000	- %	7.500.000	*30 %*	*128.100.000*	*35,29%*	*35,62%*	*396 %*	*2.415.981.271*	*93,18%*	*94,13%*	INSPEKTORAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**-**	**29,41**	**27,69**	**5,88**	**5,84**	**0,00**	**2,09**	**35,29**	**35,62**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			UNSUR KEWILAYAHAN			-		-																			
31			**KECAMATAN KOTA AGUNG**			-		-																			
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**28.724.172.195**	**81,95 %**	**27.369.868.943**	**100 %**	**4.965.817.588**	**7,28 %**	**698.252.698**	**9,73 %**	**2.031.718.234**	**14,27 %**	**1.245.701.531**	**67,14 %**	**837.816.058**	*98,41 %*	*4.813.488.521*	*98,41%*	*96,93%*	*180,36 %*	*32.183.357.464*	*90,18%*	*112,04%*	KEC. KOTA AGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**		**100.375.500**		**88.052.950**		**19.850.100**		**1.950.000**		**3.600.000**		**3.045.000**		**2.325.000**	-	*10.920.000*		*55,01%*	-	*98.972.950*		*98,60%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja	150 Buku	74.625.000	120 Buku	70.440.950	30 Buku	14.970.000	0 Buku	1.200.000	10 Buku	3.600.000	5 Buku	3.045.000	15 Buku	2.325.000	*30 Buku*	*10.170.000*	*100,00%*	*67,94%*	*150 Buku*	*80.610.950*	*100,00%*	*108,02%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Eksemplar Dokumen	11.608.500	80 Eksemplar Dokumen	7.936.800	20 Eksemplar Dokumen	2.321.700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*80 Eksemplar Dokumen*	*7.936.800*	*80,00%*	*68,37%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.983.500	30 Eksemplar Dokumen	3.590.100	10 Eksemplar Dokumen	1.046.700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3.590.100*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2.250.000	60 Eksemplar Dokumen	1.800.000	15 Eksemplar Dokumen	750.000	15 Eksemplar Dokumen	750.000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*15 Eksemplar Dokumen*	*750.000*	*100,00%*	*100,00%*	*75 Eksemplar Dokumen*	*2.550.000*	*100,00%*	*113,33%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	3.808.500	60 Eksemplar Dokumen	3.025.100	15 Eksemplar Dokumen	761.700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*3.025.100*	*80,00%*	*79,43%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	50 Eksemplar Dokumen	1.050.000	30 Eksemplar Dokumen	630.000	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*630.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	1.050.000	30 Eksemplar Dokumen	630.000	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*630.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu**		**23.205.673.645**		**22.725.397.213**		**4.428.296.434**		**639.365.638**		**1.873.675.234**		**1.097.607.031**		**742.105.858**	-	*4.352.753.761*		*98,29%*	-	*27.078.150.974*		*116,69%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang	14.207.723.645	100 Orang	13.736.962.213	25 Orang	2.540.786.434	6 Orang	585.860.638	6 Orang	835.305.234	6 Orang	637.202.031	7 Orang	429.215.858	*25 Orang*	*2.487.583.761*	*100,00%*	*97,91%*	*125 Orang*	*16.224.545.974*	*100,00%*	*114,20%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	420 Orang	8.088.000.000	336 Orang	8.278.425.000	84 Orang	1.812.300.000	21 Orang	46.175.000	21 Orang	1.009.050.000	21 Orang	453.075.000	21 Orang	302.050.000	*84 Orang*	*1.810.350.000*	*100,00%*	*99,89%*	*420 Orang*	*10.088.775.000*	*100,00%*	*124,74%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	905.900.000	48 Kali	707.580.000	12 Kali	75.210.000	1 Kali	7.330.000	4 Kali	29.320.000	2 Kali	7.330.000	5 Kali	10.840.000	*12 Kali*	*54.820.000*	*100,00%*	*72,89%*	*60 Kali*	*762.400.000*	*100,00%*	*84,16%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Buku	4.050.000	30 Buku	2.430.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Buku*	*2.430.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik**		**320.375.000**		**239.125.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*239.125.000*		*74,64%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1375 Stel	320.375.000	1306 Stel	239.125.000	0 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1.306 Stel*	*239.125.000*	*94,98%*	*74,64%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat Waktu**		**797.997.050**		**693.247.430**		**25.993.200**		**2.518.660**		**9.481.034**		**6.502.500**		**4.317.600**	-	*22.819.794*		*87,79%*	-	*716.067.224*		*89,73%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Unit	255.090.500	44 Unit	320.458.600	11 Unit	8.540.000	0 Unit	-	- Unit	5.660.000	9 Unit	1.880.000	2 Unit	-	*11 Unit*	*7.540.000*	*100,00%*	*88,29%*	*55 Unit*	*327.998.600*	*100,00%*	*128,58%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Keperluan Rutin Kantor	10800 Kotak	243.000.000	8040 Kotak	153.819.000	2000 Kotak	1.800.000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	2.000 Kotak	1.782.000	*2.000 Kotak*	*1.782.000*	*100,00%*	*99,00%*	*10.040 Kotak*	*155.601.000*	*92,96%*	*64,03%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	180 Eksemplar	105.400.050	160 Eksemplar	75.809.730	36 Eksemplar	3.537.300	7 Eksemplar	618.660	15 Eksemplar	1.408.320	5 Eksemplar	412.500	9 Eksemplar	-	*36 Eksemplar*	*2.439.480*	*100,00%*	*68,96%*	*196 Eksemplar*	*78.249.210*	*108,89%*	*74,24%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	6145 Buah	179.506.500	5804 Buah	134.160.100	1000 Buah	12.115.900	193 Buah	1.900.000	245 Buah	2.412.714	427 Buah	4.210.000	135 Buah	2.535.600	*1.000 Buah*	*11.058.314*	*100,00%*	*91,27%*	*6.804 Buah*	*145.218.414*	*110,72%*	*80,90%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kali	15.000.000	60 Kali	9.000.000	0 Kali	-	Kali		Kali		Kali	-	Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Kali*	*9.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan baik**		**730.240.000**		**438.144.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*438.144.000*		*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	194.050.000	3 Unit	116.430.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*116.430.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	280 Unit	331.190.000	168 Unit	198.714.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*168 Unit*	*198.714.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	205.000.000	27 Unit	123.000.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*27 Unit*	*123.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tepat Waktu**		**1.052.656.000**		**861.840.300**		**62.860.254**		**12.703.000**		**13.828.116**		**19.543.400**		**1.994.000**	-	*48.068.516*		*76,47%*	-	*909.908.816*		*86,44%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	523.550.000	48 Kali	436.652.500	12 Kali	25.290.254	0 Kali	203.000	1 Kali	1.978.116	3 Kali	13.893.400	8 Kali	1.994.000	*12 Kali*	*18.068.516*	*100,00%*	*71,44%*	*60 Kali*	*454.721.016*	*100,00%*	*86,85%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	70 Kali	529.106.000	56 Kali	425.187.800	14 Kali	37.570.000	4 Kali	12.500.000	3 Kali	11.850.000	1 Kali	5.650.000	6 Kali	-	*14 Kali*	*30.000.000*	*100,00%*	*79,85%*	*70 Kali*	*455.187.800*	*100,00%*	*86,03%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**		**2.516.855.000**		**2.324.062.050**		**428.817.600**		**41.715.400**		**131.133.850**		**119.003.600**		**87.073.600**	-	*378.926.450*		*88,37%*	-	*2.702.988.500*		*107,40%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	65 Unit	2.172.274.000	50 Unit	2.052.695.100	13 Unit	385.607.600	1 Unit	41.715.400	5 Unit	127.716.800	3 Unit	118.353.600	4 Unit	87.073.600	*13 Unit*	*374.859.400*	*100,00%*	*97,21%*	*63 Unit*	*2.427.554.500*	*96,92%*	*111,75%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	20 Unit	1.500.000	16 Unit	1.200.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*16 Unit*	*1.200.000*	*80,00%*	*80,00%*	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	45 Unit	38.350.000	36 Unit	31.710.000	9 Unit	610.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit		-	-	0,00%	0,00%	36 Unit	31.710.000	80,00%	82,69%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100 %	95.056.000	100 %	84.301.950	100 %	42.600.000	0 %	-	21,29 %	3.417.050	4,05 %	650.000	74,66 %	-	100,00 %	4.067.050	100,00%	9,55%	200 %	88.369.000	200,00%	92,97%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	67.925.000	3 Unit	40.755.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0,00%	0,00%	3 Unit	40.755.000	60,00%	60,00%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan baik	10 Unit	141.750.000	8 Unit	113.400.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0,00%	0,00%	8 Unit	113.400.000	80,00%	80,00%	KEC. KOTA AGUNG
								Rata-rata capaian kinerja (%)	7,28	14,06	9,73	40,91	14,27	25,09	67,14	16,87	98,41	96,93								
								Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	ST							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**1.526.103.000**	**77,60 %**	**1.080.286.600**	**% 100**	**9.000.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**100,00 %**	**8.950.940**	*100 %*	*8.950.940*	*100,00%*	*99,45%*	*177,60 %*	*1.089.237.540*	*88,80%*	*71,37%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah**		**1.345.870.000**		**958.294.000**		**9.000.000**		-		-		-	**8.950.940**	-	*8.950.940*		*99,45%*	-	*967.244.940*		*71,87%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	109.520.000	6 Kali	65.712.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	6 Kali	65.712.000	60,00%	60,00%	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Kali	1.236.350.000	24 Kali	892.582.000	Kali 6	9.000.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	6 Kali	8.950.940	*6 Kali*	*8.950.940*	*100,00%*	*99,45%*	*30 Kali*	*901.532.940*	*100,00%*	*72,92%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terlaksananya Peningkatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**180.233.000**		**121.992.600**		-		-		-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	*121.992.600*		*67,69%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Kemiski	85 Orang	180.233.000	67 Orang	121.992.600	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	0,00%	0,00%	67 *Orang*	*121.992.600*	*78,82%*	*67,69%*	KEC. KOTA AGUNG
								Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,45	*100,00*	99,45								
								Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**12.406.644.540**	**71,93 %**	**7.725.317.224**	**% 100**	**36.325.000**	**% 0,00**	-	**% 100,00**	**23.676.240**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	**12.608.060**	*100,00 %*	*36.284.300*	*100,00%*	*99,89%*	*171,93 %*	*7.761.601.524*	*85,96%*	*62,56%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan yang Disetujui di Tingkat**		**1.088.580.000**		**934.478.500**		**36.325.000**		-		**23.676.240**		-		**12.608.060**	- -	*36.284.300*		*99,89%*	-	*970.762.800*		*89,18%*	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	85 Kali	287.930.000	68 Kali	270.728.500	Kali 17	36.325.000	Kali 0	-	Kali 17	23.676.240	0 Kali	-	- Kali	12.608.060	*17 Kali*	*36.284.300*	*100,00%*	*99,89%*	*85 Kali*	*307.012.800*	*100,00%*	*106,63%*	KEC. KOTA AGUNG
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	85 Orang	611.550.000	68 Orang	441.330.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	0,00%	0,00%	68 *Orang*	*441.330.000*	*80,00%*	*72,17%*	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Kali	189.100.000	12 Kali	222.420.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	0,00%	0,00%	12 *Kali*	*222.420.000*	*60,00%*	*117,62%*	KEC. KOTA AGUNG
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Tercapainya Kelompok Masyarakat Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan**		**11.318.064.540**		**6.790.838.724**		-		-		-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	*6.790.838.724*		*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah bangunan gedung dan fasilitas pemerintahan kelurahan yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi	55 Unit	9.662.066.500	33 Unit	5.797.239.900	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	0,00%	0,00%	33 *Unit*	*5.797.239.900*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	40 Kali	1.655.998.040	24 Kali	993.598.824	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	0,00%	0,00%	24 *Kali*	*993.598.824*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
								Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	100,00	65,18	0,00	0,00	0,00	34,71	*100,0*	99,89								
								Predikat kinerja	SR	SR	ST	SD	SR	SR	SR	SR	ST	ST							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**147.600.000**	**80,00 %**	**163.560.000**	**% 100**	**69.000.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*163.560.000*	*40,00%*	*110,81%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Penurunan Gangguan Keamanan**		**147.600.000**		**163.560.000**		**69.000.000**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*163.560.000*		*110,81%*	KEC. KOTA AGUNG
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergisitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	147.600.000	48 Kali	163.560.000	Kali 12	69.000.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*163.560.000*	*80,00%*	*110,81%*	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**113.325.000**	**60,00 %**	**67.995.000**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-		*0,00%*	*60,00 %*	*67.995.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan**		**113.325.000**		**67.995.000**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*67.995.000*		*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Kali	82.725.000	33 Kali	49.635.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*33 Kali*	*49.635.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	30.600.000	3 Kali	18.360.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*18.360.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**1.817.475.000**	**68,06 %**	**1.142.735.250**	**% 100**	**19.070.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**10,34 %**	**9.443.500**	*10,34* %	*9.443.500*	*10,34%*	*49,52%*	*78,40 %*	*1.152.178.750*	*39,20%*	*63,39%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**1.817.475.000**		**1.142.735.250**		**19.070.000**		-		-		-	**9.443.500**	-	*9.443.500*		*49,52%*	-	*1.152.178.750*		*63,39%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	15 Kali	129.375.000	12 Kali	106.475.250	Kali 3	9.450.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	3 Kali	9.443.500	*3 Kali*	*9.443.500*	*100,00%*	*99,93%*	*15 Kali*	*115.918.750*	*100,00%*	*89,60%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	130 Kali	152.100.000	104 Kali	114.660.000	Kali 26	9.620.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*104 Kali*	*114.660.000*	*80,00%*	*75,38%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah fasilitas pelaksanaan tugas,fungsi,dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	215 Orang	1.536.000.000	129 Orang	921.600.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*129 Orang*	*921.600.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,34**	**49,52**	10,34	49,52						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			KELURAHAN BAROS			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**339.351.900**	**63,11 %**	**207.585.060**	**% 100**	**100.247.800**	**% 0,00**	-	**% 0,20**	**8.270.000**	**0,20 %**	-	**98,00 %**	**91.957.800**	*98,40* %	*100.227.800*	*98,40%*	*99,98%*	*161,51 %*	*307.812.860*	*80,75%*	*90,71%*	KELURAHAN BAROS
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Waktu**		**95.760.000**		**63.840.000**		**31.920.000**		-		-		-	**31.920.000**	-	*31.920.000*		*100,00%*	-	*95.760.000*		*100,00%*	KELURAHAN BAROS
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Bulan	95.760.000	24 Bulan	63.840.000	Bulan 12	31.920.000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	31.920.000	*12 Bulan*	*31.920.000*	*100,00%*	*100,00%*	*36 Bulan*	*95.760.000*	*100,00%*	*100,00%*	KELURAHAN BAROS
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian**		**9.425.000**		**5.725.000**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*5.725.000*		*60,74%*	KELURAHAN BAROS
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	9.425.000	17 Stel	5.725.000	Stel 8	-	Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	*17 Stel*	*5.725.000*	*68,00%*	*60,74%*	KELURAHAN BAROS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**49.051.900**		**32.983.800**		**36.827.800**		-	**8.270.000**		-		**28.537.800**	-	*36.807.800*		*99,95%*	-	*69.791.600*		*142,28%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	13.101.500	10 Unit	10.131.100	5 Unit	24.411.000	0 Unit	-	1 Unit	8.270.000	1 Unit	-	3 Unit	16.141.000	*5 Unit*	*24.411.000*	*100,00%*	*100,00%*	*15 Unit*	*34.542.100*	*100,00%*	*263,65%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	45 Eksemplar	14.060.100	40 Eksemplar	8.856.400	20 Eksemplar	5.301.500	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	20 Eksemplar	5.301.500	*20 Eksemplar*	*5.301.500*	*100,00%*	*100,00%*	*60 Eksemplar*	*14.157.900*	*133,33%*	*100,70%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1026 Buah	21.890.300	684 Buah	13.996.300	342 Buah	7.115.300	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	-	342 Buah	7.095.300	*342 Buah*	*7.095.300*	*100,00%*	*99,72%*	*1.026 Buah*	*21.091.600*	*100,00%*	*96,35%*	KELURAHAN BAROS
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang**		**77.440.000**		**50.286.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*50.286.000*		*64,94%*	KELURAHAN BAROS
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 Unit	36.900.000	4 Unit	23.746.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0*	*4 Unit*	*23.746.000*	*66,67%*	*64,35%*	KELURAHAN BAROS
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	20 Unit	40.540.000	12 Unit	26.540.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Unit*	*26.540.000*	*60,00%*	*65,47%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**23.680.000**		**14.755.260**		**9.000.000**		-		-		-		**9.000.000**	-	*9.000.000*		*100,00%*	-	*23.755.260*		*100,32%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bulan	23.680.000	24 Bulan	14.755.260	12 Bulan	9.000.000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	9.000.000	*12 Bulan*	*9.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*36 Bulan*	*23.755.260*	*100,00%*	*100,32%*	KELURAHAN BAROS
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**83.995.000**		**39.995.000**		**22.500.000**		-		-		-		**22.500.000**	-	*22.500.000*		*100,00%*	-	*62.495.000*		*74,40%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	36.350.000	4 Unit	20.850.000	Unit 2	9.000.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	9.000.000	*2 Unit*	*9.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*6 Unit*	*29.850.000*	*100,00%*	*82,12%*	KELURAHAN BAROS
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	1.460.000	12 Unit	1.460.000											- -	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Unit*	*1.460.000*	*600,00%*	*100,00%*	KELURAHAN BAROS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	13.500.000	%		% 100	13.500.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	13.500.000	*100 %*	*13.500.000*	*100,00%*	*100,00%*	*100 %*	*13.500.000*	*100,00%*	*100,00%*	KELURAHAN BAROS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Dengan Baik	3 Unit	32.685.000	2 Unit	17.685.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2 Unit*	*17.685.000*	*66,67%*	*54,11%*	KELURAHAN BAROS
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,20**	**8,25**	**0,20**	**0,00**	**98,00**	**91,73**	**98,40**	**99,98**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**2.165.212.812**	**66,67 %**	**1.443.311.004**	**% 100**	**341.046.300**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	100,00 %	**99.034.300**	*100,00 %*	*99.034.300*	*100,00%*	*29,04%*	*166,67 %*	*1.542.345.304*	*83,33%*	*71,23%*	KELURAHAN BAROS
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Usulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**2.165.212.812**		**1.443.311.004**		**341.046.300**		-		-		-		**99.034.300**	-	*99.034.300*		*29,04%*	-	*1.542.345.304*		*71,23%*	KELURAHAN BAROS
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	18 Unit	1.831.613.100	12 Unit	1.221.075.400	6 Unit	261.160.800	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	6 Unit	19.148.800	*6 Unit*	*19.148.800*	*100,00%*	*7,33%*	*18 Unit*	*1.240.224.200*	*100,00%*	*67,71%*	KELURAHAN BAROS
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	12 Kali	333.599.712	8 Kali	222.235.604	Kali 4	79.885.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	4 Kali	79.885.500	*4 Kali*	*79.885.500*	*100,00%*	*100,00%*	*12 Kali*	*302.121.104*	*100,00%*	*90,56%*	KELURAHAN BAROS
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**29,04**	*100,00*	**29,04**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**187.200.000**	**66,67 %**	**64.800.000**	**% 100**	**70.200.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	100,00 %	**70.200.000**	*100,00 %*	*70.200.000*	*100,00%*	*100,00%*	*166,67 %*	*135.000.000*	*83,33%*	*72,12%*	KELURAHAN BAROS
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**187.200.000**		**64.800.000**		**70.200.000**		-		-		-		**70.200.000**	-	*70.200.000*		*100,00%*	-	*135.000.000*		*72,12%*	KELURAHAN BAROS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	36 Bulan	187.200.000	24 Bulan	64.800.000	Bulan 12	70.200.000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	70.200.000	***12 Bulan***	***70.200.000***	***100,00%***	***100,00%***	***36 Bulan***	***135.000.000***	***100,00%***	***72,12%***	KELURAHAN BAROS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**							
			KELURAHAN PASAR MADANG			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**299.278.700**	**63,39 %**	**120.802.700**	**% 100**	**88.127.209**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**98,80 %**	**57.765.609**	***98,80 %***	***57.765.609***	***98,80%***	***65,55%***	***162,19 %***	***178.568.309***	***81,09%***	***59,67%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**95.760.000**		**47.880.000**		**31.920.000**		-		-		-		**15.960.000**	-	***15.960.000***		***50,00%***	-	***63.840.000***		***66,67%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Bulan	95.760.000	24 Bulan	47.880.000	Bulan 12	31.920.000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	15.960.000	***12 Bulan***	***15.960.000***	***100,00%***	***50,00%***	***36 Bulan***	***63.840.000***	***100,00%***	***66,67%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian**		**9.425.000**		**2.025.000**		-		-		-		-		-	-	***2.025.000***		***0,00%***	-	***2.025.000***		***21,49%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	9.425.000	9 Stel	2.025.000	Stel 0	-	Stel	-	Stel	-	Stel	-	Stel		- ***Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9 Stel***	***2.025.000***	***36,00%***	***21,49%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun**		**47.550.700**		**21.927.700**		**17.263.200**		-		-		-		**11.561.600**	-	***11.561.600***		***66,97%***	-	***33.489.300***		***70,43%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	13.452.800	10 Unit	5.695.600	Unit 5	2.125.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	5 Unit	1.125.000	***5 Unit***	***1.125.000***	***100,00%***	***52,94%***	***15 Unit***	***6.820.600***	***100,00%***	***50,70%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	65 Eksemplar	12.719.950	40 Eksemplar	6.043.200	20 Eksemplar	7.173.900	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	20 Eksemplar	2.472.300	***20 Eksemplar***	***2.472.300***	***100,00%***	***34,46%***	***60 Eksemplar***	***8.515.500***	***92,31%***	***66,95%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1141 Buah	21.377.950	799 Buah	10.188.900	Buah 342	7.964.300	Buah 0	-	Buah -	-	0 Buah	-	342 Buah	7.964.300	***342 Buah***	***7.964.300***	***100,00%***	***100,00%***	***1.141 Buah***	***18.153.200***	***100,00%***	***84,92%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang**		**38.140.000**		**13.600.000**		**8.000.000**		-		-		-		-	-	***13.600.000***		***0,00%***	-	***13.600.000***		***35,66%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	20 Unit	38.140.000	6 Unit	13.600.000	Unit 6	8.000.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***6 Unit***	***13.600.000***	***30,00%***	***35,66%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 Unit	36.900.000	4 Unit	23.900.000	Unit 2	21.000.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	10.000.000	***2 Unit***	***10.000.000***	***100,00%***	***47,62%***	***6 Unit***	***33.900.000***	***100,00%***	***91,87%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**		**24.655.000**		**12.695.000**		**7.920.009**		-		-		-		**7.920.009**	-	***7.920.009***		***100,00%***	-	***20.615.009***		***83,61%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bulan	24.655.000	24 Bulan	12.695.000	Bulan 12	7.920.009	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	7.920.009	***12 Bulan***	***7.920.009***	***100,00%***	***100,00%***	***36 Bulan***	***20.615.009***	***100,00%***	***83,61%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**83.748.000**		**22.675.000**		**23.024.000**		-		-		-		**22.324.000**	-	***22.324.000***		***96,96%***	-	***44.999.000***		***53,73%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	35.150.000	4 Unit	17.325.000	Unit 2	8.900.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	8.200.000	***2 Unit***	***8.200.000***	***100,00%***	***92,13%***	***6 Unit***	***25.525.000***	***100,00%***	***72,62%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya															- -	-	***0,00%***	***0,00%***	- -	-	***0,00%***	***0,00%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	100 %	14.124.000	0 %	-	% 100	14.124.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	14.124.000	***100 %***	***14.124.000***	***100,00%***	***100,00%***	***100 %***	***14.124.000***	***100,00%***	***100,00%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Dengan Baik	3 Unit	34.474.000	1 Unit	5.350.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***1 Unit***	***5.350.000***	***33,33%***	***15,52%***	KELURAHAN PASAR MADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80**	**65,55**	**98,80**	**65,55**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**	**ST**	**ST**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200** **%**	**2.166.813.700**	**66,67 %**	**1.353.517.650**	**% 100**	**323.834.300**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**100,00 %**	**127.697.900**	***100 %***	***127.697.900***	***100,00%***	***39,43%***	***166,67 %***	***1.481.215.550***	***83,33%***	***68,36%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Usulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**2.166.813.700**		**1.353.517.650**		**323.834.300**		-		-		-		**127.697.900**	-	***127.697.900***		***39,43%***	-	***1.481.215.550***		***68,36%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros	18 Unit	1.832.614.000	12 Unit	1.188.489.750	Unit 6	211.634.800	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	6 Unit	15.498.400	***6 Unit***	***15.498.400***	***100,00%***	***7,32%***	***18 Unit***	***1.203.988.150***	***100,00%***	***65,70%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	12 Kali	334.199.700	8 Kali	165.027.900	Kali 4	112.199.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	4 Kali	112.199.500	***4 Kali***	***112.199.500***	***100,00%***	***100,00%***	***12 Kali***	***277.227.400***	***100,00%***	***82,95%***	KELURAHAN PASAR MADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**39,43**	***100,00***	**39,43**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200** **%**	**302.400.000**	**66,67 %**	**201.600.000**	**% 100**	**113.400.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**100,00 %**	**113.400.000**	***100,00 %***	***113.400.000***	***100,00%***	***100,00%***	***166,67 %***	***315.000.000***	***83,33%***	***104,17%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**302.400.000**		**201.600.000**		**113.400.000**		-		-		-		**113.400.000**	-	***113.400.000***		***100,00%***	-	***315.000.000***		***104,17%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	36 Bulan	302.400.000	24 Bulan	201.600.000	Bulan 12	113.400.000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	113.400.000	***12 Bulan***	***113.400.000***	***100,00%***	***100,00%***	***36 Bulan***	***315.000.000***	***100,00%***	***104,17%***	KELURAHAN PASAR MADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**						
			KELURAHAN KURIPAN			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** **%**	**336.131.580**	**66,37 %**	**205.648.860**	**% 100**	**103.169.590**	**% 0,00**	-	**% 0,62**	**11.300.000**	**0,00 %**	-	**98,76 %**	**88.430.470**	***99,38 %***	***99.730.470***	***99,38%***	***96,67%***	***165,75 %***	***305.379.330***	***82,87%***	***90,85%***	KELURAHAN KURIPAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun**		**95.760.000**		**62.840.000**		**31.920.000**		-		-		-		**31.920.000**	-	***31.920.000***		***100,00%***	-	***94.760.000***		***98,96%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Kali	95.760.000	24 Kali	62.840.000	Kali 12	31.920.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	12 Kali	31.920.000	***12 Kali***	***31.920.000***	***100,00%***	***100,00%***	***36 Kali***	***94.760.000***	***100,00%***	***98,96%***	KELURAHAN KURIPAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian**		**9.725.000**		**5.725.000**		-		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***5.725.000***		***58,87%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	9.725.000	17 Stel	5.725.000	Stel 0	-	Stel		Stel		Stel		Stel		- ***Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***17 Stel***	***5.725.000***	***68,00%***	***58,87%***	KELURAHAN KURIPAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun**		**59.067.080**		**35.855.420**		**28.639.590**		-		-		-		**25.292.190**	-	***25.292.190***		***88,31%***	-	***61.147.610***		***103,52%***	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Unit	21.983.500	10 Unit	11.983.500	Unit 5	12.082.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	3 Unit	12.082.000	***3 Unit***	***12.082.000***	***60,00%***	***100,00%***	***13 Unit***	***24.065.500***	***81,25%***	***109,47%***	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	60 Eksemplar	14.734.980	40 Eksemplar	9.523.320	Eksemplar 20	7.969.190	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	20 Eksemplar	4.621.790	***20 Eksemplar***	***4.621.790***	***100,00%***	***58,00%***	***60 Eksemplar***	***14.145.110***	***100,00%***	***96,00%***	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	795 Buah	22.348.600	530 Buah	14.348.600	Buah 265	8.588.400	Buah 0	-	Buah -	-	0 Buah	-	265 Buah	8.588.400	***265 Buah***	***8.588.400***	***100,00%***	***100,00%***	***795 Buah***	***22.937.000***	***100,00%***	***102,63%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang**		**75.959.500**		**46.859.500**		**11.300.000**		-		**11.300.000**		-		-	-	***11.300.000***		***100,00%***	-	***58.159.500***		***76,57%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	54.500.000	5 Unit	33.700.000	Unit 2	11.300.000	Unit 0	-	Unit 2	11.300.000	0 Unit	-	- Unit	-	***2 Unit***	***11.300.000***	***100,00%***	***100,00%***	***7 Unit***	***45.000.000***	***100,00%***	***82,57%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	10 Unit	21.459.500	5 Unit	13.159.500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***5 Unit***	***13.159.500***	***50,00%***	***61,32%***	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**26.920.000**		**15.763.400**		**8.460.000**		-		-		-		**8.457.500**	-	***8.457.500***		***99,97%***	-	***24.220.900***		***89,97%***	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Kali	26.920.000	24 Kali	15.763.400	Kali 12	8.460.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	12 Kali	8.457.500	***12 Kali***	***8.457.500***	***100,00%***	***99,97%***	***36 Kali***	***24.220.900***	***100,00%***	***89,97%***	KELURAHAN KURIPAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**68.700.000**		**38.605.540**		**22.850.000**		-		-		-		**22.760.780**	-	***22.760.780***		***99,61%***	-	***61.366.320***		***89,33%***	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	14 Unit	36.150.000	8 Unit	21.055.540	Unit 6	9.350.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	6 Unit	9.260.780	***6 Unit***	***9.260.780***	***100,00%***	***99,05%***	***14 Unit***	***30.316.320***	***100,00%***	***83,86%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Dengan Baik	3 Unit	32.550.000	2 Unit	17.550.000	Unit 1	13.500.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit	13.500.000	***1 Unit***	***13.500.000***	***100,00%***	***100,00%***	***3 Unit***	***31.050.000***	***100,00%***	***95,39%***	KELURAHAN KURIPAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,62**	**10,95**	**0,00**	**0,00**	**98,76**	**85,71**	99,38	96,67						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**2.174.674.612**	**68,00 %**	**1.356.758.008**	**% 100**	**320.417.150**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00 %**	-	**100,00 %**	**320.417.150**	***100 %***	***320.417.150***	***100,00%***	***100,00%***	***168,00 %***	***1.677.175.158***	***84,00%***	***77,12%***	KELURAHAN KURIPAN
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Usulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**2.174.674.612**		**1.356.758.008**		**320.417.150**		-		-		-		**320.417.150**	-	***320.417.150***		***100,00%***	-	***1.677.175.158***		***77,12%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 Unit	1.841.075.200	9 Unit	1.134.520.700	4 Unit	224.234.250	0 Unit	-	Unit -	-	0 Unit	-	4 Unit	224.234.250	***4 Unit***	***224.234.250***	***100,00%***	***100,00%***	***13 Unit***	***1.358.754.950***	***100,00%***	***73,80%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	12 Kali	333.599.412	8 Kali	222.237.308	4 Kali	96.182.900	0 Kali	-	Kali -	-	0 Kali	-	4 Kali	96.182.900	***4 Kali***	***96.182.900***	***100,00%***	***100,00%***	***12 Kali***	***318.420.208***	***100,00%***	***95,45%***	KELURAHAN KURIPAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	***100,00***	**100,00**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**438.000.000**	**66,67 %**	**288.000.000**	**% 100**	**162.000.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00 %**	-	**100,00 %**	**162.000.000**	***100,00 %***	***162.000.000***	***100,00%***	***100,00%***	***166,67 %***	***450.000.000***	***83,33%***	***102,74%***	KELURAHAN KURIPAN
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**438.000.000**		**288.000.000**		**162.000.000**		-		-		-		**162.000.000**	-	***162.000.000***		***100,00%***	-	***450.000.000***		***102,74%***	KELURAHAN KURIPAN
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	36 Bulan	438.000.000	24 Bulan	288.000.000	Bulan 12	162.000.000	Bula n 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	162.000.000	***12 Bulan***	***162.000.000***	***100,00%***	***100,00%***	***36 Bulan***	***450.000.000***	***100,00%***	***102,74%***	KELURAHAN KURIPAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**						
			UNSUR KEWILAYAHAN			-		-																			
32			**KECAMATAN WONOSOBO**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**13.508.982.730**	**77,35 %**	**12.048.648.271**	**% 100**	**1.742.499.551**	**% 1,15**	**364.575.747**	**% 9,72**	**419.662.152**	**% 0,97**	**431.437.157**	**% 78,71**	**409.088.866**	***90,55 %***	***1.624.763.922***	***90,55%***	***93,24%***	***167,90 %***	***13.673.412.193***	***83,95%***	***101,22%***	KEC. WONOSOBO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**125.289.500**		**82.108.050**		**10.597.900**		-		-		-		**1.200.000**	-	***1.200.000***		***11,32%***	-	***83.308.050***		***66,49%***	KEC. WONOSOBO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	99.189.500	12 Eksemplar Dokumen	66.448.050	3 Eksemplar Dokumen	5.377.900	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	1.200.000	***3 Eksemplar Dokumen***	***1.200.000***	***100,00%***	***22,31%***	***15 Eksemplar Dokumen***	***67.648.050***	***100,00%***	***68,20%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4.750.000	9 Eksemplar Dokumen	2.850.000	3 Eksemplar Dokumen	950.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	-	***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2.850.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4.750.000	9 Eksemplar Dokumen	2.850.000	3 Eksemplar Dokumen	950.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	-	***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2.850.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	3.550.000	9 Eksemplar Dokumen	2.130.000	3 Eksemplar Dokumen	710.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	-	***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2.130.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. WONOSOBO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	3.550.000	9 Eksemplar Dokumen	2.130.000	3 Eksemplar Dokumen	710.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	9 Eksemplar Dokumen	2.130.000	60,00%	60,00%	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4.750.000	9 Eksemplar Dokumen	2.850.000	3 Eksemplar Dokumen	950.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	9 Eksemplar Dokumen	2.850.000	60,00%	60,00%	KEC. WONOSOBO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	4.750.000	9 Eksemplar Dokumen	2.850.000	3 Eksemplar Dokumen	950.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	9 Eksemplar Dokumen	2.850.000	60,00%	60,00%	KEC. WONOSOBO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**11.190.890.125**		**10.132.686.609**		**1.547.848.251**		**359.195.747**		**395.965.152**		**406.884.757**		**350.188.366**	-	*1.512.234.022*		*97,70%*	-	*11.644.920.631*		*104,06%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	9.480.290.125	72 Orang	8.405.031.609	18 Orang	1.188.358.251	5 Orang	268.800.747	4 Orang	309.790.152	3 Orang	320.709.757	6 Orang	257.593.366	*18 Orang*	*1.156.894.022*	*100,00%*	*97,35%*	*90 Orang*	*9.561.925.631*	*100,00%*	*100,86%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	1.426.650.000	72 Orang	1.494.015.000	18 Orang	345.330.000	5 Orang	86.175.000	4 Orang	86.175.000	3 Orang	86.175.000	6 Orang	86.175.000	*18 Orang*	*344.700.000*	*100,00%*	*99,82%*	*90 Orang*	*1.838.715.000*	*100,00%*	*128,88%*	KEC. WONOSOBO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	283.950.000	24 Orang	233.640.000	6 Orang	14.160.000	2 Orang	4.220.000	- Orang	-	0 Orang	-	4 Orang	6.420.000	*6 Orang*	*10.640.000*	*100,00%*	*75,14%*	*30 Orang*	*244.280.000*	*100,00%*	*86,03%*	KEC. WONOSOBO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**432.637.750**		**296.976.080**		**32.827.400**		**445.200**		**1.875.000**		**1.000.000**		**7.438.700**	-	*10.758.900*		*32,77%*	-	*307.734.980*		*71,13%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300 %	197.241.250	200 %	139.744.780	100 %	7.344.000	0 %	-	- %	-	0,00 %	-	100 %	703.000	*100,00 %*	*703.000*	*100,00%*	*9,57%*	*300 %*	*140.447.780*	*100,00%*	*71,21%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	4200 Kotak	111.500.000	3360 Kotak	72.525.000	840 Kotak	12.840.000	0 Kotak	-	98 Kotak	1.501.500	0 Kotak	-	742 Kotak	-	*840 Kotak*	*1.501.500*	*100,00%*	*11,69%*	*4.200 Kotak*	*74.026.500*	*100,00%*	*66,39%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	21.822.000	48 Bulan	18.934.800	12 Bulan	4.398.900	0 Bulan	-	1 Bulan	373.500	1 Bulan	600.000	10 Bulan	2.210.000	*12 Bulan*	*3.183.500*	*100,00%*	*72,37%*	*60 Bulan*	*22.118.300*	*100,00%*	*101,36%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	35.363.500	48 Bulan	25.744.900	12 Bulan	6.744.500	1 Bulan	445.200	- Bulan	-	0 Bulan	400.000	11 Bulan	4.525.700	*12 Bulan*	*5.370.900*	*100,00%*	*79,63%*	*60 Bulan*	*31.115.800*	*100,00%*	*87,99%*	KEC. WONOSOBO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	440 Orang /Kali	66.711.000	264 Orang /Kali	40.026.600	88 Orang /Kali	1.500.000	0 Orang/Kali	-	- Orang/Kali	-	0 Orang/ Kali	-	- Orang/ Kali	-	*- Orang /Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*264 Orang /Kali*	*40.026.600*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**291.452.500**		**225.934.100**		**42.279.000**		-		**14.097.000**		**9.960.000**		**3.515.000**	-	*27.572.000*		*65,21%*	-	*253.506.100*		*86,98%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	155.895.000	48 Bulan	144.099.600	12 Bulan	32.979.000	0 Bulan	-	2 Bulan	4.797.000	3 Bulan	9.960.000	7 Bulan	3.515.000	*12 Bulan*	*18.272.000*	*100,00%*	*55,40%*	*60 Bulan*	*162.371.600*	*100,00%*	*104,15%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kegiatan	135.557.500	8 Kegiatan	81.834.500	2 Kegiatan	9.300.000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	9.300.000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	*2 Kegiatan*	*9.300.000*	*100,00%*	*100,00%*	*10 Kegiatan*	*91.134.500*	*100,00%*	*67,23%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.468.712.855**		**1.310.943.432**		**108.947.000**		**4.934.800**		**7.725.000**		**13.592.400**		**46.746.800**	-	*72.999.000*		*67,00%*	-	*1.383.942.432*		*94,23%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	2.000.000	3 Mobil	-	Mobil		Mobil		Mobil		Mobil		Mobil		- *Mobil*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Mobil*	-	*60,00%*	*0,00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Mobil /Motor	465.556.000	8 Mobil /Motor	438.299.820	2 Mobil /Motor	86.171.200	0 Mobil/Motor	4.934.800	- Mobil /Motor	7.725.000	1 Mobil/ Motor	13.592.400	1 Mobil/ Motor	46.746.800	*2 Mobil/ Motor*	*72.999.000*	*100,00%*	*84,71%*	*10 Mobil/ Motor*	*511.298.820*	*100,00%*	*109,83%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	50 Unit	67.400.000	40 Unit	43.975.200	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Unit*	*43.975.200*	*80,00%*	*65,25%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	933.756.855	5 Unit	828.668.412	1 Unit	22.775.800	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*5 Unit*	*828.668.412*	*100,00%*	*88,75%*	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1,15**	**20,92**	**9,72**	**24,08**	**0,97**	**24,76**	**78,71**	**23,48**	**90,55**	**93,24**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**	**ST**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**267.594.500**	**65,45 %**	**178.156.700**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*65,45 %*	*178.156.700*	*32,73%*	*66,58%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Tercapainya Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**		**92.747.500**		**55.648.500**		-		-		-		-		-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*55.648.500*		*60,00%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500 %	92.747.500	300 %	55.648.500											- -	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*55.648.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan**		**174.847.000**		**122.508.200**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*122.508.200*		*70,07%*	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	174.847.000	60 Laporan	122.508.200	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Laporan*	*122.508.200*	*120,00%*	*70,07%*	KEC. WONOSOBO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**514.815.600**	**46,92 %**	**427.840.928**	**% 100**	**74.270.600**	**% 0,00**	-	**% 14,73**	**37.867.000**	**7,75 %**	**5.307.600**	**0,00 %**	**18.897.050**	*22,48 %*	*62.071.650*	*22,48%*	*83,57%*	*69,40 %*	*489.912.578*	*34,70%*	*95,16%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**		**495.839.800**		**427.840.928**		**55.294.800**		-		**37.867.000**		**5.307.600**		-	-	*43.174.600*		*78,08%*	-	*471.015.528*		*94,99%*	KEC. WONOSOBO
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	145 Kecamatan/Pekon	378.160.000	96 Kecamatan/ Pekon	362.228.528	29 Kecamatan/Pekon	46.969.000	0 Kecamatan/Pekon	-	19 Kecamatan/Pekon	37.867.000	10 Kecamatan/Pekon	5.307.600	- Kecamatan/Pekon	-	*29 Kecamatan/Pekon*	*43.174.600*	*100,00%*	*91,92%*	*125 Kecamatan/Pekon*	*405.403.128*	*86,21%*	*107,20%*	KEC. WONOSOBO
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100 %	8.325.800	%		% 100	8.325.800	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. WONOSOBO
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	145 Kecamatan/Pekon	109.354.000	87 Kecamatan/ Pekon	65.612.400	Kecamatan/Pekon		Kecamatan/Pekon		Kecamatan/Pekon		Kecamatan/Pekon		- *Kecamatan/Pekon*	-	*0,00%*	*0,00%*	*87 Kecamatan/Pekon*	*65.612.400*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. WONOSOBO
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**18.975.800**		-		**18.975.800**		-		-		-	**18.897.050**	-	*18.897.050*		*99,58%*	-	*18.897.050*		*99,58%*	KEC. WONOSOBO
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 %	18.975.800	%		% 100	18.975.800	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	18.897.050	*100 %*	*18.897.050*	*100,00%*	*99,58%*	*100 %*	*18.897.050*	*100,00%*	*99,58%*	KEC. WONOSOBO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**10,25**	**50,99**	**5,40**	**7,15**	**30,40**	**25,44**	**46,04**	**83,57**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban**	**200 %**	**141.457.500**	**80,00 %**	**156.874.500**	**% 100**	**79.715.900**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*156.874.500*	*40,00%*	*110,90%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapainya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah**		**141.457.500**		**156.874.500**		**79.715.900**		-		-		-		-	-	*0,00%*		-	*156.874.500*		*110,90%*	KEC. WONOSOBO
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141.457.500	48 Bulan	156.874.500	Bulan 12	79.715.900	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*156.874.500*	*80,00%*	*110,90%*	KEC. WONOSOBO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**402.997.500**	**60,00 %**	**241.798.500**	**% 100**	**20.309.100**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*241.798.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. WONOSOBO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**402.997.500**		**241.798.500**		**20.309.100**				-		-		-	-	-				**241.798.500**		**60,00%**	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon	25 Kali	96.802.500	15 Kali	58.081.500	Kali 5	7.820.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*15 Kali*	*58.081.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	140 Pekon	228.750.000	84 Pekon	137.250.000	Pekon 28	12.488.600	Pekon 0	-	Pekon -	-	0 Pekon	-	- Pekon	-	- *Pekon*	-	*0,00%*	*0,00%*	*84 Pekon*	*137.250.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APDPekon	10 Kali	77.445.000	6 Kali	46.467.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*46.467.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. WONOSOBO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
33			**KECAMATAN TALANG PADANG**																-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**15.383.520.945**	**79,07 %**	**13.778.114.629**	**% 100**	**2.361.574.263**	**% 2,97**	**525.053.306**	**% 6,89**	**574.370.253**	**% 12,00**	**594.564.450**	**% 77,22**	**491.972.402**	*99,08 %*	*2.185.960.411*	*99,08%*	*92,56%*	*178,15 %*	*15.964.075.040*	*89,07%*	*103,77%*	KEC. TALANG PADANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**85.125.000**		**67.575.000**		**13.425.000**		-		**1.800.000**		**1.500.000**		-	-	*3.300.000*		*24,58%*	-	*70.875.000*		*83,26%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	200 Buku	37.500.000	160 Buku	34.500.000	Buku 40	3.900.000	Buku 0	-	Buku 10	1.800.000	8 Buku	1.500.000	22 Buku	-	*40 Buku*	*3.300.000*	*100,00%*	*84,62%*	*200 Buku*	*37.800.000*	*100,00%*	*100,80%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	50 Buku	7.500.000	60 Buku	7.500.000	Buku 10	1.500.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Buku*	*7.500.000*	*120,00%*	*100,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Buku	7.500.000	30 Buku	4.500.000	Buku 10	1.500.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Buku*	*4.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	50 Buku	7.500.000	40 Buku	6.000.000	Buku 10	1.500.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Buku*	*6.000.000*	*80,00%*	*80,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Buku	7.500.000	30 Buku	4.500.000	Buku 10	1.500.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Buku*	*4.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Buku	7.500.000	30 Buku	4.500.000	Buku 10	1.500.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Buku*	*4.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Buku	10.125.000	30 Buku	6.075.000	Buku 10	2.025.000	Buku 0	-	Buku -	-	Buku		- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Buku*	*6.075.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**12.898.138.445**		**11.775.255.765**		**2.052.916.963**		**458.024.294**		**526.404.060**		**535.308.258**		**454.490.857**	-	*1.974.227.469*		*96,17%*	-	*13.749.483.234*		*106,60%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	10.504.938.445	88 Orang	9.469.185.765	Orang 22	1.558.506.963	Orang 6	348.374.294	Orang 5	410.044.060	5 Orang	418.788.258	6 Orang	344.840.857	*22 Orang*	*1.522.047.469*	*100,00%*	*97,66%*	*110 Orang*	*10.991.233.234*	*100,00%*	*104,63%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	2.020.500.000	88 Orang	2.019.900.000	Orang 22	438.600.000	Orang 6	109.650.000	Orang 5	109.650.000	5 Orang	109.650.000	6 Orang	109.650.000	*22 Orang*	*438.600.000*	*100,00%*	*100,00%*	*110 Orang*	*2.458.500.000*	*100,00%*	*121,68%*	KEC. TALANG PADANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	372.700.000	48 Bulan	286.170.000	Bulan 12	55.810.000	Bulan 0	-	Bulan 1	6.710.000	1 Bulan	6.870.000	10 Bulan	-	*12 Bulan*	*13.580.000*	*100,00%*	*24,33%*	*60 Bulan*	*299.750.000*	*100,00%*	*80,43%*	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**		**74.000.000**		**57.600.000**		-		-		-		-			-	-		*0,00%*	-	*57.600.000*		*77,84%*	KEC. TALANG PADANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	185 Stel	74.000.000	148 Stel	57.600.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	*148 Stel*	*57.600.000*	*80,00%*	*77,84%*	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**260.562.000**		**225.982.050**		**36.580.900**		**900.000**		**3.748.200**		**2.876.150**		-	-	*7.524.350*		*20,57%*	-	*233.506.400*		*89,62%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	71.670.000	40 Unit	80.021.700	Unit 10	12.614.000	Unit 0	-	Unit 1	1.596.000	1 Unit	769.800	8 Unit	-	*10 Unit*	*2.365.800*	*100,00%*	*18,76%*	*50 Unit*	*82.387.500*	*100,00%*	*114,95%*	KEC. TALANG PADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3000 Kotak	67.500.000	1900 Kotak	40.500.000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- *Kotak*	-	*0,00%*	*0,00%*	*1.900 Kotak*	*40.500.000*	*63,33%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29300 Eksemplar	41.667.000	23540 Eksemplar	37.637.100	5860 Eksemplar	9.252.900	159 Eksemplar	251.400	374 Eksemplar	591.000	726 Eksemplar	1.145.500	4.601 Eksemplar	-	*5.860 Eksemplar*	*1.987.900*	*100,00%*	*21,48%*	*29.400 Eksemplar*	*39.625.000*	*100,34%*	*95,10%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2280 Buah	66.225.000	1924 Buah	59.723.250	456 Buah	14.714.000	20 Buah	648.600	48 Buah	1.561.200	30 Buah	960.850	358 Buah	-	*456 Buah*	*3.170.650*	*100,00%*	*21,55%*	*2.380 Buah*	*62.893.900*	*104,39%*	*94,97%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30 Kali	13.500.000	18 Kali	8.100.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*18 Kali*	*8.100.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**340.761.000**		**283.914.264**		**71.093.000**		**23.155.612**		**10.566.593**		**16.751.442**		**4.469.545**	-	*54.943.192*		*77,28%*	-	*338.857.456*		*99,44%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	195.861.000	48 Bulan	176.974.264	12 Bulan	39.138.000	1 Bulan	2.180.612	3 Bulan	10.086.593	3 Bulan	7.767.192	5 Bulan	4.469.545	*12 Bulan*	*24.503.942*	*100,00%*	*62,61%*	*60 Bulan*	*201.478.206*	*100,00%*	*102,87%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	144.900.000	4 Kali	106.940.000	Kali 1	31.955.000	Kali 0	20.975.000	Kali -	480.000	0 Kali	8.984.250	1 Kali	-	*1 Kali*	*30.439.250*	*100,00%*	*95,26%*	*5 Kali*	*137.379.250*	*100,00%*	*94,81%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.724.934.500**		**1.367.787.550**		**187.558.400**		**42.973.400**		**31.851.400**		**38.128.600**		**33.012.000**	-	*145.965.400*		*77,82%*	-	*1.513.752.950*		*87,76%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	188.350.000	4 Unit	177.775.400	Unit 1	37.670.000	Unit 0	2.467.400	Unit -	2.467.400	0 Unit	11.369.600	1 Unit	-	*1 Unit*	*16.304.400*	*100,00%*	*43,28%*	*5 Unit*	*194.079.800*	*100,00%*	*103,04%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	689.442.000	20 Unit	651.726.650	Unit 5	149.888.400	Unit 1	40.506.000	Unit 1	29.384.000	1 Unit	26.759.000	2 Unit	33.012.000	*5 Unit*	*129.661.000*	*100,00%*	*86,51%*	*25 Unit*	*781.387.650*	*100,00%*	*113,34%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	30 Unit	32.400.000	18 Unit	19.440.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*18 Unit*	*19.440.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	67.500.000	3 Unit	40.500.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*40.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	747.242.500	4 Unit	478.345.500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*478.345.500*	*80,00%*	*64,01%*	KEC. TALANG PADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		2,97	22,23	6,89	24,32	12,00	25,18	77,22	20,83	99,08	92,56					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR	ST	ST					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**327.091.250**	**60,00 %**	**196.254.750**	% 100	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*60,00 %*	*196.254.750*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**122.492.250**		**73.495.350**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*73.495.350*		*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	122.492.250	12 Kali	73.495.350	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kali*	*73.495.350*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**204.599.000**		**122.759.400**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*122.759.400*		*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	204.599.000	30 Eksemplar	122.759.400	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar*	*122.759.400*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. TALANG PADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200** **%**	**507.070.500**	**60,00 %**	**361.737.950**	**% 100**	**33.376.650**	**% 0,00**	**29.481.150**	**% 100,00**	**2.569.400**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	***100,00 %***	***32.050.550***	***1,00***	***96,03%***	***160,00 %***	***393.788.500***	***80,00%***	***77,66%***	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**507.070.500**		**361.737.950**		**33.376.650**		**29.481.150**		**2.569.400**		-		-	-	***32.050.550***		***96,03%***	-	***393.788.500***		***77,66%***	KEC. TALANG PADANG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	5 Kali	334.602.000	3 Kali	258.256.850	Kali 1	33.376.650	Kali 0	29.481.150	Kali 1	2.569.400	0 Kali	-	- Kali	-	***1 Kali***	***32.050.550***	***100,00%***	***96,03%***	***4 Kali***	***290.307.400***	***0,00%***	***86,76%***	KEC. TALANG PADANG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	20 Kali	172.468.500	12 Kali	103.481.100	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***12 Kali***	***103.481.100***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. TALANG PADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**88,33**	**100,00**	**7,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**96,03**						
									Predikat kinerja		**SR**	**R**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200** **%**	**139.500.000**	**80,00 %**	**165.900.000**	**% 100**	**78.900.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	***80,00 %***	***165.900.000***	***40,00%***	***118,92%***	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah**		**139.500.000**		**165.900.000**		**78.900.000**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***165.900.000***		***118,92%***	KEC. TALANG PADANG
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	139.500.000	48 Bulan	165.900.000	Bulan 12	78.900.000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	***- Bulan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***48 Bulan***	***165.900.000***	***80,00%***	***118,92%***	KEC. TALANG PADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200** **%**	**58.432.500**	**2,86 %**	**25.103.250**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	***2,86 %***	***25.103.250***	***1,43%***	***42,96%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**58.432.500**		**25.103.250**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***25.103.250***		***42,96%***	KEC. TALANG PADANG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %	16.593.750	0 %	-	%		%		%		%		***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	KEC. TALANG PADANG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	41.838.750	3 Kali	25.103.250	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Kali***	***25.103.250***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. TALANG PADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200** **%**	**425.359.000**	**89,27 %**	**275.014.350**	**% 100**	**13.500.000**	**% 0,00**	-	**% 85,00**	**13.365.000**	**15,00 %**	-	**0,00 %**	-	***100,00 %***	***13.365.000***	***100,00%***	***99,00%***	***189,27 %***	***288.379.350***	***94,63%***	***67,80%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**425.359.000**		**275.014.350**		**13.500.000**		-		**13.365.000**		-		-	-	***13.365.000***		***99,00%***	-	***288.379.350***		***67,80%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon	5 Kali	206.048.500	3 Kali	123.629.100	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Kali***	***123.629.100***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	182.758.750	80 Kali	136.385.250	Kali 20	13.500.000	Kali 0	-	Kali 17	13.365.000	3 Kali	-	- Kali	-	***20 Kali***	***13.365.000***	***100,00%***	***99,00%***	***100 Kali***	***149.750.250***	***100,00%***	***81,94%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	36.551.750	100 %	15.000.000	%		%		%		%		%		***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	***100 %***	***15.000.000***	***100,00%***	***41,04%***	KEC. TALANG PADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**85,00**	**99,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,00**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**T**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
34			**KECAMATAN PULAU PANGGUNG**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9.865.777.055**	**80,71 %**	**9.015.186.526**	**100 %**	**1.454.689.863**	**3,45 %**	**438.531.062**	**0,71 %**	**177.654.471**	**12,99 %**	**383.372.106**	**32,51 %**	**309.209.462**	***49,65 %***	***1.308.767.101***	***49,65%***	***89,97%***	***130,36 %***	***10.323.953.627***	***65,18%***	***104,64%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**126.300.000**		**91.050.000**		**5.462.400**		**600.000**		-		**1.200.000**		-	-	***1.800.000***		***32,95%***	-	***92.850.000***		***73,52%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	76.800.000	83 Eksemplar Dokumen	60.480.000	20 Eksemplar Dokumen	3.060.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1.200.000	19 Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokumen***	***1.200.000***	***100,00%***	***39,22%***	***103 Eksemplar Dokumen***	***61.680.000***	***103,00%***	***80,31%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	23.250.000	200 Eksemplar Dokumen	14.385.000	50 Eksemplar Dokumen	302.400	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***200 Eksemplar Dokumen***	***14.385.000***	***80,00%***	***61,87%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.250.000	30 Eksemplar Dokumen	3.150.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***3.150.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.250.000	40 Eksemplar Dokumen	3.585.000	10 Eksemplar Dokumen	1.050.000	5 Eksemplar Dokumen	600.000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokumen***	***600.000***	***100,00%***	***57,14%***	***50 Eksemplar Dokumen***	***4.185.000***	***100,00%***	***79,71%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5.250.000	90 Eksemplar Dokumen	3.150.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***90 Eksemplar Dokumen***	***3.150.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.250.000	30 Eksemplar Dokumen	3.150.000	10 Eksemplar Dokumen	1.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***3.150.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	5.250.000	30 Eksemplar Dokumen	3.150.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***3.150.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8.123.983.495**		**7.688.292.647**		**1.305.929.163**		**393.966.362**		**177.654.471**		**357.983.581**		**296.170.762**	-	***1.225.775.176***		***93,86%***	-	***8.914.067.823***		***109,73%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	6.748.092.495	52 Bulan	6.379.718.047	12 Bulan	1.042.380.963	3 Bulan	323.466.362	3 Bulan	177.654.471	3 Bulan	262.898.581	3 Bulan	238.015.762	***12 Bulan***	***1.002.035.176***	***100,00%***	***96,13%***	***64 Bulan***	***7.381.753.223***	***91,43%***	***109,39%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	1.044.250.000	56 Orang	1.028.850.000	14 Orang	212.500.000	4 Orang	70.500.000	3 Orang	-	3 Orang	89.125.000	4 Orang	52.875.000	***14 Orang***	***212.500.000***	***100,00%***	***100,00%***	***70 Orang***	***1.241.350.000***	***100,00%***	***118,87%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Bulan	324.500.000	40 Bulan	275.440.000	10 Bulan	49.620.000	0 Bulan	-	- Bulan	-	1 Bulan	5.960.000	9 Bulan	5.280.000	***10 Bulan***	***11.240.000***	***100,00%***	***22,65%***	***50 Bulan***	***286.680.000***	***100,00%***	***88,35%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahu	50 Eksemplar	7.141.000	30 Eksemplar	4.284.600	10 Eksemplar	1.428.200	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- ***Eksemplar***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar***	***4.284.600***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**200.680.150**		**142.146.490**		**16.197.300**		**300.000**		-		**2.723.000**		**900.000**	-	***3.923.000***		***24,22%***	-	***146.069.490***		***72,79%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	111.375.000	2100 Kotak	77.071.500	500 Kotak	6.030.000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	- ***Kotak***	-	***0,00%***	***0,00%***	***2.100 Kotak***	***77.071.500***	***84,00%***	***69,20%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	27.150.000	4 Paket	18.812.900	1 Paket	3.042.200	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	633.000	1 Paket	-	***1 Paket***	***633.000***	***100,00%***	***20,81%***	***5 Paket***	***19.445.900***	***100,00%***	***71,62%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2280 Buah	62.155.150	1836 Buah/Bulan	46.262.090	456 Buah/Bulan	7.125.100	19 Buah/Bulan	300.000	- Buah/Bulan	-	134 Buah/Bulan	2.090.000	303 Buah/Bulan	900.000	***456 Buah/Bulan***	***3.290.000***	***100,00%***	***46,17%***	***2.292 Buah/Bulan***	***49.552.090***	***100,53%***	***79,72%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																-	-			-	-			KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**338.443.900**		**286.949.714**		**68.753.000**		**30.257.500**		-		**14.569.725**		**9.487.700**	-	***54.314.925***		***79,00%***	-	***341.264.639***		***100,83%***	KEC. PULAU PANGGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	140.790.000	48 Bulan	138.865.568	Bulan 12	34.758.000	Bulan 3	10.257.500	Bulan -	-	2 Bulan	5.416.725	7 Bulan	8.718.700	*12 Bulan*	*24.392.925*	*100,00%*	*70,18%*	*60 Bulan*	*163.258.493*	*100,00%*	*115,96%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	75.103.900	12 Unit	74.554.146	Unit 3	7.105.000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	2.653.000	2 Unit	769.000	*3 Unit*	*3.422.000*	*100,00%*	*48,16%*	*15 Unit*	*77.976.146*	*100,00%*	*103,82%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	122.550.000	3 Kali	73.530.000	Kali 1	26.890.000	Kali 0	20.000.000	Kali -	-	1 Kali	6.500.000	- Kali	-	*1 Kali*	*26.500.000*	*100,00%*	*98,55%*	*4 Kali*	*100.030.000*	*80,00%*	*81,62%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.076.369.510**		**806.747.675**		**58.348.000**		**13.407.200**		**-**		**6.895.800**		**2.651.000**	-	*22.954.000*		*39,34%*	-	*829.701.675*		*77,08%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	220.850.000	4 Unit	167.920.969	Unit 1	44.170.000	Unit 0	9.671.200	Unit -	-	0 Unit	6.617.800	1 Unit	2.418.000	*1 Unit*	*18.707.000*	*100,00%*	*42,35%*	*5 Unit*	*186.627.969*	*100,00%*	*84,50%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	43.500.000	8 Unit	37.520.000	Unit 2	8.700.000	Unit 0	1.884.000	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	233.000	*2 Unit*	*2.117.000*	*100,00%*	*24,33%*	*10 Unit*	*39.637.000*	*100,00%*	*91,12%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	100 Unit	812.019.510	82 Unit	601.306.706	Unit 20	5.478.000	Unit 5	1.852.000	Unit 2	-	1 Unit	278.000	12 Unit	-	*20 Unit*	*2.130.000*	*100,00%*	*38,88%*	*102 Unit*	*603.436.706*	*102,00%*	*74,31%*	KEC. PULAU PANGGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**3,45**	**30,15**	**0,71**	**12,21**	**12,99**	**26,35**	**32,51**	**21,26**	**49,65**	**89,97**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**297.612.250**	**60,00 %**	**178.567.350**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*178.567.350*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**31.662.250**		**18.997.350**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*18.997.350*		*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	31.662.250	6 Kali	18.997.350	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*18.997.350*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**265.950.000**		**159.570.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*159.570.000*		*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	265.950.000	30 Eksemplar	159.570.000	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar*	*159.570.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**456.501.000**	**65,00 %**	**385.402.600**	% **100**	**25.534.450**	% **12,50**	**12.465.450**	% **0,00**	-	% **0,00**	-	% **12,50**	-	*25,00 %*	*12.465.450*	*25,00%*	*48,82%*	*90,00 %*	*397.868.050*	*45,00%*	*87,16%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**		**456.501.000**		**385.402.600**		**25.534.450**		**12.465.450**		-		-		-	-	*12.465.450*		*48,82%*	-	*397.868.050*		*87,16%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	10 Kali	292.428.250	8 Kali	286.958.950	Kali 2	12.822.350	Kali 1	12.465.450	Kali -	-	0 Kali	-	1 Kali	-	*2 Kali*	*12.465.450*	*100,00%*	*97,22%*	*10 Kali*	*299.424.400*	*100,00%*	*102,39%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	30 Kali	164.072.750	18 Kali	98.443.650	Kali 6	12.712.100	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*18 Kali*	*98.443.650*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**12,50**	**48,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**0,00**	**25,00**	**48,82**						
									Predikat kinerja		**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**146.200.000**	**80,00 %**	**162.920.000**	**% 100**	**78.000.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*162.920.000*	*40,00%*	*111,44%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**146.200.000**		**162.920.000**		**78.000.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*162.920.000*		*111,44%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	146.200.000	48 Bulan	162.920.000	Bulan 12	78.000.000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*162.920.000*	*80,00%*	*111,44%*	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**101.612.500**	**60,00 %**	**60.967.500**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*60.967.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**101.612.500**		**60.967.500**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*60.967.500*		*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	90.862.500	3 Kali	54.517.500	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*54.517.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	10.750.000	3 Kali	6.450.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*6.450.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**349.342.500**	**80,00 %**	**225.355.500**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*225.355.500*	*40,00%*	*64,51%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**349.342.500**		**225.355.500**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*225.355.500*		*64,51%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	105 Kali	349.342.500	84 Kali	225.355.500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*84 Kali*	*225.355.500*	*80,00%*	*64,51%*	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
35			**KECAMATAN PUGUNG**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**13.271.389.995**	**74,32 %**	**11.809.948.264**	**% 100**	**1.914.603.429**	**% 2,94**	**398.255.458**	**% 45,45**	**487.437.327**	**% 16,64**	**516.827.288**	**% 5,87**	**271.645.668**	*70,91 %*	*1.674.165.741*	*70,91%*	*87,44%*	*145,23 %*	*13.484.114.005*	*72,61%*	*101,60%*	KEC. PUGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**102.032.000**		**79.512.300**		**5.177.400**		**990.000**		**2.344.100**		**310.000**		-	-	*3.644.100*		*70,38%*	-	*83.156.400*		*81,50%*	KEC. PUGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	60 Buku	77.972.000	48 Buku	60.750.700	Buku 12	2.283.100	Buku 2	990.000	Buku 2	1.223.100	0 Buku	-	8 Buku	-	*12 Buku*	*2.213.100*	*100,00%*	*96,93%*	*60 Buku*	*62.963.800*	*100,00%*	*80,75%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	500 %	7.250.000	400 %	5.575.000	% 100	325.000	% 0,00	-	% 100,00	325.000	0 %	-	- %	-	*100 %*	*325.000*	*100,00%*	*100,00%*	*500 %*	*5.900.000*	*100,00%*	*81,38%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	500 %	2.250.000	400 %	1.800.000	% 100	325.000	% 0,00	-	% 100,00	325.000	0 %	-	- %	-	*100 %*	*325.000*	*100,00%*	*100,00%*	*500 %*	*2.125.000*	*100,00%*	*94,44%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	500 %	3.005.000	400 %	2.404.000	% 100	310.000	% 0,00	-	% -	-	100 %	310.000	- %	-	*100 %*	*310.000*	*100,00%*	*100,00%*	*500 %*	*2.714.000*	*100,00%*	*90,32%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	500 %	3.155.000	400 %	2.262.600	% 100	471.000	% 0,00	-	% 100,00	471.000	0 %	-	- %	-	*100 %*	*471.000*	*100,00%*	*100,00%*	*500 %*	*2.733.600*	*100,00%*	*86,64%*	KEC. PUGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500 %	2.650.000	400 %	2.120.000	% 100	280.600	% 0,00	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	0,00%	0,00%	400 %	2.120.000	80,00%	80,00%	KEC. PUGUNG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500 %	5.750.000	400 %	4.600.000	% 100	1.182.700	% 0,00	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	0,00%	0,00%	400 %	4.600.000	80,00%	80,00%	KEC. PUGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**11.588.376.545**		**10.393.605.394**		**1.820.164.435**		**391.745.458**		**465.777.327**		**493.587.288**		**269.525.343**	-	*1.620.635.416*		*89,04%*	-	*12.014.240.810*		*103,67%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	10.551.363.545	96 Orang	9.356.034.994	24 Orang	1.580.114.435	6 Orang	341.435.458	6 Orang	410.457.327	6 Orang	436.967.288	6 Orang	224.225.343	*24 Orang*	*1.413.085.416*	*100,00%*	*89,43%*	*120 Orang*	*10.769.120.410*	*100,00%*	*102,06%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	674.750.000	36 Orang	714.510.000	9 Orang	182.240.000	3 Orang	45.300.000	2 Orang	45.300.000	1 Orang	46.210.000	3 Orang	45.300.000	*9 Orang*	*182.110.000*	*100,00%*	*99,93%*	*45 Orang*	*896.620.000*	*100,00%*	*132,88%*	KEC. PUGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	362.263.000	48 Bulan	323.060.400	12 Bulan	57.810.000	1 Bulan	5.010.000	2 Bulan	10.020.000	1 Bulan	10.410.000	8 Bulan	-	*12 Bulan*	*25.440.000*	*100,00%*	*44,01%*	*60 Bulan*	*348.500.400*	*100,00%*	*96,20%*	KEC. PUGUNG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**		-		-		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	-			KEC. PUGUNG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	175 Stel	-	105 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		*- Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	*105 Stel*	-	*60,00%*	*0,00%*	KEC. PUGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**283.325.450**		**241.989.320**		**8.821.594**		**2.185.600**		**2.183.200**		**2.427.850**		-	-	*6.796.650*		*77,05%*	-	*248.785.970*		*87,81%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	126.713.400	48 Bulan	123.313.540	12 Bulan	1.654.000	2 Bulan	257.800	2 Bulan	391.800	5 Bulan	1.000.000	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*1.649.600*	*100,00%*	*99,73%*	*60 Bulan*	*124.963.140*	*100,00%*	*98,62%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1000 Kotak	45.000.000	600 Kotak	27.000.000	0 Kotak	-	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		*- Kotak*	-	*0,00%*	*0,00%*	*600 Kotak*	*27.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	37.767.500	48 Bulan	36.716.450	12 Bulan	4.599.760	3 Bulan	996.000	3 Bulan	855.500	3 Bulan	797.850	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*2.649.350*	*100,00%*	*57,60%*	*60 Bulan*	*39.365.800*	*100,00%*	*104,23%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	36.344.550	48 Bulan	32.459.330	12 Bulan	2.567.834	3 Bulan	931.800	3 Bulan	935.900	3 Bulan	630.000	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*2.497.700*	*100,00%*	*97,27%*	*60 Bulan*	*34.957.030*	*100,00%*	*96,18%*	KEC. PUGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	250 Kali	37.500.000	150 Kali	22.500.000	0 Kali	-	Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*150 Kali*	*22.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**250.000.000**		**210.526.250**		**36.000.000**		**592.000**		**13.990.300**		**8.704.850**		**2.120.325**	-	*25.407.475*		*70,58%*	-	*235.933.725*		*94,37%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	112.500.000	48 Bulan	108.026.250	12 Bulan	23.500.000	1 Bulan	592.000	5 Bulan	8.990.300	0 Bulan	1.204.850	6 Bulan	2.120.325	*12 Bulan*	*12.907.475*	*100,00%*	*54,93%*	*60 Bulan*	*120.933.725*	*100,00%*	*107,50%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	137.500.000	4 Kali	102.500.000	1 Kali	12.500.000	0 Kali	-	- Kali	5.000.000	0 Kali	7.500.000	1 Kali	-	*1 Kali*	*12.500.000*	*100,00%*	*100,00%*	*5 Kali*	*115.000.000*	*100,00%*	*83,64%*	KEC. PUGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.047.656.000**		**884.315.000**		**44.440.000**		**2.742.400**		**3.142.400**		**11.797.300**		-	-	*17.682.100*		*39,79%*	-	*901.997.100*		*86,10%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	240.656.000	4 Unit	218.852.200	1 Unit	43.220.000	0 Unit	2.742.400	- Unit	3.142.400	0 Unit	11.797.300	1 Unit	-	*1 Unit*	*17.682.100*	*100,00%*	*40,91%*	*5 Unit*	*236.534.300*	*100,00%*	*98,29%*	KEC. PUGUNG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Kantor	40 Unit	27.950.000	32 Unit	26.210.000	8 Unit	1.220.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*32 Unit*	*26.210.000*	*80,0%*	*93,8%*	KEC. PUGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	75.050.000	4 Unit	90.040.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*90.040.000*	*80,0%*	*120,0%*	KEC. PUGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	10 Unit	704.000.000	8 Unit	549.212.800	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Unit*	*549.212.800*	*80,0%*	*78,0%*	KEC. PUGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		2,94	20,80	45,45	25,46	16,64	26,99	5,87	14,19	70,91	87,44						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**381.581.500**	**60,00 %**	**228.948.900**	**% 100**	**2.700.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*228.948.900*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**69.891.000**		**41.934.600**		**2.700.000**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*41.934.600*		*60,00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	69.891.000	6 Kali	41.934.600	Kali 2	2.700.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*41.934.600*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PUGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**311.690.500**		**187.014.300**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*187.014.300*		*60,00%*	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	135 Eksemplar	239.423.000	81 Eksemplar	143.653.800	Eksemplar 0	-	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*81 Eksemplar*	*143.653.800*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PUGUNG
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarg	15 Kali	72.267.500	9 Kali	43.360.500	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Kali*	*43.360.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PUGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**327.250.000**	**80,00 %**	**292.546.500**	**% 100**	**36.900.000**	% 0,00	-	% 100,00	**27.893.800**	0,00 %	-	0,00 %	-	*100 %*	*27.893.800*	*100,00%*	*75,59%*	*180,00 %*	*320.440.300*	*90,00%*	*97,92%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**		**327.250.000**		**292.546.500**		**36.900.000**		-		**27.893.800**		-		-	*27.893.800*		*75,59%*	-	*320.440.300*		*97,92%*	KEC. PUGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	135 Eksemplar	327.250.000	108 Eksemplar	292.546.500	Eksemplar 27	36.900.000	Eksemplar 0	-	Eksemplar 27	27.893.800	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	*27 Eksemplar*	*27.893.800*	*100,00%*	*75,59%*	*135 Eksemplar*	*320.440.300*	*100,00%*	*97,92%*	KEC. PUGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	100,00	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,59						
									Predikat kinerja		SR	SR	ST	T	SR	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**137.744.500**	**80,00 %**	**123.995.600**	**% 100**	**72.282.600**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*123.995.600*	*40,00%*	*90,02%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**137.744.500**		**123.995.600**		**72.282.600**		-	*0,00*	-		-		-	- -	-	*0,00%*	- -	*123.995.600*		*90,02%*	KEC. PUGUNG
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	137.744.500	48 Bulan	123.995.600	Bulan 12	72.282.600	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*123.995.600*	*80,00%*	*90,02%*	KEC. PUGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**24.575.000**	**60,00 %**	**14.745.000**	**% 100**	**1.000.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*14.745.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. PUGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**24.575.000**		**14.745.000**		**1.000.000**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	***14.745.000***		***60,00%***	KEC. PUGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	24.575.000	3 Kali	14.745.000	Kali 1	1.000.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Kali***	***14.745.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PUGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	500 %	21.200.000	300 %	12.720.000	% 0	-	%		%		%		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***300 %***	***12.720.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PUGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**318.574.000**	**70,18 %**	**203.172.900**	**% 100**	-	**% 0,17**	-	**% 17,58**	-	**% 0,29**	-	**% 78,87**	-	- **%**	-	***0,00%***	***0,00%***	***70,18 %***	***203.172.900***	***35,09%***	***63,78%***	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**318.574.000**		**203.172.900**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	***203.172.900***		***63,78%***	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	140 Kali	204.969.500	112 Kali	135.010.200	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***112 Kali***	***135.010.200***	***80,00%***	***65,87%***	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	135 Kali	113.604.500	81 Kali	68.162.700	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***81 Kali***	***68.162.700***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. PUGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
36			**KECAMATAN CUKUH BALAK**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**8.395.950.290**	**76,68 %**	**7.536.802.848**	**% 100**	**1.295.715.872**	**% 0,17**	**253.227.665**	**% 17,58**	**296.518.994**	**% 0,29**	**310.375.516**	**% 78,87**	**316.113.368**	***96,91 %***	***1.176.235.543***	***96,91%***	***90,78%***	***173,59 %***	***8.713.038.391***	***86,80%***	***103,78%***	KEC. CUKUH BALAK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**101.358.990**		**69.615.694**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	***69.615.694***		***68,68%***	KEC. CUKUH BALAK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	15 Eksemplar Dokumen	62.080.000	12 Eksemplar Dokumen	46.024.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***12 Eksemplar Dokumen***	***46.024.000***	***80,00%***	***74,14%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	8.465.000	40 Eksemplar Dokumen	5.103.300	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***40 Eksemplar Dokumen***	***5.103.300***	***80,00%***	***60,29%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	7.578.990	30 Eksemplar Dokumen	4.547.394	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***4.547.394***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6.595.000	30 Eksemplar Dokumen	3.957.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***3.957.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.915.000	30 Eksemplar Dokumen	3.549.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***3.549.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	6.225.000	30 Eksemplar Dokumen	3.735.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***3.735.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	4.500.000	30 Eksemplar Dokumen	2.700.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*2.700.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7.080.569.940**		**6.559.622.738**		**1.217.749.580**		**253.227.665**		**282.837.539**		**297.832.323**		**280.428.549**	-	*1.114.326.076*		*91,51%*	-	*7.673.948.814*		*108,38%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	6.240.469.940	48 Orang	5.742.952.738	12 Orang	1.046.749.580	3 Orang	221.277.665	3 Orang	252.262.539	3 Orang	265.882.323	3 Orang	252.603.549	*12 Orang*	*992.026.076*	*100,00%*	*94,77%*	*60 Orang*	*6.734.978.814*	*100,00%*	*107,92%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	570.000.000	45 Orang	583.800.000	9 Orang	127.800.000	3 Orang	31.950.000	2 Orang	30.575.000	2 Orang	31.950.000	2 Orang	27.825.000	*9 Orang*	*122.300.000*	*100,00%*	*95,70%*	*54 Orang*	*706.100.000*	*120,00%*	*123,88%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	270.100.000	24 Orang	232.870.000	6 Orang	43.200.000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*24 Orang*	*232.870.000*	*80,00%*	*86,22%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100.000.000**		**60.000.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*60.000.000*		*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	125 Stel	100.000.000	75 Stel	60.000.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	*75 Stel*	*60.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**415.129.460**		**267.639.676**		**3.348.600**		-		**240.000**		-		-	-	*240.000*		*7,17%*	-	*267.879.676*		*64,53%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	225.007.960	24 Unit	141.773.776	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*24 Unit*	*141.773.776*	*80,00%*	*63,01%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	90.000.000	2160 Kotak	54.000.000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- *Kotak*	-	*0,00%*	*0,00%*	*2.160 Kotak*	*54.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16295 Eksemplar	8.278.000	13136 Eksemplar	6.704.300	3259 Eksemplar	928.500	0 Eksemplar	-	595 Eksemplar	240.000	0 Eksemplar	-	2.664 Eksemplar	-	*3.259 Eksemplar*	*240.000*	*100,00%*	*25,85%*	*16.395 Eksemplar*	*6.944.300*	*100,61%*	*83,89%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	500 %	61.843.500	400 %	47.161.600	% 100	2.420.100	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*47.161.600*	*80,00%*	*76,26%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	30.000.000	60 Kali	18.000.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Kali*	*18.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**288.011.900**		**242.767.240**		**40.709.092**		-		**13.441.455**		**2.303.193**		**15.204.819**	-	*30.949.467*		*76,03%*	-	*273.716.707*		*95,04%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153.111.900	48 Bulan	141.827.240	Bulan 12	30.709.092	Bulan 0	-	Bulan 2	3.441.455	0 Bulan	2.303.193	10 Bulan	15.204.819	*12 Bulan*	*20.949.467*	*100,00%*	*68,22%*	*60 Bulan*	*162.776.707*	*100,00%*	*106,31%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	134.900.000	4 Kali	100.940.000	Kali 1	10.000.000	Kali 0	-	Kali 1	10.000.000	0 Kali	-	- Kali	-	*1 Kali*	*10.000.000*	*100,00%*	*100,00%*	*5 Kali*	*110.940.000*	*100,00%*	*82,24%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**410.880.000**		**337.157.500**		**33.908.600**		-		-		**10.240.000**		**20.480.000**	-	*30.720.000*		*90,60%*	-	*367.877.500*		*89,53%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	188.350.000	4 Mobil	176.194.000	Mobil 1	22.206.600	Mobil 0	-	Mobil -	-	0 Mobil	7.395.000	1 Mobil	14.790.000	*1 Mobil*	*22.185.000*	*100,00%*	*99,90%*	*5 Mobil*	*198.379.000*	*100,00%*	*105,32%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	155 Unit	88.430.000	127 Unit	80.503.500	Unit 31	11.702.000	Unit 0	-	Unit -	-	5 Unit	2.845.000	26 Unit	5.690.000	*31 Unit*	*8.535.000*	*100,00%*	*72,94%*	*158 Unit*	*89.038.500*	*101,94%*	*100,69%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Motor	35.100.000	9 Motor	21.060.000	Motor		Motor		Motor		Motor		Motor		- *Motor*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Motor*	*21.060.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	66.000.000	3 Unit	39.600.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*39.600.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	33.000.000	3 Unit	19.800.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*19.800.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,17	19,54	17,58	22,88	0,29	23,95	78,87	24,40	96,91	90,78						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR	ST	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**371.974.000**	**70,00 %**	**223.184.400**		-		-		-		-		-	- -	-	*0,00%*	*0,00%*	*70,00 %*	*223.184.400*	*35,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**166.974.500**		**100.184.700**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*100.184.700*		*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Eksemplar	166.974.500	40 Eksemplar	100.184.700	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar	- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar*	*100.184.700*	*80,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**204.999.500**		**122.999.700**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*122.999.700*		*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	204.999.500	30 Laporan	122.999.700	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Laporan*	*122.999.700*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**308.966.750**	**68,00 %**	**190.111.150**	% **100**	**24.750.000**	% **0,00**	-	% **0,00**	-	% **0,00**	-	% **0,00**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*68,00 %*	*190.111.150*	*34,00%*	*61,53%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**308.966.750**		**190.111.150**		**24.750.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*190.111.150*		*61,53%*	KEC. CUKUH BALAK
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	148.524.500	8 Kali	93.845.800	Kali 2	24.750.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Kali*	*93.845.800*	*80,00%*	*63,19%*	KEC. CUKUH BALAK
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	160.442.250	9 Kali	96.265.350	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Kali*	*96.265.350*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**139.500.000**	**80,00 %**	**149.700.000**	% **100**	**70.200.000**	% **0,00**	-	% **0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*149.700.000*	*40,00%*	*107,31%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**139.500.000**		**149.700.000**		**70.200.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*149.700.000*		*107,31%*	KEC. CUKUH BALAK
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	139.500.000	48 Kali	149.700.000	Kali 12	70.200.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*149.700.000*	*80,00%*	*107,31%*	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**167.462.500**	**60,00 %**	**100.477.500**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*100.477.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**167.462.500**		**100.477.500**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*100.477.500*		*60,00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	71.748.750	3 Kali	43.049.250	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*43.049.250*	*60,0%*	*60,0%*	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	95.713.750	3 Kali	57.428.250	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*57.428.250*	*60,0%*	*60,0%*	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-								
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**387.689.750**	**60,00 %**	**232.613.850**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*232.613.850*	*30,00%*	*60,0%*	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**387.689.750**		**232.613.850**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*232.613.850*		*60,0%*	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	15 Kali	203.649.000	9 Kali	122.189.400	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Kali*	*122.189.400*	*60,0%*	*60,0%*	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	184.040.750	60 Kali	110.424.450	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Kali*	*110.424.450*	*60,0%*	*60,0%*	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
37			**KECAMATAN SEMAKA**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**10.202.585.700**	**78,26 %**	**9.542.922.385**	**% 100**	**1.660.998.773**	% 0,89	**502.169.983**	% 18,77	**251.453.587**	% 1,79	**409.170.740**	% 38,35	**321.305.254**	*59,80 %*	*1.484.099.564*	*59,80%*	*89,35%*	*138,06 %*	*11.027.021.949*	*69,03%*	*108,08%*	KEC. SEMAKA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**47.200.000**		**35.907.100**		**13.129.600**		-		-		**1.324.800**		-	-	*1.324.800*		*10,09%*	-	*37.231.900*		*78,88%*	KEC. SEMAKA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	75 Buku	7.095.000	60 Buku	6.166.800	Buku 15	1.324.800	Buku 0	-	Buku -	-	15 Buku	1.324.800	- Buku	-	*15 Buku*	*1.324.800*	*100,00%*	*100,00%*	*75 Buku*	*7.491.600*	*100,00%*	*105,59%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	500 %	7.650.000	400 %	5.397.900	% 100	807.900	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*5.397.900*	*80,00%*	*70,56%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase Penyediaaan Dokumen Perubahan RKA SKPD	500 %	3.700.000	400 %	3.200.400	% 100	1.430.400	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*3.200.400*	*80,00%*	*86,50%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen DPA SKPD	500 %	7.100.000	400 %	6.760.000	% 100	1.450.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*6.760.000*	*80,00%*	*95,21%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen Perubahan DPA SKPD	500 %	8.730.000	300 %	5.238.000	% 100	1.215.500	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*5.238.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	500 %	9.600.000	400 %	6.484.000	% 100	1.259.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*6.484.000*	*80,00%*	*67,54%*	KEC. SEMAKA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perangkat Daerah	500 %	3.325.000	400 %	2.660.000	% 100	5.642.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*2.660.000*	*80,00%*	*80,00%*	KEC. SEMAKA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8.245.450.905**		**7.844.429.668**		**1.477.206.834**		**480.269.983**		**237.703.587**		**379.267.480**		**319.262.024**	-	*1.416.503.074*		*95,89%*	-	*9.260.932.742*		*112,32%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6.653.450.905	48 Bulan	6.221.179.668	Bulan 12	1.127.106.834	Bula n 3	363.569.983	Bulan 3	179.353.587	3 Bulan	291.742.480	3 Bulan	231.737.024	*12 Bulan*	*1.066.403.074*	*100,00%*	*94,61%*	*60 Bulan*	*7.287.582.742*	*100,00%*	*109,53%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	1.584.000.000	48 Bulan	1.623.250.000	Bulan 12	350.100.000	Bula n 3	116.700.000	Bulan 3	58.350.000	3 Bulan	87.525.000	3 Bulan	87.525.000	*12 Bulan*	*350.100.000*	*100,00%*	*100,00%*	*60 Bulan*	*1.973.350.000*	*100,00%*	*124,58%*	KEC. SEMAKA
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**8.000.000**		-		-		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	-	-		*0,00%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Kali	8.000.000	0 Kali	-	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**200.064.200**		**148.248.480**		**21.718.740**		**1.010.400**		**3.350.000**		**665.200**		-	- -	*5.025.600*		*23,14%*	-	*153.274.080*		*76,61%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315 Buah	25.410.000	252 Buah	23.019.350	63 Buah	9.142.800	7 Buah	1.010.400	5 Buah	745.400	5 Buah	665.200	46 Buah	-	*63 Buah*	*2.421.000*	*100,00%*	*26,48%*	*315 Buah*	*25.440.350*	*100,00%*	*100,12%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1060 Buah	129.605.000	862 Buah/ Bulan	97.680.130	850 Buah/ Bulan	5.400.000	0 Buah /Bulan	-	Buah 281 /Bulan	1.782.000	0 Buah/ Bulan	-	569 Buah/Bulan	-	*850 Buah/ Bulan*	*1.782.000*	*100,00%*	*33,00%*	*1.712 Buah/ Bulan*	*99.462.130*	*161,51%*	*76,74%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40 Eksemplar	13.752.500	32 Eksemplar	9.149.000	8 Eksemplar	3.725.400	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	*- Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*32 Eksemplar*	*9.149.000*	*80,00%*	*66,53%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	100 %	3.296.700	100 %	1.150.000	100 %	1.950.540	0 %	-	42,17 %	822.600	0,00 %	-	57,83 %	-	*100 %*	*822.600*	*100,00%*	*42,17%*	*200 %*	*1.972.600*	*200,00%*	*59,84%*	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	60 Kali	28.000.000	48 Kali	17.250.000	Kali 12	1.500.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*17.250.000*	*80,00%*	*61,61%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**422.250.000**		**401.096.690**		**90.960.000**		**11.020.000**		**8.750.000**		**17.768.660**		**2.043.230**	-	*39.581.890*		*43,52%*	-	*440.678.580*		*104,36%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	118.650.000	48 Bulan	115.326.690	Bulan 12	24.900.000	Bulan 2	2.700.000	Bulan 1	2.490.000	6 Bulan	9.768.660	3 Bulan	2.043.230	*12 Bulan*	*17.001.890*	*100,00%*	*68,28%*	*60 Bulan*	*132.328.580*	*100,00%*	*111,53%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	30 Orang	303.600.000	24 Orang	285.770.000	Orang 6	66.060.000	Orang 1	8.320.000	Orang 1	6.260.000	0 Orang	8.000.000	4 Orang	-	*6 Orang*	*22.580.000*	*100,00%*	*34,18%*	*30 Orang*	*308.350.000*	*100,00%*	*101,56%*	KEC. SEMAKA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.268.266.995**		**1.113.240.447**		**55.990.000**		**9.869.600**		**1.650.000**		**10.144.600**		-	-	*21.664.200*		*38,69%*	-	*1.134.904.647*		*89,48%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	519.050.000	4 Mobil	465.579.250	Mobil 1	55.990.000	Mobil 0	9.869.600	Mobil -	1.650.000	0 Mobil	10.144.600	1 Mobil	-	*1 Mobil*	*21.664.200*	*100,00%*	*38,69%*	*5 Mobil*	*487.243.450*	*100,00%*	*93,87%*	KEC. SEMAKA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	749.216.995	4 Unit	647.661.197	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*647.661.197*	*80,00%*	*86,45%*	KEC. SEMAKA
			Penataan Organisasi			**11.353.600**		-	%	**1.993.599**	%	-	%	-	%		%		- %	-		*0,00%*	-	-		*0,00%*	KEC. SEMAKA
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Kali	11.353.600	0 Kali	-	Kali 100	1.993.599	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*- Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. SEMAKA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,94	30,23	19,82	15,14	1,89	24,63	40,49	19,34	63,14	89,35					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**84.545.000**	**34,52 %**	**52.244.400**	%	-	%	-	%	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*34,52 %*	*52.244.400*	*17,26%*	*61,79%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**53.095.000**		**39.126.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*39.126.000*		*73,69%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	5 Kali	53.095.000	4 Kali	39.126.000	Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*39.126.000*	*80,00%*	*73,69%*	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**28.500.000**		**13.118.400**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*13.118.400*		*46,03%*	KEC. SEMAKA
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	7.140.000	0 %	-	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100 %	6.030.000	100 %	3.920.400	%		%		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	100 %	3.920.400	100,00%	65,01%	KEC. SEMAKA
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	5 Kali	15.330.000	3 Kali	9.198.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	0,00%	0,00%	*3 Kali*	*9.198.000*	60,00%	60,00%	KEC. SEMAKA
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**2.950.000**		-		-		-		-		-		-	-		0,00%	-	-		0,00%	KEC. SEMAKA
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 %	2.950.000	0 %	-	%		%		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	- %	-	0,00%	0,00%	KEC. SEMAKA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR								
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**291.795.600**	**75,15 %**	**233.571.000**	**% 100**	**41.834.600**	% 0,00	-	% 100,00	24.869.000	0,00 %	390.200	0,00 %	-	*100,00 %*	*25.259.200*	*100,00%*	*60,38%*	*175,15 %*	*258.830.200*	*87,58%*	*88,70%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**281.290.000**		**233.571.000**		**31.329.000**		-		**24.869.000**		-		-	-	*24.869.000*		*79,38%*	-	*258.440.000*		*91,88%*	KEC. SEMAKA
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	115 Kali	207.270.000	94 Kali	189.159.000	Kali 23	31.329.000	Kali 0	-	Kali 23	24.869.000	0 Kali	-	- Kali	-	*23 Kali*	*24.869.000*	*100,00%*	*79,38%*	*117 Kali*	*214.028.000*	*101,74%*	*103,26%*	KEC. SEMAKA
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pengarustamaan Gender	50 Eksemplar	74.020.000	30 Eksemplar	44.412.000	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar*	*44.412.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SEMAKA
			Pemberdayaan Kelurahan			**10.505.600**		-		**10.505.600**		-		-		**390.200**		-	-	*390.200*		*3,71%*	-	*390.200*		*3,71%*	KEC. SEMAKA
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	10.505.600	0 %	-	% 100	10.505.600	% 0	-	% -	-	3,71 %	390.200	96,29 %	-	*100 %*	*390.200*	*100,00%*	*3,71%*	*100 %*	*390.200*	*100,00%*	*3,71%*	KEC. SEMAKA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	55,16	59,45	1,66	0,93	43,18	0,00	100,00								
									Predikat kinerja		SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	SR	ST								
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**159.305.000**	**30,00 %**	**113.775.000**	**% 100**	**79.875.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*30,00 %*	*113.775.000*	*15,00%*	*71,42%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapainya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140.875.000**		**113.775.000**		**79.875.000**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*113.775.000*		*80,76%*	KEC. SEMAKA
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140.875.000	48 Kali	113.775.000	Kali 12	79.875.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*113.775.000*	*80,00%*	*80,76%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			**18.430.000**		-	**0**	-	**0**	-	*0,00*	-		-		-	- -	-		*0,00%*	- -	-		*0,00%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	18.430.000	0 %	-	%		%		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	- %	-	0,00%	0,00%	KEC. SEMAKA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**211.625.000**	**60,00 %**	**126.975.000**	**% 100**	**6.500.000**	% 0,00	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*126.975.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**211.625.000**		**126.975.000**		**6.500.000**		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*126.975.000*		*60,00%*	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	114.925.000	3 Kali	68.955.000	Kali 1	980.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*68.955.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SEMAKA
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	96.700.000	3 Kali	58.020.000	Kali 1	5.520.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*58.020.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SEMAKA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**447.283.500**	**16,76 %**	**265.900.600**	**% 100**	**4.796.200**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*16,76 %*	*265.900.600*	*8,38%*	*59,45%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**447.283.500**		**265.900.600**		**4.796.200**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*265.900.600*		*59,45%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	50 Kali	200.000.000	46 Kali	120.000.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*46 Kali*	*120.000.000*	*92,00%*	*60,00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	5.070.000	0 %	-	% 100	4.796.200	% -	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	3.366.000	0 %	-	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100 %	8.400.000	0 %	-	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	20 Kali	230.447.500	16 Kali	145.900.600	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*16 Kali*	*145.900.600*	*80,00%*	*63,31%*	KEC. SEMAKA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
38			**KECAMATAN PEMATANG SAWA**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9.239.730.615**	**79,46 %**	**8.289.923.130**	**% 100**	**1.310.480.838**	**% 0,55**	**259.070.839**	**% 1,98**	**311.228.503**	**% 12,64**	**261.882.790**	**% 80,44**	**315.347.971**	*95,60 %*	*1.147.530.103*	*95,60%*	*87,57%*	*175,07 %*	*9.437.453.233*	*87,53%*	*102,14%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**40.394.500**		**30.520.800**		**5.453.200**		-		**2.473.000**		-		-	-	*2.473.000*		*45,35%*	-	*32.993.800*		*81,68%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	50 Buku	14.175.000	40 Buku	10.255.600	Buku 10	2.250.000	Buku -	-	Buku 5	1.950.000	0 Buku	-	5 Buku	-	*10 Buku*	*1.950.000*	*100,00%*	*86,67%*	*50 Buku*	*12.205.600*	*100,00%*	*86,11%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	10.831.500	40 Eksemplar Dokumen	8.064.900	Eksemplar 10 Dokumen	666.300	Eksemplar - Dokumen	-	Eksemplar 5 Dokumen	523.000	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*523.000*	*100,00%*	*78,49%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*8.587.900*	*100,00%*	*79,29%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.206.500	40 Eksemplar Dokumen	4.375.900	Eksemplar 10 Dokumen	366.300	Eksemplar - Dokumen	-	Eksemplar - Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*4.375.900*	*80,00%*	*84,05%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	2.250.000	30 Eksemplar Dokumen	1.800.000	Eksemplar 10 Dokumen	519.300	Eksemplar - Dokumen	-	Eksemplar - Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*1.800.000*	*60,00%*	*80,00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	3.331.500	40 Eksemplar Dokumen	2.664.900	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*2.664.900*	*80,00%*	*79,99%*	KEC. PEMATANG SAWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	1.050.000	40 Eksemplar Dokumen	830.000	10 Eksemplar Dokumen	941.300	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*830.000*	*80,00%*	*79,05%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	3.550.000	40 Eksemplar Dokumen	2.529.500	10 Eksemplar Dokumen	710.000	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*2.529.500*	*80,00%*	*71,25%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7.200.176.215**		**6.640.950.090**		**1.174.127.804**		**253.934.339**		**286.248.503**		**235.198.790**		**310.307.971**	*-*	*1.085.689.603*		*92,47%*	*-*	*7.726.639.693*		*107,31%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	6.115.620.715	40 Orang	5.566.446.790	10 Orang	964.847.804	3 Orang	210.584.339	2 Orang	238.238.503	2 Orang	175.538.790	3 Orang	266.957.971	*10 Orang*	*891.319.603*	*100,00%*	*92,38%*	*50 Orang*	*6.457.766.393*	*100,00%*	*105,59%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	818.700.000	40 Orang	831.770.000	10 Orang	173.400.000	2 Orang	43.350.000	3 Orang	43.350.000	2 Orang	43.350.000	3 Orang	43.350.000	*10 Orang*	*173.400.000*	*100,00%*	*100,00%*	*50 Orang*	*1.005.170.000*	*100,00%*	*122,78%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat Waktu	60 Paket	265.855.500	48 Paket	242.733.300	12 Paket	35.880.000	0 Paket	-	1 Paket	4.660.000	6 Paket	16.310.000	5 Paket	-	*12 Paket*	*20.970.000*	*100,00%*	*58,44%*	*60 Paket*	*263.703.300*	*100,00%*	*99,19%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**28.125.000**		**16.875.000**		*-*		*-*		*-*		*-*		*-*	*-*	*-*		*0,00%*	*-*	*16.875.000*		*60,00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 Set	28.125.000	60 Set	16.875.000	Set		Set		Set		Set		Set		*- Set*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*60 Set*	*16.875.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**512.191.500**		**387.221.100**		**28.206.030**		*-*		*-*		**6.049.000**		*-*	*-*	*6.049.000*		*21,45%*	*-*	*393.270.100*		*76,78%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	234.550.000	32 Unit	194.988.000	Unit 8	5.735.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	2.621.000	8 Unit	-	*8 Unit*	*2.621.000*	*100,00%*	*45,70%*	*40 Unit*	*197.609.000*	*100,00%*	*84,25%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3900 Kotak	94.500.000	3120 Kotak	65.661.500	Kotak 780	17.050.000	Kotak 0	-	Kotak -	-	100 Kotak	1.936.000	680 Kotak	-	*780 Kotak*	*1.936.000*	*100,00%*	*11,35%*	*3.900 Kotak*	*67.597.500*	*100,00%*	*71,53%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	56.053.500	48 Bulan	39.725.100	Bulan 12	1.812.600	Bulan 0	-	Bulan -	-	1 Bulan	99.000	11 Bulan	-	*12 Bulan*	*99.000*	*100,00%*	*5,46%*	*60 Bulan*	*39.824.100*	*100,00%*	*71,05%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Unit	46.088.000	4 Unit	34.033.400	Unit 1	5.421.030	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	1.393.000	1 Unit	-	*1 Unit*	*1.393.000*	*100,00%*	*25,70%*	*5 Unit*	*35.426.400*	*100,00%*	*76,87%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	490 Kali	81.000.000	394 Kali	52.813.100	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*394 Kali*	*52.813.100*	*80,41%*	*65,20%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**124.539.400**		**132.287.440**		**51.935.004**		**202.500**		**20.040.000**		**6.055.000**		**5.040.000**	*-*	*31.337.500*		*60,34%*	*-*	*163.624.940*		*131,38%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	112.045.000	48 Bulan	123.114.500	Bulan 12	36.560.004	Bulan 0	202.500	Bulan 1	5.040.000	3 Bulan	6.055.000	8 Bulan	5.040.000	*12 Bulan*	*16.337.500*	*100,00%*	*44,69%*	*60 Bulan*	*139.452.000*	*100,00%*	*124,46%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Paket	12.494.400	4 Paket	9.172.940	Paket 1	15.375.000	Paket 0	-	Paket -	15.000.000	0 Paket	-	1 Paket	-	*1 Paket*	*15.000.000*	*100,00%*	*97,56%*	*5 Paket*	*24.172.940*	*100,00%*	*193,47%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.334.304.000**		**1.082.068.700**		**50.758.800**		**4.934.000**		**2.467.000**		**14.580.000**		*-*	*-*	*21.981.000*		*43,30%*	*-*	*1.104.049.700*		*82,74%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	20 Unit	293.694.000	16 Unit	261.772.700	Unit 4	50.758.800	Unit 0	4.934.000	Unit 1	2.467.000	1 Unit	14.580.000	2 Unit	-	*4 Unit*	*21.981.000*	*100,00%*	*43,30%*	*20 Unit*	*283.753.700*	*100,00%*	*96,62%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Paket	1.040.610.000	4 Paket	820.296.000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		*- Paket*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Paket*	*820.296.000*	*80,00%*	*78,83%*	KEC. PEMATANG SAWA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,55**	**19,77**	**1,98**	**23,75**	**12,64**	**19,98**	**80,44**	**24,06**	**95,60**	**87,57**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR	ST	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**142.849.000**	**80,00 %**	**86.956.900**	**% 100**	**9.252.650**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*86.956.900*	*40,00%*	*60,87%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**57.187.000**		**34.827.200**		**2.572.350**		-		-		-		-	-	*0,00%*	-	*34.827.200*		*60,90%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Eksemplar	57.187.000	40 Eksemplar	34.827.200	Eksemplar 10	2.572.350	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar*	*34.827.200*	*80,00%*	*60,90%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**85.662.000**		**52.129.700**		**6.680.300**		-		-		-		-	-	*0,00%*	-	*52.129.700*		*60,86%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	85.662.000	40 Laporan	52.129.700	Laporan 10	6.680.300	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Laporan*	*52.129.700*	*80,00%*	*60,86%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**268.485.000**	**80,00 %**	**218.585.800**	**% 100**	**25.906.900**	% 18,75	**4.463.500**	% 75,00	-	% 0,00	**1.461.000**	% 6,25	-	*100,00 %*	*5.924.500*	*100,00%*	*22,87%*	*180,00 %*	*224.510.300*	*90,00%*	*83,62%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**268.485.000**		**218.585.800**		**25.906.900**		**4.463.500**		-		**1.461.000**		-	-	*5.924.500*		*22,87%*	-	*224.510.300*		*83,62%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	75 Kegiatan	136.115.500	60 Kegiatan	136.164.100	Kegiatan 15	9.564.300	Kegiatan 3	4.463.500	Kegiatan 12	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	*15 Kegiatan*	*4.463.500*	*100,00%*	*46,67%*	*75 Kegiatan*	*140.627.600*	*100,00%*	*103,31%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Paket	132.369.500	4 Paket	82.421.700	Paket 1	16.342.600	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	1.461.000	1 Paket	-	*1 Paket*	*1.461.000*	*100,00%*	*8,94%*	*5 Paket*	*83.882.700*	*100,00%*	*63,37%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**18,75**	**17,23**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**5,64**	**6,25**	**0,00**	**100,00**	**22,87**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**164.590.000**	**80,00 %**	**172.320.700**	**% 100**	**66.781.500**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*172.320.700*	*40,00%*	*104,70%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**164.590.000**		**172.320.700**		**66.781.500**		-		-		-		-	-	*0,00%*	-	*172.320.700*		*104,70%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	164.590.000	48 Kali	172.320.700	Kali 12	66.781.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*172.320.700*	*80,00%*	*104,70%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**118.415.500**	**60,00 %**	**71.049.300**	**% 100**	**26.495.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*71.049.300*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. PEMATANG SAWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**118.415.500**		**71.049.300**		**26.495.000**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	**71.049.300**		**60,00%**	KEC. PEMATANG SAWA
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	42.800.500	3 Kali	25.680.300	Kali 1	26.495.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*25.680.300*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	75.615.000	3 Kali	45.369.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*45.369.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. PEMATANG SAWA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**234.878.250**	**80,00 %**	**151.521.650**	**% 100**	**18.674.700**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*151.521.650*	*40,00%*	*64,51%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**234.878.250**		**151.521.650**		**18.674.700**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	**151.521.650**		***64,51%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	70 Kali	126.224.250	56 Kali	79.942.750	Kali 14	4.337.850	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*56 Kali*	*79.942.750*	*80,00%*	*63,33%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	5 Paket	108.654.000	4 Paket	71.578.900	Paket 1	14.336.850	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	- Paket	-	- *Paket*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Paket*	*71.578.900*	*80,00%*	*65,88%*	KEC. PEMATANG SAWA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
39			**KECAMATAN SUMBEREJO**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9.267.025.115**	**65,19 %**	**7.320.697.811**	**% 100**	**1.545.373.923**	**% 2,83**	**317.127.132**	**% 7,65**	**391.759.647**	**% 6,23**	**392.763.875**	**% 16,15**	**277.473.263**	*32,86 %*	*1.379.123.917*	*32,86%*	*89,24%*	*98,05 %*	*8.699.821.728*	*49,03%*	*93,88%*	KEC. SUMBEREJO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**82.500.000**		**66.550.000**		**19.336.700**		-		**2.400.000**		-		-	-	*2.400.000*		*12,41%*	-	*68.950.000*		*83,58%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	200 Buku	43.500.000	160 Buku	41.200.000	Buku 40	14.841.800	Buku 0	-	Buku 6	2.400.000	0 Buku	-	34 Buku	-	*40 Buku*	*2.400.000*	*100,00%*	*16,17%*	*200 Buku*	*43.600.000*	*100,00%*	*100,23%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	7.875.000	30 Eksemplar Dokumen	4.725.000	Eksemplar 10 Dokumen	1.327.700	Eksemplar 0 Dokumen	-	Eksemplar - Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*4.725.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	7.875.000	40 Eksemplar Dokumen	5.625.000	Eksemplar 10 Dokumen	791.800	Eksemplar 0 Dokumen	-	Eksemplar - Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*5.625.000*	*80,00%*	*71,43%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.625.000	40 Eksemplar Dokumen	3.825.000	Eksemplar 10 Dokumen	851.800	Eksemplar 0 Dokumen	-	Eksemplar - Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*3.825.000*	*80,00%*	*68,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6.375.000	40 Eksemplar Dokumen	4.425.000	Eksemplar 10 Dokumen	701.800	Eksemplar 0 Dokumen	-	Eksemplar - Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*4.425.000*	*80,00%*	*69,41%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Buku	5.625.000	30 Buku	3.375.000	Buku 10	410.900	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Buku*	*3.375.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Buku	5.625.000	30 Buku	3.375.000	10 Buku	410.900	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0,00%	0,00%	30 Buku	3.375.000	60,00%	60,00%	KEC. SUMBEREJO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7.388.786.865**		**5.823.622.761**		**1.414.189.523**		**307.347.832**		**361.840.447**		**380.274.875**		**265.172.553**	-	*1.314.635.707*		*92,96%*	-	*7.138.258.468*		*96,61%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6.563.186.865	48 Bulan	5.047.862.761	12 Bulan	1.256.579.523	3 Bulan	280.947.832	3 Bulan	334.440.447	3 Bulan	340.234.875	3 Bulan	235.362.553	*12 Bulan*	*1.190.985.707*	*100,00%*	*94,78%*	*60 Bulan*	*6.238.848.468*	*100,00%*	*95,06%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	477.600.000	24 Orang	491.920.000	6 Orang	111.600.000	2 Orang	26.400.000	1 Orang	27.400.000	1 Orang	26.400.000	2 Orang	26.400.000	*6 Orang*	*106.600.000*	*100,00%*	*95,52%*	*30 Orang*	*598.520.000*	*100,00%*	*125,32%*	KEC. SUMBEREJO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	348.000.000	28 Orang	283.840.000	7 Orang	46.010.000	0 Orang	-	- Orang	-	2 Orang	13.640.000	5 Orang	3.410.000	*7 Orang*	*17.050.000*	*100,00%*	*37,06%*	*35 Orang*	*300.890.000*	*100,00%*	*86,46%*	KEC. SUMBEREJO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**355.138.250**		**246.384.350**		**12.833.700**		**1.255.100**		**2.750.000**		**2.530.000**		**290.000**	-	*6.825.100*		*53,18%*	-	*253.209.450*		*71,30%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	220.813.000	40 Unit	145.372.800	10 Unit	2.765.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Unit*	*145.372.800*	*80,00%*	*65,84%*	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1200 Kotak	56.700.000	720 Kotak	34.020.000	Kotak 0	-	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- Kotak	-	0,00%	0,00%	720 Kotak	34.020.000	60,00%	60,00%	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110 Eksemplar	33.775.250	88 Eksemplar	25.811.050	22 Eksemplar	3.416.200	0 Eksemplar	-	12 Eksemplar	1.150.000	7 Eksemplar	400.000	3 Eksemplar	-	22 Eksemplar	1.550.000	100,00%	45,37%	110 Eksemplar	27.361.050	100,00%	81,01%	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	43.850.000	48 Bulan	41.180.500	12 Bulan	6.652.500	3 Bulan	1.255.100	3 Bulan	1.600.000	3 Bulan	2.130.000	3 Bulan	290.000	12 Bulan	5.275.100	100,00%	79,30%	60 Bulan	46.455.600	100,00%	105,94%	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	835 Kali	126.000.000	501 Kali	75.600.000	Kali 167	2.250.000,00	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0,00%	0,00%	501 Kali	75.600.000	60,00%	60,00%	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**242.500.000**		**208.746.300**		**52.304.000**		**5.574.200**		**16.969.200**		**6.929.000**		**6.110.710**	-	*35.583.110*		*68,03%*	-	*244.329.410*		*100,75%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	142.500.000	48 Bulan	121.946.300	Bulan 12	10.500.000	Bulan 2	1.374.200	Bulan 2	1.969.200	3 Bulan	2.729.000	5 Bulan	1.910.710	*12 Bulan*	*7.983.110*	*100,00%*	*76,03%*	*60 Bulan*	*129.929.410*	*100,00%*	*91,18%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	100.000.000	4 Kali	86.800.000	Kali 1	41.804.000	Kali 0	4.200.000	Kali -	15.000.000	0 Kali	4.200.000	1 Kali	4.200.000	*1 Kali*	*27.600.000*	*100,00%*	*66,02%*	*5 Kali*	*114.400.000*	*100,00%*	*114,40%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.198.100.000**		**975.394.400**		**46.710.000**		**2.950.000**		**7.800.000**		**3.030.000**		**5.900.000**	-	*19.680.000*		*42,13%*	-	*995.074.400*		*83,05%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	226.350.000	4 Mobil	199.794.400	Mobil 1	43.870.000	Mobil 0	2.950.000	Mobil -	7.800.000	0 Mobil	1.650.000	1 Mobil	5.900.000	*1 Mobil*	*18.300.000*	*100,00%*	*41,71%*	*5 Mobil*	*218.094.400*	*100,00%*	*96,35%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Motor	43.500.000	8 Motor	33.150.000	Motor		Motor		Motor		Motor		Motor		- *Motor*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Motor*	*33.150.000*	*80,00%*	*76,21%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	10.350.000	9 Unit	6.210.000	Unit 3	2.840.000	Unit 0	-	Unit -	-	3 Unit	1.380.000	- Unit	-	*3 Unit*	*1.380.000*	*100,00%*	*48,59%*	*12 Unit*	*7.590.000*	*80,00%*	*73,33%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	47.250.000	3 Unit	28.350.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*28.350.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	870.650.000	3 Unit	707.890.000	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*707.890.000*	*60,00%*	*81,31%*	KEC. SUMBEREJO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		2,83	20,52	7,65	25,35	6,23	25,42	16,15	17,96	32,86	89,24					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**139.770.000**	**60,00 %**	**83.862.000**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*83.862.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**52.020.000**		**31.212.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*31.212.000*		*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Eksemplar	52.020.000	30 Eksemplar	31.212.000	Eksemplar 0	-	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar	- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar*	*31.212.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**87.750.000**		**52.650.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*52.650.000*		*60,00%*	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	87.750.000	30 Laporan	52.650.000	Laporan 0	-	Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		- Laporan	-	0,00%	0,00%	30 Laporan	52.650.000	60,00%	60,00%	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**423.325.250**	**65,71 %**	**305.586.650**	**% 100**	**35.419.300**	**% 0,00**	**5.394.900**	**% 33,33**	**5.250.000**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	*33,33 %*	*10.644.900*	*33,33%*	*30,05%*	*99,05 %*	*316.231.550*	*49,52%*	*74,70%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**423.325.250**		**305.586.650**		**35.419.300**		**5.394.900**		**5.250.000**		-		-	-	*10.644.900*		*30,05%*	-	*316.231.550*		*74,70%*	KEC. SUMBEREJO
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	129.711.500	8 Kali	129.418.400	Kali 2	25.369.300	Kali 0	5.394.900	Kali 2	5.250.000	0 Kali	-	- Kali	-	*2 Kali*	*10.644.900*	*100,00%*	*41,96%*	*10 Kali*	*140.063.300*	*100,00%*	*107,98%*	KEC. SUMBEREJO
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Kegiatan	138.100.000	3 Kegiatan	82.860.000	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kegiatan*	*82.860.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Kegiatan	155.513.750	12 Kegiatan	93.308.250	Kegiatan 4	10.050.000	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	*Kegiatan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kegiatan*	*93.308.250*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	15,23	33,33	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	30,05						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**165.537.500**	**80,00 %**	**178.222.500**	**% 100**	**76.402.500**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*178.222.500*	*40,00%*	*107,66%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**165.537.500**		**178.222.500**		**76.402.500**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*178.222.500*		*107,66%*	KEC. SUMBEREJO
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	165.537.500	48 Kali	178.222.500	Kali 12	76.402.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*178.222.500*	*80,00%*	*107,66%*	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**138.125.000**	**60,00 %**	**82.875.000**	**% 100**	**12.185.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*82.875.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**138.125.000**		**82.875.000**		**12.185.000**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*82.875.000*		*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	61.750.000	3 Kali	37.050.000	Kali 1	12.185.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*37.050.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	76.375.000	3 Kali	45.825.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*45.825.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**49.500.000**		**39.600.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*39.600.000*		*80,00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	200 Stel	49.500.000	136 Stel	39.600.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0,00%*	*0,00%*	*136 Stel*	*39.600.000*	*68,00%*	*80,00%*	KEC. ULU BELU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**254.698.500**		**211.783.500**		**13.373.300**		-		**372.600**		**887.600**		**3.388.000**	-	*4.648.200*		*34,76%*	-	*216.431.700*		*84,98%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 Unit	74.250.000	23 Unit	96.250.000	Unit 4	3.400.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*23 Unit*	*96.250.000*	*85,19%*	*129,63%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1000 Kotak	46.650.000	800 Kotak	29.270.000	Kotak 100	1.600.000	0 Kotak	-	Kotak -	-	0 Kotak	-	100 Kotak	930.000	*100,00 Kotak*	*930.000*	*100,00%*	*58,13%*	*900 Kotak*	*30.200.000*	*90,00%*	*64,74%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31835 Lembar/Paket	11.600.000	19203 Lembar/Paket	10.508.600	100 Lembar/Paket	1.905.000	0 Lembar/Paket	-	9 Lembar/Paket	372.600	21 Lembar/Paket	887.600	70 Lembar/Paket	608.000	*100 Lembar/Paket*	*1.868.200*	*100,00%*	*98,07%*	*19.303 Lembar/Paket*	*12.376.800*	*60,63%*	*106,70%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	15 Paket	22.154.500	12 Paket	17.254.900	Paket 3	5.484.300	0 Paket	-	Paket -	-	0 Paket	-	3 Paket	1.850.000	*3 Paket*	*1.850.000*	*100,00%*	*33,73%*	*15 Paket*	*19.104.900*	*100,00%*	*86,23%*	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	380 Kali	97.500.000	228 Kali	58.500.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*228 Kali*	*58.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	2.544.000	0 %	-	% 100	984.000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- *%*	-	*0,00%*	*0,00%*	- *%*	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**37.500.000**		**22.500.000**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*22.500.000*		*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	525 Unit	37.500.000	315 Unit	22.500.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*315 Unit*	*22.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100.531.700**		**99.190.520**		**18.466.000**		-		**4.030.000**		**4.925.000**		**3.026.600**	-	*11.981.600*		*64,88%*	-	*111.172.120*		*110,58%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	73.950.000	48 Bulan	76.599.000	Bulan 12	13.710.000	Bulan 0	-	Bulan 3	4.030.000	3 Bulan	3.680.000	6 Bulan	350.000	*12 Bulan*	*8.060.000*	*100,00%*	*58,79%*	*60 Bulan*	*84.659.000*	*100,00%*	*114,48%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kali	26.581.700	20 Kali	22.591.520	Kali 5	4.756.000	Kali 0	-	Kali -	-	1 Kali	1.245.000	4 Kali	2.676.600	*5 Kali*	*3.921.600*	*100,00%*	*82,46%*	*25 Kali*	*26.513.120*	*100,00%*	*99,74%*	KEC. ULU BELU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**472.650.000**		**358.770.600**		**48.308.800**		-		**2.467.400**		**2.467.400**		**16.260.200**	-	*21.195.000*		*43,87%*	-	*379.965.600*		*80,39%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	279.850.000	20 Unit	243.090.600	Unit 5	48.308.800	Unit 0	-	Unit -	2.467.400	0 Unit	2.467.400	5 Unit	16.260.200	*5 Unit*	*21.195.000*	*100,00%*	*43,87%*	*25 Unit*	*264.285.600*	*100,00%*	*94,44%*	KEC. ULU BELU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Unit	192.800.000	6 Unit	115.680.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Unit*	*115.680.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**1,08**	**19,03**	**3,42**	**22,18**	**5,59**	**22,88**	**39,82**	**23,04**	**49,91**	**87,14**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**75.665.000**	**60,00 %**	**45.399.000**	**% 100**	**2.236.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	- *%*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*45.399.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**41.595.000**		**24.957.000**		**228.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*24.957.000*		*60,00%*	KEC. ULU BELU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	41.595.000	6 Kali	24.957.000	Kali 2	228.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6 Kali	24.957.000	60,00%	60,00%	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**34.070.000**		**20.442.000**		**2.008.000**		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	*20.442.000*		*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	34.070.000	30 Laporan	20.442.000	Laporan 10	2.008.000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	0,00%	0,00%	*30 Laporan*	*20.442.000*	60,00%	60,00%	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**491.685.000**	**75,20 %**	**331.109.750**	**% 100**	**45.859.000**	% 0,00	-	% 76,00	**17.777.500**	0,00 %	**15.000.000**	0,00 %	-	*76,00 %*	*32.777.500*	*76,00%*	*71,47%*	*151,20 %*	*363.887.250*	*75,60%*	*74,01%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**491.685.000**		**331.109.750**		**45.859.000**		-		**17.777.500**		**15.000.000**		-	-	*32.777.500*		*71,47%*	-	*363.887.250*		*74,01%*	KEC. ULU BELU
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	95 Kegiatan	388.685.000	76 Kegiatan	269.309.750	Kegiatan 19	33.459.000	Kegiatan 0	-	Kegiatan 19	17.777.500	0 Kegiatan	15.000.000	- Kegiatan	-	*19 Kegiatan*	*32.777.500*	*100,00%*	*97,96%*	*95 Kegiatan*	*302.087.250*	*100,00%*	*77,72%*	KEC. ULU BELU
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Kali	103.000.000	18 Kali	61.800.000	Kali 6	12.400.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	0,00%	0,00%	*18 Kali*	*61.800.000*	60,00%	60,00%	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	76,00	38,77	0,00	32,71	0,00	0,00	76,00	71,47						
										Predikat kinerja	SR	SR	T	SR	SR	SR	SR	SR	T	SD						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140.790.000**	**80,00 %**	**106.224.000**	**% 100**	**52.500.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	0,00%	0,00%	*80,00 %*	*106.224.000*	*40,00%*	*75,45%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapainya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140.790.000**		**106.224.000**		**52.500.000**		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	*106.224.000*		*75,45%*	KEC. ULU BELU
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140.790.000	48 Kali	106.224.000	Kali 12	52.500.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	0,00%	0,00%	*48 Kali*	*106.224.000*	*80,00%*	*75,45%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**94.990.000**	**60,00 %**	**56.994.000**	**% 100**	**10.520.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	0,00%	0,00%	*60,00 %*	*56.994.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**94.990.000**		**56.994.000**		**10.520.000**		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	*56.994.000*		*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Kali	59.900.000	6 Kali	35.940.000	Kali 2	9.820.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	0,00%	0,00%	*6 Kali*	*35.940.000*	60,00%	60,00%	KEC. ULU BELU
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	35.090.000	3 Kali	21.054.000	Kali 1	700.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	0,00%	0,00%	*3 Kali*	*21.054.000*	60,00%	60,00%	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200** %	**333.140.000**	**60,00** %	**199.884.000**	% **100**	**1.600.000**	% **0,00**	-	% **0,00**	-	% **0,00**	-	% **0,00**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00* %	*199.884.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**333.140.000**		**199.884.000**		**1.600.000**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*199.884.000*		*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	160 Kali	131.260.000	96 Kali	78.756.000	Kali 32	1.152.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*96 Kali*	*78.756.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	160 Kali	127.920.000	96 Kali	76.752.000	Kali 32	448.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*96 Kali*	*76.752.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 Kali	73.960.000	48 Kali	44.376.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*44.376.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. ULU BELU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
41			**KECAMATAN KELUMBAYAN**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**8.774.640.850**	**78,62** %	**8.298.563.364**	% **100**	**1.485.110.837**	% **0,30**	**303.767.138**	% **19,28**	**345.607.198**	% **1,96**	**325.523.887**	% **70,93**	**276.801.307**	*92,47* %	*1.251.699.530*	*92,47%*	*84,28%*	*171,09* %	*9.550.262.894*	*85,55%*	*108,84%*	KEC. KELUMBAYAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**154.245.000**		**108.497.800**		**13.332.000**		**-**		**674.500**		**-**		**-**	-	*674.500*		*5,06%*	-	*109.172.300*		*70,78%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Eksemplar Dokumen	73.245.000	120 Eksemplar Dokumen	54.567.200	30 Eksemplar Dokumen	8.457.700	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	234.500	0 Eksemplar Dokumen	-	29 Eksemplar Dokumen	-	*30 Eksemplar Dokumen*	*234.500*	*100,00%*	*2,77%*	*150 Eksemplar Dokumen*	*54.801.700*	*100,00%*	*74,82%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	15.750.000	40 Eksemplar Dokumen	10.535.600	10 Eksemplar Dokumen	840.000	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	440.000	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*440.000*	*100,00%*	*52,38%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*10.975.600*	*100,00%*	*69,69%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15.750.000	40 Eksemplar Dokumen	11.095.000	10 Eksemplar Dokumen	840.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*11.095.000*	*80,00%*	*70,44%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15.000.000	40 Eksemplar Dokumen	10.550.000	10 Eksemplar Dokumen	840.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*10.550.000*	*80,00%*	*70,33%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5.250.000	40 Eksemplar Dokumen	4.200.000	10 Eksemplar Dokumen	900.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*4.200.000*	*80,00%*	*80,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	14.250.000	30 Eksemplar Dokumen	8.550.000	10 Eksemplar Dokumen	840.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*8.550.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	15.000.000	30 Eksemplar Dokumen	9.000.000	10 Eksemplar Dokumen	614.300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*9.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**6.774.247.050**		**6.719.920.284**		**1.258.420.610**		**303.767.138**		**317.540.198**		**315.223.387**		**261.135.807**	-	*1.197.666.530*		*95,17%*	-	*7.917.586.814*		*116,88%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	6.160.247.050	56 Orang	6.152.245.084	14 Orang	1.147.300.610	4 Orang	285.617.138	3 Orang	294.110.198	3 Orang	289.783.387	4 Orang	238.335.807	*14 Orang*	*1.107.846.530*	*100,00%*	*96,56%*	*70 Orang*	*7.260.091.614*	*100,00%*	*117,85%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	234.300.000	12 Orang	258.180.000	3 Orang	72.600.000	0 Orang	18.150.000	1 Orang	18.150.000	1 Orang	18.150.000	1 Orang	18.150.000	*3 Orang*	*72.600.000*	*100,00%*	*100,00%*	*15 Orang*	*330.780.000*	*100,00%*	*141,18%*	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	342.200.000	24 Orang	283.595.200	Orang 6	38.520.000	Orang 0	-	Orang 1	5.280.000	0 Orang	7.290.000	5 Orang	4.650.000	*6 Orang*	*17.220.000*	*100,00%*	*44,70%*	*30 Orang*	*300.815.200*	*100,00%*	*87,91%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Eksamplar	18.750.000	40 Eksamplar	14.650.000	Eksamplar		Eksamplar		Eksamplar		Eksamplar		Eksamplar		*- Eksamplar*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksamplar*	*14.650.000*	*80,00%*	*78,13%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Eksamplar	18.750.000	30 Eksamplar	11.250.000	Eksamplar		Eksamplar		Eksamplar		Eksamplar		Eksamplar		*- Eksamplar*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksamplar*	*11.250.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**39.375.000**		**23.625.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*23.625.000*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150 Stel	39.375.000	90 Stel	23.625.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		*- Stel*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*90 Stel*	*23.625.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**794.768.150**		**548.717.890**		**66.075.900**		-		**4.289.000**		**260.000**		**1.060.000**	-	*5.609.000*		*8,49%*	-	*554.326.890*		*69,75%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Unit	431.658.150	60 Unit	317.558.690	Unit 15	16.730.500	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*60 Unit*	*317.558.690*	*80,00%*	*73,57%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	157.500.000	2000 Kotak	100.024.640	Kotak 500	15.000.000	Kotak 0	-	Kotak 125	2.255.000	0 Kotak	-	375 Kotak	-	*500 Kotak*	*2.255.000*	*100,00%*	*15,03%*	*2.500 Kotak*	*102.279.640*	*100,00%*	*64,94%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Eksemplar	39.000.000	700 Eksemplar	24.647.200	Eksemplar 200	15.866.500	Eksemplar 0	-	Eksemplar 8	384.000	2 Eksemplar	90.000	190 Eksemplar	-	*200 Eksemplar*	*474.000*	*100,00%*	*2,99%*	*900 Eksemplar*	*25.121.200*	*90,00%*	*64,41%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2250 Buah	102.110.000	1900 Buah	67.787.360	Buah 450	15.478.900	Buah 0	-	Buah 110	1.650.000	20 Buah	170.000	320 Buah	1.060.000	*450 Buah*	*2.880.000*	*100,00%*	*18,61%*	*2.350 Buah*	*70.667.360*	*104,44%*	*69,21%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	175 Kali	64.500.000	105 Kali	38.700.000	Kali 35	3.000.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*105 Kali*	*38.700.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**246.326.635**		**162.780.981**		**103.762.327**		-		**15.969.500**		-		-	-	*15.969.500*		*15,39%*	-	*178.750.481*		*72,57%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	117.576.635	48 Bulan	78.530.981	Bulan 12	103.762.327	Bulan 0	-	Bulan 2	15.969.500	0 Bulan	-	10 Bulan	-	*12 Bulan*	*15.969.500*	*100,00%*	*15,39%*	*60 Bulan*	*94.500.481*	*100,00%*	*80,37%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	128.750.000	4 Kali	84.250.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*84.250.000*	*80,00%*	*65,44%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**765.679.015**		**735.021.409**		**43.520.000**		-		**7.134.000**		**10.040.500**		**14.605.500**	-	*31.780.000*		*73,02%*	-	*766.801.409*		*100,15%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	195.850.000	4 Unit	200.581.600	Unit 1	39.170.000	Unit 0	-	Unit -	6.309.000	0 Unit	9.660.000	1 Unit	14.055.500	*1 Unit*	*30.024.500*	*100,00%*	*76,65%*	*5 Unit*	*230.606.100*	*100,00%*	*117,75%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	84.680.000	8 Unit	69.000.400	Unit 2	4.350.000	Unit 0	-	Unit -	825.000	0 Unit	380.500	2 Unit	550.000	*2 Unit*	*1.755.500*	*100,00%*	*40,36%*	*10 Unit*	*70.755.900*	*100,00%*	*83,56%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	485.149.015	4 Unit	465.439.409	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*465.439.409*	*80,00%*	*95,94%*	KEC. KELUMBAYAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,30**	**20,45**	**19,28**	**23,27**	**1,96**	**21,92**	**70,93**	**18,64**	**92,47**	**84,28**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**	**T**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**135.937.500**	**60,00 %**	**81.562.500**	**% 100**	**4.462.500**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*81.562.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**42.937.500**		**25.762.500**		**4.462.500**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*25.762.500*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	42.937.500	12 Kali	25.762.500	Kali 4	4.462.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kali*	*25.762.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**93.000.000**		**55.800.000**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*55.800.000*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	93.000.000	30 Laporan	55.800.000	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		- *Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Laporan*	*55.800.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**180.475.000**	**75,38 %**	**115.437.000**	**% 100**	**20.212.500**	% 0,00	-	% 0,00	-	100,00 %	**1.182.500**	0,00 %	-	*100 %*	*1.182.500*	*100,00%*	*5,85%*	*175,38 %*	*116.619.500*	*87,69%*	*64,62%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**180.475.000**		**115.437.000**		**20.212.500**		-		-		**1.182.500**		-	-	*1.182.500*		*5,85%*	-	*116.619.500*		*64,62%*	KEC. KELUMBAYAN
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	50 Kali	123.012.500	40 Kali	80.959.500	Kali 10	20.212.500	Kali 0	-	Kali -	-	10 Kali	1.182.500	- Kali	-	*10 Kali*	*1.182.500*	*100,00%*	*5,85%*	*50 Kali*	*82.142.000*	*100,00%*	*66,78%*	KEC. KELUMBAYAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	57.462.500	9 Kali	34.477.500	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Kali*	*34.477.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,85	0,00	0,00	100,00	5,85						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	ST	SR	SR	SR	ST	SR						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140.250.000**	**80,00 %**	**105.341.000**	**% 100**	**51.000.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*105.341.000*	*40,00%*	*75,11%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140.250.000**		**105.341.000**		**51.000.000**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*105.341.000*		*75,11%*	KEC. KELUMBAYAN
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140.250.000	48 Kali	105.341.000	Kali 12	51.000.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*105.341.000*	*80,00%*	*75,11%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**66.787.500**	**70,00 %**	**41.597.500**	**% 100**	**8.392.500**	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*70,00 %*	*41.597.500*	*35,00%*	*62,28%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**66.787.500**		**41.597.500**		**8.392.500**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*41.597.500*		*62,28%*	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	49.662.500	4 Kali	31.322.500	Kali 1	4.967.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*31.322.500*	*80,00%*	*63,07%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	17.125.000	3 Kali	10.275.000	Kali 1	3.425.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*10.275.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**156.087.500**	**60,00 %**	**93.652.500**	**% 100**	**3.600.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*93.652.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**156.087.500**		**93.652.500**		**3.600.000**		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	-	*93.652.500*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	73.587.500	18 Kali	44.152.500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*18 Kali*	*44.152.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	82.500.000	6 Kali	49.500.000	Kali 2	3.600.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*49.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
42			**KECAMATAN GISTING**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**13.305.903.435**	**94,62 %**	**11.912.456.735**	**% 100**	**1.894.563.519**	**% 1,18**	**380.898.665**	**% 0,12**	**439.746.218**	**% 4,05**	**462.788.396**	**% 94,17**	**461.576.458**	***99,53 %***	***1.745.009.737***	***99,53%***	***92,11%***	***194,14 %***	***13.657.466.472***	***97,07%***	***102,64%***	KEC. GISTING
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**65.417.000**		**45.866.800**		**8.660.800**		**-**		**1.019.000**		**600.000**		-	-	***1.619.000***		***18,69%***	-	***47.485.800***		***72,59%***	KEC. GISTING
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Buku	16.679.000	80 Buku	11.942.800	Buku 20	2.460.700	Buku 0	-	Buku 6	1.019.000	0 Buku	-	14 Buku	-	***20 Buku***	***1.019.000***	*100,00%*	*41,41%*	*100 Buku*	*12.961.800*	*100,00%*	*77,71%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Buku	13.908.000	80 Buku	11.317.800	Buku 20	1.741.200	Buku 0	-	Buku -	-	4 Buku	600.000	16 Buku	-	***20 Buku***	***600.000***	*100,00%*	*34,46%*	*100 Buku*	*11.917.800*	*100,00%*	*85,69%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Buku	11.580.000	60 Buku	6.948.000	Buku 20	926.700	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Buku*	*6.948.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buku	7.125.000	80 Buku	4.987.500	Buku 20	866.100	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Buku*	*4.987.500*	*80,00%*	*70,00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buku	7.125.000	60 Buku	4.275.000	Buku 20	866.100	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Buku*	*4.275.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Buku	4.500.000	80 Buku	3.195.300	Buku 20	900.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Buku*	*3.195.300*	*80,00%*	*71,01%*	KEC. GISTING
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Buku	4.500.000	80 Buku	3.200.400	Buku 20	900.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Buku*	*3.200.400*	*80,00%*	*71,12%*	KEC. GISTING
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**9.627.412.865**		**9.018.609.078**		**1.491.702.445**		**331.740.665**		**368.252.881**		**377.716.488**		**336.509.018**	-	***1.414.219.052***		***94,81%***	-	***10.432.828.130***		***108,37%***	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7.262.226.865	54 Bulan	6.691.067.478	12 Bulan	996.662.845	3 Bulan	223.515.665	3 Bulan	254.907.881	3 Bulan	269.491.488	3 Bulan	225.644.018	*12 Bulan*	*973.559.052*	*100,00%*	*97,68%*	*66 Bulan*	*7.664.626.530*	*94,29%*	*105,54%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	2.058.375.000	96 Orang	2.054.025.000	24 Orang	432.900.000	6 Orang	108.225.000	6 Orang	108.225.000	6 Orang	108.225.000	6 Orang	108.225.000	*24 Orang*	*432.900.000*	*100,00%*	*100,00%*	*120 Orang*	*2.486.925.000*	*100,00%*	*120,82%*	KEC. GISTING
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	290.400.000	24 Orang	262.470.000	6 Orang	61.440.000	0 Orang	-	- Orang	5.120.000	0 Orang	-	6 Orang	2.640.000	*6 Orang*	*7.760.000*	*100,00%*	*12,63%*	*30 Orang*	*270.230.000*	*100,00%*	*93,05%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Buku	16.411.000	40 Buku	11.046.600	10 Buku	699.600	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*40 Buku*	*11.046.600*	*80,00%*	*67,31%*	KEC. GISTING
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**16.425.000**		**9.855.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*9.855.000*		*60,00%*	KEC. GISTING
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 Stel	16.425.000	27 Stel	9.855.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		*- Stel*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*27 Stel*	*9.855.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**481.809.070**		**335.508.642**		**59.897.914**		**156.000**		**11.268.000**		**4.774.250**		**1.291.000**	-	*17.489.250*		*29,20%*	-	*352.997.892*		*73,27%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	157.165.000	24 Unit	101.162.000	Unit 6	23.163.000	Unit 0	-	Unit -	775.500	0 Unit	410.000	6 Unit	710.000	*6 Unit*	*1.895.500*	*100,00%*	*8,18%*	*30 Unit*	*103.057.500*	*100,00%*	*65,57%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	81.000.000	2280 Kotak	60.628.500	Kotak 720	13.500.000	0 Kotak	-	Kotak -	-	178 Kotak	3.341.250	542 Kotak	-	*720 Kotak*	*3.341.250*	*100,00%*	*24,75%*	*3.000 Kotak*	*63.969.750*	*83,33%*	*78,98%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	##### Lembar	43.969.500	#### Lembar	34.083.900	Lembar 22200	9.059.400	264 Lembar	156.000	Lembar -	-	736 Lembar	423.000	21.200 Lembar	581.000	*22.200 Lembar*	*1.160.000*	*100,00%*	*12,80%*	*###### Lembar*	*35.243.900*	*116,04%*	*80,16%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	65.139.570	48 Bulan	58.913.242	Bulan 12	14.175.514	0 Bulan	-	Bulan 6	10.492.500	2 Bulan	600.000	4 Bulan	-	*12 Bulan*	*11.092.500*	*100,00%*	*78,25%*	*60 Bulan*	*70.005.742*	*100,00%*	*107,47%*	KEC. GISTING
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	575 Kali	134.535.000	345 Kali	80.721.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*345 Kali*	*80.721.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**		**37.500.000**		**22.500.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*22.500.000*		*60,00%*	KEC. GISTING
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, lemari dan mebel lainnya	30 Unit	37.500.000	18 Unit	22.500.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*18 Unit*	*22.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**280.415.500**		**240.888.415**		**68.544.460**		**10.000.000**		**28.160.337**		**6.746.658**		**13.605.190**	-	*58.512.185*		*85,36%*	-	*299.400.600*		*106,77%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153.900.000	48 Bulan	143.638.115	Bulan 12	33.791.360	0 Bulan	-	Bulan 3	7.382.237	3 Bulan	6.746.658	6 Bulan	13.605.190	*12 Bulan*	*27.734.085*	*100,00%*	*82,07%*	*60 Bulan*	*171.372.200*	*100,00%*	*111,35%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	126.515.500	4 Kali	97.250.300	Kali 1	34.753.100	0 Kali	10.000.000	Kali -	20.778.100	0 Kali	-	1 Kali	-	*1 Kali*	*30.778.100*	*100,00%*	*88,56%*	*5 Kali*	*128.028.400*	*100,00%*	*101,20%*	KEC. GISTING
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.796.924.000**		**2.239.228.800**		**265.757.900**		**39.002.000**		**31.046.000**		**72.951.000**		**110.171.250**	-	*253.170.250*		*95,26%*	-	*2.492.399.050*		*89,11%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	225.850.000	4 Unit	209.016.400	Unit 1	39.170.000	Unit 0	4.934.000	Unit -	6.434.000	0 Unit	7.048.000	1 Unit	14.448.750	*1 Unit*	*32.864.750*	*100,00%*	*83,90%*	*5 Unit*	*241.881.150*	*100,00%*	*107,10%*	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit Mobil dan Motor	1.310.372.000	20 Unit Mobil dan Motor	1.143.736.200	Unit Mobil dan Motor 5	216.622.900	Unit Mobil dan Motor 1	34.068.000	Unit Mobil dan Motor 1	23.812.000	1 Unit Mobil dan Motor	59.568.000	2 Unit Mobil dan Motor	94.722.500	*5 Unit Mobil dan Motor*	*212.170.500*	*100,00%*	*97,94%*	*25 Unit Mobil dan Motor*	*1.355.906.700*	*100,00%*	*103,47%*	KEC. GISTING
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75 Unit	56.850.000	60 Unit	40.305.000	Unit 15	5.240.000	Unit 0	-	Unit 2	800.000	4 Unit	1.610.000	9 Unit	1.000.000	*15 Unit*	*3.410.000*	*100,00%*	*65,08%*	*75 Unit*	*43.715.000*	*100,00%*	*76,90%*	KEC. GISTING
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Gedung Bangunan	1.203.852.000	8 Gedung Bangunan	846.171.200	Gedung Bangunan 2	4.725.000	Gedung Bangunan 0	-	Gedung Bangunan -	-	2 Gedung Bangunan	4.725.000	- Gedung Bangunan	-	*2 Gedung Bangunan*	*4.725.000*	*100,00%*	*100,00%*	*10 Gedung Bangunan*	*850.896.200*	*100,00%*	*70,68%*	KEC. GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**1,18**	**20,10**	**0,12**	**23,21**	**4,05**	**24,43**	**94,17**	**24,36**	**99,53**	**92,11**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**240.102.500**	**60,00 %**	**144.061.500**	**% 100**	**3.192.200**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*144.061.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**125.328.000**		**75.196.800**		**1.191.100**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-		*0,00%*	-	*75.196.800*		*60,00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	500 %	125.328.000	300 %	75.196.800	% 100	1.191.100	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*75.196.800*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**114.774.500**		**68.864.700**		**2.001.100**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-		*0,00%*	-	*68.864.700*		*60,00%*	KEC. GISTING
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentas Penyediaan Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	500 %	114.774.500	300 %	68.864.700	% 100	2.001.100	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*68.864.700*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**183.820.500**	**68,00 %**	**145.226.900**	**% 100**	**33.914.100**	**% 40,00**	**18.373.750**	**% 0,00**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	*40,00 %*	*18.373.750*	*40,00%*	*54,18%*	*108,00 %*	*163.600.650*	*54,00%*	*89,00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**183.820.500**		**145.226.900**		**33.914.100**		**18.373.750**		**-**		**-**		**-**	-	*18.373.750*		*54,18%*	-	*163.600.650*		*89,00%*	KEC. GISTING
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	88.032.500	8 Kali	87.754.100	Kali 2	18.506.500	Kali 2	18.373.750	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*2 Kali*	*18.373.750*	*100,00%*	*99,28%*	*10 Kali*	*106.127.850*	*100,00%*	*120,56%*	KEC. GISTING
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	95.788.000	9 Kali	57.472.800	Kali 3	15.407.600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Kali*	*57.472.800*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**40,00**	**54,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**54,18**						
									Predikat kinerja		**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**141.593.000**	**80,00 %**	**142.905.800**	**% 100**	**52.087.500**	**% 0,00**	**-**	**% 0,00**	**-**	**0,00 %**	**222.750**	**100,00 %**	**-**	*100,00 %*	*222.750*	*100,00%*	*0,43%*	*180,00 %*	*143.128.550*	*90,00%*	*101,08%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**141.593.000**		**142.905.800**		**52.087.500**		**-**		**-**		**222.750**		**-**	-	*222.750*		*0,43%*	-	*143.128.550*		*101,08%*	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141.593.000	48 Bulan	142.905.800	Bulan 12	52.087.500	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	222.750	12 Bulan	-	***12 Bulan***	***222.750***	***100,00%***	***0,43%***	***60 Bulan***	***143.128.550***	***100,00%***	***101,08%***	KEC. GISTING
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,43**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,43**					
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**66.039.500**	**60,00 %**	**39.623.700**	**% 100**	**10.701.800**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**100,00 %**	**10.670.800**	**0,00 %**	-	***100 %***	***10.670.800***	***100,00%***	***99,71%***	***160,00 %***	***50.294.500***	***80,00%***	***76,16%***	KEC. GISTING
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**66.039.500**		**39.623.700**		**10.701.800**		-		-		**10.670.800**		-	-	***10.670.800***		***99,71%***	-	***50.294.500***		***76,16%***	KEC. GISTING
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	44.634.000	3 Kali	26.780.400	Kali 1	10.701.800	Kali 0	-	Kali -	-	1 Kali	10.670.800	- Kali	-	***1 Kali***	***10.670.800***	***100,00%***	***99,71%***	***4 Kali***	***37.451.200***	***80,00%***	***83,91%***	KEC. GISTING
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	21.405.500	3 Kali	12.843.300	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Kali***	***12.843.300***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. GISTING
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,71**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,71**					
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**201.424.000**	**78,35 %**	**126.868.650**	**% 100**	**16.441.200**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***78,35 %***	***126.868.650***	***39,17%***	***62,99%***	KEC. GISTING
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**201.424.000**		**126.868.650**		**16.441.200**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***126.868.650***		***62,99%***	KEC. GISTING
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	500 %	111.861.000	400 %	73.130.850	% 100	6.628.600	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***400 %***	***73.130.850***	***80,00%***	***65,38%***	KEC. GISTING
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	45 Desa	89.563.000	27 Desa	53.737.800	Desa 9	9.812.600	Desa 0	-	Desa -	-	0 Desa	-	- Desa	-	- ***Desa***	-	***0,00%***	***0,00%***	***27 Desa***	***53.737.800***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. GISTING
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-					
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
43			**KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9.197.428.345**	**72,62 %**	**8.557.532.035**	**% 100**	**1.533.796.085**	**% 17,49**	**447.643.292**	**% 4,10**	**275.944.605**	**% 11,07**	**379.037.153**	**% 48,22**	**235.765.015**	***80,87 %***	***1.338.390.065***	***80,87%***	***87,26%***	***153,49 %***	***9.895.922.100***	***76,75%***	***107,59%***	KEC. KOTIM
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**40.513.500**		**33.896.204**		**8.000.300**		**348.000**		**1.026.000**		**200.000**		-	-	***1.574.000***		***19,67%***	-	***35.470.204***		***87,55%***	KEC. KOTIM
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	50 Buku	15.215.000	40 Buku	16.437.054	Buku 10	4.050.000	Buku 0	348.000	Buku 2	1.026.000	0 Buku	-	8 Buku	-	***10 Buku***	***1.374.000***	***100,00%***	***33,93%***	***50 Buku***	***17.811.054***	***100,00%***	***117,06%***	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	150 Buku	13.628.000	120 Buku	8.618.000	Buku 30	775.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- ***Buku***	-	***0,00%***	***0,00%***	***120 Buku***	***8.618.000***	***80,00%***	***63,24%***	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Buku	1.075.500	140 Buku	752.850	Buku 10	786.300	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- ***Buku***	-	***0,00%***	***0,00%***	***140 Buku***	***752.850***	***280,00%***	***70,00%***	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Buku	1.610.000	40 Buku	1.491.000	Buku 10	532.000	Buku 0	-	Buku -	-	3 Buku	200.000	7 Buku	-	***10 Buku***	***200.000***	***100,00%***	***37,59%***	***50 Buku***	***1.691.000***	***100,00%***	***105,03%***	KEC. KOTIM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Buku	1.610.000	40 Buku	1.147.300	Buku 10	532.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0,00%	0,00%	40 Buku	1.147.300	80,00%	71,26%	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Buku	2.875.000	30 Buku	1.725.000	Buku 10	675.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0,00%	0,00%	30 Buku	1.725.000	60,00%	60,00%	KEC. KOTIM
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Buku	4.500.000	40 Buku	3.725.000	Buku 10	650.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0,00%	0,00%	40 Buku	3.725.000	80,00%	82,78%	KEC. KOTIM
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7.511.330.295**		**7.225.859.430**		**1.421.434.585**		**422.095.692**		**248.058.605**		**373.376.953**		**226.301.015**	-	*1.269.832.265*		*89,33%*	-	*8.495.691.695*		*113,11%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6.418.580.295	48 Bulan	6.155.639.430	Bulan 12	1.166.884.585	Bulan 3	356.520.692	Bulan 3	207.808.605	3 Bulan	317.331.953	3 Bulan	174.396.015	*12 Bulan*	*1.056.057.265*	*100,00%*	*90,50%*	*60 Bulan*	*7.211.696.695*	*100,00%*	*112,36%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	753.600.000	48 Bulan	784.582.000	Bulan 12	197.700.000	Bulan 3	65.575.000	Bulan 3	32.950.000	3 Bulan	49.425.000	3 Bulan	49.425.000	*12 Bulan*	*197.375.000*	*100,00%*	*99,84%*	*60 Bulan*	*981.957.000*	*100,00%*	*130,30%*	KEC. KOTIM
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	339.150.000	48 Bulan	285.638.000	Bulan 12	56.850.000	Bulan 0	-	Bulan 2	7.300.000	0 Bulan	6.620.000	10 Bulan	2.480.000	*12 Bulan*	*16.400.000*	*100,00%*	*28,85%*	*60 Bulan*	*302.038.000*	*100,00%*	*89,06%*	KEC. KOTIM
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**164.303.650**		**108.630.125**		**26.291.200**		**10.680.000**		**1.360.000**		**3.068.000**		-	-	*15.108.000*		*57,46%*	-	*123.738.125*		*75,31%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200 %	25.418.650	100 %	9.510.200	% 100	1.735.800	% 0	-	% -	-	17,17 %	298.000	82,83 %	-	*100 %*	*298.000*	*100,00%*	*17,17%*	*200,00 %*	*9.808.200*	*100,00%*	*38,59%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	960 Kali	45.000.000	576 Kali	27.000.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*576 Kali*	*27.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	17.125.000	48 Bulan	11.775.900	Bulan 12	1.680.000	Bulan 3	1.000.000	Bulan 3	-	1 Bulan	-	5 Bulan	-	*12 Bulan*	*1.000.000*	*100,00%*	*59,52%*	*60 Bulan*	*12.775.900*	*100,00%*	*74,60%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200 %	17.000.000	100 %	17.000.000	% 100	17.280.000	% 50,00	7.280.000	% -	1.360.000	8,33 %	1.440.000	41,67 %	-	*100 %*	*10.080.000*	*100,00%*	*58,33%*	*200,00 %*	*27.080.000*	*100,00%*	*159,29%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	22.260.000	60 Bulan	20.844.025	Bulan 12	5.595.400	Bulan 3	2.400.000	Bulan 2	-	3 Bulan	1.330.000	4 Bulan	-	*12 Bulan*	*3.730.000*	*100,00%*	*66,66%*	*72 Bulan*	*24.574.025*	*120,00%*	*110,40%*	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	205 Kali	37.500.000	123 Kali	22.500.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*123 Kali*	*22.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**283.935.000**		**213.977.255**		**37.000.000**		**2.450.000**		**25.500.000**		**743.000**		**3.155.000**	-	*31.848.000*		*86,08%*	-	*245.825.255*		*86,58%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	59.700.000	48 Bulan	56.836.255	Bulan 12	10.500.000	Bulan 2	2.450.000	Bulan -	-	1 Bulan	743.000	9 Bulan	3.155.000	*12 Bulan*	*6.348.000*	*100,00%*	*60,46%*	*60 Bulan*	*63.184.255*	*100,00%*	*105,84%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 %	94.235.000	400 %	59.141.000	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*59.141.000*	*80,00%*	*62,76%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	130.000.000	4 Kali	98.000.000	Kali 1	26.500.000	Kali 0	-	Kali -	25.500.000	0 Kali	-	1 Kali	-	*1 Kali*	*25.500.000*	*100,00%*	*96,23%*	*5 Kali*	*123.500.000*	*100,00%*	*95,00%*	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.197.345.900**		**975.169.021**		**41.070.000**		**12.069.600**		-		**1.649.200**		**6.309.000**	-	*20.027.800*		*48,77%*	-	*995.196.821*		*83,12%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15 Unit	243.350.000	12 Unit	203.815.007	Unit 3	41.070.000	Unit 0	12.069.600	Unit -	-	1 Unit	1.649.200	2 Unit	6.309.000	*3 Unit*	*20.027.800*	*100,00%*	*48,77%*	*15 Unit*	*223.842.807*	*100,00%*	*91,98%*	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	500 %	77.100.000	400 %	59.760.000	% 0	-	%		%		%	-	%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*400 %*	*59.760.000*	*80,00%*	*77,51%*	KEC. KOTIM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	876.895.900	4 Unit	711.594.014	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*711.594.014*	*80,00%*	*81,15%*	KEC. KOTIM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**17,49**	**29,19**	**4,10**	**17,99**	**11,07**	**24,71**	**48,22**	**15,37**	**80,87**	**87,26**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**131.497.600**	**35,00 %**	**78.867.000**	**% 100**	**9.000.000**	% **0,00**	-	% **0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*35,00 %*	*78.867.000*	*17,50%*	*59,98%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**15.357.500**		**9.214.500**		**9.000.000**		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	-	*9.214.500*		*60,00%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Eksemplar	15.357.500	30 Eksemplar	9.214.500	Exampler 10	9.000.000	Exampler 0	-	Exampler -	-	0 Exampler	-	- Exampler	-	- *Exampler*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksemplar*	*9.214.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**116.140.100**		**69.652.500**		-		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	-	*69.652.500*		*59,97%*	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	110.237.500	40 Eksemplar	69.652.500	Eksemplar 0	-	Eksempla r		Eksempla r		Eksemplar		Eksemplar		- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksemplar*	*69.652.500*	*80,00%*	*63,18%*	KEC. KOTIM
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	5.902.600	0 %	-	% 0	-	%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. KOTIM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**174.437.500**	**80,00 %**	**154.804.250**	**% 100**	**17.611.500**	% **100,00**	**1.682.000**	% **0,00**	**10.346.500**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	*100 %*	*12.028.500*	*100,00%*	*68,30%*	*180,00 %*	*166.832.750*	*90,00%*	*95,64%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**174.437.500**		**154.804.250**		**17.611.500**		**1.682.000**		**10.346.500**		-		-	-	*12.028.500*		*68,30%*	-	*166.832.750*		*95,64%*	KEC. KOTIM
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	50 Eksemplar	174.437.500	40 Eksemplar	154.804.250	Eksemplar 10	17.611.500	Eksempla r 10	1.682.000	Eksempla r -	10.346.500	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	*10 Eksemplar*	*12.028.500*	*100,00%*	*68,30%*	*50 Eksemplar*	*166.832.750*	*100,00%*	*95,64%*	KEC. KOTIM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**100,00**	**9,55**	**0,00**	**58,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**68,30**						
									Predikat kinerja		**ST**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**135.000.000**	**80,00 %**	**134.250.000**	**% 100**	**69.150.000**	% **0,00**	-	% **0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*134.250.000*	*40,00%*	*99,44%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**135.000.000**		**134.250.000**		**69.150.000**		-		-		-		-	-	-	*0,00%*	-	*134.250.000*		*99,44%*	KEC. KOTIM
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	25 Orang	135.000.000	20 Orang	134.250.000	Orang 5	69.150.000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0,00%*	*0,00%*	*20 Orang*	*134.250.000*	*80,00%*	*99,44%*	KEC. KOTIM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200 %	18.650.000	60,00 %	11.190.000	% 100	4.960.000	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00 %	-	0,00 %	-	- %	-	0,00%	0,00%	60,00 %	11.190.000	30,00%	60,00%	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan		18.650.000		11.190.000		4.960.000		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	11.190.000		60,00%	KEC. KOTIM
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	5.075.000	3 Kali	3.045.000	Kali 1	4.960.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0,00%	0,00%	3 Kali	3.045.000	60,00%	60,00%	KEC. KOTIM
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	13.575.000	3 Kali	8.145.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	3 Kali	8.145.000	60,00%	60,00%	KEC. KOTIM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	200 %	106.625.000	60,00 %	63.975.000	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	0,00%	0,00%	60,00 %	63.975.000	30,00%	60,00%	KEC. KOTIM
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		106.625.000		63.975.000		-		-		-		-		-	-	-		0,00%	-	63.975.000		60,00%	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	500 %	78.650.000	300 %	47.190.000	% 0	-	% 0		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	300 %	47.190.000	60,00%	60,00%	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	60 Desa	27.975.000	36 Desa	16.785.000	Desa		Desa		Desa		Desa		Desa		- Desa	-	0,00%	0,00%	36 Desa	16.785.000	60,00%	60,00%	KEC. KOTIM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
44			KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT			-		-																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	200 %	9.253.286.595	78,80 %	8.528.349.933	% 100	1.538.278.797	% 3,44	316.463.115	% 4,95	362.948.441	% 6,02	370.985.556	% 33,33	289.781.435	47,74 %	1.340.178.547	47,74%	87,12%	126,55 %	9.868.528.480	63,27%	106,65%	KEC. KOBAR
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		106.992.500		84.182.300		25.062.800		2.622.000		2.017.400		1.252.500		5.246.900	-	11.138.800		44,44%	-	95.321.100		89,09%	KEC. KOBAR
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Buku	80.817.500	120 Buku	65.867.300	Buku 30	19.803.800	Buku 5	2.622.000	Buku 3	1.700.000	2 Buku	952.500	20 Buku	4.764.500	30 Buku	10.039.000	100,00%	50,69%	150 Buku	75.906.300	100,00%	93,92%	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	150 Eksamplar Dokumen	10.500.000	120 Eksamplar Dokumen	7.050.000	Eksamplar 30 Dokumen	2.100.000	Eksamplar 0 Dokumen	-	Eksamplar - Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	120 Eksamplar Dokumen	7.050.000	80,00%	67,14%	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	4.875.000	120 Eksamplar Dokumen	3.225.000	Eksamplar 30 Dokumen	975.000	Eksamplar 0 Dokumen	-	Eksamplar - Dokumen	-	9 Eksamplar Dokumen	300.000	21 Eksamplar Dokumen	-	30 Eksamplar Dokumen	300.000	100,00%	30,77%	150 Eksamplar Dokumen	3.525.000	100,00%	72,31%	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	2.370.000	120 Eksamplar Dokumen	1.896.000	Eksamplar 30 Dokumen	474.000	Eksamplar 0 Dokumen	-	Eksamplar 10 Dokumen	165.000	0 Eksamplar Dokumen	-	20 Eksamplar Dokumen	-	30 Eksamplar Dokumen	165.000	100,00%	34,81%	150 Eksamplar Dokumen	2.061.000	100,00%	86,96%	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	2.250.000	90 Eksamplar Dokumen	1.350.000	Eksamplar 30 Dokumen	474.000	Eksamplar 0 Dokumen	-	Eksamplar - Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0,00%	0,00%	90 Eksamplar Dokumen	1.350.000	60,00%	60,00%	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	150 Eksamplar Dokumen	2.310.000	120 Eksamplar Dokumen	1.848.000	30 Eksamplar Dokumen	462.000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Elsamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	- *Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*120 Eksamplar Dokumen*	*1.848.000*	*80,00%*	*80,00%*	KEC. KOBAR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	150 Eksamplar Dokumen	3.870.000	120 Eksamplar Dokumen	2.946.000	30 Eksamplar Dokumen	774.000	0 Eksamplar Dokumen	-	1 Elsamplar Dokumen	152.400	5 Eksamplar Dokumen	-	24 Eksamplar Dokumen	482.400	*30 Eksamplar Dokumen*	*634.800*	*100,00%*	*82,02%*	*150 Eksamplar Dokumen*	*3.580.800*	*100,00%*	*92,53%*	KEC. KOBAR
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7.373.119.495**		**7.020.372.630**		**1.398.541.359**		**301.539.520**		**347.058.641**		**353.194.272**		**274.682.853**	-	*1.276.475.286*		*91,27%*	-	*8.296.847.916*		*112,53%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	6.013.192.495	44 Orang	5.693.093.630	11 Orang	1.098.012.959	3 Orang	244.339.520	2 Orang	281.378.641	3 Orang	296.494.272	3 Orang	212.572.853	*11 Orang*	*1.034.785.286*	*100,00%*	*94,24%*	*55 Orang*	*6.727.878.916*	*100,00%*	*111,89%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	1.043.700.000	68 Orang	1.042.052.000	17 Orang	234.420.000	4 Orang	57.200.000	4 Orang	57.200.000	4 Orang	56.700.000	5 Orang	56.700.000	*17 Orang*	*227.800.000*	*100,00%*	*97,18%*	*85 Orang*	*1.269.852.000*	*100,00%*	*121,67%*	KEC. KOBAR
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Kali	312.423.000	48 Kali	281.423.000	12 Kali	65.347.600	0 Kali	-	2 Kali	8.480.000	0 Kali	-	10 Kali	5.410.000	*12 Kali*	*13.890.000*	*100,00%*	*21,26%*	*60 Kali*	*295.313.000*	*100,00%*	*94,52%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25 Buku	3.804.000	20 Buku	3.804.000	5 Buku	760.800	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*20 Buku*	*3.804.000*	*80,00%*	*100,00%*	KEC. KOBAR
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**232.034.550**		**192.073.468**		**19.752.800**		**600.000**		-		**240.000**		**2.274.700**	-	*3.114.700*		*15,77%*	-	*195.188.168*		*84,12%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	129.164.270	12 Unit	112.256.916	3 Unit	1.565.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Unit*	*112.256.916*	*80,00%*	*86,91%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	600 Porsi	27.000.000	480 Porsi	18.906.000	120 Porsi	5.400.000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	-	- Porsi	-	- *Porsi*	-	*0,00%*	*0,00%*	*480 Porsi*	*18.906.000*	*80,00%*	*70,02%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150 Eksamplar	8.839.000	120 Eksamplar	8.396.400	30 Eksamplar	1.929.700	0 Eksamplar	-	- Elsamplar	-	0 Eksamplar	-	30 Eksamplar	1.514.700	*30 Eksamplar*	*1.514.700*	*100,00%*	*78,49%*	*150 Eksamplar*	*9.911.100*	*100,00%*	*112,13%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	70 Buah	46.781.280	56 Buah	40.064.152	14 Buah	9.058.100	1 Buah	600.000	- Buah	-	1 Buah	240.000	12 Buah	760.000	*14 Buah*	*1.600.000*	*100,00%*	*17,66%*	*70 Buah*	*41.664.152*	*100,00%*	*89,06%*	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	50 Kali	20.250.000	40 Kali	12.450.000	10 Kali	1.800.000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Kali*	*12.450.000*	*80,00%*	*61,48%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**271.115.050**		**230.548.475**		**44.951.838**		**6.766.795**		**11.405.000**		**13.831.384**		**4.384.667**	-	*36.387.846*		*80,95%*	-	*266.936.321*		*98,46%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	140.340.050	48 Kali	136.845.575	12 Kali	28.546.838	3 Kali	6.766.795	- Kali	-	3 Kali	8.831.384	6 Kali	4.384.667	*12 Kali*	*19.982.846*	*100,00%*	*70,00%*	*60 Kali*	*156.828.421*	*100,00%*	*111,75%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	130.775.000	4 Kali	93.702.900	1 Kali	16.405.000	0 Kali	-	- Kali	11.405.000	1 Kali	5.000.000	- Kali	-	*1 Kali*	*16.405.000*	*100,00%*	*100,00%*	*5 Kali*	*110.107.900*	*100,00%*	*84,20%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**		**1.270.025.000**		**1.001.173.060**		**49.970.000**		**4.934.800**		**2.467.400**		**2.467.400**		**3.192.315**	-	*13.061.915*		*26,14%*	-	*1.014.234.975*		*79,86%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit		3 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	-	*60,00%*	*0,00%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit Mobil dan Motor	259.350.000	23 Unit Mobil dan Motor	219.635.060	5 Unit Mobil dan Motor	43.070.000	0 Unit Mobil dan Motor	4.934.800	1 Unit Mobil dan Motor	2.467.400	0 Unit Mobil dan Motor	2.467.400	4 Unit Mobil dan Motor	3.192.315	*5 Unit Mobil dan Motor*	*13.061.915*	*100,00%*	*30,33%*	*28 Unit Mobil dan Motor*	*232.696.975*	*112,00%*	*89,72%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75 Unit	28.400.000	60 Unit	19.190.000	15 Unit	6.900.000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Unit*	*19.190.000*	*80,00%*	*67,57%*	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Gedung Bangunan	982.275.000	8 Gedung Bangunan	762.348.000	Gedung Bangunan		Gedung Bangunan		Gedung Bangunan		Gedung Bangunan		Gedung Bangunan		- *Gedung Bangunan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Gedung Bangunan*	*762.348.000*	*80,00%*	*77,61%*	KEC. KOBAR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**3,44**		**20,57**		**4,95**		**23,59**		**6,02**		**24,12**		**33,33**		**18,84**		**47,74**		**87,12**				
									Predikat kinerja		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**T**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**364.398.800**	**24,71 %**	**189.484.200**	**% 100**	**11.706.700**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*24,71 %*	*189.484.200*	*12,35%*	*52,00%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**129.567.300**		**48.585.300**		**11.706.700**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*48.585.300*		*37,50%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	60 Kali	80.975.500	36 Kali	48.585.300	Kali 12	5.017.600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*36 Kali*	*48.585.300*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOBAR
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	48.591.800	0 %	-	% 100	6.689.100	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**234.831.500**		**140.898.900**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	*0,00%*	-	*140.898.900*		*60,00%*	KEC. KOBAR
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	10 Eksemplar	234.831.500	6 Eksemplar	140.898.900	Eksemplar		Eksemplar		Elsemplar		Eksemplar		Eksemplar		- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Eksemplar*	*140.898.900*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOBAR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**-**		**-**				
									Predikat kinerja		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**452.293.000**	**80,00 %**	**359.049.000**	**% 100**	**36.895.300**	**% 0,00**	-	**% 85,00**	**4.757.600**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	*85,00 %*	*4.757.600*	*85,00%*	*12,89%*	*165,00 %*	*363.806.600*	*82,50%*	*80,44%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**452.293.000**		**359.049.000**		**36.895.300**		-		**4.757.600**		-		-	-	*4.757.600*		*12,89%*	-	*363.806.600*		*80,44%*	KEC. KOBAR
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	85 Kali	361.238.000	68 Kali	301.074.750	Kali 17	26.008.700	Kali 0	-	Kali 17	4.757.600	0 Kali	-	- Kali	-	*17 Kali*	*4.757.600*	*100,00%*	*18,29%*	*85 Kali*	*305.832.350*	*100,00%*	*84,66%*	KEC. KOBAR
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	91.055.000	12 Kali	57.974.250	Kali 3	10.886.600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kali*	*57.974.250*	*80,00%*	*63,67%*	KEC. KOBAR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**		**0,00**	**85,00**	**12,89**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**12,89**							
									Predikat kinerja		**SR**		**SR**	**T**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140.675.000**	**80,00 %**	**143.540.000**	**% 100**	**57.934.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*143.540.000*	*40,00%*	*102,04%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140.675.000**		**143.540.000**		**57.934.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*143.540.000*		*102,04%*	KEC. KOBAR
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140.675.000	48 Kali	143.540.000	Kali 12	57.934.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*143.540.000*	*80,00%*	*102,04%*	KEC. KOBAR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**							
									Predikat kinerja		**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**72.628.750**	**60,00 %**	**43.577.250**	**% 100**	**13.782.500**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*43.577.250*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**72.628.750**		**43.577.250**		**13.782.500**		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*43.577.250*		*60,00%*	KEC. KOBAR
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	44.950.000	3 Kali	26.970.000	Kali 1	8.315.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*26.970.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOBAR
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	27.678.750	3 Kali	16.607.250	Kali 1	5.467.500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*16.607.250*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**368.746.000**	**80,00 %**	**228.618.700**	**% 100**	**8.437.300**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**88,89 %**	**1.439.100**	*89 %*	*1.439.100*	*88,89%*	*17,06%*	*168,89 %*	*230.057.800*	*84,44%*	*62,39%*	KEC. KOBAR
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**368.746.000**		**228.618.700**		**8.437.300**		-		-		-		**1.439.100**	-	*1.439.100*		*17,06%*	-	*230.057.800*		*62,39%*	KEC. KOBAR
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	80 Kali	115.195.500	64 Kali	76.245.300	Kali 16	7.199.700	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	16 Kali	1.439.100	*16 Kali*	*1.439.100*	*100,00%*	*19,99%*	*80 Kali*	*77.684.400*	*100,00%*	*67,44%*	KEC. KOBAR
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	253.550.500	8 Kali	152.373.400	Kali 2	1.237.600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*8 Kali*	*152.373.400*	*80,00%*	*60,10%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	17,06	88,89	17,06						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR	T	SR						
45			**KECAMATAN GUNUNG ALIP**			-		-		**9.371.899.565**		**312.626.122**		**401.079.267**		**418.221.043**		**378.756.692**	*15,39 %*	*1.510.683.124*	*15,39%*	*92,36%*	*79,52 %*	*10.231.803.060*	*39,76%*	*109,18%*	KEC. GULIP
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**		**64,13 %**	**8.721.119.936**	**% 100**		**% 0,53**		**% 1,20**		**% 13,66**		**% 0,00**										
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**131.355.000**		**96.712.000**		**7.542.100**		-		**251.000**		**275.900**		**89.100**	-	*616.000*		*8,17%*	-	*97.328.000*		*74,10%*	KEC. GULIP
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Eksamplar Dokumen	83.125.000	120 Eksamplar Dokumen	64.767.500	30 Eksamplar Dokumen	6.320.300	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	125.900	30 Eksamplar Dokumen	-	*30 Eksamplar Dokumen*	*125.900*	*100,00%*	*1,99%*	*150 Eksamplar Dokumen*	*64.893.400*	*100,00%*	*78,07%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksamplar Dokumen	14.290.000	40 Eksamplar Dokumen	9.458.300	10 Eksamplar Dokumen	280.000	0 Eksamplar Dokumen	-	4 Eksamplar Dokumen	101.000	0 Eksamplar Dokumen	-	6 Eksamplar Dokumen	-	*10 Eksamplar Dokumen*	*101.000*	*100,00%*	*36,07%*	*50 Eksamplar Dokumen*	*9.559.300*	*100,00%*	*66,90%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksamplar Dokumen	5.250.000	40 Eksamplar Dokumen	3.919.200	0 Eksamplar Dokumen	-	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen	-	*Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksamplar Dokumen*	*3.919.200*	*80,00%*	*74,65%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksamplar Dokumen	5.250.000	40 Eksamplar Dokumen	3.450.000	10 Eksamplar Dokumen	585.900	0 Eksamplar Dokumen	-	2 Eksamplar Dokumen	150.000	0 Eksamplar Dokumen	-	8 Eksamplar Dokumen	-	*10 Eksamplar Dokumen*	*150.000*	*100,00%*	*25,60%*	*50 Eksamplar Dokumen*	*3.600.000*	*100,00%*	*68,57%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksamplar Dokumen	5.250.000	30 Eksamplar Dokumen	3.150.000	10 Eksamplar Dokumen	256.000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	4 Eksamplar Dokumen	150.000	6 Eksamplar Dokumen	-	*10 Eksamplar Dokumen*	*150.000*	*100,00%*	*58,59%*	*40 Eksamplar Dokumen*	*3.300.000*	*80,00%*	*62,86%*	KEC. GULIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksamplar Dokumen	13.440.000	40 Eksamplar Dokumen	9.117.000	Eksamplar Dokumen 10	99.900	Eksamplar Dokumen 0	-	Eksamplar Dokumen -	-	0 Eksamplar Dokumen	-	10 Eksamplar Dokumen	89.100	***10 Eksamplar Dokumen***	***89.100***	***100,00%***	***89,19%***	***50 Eksamplar Dokumen***	***9.206.100***	***100,00%***	***68,50%***	KEC. GULIP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksamplar Dokumen	4.750.000	30 Eksamplar Dokumen	2.850.000	Eksamplar Dokumen 0	-	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		***- Eksamplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksamplar Dokumen***	***2.850.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. GULIP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8.102.699.455**		**7.813.980.950**		**1.546.152.492**		**312.626.122**		**371.291.067**		**402.026.043**		**363.636.692**	***-***	***1.449.579.924***		***93,75%***	***-***	***9.263.560.874***		***114,33%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	6.908.755.955	68 Orang	6.663.969.750	Orang 17	1.344.762.492	Orang 4	271.451.122	Orang 4	330.116.067	4 Orang	356.161.043	5 Orang	320.821.692	***17 Orang***	***1.278.549.924***	***100,00%***	***95,08%***	***85 Orang***	***7.942.519.674***	***100,00%***	***114,96%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	847.500.000	41 Orang	875.490.500	Orang 10	164.790.000	Orang 3	41.175.000	Orang 2	41.175.000	2 Orang	41.175.000	3 Orang	41.175.000	***10 Orang***	***164.700.000***	***100,00%***	***99,95%***	***51 Orang***	***1.040.190.500***	***102,00%***	***122,74%***	KEC. GULIP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	324.700.000	24 Orang	259.670.600	Orang 6	36.600.000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	4.690.000	6 Orang	1.640.000	***6 Orang***	***6.330.000***	***100,00%***	***17,30%***	***30 Orang***	***266.000.600***	***100,00%***	***81,92%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	150.000	%		0 %	-	%		%		%		%		***- %***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***- %***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Eksampler	21.593.500	40 Eksampler	14.850.100	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		***- Eksampler***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***40 Eksampler***	***14.850.100***	***80,00%***	***68,77%***	KEC. GULIP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**458.476.700**		**288.106.620**		**5.863.400**		**-**		**-**		**594.000**		**1.396.100**	***-***	***1.990.100***		***33,94%***	***-***	***290.096.720***		***63,27%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80 Unit	207.385.900	64 Unit	129.115.840	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit	-	Unit		***- Unit***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***64 Unit***	***129.115.840***	***80,00%***	***62,26%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	5000 Kotak	119.250.000	3000 Kotak	71.550.000	Kotak 1000	2.660.000	Kotak 0	-	Kotak -	-	169 Kotak	594.000	831 Kotak	-	***1.000 Kotak***	***594.000***	***100,00%***	***22,33%***	***4.000 Kotak***	***72.144.000***	***80,00%***	***60,50%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Eksampler	25.639.000	800 Eksampler	17.508.300	Eksampler 200	1.782.600	Eksampler 0	-	Eksampler -	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	***- Eksampler***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***800 Eksampler***	***17.508.300***	***80,00%***	***68,29%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	68.701.800	48 Bulan	47.432.480	Bulan 12	1.420.800	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	1.396.100	***12 Bulan***	***1.396.100***	***100,00%***	***98,26%***	***60 Bulan***	***48.828.580***	***100,00%***	***71,07%***	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	175 Kali	37.500.000	105 Kali	22.500.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***105 Kali***	***22.500.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. GULIP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**		**6.500.000**		**3.900.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	***-***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***-***	***3.900.000***		***60,00%***	KEC. GULIP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, lemari dan mebel lainnya	50 Unit	6.500.000	30 Unit	3.900.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***30 Unit***	***3.900.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**275.818.410**		**240.868.534**		**42.452.500**		**-**		**22.135.000**		**6.822.900**		**8.700.000**	***-***	***37.657.900***		***88,71%***	***-***	***278.526.434***		***100,98%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	160.768.410	48 Bulan	154.083.534	Bulan 12	24.952.500	Bulan 0	-	Bulan 2	4.635.000	3 Bulan	6.822.900	7 Bulan	8.700.000	***12 Bulan***	***20.157.900***	***100,00%***	***80,79%***	***60 Bulan***	***174.241.434***	***100,00%***	***108,38%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kali	115.050.000	10 Kali	86.785.000	Kali 2	17.500.000	Kali 0	-	Kali 2	17.500.000	0 Kali	-	- Kali	-	***2 Kali***	***17.500.000***	***100,00%***	***100,00%***	***12 Kali***	***104.285.000***	***120,00%***	***90,64%***	KEC. GULIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**397.050.000**		**277.551.832**		**33.658.800**		-	**7.402.200**			**8.502.200**		**4.934.800**	-	***20.839.200***		***61,91%***	-	***298.391.032***		***75,15%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	235.850.000	4 Unit	174.781.832	Unit 1	29.608.800	Unit 0	-	Unit -	7.402.200	0 Unit	7.402.200	1 Unit	4.934.800	***1 Unit***	***19.739.200***	***100,00%***	***66,67%***	***5 Unit***	***194.521.032***	***100,00%***	***82,48%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	42.250.000	7 Unit	31.400.000	Unit 2	4.050.000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	1.100.000	2 Unit	-	***2 Unit***	***1.100.000***	***100,00%***	***27,16%***	***9 Unit***	***32.500.000***	***90,00%***	***76,92%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50 Unit	16.450.000	30 Unit	9.870.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Unit***	***9.870.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	102.500.000	3 Unit	61.500.000	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Unit***	***61.500.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. GULIP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,53**	**19,11**	**1,20**	**24,52**	**13,66**	**25,57**	**64,73**	**23,16**	**80,13**	**92,36**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**T**	**ST**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**124.007.000**	**32,94 %**	**75.105.744**	**% 100**	**4.974.500**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 8,77**	**560.000**	***9 %***	***560.000***	***8,77%***	***11,26%***	***41,71 %***	***75.665.744***	***20,86%***	***61,02%***	KEC. GULIP
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**43.460.000**		**27.171.000**		**150.000**		-		-		-		-	-	-		***0,00%***	-	***27.171.000***		***62,52%***	KEC. GULIP
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	43.460.000	16 Kali	27.171.000	Kali 4	150.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***16 Kali***	***27.171.000***	***80,00%***	***62,52%***	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**80.547.000**		**47.934.744**		**4.824.500**		-		-		-	**560.000**	-	***560.000***		***11,61%***	-	***48.494.744***		***60,21%***	KEC. GULIP
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	79.492.500	40 Eksemplar	47.934.744	Eksemplar 10	4.685.000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	10 Eksemplar	560.000	***10 Eksemplar***	***560.000***	***100,00%***	***11,95%***	***50 Eksemplar***	***48.494.744***	***100,00%***	***61,01%***	KEC. GULIP
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	1.054.500	%		% 100	139.500	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	KEC. GULIP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,77**	**11,26**	***8,77***	**11,26**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**240.157.500**	**80,00 %**	**175.786.500**	**% 100**	**16.642.500**	**% 0,00**	-	**% 100,00**	**9.381.800**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	***100,00 %***	***9.381.800***	***100,00%***	***56,37%***	***180,00 %***	***185.168.300***	***90,00%***	***77,10%***	KEC. GULIP
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**240.157.500**		**175.786.500**		**16.642.500**		-		**9.381.800**		-		-	-	***9.381.800***		***56,37%***	-	***185.168.300***		***77,10%***	KEC. GULIP
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	70 Kali	164.225.000	56 Kali	128.457.400	Kali 14	16.642.500	Kali 0	-	Kali 14	9.381.800	0 Kali	-	Kali	-	***14 Kali***	***9.381.800***	***100,00%***	***56,37%***	***70 Kali***	***137.839.200***	***100,00%***	***83,93%***	KEC. GULIP
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	75.932.500	12 Kali	47.329.100	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***12 Kali***	***47.329.100***	***80,00%***	***62,33%***	KEC. GULIP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**100,00**	**56,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**56,37**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
										Predikat kinerja	SR	SR	ST	R	SR	SR	SR	SR	ST	R						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200** **%**	**144.850.000**	**80,00 %**	**136.890.000**	**% 100**	**57.090.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	7.800	- %	*7.800*	*0,00%*	*0,01%*	*80,00 %*	*136.897.800*	*40,00%*	*94,51%*	KEC. GULIP
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**144.850.000**		**136.890.000**		**57.090.000**		-		-		-		**7.800**	-	*7.800*		*0,01%*	-	*136.897.800*		*94,51%*	KEC. GULIP
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	144.850.000	48 Bulan	136.890.000	Bulan 12	57.090.000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	7.800	- *Bulan*	*7.800*	*0,00%*	*0,01%*	*48 Bulan*	*136.897.800*	*80,00%*	*94,51%*	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	-	**0,01**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200** **%**	**125.537.500**	**60,00 %**	**75.322.500**	**% 100**	**2.250.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	0,00 %	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*75.322.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**125.537.500**		**75.322.500**		**2.250.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*75.322.500*		*60,00%*	KEC. GULIP
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	105.412.500	3 Kali	63.247.500	Kali 1	2.250.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*63.247.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GULIP
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	20.125.000	3 Kali	12.075.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*12.075.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200** **%**	**131.292.500**	**85,00 %**	**81.367.000**	**% 100**	**1.425.000**	% 0,00	-	% 0,00	-	% 0,00	-	75,00 %	225.000	*75 %*	*225.000*	*75,00%*	*15,79%*	*160,00 %*	*81.592.000*	*80,00%*	*62,15%*	KEC. GULIP
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**131.292.500**		**81.367.000**		**1.425.000**		-		-		-		**225.000**	-	*225.000*		*15,79%*	-	*81.592.000*		*62,15%*	KEC. GULIP
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	46.735.000	24 Kali	29.332.000	Kali 6	1.275.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	6 Kali	225.000	*6 Kali*	*225.000*	*100,00%*	*17,65%*	*30 Kali*	*29.557.000*	*100,00%*	*63,24%*	KEC. GULIP
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	84.557.500	10 Kali	52.035.000	Kali 2	150.000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*10 Kali*	*52.035.000*	*100,00%*	*61,54%*	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**15,79**	**75,00**	**15,79**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SD**	**SR**						
46			**KECAMATAN LIMAU**			-		-																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** **%**	**9.894.422.860**	**67,88 %**	**8.898.278.631**	**% 100**	**1.409.594.977**	% 3,02	**351.825.679**	% 4,03	**274.911.943**	% 37,72	**367.359.398**	55,23 %	**289.629.280**	*100,00 %*	*1.283.726.300*	*100,00%*	*91,07%*	*167,88 %*	*10.182.004.931*	*83,94%*	*102,91%*	KEC. LIMAU
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**72.032.000**		**49.076.200**		**500.000**		-		-		**500.000**		-	-	*500.000*		*100,00%*	-	*49.576.200*		*68,83%*	KEC. LIMAU
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	200 Buku	47.972.000	160 Buku	32.983.200	Buku 40	500.000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	500.000	40 Buku	-	*40 Buku*	*500.000*	*100,00%*	*100,00%*	*200 Buku*	*33.483.200*	*100,00%*	*69,80%*	KEC. LIMAU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	25 Eksamplar Dokumen	7.250.000	20 Eksamplar Dokumen	4.800.000	0 Eksamplar Dokumen	-	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		- *Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	20 *Eksamplar Dokumen*	*4.800.000*	*80,00%*	*66,21%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Eksamplar Dokumen	2.250.000	20 Eksamplar Dokumen	1.675.000	0 Eksamplar Dokumen	-	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		- *Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	20 *Eksamplar Dokumen*	*1.675.000*	*80,00%*	*74,44%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksamplar Dokumen	3.005.000	10 Eksamplar Dokumen	1.934.000	0 Eksamplar Dokumen	-	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		- *Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	10 *Eksamplar Dokumen*	*1.934.000*	*20,00%*	*64,36%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksamplar Dokumen	3.155.000	50 Eksamplar Dokumen	2.644.000	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		- *Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	50 *Eksamplar Dokumen*	*2.644.000*	*100,00%*	*83,80%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	25 Eksamplar Dokumen	2.650.000	15 Eksamplar Dokumen	1.590.000	0 Eksamplar Dokumen	-	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		- *Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	15 *Eksamplar Dokumen*	*1.590.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksamplar Dokumen	5.750.000	30 Eksamplar Dokumen	3.450.000	0 Eksamplar Dokumen	-	Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		Eksamplar Dokumen		- *Eksamplar Dokumen*	-	*0,00%*	*0,00%*	30 *Eksamplar Dokumen*	*3.450.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8.437.169.250**		**7.897.783.865**		**1.333.590.295**		**346.010.879**		**261.897.143**		**344.165.798**		**287.469.280**	-	*1.239.543.100*		*92,95%*	-	*9.137.326.965*		*108,30%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	7.299.269.250	48 Orang	6.816.663.865	12 Orang	1.091.940.295	3 Orang	301.870.879	3 Orang	217.717.143	3 Orang	288.125.798	3 Orang	247.269.280	*12 Orang*	*1.054.983.100*	*100,00%*	*96,62%*	*60 Orang*	*7.871.646.965*	*100,00%*	*107,84%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	772.500.000	48 Bulan	764.700.000	12 Bulan	177.300.000	3 Bulan	40.200.000	3 Bulan	40.200.000	3 Bulan	40.200.000	3 Bulan	40.200.000	*12 Bulan*	*160.800.000*	*100,00%*	*90,69%*	*60 Bulan*	*925.500.000*	*100,00%*	*119,81%*	KEC. LIMAU
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	361.350.000	32 Orang	313.990.000	Orang 8	64.350.000	2 Orang	3.940.000	- Orang	3.980.000	1 Orang	15.840.000	5 Orang	-	*8 Orang*	*23.760.000*	*100,00%*	*36,92%*	*40 Orang*	*337.750.000*	*100,00%*	*93,47%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Buku	4.050.000	30 Buku	2.430.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Buku*	*2.430.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**8.050.000**		-		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	-		*0,00%*	KEC. LIMAU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	8.050.000	0 %	-	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**135.694.110**		**96.633.466**		**13.347.200**		**330.000**		-		**7.010.000**		**2.160.000**	-	*9.500.000*		*71,18%*	-	*106.133.466*		*78,22%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	14.962.500	48 Bulan	10.027.400	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*10.027.400*	*80,00%*	*67,02%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	60 Bulan	45.000.000	36 Bulan	27.000.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*36 Bulan*	*27.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500 %	30.043.500	400 %	22.219.100	% 100	1.270.200	% 0	-	% -	-	42,09 %	1.270.000	57,91 %	-	*100 %*	*1.270.000*	*100,00%*	*99,98%*	*500 %*	*23.489.100*	*100,00%*	*78,18%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200 %	8.640.000	100 %	8.640.000	% 100	8.640.000	% 0	-	% -	-	58,33 %	5.040.000	41,67 %	2.160.000	*100 %*	*7.200.000*	*100,00%*	*83,33%*	*200 %*	*15.840.000*	*100,00%*	*183,33%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	18.298.110	48 Bulan	16.496.966	Bulan 12	3.437.000	1 Bulan	330.000	- Bulan	-	3 Bulan	700.000	8 Bulan	-	*12 Bulan*	*1.030.000*	*100,00%*	*29,97%*	*60 Bulan*	*17.526.966*	*100,00%*	*95,79%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	500 %	18.750.000	300 %	12.250.000	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*300 %*	*12.250.000*	*60,00%*	*65,33%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**131.250.000**		**107.837.000**		**22.598.682**		-		**8.080.000**		**264.000**		-	-	*8.344.000*		*36,92%*	-	*116.181.000*		*88,52%*	KEC. LIMAU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	33.750.000	48 Bulan	29.337.000	Bulan 12	22.598.682	Bulan 0	-	Bulan 6	8.080.000	1 Bulan	264.000	5 Bulan	-	*12 Bulan*	*8.344.000*	*100,00%*	*36,92%*	*60 Bulan*	*37.681.000*	*100,00%*	*111,65%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	97.500.000	4 Kali	78.500.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*78.500.000*	*80,00%*	*80,51%*	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.110.227.500**		**746.948.100**		**39.558.800**		**5.484.800**		**4.934.800**		**15.419.600**		-	-	*25.839.200*		*65,32%*	-	*772.787.300*		*69,61%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	10 Unit	193.600.000	8 Unit	189.295.600	Unit 2	39.558.800	Unit 0	5.484.800	Unit -	4.934.800	1 Unit	15.419.600	1 Unit	-	*2 Unit*	*25.839.200*	*100,00%*	*65,32%*	*10 Unit*	*215.134.800*	*100,00%*	*111,12%*	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	2.840.000	100 %	1.550.000	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*100 %*	*1.550.000*	*100,00%*	*54,58%*	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Unit	73.550.000	7 Unit	51.960.000	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*7 Unit*	*51.960.000*	*70,00%*	*70,65%*	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	10 Unit	840.237.500	6 Unit	504.142.500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Unit*	*504.142.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		3,02	24,96	4,03	19,50	37,72	26,06	55,23	20,55	100,00	91,07						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**91.594.900**	**50,00 %**	**53.802.300**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*50,00 %*	*53.802.300*	*25,00%*	*58,74%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**42.262.500**		**25.357.500**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*25.357.500*		*60,00%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	42.262.500	12 Kali	25.357.500	Kali 0	-	Kali 0		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kali*	*25.357.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**49.332.400**		**28.444.800**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*28.444.800*		*57,66%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	480 Eksampler	47.408.000	288 Eksampler	28.444.800	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler	-	*Eksampler*	-	*0,00%*	*0,00%*	*288 Eksampler*	*28.444.800*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	1.924.400	0 %	-	%		%		%		%		%	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. LIMAU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**152.450.000**	**80,00 %**	**123.322.000**	% 100	**15.117.390**	% 100,00	**10.884.250**	% 0,00	-	0,00 %	**1.795.200**	0,00 %	-	*100 %*	*12.679.450*	*100,00%*	*83,87%*	*180,00 %*	*136.001.450*	*90,00%*	*89,21%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**152.450.000**		**123.322.000**		**15.117.390**		**10.884.250**		-		**1.795.200**		-	-	*12.679.450*		*83,87%*	-	*136.001.450*		*89,21%*	KEC. LIMAU
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	55 Kali	152.450.000	44 Kali	123.322.000	Kali 11	15.117.390	Kali 11	10.884.250	Kali -	-	0 Kali	1.795.200	- Kali	-	*11 Kali*	*12.679.450*	*100,00%*	*83,87%*	*55 Kali*	*136.001.450*	*100,00%*	*89,21%*	KEC. LIMAU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	72,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	100,00	83,87						
									Predikat kinerja		ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**136.500.000**	**80,00 %**	**151.800.000**	**% 100**	**73.482.600**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*151.800.000*	*40,00%*	*111,21%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**136.500.000**		**151.800.000**		**73.482.600**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*151.800.000*		*111,21%*	KEC. LIMAU
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	136.500.000	48 Kali	151.800.000	Kali 12	73.482.600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Kali*	*151.800.000*	*80,00%*	*111,21%*	KEC. LIMAU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**27.150.000**	**60,00 %**	**16.290.000**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*16.290.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**27.150.000**		**16.290.000**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*16.290.000*		*60,00%*	KEC. LIMAU
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	12.450.000	3 Kali	7.470.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*7.470.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	14.700.000	3 Kali	8.820.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*8.820.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**119.219.500**	**60,00 %**	**71.531.700**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*71.531.700*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**119.219.500**		**71.531.700**		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*71.531.700*		*60,00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	74.750.000	18 Kali	44.850.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*18 Kali*	*44.850.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	44.469.500	6 Kali	26.681.700	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*26.681.700*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. LIMAU
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
47			**KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**10.124.222.665**	**75,07 %**	**6.348.821.383**	**% 100**	**1.689.220.673**	**% 13,75**	**350.965.390**	**% 16,52**	**541.304.810**	**% 20,98**	**380.773.620**	**% 48,75**	**316.367.265**	*100,00* %	*1.589.411.085*	*100,00%*	*94,09%*	*175,07 %*	*7.938.232.468*	*87,53%*	*78,41%*	KEC. BNS
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**72.207.000**		**43.324.200**		**4.800.000**		**600.000**		**1.200.000**		-		-	-	*1.800.000*		*37,50%*	-	*45.124.200*		*62,49%*	KEC. BNS
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Buku	50.272.000	80 Buku	40.488.080	Buku 20	4.800.000	Buku 2	600.000	Buku 3	1.200.000	0 Buku	-	15 Buku	-	*20 Buku*	*1.800.000*	*100,00%*	*37,50%*	*100 Buku*	*42.288.080*	*100,00%*	*84,12%*	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Buku	4.500.000	80 Buku	4.300.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Buku*	*4.300.000*	*80,00%*	*95,56%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Buku	2.875.000	80 Buku	3.550.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Buku*	*3.550.000*	*80,00%*	*123,48%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buku	3.005.000	80 Buku	3.680.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Buku*	*3.680.000*	*80,00%*	*122,46%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buku	3.155.000	60 Buku	3.218.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*60 Buku*	*3.218.000*	*60,00%*	*102,00%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Buku	2.650.000	65 Buku	2.120.000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*65 Buku*	*2.120.000*	*65,00%*	*80,00%*	KEC. BNS
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Buku	5.750.000	80 Buku	5.346.500	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0,00%*	*0,00%*	*80 Buku*	*5.346.500*	*80,00%*	*92,98%*	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8.693.645.585**		**5.216.187.351**		**1.462.943.073**		**347.205.390**		**358.361.010**		**351.588.620**		**308.454.765**	-	***1.365.609.785***		***93,35%***	-	***6.581.797.136***		***75,71%***	KEC. BNS
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PersentasePenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	6.947.773.585	400 %	6.509.863.153	% 100	1.029.543.073	% 25,00	248.180.390	% 25,00	254.136.010	25,00 %	253.203.620	25,00 %	214.629.765	***100,00 %***	***970.149.785***	***100,00%***	***94,23%***	***500 %***	***7.480.012.938***	***100,00%***	***107,66%***	KEC. BNS
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	1.443.000.000	400 %	1.517.325.000	% 100	391.800.000	% 25,00	93.825.000	% 25,00	93.825.000	25,00 %	93.825.000	25,00 %	93.825.000	***100,00 %***	***375.300.000***	***100,00%***	***95,79%***	***500 %***	***1.892.625.000***	***100,00%***	***131,16%***	KEC. BNS
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	298.900.000	400 %	297.570.000	% 100	41.600.000	% 8,33	5.200.000	% 16,67	10.400.000	7,31 %	4.560.000	67,69 %	-	***100,00 %***	***20.160.000***	***100,00%***	***48,46%***	***500 %***	***317.730.000***	***100,00%***	***106,30%***	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25 Buku	3.972.000	15 Buku	2.383.200	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- ***Buku***	-	***0,00%***	***0,00%***	***15 Buku***	***2.383.200***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. BNS
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**113.097.580**		**67.858.548**		**7.221.000**		**142.600**		**285.200**		**1.957.800**		-	-	***2.385.600***		***33,04%***	-	***70.244.148***		***62,11%***	KEC. BNS
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 %	122.877.080	400 %	105.121.664	%		%		%		%		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***400 %***	***105.121.664***	***80,00%***	***85,55%***	KEC. BNS
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Makan dan Minum	500 %	27.000.000	300 %	16.200.000	%		%		%		%		%		- %	-	-	***0,00%***	***300 %***	***16.200.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. BNS
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500 %	8.760.500	400 %	7.908.400	% 100	3.670.000	% 0	-	% -	-	27,28 %	1.028.000	72,72 %	-	***100,00 %***	***1.028.000***	***100,00%***	***28,01%***	***500 %***	***8.936.400***	***100,00%***	***102,01%***	KEC. BNS
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	45.460.000	48 Bulan	37.889.300	Bulan 12	3.551.000	Bulan 1	142.600	Bulan -	285.200	3 Bulan	929.800	8 Bulan	-	***12 Bulan***	***1.357.600***	***100,00%***	***38,23%***	***60 Bulan***	***39.246.900***	***100,00%***	***86,33%***	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	500 %	9.000.000	300 %	5.400.000	%		%		%		%				- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***300 %***	***5.400.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**165.222.500**		**138.435.800**		**31.650.000**		-		**7.912.500**		**15.825.000**		**7.912.500**	-	***31.650.000***		***100,00%***	-	***170.085.800***		***102,94%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	55.222.500	48 Bulan	47.435.800	Bulan 12	31.650.000	Bulan 0	-	Bulan 3	7.912.500	6 Bulan	15.825.000	3 Bulan	7.912.500	***12 Bulan***	***31.650.000***	***100,00%***	***100,00%***	***60 Bulan***	***79.085.800***	***100,00%***	***143,21%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	110.000.000	4 Kali	91.000.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Kali***	***91.000.000***	***80,00%***	***82,73%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.111.700.000**		**883.015.484**		**182.606.600**		**3.017.400**		**153.346.100**		**11.402.200**		-	-	***167.765.700***		***91,87%***	-	***1.050.781.184***		***94,52%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	217.600.000	8 Unit	213.355.484	Unit 2	182.606.600	Unit 0	3.017.400	1 Unit	153.346.100	0 Unit	11.402.200	1 Unit	-	***2 Unit***	***167.765.700***	***100,00%***	***91,87%***	***10 Unit***	***381.121.184***	***100,00%***	***175,15%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perrsentase Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500 %	28.400.000	400 %	24.180.000	%		%		%		%		%	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***400 %***	***24.180.000***	***80,00%***	***85,14%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	865.700.000	4 Unit	645.480.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***4 Unit***	***645.480.000***	***80,00%***	***74,56%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**13,75**	**20,78**	**16,52**	**32,04**	**20,98**	**22,54**	**48,75**	**18,73**	**100.00**	**94.09**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**125.328.000**	**60,00 %**	**75.196.800**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***60,00 %***	***75.196.800***	***30,00%***	***60,00%***	KEC. BNS
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**34.415.500**		**20.649.300**		-		-		-		-		-	- -	-		***0,00%***	-	***20.649.300***		***60,00%***	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	34.415.500	12 Kali	20.649.300	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	12 Kali	20.649.300	60,00%	60,00%	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**90.912.500**		**54.547.500**		-		-		-		-		-	-	*0,00%*	*0,00%*	-	*54.547.500*		*60,00%*	KEC. BNS
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	90.912.500	30 Eksampler	54.547.500	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		- *Eksampler*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksampler*	*54.547.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**103.414.000**	**80,00 %**	**104.170.200**	**% 100**	**27.150.000**	% 100,00	-	0,00 %	20.200.000	0,00 %	-	0,00 %	-	*100 %*	*20.200.000*	*100,00%*	*74,40%*	*180,00 %*	*124.370.200*	*90,00%*	*120,26%*	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**103.414.000**		**104.170.200**	%	**27.150.000**	% -	-	%	**20.200.000**		-		-	- %	*20.200.000*		*74,40%*	-	*124.370.200*		*120,26%*	KEC. BNS
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	500 %	103.414.000	400 %	104.170.200	% 100	27.150.000	% 100	-	- %	20.200.000,00	0 %	-	- %	-	*100,00 %*	*20.200.000*	*100,00%*	*74,40%*	*500 %*	*124.370.200*	*100,00%*	*120,26%*	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**74,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**74,40**						
										Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140.125.000**	**80,00 %**	**163.100.000**	% **100**	**36.400.000**	% **0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*163.100.000*	*40,00%*	*116,40%*	KEC. BNS
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140.125.000**		**163.100.000**		**36.400.000**		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	-	*163.100.000*		*116,40%*	KEC. BNS
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	140.125.000	48 Bulan	163.100.000	Bulan 12	36.400.000	Bulan 0	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	Bulan		- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*163.100.000*	*80,00%*	*116,40%*	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**48.570.000**	**70,00 %**	**35.516.000**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*70,00 %*	*35.516.000*	*35,00%*	*73,12%*	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**48.570.000**		**35.516.000**		-		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	-	*35.516.000*		*73,12%*	KEC. BNS
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	48.570.000	4 Kali	35.516.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Kali*	*35.516.000*	*80,00%*	*73,12%*	KEC. BNS
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	22.301.250	3 Kali	13.380.750	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*13.380.750*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**159.640.500**	**60,00 %**	**95.784.300**	% **100**	**9.000.000**	% **0,00**	-	% **0,00**	-	**100,00 %**	**8.960.000**	**0,00 %**	-	*100 %*	*8.960.000*	*100,00%*	*99,56%*	*160,00 %*	*104.744.300*	*80,00%*	*65,61%*	KEC. BNS
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**159.640.500**		**95.784.300**		**9.000.000**		-		-		**8.960.000**		-	-	*8.960.000*		*99,56%*	-	*104.744.300*		*65,61%*	KEC. BNS
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	55 Kali	69.500.000	33 Kali	41.700.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*33 Kali*	*41.700.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BNS
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	90.140.500	60 Kali	54.084.300	Kali 20	9.000.000	Kali 0	-	- Kali	-	20 Kali	8.960.000	- Kali	-	*20 Kali*	*8.960.000*	*100,00%*	*99,56%*	*80 Kali*	*63.044.300*	*80,00%*	*69,94%*	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,56**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,56**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
48			**KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**7.583.055.625**	**69,91 %**	**6.920.868.836**	% **100**	**1.169.933.193**	% **3,74**	**238.735.184**	% **10,28**	**285.737.123**	% **14,02**	**265.196.718**	% **32,71**	**277.036.612**	*60,75 %*	*1.066.705.637*	*60,75%*	*91,18%*	*130,66 %*	*7.987.574.473*	*65,33%*	*105,33%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**53.150.000**		**33.030.000**		**600.000**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	**33.030.000**		**62,14%**	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Eksampler	48.050.000	120 Eksampler	33.030.000	30 Eksampler	600.000	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- ***Eksampler***	-	***0,00%***	***0,00%***	***120 Eksampler***	***33.030.000***	***80,00%***	***68,74%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen RKA SKPD	100 %	600.000	%		0 %	-	%		%		%		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 %	2.250.000	%		0 %	-	%		%		%		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen DPA SKPD	100 %	2.250.000	%		0 %	-	%		%		%		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**6.193.353.915**		**5.943.511.610**		**1.091.599.151**		**238.735.184**		**272.464.523**		**257.794.518**		**262.855.012**	-	***1.031.849.237***		***94,53%***	-	***6.975.360.847***		***112,63%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	5.572.853.915	48 Bulan	5.322.838.610	12 Bulan	971.539.151	3 Bulan	216.460.184	3 Bulan	245.129.523	3 Bulan	233.509.518	3 Bulan	235.990.012	***12 Bulan***	***931.089.237***	***100,00%***	***95,84%***	***60 Bulan***	***6.253.927.847***	***100,00%***	***112,22%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	315.000.000	48 Bulan	341.100.000	12 Bulan	30.960.000	0 Bulan	-	1 Bulan	5.060.000	8 Bulan	2.010.000	3 Bulan	4.590.000	***12 Bulan***	***11.660.000***	***100,00%***	***37,66%***	***60 Bulan***	***352.760.000***	***100,00%***	***111,99%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	305.500.000	20 Orang	279.573.000	5 Orang	89.100.000	1 Orang	22.275.000	1 Orang	22.275.000	1 Orang	22.275.000	2 Orang	22.275.000	***5 Orang***	***89.100.000***	***100,00%***	***100,00%***	***25 Orang***	***368.673.000***	***100,00%***	***120,68%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**		**70.500.000**		**42.300.000**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	***42.300.000***		***60,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Stel	70.500.000	60 Stel	42.300.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- ***Stel***	-	***0,00%***	***0,00%***	***60 Stel***	***42.300.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%		%		%		%		%		%		%		- %	-	***0,00%***	***0,00%***	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**367.320.000**		**269.287.000**		**6.762.700**		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	***269.287.000***		***73,31%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Unit	8.500.000	45 Unit	5.100.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***45 Unit***	***5.100.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	144.000.000	2000 Kotak	110.184.000	0 Kotak	-	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- ***Kotak***	-	***0,00%***	***0,00%***	***2.000 Kotak***	***110.184.000***	***80,00%***	***76,52%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	68.950.000	48 Bulan	54.330.000	12 Bulan	1.129.200	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- ***Bulan***	-	***0,00%***	***0,00%***	***48 Bulan***	***54.330.000***	***80,00%***	***78,80%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	67.870.000	48 Bulan	51.973.000	12 Bulan	5.633.500	0 Bulan	-	1 Bulan	327.400	1 Bulan	187.800	10 Bulan	428.400	***12 Bulan***	***943.600***	***100,00%***	***16,75%***	***60 Bulan***	***52.916.600***	***100,00%***	***77,97%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	78.000.000	80 Kali	47.700.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***80 Kali***	***47.700.000***	***80,00%***	***61,15%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**332.500.000**		**199.500.000**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	***199.500.000***		***60,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	100 Unit	332.500.000	60 Unit	199.500.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***60 Unit***	***199.500.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**149.526.710**		**102.066.026**		**15.665.342**		-		**3.301.780**		**927.000**		**1.348.890**	-	*5.577.670*		*35,61%*	-	*107.643.696*		*71,99%*	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	49.526.710	48 Bulan	42.066.026	Bulan 12	15.665.342	Bulan 0	-	2 Bulan	3.301.780	1 Bulan	927.000	9 Bulan	1.348.890	*12 Bulan*	*5.577.670*	*100,00%*	*35,61%*	*60 Bulan*	*47.643.696*	*100,00%*	*96,20%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	150 Kali	100.000.000	90 Kali	60.000.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*90 Kali*	*60.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**416.705.000**		**331.174.200**		**55.306.000**		-		**13.272.600**		**7.402.200**		**14.181.600**	-	*34.856.400*		*63,02%*	-	*366.030.600*		*87,84%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlaha pemeliharaan rutin/berkala mobil jabata	60 Bulan	235.850.000	48 Bulan	210.736.200	Bulan 12	55.306.000	Bulan 0	-	3 Bulan	13.272.600	1 Bulan	7.402.200	8 Bulan	14.181.600	*12 Bulan*	*34.856.400*	*100,00%*	*63,02%*	*60 Bulan*	*245.592.600*	*100,00%*	*104,13%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasiona	60 Bulan	85.680.000	48 Bulan	67.788.000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*67.788.000*	*80,00%*	*79,12%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah dinas	5 Unit	87.750.000	3 Unit	52.650.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*52.650.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	7.425.000	0 %	-	%		%		%		%		%	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**3,74**	**20,41**	**10,28**	**24,42**	**14,02**	**22,67**	**32,71**	**23,68**	**60,75**	**91,18**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**ST**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**49.500.000**	**60,00 %**	**29.700.000**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*29.700.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**27.000.000**		**16.200.000**		-		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	-	*16.200.000*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	27.000.000	6 Kali	16.200.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*16.200.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**22.500.000**		**13.500.000**		-		-		-		-		-	-	-		*0,00%*	-	*13.500.000*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	22.500.000	30 Eksampler	13.500.000	%		%		%		%		%	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksampler*	*13.500.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**177.000.000**	**76,36 %**	**123.860.000**	% **100**	**30.465.000**	% **0,00**	-	% **81,82**	**20.711.250**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	*81,82 %*	*20.711.250*	*81,82%*	*67,98%*	*158,18 %*	*144.571.250*	*79,09%*	*81,68%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**177.000.000**		**123.860.000**		**30.465.000**		-		**20.711.250**		-		-	-	*20.711.250*		*67,98%*	-	*144.571.250*		*81,68%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	45 Kali	87.000.000	36 Kali	69.860.000	Kali 9	21.465.000	Kali 0	-	9 Kali	20.711.250	0 Kali	-	- Kali	-	*9 Kali*	*20.711.250*	*100,00%*	*96,49%*	*45 Kali*	*90.571.250*	*100,00%*	*104,10%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	10 Kali	90.000.000	6 Kali	54.000.000	Kali 2	9.000.000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*54.000.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	81,82	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	67,98							
										Predikat kinerja	SR	SR	T	SD	SR	SR	SR	SR	T	SD							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**135.000.000**	**80,00 %**	**105.750.000**	**% 100**	**36.000.000**	% 0,00	-	% 0,00 %	-	% 0,00 %	-	% 0,00 %	-	*- %*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*105.750.000*	*40,00%*	*78,33%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**135.000.000**		**105.750.000**		**36.000.000**		-		-		-		-	*- -*	*-*		*0,00%*	*-*	*105.750.000*		*78,33%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	135.000.000	48 Bulan	105.750.000	Bulan 12	36.000.000	Bulan 0	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	*- Bulan*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*105.750.000*	*80,00%*	*78,33%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**110.487.500**	**60,00 %**	**66.292.500**	**% 100**	**4.690.000**	% 0,00	-	0,00 %	-	% 0,00 %	-	% 0,00 %	-	*- %*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*66.292.500*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**110.487.500**		**66.292.500**		**4.690.000**		-		-		-		-	*- -*	*-*		*0,00%*	*-*	*66.292.500*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	92.862.500	3 Kali	55.717.500	Kali 1	4.690.000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*55.717.500*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	17.625.000	3 Kali	10.575.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*10.575.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**74.325.000**	**60,00 %**	**44.595.000**	**%**	-	%	-	%	-	%	-	%	-	*- %*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*44.595.000*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**74.325.000**		**44.595.000**		-		-		-		-		-	*-*	*-*		*0,00%*	*-*	*44.595.000*		*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	20 Kali	31.125.000	12 Kali	18.675.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*12 Kali*	*18.675.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	43.200.000	6 Kali	25.920.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*6 Kali*	*25.920.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
49			**KECAMATAN AIR NANINGAN**			-		-																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9.740.228.140**	**77,33 %**	**8.849.881.303**	**100 %**	**1.484.948.763**	**0,19 %**	**305.453.680**	**1,71 %**	**445.077.504**	**16,64 %**	**343.963.001**	**3,47 %**	**237.133.952**	***22,01 %***	***1.331.628.137***	***22,01%***	***89,68%***	***99,34 %***	***10.181.509.440***	***49,67%***	***104,53%***	KEC. AIR NANINGAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**173.477.500**		**126.286.500**		**5.085.800**		**-**		**2.182.000**		**1.200.000**		**-**	***-***	***3.382.000***		***66,50%***	***-***	***129.668.500***		***74,75%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Eksemplar Dokumen	96.977.500	80 Eksemplar Dokumen	72.586.500	20 Eksemplar Dokumen	1.500.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***80 Eksemplar Dokumen***	***72.586.500***	***80,00%***	***74,85%***	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Eksemplar Dokumen	14.250.000	80 Eksemplar Dokumen	12.000.000	20 Eksemplar Dokumen	1.560.900	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	1.500.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokumen***	***1.500.000***	***100,00%***	***96,10%***	***100 Eksemplar Dokumen***	***13.500.000***	***100,00%***	***94,74%***	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	14.250.000	60 Eksemplar Dokumen	8.550.000	20 Eksemplar Dokumen	660.900	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	7 Eksemplar Dokumen	600.000	13 Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokumen***	***600.000***	***100,00%***	***90,79%***	***80 Eksemplar Dokumen***	***9.150.000***	***80,00%***	***64,21%***	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	14.250.000	80 Eksemplar Dokumen	11.400.000	20 Eksemplar Dokumen	682.000	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	682.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokumen***	***682.000***	***100,00%***	***100,00%***	***100 Eksemplar Dokumen***	***12.082.000***	***100,00%***	***84,79%***	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	12.000.000	60 Eksemplar Dokumen	7.200.000	20 Eksemplar Dokumen	682.000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	17 Eksemplar Dokumen	600.000	3 Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokumen***	***600.000***	***100,00%***	***87,98%***	***80 Eksemplar Dokumen***	***7.800.000***	***80,00%***	***65,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Eksemplar Dokumen	6.750.000	60 Eksemplar Dokumen	4.050.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***60 Eksemplar Dokumen***	***4.050.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	15.000.000	80 Eksemplar Dokumen	10.500.000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***80 Eksemplar Dokumen***	***10.500.000***	***80,00%***	***70,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8.334.052.740**		**7.797.131.133**		**1.383.584.663**		**305.453.680**		**438.895.504**		**327.126.001**		**228.631.752**	***-***	***1.300.106.937***		***93,97%***	***-***	***9.097.238.070***		***109,16%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	7.319.002.740	60 Orang	6.839.951.133	15 Orang	1.172.404.663	4 Orang	268.403.680	3 Orang	389.495.504	4 Orang	290.076.001	4 Orang	203.931.752	***15 Orang***	***1.151.906.937***	***100,00%***	***98,25%***	***75 Orang***	***7.991.858.070***	***100,00%***	***109,19%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	704.250.000	60 Orang	711.150.000	15 Orang	148.200.000	4 Orang	37.050.000	3 Orang	49.400.000	4 Orang	37.050.000	4 Orang	24.700.000	***15 Orang***	***148.200.000***	***100,00%***	***100,00%***	***75 Orang***	***859.350.000***	***100,00%***	***122,02%***	KEC. AIR NANINGAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	310.800.000	23 Orang	246.030.000	6 Orang	62.980.000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	***- Orang***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***23 Orang***	***246.030.000***	***76,67%***	***79,16%***	KEC. AIR NANINGAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**		**50.000.000**		**35.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	***-***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***-***	***35.000.000***		***70,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	125 Stel	50.000.000	100 Stel	35.000.000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		***- Stel***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***100 Stel***	***35.000.000***	***80,00%***	***70,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**396.067.900**		**296.277.470**		**22.208.300**		**-**		**981.000**		**1.083.000**		**457.800**	***-***	***2.521.800***		***11,36%***	***-***	***298.799.270***		***75,44%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	197.030.900	24 Unit	155.608.040	Unit 0	-	Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***24 Unit***	***155.608.040***	***80,00%***	***78,98%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	54.000.000	2160 Kotak	32.400.000	Kotak 0	-	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		***- Kotak***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***2.160 Kotak***	***32.400.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16295 Eksampler	28.547.000	13136 Eksampler	21.687.700	Eksampler 3259	2.621.400	Eksampler 0	-	- Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	***- Eksampler***	***-***	***0,00%***	***0,00%***	***13.136 Eksampler***	***21.687.700***	***80,61%***	***75,97%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200 %	16.800.000	100 %	16.800.000	% 100	16.800.000	% 0	-	- %	-	50,00 %	8.400.000	50,00 %	-	***100 %***	***8.400.000***	***100,00%***	***50,00%***	***200 %***	***25.200.000***	***100,00%***	***150,00%***	KEC. AIR NANINGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	3515 Buah	65.907.500	2912 Buah	49.512.230	703 Buah	2.786.900	0 Buah	-	22 Buah	981.000	616 Buah	1.083.000	65 Buah	457.800	***703 Buah***	***2.521.800***	***100,00%***	***90,49%***	***3.615 Buah***	***52.034.030***	***102,84%***	***78,95%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	33.782.500	60 Kali	20.269.500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***60 Kali***	***20.269.500***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**270.000.000**		**162.000.000**		-	-	-	-	-	-	-			-	-	***0,00%***	***0,00%***	-	***162.000.000***		***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Unit	270.000.000	3 Unit	162.000.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Unit***	***162.000.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**227.136.000**		**188.726.600**		**26.200.000**		-		**14.050.000**		**4.050.000**		**8.100.000**	-	***26.200.000***		***100,00%***	-	***214.926.600***		***94,62%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153.000.000	48 Bulan	139.245.000	Bulan 12	16.200.000	Bulan 0	-	3 Bulan	4.050.000	3 Bulan	4.050.000	6 Bulan	8.100.000	***12 Bulan***	***16.200.000***	***100,00%***	***100,00%***	***60 Bulan***	***155.445.000***	***100,00%***	***101,60%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan	5 Kali	74.136.000	4 Kali	49.481.600	Kali 1	10.000.000	Kali 0	-	1 Kali	10.000.000	0 Kali	-	- Kali	-	***1 Kali***	***10.000.000***	***100,00%***	***100,00%***	***5 Kali***	***59.481.600***	***100,00%***	***80,23%***	KEC. AIR NANINGAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**289.494.000**		**244.459.600**		**47.870.000**		-		**4.000.000**		**15.637.000**		**8.502.200**	-	***28.139.200***		***58,78%***	-	***272.598.800***		***94,16%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	175.544.000	4 Unit	171.089.600	Unit 1	47.870.000	Unit 0	-	- Unit	4.000.000	0 Unit	15.637.000	1 Unit	8.502.200	***1 Unit***	***28.139.200***	***100,00%***	***58,78%***	***5 Unit***	***199.228.800***	***100,00%***	***113,49%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	39.500.000	12 Unit	28.700.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***12 Unit***	***28.700.000***	***80,00%***	***72,66%***	KEC. AIR NANINGAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	74.450.000	3 Unit	44.670.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***3 Unit***	***44.670.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,19**	**20,57**	**1,71**	**29,97**	**16,64**	**23,16**	**3,47**	**15,97**	**22,01**	**89,68**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**174.977.400**	**15,56 %**	**92.521.800**	**% 100**	**4.500.000**	**% 0,00**	-	**50,00 %**	**4.500.000**	**0,00 %**	-	**50,00 %**	-	***100 %***	***4.500.000***	***100,00%***	***100,00%***	***115,56 %***	***97.021.800***	***57,78%***	***55,45%***	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**69.700.000**		**41.820.000**		-		-		-		-		-	- -	-		**0,00%**	-	***41.820.000***		***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	69.700.000	12 Kali	41.820.000	Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***0,00%***	***0,00%***	***12 Kali***	***41.820.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**105.277.400**		**50.701.800**		**4.500.000**		-		**4.500.000**		-		-	-	***4.500.000***		***100,00%***	-	***55.201.800***		***52,43%***	KEC. AIR NANINGAN
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	84.503.000	30 Eksampler	50.701.800	Eksampler 0	-	Eksampler		Eksampler	-	Eksampler		***- Eksampler***	-	***0,00%***	***0,00%***	***30 Eksampler***	***50.701.800***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. AIR NANINGAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	11.774.400	0 %	-	%		%		%		%		%		***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	***- %***	-	***0,00%***	***0,00%***	KEC. AIR NANINGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	16
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaaan Pelayananan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	9.000.000	%		% 100	4.500.000	% 0	-	50 %	4.500.000	0 %	-	50 %	-	*100 %*	*4.500.000*	*100,00%*	*100,00%*	*100 %*	*4.500.000*	*100,00%*	*50,00%*	KEC. AIR NANINGAN
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	*100,00*	*100,00*					
											Predikat kinerja	SR	SR	SR	ST	SR	SR	SR	SR	ST	ST					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**189.500.000**	**68,00 %**	**150.612.000**	**% 100**	**17.367.390**	**% 0,00**	-	**100,00 %**	**17.367.000**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	*100 %*	*17.367.000*	*100,00%*	*100,00%*	*168,00 %*	*167.979.000*	*84,00%*	*88,64%*	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**189.500.000**		**150.612.000**		**17.367.390**		-		**17.367.000**		-		-	- -	*17.367.000*		*100,00%*	-	*167.979.000*		*88,64%*	KEC. AIR NANINGAN
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	115.075.000	8 Kali	105.957.000	Kali 2	17.367.390	Kali 0	-	2 Kali	17.367.000	0 Kali	-	- Kali	-	*2 Kali*	*17.367.000*	*100,00%*	*100,00%*	*10 Kali*	*123.324.000*	*100,00%*	*107,17%*	KEC. AIR NANINGAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	74.425.000	9 Kali	44.655.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*9 Kali*	*44.655.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. AIR NANINGAN
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
											Predikat kinerja	SR	SR	ST	ST	SR	SR	SR	SR	ST	ST					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**102.925.000**	**80,00 %**	**132.105.000**	**% 100**	**48.000.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*132.105.000*	*40,00%*	*128,35%*	KEC. AIR NANINGAN
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**102.925.000**		**132.105.000**		**48.000.000**		-	**0**	-		-		-	- -	-	*0,00%*		*132.105.000*		*128,35%*	KEC. AIR NANINGAN
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	102.925.000	48 Bulan	132.105.000	Bulan 12	48.000.000	Bulan 0	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*132.105.000*	*80,00%*	*128,35%*	KEC. AIR NANINGAN
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
											Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**96.235.250**	**60,00 %**	**57.741.150**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*57.741.150*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. AIR NANINGAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**96.235.250**		**57.741.150**		-		-		-		-		- -	-		*0,00%*	-	*57.741.150*		*60,00%*	KEC. AIR NANINGAN
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	56.588.750	3 Kali	33.953.250	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*33.953.250*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. AIR NANINGAN
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	39.646.500	3 Kali	23.787.900	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*23.787.900*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. AIR NANINGAN
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
											Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**92.450.000**	**92,90 %**	**63.206.000**	**% 100**	**2.700.000**	**% 0,00**	-	**% 100,00**	**2.700.000**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	*100 %*	*2.700.000*	*100,00%*	*100,00%*	*192,90 %*	*65.906.000*	*96,45%*	*71,29%*	KEC. AIR NANINGAN
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**92.450.000**		**63.206.000**		**2.700.000**		-		**2.700.000**		-		-	-	*2.700.000*		*100,00%*	-	*65.906.000*		*71,29%*	KEC. AIR NANINGAN
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	55 Kali	83.750.000	44 Kali	54.506.000	Kali 11	2.700.000	Kali 0	-	11 Kali	2.700.000	0 Kali	-	- Kali	-	*11 Kali*	*2.700.000*	*100,00%*	*100,00%*	*55 Kali*	*57.206.000*	*100,00%*	*68,31%*	KEC. AIR NANINGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	8.700.000	100 %	8.700.000	% 0	-	%		%		%		%		- %	-	0,00%	0,00%	100 %	8.700.000	100,00%	100,00%	KEC. AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00		0,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00						
									Predikat kinerja		SR		SR		ST		ST		SR		SR		SR		ST						
50			**KECAMATAN BULOK**																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**10.211.130.285**	**64,80 %**	**9.343.191.105**	**% 100**	**1.597.283.765**	**% 18,13**	**344.219.830**	**% 10,46**	**406.179.451**	**% 33,62**	**358.551.140**	**% 94,04**	**353.452.912**	***156,25 %***	***1.462.403.333***	***156,25%***	***91,56%***	***221,05 %***	***10.805.594.438***	***110,53%***	***105,82%***	KEC. BULOK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**112.500.000**		**92.779.600**		**18.672.400**		**217.800**		**195.000**		**342.000**		**182.800**	-	***937.600***		***5,02%***	-	***93.717.200***		***83,30%***	KEC. BULOK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	25 Buku	83.250.000	20 Buku	69.150.000	Buku 5	15.600.000	Buku 0	217.800	0 Buku	195.000	0 Buku	-	5 Buku	-	***5 Buku***	***412.800***	***100,00%***	***2,65%***	***25 Buku***	***69.562.800***	***100,00%***	***83,56%***	KEC. BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	25 Eksemplar Dokumen	15.750.000	20 Eksemplar Dokumen	11.325.300	Eksemplar Dokumen 5	1.395.000	Eksemplar Dokumen 0	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	217.800	4 Eksemplar Dokumen	182.800	***5 Eksemplar Dokumen***	***400.600***	***100,00%***	***28,72%***	***25 Eksemplar Dokumen***	***11.725.900***	***100,00%***	***74,45%***	KEC. BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	1.875.000	20 Eksemplar Dokumen	1.849.300	Eksemplar Dokumen 5	375.000	Eksemplar Dokumen 0	-	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	124.200	3 Eksemplar Dokumen	-	***5 Eksemplar Dokumen***	***124.200***	***100,00%***	***33,12%***	***25 Eksemplar Dokumen***	***1.973.500***	***100,00%***	***105,25%***	KEC. BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2.625.000	20 Eksemplar Dokumen	2.550.000	Eksemplar Dokumen 5	302.400	Eksemplar Dokumen 0	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20 Eksemplar Dokumen***	***2.550.000***	***80,00%***	***97,14%***	KEC. BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2.625.000	20 Eksemplar Dokumen	2.640.000	Eksemplar Dokumen 5	300.000	Eksemplar Dokumen 0	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20 Eksemplar Dokumen***	***2.640.000***	***80,00%***	***100,57%***	KEC. BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	25 Eksemplar Dokumen	3.000.000	15 Eksemplar Dokumen	2.190.000	Eksemplar Dokumen 5	325.000	Eksemplar Dokumen 0	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***15 Eksemplar Dokumen***	***2.190.000***	***60,00%***	***73,00%***	KEC. BULOK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	25 Eksemplar Dokumen	3.375.000	20 Eksemplar Dokumen	3.075.000	Eksemplar Dokumen 5	375.000	Eksemplar Dokumen 0	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***20 Eksemplar Dokumen***	***3.075.000***	***80,00%***	***91,11%***	KEC. BULOK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8.514.411.425**		**8.056.346.255**		**1.473.937.465**		**336.599.830**		**377.909.451**		**344.861.140**		**335.537.912**	-	***1.394.908.333***		***94,64%***	-	***9.451.254.588***		***111,00%***	KEC. BULOK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7.654.311.425	54 Bulan	7.140.872.255	Bulan 12	1.291.752.465	Bulan 3	304.734.830	3 Bulan	343.444.451	3 Bulan	309.686.140	3 Bulan	305.012.912	***12 Bulan***	***1.262.878.333***	***100,00%***	***97,76%***	***66 Bulan***	***8.403.750.588***	***94,29%***	***109,79%***	KEC. BULOK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	520.500.000	28 Orang	538.500.000	Orang 7	146.100.000	Orang 2	30.525.000	1 Orang	30.525.000	2 Orang	30.525.000	2 Orang	30.525.000	***7 Orang***	***122.100.000***	***100,00%***	***83,57%***	***35 Orang***	***660.600.000***	***100,00%***	***126,92%***	KEC. BULOK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	335.850.000	28 Orang	374.580.000	Orang 7	35.760.000	Orang 0	1.340.000	0 Orang	3.940.000	1 Orang	4.650.000	6 Orang	-	***7 Orang***	***9.930.000***	***100,00%***	***27,77%***	***35 Orang***	***384.510.000***	***100,00%***	***114,49%***	KEC. BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Eksampler	3.750.000	40 Eksampler	2.394.000	Eksampler 10	325.000	Eksampler 0	-	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- ***Eksampler***	-	***0,00%***	***0,00%***	***40 Eksampler***	***2.394.000***	***80,00%***	***63,84%***	KEC. BULOK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**207.300.000**		**135.796.300**		**10.602.900**		-		**460.000**		**41.000**		-	-	***501.000***		***4,73%***	-	***136.297.300***		***65,75%***	KEC. BULOK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65 Unit	25.215.000	52 Unit	15.695.400	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0,00%***	***0,00%***	***52 Unit***	***15.695.400***	***80,00%***	***62,25%***	KEC. BULOK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2000 Kotak	90.000.000	1200 Kotak	54.000.000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- ***Kotak***	-	***0,00%***	***0,00%***	***1.200 Kotak***	***54.000.000***	***60,00%***	***60,00%***	KEC. BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	225 Eksampler	33.155.500	180 Eksampler	22.546.700	45 Eksampler	5.872.400	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- *Eksampler*	-	*0,00%*	*0,00%*	*180 Eksampler*	*22.546.700*	*80,00%*	*68,00%*	KEC. BULOK
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	105 Unit	47.679.500	84 Unit	36.804.200	21 Unit	4.730.500	0 Unit	-	2 Unit	460.000	1 Unit	41.000	18 Unit	-	*21 Unit*	*501.000*	*100,00%*	*10,59%*	*105 Unit*	*37.305.200*	*100,00%*	*78,24%*	KEC. BULOK
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	75 Kali	11.250.000	45 Kali	6.750.000	Kali 0	-	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*45 Kali*	*6.750.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BULOK
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**		**376.457.860**		**294.216.300**		-		-		-		-		-	-	-		**0,00%**	-	*294.216.300*		*78,15%*	KEC. BULOK
			Pengadaan Mebel	Persentase Jumlah Pengadaan Mebel	100 %	8.247.360	0 %	-	%		%		%		%		%		- %	-	*0,00%*	*0,00%*	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	KEC. BULOK
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	55 Unit	109.750.000	44 Unit	92.850.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*44 Unit*	*92.850.000*	*80,00%*	*84,60%*	KEC. BULOK
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15 Unit	258.460.500	12 Unit	201.366.300	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Unit*	*201.366.300*	*80,00%*	*77,91%*	KEC. BULOK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**239.400.000**		**227.210.650**		**45.721.000**		-		**26.790.000**		**420.000**		**8.955.000**	-	*36.165.000*		*79,10%*	-	*263.375.650*		*110,01%*	KEC. BULOK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	149.400.000	48 Bulan	138.430.650	Bulan 12	8.625.000	Bulan 0	-	4 Bulan	3.250.000	1 Bulan	420.000	7 Bulan	4.955.000	*12 Bulan*	*8.625.000*	*100,00%*	*100,00%*	*60 Bulan*	*147.055.650*	*100,00%*	*98,43%*	KEC. BULOK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	90.000.000	4 Kali	88.780.000	Kali 1	37.096.000	Kali 0	-	0 Kali	23.540.000	0 Kali	-	1 Kali	4.000.000	*1 Kali*	*27.540.000*	*100,00%*	*74,24%*	*5 Kali*	*116.320.000*	*100,00%*	*129,24%*	KEC. BULOK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**761.061.000**		**536.842.000**		**48.350.000**		**7.402.200**		**825.000**		**12.887.000**		**8.777.200**	-	*29.891.400*		*61,82%*	-	*566.733.400*		*74,47%*	KEC. BULOK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	56.106.000	100 %	43.020.000	% 100	48.350.000	% 15,31	7.402.200	1,71 %	825.000	26,65 %	12.887.000	56,33 %	8.777.200	*100 %*	*29.891.400*	*100,00%*	*61,82%*	*200 %*	*72.911.400*	*200,00%*	*129,95%*	KEC. BULOK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	440.980.000	4 Unit	305.062.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*305.062.000*	*80,00%*	*69,18%*	KEC. BULOK
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20 Unit Mobil dan Motor	151.875.000	12 Unit Mobil dan Motor	91.125.000	Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor	- *Unit Mobil dan Motor*	-	*0,00%*	*0,00%*	*12 Unit Mobil dan Motor*	*91.125.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BULOK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	56.050.000	4 Unit	64.005.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*4 Unit*	*64.005.000*	*80,00%*	*114,19%*	KEC. BULOK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	56.050.000	3 Unit	33.630.000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Unit*	*33.630.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BULOK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,18**	**21,55**	**0,10**	**25,43**	**0,34**	**22,45**	**0,94**	**22,13**	**1,56**	**91,56**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**177.541.200**	**70,00 %**	**106.974.720**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*70,00 %*	*106.974.720*	*35,00%*	*60,25%*	KEC. BULOK
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**91.143.700**		**54.686.220**		-		-		-		-		-	- -	-		*0,00%*	-	*54.686.220*		*60,00%*	KEC. BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Eksampler	91.143.700	30 Eksampler	54.686.220	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		- *Eksampler*	-	*0,00%*	*0,00%*	*30 Eksampler*	*54.686.220*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BULOK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**86.397.500**		**52.288.500**		-		-		-		-		-	-		*0,00%*	-	*52.288.500*		*60,52%*	KEC. BULOK
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	86.397.500	40 Eksampler	52.288.500	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		- *Eksampler*	-	*0,00%*	*0,00%*	*40 Eksampler*	*52.288.500*	*80,00%*	*60,52%*	KEC. BULOK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**301.168.000**	**72,94 %**	**220.842.600**	**% 100**	**23.795.000**	**% 100,00**	**12.251.250**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	*100 %*	*12.251.250*	*100,00%*	*51,49%*	*172,94 %*	*233.093.850*	*86,47%*	*77,40%*	KEC. BULOK
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**301.168.000**		**220.842.600**		**23.795.000**		**12.251.250**		-		-		-	- -	*12.251.250*		*51,49%*	-	*233.093.850*		*77,40%*	KEC. BULOK
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	55 Kali	143.848.000	44 Kali	126.450.600	Kali 11	23.795.000	Kali 11	12.251.250	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*11 Kali*	*12.251.250*	*100,00%*	*51,49%*	*55 Kali*	*138.701.850*	*100,00%*	*96,42%*	KEC. BULOK
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Kali	157.320.000	18 Kali	94.392.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*18 Kali*	*94.392.000*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BULOK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**100,00**	**51,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**51,49**						
									Predikat kinerja		**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**R**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**141.250.500**	**80,00 %**	**134.250.300**	**% 100**	**63.450.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	% **0,00**	-	% **0,00**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*80,00 %*	*134.250.300*	*40,00%*	*95,04%*	KEC. BULOK
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**%**	**141.250.500**		**134.250.300**		**63.450.000**		-		-		-		-	- -	-	*0,00%*	- -	*134.250.300*		*95,04%*	KEC. BULOK
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141.250.500	48 Bulan	134.250.300	Bulan 12	63.450.000	Bulan 0	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*48 Bulan*	*134.250.300*	*80,00%*	*95,04%*	KEC. BULOK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**125.944.450**	**60,00 %**	**75.566.670**	**% 100**	**8.450.000**	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	**% 0,00**	-	- %	-	*0,00%*	*0,00%*	*60,00 %*	*75.566.670*	*30,00%*	*60,00%*	KEC. BULOK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**125.944.450**		**75.566.670**		**8.450.000**		-		-		-		-	- -	-	*0,00%*	-	*75.566.670*		*60,00%*	KEC. BULOK
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	91.319.450	3 Kali	54.791.670	Kali 1	8.450.000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0,00%*	*0,00%*	*3 Kali*	*54.791.670*	*60,00%*	*60,00%*	KEC. BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	34.625.000	3 Kali	20.775.000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	3 Kali	20.775.000	60,00%	60,00%	KEC. BULOK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**385.660.000**	**63,81 %**	**231.700.800**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	0,00%	0,00%	63,81 %	231.700.800	31,90%	60,08%	KEC. BULOK
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**385.660.000**		**231.700.800**		-		-		-		-		- -	-		0,00%	-	231.700.800		60,08%	KEC. BULOK
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	20 Kali	157.271.500	12 Kali	94.362.900	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	12 Kali	94.362.900	60,00%	60,00%	KEC. BULOK
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	150 Buku	131.764.500	90 Buku	79.058.700	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- Buku	-	0,00%	0,00%	90 Buku	79.058.700	60,00%	60,00%	KEC. BULOK
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan dan Pembentukan Desa Wisata & UMKM	40 Kali	96.624.000	32 Kali	58.279.200	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0,00%	0,00%	32 Kali	58.279.200	80,00%	60,32%	KEC. BULOK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			-		-																		
51			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			-		-																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**21.936.990.465**	**60,08 %**	**19.029.671.344**	% **100**	**2.679.221.985**	% **2,36**	**464.635.674**	% **3,33**	**558.993.892**	% **8,32**	**750.646.681**	% **6,80**	**534.589.339**	*20,80 %*	*2.308.865.586*	*20,80%*	*86,18%*	*80,88 %*	*21.338.536.930*	*40,44%*	*97,27%*	BADAN KESBANGPOL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**246.258.500**		**222.176.100**		**36.375.800**		**5.647.800**		**3.759.900**		**13.009.500**		**4.498.200**	-	*26.915.400*		*73,99%*	-	*249.091.500*		*101,15%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra,Renja dan Perubahannya	250 Buku	199.407.000	195 Buku	179.321.700	Dokumen 6	30.055.800	Dokumen 1	5.647.800	2 Dokumen	3.759.900	0 Dokumen	9.000.000	2 Dokumen	4.498.200	*5 Dokumen*	*22.905.900*	*83,33%*	*76,21%*	*200 Buku*	*202.227.600*	*80,00%*	*101,41%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	75 Eksemplar Dokumen	4.500.000	60 Eksemplar Dokumen	4.270.000	12 Eksemplar Dokumen	900.000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	900.000	- Eksemplar Dokumen	-	*12 Eksemplar Dokumen*	*900.000*	*100,00%*	*100,00%*	*72 Eksemplar Dokumen*	*5.170.000*	*96,00%*	*114,89%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dukumen Perubahan RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	10.200.000	200 Eksemplar Dokumen	10.200.000	12 Eksemplar Dokumen	2.040.000	0 Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	1.341.900	- Eksemplar Dokumen	-	*12 Eksemplar Dokumen*	*1.341.900*	*100,00%*	*65,78%*	*212 Eksemplar Dokumen*	*11.541.900*	*84,80%*	*113,16%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dukumen DPA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	3.660.000	120 Eksemplar Dokumen	3.648.000	12 Eksemplar Dokumen	720.000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	612.000	8 Eksemplar Dokumen	-	*8 Eksemplar Dokumen*	*612.000*	*66,67%*	*85,00%*	*128 Eksemplar Dokumen*	*4.260.000*	*85,33%*	*116,39%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dukumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	3.000.000	60 Eksemplar Dokumen	2.443.200	12 Eksemplar Dokumen	600.000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	600.000	- Eksemplar Dokumen	-	*12 Eksemplar Dokumen*	*600.000*	*100,00%*	*100,00%*	*72 Eksemplar Dokumen*	*3.043.200*	*96,00%*	*101,44%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Rensrta,Renja,Perubahan Renja dan Laporan Triwulan	75 Eksemplar Dokumen	17.916.500	59 Eksemplar Dokumen	15.203.200	Laporan 4	1.030.000	Laporan 0	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	*- Laporan*	-	*0,00%*	*0,00%*	*59 Eksemplar Dokumen*	*15.203.200*	*78,67%*	*84,86%*	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dukumen LPPD,LAKIP,LKPJ Perangkat Daerah	75 Eksemplar Dokumen	7.575.000	60 Eksemplar Dokumen	7.090.000	4 Laporan	1.030.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	555.600	2 Laporan	-	*4 Laporan*	*555.600*	*100,00%*	*53,94%*	*64 Eksemplar Dokumen*	*7.645.600*	*85,33%*	*100,93%*	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**		**19.949.167.035**		**17.158.088.050**		**2.212.151.285**		**429.150.274**		**523.246.092**		**552.426.581**		**454.805.439**	-	*1.959.628.386*		*88,58%*	-	*19.117.716.436*		*95,83%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	18.252.667.035	55 Bulan	15.564.188.050	14 Bulan	1.820.651.285	3 Bulan	363.300.274	3 Bulan	457.396.092	5 Bulan	482.076.581	3 Bulan	388.955.439	*14 Bulan*	*1.691.728.386*	*100,00%*	*92,92%*	*69 Bulan*	*17.255.916.436*	*98,57%*	*94,54%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	1.696.500.000	48 Bulan	1.593.900.000	12 Bulan	391.500.000	3 Bulan	65.850.000	3 Bulan	65.850.000	3 Bulan	70.350.000	3 Bulan	65.850.000	*12 Bulan*	*267.900.000*	*100,00%*	*68,43%*	*60 Bulan*	*1.861.800.000*	*100,00%*	*109,74%*	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya administrasi kegpegawaian yang baik**		**307.003.500**		**271.477.400**		**68.640.000**		**1.720.000**		**10.160.000**		**19.550.000**		**5.080.000**	- -	*36.510.000*		*53,19%*	-	*307.987.400*		*100,32%*	BADAN KESBANGPOL
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	60 Bulan	307.003.500	39 Bulan	271.477.400	12 Bulan	68.640.000	2 Bulan	1.720.000	- Bulan	10.160.000	0 Bulan	19.550.000	10 Bulan	5.080.000	*12 Bulan*	*36.510.000*	*100,00%*	*53,19%*	*51 Bulan*	*307.987.400*	*85,00%*	*100,32%*	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**680.498.430**		**587.435.794**		**149.142.500**		-		**7.239.900**		**74.460.000**		**7.773.800**	-	*89.473.700*		*59,99%*	-	*676.909.494*		*99,47%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Unit	92.011.180	18 Unit	130.053.544	6 Unit	111.149.000	0 Unit	-	- Unit	7.239.900	4 Unit	62.910.000	1 Unit	7.773.800	*5 Unit*	*77.923.700*	*83,33%*	*70,11%*	*23 Unit*	*207.977.244*	*54,76%*	*226,03%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	##### Buah/Kotak	115.727.000	#### Buah/Kotak	83.577.600	Buah/Kotak		Buah/Kotak		Buah/Kotak		Buah/Kotak		Buah/Kotak	- *Buah/Kotak*	-	*0,00%*	*0,00%*	###### *Buah/Kotak*	*83.577.600*	*60,04%*	*72,22%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan	706 Eksemplar	18.405.250	676 Eksemplar	30.882.350	556 Eksemplar	11.658.500	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	*0,00%*	*0,00%*	*676 Eksemplar*	*30.882.350*	*95,75%*	*167,79%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	900 Kali	454.355.000	677 Kali	342.922.300	30 Laporan	26.335.000	0 Laporan	-	- Laporan	-	13 Laporan	11.550.000	17 Laporan	-	*30 Laporan*	*11.550.000*	*100,00%*	*43,86%*	*707 Kali*	*354.472.300*	*78,56%*	*78,02%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**225.081.000**		**202.501.750**		**108.146.000**		**22.485.600**		**7.348.100**		**16.740.600**		**54.658.100**	-	*101.232.400*		*93,61%*	-	*303.734.150*		*134,94%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunkikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	219.081.000	46 Bulan	196.651.750	12 Bulan	86.946.000	3 Bulan	7.485.600	- Bulan	7.348.100	6 Bulan	16.215.600	2 Bulan	54.658.100	*11 Bulan*	*85.707.400*	*91,67%*	*98,58%*	*57 Bulan*	*282.359.150*	*95,00%*	*128,88%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	6.000.000	50 Bulan	5.850.000	12 Bulan	21.200.000	3 Bulan	15.000.000	3 Bulan	-	3 Bulan	525.000	- Bulan	-	*9 Bulan*	*15.525.000*	*75,00%*	*73,23%*	*59 Bulan*	*21.375.000*	*98,33%*	*356,25%*	BADAN KESBANGPOL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**528.982.000**		**587.992.250**		**104.766.400**		**5.632.000**		**14.080.000**		**28.366.400**		**10.648.000**	-	*58.726.400*		*56,05%*	-	*646.718.650*		*122,26%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	20 Unit	474.982.000	16 Unit	534.057.250	4 Unit	93.966.400	2 Unit	5.632.000	- Unit	14.080.000	0 Unit	28.366.400	1 Unit	10.648.000	*3 Unit*	*58.726.400*	*75,00%*	*62,50%*	*19 Unit*	*592.783.650*	*95,00%*	*124,80%*	BADAN KESBANGPOL
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantof	5 Unit	54.000.000	4 Unit	53.935.000	1 Unit	10.800.000	0 Unit	-	1 Unit	10.800.000	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*10.800.000*	*100,00%*	*100,00%*	*5 Unit*	*64.735.000*	*100,00%*	*119,88%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2,36**	**17,34**	**3,33**	**20,86**	**8,32**	**28,02**	**6,80**	**19,95**	**20,80**	**86,18**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**200 %**	**191.273.000**	**61,36 %**	**117.254.800**	**100 %**	**47.708.100**	**0,00 %**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**45.688.100**	- %	*45.688.100*	*0,00%*	*95,77%*	*61,36 %*	*162.942.900*	*30,68%*	*85,19%*	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			**191.273.000**		**117.254.800**		**47.708.100**		-		-		-		**45.688.100**	- -	*45.688.100*		*95,77%*	-	*162.942.900*		*85,19%*	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tanggamus	20 Rapat	59.350.000	15 Rapat	38.101.000	Rapat 5	47.708.100	Rapat 0	-	- Rapat	-	0 Rapat	-	4 Rapat	45.688.100	*4 Rapat*	*45.688.100*	*80,00%*	*95,77%*	*19 Rapat*	*83.789.100*	*95,00%*	*141,18%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	JUmlah Pelaksanaan Monitoring Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tanggamus	200 Orang	131.923.000	120 Orang	79.153.800	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*120 Orang*	*79.153.800*	*60,00%*	*60,00%*	BADAN KESBANGPOL
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		**200 %**	**341.874.400**	**56,86 %**	**117.315.200**	**% 100**	**22.225.254.000**	**% 0,00**	**-**	**0,00 %**	**-**	**26,92 %**	**77.837.900**	**65,38 %**	**############**	*92 %*	*22.199.007.250*	*92,31%*	*99,88%*	*149,17 %*	*22.316.322.450*	*74,59%*	*6527,64%*	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			**341.874.400**		**117.315.200**		**22.225.254.000**		**-**		**-**		**77.837.900**		**############**	*- -*	*22.199.007.250*		*99,88%*	*-*	*22.316.322.450*		*6527,64%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Partai	102.002.900	Partai		Partai 8	102.002.900	Parta i 0	-	- Parta i	-	0 Partai	-	7 Partai	82.942.250	*7 Partai*	*82.942.250*	*87,50%*	*81,31%*	*7 Partai*	*82.942.250*	*87,50%*	*81,31%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	TIM Administrasi Verifikasi Bantuan Partai Politik Di Kabupaten Tanggamus	40 Partai	121.981.500	29 Partai	99.245.200	Partai 10	22.080.048.200	Parta i 0	-	- Parta i	-	7 Partai	77.837.900	3 Partai	22.000.109.300	*10 Partai*	*22.077.947.200*	*100,00%*	*99,99%*	*39 Partai*	*22.177.192.400*	*97,50%*	*18180,78%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kegiatan TIM Administrasi Verifikasi Bantuan Partai Politik Di Kabupaten Tanggamus	3 Kali	117.890.000	0 Kali	18.070.000	Lapor an 8	43.202.900	Lapo ran 0	-	- Lapo ran	-	0 Lapora n	-	7 Lapora n	38.117.800	*7 Lapora n*	*38.117.800*	*87,50%*	*88,23%*	*7 Kali*	*56.187.800*	*233,33%*	*47,66%*	BADAN KESBANGPOL
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,92**	**0,35**			26,92	0,35						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		**200 %**	**9.891.457.050**	**73,44 %**	**8.622.012.808**	**% 100**	**1.853.106.635**	**% 0,00**	-	**35,08 %**	**1.298.965.000**	**24,95 %**	**154.058.900**	**34,64 %**	**312.299.400**	***94,67 %***	***1.765.323.300***	***94,67%***	***95,26%***	***168,11 %***	***10.387.336.108***	***84,05%***	***105,01%***	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			**9.891.457.050**		**8.622.012.808**		**1.853.106.635**		-		**1.298.965.000**		**154.058.900**		**312.299.400**	-	***1.765.323.300***		***95,26%***	-	***10.387.336.108***		***105,01%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Tersalurkannya Hibah Keuangan	500 %	9.714.165.450	#### %	8.559.284.808	% 100	1.716.572.635	% 0,00	-	70,15 %	1.298.965.000	6,90 %	127.600.000	18,28 %	209.844.000	***95 %***	***1.636.409.000***	***95,33%***	***95,33%***	***528 %***	***10.195.693.808***	***105,56%***	***104,96%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	30.958.900	Orang		50 Orang	30.958.900	Orang 0	-	- Orang	-	43 Orang	26.458.900	2 Orang	-	***45 Orang***	***26.458.900***	***90,00%***	***85,46%***	***45 Orang***	***26.458.900***	***90,00%***	***85,46%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	59.952.700	Orang		50 Orang	105.575.100	Orang 0	-	- Orang	-	0 Orang	-	49 Orang	102.455.400	***49 Orang***	***102.455.400***	***98,00%***	***97,05%***	***49 Orang***	***102.455.400***	***98,00%***	***170,89%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas Di Kabupaten tanggamus	125 Orang	86.380.000	100 Orang	62.728.000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***100 Orang***	***62.728.000***	***80,00%***	***72,62%***	BADAN KESBANGPOL
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**35,08**	**70,10**	**24,95**	**8,31**	**34,64**	**16,85**	**94,67**	**95,26**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		**200 %**	**336.750.500**	**65,60 %**	**213.206.200**	**% 100**	**36.591.300**	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**96,67 %**	**35.581.300**	**0,00 %**	-	***97 %***	***35.581.300***	***0,00%***	***97,24%***	***162,27 %***	***248.787.500***	***81,13%***	***73,88%***	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			**336.750.500**		**213.206.200**		**36.591.300**		-		-		**35.581.300**		-	-	***35.581.300***		***97,24%***	-	***248.787.500***		***73,88%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Budaya,Penyalah Gunaan Narkotika dan FKUB di Kabupaten Tanggamus	250 Orang	134.034.500	150 Orang	80.420.700	Orang 60	36.591.300	Orang 0	-	- Orang	-	58 Orang	35.581.300	- Orang	-	***58 Orang***	***35.581.300***	***96,67%***	***97,24%***	***208 Orang***	***116.002.000***	***83,20%***	***86,55%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Etnis dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Dikabupaten Tanggamus	250 Orang	67.012.500	192 Orang	51.363.400	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***192 Orang***	***51.363.400***	***76,80%***	***76,65%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Jumlah Laporan Stabilitas Ekonomi Masyarakat	250 Orang	135.703.500	150 Orang	81.422.100	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***150 Orang***	***81.422.100***	***60,00%***	***60,00%***	BADAN KESBANGPOL
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,67**	**97,24**	**0,00**	**0,00**	**96,67**	**97,24**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		**200** **%**	**224.506.000**	**80,60 %**	**176.205.800**	**% 100**	**29.813.000**	**% 0,00**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	- %	-	***0,00%***	***0,00%***	***80,60 %***	***176.205.800***	***40,30%***	***78,49%***	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			**224.506.000**		**176.205.800**		**29.813.000**		-		-		-		-	- -	-		***0,00%***	- -	***176.205.800***		***78,49%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Untuk cegah Dini dan Deteksi Dini Terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM	250 Dokumen Orang	128.523.000	207 Orang	102.837.400	Dokumen 50	29.813.000	Dokumen 0	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0,00%***	***0,00%***	***207 Orang***	***102.837.400***	***82,80%***	***80,01%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	"Jumlah Dokumen Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah"	250 Orang	95.983.000	196 Orang	73.368.400	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0,00%***	***0,00%***	***196 Orang***	***73.368.400***	***78,40%***	***76,44%***	BADAN KESBANGPOL
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-						
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
									JUMLAH PAGU ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**1.863.837.676.981,00**								**JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**1.471.396.054.617,00**							
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**6,40**	**2,99**	**12,46**	**22,84**	**17,43**	**27,21**	**34,54**	**25,90**	**70,83**	**78,94**					**97,32**	**94,02**	
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**					**ST**	**ST**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kemauan Perangat Daerah (PD) untuk mendorong kinerja di Perangkat Daerah-nya masing-masing.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terdapat kolom dalam format pelaporan yang tidak di isi oleh PD, tidak semua kegiatan di dalam Renstra-PD yang dilaksanakan di tahun yang dievaluasi; terdapat beberapa satuan target kegiatan di Renstra berbeda dengan Renja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memotivasi PD untuk selalu meningkatkan capaian kinerja di setiap triwulan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : lebih memperhatikan satuan target dalam Renja agar sinkron dengan satuan target dalam Renstra.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, Kabupaten Tanggamus sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih intensif, komprehensif dan lintas sektor. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 menitikberatkan kepada penanganan isu strategis pembangunan dan permasalahan yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Tanggamus, disamping itu juga harus memperhatikan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Lampung dan Nasional.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah mengacu pada kriteria sebagai berikut:

1. Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sektor jasa, ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah;
4. Terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
5. Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Permasalahan bersumber dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang rendah dan perlu upaya keras untuk perbaikan. Deskripsi dari capaian indikator tersebut memberikan arah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan pembangunan dikategorikan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan, yaitu:
   1) Masih belum meratanya infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan dengan :
      - Transportasi darat, antara lain rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten (37,45%), rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi dan jumlah kendaraan yang makin padat pada jalan lintas Barat;
      - Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung.
   2) Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi berupa :
      - Potensi sumber daya air di Kabupaten Tanggamus yang besar tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri dan kebutuhan domestik;
      - Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai;
      - Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi yang diakibatkan oelh menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;

- Kondisi jaringan irigasijuga belum memadai mengingat irigasi dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan.

3) Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi yaitu:
   - Rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum memadai, yaitu baru mencapai 70,33%;
   - Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, surya dan angin masih sangat terbatas.
4) Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel untuk daerah kecamatan dengan kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama diwilayah perdesaan.
5) Permasalahan pada Bidang Penataan Ruang yaitu penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.

b. Permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah sebagai berikut :
   1) Di Bidang Pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: (a) tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Tanggamus masih relatif rendah. Di tahun 2022, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus baru mencapai 7,35 tahun; (b) Masih terdapatnya Angka Putus Sekolah terutama untuk jenjang SD dan SMP; (c) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing; (d) terjadinya perubahan kewenangan dalam bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
   2) Di Bidang Kesehatan, antara lain : (a) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan

kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (c) Masih terjadinya kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita; dan (d) Masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti AIDS dan HIV positif.

3) Di Bidang Pemuda dan Olahraga, permasalahan yang dihadapi bidang keolahragaan yaitu pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olaharaga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Kabupaten Tanggamus dalam pentas kompetisi olahraga nasional dan internasional serta permasalahan masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
4) Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, masih sangat terbatasnya program/kegiatan yang terkait dengan kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

c. Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi Kabupaten Tanggamus, antara lain belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus belum terkelola dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi destinasi pariwisata Kabupaten Tanggamus.

d. Permasalahan pada Bidang Sosial, Budaya dan Keagamaan adalah sebagai berikut :
   1) Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata adalah masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI terhadap budaya Kabupaten Tanggamus. Sedangkan permasalahan bidang pariwisata yaitu belum terkelolanya potensi pariwisata serta belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pariwsiata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar daerah wisata akan pentingnya pengembangan destinasi pariwisata.
   2) Di Bidang Sosial yaitu adanya kecenderungan peningkatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, dan lain-lain. Masih relatif rendahnya peranserta masyarakat dalam penanganan masalah sosial sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permaslahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

e. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dijumpai antara lain masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat, masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana. Selain itu, strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran Perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

f. Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup yaitu masih tingginya timbulan sampah yang belum termanfaatkan sehingga membebani TPA, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi alternatif yang

terbarukan, selain tenaga air. Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Sumber penyebab bencana lainnya yaitu masih tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus seperti Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau. Permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya mitigasi bencana alam. Berdasarkan kondisi kualitas air sungai di tujuh sungai utama, upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik.

g. Permasalahan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan adalah belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.3.2 Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diidentifikasi pada setiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi setipa SKPD. Identifikasi tersebut menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel II.117. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
1.	Pendidikan	• Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih di bawah RLS dan HLS Provinsi Lampung dan Nasional. • Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 7,36 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Nasioanl masing-masing adalah 8,29 tahun dan 8,77 tahun. • Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2023 adalah 12,31 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung dan Nasional masing-masing adalah 12,77 tahun dan 13,15 tahun. • Masih terdapat 19,38% Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Dasar yang sangat mendesak untuk diperbaiki.	• Belum tercapainya Program Wajib Belajar 12 Tahun • Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan • Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah. • Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan. • Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan.
2.	Kesehatan	• Angka Harapan Hidup masih dibawah Provinsi Lampung maupun Nasional. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 69,23 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Nasioanl masing-masing adalah 71,25 tahun dan 73,93. • Kasus kematian bayi di tahun 2023 terdapat 47 kasus kematian bayi termasuk neonatal. • Kasus kematian ibu, di tahun 2023 terdapat 9 kasus kematian ibu. • Terdapat kasus Balita Gizi Buruk, pada tahun 2023 ditemukan 1 Kasus Gizi Buruk. • Jumlah penderita TBC masih tergolong tinggi. Pada tahun 2023, terdapat 12.344 orang terduga TBC, 131 kasus DBD, dan 19 kasus baru AIDS.	• Belum optimalnya pelayanan kesehatan. • Masih rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata khususnya pada daerah yang sulit dijangkau • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya. • Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular. • Masih kurangnya fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2023 baru mencapai 37,74%. • Irigasi dalam kondisi rusak masih cukup tinggi yang ditandai dengan capaian irigasi dalam kondisi mantap baru sebesar 64.49%.	• Masih rendahnya jalan dalam kondisi baik dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. • Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi. • Belum optimalnya system drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan. • Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase). • Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, pada tahun 2023 sebanyak 8.479 unit. • Masih terdapatnya lingkungan pemukiman kumuh.	• Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni • Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman. • Kawasan/permukiman kumuh yang perlu segera mendapatkan penanganan • Terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana pada kawasan pemukiman. • Belum terintegrasinya • Pengembangan kawasan • perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan. • Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga masih sangat terbatas walaupun selalu diupayakan secara berkelanjutan.
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	• Pada tahun 2023, angka kriminalitas relatif tinggi yaitu 44,88 yang berarti dalam setiap 100.000 penduduk terjadi 44 tindak kriminalitas. • Terjadinya bencana alam pada yang mengakibatkan korban jiwa.	• Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku • Kondisi Kabupaten Tanggamus yang rawan

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			bencana alam • Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat bencana • Kurangnya dukungan database kebencanaan.
6.	Sosial	• Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 10,52% meskipun lebih rendah daripada tingkat kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 11,11% namun lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,36%. • Pada tahun 2023, jumlah anak terlantar sebanyak 449 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 1.633 orang, dan Penyandang Disabilitas sebanyak 580 orang.	• Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi • Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah. • Belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lansia, disabilitas, dan anak terlantar. • Masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di Bidang Pelayanan Sosial.
7.	Tenaga Kerja	• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 adalah sebesar 70,76%, lebih rendah dari TPAK Provinsi sebesar 70,04%. • Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 menjadi 3,35%. • Mayoritas Pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal. • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan pada tahun 2023 sebesar 0%.	• Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja disektor formal • Kualitas dan kompetensi angkatan kerja belum memadai • Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru • Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan-pelatihan tenaga kerja • Kurangnya variasi dan jenis pelatihan. • Sistim informasi ketenagakerjaan yang belum memadai.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Pada tahun 2023, persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah adalah 56,58%.	• Masih rendahnya partisipasi perempuan di berbagai bidang dan ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. • Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			pembangunan. • Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender. • Kurang Optimalnya Penguatan Karakter Berbasis Keluarga
9.	Pangan	• Pada tahun 2023, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 58,40 Ku/Ha. • NTP mulai beranjak naik, pada tahun 2023 berada pada angka 110,46.	• Masih rendahnya Nilai Tukar Petani akibat harga komoditas pertanian rakyat yang mengalami penurunan • Masih adanya beberapa daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan penanganan serius. • Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyediaan cadangan pangan dan lain-lain
10.	Pertanahan	• Pada tahun 2023, Persentase luas lahan bersertifikat sebanyak 69,11%.	• Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya sertifikasi atas tanah yang dimiliki • Belum ada database pertanahan • Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan. • Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainya
11.	Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 64,75 dengan kategori sedang. • Masih tingginya timbulan sampah yang belum termanfaatkan.	• Luas tutupan lahan yang semakin berkurang karena perluasan pemukiman penduduk dan kebakaran hutan. • Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup. • Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			• Masih minimnya bank sampah dan TPS3R. • Belum optimalnya sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah yang mempunyai manfaat ekonomi rumah tangga • Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan lingkungan bersih dan sehat termasuk dalam penanganan dan pengolahan sampah
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Pada tahun 2023, rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk sebesar 70,16%.	• Ada sebagian masyarakat yang sudah menikah akan tetapi tidak memiliki akta nikah, atau tidak dicatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan. • Terbatasnya sarana prasana dan SDM pengelola data dalam pelayanan adminduk.
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Pada tahun 2023, rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar 87%. • Masih terdapat 189 Pekon Berkembang.	• Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki LPM Kabupaten Tanggamus, belum sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. • Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. • Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Pekon dalam menerapkan penyelenggaraan

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat; • Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Persentase akseptor KB MKJP pada tahun 2023 adalah 18,88%.	• Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana. • Jumlah PLKB sangat kurang, idealnya 1 pekon 1 PLKB. • Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
15.	Perhubungan	• Pada tahun 2023 terdapat 6 buah/lokasi Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis.	• Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada. • Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan tranportasi. • Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			• Belum optimal dan meratanya pembangunan di seluruh wilayah baik menyangkut fisik maupun sistem manajemen transportasi yang dikembangkan • Masih adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan mengingat kondisi geografis yang tidak mendukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akhir-akhir ini menurun.
16.	Komunikasi dan Informatika	• Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan pada tahun 2023 adalah 28%. • Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2023 adalah 70%.	• Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. • Belum optimalnya integrasi system informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Tanggamus. • Kondisi geografis Kabupaten Tanggamus yang beberapa wilayahnya berbukit-bukit, sehingga terdapat wilayah *blank spot* (tidak terjangkau melalui media elektronik) dan daya akses informasi masyarakat yang masih cukup rendah sebagai akibat masih rendahnya kemampuan di bidang teknologi informasi. • SDM yang menangani Informasi dan komunikasi masih dirasakan kurang dalam penguasan teknologi Informasi. • Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
17.	Koperasi,	• Jumlah koperasi aktif pada tahun	• Masih rendahnya daya

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
	Usaha Kecil dan Menengah	2023 hanya 88 koperasi. • Jumlah UMKM yang ada di tahun 2023 sebanyak 5.243 UMKM.	saing koperasi dan UMKM. • Manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik • Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya. • Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah disebabkan terbatasnya akses pembiayaan modal bagi koperasi dan UMKM yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan usahanya. • Lemahnya akses usaha kecil dan menengah dalam memasuki pasar. • Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga
18.	Penanaman Modal	• Jumlah investor PMDN/PMA pada tahun 2023 adalah 20 investor yang terdiri dari 15 PMDN dan 5 PMA.	• Belum lengkapnya profil dan peta investasi daerah • Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah • Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan listrik, dan belum adanya pelabuhan untuk mendukung investasi di Kabupaten Tanggamus
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	• Persentase organisasi pemuda yang aktif tahun 2023 sebesar 60%. • Cakupan pembinaan olahraga 90%.	• Sangat terbatasnya sarana dan prasarana olahraga serta belum adanya gelanggang pemuda/remaja • Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			• Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan • Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda.
20.	Statistik	• Ketersediaan dokumen statistik: 1. Tanggamus Dalam Angka 2. PDRB Tanggamus	• Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral • Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders)* maupun antar instansi dalam proses pengumpulan data bagi perencanaan pembangunan. • Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat. • Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan.
21.	Persandian	• Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 12.	• Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi. • Belum terlaksananya tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasian, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
22.	Kebudayaan	• Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2023 adalah 67%. • Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tahun 2023 sebanyak 1 karya budaya.	• Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Tanggamus. • Kurang optimalnya promosi budaya local Tanggamus di dalam dan luar negeri.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			• Belum terpenuhinya formasi Pamong Budaya, sehingga pembinaan dan pengembangan kebudayaan hanya mengandalkan personil yang tersedia. • Belum tersedianya anggaran untuk program pelestarian benda cagar budaya.
23.	Perpustakaan	• Perpustakaan daerah 1 unit, yang mengakibatkan rendahnya minat baca dan jumlah pengunjung perpustakaan. • Masih terbatasnya jumlah koleksi judul buku perpustakaan.	• Keterbatasan koleksi di perpustakaan daerah. • Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. • Pelaksanaan perpustakaan keliling yang diminati masyarakat belum bisa menjangkau ke wilayah kecamatan se-Kabupaten Kabupaten Tanggamus.
24.	Kearsipan	• Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tahun 2023 sebesar 40%. • SDM pengelola kearsipan tahun 2023 sebanyak 2 orang	• Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. • Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip • Selama ini pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip masih kurang. Arsip dipahami hanya sebatas proses surat menyurat dan selanjutnya menjadi tumpukan dokumen

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			yang tidak berarti yang harus disingkirkan. Pemahaman yang kurang ini menjadi penyebab kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan arsip yang terjadi pada sebagian besar SKPD. • Disamping itu, ketidakpedulian terhadap arsip juga dicerminkan dari anggaran SKPD yang sering luput mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung pengelolaan arsip. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas arsip SKPD untuk bisa mengelola arsip instansinya secara baik karena tidak memperoleh dukungan sarana prasarana kearsipan yang memadai.
25.	Kelautan dan Perikanan	• Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya tahun 2023 sebesar 41.631,32 Ton. • Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023 sebesar 4.196,50 Ton.	• Sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai • Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur dan nelayan kapasitasnya masih kurang. • Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna bagi nelayan • Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
26.	Pariwisata	• Jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 678.221 orang. • Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah masih sangat kecil yaitu sebesar 0,024%.	• Masih rendahnya investasi di sektor pariwisata • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta akses menuju destinasi wisata • Pemasaran dan promosi wisata dirasa masih

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			lemah dan terkendala tiadanya sarana promosi yang memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan teknologi baik SDM maupun perangkat/peralatannya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas promosi. • Kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat. • Belum tersedianya anggaran untuk menata kawasan pantai meliputi percontohan penataan kios, percontohan pengelolaan sampah, dan percontohan pengelolaan limbah. • Masih terbatasnya fasilitas objek wisata yang belum memadai antara lain: areal parkir, tempat ibadah, MCK, dan kios cinderamata serta terbatasnya jaringan listrik.
27.	Pertanian	• Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 38,91%. • Ketersediaan pangan utama tahun 2023 sebesar 170.915 ton. • Cakupan bina kelompok petani tahun 2023 sebesar 88%.	• Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan. • Belum optimalnya akses maupun penggunaan oleh masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian. • Masih banyak petani dan peternak yang belum memanfaatkan fasilitas asuransi pertanian. • Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. • Terbatasnya tenaga medik veteriner dan

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			dokter hewan Poskeswan/Laboratorium Kesehatan Hewan • Keterbatasan keberadaan sapronak karena tergantung pabrik luar daerah.
28.	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Pada tahun 2023, persentase rumah tangga pengguna listrik adalah 96,78%. • Rasio ketersediaan daya listrik sebesar 97,50%.	• Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT). • Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian daerah terisolir/terpencil. • Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral. • Kurangnya kesadaran dan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan energi dan sumber daya mineral. • Masih ditemukannya kegiatan pertambangan rakyat yang belum berizin/penambagan liar. • Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan.
29.	Perdagangan	• Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2023 sebesar Rp.(1,414,050.00). • Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tahun 2023 sebesar Rp.14,222,222.00	• Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus ke luar daerah dan nasional masih terbatas. • Masih rendahnya kontribusi sector perdagangan erhadap PDRB. • Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusah mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. • Faktor kesadaran

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. • Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang ada sehingga belum memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat. • Bertambahnya ritel-ritel modern di beberapa kota kecamatan berpengaruh terhadap perkembangan pasar tradisional. • Kesadaran pedagang pasar dalam menata dagangan dan menjaga kebersihan pasar kurang terjaga, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen di pasar tradisional.
30.	Perindustrian	• Cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2022 sebesar 15,41%.	• Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. • Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. • Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas.
31	Transmigrasi	• Pada tahun 2023 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi.	• Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah. • Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas sehingga ketika secara kuantitas calon

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			transmigran terpenuhi, belum dibarengi dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi. • Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi.
32.	Perencanaan	• Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100%.	• Belum adanya sinergitas antar SKPD terhadap dokumen perencanaan daerah secara optimal. • Adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun oleh daerah. • Belum optimalnya basis data yang dikelola oleh statistik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.
33.	Keuangan	• Persentase Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar 85,12%. • Persentase Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 sebesar 84,05%	• Masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. • Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah. • Terbatasnya aparatur yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan. • Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan time *schedule* yang telah ditetapkan.
34.	Kepegawaian serta	• Nilai Profesionalitas ASN masih diangka 54,23.	• Belum optimalnya pola pengembangan/pembina

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
	Pendidikan dan Pelatihan	• Nilai Merit System masih berada pada angka 173,5.	an karir dan kapasitas ASN seperti diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi karena sumber daya APBD yang terbatas. • Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja di setiap SKPD. • Belum optimalnya manajemen informasi sistem kepegawaian yang ada disetiap SKPD. • Masih kurangya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
35.	Penelitian dan Pengembangan	• Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 sebesar 60,94 dengan Kategori Sangat Inovatif; • Skor indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 sebesar 2,90. • Belum optimalnya nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).	• Belum optimalnya peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait. • Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas. • Belum optimalnya inovasi daerah yang dilakukan oleh SKPD maupun *stakeholders* lainnya dalam peningkatan pelayanan publik maupun pemerintahan. • Masih terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta Kerjasama dengan pihak akademisi.
36.	Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan	• Persentase tindak lanjut temuan APIP Inspektorat 85,00%. • Persentase tindak lanjut temuan	• Masih terbatasnya sumber daya aparatur khususnya auditor dan

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
	Peraturan Perundang-Undangan	BPK 70,85%.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). • Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah untuk mendukung kinerja yang optimal. • Belum optimalnya pelayanan publik di daerah.

Sumber : Data diolah dan hasil analisis, 2024

2.3.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Identifikasi isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Isu strategis berperan penting dalam pengambilan keputusan politis. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu tersebut ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan.

Salah satu Momentum yang muncul sejak awal tahun 2024 dan berdampak sangat besar terhadap identifikasi isu strategis yaitu Pemilu serentak dan dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Daerah yang merupakan agenda Nasional. Sedangkan asumsi-asumsi target makro ekonomi yang sebelumnya disusun dalam target RPJMD 2018-2023 mengalami perubahan signifikan. Permasalahan tersebut juga akan berdampak terhadap pendapatan negara khususnya daerah dikarenakan aktivitas ekonomi yang lesu.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD serta mempertimbangkan Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's, maka terdapat beberapa Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 yang dirumuskan sebagai berikut:

A. Isu Strategis Pilar Ekonomi :

a) Percepatan pemulihan ekonomi yang pada tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 4,70%, terutama Sektor UMKM dan sektor informal lainnya*;*
b) Peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian dan Perikanan yang pada tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 1,62%;
c) Peningkatan kontribusi Pendukung Sektor Pariwisata sebagai daya dukung perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2023 hanya sebesar 1,88%;
d) Peningkatan realisasi investasi yang baru mencapai 5,18% dalam rangka mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi;
e) Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanggamus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus;
f) Pengendalian dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat yang saat ini menopang 71,62% terhadap perekonomian;
g) Peningkatan Konektivitas Wilayah, saat ini Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten baru mencapai 37,08% hal tersebut masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan.

B. Isu Strategis Pilar Sosial :

a) Penurunan Tingkat Kemiskinan yang saat ini sebesar 10,52% masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Nasional 9,36%;
b) Peningkatan IPM, capaian IPM saat ini masih rendah yaitu sebesar 67,86 dan capaian tersebut masih dibawah Provinsi Lampung 71,15 dan Nasional 74,39 oleh karena itu perlu kolaborasi antar *stakeholders* dalam peningkatan HLS, RLS, AHH dan PPK;
c) Pencapaian Kabupaten ODF sampai dengan tahun 2023 baru 200 Pekon dari 302 Pekon/Kelurahan (66,23%) yang berstatus Pekon ODF sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI 2023 sebesar 20,40%;
d) Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, saat ini Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani masih berada pada angka 98,13%.

C. Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola :

a) Peningkatan Pelayanan Publik, saat ini Kualitas Pelayanan Publik masih berada pada nilai 83,44. Upaya peningkatannya melalui pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul) pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b) Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), saat ini Kualitas SPBE masih berada diangka 1,60 dengan kategori kurang, sehingga harus terus diupayakan dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan;

D. Isu Strategis Pilar Lingkungan :

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, saat ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru mencapai 64,75 (kategori sedang) dan timbulan sampah yang belum termanfaatkan masih cukup tinggi oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas air, udara dan tututan lahan serta pengelolaan sampah yang terintegrasi;
b) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim yang saat ini baru berkontribusi sebesar 1,69%;

Disamping isu strategis berdasarkan empat pilar pembangunan diatas, dan ancaman resesi ekonomi dunia terhadap perekonomian daerah, yaitu:

a) Menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 71,62% terhadap perekonomian;
b) Adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada kelangsungan dunia usaha;
c) Terjadinya fluktuasi harga bahan pokok masyarakat dan penurunan harga komoditas produk unggulan akibat pelemahan ekonomi.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang

meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Provinsi Lampung, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan

ekonomi nasional dan Provinsi Lampung yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Tanggamus. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domistik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2024 sebesar 5,2%, sedangkan angka inflasi 2,8%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar Rp15.000/US$. Hal itu diperoleh dari paparan asumsi dasar makro tahun 2024 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5%, dan OECD sebesar 5,2%.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2% diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran Rp6.900 Trilliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, capital expenditure BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global yang diproyeksikan sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan dari World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan oleh IMF pada 10 Oktober 2023. Secara garis besar proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2024 masih bernilai positif. Namun, kondisi perekonomian global dapat berdampak pada perekonomian Indonesia jika Pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait belum merencanakan langkah antisipatif.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2024 target inflasi ditetapkan sebesar 2,5±1%. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 3±1%. Tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar

2,61% (yoy), nilai ini jauh lebih rendah dari tahun 2022 yang tingkat inflasinya mencapai 5.5% (yoy). Seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi e-commerce diprakirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp67 ribu dan Rp87 ribu triliun.

Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas. Khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia memaparkan ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial.

Untuk itu, Bank Indonesia pun menentukan bauran kebijakan yang akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam hal ini kebijakan moneter pro-stability akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, yaitu 2,5±1% pada tahun 2024 dan 2025. Dengan tingkat inflasi tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,7-5,5 persen pada 2024 dan 4,8-5,6 persen pada 2025.

Di samping itu, arah kebijakan moneter ini juga bertujuan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal. Kebijakan tersebut didukung operasi moneter "*pro-market*" untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian. Termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.

Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Adapun penjelasan masing-masing kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap difokuskan pada stabililasi nilai tukar Rupiah dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi agar tetap dalam sasaran. Hal ini merupakan bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-callibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2024. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (data *dependent*).

b. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

c. Kebijakan Sistem Pembayaran

BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint berisi 5 (lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 (lima) *working group* yaitu *Open banking*, Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan. BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 *key deliverables* yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2025.

d. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

e. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan

sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.

Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan eksporsebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertahan pada awal masa pandemi. Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, perhotelan dan hiburan diperkirakan akan berangsur pulih setelah pemerintah memutuskan untuk membuka jalur travel bubble bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.

Tabel III.1. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025 berdasarkan Ranwal RPJMN 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
2.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5-5,0
4.	Parsipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,4
5.	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	70,8
6.	Tingkat Inflasi	%	2,5±1,0
7.	Inklusi Keuangan	%	91
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indeks	28,12

Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Inflasi melanda negara-negara maju. Amerika yang biasanya di bawah 1 persen saat ini inflasi sudah mencapai 8,5 persen, dan inflasi paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka 61,1 persen. Inflasi Negara

berkembang diperkirakan juga akan meningkat, namun dalam batas yang moderat. Kondisi ini berdampak pada skenario perdagangan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp448.880,25 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp269.240,54 miliar.

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen, menguat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,28 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 16,66 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59 persen.

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 tumbuh 5,40% (yoy), meningkat dibandingkan 3,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja investasi, terutama investasi bangunan, serta terjaganya Konsumsi Rumah Tangga menopang peningkatan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan. Di sisi lain, berlanjutnya kontraksi Net Ekspor menahan pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi, terutama peningkatan impor yang mengoreksi perbaikan kinerja ekspor.

Kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2023 tumbuh menguat utamanya didukung oleh meningkatnya kinerja Investasi dan tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja investasi yang tercermin dari PMTB tercatat tumbuh sebesar 7,08% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,43% (yoy) pada triwulan sebelumnya, utamanya ditopang oleh kinerja investasi swasta di sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Adapun konsumsi rumah tangga turut menopang kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2023 dengan tumbuh sebesar 4,64% (yoy), meski sedikit melambat jika dibandingkan dengan 5,21% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya permintaan pada periode HBKN Nataru dan aktivitas di sektor pariwisata, sejalan dengan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan

yang tercermin dari tetap positifnya pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK).

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan kinerja Konstruksi, Perdagangan Besar Eceran, dan Transportasi dan Pergudangan mendorong akselerasi perekonomian Lampung triwulan IV 2023. Kinerja LU Konstruksi tercatat tumbuh sebesar 15,03%, lebih tinggi dibandingkan 9,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan realisasi semen, indeks nilai konstruksi yang positif, serta beberapa proyek pembangunan di sektor hotel dan restoran. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 8,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 7,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh akselerasi permintaan menjelang HBKN Nataru dan belanja calon legislatif pada periode kampanye di tahun politik. Lebih lanjut, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh 11,03% (yoy), tetap kuat meski melambat jika dibandingkan dengan 13,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan pada sebagian besar modal transportasi seperti angkutan rel, angkutan penyeberangan, dan angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada HBKN Nataru dan libur sekolah.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tanggamus

Perekonomian Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2019-2023 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan trend yang meningkat. Meskipun pada tahun 2021 kondisi pandemi *covid-19* yang terjadi secara global (tidak terkecuali di Kabupaten Tanggamus) berdampak terhadap pembatasan kegiatan dan aktivitas ekonomi pada berbagai lapangan usaha, pada tahun 2022 kondisi perekonomian khususnya di Kabupaten Tanggamus mulai membaik.

PDRB Kabupaten Tanggamus menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 meningkat menjadi 19,61 Triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1,51 Triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 18,01 Triliun rupiah.

Gambar III. 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

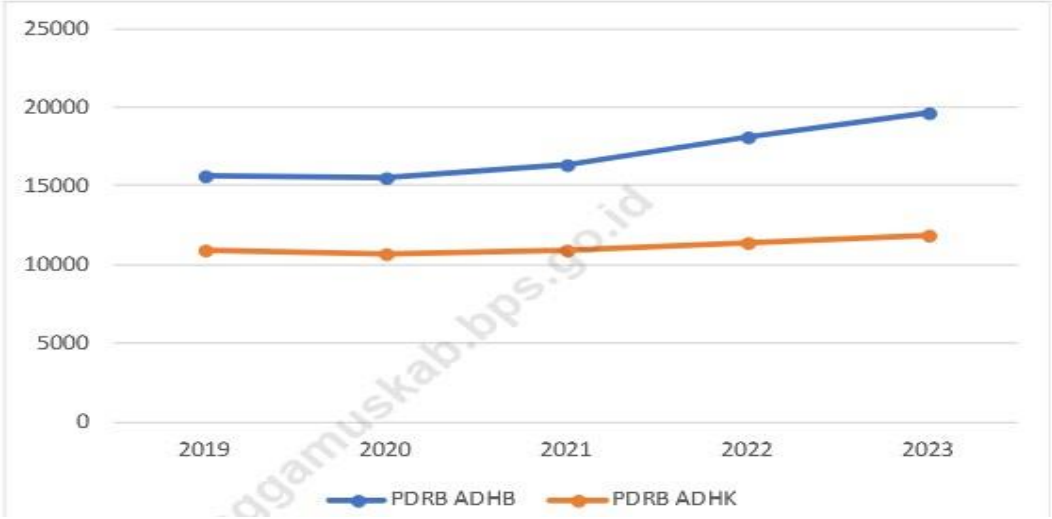

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan mencapai 4,70 persen, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 4,05 persen. Secara grafis, perbandingan target dan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023 ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar III. 2. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

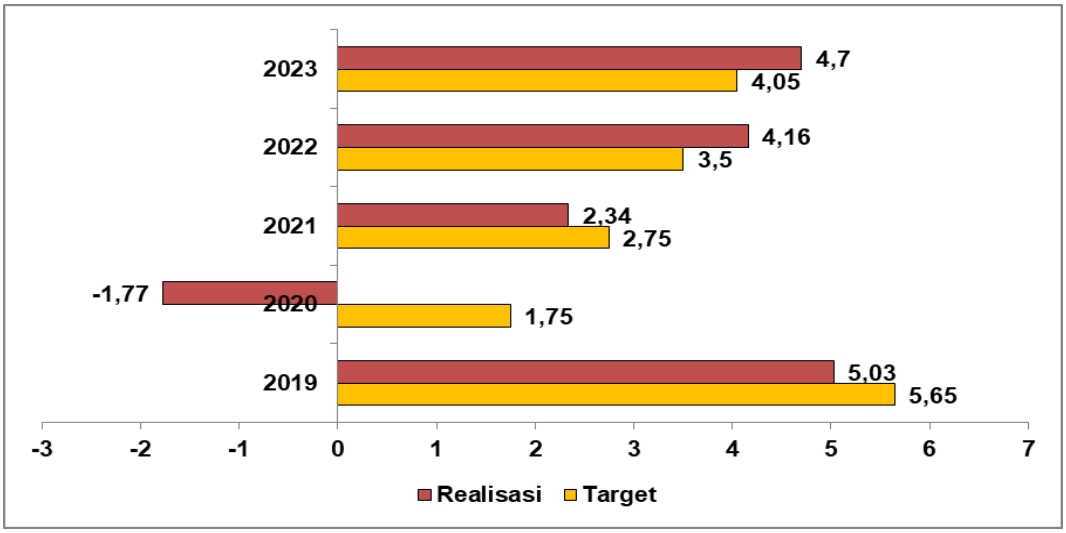

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Pada tahun 2023, semua kategori lapangan usaha tumbuh secara positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,20%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor real estate sebesar 0,57%. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap manjadi sektor yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023, yaitu sebesar 38,33% dengan laju pertumbuhan sebesar 1,27%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar, pada tahun 2023 sebesar 12,28% dengan laju pertumbuhan sebesar 9,93%.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk PDRB per kapita Kabupaten Tanggamus di tahun 2023 ialah sebesar 29,59 juta rupiah. Indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi disuatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat.

Gambar III. 3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

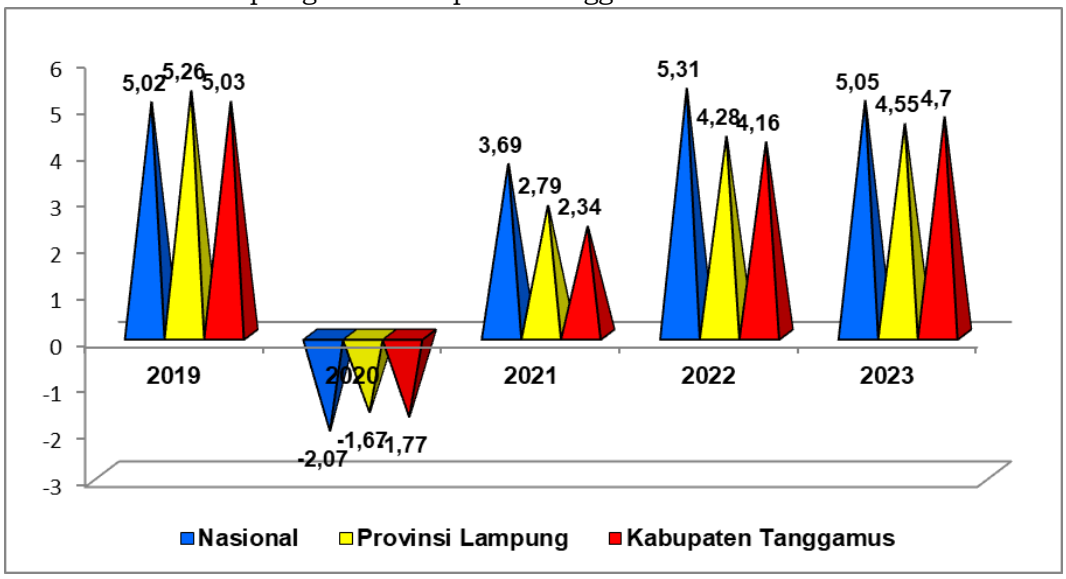

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

PDRB Kabupaten Tanggamus menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Gambar III.4. Distribusi Persentase Dominan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanggamus, 2023

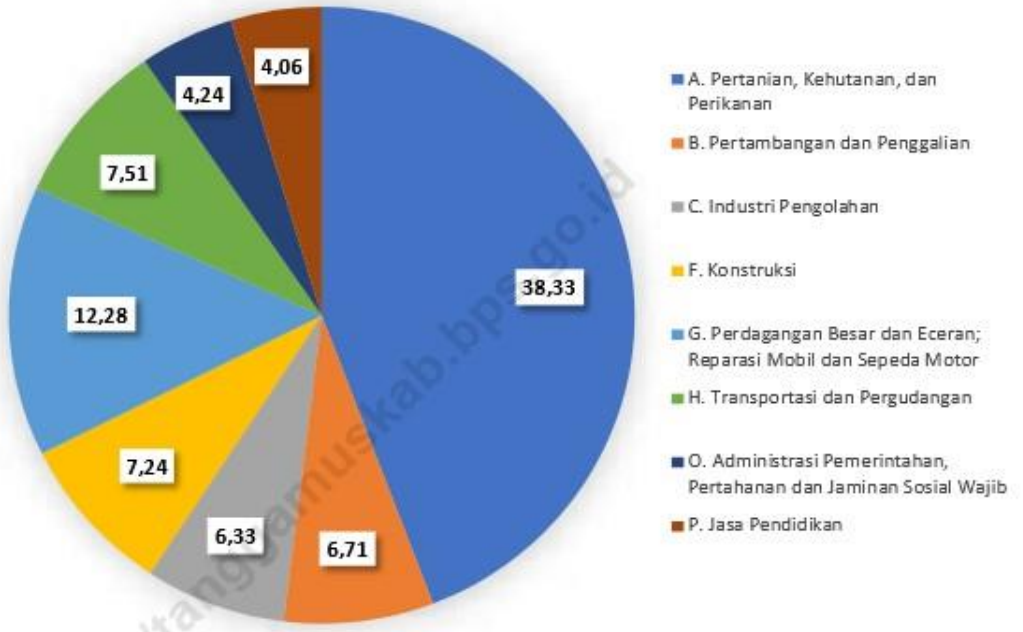

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja penduduk Tanggamus. Nilai tambah yang dicipatakan oleh kegiatan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2023 mencapai 7,516 triliun Rupiah. Secara nominal besaran ekonomi kategori ini meningkat sebesar 498 miliar Rupiah dibanding 2022. Pada tahun 2023 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan utama dengan kontribusi 38,33 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Tanggamus atau menurun sebesar 0,45 persen

dibanding tahun 2022 sebesar 38,78 persen. Faktor geografis dan tipologi wilayah memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

Pertambangan dan Penggalian Kategori Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi terbesar ke lima terhadap total perekonomian Tanggamus, yaitu sebesar 6,71 persen pada tahun 2023. Ditahun 2023, kategori ini menunjukan pertumbuhan positif sebesar 3,97 persen, lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2022 sektor ini menunjukkan kontraksi pertumbuhan sebesar -4,62.

Industri Pengolahan Kegiatan ekonomi dari kategori industri pengolahan di tahun 2023 mampu memberikan nilai tambah sebesar 1,24 triliun Rupiah. Nilai tambah yang tercipta tersebut secara nominal meningkat sebesar 44,03 milyar Rupiah dari tahun 2022. Industri pengolahan berkontribusi sekitar 6,33 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Tanggamus.

Pengadaan Listrik dan Gas Selama periode 2019-2023 peranan atau kontribusi yang diberikan sektor pengadaan listrik dan gas tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan cenderung stabil. Kontribusi yang diberikan kategori ini tahun 2023 yakni 0,06 persen. Tahun 2023 memberikan kontribusi yang stabil, pertumbuhan kategori pengadaan listrik dan gas ditahun 2023 adalah 1,1 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui pelbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Nilai tambah yang diciptakan kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang di tahun 2023 mencapai 23,47 milliar rupiah. Pertumbuhan kategori ini di 2023 sebesar 2,93 persen, lebih tinggi dari pada pertumbuhan di 2022 yang mencapai 0,88 persen.

Konstruksi Selama lima tahun terakhir (2019-2023) kontribusi kategori konstruksi terhadap total perekonomian perlahan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, sektor ini berkontribusi 7,24 persen atau meningkat 0,12 dibandingkan tahun 2022. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini pada 2023 ialah lebih dari 913,45 miliar rupiah. Pertumbuhan kategori ini selama

2019-2023 cukup berfluktuatif. Titik terendah pertumbuhan terjadi di tahun 2020, dengan kontraksi sebesar -2,51 persen. Dan titik tertinggi pertumbuhan terjadi di tahun 2019, dengan besaran pertumbuhan mencapai 9,62 persen. Kontraksi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur untuk penanganan covid19.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Selama lima tahun terakhir kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor telah menjadi penyumbang nilai tambah terbesar kedua di Kabupaten Tanggamus. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini di tahun 2023 adalah sebesar 2,408 triliun rupiah atau sebesar 12,28 persen dari total nilai tambah perekonomian Tanggamus. Pertumbuhan yang dialami kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2023 mencapai 9,93 persen.

Transportasi dan Pergudangan Kategori transportasi dan pergudangan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, keberadaan kategori ini diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi dari kategori lapangan usaha lainnya. Nilai tambah yang tercipta dari kegiatan ekonomi kategori ini di tahun 2023 ialah sebesar 1.471 miliar rupiah atau sekitar 7,51 persen dari total PDRB Kabupaten Tanggamus.

Sektor ini sejalan dengan mulai naiknya pertumbuhan ekonomi yang ialami kabupaten Tanggamus, pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan di tahun 2023 yakni sebesar 15,33 persen, mengalami penurunan dari pertumbuhan di tahun 2022 yang mencapai 21,89 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian Tanggamus sebesar 396,34 miliar rupiah atau setara dengan 2,02 persen dari total PDRB Tanggamus. Pertumbuhan yang dialami kategori ini di tahun 2023 meningkat cukup signifikan. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat sebesar 16,20 persen, lebih baik dari pertumbuhan di tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 sebesar 14,13 persen.

Informasi dan Komunikasi Di tahun 2023, kategori informasi dan komunikasi memberikan kontribusi tehadap perekonomian Tanggamus sebesar 716,89 miliar rupiah. Secara nominal besaran ekonomi kategori ini

meningkat sebesar 50,567 milliar dari tahun sebelumnya . Pada tahun 2023 nilai tambah yang diciptakan kategori ini menyokong 3,66 persen PDRB, lebih rendah dari tahun 2022 yang hanya berkisar 3,68 persen. Kategori ini tumbuh sebesar 7,47 persen di tahun 2023, meningkat secara signifikan dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,40 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi Kategori jasa keuangan dan asuransi menyokong perekonomian Kabupaten Tanggamus sebesar 1,84 persen pada 2023. Nilai tambah yang dihasilkan kategori jasa keuangan dan asuransi di tahun 2023 adalah sebesar 360,75 miliar rupiah. Kategori ini di tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,82 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar -0,20.

Real Estat Meskipun kecil, kategori real estat memberikan kontribusi bagi PDRB Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2023, kategori ini bertumbuh 0,57 persen. Nilai tambah yang dihasilkan kategori ini di tahun 2023 adalah sebesar 510,73 miliar rupiah. Kategori ini di tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,57 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,77.

Jasa Perusahaan Kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahan memberikan nilai tambah sebesar 18,13 miliar atau berkontribusi sebesar 0,09 persen di tahun 2023. Peranan kategori ini terhadap total perekonomian Tanggamus relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya. Pertumbuhan kategori ini pada 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,50 persen atau menurun dibanding pertumbuhan tahun 2022 sebesar 17,87 persen.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya dibidang pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi lembaga pemerintahan termasuk didalamnya juga perundangundangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kegiatan ekonomi pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan nilai tambah sebesar 831,67 miliar upiah atau sebesar 4,24 persen di tahun 2023. Peranan kategori ini terhadap total perekonomian Tanggamus relatif kecil dibandingkan peranan kategorikategori lainnya. Pertumbuhan kategori ini pada 2023 meningkat

menjadi 1,41 persen dari tahun 2022 yang pertumbuhannya sebesar -1,15 persen.

Jasa Pendidikan Selama lima tahun terakhir peranan kategori jasa pendidikan terhadap total ekonomi di Kabupaten Tanggamus cukup stabil. Peranan yang dihasilkan kategori ini pada periode tahun 2019-2023 berada pada kisaran 4,06 persen hingga 4,43 persen terhadap total PDRB. Pertumbuhan kategori ini mengalami penurunan dari 2,80 di tahun 2022 menjadi 2,04 di tahun 2023.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2023, kontribusinya terhadap perekonomian Tanggamus sebesar 288,66 miliar rupiah atau sebesar 1,47 persen, sama dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kategori jasa kesehatan sebesar 5,13 persen, meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya sebesar -0,16 persen.

Jasa Lainnya Kegiatan ekonomi pada kategori jasa lainnya memberikan nilai tambah sebesar 281,54 miliar rupiah atau sebesar 1,44 persen di tahun 2023. Peranan kategori ini terhadap total perekonomian Tanggamus relatif kecil dibandingkan peranan kategorikategori lainnya. Pertumbuhan kategori ini pada 2023 sebesar 17,65 persen.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

3.1.4.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2025

Prospek perekonomian Kabupaten Tanggamus tahun 2025 masih akan diliputi ketidakpastian, utamanya rambatan dari perekonomian global. Tekanan deflasi ekonomi China, dan juga dinamika pemilu Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada November 2024 akan banyak mempengaruhi Indonesia dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan. Di samping itu, konflik di Timur Tengah yang masih terjadi hingga saat ini akan mempengaruhi stabilitas harga komoditas terutama pada perdagangan global.

Disisi lain, kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus antara lain :

1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan Negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
2) Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (a) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (b) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (c) masih kurang efisiennya belanja operasional.
3) Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
4) Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik, antara lain : (a) perubahan bentuk rantai pasok global; (b) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (c) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (d) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
5) Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada.
6) Tekanan terhadap daya beli masyarakat sebagai dampak inflasi yang cenderung mengalami peningkatan merupakan tantangan yang perlu didukung upaya mitigasi.
7) Isu krisis pangan yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global dan perubahan iklim (*climate change*) dapat memicu kenaikan harga pangan dunia.

Disamping beberapa hal tersebut diatas, s*hifting* ekonomi perlu segera dilakukan untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan mengadopsi kebiasaan dan perubahan perilaku selama pandemi. Upaya tersebut diantaranya melalui pemanfaatan kembali lahan-lahan produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi. Mengatasi dampak kemiskinan yang cukup ekstrem akibat pasca pandemi dan adanya tekanan inflasi tentunya diperlukan sebuah bauran kebijakan yang

komprehensif, holistic dan terintegrasi. Program penanggulangan kemiskinan pastinya tidak semata bertujuan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, namun juga kebijakan yang bersifat *income generating policy* melalui program penguatan ekonomi lokal khususnya yang difokuskan di kantong-kantong kemiskinan utama di wilayah pedesaan.

Demikian pula adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) maupun dana bagi hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi lain adanya proyeksi penurunan pendapatan nasional akibat dampak global juga akan berpengaruh pada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

3.1.4.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2019-2023 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan trend yang meningkat. Nilai PDRB dengan Kabupaten Tanggamus atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 meningkat menjadi 19,60 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan 1,51 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 18,12 triliun rupiah.

Ditinjau menurut konstribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Tanggamus, perekonomian Kabupaten Tanggamus masih sangat bergantung pada sektor primer. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tanggamus tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 38,33 persen. Angka ini menurun dari tahun 2022 yang mencapai 38,78 persen. Lapangan usaha pemberi share terbesar kedua adalah kategori perdagangan yang mencapai

12,28 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu dibawah 8 persen.

Penguatan ekonomi lokal di wilayah pedesaan melalui strategi penciptaan wirausaha baru serta ekosistem usaha berbasis produk unggulan merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam menggerakan perekonomian dari skala terkecil di pedesaan.

Di tengah ancaman inflasi, resesi global serta penurunan daya beli serta ketimpangan yang semakin melebar, Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pertanian yang cukup besar memberikan optimisme bahwa stabilitas pangan Kabupaten Tanggamus masih dapat terjaga ditengah isu krisis pangan global kedepan.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sector perekat juga dipandang cukup efektif berperan sebagai akselerator pembangunan ekonomi Kabupaten Tanggamus. Preferensi wisata pasca pandemi nampaknya cukup kuat dalam mendorong terwujudnya *sustainable tourism* yang mengedepankan prinsip berkelanjutan yang memperhitungkan aspek dan dampak ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata yang bertujuan memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif.

3.1.5 Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Momentum pemulihan ekonomi yang cepat sejak tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Kabupaten Tanggamus akan terus tumbuh positif di tahun 2024 dan 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsive dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tanggamus di tahun 2025 sebagai berikut :

1) Peningkatan Daya Beli

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan

masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di antaranya adalah :

a) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan;
b) Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja;
c) Mendorong promosi produk unggulan daerah;
d) Membantu pengembangan sistem resi gudang dan perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen;
e) Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah, misalnya dengan mengadakan festival budaya.

Sementara itu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat di antaranya adalah :

a) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah;
b) Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah;
c) Mengkoordinasikan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran;
d) Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif.

2) Peningkatan Iklim Investasi

Iklim Investasi merupakan salah satu isu dari peningkatan daya saing sebagai penguat dalam keadaan ekonomi domestik, investasi dapat mencerminkan daya saing perekonomian domestik melalui penigkatan investasi merupakan salah satu solusi yang terbaik. Semakin baik investasi akan memperlihatkan timgkat kepercayaan penanaman modal yang baik, iklim investasi mencerminkan sejumlah factor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi

pemilik modal untuk melakukan usaha tau investasi secara produktif dan berkembang, oleh sebab itu penimgkatan iklim investasi dan usaha sangat penting untuk mendorong arus investasi masuk dan berkembangnya usaha. Dengan investasi yang baik akan mendorong aktifitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya beli masyarakat yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesehteraan rakyat, disamping itu investasi yang masuk kedaerah juga akan membawa teknologi baru yang membuat prosese produksi berlangsung lebih efisien dan lebih produktif, saat ini banyak investor asing yang berminat untu investasi dikabupaten Tanggamus karena domestic yang besar serta sumberdaya alam yang banyak.

Dalam upaya peningkatan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komperehensif, Pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan langkah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui :

a) Peningkatan Kemudahan Perizinan Melalui Peningkatan Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Saat ini penerbitan izin usaha diseluruh Indonesia dalam proses menggunakan OSS **(*Online Single Submission)*** yaitu suatu system perizinan terpusat, mulai dari prosedur, dokumen pendukung yang menyertai, lamanya proses dan tanpa biaya. Pembelian perizinan usaha yang transparan cepat, serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu, serta proporsional biaya, maka dunia usaha akan berkembang.

Untuk mempermudah proses perijinan serta menciptakan transparansi, maka diperlukan penyatuan dan penyederhanaan prosedur perizinan pada satu tempat, yaitu seluruh proses dan penerbitan atas berbagai ijin usahadan ijin lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan DPMPTS perlu mengacu kepada standar pelayanan prima, sehingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi, serta mencapai standar ISO yang sangat diperlukan di seluruh daerah.

Dengan adanya DPMPTS maka investor hanya cukup datang pada satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, mengadukan permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi.

b) Penyederhanaan dan Harmonisasi Peraturan Daerah

Perlunya daerah kembali meninjau dan menata Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan untuk menghindari timbulnya hal-hal yang bersifat kontra produktif bagi dunia usaha dan masyarakat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk itu beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah :

- Perda yang tidak didukung penciptaan iklim investasi sebaiknya dihapuskan dan diubah dengan penyediaan fasilitasi bagi dunia usaha;
- Perda terkait Investasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional);

c) *Pemberian Fasilitas*

Perlunya perubahan pola pikir (*mindset*) pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dengan salah satu cara adalah menyediakan fasilitas. Dunia usaha memerlukan fasilitas antara lain kemudahan penerbitan usaha melalui jemput bola, pendampingan pengembangan keahlian khusus, promosi produk, bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk secara aktif menjemput calon investor potensial, menyediakan data dan informasi potensi daerah dan menjadi *clearing house* masalah investasi di daerah. Fasilitasi ini tentunya akan berbeda setiap sektornya.

Sektor primer membutuhkan fasilitas berupa kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa dan etos kerja masyarakat lokal yang tinggi.

Sektor pengolahan/sekunder membutuhkan ketersediaan energi, infrastruktur fisik, fasilitas penundaan pembayaran paja sampai dengan berproduksinya usaha. Dukungan infrastruktur yang memadai dan baik juga akan membantu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya.

Sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi baik di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha dan selama proses pengiriman barang menuju daerah tujuan, selain itu Pemerintah perlu juga untuk memfasilitasi penyediaan lahan untuk industry dan memastikan terakomodasi alam Rencana Tata Ruang Wilayah, sementara itu fasilitasi lain yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif yang harmonis antara pengusaha dan buruh.

d) Pemilihan Fokus Bidang Usaha

Pembangunan Ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan ekonomi global, implikasinya pembangunan ekonomi masyarakat makin perlu diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis *(knowledge-base deconomy)* yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan inovasi. Dalam konteks tersebut pemanfaatan iptek menjadi basis pengembangan ekonomi masyarakat, disisi lain pengembangan pengetahuan (dan teknologi) perlu difokuskan pada upaya pengembangan yang berbasiskan potensi/kekayaan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan interaksi antar sector rill di dan antar daerah di perlukan adanya pendekatan yang terintegritas dan strategi kebijakan yang menyeluruh, oleh karena itu penguatan system inovasi didaerah diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah.

Pemerintah daerah perlu mulai memilih dan fokus pada bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing. Bidang usaha yang dipilih hendaknya difasilitasi sehingga lebih cepat dalam pengembangannya. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja,

menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing.

e) Peningkatan kerjasama dengan daerah lain.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan alternative pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggara pelayanan public serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Beberapa jenis usaha tentunya akan bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakharmonisan kebijakan yang bersifat lintas wilayah, mengurangi inkonsistensi kebijakan antar wilayah, serta mendorong dunia usaha untuk lebih meningkatkan usaha yang bersifat lintas wilayah karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha, maka pemerintah daerah dapat melakukan :

- *Penyediaan pelatihan ketrampilan*, dengan membangun pusat pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dan peluang untuk mengembangkannya ke bidang lain. Penyediaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- *Penyediaan pendidikan.* Membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang, namun harus dimulai sedini mungkin agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan memiliki peluang lapangan kerjayang

lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, sertamemberi pengaruh yang lebih baik bagi lingkungannya.

- *Peningkatan kesadaran masyarakat,* terhadap perlunya etoskerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa keterampilan dan intelegensia, perlu pula dibangun etoskerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik. *Role model* pemimpin daerah sangat mempengaruhi perilaku pegawai yang tercermin dari etos kerja pegawai kantor pemerintah daerahnya dan menjadi panutan bagi masyarakat.

3) Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan proporsi total Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 1.784.643.520.360,16 dengan komposisi Belanja Modal 9,25% atau senilai Rp. 165.046.827.681,35 dengan menggunakan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, kualitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal).

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kualitas belanja diantaranya adalah :

a) Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;
b) Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan kabupaten serta jaringan irigasi sekunder/tersier;
c) Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD;

d) Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
e) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja pemerintah.

4) Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Sejalan dengan arah kebijakan ekspor nasional yang memfokuskan pada peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan kualitas serta keberagaman produk, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan perhatiannya pada pengembangan potensi dan daya saing ekspor daerah masing-masing.

Langkah-langkah umum yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan daya saing produk unggulan antara lain dapat berupa :

a) Melakukan identifikasi komoditas unggulan daerah dengan orientasi ekspor untuk menetapkan fokus pembinaan kepada pelaku usaha dan eksportir lokal;
b) Menggiatkan diseminasi informasi kepada pelaku usaha dan eksportir terkait potensi pasar termasuk pasar ekspor non tradisional, tingkat kualitas dan diversifikasi produk yang dibutuhkan, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor;
c) Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan sektor/instansi lain yang mempengaruhi kelancaran ekspor seperti infrastruktur, logistik, penanaman modal, pendanaan dan perizinan;
d) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan;
e) Mengembangkan insentif bagi industri berorientasi ekspor yang menggunakan input lokal dalam porsi besar;
f) Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien, untuk mempermudah perolehan bahan baku dan memperlancar distribusi hasil produksi;
g) Menghapus beban pungutan (baik pungutan resmi maupun tidak resmi) yang membebani proses produksi dan distribusi barang, terutama barang-barang yang akan diekspor.

Langkah-langkah tersebut tentunya dapat dikembangkan dan perlu disesuaikan dengan kondisi sumber daya di daerah. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah ini akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat sejak tahun 2015 telah diimplementasikan pasar bersama ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Dengan dibukanya pasar bersama regional tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pasar lokal akan dibanjiri dengan produk impor dari negara tetangga yang erpotensi menciptakan defisit neraca perdagangan. Peningkatan daya saing produk ini diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat mengimbangi masuknya barang impor dan bahkan dapat memberikan surplus dalam neraca perdagangan.

5) Peningkatan Nilai Tambah Industri

Secara umum pengembangan industri hilir nasional masih terbatas, khususnya di daerah, dan secara spasial terkonsentrasi di Jabodetabek, Banten, wilayah Pantura Jawa dan Batam. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah yang masuk dalam RIPIN Tahun 2015-2025, dimana peranan Kabupaten Tanggamus dalam WPPI (Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri) Wilayah 9 berupa Kawasan Industri Maritim (KIM). Pemerintah juga telah menetapkan sektor-sektor strategis untuk dikembangkan rantai industri hilirnya. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal ini akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong proses transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan dan mendorong nilai tambah industri di antaranya adalah :

a) Mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah;
b) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama dalam hal pemberian insentif bagi investasi yang menghasilkan produk hilir;

c) Mengembangkan kawasan industri terpadu (*industrial park*) untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi industri, mengefisienkan pembangunan infrastruktur industri dan meningkatkan *linkages* antar industri terkait.

6) Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah

Perdagangan antar wilayah berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan integrasi perekonomian nasional. Perdagangan antar pulau yang intensif akan menguntungkan semua wilayah yang terlibat, terlebih bila masing-masing wilayah dapat mengembangkan spesialisasinya. Namun demikian hingga saat ini pola perdagangan antar wilayah nasional masih didominasi perdagangan intrapulau.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perdagangan antar wilayah antara lain :

a) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk pengembangan pasar regional;
b) Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal;
c) Mengurangi pungutan arus barang antar wilayah;
d) Memantau dan menjaga kelancaran arus angkutan barang dari dan ke pelabuhan;
e) Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah untuk mengefisienkan biaya transportasi.

7) Peningkatan Infrastruktur

Infrastruktur berperan sangat strategis bagi peningkatan daya saing wilayah dan daerah. Jaringan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi distribusi barang dan orang secara efisien, dan efisiensi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing dipasar nasional dan internasional.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah :

a) Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;
b) Menurunkan biaya logistik;
c) Mengurangi ekonomi biaya tinggi;
d) Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
e) Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan hal tersebut perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara.

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, yaitu:

a) Pemerintah Pusat

- Memberikan fokus pada pembangunan prasarana dasar yang menjadi wewenang pemerintah pusat;
- Mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur, terutama jenis infrastruktur yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian;
- Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur

b) Pemerintah Daerah

- Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- Melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu dalam upaya memperkuat konektivitas antar pusat ekonomi dan/atau pusat produksi, baik di dalam provinsi maupun denganpusat ekonomi di luar provinsi;

- Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil;
- Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
- Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik berbasis sumber daya lokal (*mikrohidro, geothermal*) dan penyediaan air bersih.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Tanggamus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud

dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran belanja agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi

juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/*basic needs* (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakatpun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1) Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD).
4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah kedepan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangan secara profesional. *Pertama,* ***sistem informasi manajemen keuangan***. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. *Kedua,* ***pengelolaan aset-aset daerah***. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan

berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sector PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan arah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak $arang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 secara umum diarahkan :

1) Optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan;
2) Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.
3) Kebijakan pembiayaan tahun 2025 diarahkan untuk untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan.

Seiring dengan adanya reformasi dibidang keuangan, pengelolaan keuangan publik harus dikelola secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian arah kebijakan pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran penerimaan pendapatan daerah relatitif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana serta terealisasi.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama diarahkan untuk mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025. Alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Belanja Pedapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Tabel III.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN DAERAH					
4,1	Pendapatan Asli Daerah	70.451.728.508,62	76.816.272.082,14	54.514.050.798,00	130.136.455.612	84.342.794.648
4.1.01	Pajak Daerah;	23.000.738.154,13	23.746.070.896,26	24.808.247.554,00	52.070.244.470	44.294.451.119
4.1.02	Retribusi Daerah;	2.320.697.051,75	1.998.349.932,00	2.651.355.488,00	60.017.505.698	4.716.042.775
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	5.237.366.730,11	4.217.476.463,02	6.022.971.740,00	4.017.476.463	10.713.234.226
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;	39.892.926.572,63	46.854.374.790,86	21.031.476.016,00	14.031.228.981	24.619.066.528
4,2	Pendapatan Transfer	1.543.427.207.912,00	1.470.999.169.156,00	1.580.639.057.287,00	1.611.979.739.562	1.713.346.353.157
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.455.190.509.327,00	1.392.834.634.246,00	1.475.230.031.000,00	1.541.188.001.000	1.621.813.691.414

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TARGET TAHUN 2026
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	88.236.698.585,00	78.164.534.910,00	105.409.026.287,00	70.791.738.562	91.532.661.743
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.604.062.993,00	11.911.121.073,00	167.163.768.089,00	70.170.379.366,16	71.942.022.696
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.036.455.352,00	11.911.121.073,00	167.163.768.089,00	70.170.379.366,16	71.942.022.696
	JUMLAH PENDAPATAN	1.641.482.999.413,62	1.559.726.562.311,14	1.802.316.876.174,00	1.812.286.574.540,16	1.869.631.170.501
5	BELANJA DAERAH					
5,1	Belanja Operasi	1.126.870.897.965,94	1.075.392.033.644,00	1.187.106.428.702,00	1.233.583.559.569,82	1.233.256.779.165
5.1.01	Belanja Pegawai	614.197.971.579,00	627.485.906.830,00	706.059.976.197,00	751.112.222.224,31	733.509.002.301
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.012.918.045,94	386.377.131.977,00	408.230.688.747,00	441.755.358.614,84	424.101.202.881
5.1.03	Belanja Bunga	3.476.800.927,00	4.912.401.085,00	4.421.976.500,00	6.406.539.475,00	4.593.886.751
5.1.05	Belanja Hibah	38.654.491.414,00	56.547.593.752,00	68.093.787.258,00	31.535.676.755,67	70.741.024.330
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.528.716.000,00	69.000.000,00	300.000.000,00	2.548.762.500,00	311.662.901
5,2	BELANJA MODAL	259.900.895.417,00	133.059.722.441,00	238.240.552.914,00		236.755.935.359
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.129.940.750,00	2.511.075.000,00	1.150.000.000,00	3.205.000.000,00	1.194.707.788
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.480.867.656,00	43.247.423.709,00	31.854.979.367,00	22.533.409.165,00	33.093.384.304
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.377.422.168,00	52.303.949.615,00	74.889.171.813,00	62.534.603.086,35	77.800.588.552
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	141.439.765.443,00	29.995.647.500,00	118.909.432.034,00	65.593.795.730,00	112.785.657.518
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.472.899.400,00	5.001.626.617,00	11.436.969.700,00	11.180.019.700,00	11.881.597.197
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.167.977.050,00	7.502.382.856,00	5.750.000.000,00	6.000.000.000,00	5.973.538.941
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.167.977.050,00	7.502.382.856,00	5.750.000.000,00	6.000.000.000,00	5.973.538.941
5,4	BELANJA TRANSFEER	327.958.151.453,00	350.656.496.203,00	352.305.509.075,00	380.013.133.108,99	366.001.857.036
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.571.046.177,00	3.122.039.021,00	3.513.866.527,00	7.175.901.437,16	3.650.472.789
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	323.387.105.276,00	347.534.457.182,00	348.791.642.548,00	372.837.231.671,83	362.351.384.247
	JUMLAH BELANJA	1.723.897.921.885,94	1.566.610.635.144,00	1.783.402.490.691,00	1.784.643.520.360,16	1.841.988.110.501
	SURPLUS/(DEFISIT)	-82.414.922.472,32	-6.884.072.832,86	18.914.385.483,00	27.643.054.180,00	27.643.060.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6,1	PENEERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.438.662.856,02	31.952.902.922,70	4.121.493.000,00	0,00	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	82.929.162.539,00	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	115.367.825.395,02	31.952.902.922,70	4.121.493.000,00	0,00	0
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	23.035.878.483,00	27.643.054.180,00	27.643.060.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	23.035.878.483,00	27.643.054.180,00	27.643.060.000
	PEMBIAYAAN NETTO	114.367.825.395,02	31.952.902.922,70	-18.914.385.483,00	-27.643.054.180,00	-27.643.060.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	31.952.902.922,70	25.068.830.089,84	0,00	0,00	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

3.2.2 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah, yang pada dasarnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tanggamus masih bertumpu pada Pendapatan Transfer pada tahun 2025 masih pada kisaran 88,95% dari total Pendapatan Daerah sedangkan PAD menyumbang sebesar 8,07%. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.559.726.562.311,14. Sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan data tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.76.816.272.082,14 atau 69,10 persen dari target PAD Kabupaten Tanggamus. Realisasi Pendapatan Transfer

sebesar Rp. 1.470.999.169.156,- atau 94,73 persen. Sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp. 11.911.121.073,- atau sebesar 7,07 persen. Sedangkan pada tahun 2024 Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus diproyeksikan meningkat menjadi Rp.1.802.316.876.174,-.

Di tahun 2025 Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan dari tahun 2024 menjadi Rp. 1.812.286.574.540,16 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp. 130.136.455.612,-
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.611.979.739.562,-
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp. 70.170.379.366,16

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 76.816.272.082,14 atau hanya mencapai 69,10 persen dari target PAD di tahun 2023. Penerimaan PAD paling besar disumbang dari Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 46.854.374.790,86 atau mencapai 61,00 persen dari total PAD. Sedangkan pada tahun 2024 PAD diproyeksikan sebesar Rp. 54.514.050.798,-.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan

ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus akan melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk dialokasikan mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan itu pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mendukung program pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 perihal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang :

   a. Dukungan sarana kesamsatan yang berada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
   b. Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
   c. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai kabupaten/kota.

   Dan untuk mendukung program tersebut, juga menghimbau kepada pengurus dan pemegang kendaraan dinas agar menganggarkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di perangkat daerahnya masing-masing.

5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.
11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
16) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, (2) menghambat mobilitas penduduk, (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

1) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
   b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

   Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :

1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
   a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c) hasil kerja sama daerah;

d) jasa giro;
e) hasil pengelolaan dana bergulir;
f) pendapatan bunga;
g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k) pendapatan denda pajak daerah;
l) Pendapatan denda retribusi daerah;
m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n) pendapatan dari pengembalian;
o) pendapatan dari BLUD; dan
p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2025, proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Tanggamus direncanakan mencapai

88,95% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai Rp. 1.541.188.001.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.791.738.562,- berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Kebijakan pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

1) Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

- ✓ Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir

yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

- ✓ Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

  Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

- ✓ Pendapatan DBH-SDA terdiri dari :
  - DBH-Kehutanan;
  - DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - DBH-Perikanan;

  dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- ✓ Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025

atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Di tahun 2025, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tanggamus direncanakan mencapai Rp. 70.170.379.366,16 atau sebesar 3,87 persen dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

1) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2023 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

2) Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus

Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Pendapatan Berasal Dari Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi

Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, mempedomani Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024, dan rencana produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN DAERAH					
4,1	Pendapatan Asli Daerah	70.451.728.508,62	76.816.272.082,14	54.514.050.798,00	130.136.455.612,00	84.342.794.648
4.1.01	Pajak Daerah;	23.000.738.154,13	23.746.070.896,26	24.808.247.554,00	52.070.244.470,00	44.294.451.119
4.1.02	Retribusi Daerah;	2.320.697.051,75	1.998.349.932,00	2.651.355.488,00	60.017.505.698,00	4.716.042.775
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	5.237.366.730,11	4.217.476.463,02	6.022.971.740,00	4.017.476.463,00	10.713.234.226
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;	39.892.926.572,63	46.854.374.790,86	21.031.476.016,00	14.031.228.981,00	24.619.066.528
4,2	Pendapatan Transfer	1.543.427.207.912,00	1.470.999.169.156,00	1.580.639.057.287,00	1.611.979.739.562,00	1.713.346.353.157
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.455.190.509.327,00	1.392.834.634.246,00	1.475.230.031.000,00	1.541.188.001.000,00	1.621.813.691.414
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	88.236.698.585,00	78.164.534.910,00	105.409.026.287,00	70.791.738.562,00	91.532.661.743
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.604.062.993,00	11.911.121.073,00	167.163.768.089,00	70.170.379.366,16	71.942.022.696
4.3.01	Hibah	16.567.607.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.036.455.352,00	11.911.121.073,00	167.163.768.089,00	70.170.379.366,16	71.942.022.696
	JUMLAH PENDAPATAN	1.641.482.999.413,62	1.559.726.562.311,14	1.802.316.876.174,00	1.812.286.574.540,16	1.869.631.170.501

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

Upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dana daerah dan menggali obyek-obyek yang baru guna menambah penerimaan daerah, secara singkat upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
   a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
      - Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (*multikanal*) dan tempat lainnya.
      - Melakukan penambahan gerai pajak dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.

b) Peningkatan *Law Enforcement*
   - Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
   - Meningkatkan kerja sama dengan terkait dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

c) Intensifikasi Pajak Daerah
   - Membangun sistem informasi pajak daerah yang terkonsolidasi.
   - Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
   - Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
   - Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah.
   - Membangun sistem terintegrasi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online.
   - Meningkatkan kerja sama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.
   - Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.

d) Ekstensifikasi Pajak Daerah
   - Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah.
   - Melakukan perluasan basis pajak daerah
   - Pengenaan persewaan seluruh ruangan hotel sebagai objek pajak hotel.
   - Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan.
   - Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan pemerintah menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan.
   - Menyesuaikan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.

2. Retribusi Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah
   - Akan menerapkan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
   - Akan menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.

- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Peningkatan *Law Enforcement*
   - Menerapkan Perda tentang Retribusi Daerah.
   - Akan membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Bank dalam rangka pembayaran retribusi daerah.

c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah
   - Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi daerah.
   - Melakukan pembaharuan system pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
   b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
   c) Memperkuat struktur permodalan BUMD.
   d) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga.
   e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

4. Kebijakan Pendapatan Transfer
   Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer bai itu Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar.

5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
   Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung untuk pencairan Dana Hibah serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi

yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Belanja Operasi
    a) Belanja Pegawai;
    b) Belanja Barang dan Jasa;
    c) Belanja Bunga;
    d) Belanja Subsidi;
    e) Belanja Hibah; dan
    f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
    a) Belanja Tanah;
    b) Belanja Peralatan dan Mesin;
    c) Belanja Bangunan dan Gedung;
    d) Belanja Jalan;
    e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
    f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
    a) Belanja Bagi Hasil;
    b) Belanja Bantuan Keuangan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus diproyeksikan sebesar Rp. 1.784.643.520.360,16 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.233.583.559.569,82 atau sebesar 69,12% kemudian Belanja Modal sebesar Rp. 165.046.827.681,35 atau 9,25%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.000.000.000,00 atau sebesar 0,34% dan Belanja Transfer sebesar Rp. 380.013.133.108,99 atau 21,29% dari total Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Selanjutnya, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2025 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1.233.583.559.569,82 atau sebesar 69,12% dari total Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 751.112.222.224,31 atau 60,89%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 441.755.358.614,84 atau 35,81%, dan Belanja Bunga sebesar Rp. 6.406.539.475,00 atau 0,52%, Belanja Subsidi sebesar Rp. 225.000.000,00 atau sebesar 0,02%, Belanja Hibah sebesar Rp. 31.535.676.755,67 atau 2,56%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.548.762.500,00 atau 0,21%.

Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025.

(3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

(9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran Belanja Barang Dan Jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

(2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

(a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

(b) Penghargaan atas suatu prestasi;

(c) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

(d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

(5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

   (a) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

   (b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

(8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

(9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

(10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

(11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

(12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

(13) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(14) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak

keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Perkada.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

(15) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

(b) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,

kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

(16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

(17) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

d) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan

dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila

telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

f) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    (a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    (b) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    (c) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
(5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

g) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Belanja Modal

Proyeksi Belanja Modal pada tahun 2025 sebesar Rp. 165.046.827.681,35 atau sebesar 9,25% dari total Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 3.205.000.000,00 atau 1,94%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar

Rp. 22.533.409.165,00 atau 13,65%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 62.534.603.086,35 atau 37,89%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 65.593.795.730,00 atau 39,74%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 11.180.019.700,00 atau 6,77%.

Belanja modal tersebut digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
   (1) Belanja Modal Tanah;
   Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

(5) Belanja Aset Tetap Lainnya;

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja Aset Lainnya;

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 atau 0,34% dari Total Belanja yang dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

   Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

   Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Keperluan mendesak; dan/atau

c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada tahun 2025 Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 380.013.133.108,99 atau mencapai 21,29% dari total Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 7.175.901.437,16 atau 1,89% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 372.837.231.671,83 atau mencapai 98,11%.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
(b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
(c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
(d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

    Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
(2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
(3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
(4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
(5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD ata atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan belanja diatas, dilaksanakan untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2025 yaitu “Penguatan Ketahanan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tabel III.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA DAERAH					
5,1	Belanja Operasi	1.126.870.897.965,94	1.075.392.033.644,00	1.187.106.428.702,00	1.233.583.559.569,82	1.233.256.779.165
5.1.01	Belanja Pegawai	614.197.971.579,00	627.485.906.830,00	706.059.976.197,00	751.112.222.224,31	733.509.002.301
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.012.918.045,94	386.377.131.977,00	408.230.688.747,00	441.755.358.614,84	424.101.202.881
5.1.03	Belanja Bunga	3.476.800.927,00	4.912.401.085,00	4.421.976.500,00	6.406.539.475,00	4.593.886.751
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	38.654.491.414,00	56.547.593.752,00	68.093.787.258,00	31.535.676.755,67	70.741.024.330
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.528.716.000,00	69.000.000,00	300.000.000,00	2.548.762.500,00	311.662.901

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TARGET TAHUN 2026
5,2	BELANJA MODAL	259.900.895.417,00	133.059.722.441,00	238.240.552.914,00	165.046.827.681,35	236.755.935.359
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.129.940.750,00	2.511.075.000,00	1.150.000.000,00	3.205.000.000,00	1.194.707.788
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.480.867.656,00	43.247.423.709,00	31.854.979.367,00	22.533.409.165,00	33.093.384.304
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.377.422.168,00	52.303.949.615,00	74.889.171.813,00	62.534.603.086,35	77.800.588.552
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	141.439.765.443,00	29.995.647.500,00	118.909.432.034,00	65.593.795.730,00	112.785.657.518
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.472.899.400,00	5.001.626.617,00	11.436.969.700,00	11.180.019.700,00	11.881.597.197
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.167.977.050,00	7.502.382.856,00	5.750.000.000,00	6.000.000.000,00	5.973.538.941
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.167.977.050,00	7.502.382.856,00	5.750.000.000,00	6.000.000.000,00	5.973.538.941
5,4	BELANJA TRANSFEER	327.958.151.453,00	350.656.496.203,00	352.305.509.075,00	380.013.133.108,99	366.001.857.036
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.571.046.177,00	3.122.039.021,00	3.513.866.527,00	7.175.901.437,16	3.650.472.789
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	323.387.105.276,00	347.534.457.182,00	348.791.642.548,00	372.837.231.671,83	362.351.384.247
	JUMLAH BELANJA	1.723.897.921.885,94	1.566.610.635.144,00	1.783.402.490.691,00	1.784.643.520.360,16	1.841.988.110.501

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1) Penerimaan Pembiayaan

a) SiLPA;
b) Pencairan Dana Cadangan;
c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau;
f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan
a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
b) Penyertaan Modal Daerah;
c) Pembentukan Dana Cadangan;
d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan penganggaran pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

a) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

(1) pelampauan penerimaan PAD;
(2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
(3) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
(4) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
(5) penghematan belanja;
(6) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
(7) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda

tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

(1) Pemerintah Pusat;
(2) pemerintah daerah lain;
(3) Lembaga Keuangan Bank;
(4) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
(5) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

(1) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
(2) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
(3) kerangka acuan kegiatan;
(4) RPJMD;
(5) RKPD;
(6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
(7) APBD tahun anggaran berjalan;
(8) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
(9) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
(10) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
(11) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
(12) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

(1) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
(2) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
(3) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada

tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

(3) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- ✓ sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- ✓ monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- ✓ pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
- ✓ pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sebagaimana maksud Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

(4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

(5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan

pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

c) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

(1) DAK;
(2) pinjaman daerah; dan
(3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
(2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
(3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
(4) sumber dana cadangan; dan
(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

d) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada tahun 2025, proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 27.643.054.180,00 yang dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. SMI sebesar Rp. 27.643.054.180,00. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN BERJALAN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6,1	PENEERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.438.662.856,02	31.952.902.922,70	4.121.493.000,00	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	82.929.162.539,00	0,00	0,00	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	115.367.825.395,02	31.952.902.922,70	4.121.493.000,00	0	0
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	23.035.878.483,00	27.643.054.180,00	27.643.060.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	23.035.878.483,00	27.643.054.180,00	27.643.060.000
	PEMBIAYAAN NETTO	114.367.825.395,02	31.952.902.922,70	-18.914.385.483,00	-27.643.054.180,00	-27.643.060.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	31.952.902.922,70	25.068.830.089,84	0,00	0	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH

Tujuan pembangunan adalah kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir suatu periode, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan tersebut. Sasaran menggambarkan kondisi atau hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat relevan dalam mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran ini dievaluasi melalui indikator kuantitatif yang relevan, yang ditetapkan untuk memastikan program prioritas berjalan secara fokus, efektif, dan efisien.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya merupakan tahap strategis yang menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan langsung pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Namun, untuk periode ini, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pendekatan yang digunakan berbeda karena tidak adanya visi dan misi Kepala Daerah.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPD, hal ini karena jika visi dan misi RPJPD tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program yang dilaksanakan

akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait.

Penentuan tujuan dan sasaran di dalam RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 didasarkan pada:

1) Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
2) Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
3) Isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom". Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 misi jangka panjang daerah, yaitu:

1) Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis;
2) Misi 2 : Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis;
3) Misi 3 : Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik;
4) Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan.

Visi dan misi RPJPD tersebut diwujudkan melalui pencapaian Sasaran Pokok sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan, adapun sasaran pokok jangka panjang daerah tersebut meliputi:

1) Sasaran Pokok Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis yaitu:
    a. Tingkat pendidikan masyarakat meningkat dengan sasaran indeks pendidikan sebesar 80 dan lamanya pendidikan 12 tahun;
    b. Sekolah semakin berkualitas baik SD, SLTP, SLTA dengan sasaran setiap kecamatan memiliki sekolah berstandar nasional dan lebih dari satu sekolah berstandar internacional;
    c. Angka partisipasi sekolah untuk SLTP dan SLTA mencapai 75-85%;
    d. Kesehatan masyarakat semakin baik dengan sasaran indeks kelangsungan hidup mencapai 75 tahun;

e. Pelayanan kesehatan makin baik dengan sasaran setiap kecamatan memiliki satu puskesmas rawat inap dan puskesmas pembantu serta rumah sakit daerah kelas B;
f. Kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita makin baik dengan sasaran tingkat kematian ibu melahirkan rendah, persalinan dengan tenaga medis mencapai 80 %, dan tidak ada balita kurang gizi serta kematian bayi rendah;
g. Agama menjadi kepribadian masyarakat yang tercermin pada nilai-nilai agama mewarnai kehidupan setiap orang secara kental serta terbangunnya kondisi yang menjamin setiap orang menjalankan agamanya.

2) Sasaran Pokok Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis yaitu:
a. Dinamika politik berjalan normal dan positif yang ditandai dengan berjalannya pendidikan politik, stabilnya partai politik, dan tumbuhnya forum-forum publik;
b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat makin baik tercermin pada keikutsertaan secara sadar dalam pemilihan kepala pekon, BHP, kepada daerah, kepala negara dan pemilu;
c. Kehidupan sosial berkembang sehat yang ditandai dengan ormas yang aktif, kepedulian sosial yang tinggi, berjalannya kerjasama dan kegiatan gotong royong, tumbuhnya tanggungjawab sosial lembaga-lembaga bisnis;
d. Kehidupan kebudayaan terus berkembang yang ditandai dengan masih kentalnya identitas budaya dalam kehidupan, berkembang dan tersalurkannya kreativitas masyarakat, tumbuhnya lembaga dan sanggar seni;
e. Adat istiadat dan budaya terus berkembang ditandai dengan masih kuatnya identitas budaya, lestarinya kegiatan tradisi budaya, berkembangnya kesenian daerah terutama budaya lokal (budaya Lampung sai batin);

3) Sasaran Pokok Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik yaitu:
a. Pemerintah dipercaya masyarakat yang ditandai dengan stabilnya pemerintahan dan taatnya masyarakat pada kebijakan pemerintah;
b. Pemerintahan berkinerja baik yang ditandai dengan rendahnya keluhan masyarakat, disiplin dan dedikasi aparatur yang tinggi, manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien;

c. Pemerintahan dikelola dengan bersih yang ditandai dengan rendahnya tingat penyimpangan keuangan, kewenangan, dan administrasi;
d. Kemandirian daerah makin meningkat yang ditandai dengan makin besarnya kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan daerah;
e. Lembaga legislatif semakin berwibawa yang ditandai dengan berjalannya fungsi legislasi, budgeter, dan pengawasan secara baik;

4) Sasaran Pokok Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan yaitu:
a. Perekonomian terus berkembang yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan mencapai rata-rata diatas 5%;
b. Daya saing ekonomi meningkat yang ditandai dengan daya dukung infrastruktur memadai dan iklim usaha kondusif, serta meningkatnya investasi;
c. Kemiskinan berkurang yang ditandai dengan perluasan kesempatan kerja dan meningkatnya daya beli serta menurunnya jumlah keluarga-orang miskin, dengan indeks daya beli mencapai 65;
d. Perekonomian berkembang secara adil yang ditandai dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil (UMK), adanya kemitraan usaha antara usaha skala besar dengan UMK dan keterpaduan antara perekonomian desa dan kota, laut dan daratan;
e. Perekonomian berkembang secara seimbang yang ditandai dengan struktur ekonomi yang berimbang dan ketimpangan antarwilayah yang rendah, dengan peranan pertanian 35%, industri 20%, dan perdagangan 25%;

Sedangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

1) Tahap Konsolidasi (Periode I);

Tahap ini merupakan peletakan dasar bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus dalam jangka panjang. Untuk melakukan percepatan dan stabilnya perkembangan Kabupaten Tanggamus maka perlu suatu kerangka dasar yang kokoh sehingga mampu menopang perkembangan yang diinginkan.

Untuk itu, pada tahap ini kegiatan diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan serta

pemulihan kerusakan lingkungan (lahan kritis, hutan gundul, das tidak terpelihara dll). Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, dan sosial. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

2) Tahap Pengembangan (Periode II dan III);

   Tahap ini merupakan kelanjuan tahapan konsolidasi, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Untuk itu, tahap ini relatif lebih panjang. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

3) Tahap Pemantapan (Periode IV);

   Tahap ini merupakan kelanjutan tahap pengembangan, yaitu merupakan tahap pemantapan pengembangan yang sudah dicapai. Kemajuan yang sduah dicapai perlu dipertahankan dan dimantapkan dengan melakukan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap kemajuan yang sudah dicapai sehingga pengembangan tersebut dapat dapat terus berkelanjutan.

   Setiap metode dan pendekatan memiliki spesifikasi tertentu terhadap kondisi yang ada, karena itu bila pengembangan telah berhasil merubaha kondisi menjadi lebih baik maka kondisi baru tersebut membutuhkan metode dan pendekatan baru yang sesuai. Esensinya bahwa pada tahap ini terjadi proses pembelajaran sehinga dapat merespon setiap perubahan yang terjadi. Akomodasi ini menjadikan metode dan pendekatan selalu efektif menjawab tantangan perubahan.

   Dengan demikian maka aspek fisik perlu direhabilitasi dan bahkan diperbaharui sehingga relevan dengan tututan perubahan. Aspek pengelolaan juga perlu pembaharuan sehingga metode dan pendekatan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 yang dilaksanakan yaitu:

1) Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis, dengan arah kebijakan:
   a) Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
   b) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;

c) Penciptaan suasana yang mendorong pendalaman dan pengamalan agama;
d) Penguatan nilai-nilai budaya;

2) Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis, dengan arah kebijakan:
   a) Penguatan kelembagaan sosial masyarakat;
   b) Peningkatan kesadaran politik masyarakat;
   c) Penguatan peran pemuda dan perempuan;
   d) Berkembangnya kehidupan berkesenian;
3) Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik, dengan arah kebijakan:
   a) Peningkatan kapasitas pemerintah;
   b) Peningkatan kapasitas lembaga legislatif;
   c) Penguatan kontrol sosial;
4) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan, dengan arah kebijakan:
   a) Iklim usaha yang sehat
   b) Praktek bisnis yang adil
   c) Produktivitas yang tinggi
   d) Jaringan usaha dan kerjasama bisnis
   e) Kelestarian daya dukung sumberdaya

Strategi sebagai cara mencapai tujuan mempunyai ruang lingkup kebijakan, program, dan kegiatan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan dalam urutan proses. Proses yang pertama adalah perumusan kebijakan, kebijakan kemudian dijabarkan kedalam program dan program dituangkan dalam kegiatan.

Perumusan kebijakan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan. Karena itu perlu dirumuskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adalah turunan visi yang masih bersifat umum. Untuk itu, tujuan diterjemahkan lebih lanjut dalam sasaran, yang sudah lebih nyata sehingga diharapkan sudah terukur.

Berdasarkan misi yang ada maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanggamus

NO	MISI RPJPD	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	VISI RPJPD : Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom										
1	**Misi 1 Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Agamis**	**T.1**	**Meningkatkan Kualitas Hidup Masyaraka**	**IT.1**	**Indeks Pembangunan Manusia**					**Indeks**	**71,17**
						S.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,23
						S.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.2	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9,86
2	**Misi 2 Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis Dan Harmonis**	**T.2**	**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**	**IT.2**	**Indeks Desa Membangun**					**Skor**	**0,7267**
						S.3	Meningkatnya Pekon Maju	IS.3	Persentase Pekon Maju	Persen	54,52
						S.4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IS.4	Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	38,48
						S.5	Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	IS.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,14
								IS.6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,78

NO	MISI RPJPD	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
						S.6	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	IS.7	Indeks Risiko Bencana	Angka	104,23
		T.3	**Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender**	**IT.3**	**Indeks Pembangunan Gender**					**Angka**	**91,46**
						S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS.8	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56,99
								IS.9	Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	750,25
3	**Misi 3 Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik**	**T.4**	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**IT.4**	**Indeks Reformasi Birokrasi**					**Nilai**	**66,32**
						S.8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.10	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65,59
								IS.11	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	70,0000
						S.9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	IS.12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,64
								IS.13	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,8589

NO	MISI RPJPD	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
4	Misi 4 Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkeadilan	T.5	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	IT.5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif					Angka	6,62
						S.10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	IS.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32
						S.11	Menurunnya Angka Pengangguran	IS.15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,96
						S.12	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.16	Angka Kemiskinan	Persen	9,11
								IS.17	Indeks Gini	Angka	0,246
						S.13	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.18	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57,96
		T.6	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.6	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDR					Persen	1,44
						S.14	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.19	Nilai Tukar Petan	Angka	127,24
								IS.20	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,60

NO	MISI RPJPD	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2025
		T.7	**Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal**	**IT.7**	**Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB**					**Persen**	**21,29**
						S.15	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS.21	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	9.00

Sumber : RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Gambar IV.1. Tema Pembangunan Tahun 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar IV.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2025

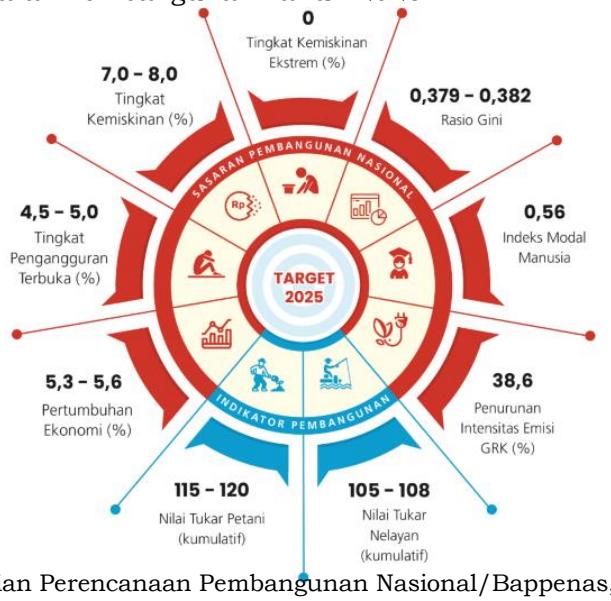

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maret 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar IV.3. Prioritas Nasional 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel IV.2. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode	2,5±1,0[a]
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300–15.900[a]
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	143,3–147,2
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	5,8–5,9
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,6)–(0,6)[b] [c]
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,30–12,36
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,1–10,3[d]
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,14)–0,61)[a] [c]
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,29)–(2,82)[a] [c]
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	37,82–38,71[a]
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,23–1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025; b) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; c) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif; d) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan setelah Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5±1,0 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300– Rp15.900 per USD.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan

terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh didorong oleh peningkatan ekspor utamanya pada produk industri. Sementara impor akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *free trade agreement/ comprehensive economic partnership agreement*.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV.3 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51	81,69-85,23
2	Indeks Aktualisasi Pancasila	75,53[1)] (2022)	79,37[a)]
3	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	69,80	71-80 (kategori baik)
4	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2022)	2,75

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Baseline dan target merujuk pada Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga/ Komunitas/Hubungan.

Arah Kebijakan

Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan (1) memperkokoh ideologi Pancasila; (2) penguatan demokrasi; (3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta (5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia. **Intervensi Kebijakan** Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

1) Memperkokoh ideologi Pancasila dilaksanakan melalui (a) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan; serta (b) aktualisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dengan pendekatan pengarusutamaan ideology Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan berbasiskan ramah pengguna (*user friendly)*.
2) Penguatan demokrasi dilaksanakan melalui (a) penguatan kebebasan dan kesetaraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil, serta penguatan kesetaraan masyarakat Prioritas Nasional pada sektor politik; dan (b) penguatan lembaga demokrasi.

3) Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik dilaksanakan melalui (a) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; serta (b) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industry (BEJO'S), melalui penguatan kapasitas lembaga dan insan pers yang dibarengi mewujudkan iklim penyehatan media arus utama.
4) Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah; serta (b) peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.
5) Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia; serta (b) transformasi layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV.4 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan			
1	Asia Power Index (*Military Capability*)	14,6 (2022)	16
2	Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	60,42	61,54
3	Asia Power Index (*Economic Relationship*)	12,6	12,6[a)]
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	63,5
5	Global Cybersecurity Index	94,88	94,92
6	Indeks Keamanan Laut Nasional	56	60

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan			
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	8,53	7,21
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,2	20
10	Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional	3,48 (2022)	3,45–3,60
11	Kapasitas tampungan air (m^3/kapita)	60,43	63,40
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39,20
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21	12,5
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan			
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3	3
15	Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,8
16	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54	76,49
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
	Kumulatif (%)	27,82	28,12
	Tahunan (%)	35,53 (2022)	36,65
20	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,92 (2022)	8,1
21	*Indonesia Blue Economy Index* (IBEI)	34,25	38,76
22	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45	45

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024
Keterangan: a) Sangat sementara

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidro- oseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif.
2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air;

(d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat;

3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV.5 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur			
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43 (2019)	51[a)]
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	128,5	136,7
3	Aset Perbankan/PDB (%)	61,52	66,9
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,0 (2022)	8,0
5	Aset Asuransi/PDB (%)	8,82	9,1
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,84	57,8
7	Total Kredit/PDB (%)	33,94	37,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70	91

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
9	Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang)	4,55	3,00–3,50
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,32 (2019)	1,44
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,04	3,14
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,60 (2022)	4,60
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,63	22,10
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77	7,92

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024
Keterangan: a) Sangat sementara

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi, (b) penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital, serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi.
2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto dilaksanakan melalui arah kebijakan pendalaman sektor keuangan.
3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang.
4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
5) Meningkatnya proporsi produk domestic bruto ekonomi kreatif dilaksanakan arah kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV.6 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Pendidikan Berkualitas yang Merata			
1	**Rata-rata nilai PISA**		
	Membaca	359 (2022)	396
	Matematika	366 (2022)	404
	Sains	383 (2022)	416
2	**Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional**		
	Literasi Membaca	60,89	62,89
	Numerasi	51,36	54,36
3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,13	9,33
4	Harapan lama sekolah (tahun)	13,15	13,32
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	31,45	33,94
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,12	11,12
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30	66,78
Kesehatan untuk Semua			
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,13	74,43
9	Angka Kelahiran Total (***Total Fertility Rate***) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023)	2,12
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189(2020)	122
11	Prevalensi ***Stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,50	18,8
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)	272
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95 (2023)	98
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
14	Indeks Ketimpangan Gender	0,447	0,424
15	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 (2022)	70,29
16	Indeks Perlindungan Anak	63,83[a)]	65,20
17	Indeks Pembangunan Pemuda	60,59	64,56
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85	92,15
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94	94
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42	69

20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42	69
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,50–5,00
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	54,52	56,3
25	Peringkat pada SEA Games	3 (2022)	3

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024
Keterangan: a) Sangat sementara data belum dirilis

Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and mathematic*; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas, dan inovasi;
2) Kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif;
3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan

kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;

4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, (c) pengembangan manajemen talenta nasional, serta (d) peningkatan prestasi olahraga.

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV.7 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan	18,67	20,8
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,5
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1–30,2
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21,0–21,6

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaransasaran pembangunan pada Prioritas Nasional5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dilaksanakan melalui (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industry strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; serta (b) pengembangan aglomerasi industri di

kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.

2) Integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pengembangan integrasi ekonomi domestic dan global melalui (a) optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV.8 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Perlindungan sosial yang adaptif			
1	Tingkat kemiskinan	9.03 (2024)	7,0 – 8,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem	0,83 (2024)	0
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0	15,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43,19
5	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19,71	22
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan			
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,15	67,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
7	Persentase desa mandiri (%)	3,9 (2021)	4,00
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			
8	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,13 (2022)	44,35

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial nasional; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan.
2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara.

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV.9 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi			
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani			
5	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68[a]
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba			
8	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan			
9	*Clearance rate* tindak pidana judi	33,28	35,00
10	*Clearance rate* tindak pidana penyelundupan	5,88	7,00
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan			
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi			
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30–12,36
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1–10,3
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
14	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Instrumen evaluasi pada tahun 2025 akan mengalami perubahan, Unit Lokus Evaluasi juga akan mengalami perubahan sehingga nilai nasional ataupun per kategori instansi pemerintah tersebut diproyeksikan akan turun.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik, (b) reformasi hukum, (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi, (d) penguatan kelembagaan hukum, serta (e) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal.*
2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi tata kelola pemerintahan, (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik, dan (c) pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani.
3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan dilaksanakan melalui arah kebijakan penanggulangan judi dan penyelundupan.
5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara.
6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel IV.10 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	71,07
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13	58,39
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02	76,77
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformative untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pembangunan berketahanan iklim, serta (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025, yaitu :

"Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia"

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut :

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
2) Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3) Penanggulangan Kemiskinan;
4) Pembangunan Infrastruktur;
5) Reformasi Birokrasi;
6) Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis;
7) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini

(hasil diskusi antar pemangku kepentingan), Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel IV.11 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2025
I.	**SASARAN PEMBANGUNAN**	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,40
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,28
4.	Indeks Pembanunan Manusia (IPM) (poin)	72,97
5.	Rasio Gini (poin)	0,282-0293
6.	Penurunan Emisi GRK (%)	7,24
II.	**INDIKATOR PEMBANGUNAN**	
1.	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	106,3-107,3
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (poin)	-

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus

Sementara itu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 mengambil tema :

"PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

Dalam rangka tercapainya kesesuaian dan sinkronisasi dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2025 adalah :

1) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2) Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas;
3) Tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan public berkualitas;
4) Memperkuat daya dukung infrastruktur yang merata dan konektivitas kewilayahan;
5) Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah;
6) Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang saat ini dihadapi Kabupaten Tanggamus, konsistensi dari hal tersebut tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.12. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Permasalahan/Isu Strategis Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	PD 1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan IPM, capaian IPM saat ini masih rendah yaitu sebesar 69,93 dan capaian tersebut dibawah Provinsi Lampung 72,48 dan Nasional 74,39 oleh karena itu perlu kolaborasi antar *stakeholders* dalam peningkatan HLS, RLS, AHH dan PPK
		Pencapaian Kabupaten ODF, sampai dengan tahun 2023 baru 200 Pekon dari 302 Pekon/Kelurahan (66,23%) yang berstatus Pekon ODF sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan SKI 2023 sebesar 17,1%
	PD 2 Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas	Percepatan pemulihan ekonomi, terutama Sektor UMKM dan sektor informal lainnya tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 12,03%
		Peningkatan realisasi investasi yang baru mencapai 5,18% dalam rangka mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS
		Pengendalian dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat yang saat ini menopang 71,62% terhadap perekonomian
		Penurunan Tingkat Kemiskinan, yang saat ini sebesar 10,52% masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Nasional 9,54%
		Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, saat ini Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih berada pada angka 13,35%, oleh karena itu fokusnya untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis
	PD 3 Tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan public berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik, saat ini Kualitas Pelayanan Publik masih berada pada nilai 4,14. Upaya peningkatannya melalui pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul) pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat
		Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks SPBE saat ini masih berada diangka 2,60 dengan kategori Baik hal ini terus mengalami peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) baru berada pada nilai 59,14 dengan predikat CC sehingga perlu dilakukan Upaya yang terintegrasi dalam mewujudkan 8 area perubahan reformasi birokrasi
	PD 4 Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan	Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanggamus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus
		Peningkatan Konektivitas Wilayah, saat ini Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten baru mencapai 37,74% hal tersebut masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan
	PD 5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah	Nilai tambah yang dicipatakan oleh kegiatan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2023 mencapai 7,5 triliun Rupiah. Secara nominal besaran ekonomi kategori ini meningkat sebesar 498 miliar Rupiah dibanding 2022. Pada tahun 2023 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan utama dengan kontribusi 38,33 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Tanggamus atau menurun sebesar 0,45 persen dibanding tahun 2022 sebesar 38,78 persen.
		Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2023 dicapai oleh kategori jasa lainnya, yang mampu tumbuh hingga 17,65 persen. Diraihnya anugerah nasional desa wisata nusantara oleh Kemendes PDT dan Transmigrasi serta signifikan berkembang sektor pariwisata turut andil terhadap pertumbuhan kategori jasa lainnya.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS
	PD 6 Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, saat ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru mencapai 64,75 (kategori sedang) dan timbulan sampah yang belum termanfaatkan masih cukup tinggi oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas air, udara dan tututan lahan serta pengelolaan sampah yang terintegrasi
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim yang saat ini baru berkontribusi sebesar 1,69%
		Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana, saat ini Indeks Risiko Bencana 132,54 oleh karena itu Kabupaten Tanggamus sebagai daerah rawan bencana memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis mitigasi bencana

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, data diolah, 2024

Selanjutnya agar pencapaian prioritas pembangunan tersebut dapat dijalankan dengan baik atau *on the track* maka ditetapkan indikator kinerja sasaran pembangunan daerah sebagai instrument penilaian keberhasilan pembangunan.

Tabel IV.13. Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA 2025
1	PD 1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.23
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9.86
2	PD 2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	9.11
			Indeks Gini	Angka	0.246
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.96
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	38.48
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.32
		Meningkatnya Pekon Maju	Persentase Pekon Maju	Persen	54.52

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA 2025
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56.99
				Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	750.25
3	PD 3	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan public berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65.59
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	70.0000
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.64
				Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2.8589
4	PD 4	Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57.96
5	PD 5	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani	Angka	127.24
				Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75.60
			Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	9.00
6	PD 6	Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66.14
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3.78
			Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	104.23

Sumber : RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Demikian pula halnya dengan sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025 disinkronkan dengan target sasaran makro Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.14. Penyelarasan Sasaran Makro RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	PROYEKSI 2025		
			NASIONAL	LAMPUNG	TANGGAMUS
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.3 – 5.6	5.2 – 5.7	4.7 – 5.2
2	Angka Kemiskinan	Persen	7.0 - 8.0	10.47	9.40 – 9.80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.5 – 5.0	4.28	2.70 – 3.13
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.98	72.97	71.03 – 72.50
5	Indeks Gini	Angka	0.379 – 0.382	0.282 – 0.293	0.252 – 0.254
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indeks	38,6	7.24	3.0 – 3.78

Sumber : Bappenas RI, Bappeda Provinsi Lampung, Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Penentuan Indikator Makro diatas mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045.

Berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah diuraikan diatas, berikut ini disajikan data Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional, Priroitas Provinsi Lampung dan Priroitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

Tabel IV.15 Dukungan Program Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**		**944.297.446.906,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	503.209.154.455,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan Pendidikan	145.417.515.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	40.507.750,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	234.427.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	122.096.700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	64.017.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.616.337.652,00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.342.590.142,00	Puskesmas
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61.600.123.171,00	Dinas Kesehatan
			19.771.046.000,00	Puskesmas
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.993.241.850,00	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	295.776.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	45.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.011.518.544,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.991.124.650,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.852.278.750,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Pengendalian Penduduk	456.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.857.292.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.427.650.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.168.866.205,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	116.885.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.444.982.700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	462.831.700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.769.267.977,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pembinaan Perpustakaan	856.490.450,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengelolaan Arsip	145.845.050,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengelolaan Arsip	14.154.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	67.625.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	419.744.999,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	330.460.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.421.475.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penataan Desa	1.452.216.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.888.353.150,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.942.081.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.981.122.208,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.273.096.288,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.854.453.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.854.007.440,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36.591.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.003.596.107,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	1.165.718.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	212.557.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.817.330.717,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.949.995.500,00	Kecamatan
2	**Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas**		**44.701.050.451,84**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.690.824.202,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	434.356.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.498.814.729,00	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	47.814.500,00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.770.000,00	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	468.045.950,00	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	128.828.000,00	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penanganan Bencana	515.283.800,00	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	15.322.600,00	Dinas Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.542.542.960,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.266.490,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	408.420.500,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	15.534.800,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	8.476.900,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.593.303.930,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.171.310.639,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	23.279.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	59.632.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	20.401.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.096.581.839,17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	69.058.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	326.038.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.032.356,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	7.609.900,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	277.902.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	665.375.368,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	9.106.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.558.700,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perekonomian dan Pembangunan	278.368.925,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.371.482.350,00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	195.916.550,00	Kecamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	75.268.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.251.892.563,67	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.388.306.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	707.094.300,00	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.230.000,00	Dinas Perikanan
3	**Tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas**		**615.564.576.541,99**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.895.908.492,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	348.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	1.011.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.752.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	36.120.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	119.450.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	73.384.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	167.029.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.800.438.500,00	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.392.107.031,00	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.588.132.446,00	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.633.790.800,00	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.337.938.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.045.792.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	380.380.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.912.496.125,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	397.361.648.324,99	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.642.237.300,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.034.533.899,00	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	818.230.700,00	Badan Pendapatan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.323.477.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.681.020.826,00	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.081.423.300,00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	379.468.900,00	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.066.278.087,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.248.463.950,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	819.320.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.892.388.911,00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	217.744.350,00	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	611.259.350,00	Kecamatan
4	**Memperkuat daya dukung infrastruktur yang merata dan konektivitas kewilayahan**		**119.537.934.881,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.462.307.036,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.463.067.347,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.556.760.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.862.106.405,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Permukiman	105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.160.117.687,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7.563.112.178,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Jalan	62.130.955.337,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	570.634.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.438.221.490,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Perumahan	509.728.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Kawasan Permukiman	243.724.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.401.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.169.545.250,00	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	927.575.600,00	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan Pelayaran	1.010.000,00	Dinas Perhubungan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	77.060.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	**Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah**		**17.323.252.016,00**	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	305.039.800,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.968.750.743,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	750.144.200,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Pemasaran Pariwisata	242.803.900,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	389.069.100,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	24.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	199.999.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				Hortikultura
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	342.300.100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			169.122.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	258.219.800,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.772.162.523,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.142.921.200,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	147.589.150,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	430.673.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	1.980.257.400,00	Sekretariat Daerah
6	**Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana**		**19.702.479.202,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.299.926.902,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.385.405.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.719.862.417,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	3.291.343.105,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.597.401.777,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	445.220.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	54.320.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	538.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat terpetakan Program Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2025 yaitu :

1. PD1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, didukung anggaran sebesar Rp. 944.297.446.906,00;
2. PD2 Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas, didukung anggaran sebesar Rp. 44.701.050.451,84;
3. PD3 Tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas, didukung anggaran sebesar Rp. 615.564.576.541,99;
4. PD4 Memperkuat daya dukung infrastruktur yang merata dan konektivitas kewilayahan, didukung anggaran sebesar Rp. 119.537.934.881,00;
5. PD5 Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebun dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah didukung anggaran sebesar Rp. 17.323.252.016,00;
6. PD6 Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana, didukung anggaran sebesar Rp. 19.702.479.202,00

Tabel IV.16 Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan**		**84.646.603.706,84**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.817.330.717,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	305.039.800,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	199.999.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	342.300.100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			169.122.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	258.219.800,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	24.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.251.892.563,67	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.388.306.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	707.094.300,00	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.230.000,00	Dinas Perikanan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.968.750.743,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	750.144.200,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	242.803.900,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	389.069.100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.772.162.523,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.142.921.200,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	147.589.150,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	430.673.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.096.581.839,17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	119.450.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	69.058.600,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	326.038.500,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.032.356,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Perekonomian dan Pembangunan	278.368.925,00	Dinas Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.558.700,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.498.814.729,00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	47.814.500,00	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	2.770.000,00	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	468.045.950,00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	128.828.000,00	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	515.283.800,00	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	15.322.600,00	Dinas Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.892.388.911,00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	217.744.350,00	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.949.995.500,00	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.371.482.350,00	Kecamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	611.259.350,00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	195.916.550,00	Kecamatan
2	**Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia**		**919.871.499.075,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	503.209.154.455,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	145.417.515.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	40.507.750,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	234.427.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	122.096.700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	64.017.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.616.337.652,00	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61.600.123.171,00	Dinas Kesehatan
			19.771.046.000,00	Puskesmas
			6.991.124.650,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.993.241.850,00	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	295.776.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	45.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.342.590.142,00	Puskesmas
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.011.518.544,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.852.278.750,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.593.303.930,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	67.625.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	419.744.999,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	330.460.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengendalian Penduduk	456.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.857.292.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.427.650.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.168.866.205,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	116.885.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.444.982.700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	462.831.700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.769.267.977,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pembinaan Perpustakaan	856.490.450,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengelolaan Arsip	145.845.050,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	14.154.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	23.279.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	20.401.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	77.060.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Hubungan Industrial	8.476.900,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.421.475.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penataan Desa	1.452.216.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.888.353.150,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.942.081.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	**Penanggulangan Kemiskinan**		**12.152.090.757,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.171.310.639,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	59.632.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	277.902.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	665.375.368,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	9.106.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.542.542.960,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.266.490,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	408.420.500,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	15.534.800,00	Dinas Tenaga Kerja
4	**Pembangunan Infrastruktur**		**119.460.874.881,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.462.307.036,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.463.067.347,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.556.760.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.862.106.405,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Permukiman	105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.160.117.687,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7.563.112.178,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Jalan	62.130.955.337,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	570.634.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.438.221.490,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Perumahan	509.728.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Kawasan Permukiman	243.724.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.401.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.169.545.250,00	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	927.575.600,00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	1.010.000,00	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
5	**Reformasi Birokrasi**		**585.085.863.137,99**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.392.107.031,00	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.800.438.500,00	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	1.980.257.400,00	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.588.132.446,00	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.633.790.800,00	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.337.938.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.045.792.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	380.380.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.323.477.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.912.496.125,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	397.361.648.324,99	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.642.237.300,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.034.533.899,00	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	818.230.700,00	Badan Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.003.596.107,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	1.165.718.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	212.557.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.681.020.826,00	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.081.423.300,00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	379.468.900,00	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.066.278.087,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.248.463.950,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	819.320.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	73.384.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	167.029.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.895.908.492,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	348.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	1.011.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.752.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	36.120.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	**Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis**		**32.903.866.664,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.690.824.202,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	434.356.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	7.609.900,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.981.122.208,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.273.096.288,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.854.453.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.854.007.440,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36.591.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	75.268.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.299.926.902,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.385.405.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.719.862.417,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	3.291.343.105,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**		**7.005.941.777,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.597.401.777,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	445.220.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	54.320.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan Persampahan	538.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Keselarasan Program Daerah Kabupaten Tanggamus terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 ditunjukkan dalam bentuk dukungan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan didukung anggaran sebesar Rp. 84.646.603.706,84;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia didukung anggaran sebesar Rp. 919.871.499.075,00;
3. Penanggulangan Kemiskinan didukung anggaran sebesar Rp.12.152.090.757,00;
4. Pembangunan Infrastruktur didukung anggaran sebesar Rp.119.460.874.881,00;
5. Reformasi Birokrasi didukung anggaran sebesar Rp.585.085.863.137,99;
6. Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis didukung anggaran sebesar Rp.32.903.866.664,00;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup didukung anggaran sebesar Rp.7.005.941.777,00;

Tabel IV.17 Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).**					**9.962.760.128,67**	
		1	**Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk**	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.800.438.500,00	Sekretariat Daerah
				2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.273.096.288,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter				
		2	**Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**	1	Program Pengembangan Kebudayaan	234.427.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	64.017.500,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				3	Program Pembinaan Sejarah	122.096.700,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				4	Program Pemasaran Pariwisata	242.803.900,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	389.069.100,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		3	**Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial**	1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.854.007.440,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36.591.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	75.268.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.854.453.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4	**Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter**	1	Program Pembinaan Perpustakaan	856.490.450,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				2	Program Pengelolaan Arsip	145.845.050,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	14.154.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**Memantapkan Sistem**					**3.470.782.247,00**	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	**1**	**Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)**	1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	7.609.900,00	Dinas Tenaga Kerja
		2	**Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi**	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.463.067.347,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		3	**Peningkatan kuantitas Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi**					**7.242.029.474,00**	
		1	**Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan**	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	305.039.800,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	199.999.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				3		1.142.921.200,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	147.589.150,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
				6	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	169.122.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	342.300.100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	24.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				9	Program Penyuluhan Pertanian	258.219.800,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2	**Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan**	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.388.306.000,00	Dinas Perikanan
				2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	707.094.300,00	Dinas Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.230.000,00	Dinas Perikanan
		3	**Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi**	1	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	23.279.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	9.106.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				3	Program Pengawasan Pemeriksaan Koperasi	20.401.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		4	**Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi**	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	277.902.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	430.673.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	59.632.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		5	**Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**	1	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	77.060.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	665.375.368,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		6	**Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi**	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	326.038.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	119.450.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				4	Program Promosi Penanaman Modal	69.058.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.032.356,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	**Memperkuat pembangunan**					**901.416.024.628,00**	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	**1**	**Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**	1	Program Pendaftaran Penduduk	348.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Program Pencatatan Sipil	1.011.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.752.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	36.120.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				5	Program Pengendalian Penduduk	456.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.857.292.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				8	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	67.625.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	**Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**	1	Program Pemberdayaan Sosial	47.814.500,00	Dinas Sosial
				2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.770.000,00	Dinas Sosial
				3	Program Rehabilitasi Sosial	468.045.950,00	Dinas Sosial
				4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	128.828.000,00	Dinas Sosial
				5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	15.322.600,00	Dinas Sosial
		3	**Peningkatan Akses dan**	1	Program Pemenuhan Upaya	61.600.123.171,00	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			Mutu Pelayanan Kesehatan		Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.991.124.650,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
						19.771.046.000,00	Puskesmas
				2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.993.241.850,00	Dinas Kesehatan
						3.852.278.750,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
				3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	45.000.000,00	Dinas Kesehatan
				4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	295.776.000,00	Dinas Kesehatan
				5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	60.616.337.652,00	Dinas Kesehatan
						37.011.518.544,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
						38.342.590.142,00	Puskesmas
		4	**Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**	1	Program Pengelolaan Pendidikan	145.417.515.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2	Program Pengembangan Kurikulum	40.507.750,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	503.209.154.455,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	**Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda**	1	Program Perlindungan Perempuan	419.744.999,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Program Perlindungan Khusus Anak	330.460.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	116.885.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.444.982.700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	462.831.700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		6	**Pengentasan Kemiskinan**	1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.427.650.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Program Penempatan Tenaga Kerja	15.534.800,00	Dinas Tenaga Kerja
				3	Program Perekonomian dan Pembangunan	278.368.925,00	Dinas Tenaga Kerja
				4	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.980.257.400,00	Sekretariat Daerah
				5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7	**Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing**	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.266.490,00	Dinas Tenaga Kerja
				2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	408.420.500,00	Dinas Tenaga Kerja
				3	Program Hubungan Industrial	8.476.900,00	Dinas Tenaga Kerja
5	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri**					**9.058.228.590,00**	
		1	**Pembangunan Wilayah Sumatera**	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	750.144.200,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				2	Program Pengembangan Perumahan	509.728.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.438.221.490,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.558.700,00	Dinas Tenaga Kerja
				5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.323.477.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
				6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	217.744.350,00	Kecamatan
				7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.949.995.500,00	Kecamatan
				9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	570.634.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				10	Program Kawasan Permukiman	243.724.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	**Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**					**100.911.739.957,35**	
		1	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.556.760.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.862.106.405,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				3	Program Pengembangan Permukiman	105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				4	Program Penataan Bangunan Gedung	4.160.117.687,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7.563.112.178,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.401.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		2	**Infrastruktur Ekonomi**	1	Program Penyelenggaraan Jalan	62.130.955.337,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				2	Program Pengelolaan Pelayaran	1.010.000,00	Dinas Perhubungan
		3	**Infrastruktur Perkotaan**	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	927.575.600,00	Dinas Perhubungan
		4	**Transformasi Digital**	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.248.463.950,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	819.320.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	73.384.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	167.029.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	**Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan**					**722.464.603.068,64**	
		1	**Konsolidasi Demokrasi**	1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.942.081.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.633.790.800,00	Sekretariat DPRD
		2	**Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**		-	-	-
		3	**Penegakan Hukum Nasional**	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	34.392.107.031,00	Sekretariat Daerah
				2	Program Penataan Desa	1.452.216.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.888.353.150,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.045.792.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
				6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	380.380.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
				7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	397.361.648.324,99	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				8	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.642.237.300,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				9	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	818.230.700,00	Badan Pendapatan Daerah
				10	Program Kepegawaian Daerah	1.165.718.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	212.557.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				12	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.081.423.300,00	Inspektorat
				13	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	379.468.900,00	Inspektorat
				14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	195.916.550,00	Kecamatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				15	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	611.259.350,00	Kecamatan
				16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13.462.307.036,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						11.690.824.202,00	Satuan Polisi Pamong Praja
						4.299.926.902,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						3.719.862.417,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						3.498.814.729,00	Dinas Sosial
						3.542.542.960,00	Dinas Tenaga Kerja
						4.593.303.930,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						12.817.330.717,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
						5.597.401.777,00	Dinas Lingkungan Hidup
						9.895.908.492,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						1.421.475.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						5.169.545.250,00	Dinas Perhubungan
						4.066.278.087,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						3.096.581.839,17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						3.168.866.205,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
						3.769.267.977,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
						3.251.892.563,67	Dinas Perikanan
						3.968.750.743,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						6.772.162.523,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
						51.588.132.446,00	Sekretariat DPRD

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						3.337.938.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
						21.912.496.125,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						4.034.533.899,00	Badan Pendapatan Daerah
						5.003.596.107,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						11.681.020.826,00	Inspektorat
						7.171.310.639,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						37.892.388.911,00	Kecamatan
						2.981.122.208,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	434.356.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.371.482.350,00	Kecamatan
8	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**					**6.600.571.905,17**	
		1	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	445.220.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	54.320.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		2	**Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**	1	Program Penanggulangan Bencana	3.291.343.105,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.385.405.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				3	Program Penanganan Bencana	515.283.800,00	Dinas Sosial
		3	**Pembangunan Rendah Karbon**	1	Program Pengelolaan Persampahan	538.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Komitmen Kabupaten Tanggamus dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025 ditunjukkan dengan penganggaran Program Daerah dalam RKPD Tahun 2025 yang sasaran dan arah kebijakkannya sinergi dengan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025, sebagai berikut :

1. **Prioritas Nasional 1.** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) didukung dengan anggaran sebesar Rp.9.962.760.128,67;
2. **Prioritas Nasional 2.** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.470.782.247,00;
3. **Prioritas Nasional 3.** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.242.029.474,00;
4. **PRIORITAS NASIONAL 4.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas didukung dengan anggaran sebesar Rp.901.416.024.628,00;

5. **PRIORITAS NASIONAL 5.** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri didukung dengan anggaran sebesar Rp.9.058.228.590,00;
6. **PRIORITAS NASIONAL 6.** Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan didukung dengan anggaran sebesar Rp.100.911.739.957,35;
7. **PRIORITAS NASIONAL 7.** Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. didukung dengan anggaran sebesar Rp.722.464.603.068,64;
8. **PRIORITAS NASIONAL 8.** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur didukung dengan anggaran sebesar Rp.6.600.571.905,17;

Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada uraian diatas juga berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses yang dilakukan oleh legislatif. Cara yang dilakukan yaitu melalui penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran yang selanjutnya dipadukan juga dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Pokok-pokok pikiran tersebut selanjutnya dimasukan kedalam *e-planning* yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang langsung dientry oleh akun masing-masing anggota DPRD melalui para pendamping DPRD yang telah ditunjuk, selanjutnya usulan tersebut diverifikasi oleh akun Sekretariat DPRD dan divalidasi oleh akun Mitra Bappelitbang yang berada dimasing-masing Bidang Teknis.

Tahapan selanjutnya, usulan yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dibahas dengan para Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi sebagai Perangkat Daerah tujuan dalam Forum Gabungan Perangkat

Daerah (Forgab-PD) yang hasilnya akan dijadikan sebagai lokus dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Gambar IV.4 Alur Pengusulan Musrenbang dan Pokir DPRD Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

Gambar IV.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil I

Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2024

Gambar IV.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil II

Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2024

Gambar IV.7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil III

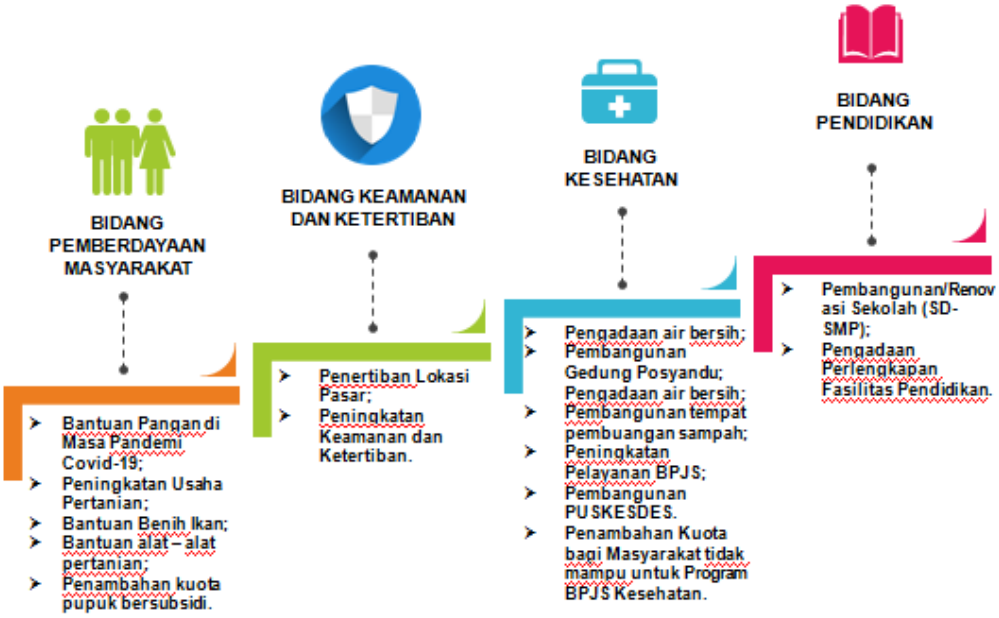

Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2024

Gambar IV.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil IV

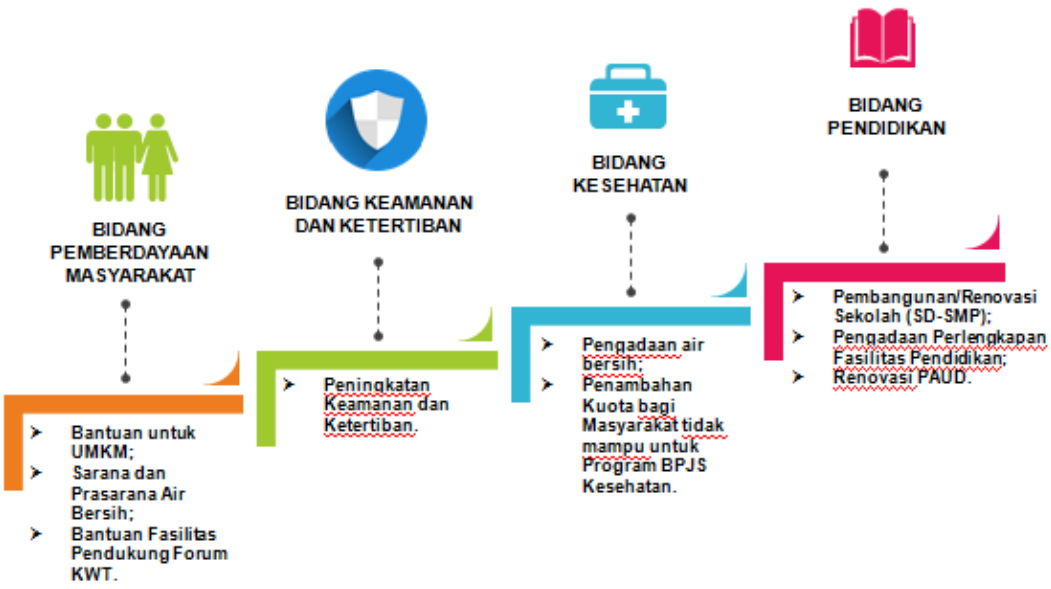

Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2024

Gambar IV.9 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil V

Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2024

Gambar IV.10 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil VI

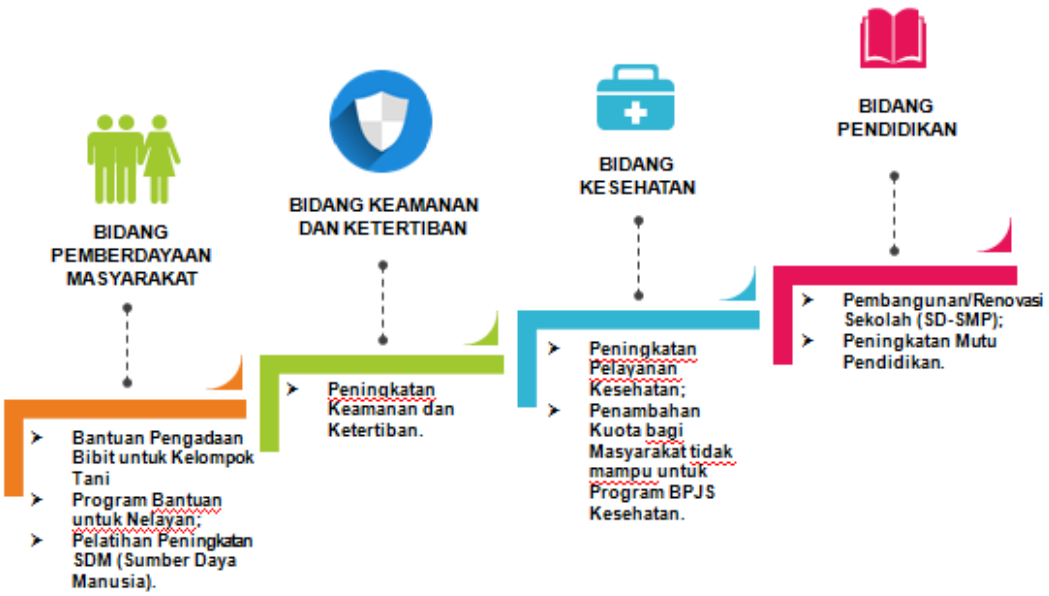

Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2024

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

5.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk Tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045.

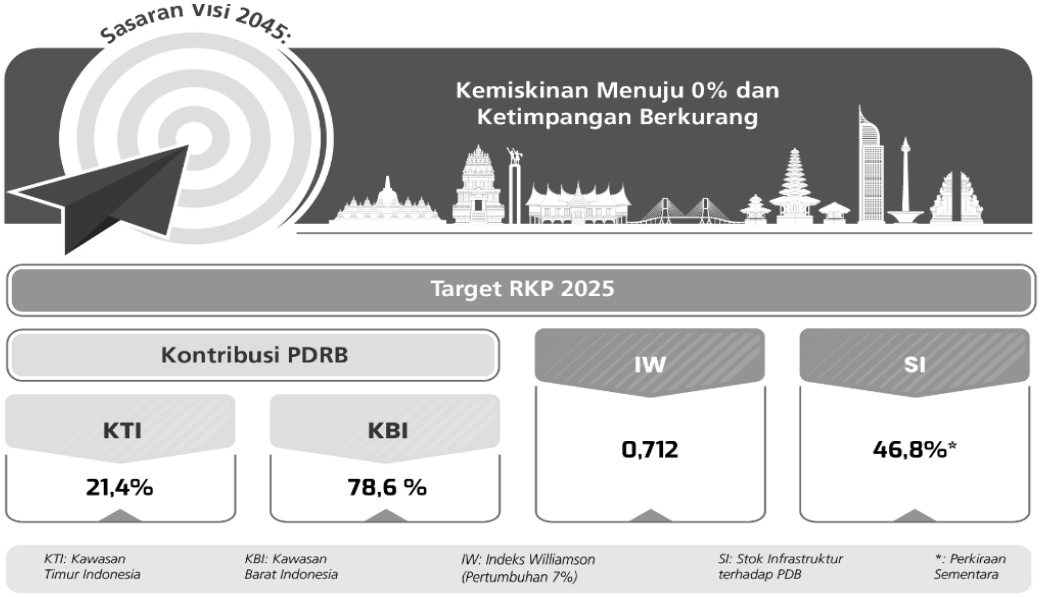

Target Pertumbuhan, Kontribusi dan Tema Pembangunan Per Wilayah Pulau Tahun 2025

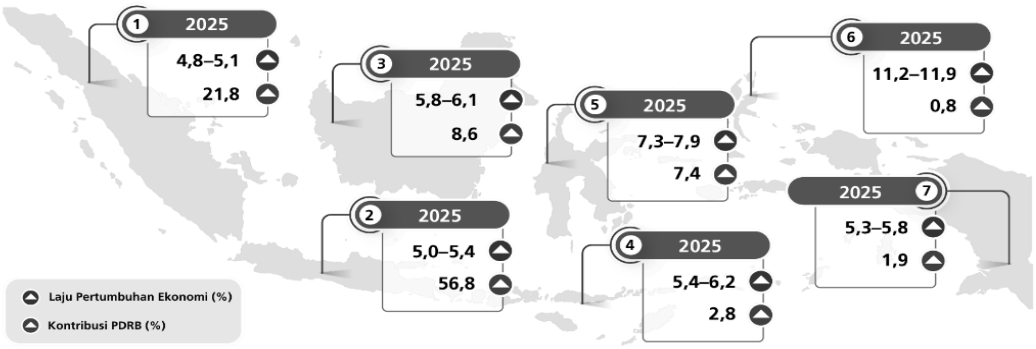

1 Tema Sumatra
Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan

2 Tema Jawa
Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan

3 Tema Kalimantan
Superhub Ekonomi Nusantara

4 Tema Bali-Nusra
Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional

5 Tema Sulawesi
Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

6 Tema Maluku
Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia

7 Tema Papua
Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif

Sumber : Bappenas 2024

Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Kebijakan tersebut didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional yaitu (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

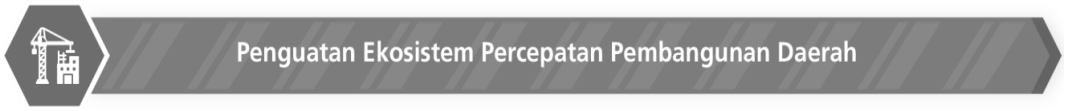

Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission*

Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan

Penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakankerja sama multi aktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)

Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untukmeningkatkan akses dan pemanfaatannya

Penguatan fondasi keuangandaerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah

Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital

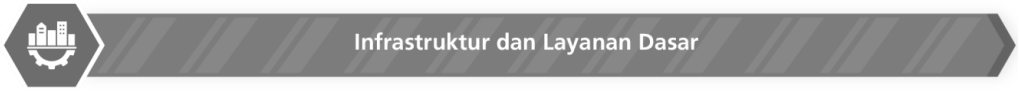

Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA), SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat diutamakan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah	**Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat,** pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, danpenguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	**Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan** termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi	**Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*)** melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air
Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana	**Penuntasan konektivitas digital,** perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular	**Pemenuhan akses air minum dan sanitasi** yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim

Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan diarahkan prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakteristik wilayah. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan

Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan

Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan

Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Pengelolaan Pusat Pertumbuhan

Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan didukung oleh konektivitas yang memadai dan **kelembagaan yang adaptif**

Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan sumber daya alam, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting

Penuntasan dan pemanfaatan proyek strategis nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan *carry over* proyek strategis nasional serta penguatan kerjasama pengelolaan proyek strategis nasional

Selain kebijakan umum yang telah disampaikan sebelumnya, juga terdapat intervensi-intervensi spesifik yang akan diimplementasikan pada setiap provinsi untuk mendukung setiap prioritas nasional yang termuat dalam dokumen Rancangan RKP Tahun 2025.

5.2 Pembangunan Kewilayahan

Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatera Tahun 2025

Kawasan Pusat Pertumbuhan dan daerah afirmasi

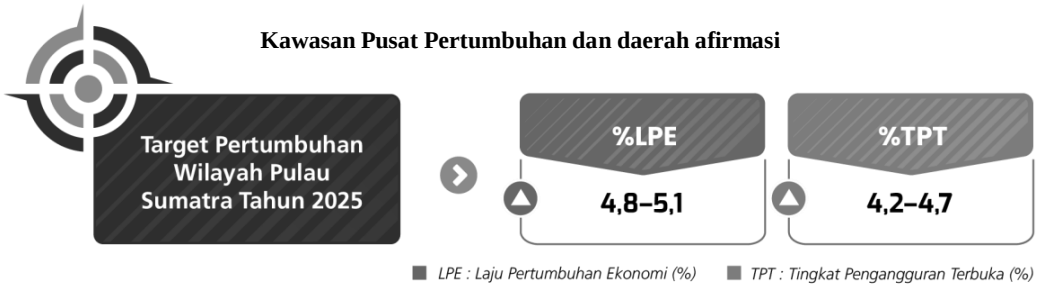

KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN DAERAH AFIRMASI

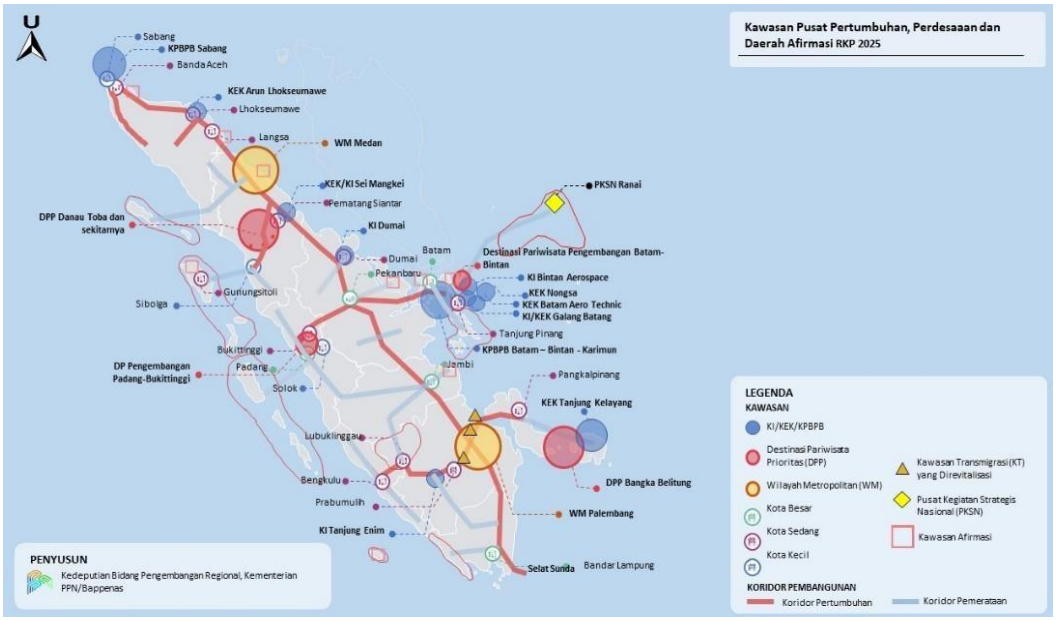

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publikteng
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Penguatan Lanal Lampung guna penguatan keamanan *global maritime trade route* di Selat Sunda (Alur Laut Kepulauan Indonesia-1) • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Fasilitasi *business matchmaking startup digital* • Fasilitasi *digital technopreneur* • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Peningkatan produktivitas tebu, kopi, ragam tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan, terutama di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesisir Barat • Penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui upaya peningkatan produktivitas padi dan pangan nabati lainnya, terutama pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Mesuji • Area penyaluran benih padi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung

	• Sarana pascapanen padi untuk mendukung pengembangan kawasan padi • Pengembangan kawasan peternakan kambing di Kabupaten Pringsewu Pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Bts. Kota Baturaja - Bts. Prov. Lampung • Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Sekampung • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Perencanaan dan Pengawasan Teknik / Survei Topografi Tugu Cokelat, Pesawaran – Gedongtataan • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Peningkatan kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri pada Sekolah Menengah Kejuruan Unggul Terpadu Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah • Penguatan tata kelola manajemen, kompetensi serta manajemen talenta dan karir aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah di Lampung • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, terutama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Tanggamus • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Pengembangan perguruan tinggi *science, technology, engineering and mathematics* unggulan pada Universitas Lampung melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Higher Education for Technology and Innovation Project” • Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

5.3 KEBIJAKAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN

Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Tanggamus yaitu :

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung
2) Jalan Nasional : adalah jalan yang membentang di sepanjang pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera (Pringsewu - Kota Agung - Bengkunat Belimbing).

Sedangkan kebijakan RTRW Provinsi Lampung dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : adalah Wonosobo dengan kegiatan utama pusat pengembangan perdagangan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
3) Sistem jaringan jalan, yaitu :
    a) Jaringan jalan Kolektor Primer jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Rantau Tijang - Kota Agung - Wonosobo – Sanggi.
    b) Jaringan jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jaringan jalan strategis merupakan jalan yang memiliki status sebagai jalan provinsi terdiri dari Talang Padang - Ulu Belu - Ulu Semong – Suoh - Sukabumi;

Tabel V.1. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI	TITIK REFERENSI	
					AWAL RUAS	AKHIR RUAS
1	036	Sukamara - Kuripan	21,777	JKP-3	Sp. Tiga Pasar Sukamara	Sp. Tiga Kuripan
2	044	Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar	25,157	JKP-2	Sp. Teluk Kiluan	Sp. Umbar
3	045	Sp. Umbar - Putih Doh	20,000	JKP-2	Sp. Tiga Umbar	Sp. Tiga Putih Doh
4	046	Putih Doh - Kuripan	11,746	JKP-2	Sp. Tiga Putih Doh	Sp. Tiga Kuripan
5	047	Kuripan - Sp. Kota Agung	22,215	JKP-2	Sp. Tiga Kuripan	Sp. Tiga Kagungan (Jalan Nasional)
6	050	Sp. Blok 9 - Sanggi	20,873	JKP-3	Sp. Tiga Blok 9	Sp. Tiga Sanggi (Jalan Nasional)
7	056	Talang Padang - Ngarip	35,600	JSP	Sp. Tiga Pasar Talang Padang (Jalan Nasional)	Bts. Desa Ngarip
8	057	Ngarip - Ulu Semong	21,500	JSP	Bts. Desa Ngarip	Sp. Tiga Ulu Semong
9	058	Ulu Semong - Sp. Trimulyo	9,660	JSP	Sp. Tiga Ulu Semong	Sp. Tiga Ke Trimulyo
10	060	Tekad - Batu Tegi	8,000	JSP	Sp. Tiga Tekad	Sp. Empat Bendungan Batu Tegi
		JUMLAH	**196,528**			

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.A/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Lampung

Secara garis besar rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanggamus dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.2. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
1	Kota Agung	PKW	• Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Minapolitan • Industri

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
2	Wonosobo	PKL	• Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Kehutanan • Minapolitan
3	Talang Padang	PKLp	• Perdagangan dan Jasa • Pertanian • Pendukung Kegiatan Pertanian
4	Gisting	PKLp	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian
5	Sri Kuncoro Kecamatan Semaka	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Kawasan Lindung
6	Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
7	Pulau Panggung	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
8	Ngarip Kecamatan Ulu Belu	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
9	Margoyoso Kecamatan Sumberejo	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
10	Sukamara Kecamatan Bulok	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
11	Kuripan Kecamatan Limau	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
12	Napal Kecamatan Kelumbayan	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
13	Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Wilayah perdesaan sebagai hinterland kawasan perkotaan dilayani oleh masing-masing pusat kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Untuk kebutuhan yang lebih besar, wilayah perdesaan dilayani oleh adanya PPK di Kabupaten Tanggamus.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman.

5.3.1 Kawasan Hutan Rakyat

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah agraris yang sektor perkonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Saat ini di Kabupaten Tanggamus terdapat penggunaan lahan berupa hutan rakyat, yaitu seluas 35.383 Ha merupakan luasan yang relatif besar dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

5.3.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Selain berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan Kawasan Penruntukan Pertanian di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 8 yang menetapkan luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebesar 18.690 Ha. Menindaklanjuti hal tersebut maka untuk menjaga ketersediaan pangan dan mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Tanggamus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan tersebut disusun dengan cara melakukan updating dan pemetaan lahan pertanian secara geospasial yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga ditetapkan luasan LP2B seluas 16.331,65 Ha.

Tabel V.3. Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LP2B (Ha)	KETERANGAN
1	Air Naningan	302,54	
2	Bandar Negeri Semuong	653,93	
3	Bulok	796,30	
4	Cukuh Balak	581,71	
5	Gisting	343,02	
6	Gunung Alip	1.160,57	
7	Kelumbayan	502,84	
8	Kelumbayan Barat	273,78	

NO	KECAMATAN	LUAS LP2B (Ha)	KETERANGAN
9	Kota Agung	431,15	
10	Kota Agung Barat	757,14	
11	Kota Agung Timur	834,64	
12	Limau	192,32	
13	Pematang Sawa	636,56	
14	Pugung	1.850,66	
15	Pulau Panggung	1.097,18	
16	Semaka	1.824,99	
17	Sumberejo	792,50	
18	Talang Padang	1.029,54	
19	Ulu Belu	587,60	
20	Wonosobo	1.682,69	
	Jumlah	**16.331,65**	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam rangka mengantisipasi perubahan luasan LP2B, ditetapkan juga luasan Lahan Cadangan P2B seluas 1.436,12 Ha.

Tabel V.4. Luasan dan Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Air Naningan	57,89	
2	Bandar Negeri Semuong	32,51	
3	Bulok	0	
4	Cukuh Balak	0	
5	Gisting	0	
6	Gunung Alip	164,52	
7	Kelumbayan	85,73	
8	Kelumbayan Barat	126,90	
9	Kota Agung	6,76	
10	Kota Agung Barat	0	
11	Kota Agung Timur	0	
12	Limau	2,36	
13	Pematang Sawa	0	
14	Pugung	367,19	
15	Pulau Panggung	125,35	
16	Semaka	358,02	
17	Sumberejo	0	
18	Talang Padang	0	
19	Ulu Belu	108,89	
20	Wonosobo	0	

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
	Jumlah	**1.436,12**	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu :

a) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
   Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung.

b) Kawasan Peruntukan Holtikultura
   Kawasan peruntukan holtikultura dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian.

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan
   Keadaan topografi Kabupaten Tanggamus yang hampir 50% nya adalah wilayah bukit dan pegunungan membuat Kabupaten Tanggamus potensial akan daerah perkebunan. Luas total areal rencana peruntukan perkebunan di Kabupaten Tanggamus adalah 69.971 Ha tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, yang didominasi oleh Kelapa, Kopi dan Kakao. Komoditas Kelapa, Kopi dan Kakao hampir merata tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Dari ketiga komoditas yang dominan tersebut, komoditas kopi robusta dan kakao menjadi komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif. Luas lahan kopi robusta dan kakao cukup dominan jika dibandingkan dengan komoditas lannnya. Bahkan untuk kopi robusta, Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan program penanaman bibit kopi robusta dengan teknologi kultur jaringan. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan
   Kawasan peruntukan peternakan berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
e) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
   Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tanggamus dibedakan menjadi tiga jenis ternak sesuai dengan ukuran dan jenis ternak yaitu ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Peternakan besar di arahkan di Kecamatan Wonosobo, Gisting, Talang Padang dan Sumberejo. Sedangkan kawasan peternakan kecil diarahkan di Kecamatan Gisting, Pulau Panggung, Talang Padang, Sumberejo, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat. Untuk kawasan peternakan unggas diarahkan di Kecamatan Talang Padang dan Sumberejo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk beberapa komoditas. Komoditas yang akan dikembangkan di Kabupaten Tanggamus antara lain padi (tanaman pangan), cabai, bawang merah, bawang putih, pisang dan manga (hortikultura), kopi dan lada (perkebunan) serta kambing (peternakan).

5.3.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berasal dari 3 (tiga) jenis perikanan, yaitu (1) Perikanan tangkap, yang terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum, (2) Perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar, payau dan laut dan (3) Pengolahan Hasil Perikanan.

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap tahun 2023 yaitu perikanan laut sebanyak 5.704 rumah tangga dan perairan umum sejumlah 212 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kecamatan Kota Agung dengan 1.389 rumah tangga sedangkan untuk perairan umum yaitu Kecamatan Air Naningan dengan 212 rumah tangga. Produksi perikanan laut pada tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus mencapai 44.524,57 ton mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 41.263,43 ton, sedangkan untuk produksi perairan umum mencapai 361,7 ton tidak mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 367,89 ton. Sebanding dengan jumlah rumah tangga perikanannya, Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan dengan produksi perikanan laut terbanyak

dari 10.942,73 ton pada tahun 2022 menjadi 11.141,12 ton pada tahun 2023.Jumlah rumah tangga perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 2.808 rumah tangga yang terdiri dari perikanan budidaya tambak sebanyak 205 rumah tangga dan kolam sebanyak 2.603 rumah tangga. Produksi perikanan budidaya sebesar 4.740,63 ton yang terdiri atas produksi perikanan tambak sebesar 2.314 ton dan kolam 2.427 ton. Produksi perikanan budidaya tambak terbesar pada tahun 2023 terdapat di Kecamatan Kota Agung dengan 657,89 ton dan kolam terdapat di Kecamatan Pugung dengan 1.140,45 ton. Sedanglan jumlah perahu/kapal pada tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor sebanyak 135 perahu, perahu motor tempel sebanyak 1.415 perahu dan kapal motor sebanyak 291 perahu.

Hasil tangkapan di laut terbesar bersumber dari Kecamatan Kota Agung yang merupakan wilayah kawasan minapolitan tangkap. Hasil tangkapan yang didapat antara lain layang, selar, kapas-kapas, kurisi, tongkol, kembung, layur, bentong dan lain-lain. Untuk produksi budidaya perikanan air tawar terbesar di sumbang oleh Kecamatan Pugung, Wonosobo dan Talang Padang yang didominasi oleh ikan mas, lele, nila dan gurame. Budidaya perikanan tambak (payau) terbesar disumbang oleh Kecamatan Limau, Kota Agung Barat, Kelumbayan dan Cukuh Balak yang didominasi oleh udang vaname, nila, bandeng dan jenis udang lainnya. Sedangkan untuk sentra produksi pengolahan hasil perikanan seperti penggaraman, pengasapan, dan jelly ikan terpusat di Kecamatan Limau.

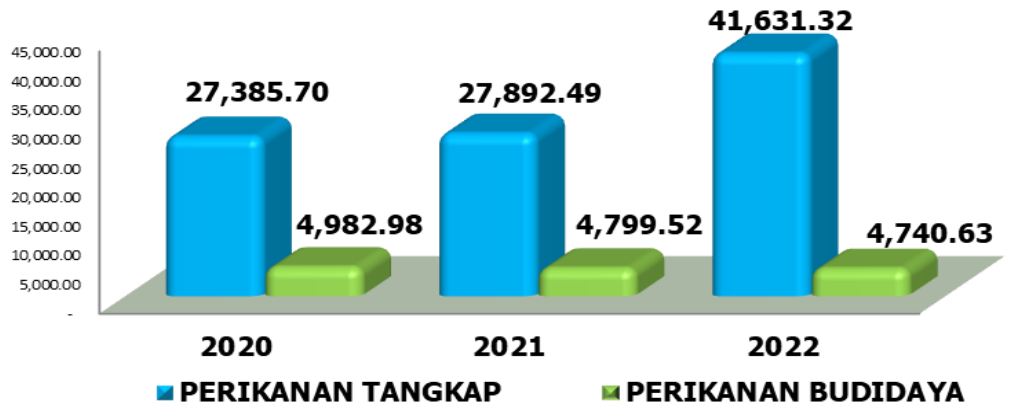

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2024

5.3.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah usaha pertambangan terdiri atas peruntukan pertambangan mineral, pertambangan batu bara dan Panas Bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral
   Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanggamus.
b) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu Bara
   Kawasan peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Naningan.
c) Kawasan Peruntukan Pertambangan Panas Bumi
   Kawasan peruntukan panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Belu.

Sedangkan wilayah pertambangan rakyat meliputi mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kota Agung dengan potensi pertambangan paling banyak terdapat di Kecamatan Pugung.

Tabel V.5 Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
1	Wonosobo	Pasir, Granit, Silika/Batu Kuarsa, Andesit, Sirtu, Pasir
2	Semaka	Granit, Andesit, Sirtu, Pasir
3	Bandar Negeri Semuong	Emas, Andesit, Pasir, Sirtu
4	Kota Agung	Andesit, Pasir, Sirtu...
5	Pematang Sawa	Andesit, Batu Apung, Batu Bara, Sirtu, Pasir
6	Kota Agung Timur	Zeolit, Andesit, Sirtu, Pasir
7	Kota Agung Barat	Andesit, Pasir, Sirtu
8	Pulau Panggung	Andesit, Batubara
9	Air Naningan	Batubara, Silika/Batu Kuarsa, Andesit
10	Ulu Belu	Belerang (Panas Bumi), Andesit
11	Talang Padang	Andesit
12	Sumberrejo	Andesit
13	Gisting	Andesit

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
14	Gunung Alip	Andesit
15	Pugung	Mangan, Batubara, Batu Gamping, Bentonit, Lempung, Silika (Batu Kuarsa), Pasir Kuarsa, Andesit, Marmer, Seng
16	Bulok	Bijih Besi, Andesit
17	Cukuh Balak	Emas, Pasir Besi, Zeolit, Andesit, Pasir, Sirtu
18	Kelumbayan	Batubara, Emas, Galena, Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Sirtu, Pasir
19	Limau	Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Pasir, Sirtu
20	Kelumbayan Barat	Emas, Galena, Batubara, Andesit, Sirtu, Pasir

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2024

5.3.5 Kawasan Peruntukan Industri

Industri di Kabupaten Tanggamus didominasi oleh Industir Kecil dan Menengah yang meliputi beberapa jenis, yaitu industri pangan, kerajinan umum, kimia bahan bangunan, jasa, logam dan industri pengolahan lainnya. Nilai investasi paling besar terserap pada kegiatan konveksi dengan tingginya nilai investai tersebut tentunya diharapkan sektor industri tersebut dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Tanggamus. Untuk kedepannya perlu pemantauan terhadap sektor-sektor industri yangmemiliki nilai investasi paling tinggi, sehingga kegiatan perekonomian yang dipengaruhi oleh sektor industri dapat terus berjalan dengan baik.

Industri pangan yang ada di Kabupaten Tanggamus berjumlah 841 industri, mulai dari industri perkebunan, hingga kehutanan. Jenis industri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus adalah industri pengolahan kebutuhan pokok, dan sisanya adalah industri kehutanan yang berkaitan dengan kebutuhan peralatanrumah tangga. Industri yang banyak dilakukan di Kabupaten Tanggamus adalah industri anyaman bambu dengan jumlah 598 unit.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dari 27 Kawasan Industri yang ada dibagi menjadi 9 Kawasan Industri Prioritas Nasional dan 18 Kawasan Industri yang Dikembangkan, pada Pulau Sumatera terdapat 10 KI dan 4 KEK, dimana Kawasan Industri Tanggamus (KIT) menjadi salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan.

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI, 2024

Disamping pengembangan Kawasan Industri Tanggamus, di Kabupaten Tanggamus juga direncanakan akan dibangun Kawasan Industri Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan RI dengan membangun PT. Pindad dan PT. PAL yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan Kawasan Industri Tanggamus atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka telah ditandatangani MoU antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Pj. Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T. dengan Rektor Unhan Mayjen TNI DR. Yoedhi Swastanto, disamping itu juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait pembangunan Kawasan Industri Pertanahan.

Secara umum pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

a) Kawasan peruntukan industri besar, dikembangkan industri maritim berupa industri perkapalan dan manufaktur yang terdapat di Teluk Semangka berlokasi di Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak, industri pertahanan yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan KIT atau mengarah ke Hutan Lindung Register

27 serta Kecamatan Pulau Panggung untuk industri olahan hasil pertanian.

b) Kawasan peruntukan industri sedang, dikembangkan di Kecamatan Gisting, Talang Padang, Pulau Panggung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Kota Agung, Sumberejo, Wonosobo, Semaka dan Pematang Sawa.
c) Kawasan peruntukan industri kecil, dikembangkan di seluruh Kabupaten Tanggamus, dikembangkan dalam bentuk klaster industri.

5.3.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kondisi fisik geografis Kabupaten Tanggamus yang bervariasi dengan bentuk daratan berupa bukit dan pegunungan serta berbatasan langsung dengan Teluk Semangka cukup banyak memberikan potensi wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus, obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tanggamus cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, dengan jenis wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan. Wisata-wisata yang ada di Kabupaten ini umunya masih belum diolah secara optimal.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus selain meningkatkan pengelolaan yang ada juga menggali potensi pariwisata yang belum dikelola. Pulau Tabuan salah satu pulau kecil di Kabupaten Tanggamus memiliki prospek pengembangan untuk kegiatan pariwisata.

Tabel V.6 Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Pantai Mulang Sayang	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
2	Pantai Bahari	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
3	Pantai Mutiara	Pekon Betung Kec. Pematang Sawa
4	Pantai Batu Malang	Pekon Telukbrak Kec. Pematang Sawa
5	Pantai Batu Kebo	Pekon Kaur Gading Kec. Pematang Sawa
6	Pantai Cukuh Pandan	Pekon Tampang Tua Kec. Pematang Sawa
7	Pantai Harapan	Pekon Guring Kec. Pematang Sawa
8	Pantai Soumil	Pekon Karang Anyar Kec Wonosobo
9	Pantai Harapan	Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Barat
10	Pantai Digul	Pekon Tanjung Agung Kec. Semaka
11	Pantai Karang Teritos	Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
12	Pantai Terbaya	Pekon Terbaya Kec. Kota Agung
13	Pantai Teba	Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur
14	Pantai Pihabung	Pekon Suka banjar Kec. Kota Agung Timur
15	Pantai Kerta	Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur
16	Pantai Karang Putih	Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak
17	Pantai Teluk Tengor	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
18	Pantai Cumuk	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
19	Pantai Badak Indah	Pekon Badak Kec. Cukuh Balak
20	Pantai Karang Indah	Pekon Ketapang Kec. Limau
21	Pantai Karang Bolong	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
22	Pantai Harapan Jaya	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
23	Pantai Batu Naga	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
24	Pantai Selancar	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
25	Pantai Pasir Putih	Pekon Kiluan Kec. Kelumbayan
26	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
27	Pantai Karang Mulya	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
28	Pantai Harapan	Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan
29	Pantai Batu Suluh	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
30	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
31	Pantai Karang Bebay	Pekon Tengor Kec. Cukuh Balak

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel V.7 Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Waduk Batu Tegi	Way Harong Kec. Air Naningan
2	Dam Margo Tirto	Landsbaw Kec Gisting

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel V.8 Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Air Terjun Way Lalaan	Kampung Baru K Kec. Kota Agung Timur
2	Air Terjun Lembah Pelangi	Suka Maju Kec. Ulu Belu
3	Air Terjun Tirai	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
4	Air Terjun Jarum	Datar Lebuay Kec. Air Naningan

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
5	Air Terjun Ratu	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
6	Air Terjun Beranak	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
7	Air Terjun Batu Lapis	Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
8	Air Terjun Curup	Air Bakoman Kec. Pulau Panggung
9	Air Terjun Talang Ogan	Talang Ogan Kec. Sumberjo
10	Air Terjun Jeram Semaka TNBBS	Kec.Semaka
11	Air Terjun Curup Way Kerap	Way Kerap Kec. Semaka
12	Air Terjun Mak Kunyana	Teratas Kec. Kota Agung
13	Air Terjun Lamuran	Teratas Kec. Kota Agung
14	Air Terjun Batu Kramat Sari	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
15	Air Terjun Cihandak	Kec. Air Naningan
16	Air Terjun Tirta Rima	Margoyoso Kec. Sumberjo
17	Air Terjun Kelahang	Taman Sari Kec. Limau
18	Air Terjun Asmara	Datarajan Kec. Ulu Belu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel V.9 Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Ekowisata Tampang Blimbing	Kec. Pematang Sawa
2	TNBBS	Sedayu Kec. Semaka
3	Lembah Sanggi	Sanggi Kec. Semaka
4	Gua Walet Putih	Kec. Kelumbayan
5	Karang Bebay	Kec. Cukuh Balak
6	Pulau Kelapa (Kiluan)	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
7	Pulau Tabuan	Tabuan Kec. Cukuh Balak
8	Eko Wisata Cikal Negri	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
9	Base Camp Sono Keling	Sidokaton Kec. Gisting
10	Danau Hijau	Muara Dua Kec. Ulu Belu
11	Sumber Air Panas Ulu Belu	Muara Dua Kec. Ulu Belu

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
12	Pulau Tanjungan	Air Naningan Kec. Air Naningan
13	Puncak Batu Kapal	Way Harong Kec. Air Naningan
14	Tanjung Harapan	Way Harong Kec. Air Naningan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel V.10 Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KOLAM RENANG	ALAMAT
1	Villa Q	Gisting Bawah Kec. Gisting
2	Buterfly	Gisting Atas Kec. Gisting
3	Hosana	Gisting Bawah Kec. Gisting
4	VIP	Gisting Bawah Kec. Gisting
5	Villa Voda Batu Kramat	Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur
6	Kodim	Waysem Kec. Kota Agung Timur
7	Suharto	Pasar Madang Kec.Kota Agung

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel V.11 Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT	KECAMATAN
1	Makam Gunung Putri	Tiuh Memon	Pugung
2	Makam Ratu Sangkhira	Tiuh Memon	Pugung
3	Gua Semedi	Penyandingan	Kelumbayan
4	Makam Kuno	Padang Manis	Wonosobo
5	Gunung Dalom	Karangbrak	Pematang Sawa

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

Tabel V.12 Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	Megalitik Batu Gajah	Budaya Hindu Budha	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
2	Arca Nandi	Hindu	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
3	Situs Batu Tulis	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
4	Prasasti Batu Bedil	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
5	Meriam Belanda	Peninggalan Belanda	Negeri Kelumbayan	Kelumbayan
6	Pusaka Kuno	-	N. Kelumbayan	Kelumbayan
7	Keris Singa Khalang	-	Pekon Unggak	Kelumbayan
8	Tugu Pidato Presiden RI	-	Kelurahan Kuripan	Kota Agung
9	Japan	Japan	Pantai Laut	Kota Agung
10	Barang Pusaka	Kerajaan Pajajaran	Pajajaran	Kota Agung Barat
11	Taboh Adat Beban	Adat	Tala Gening	Kota Agung Barat
12	Barang-Barang Kuno	Warisan	Sanggi Unggak	Bandar Negeri Semuong

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

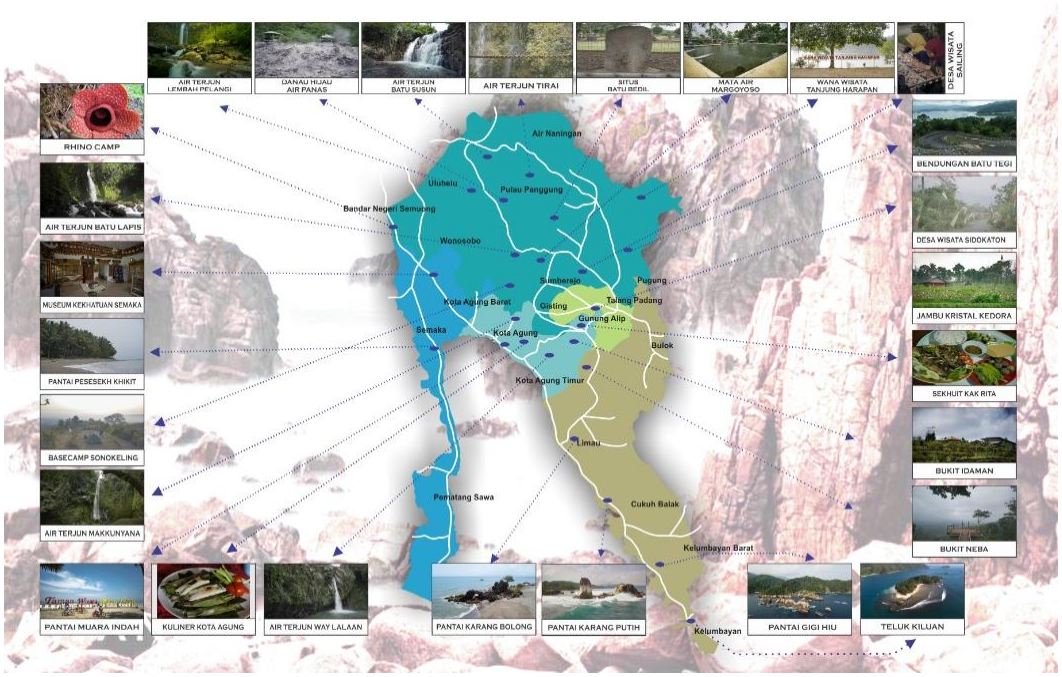

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2024

5.3.7 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

a) Permukiman Perkotaan

Mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanggamus maka Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, Gisting, dan

Talang Padang akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai, beberapa sektor perkotaan terkonsentrasi di keempat kecamatan tersebut. Secara eksisting, jumlah penduduk di Kawasan perkotaan mencapai 184.774 jiwa. Untuk perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Talang Padang dan Gisting. Sedangkan Kecamatan Wonosobo, diarahkan untuk perumahan dengan kepadatan menengah.

Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dikembangkan di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

b) Permukiman Pedesaan

Pemukiman pedesaan merupakan permukiman yang cukup dominan berada di Kabupaten Tanggamus. Secara umum kawasan permukiman perdesaan ini memiliki karakter, sebagian besar penduduk bekerja sektor pertanian, kondisi perumahan yang cukup renggang, distribusi mengelompok namun tersebar dan memiliki keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana. Secara eksisting masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanggamus mencapai 399.901 jiwa. Kawasan perumahan pedesaan merupakan perumahan dengan kepadatan rendah.

Kawasan peruntukan pemukiman pedesaan dikembangkan menyebar pada wilayah Kabupaten Tanggamus, terutama pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal.

5.3.8 Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya

Kawasan budidaya peruntukan lainnya di Kabupaten Tanggamus meliputi peruntukan pertahanan dan keamanan, kawasan pengembangan sektor informal, kawasan pesisir, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dan ruang dalam bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

1. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Kota Agung Timur dan Kota Agung;
2. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan;

3. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus; dan
4. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
5. Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

b) Kawasan Pengembangan Sektor Informal

Kawasan pengembangan sektor informal diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

c) Kawasan Pesisir

Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Peluang tersebut adalah dalam keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat yang didukung oleh potensi masing-masing sumber daya, baik barang maupun jasa. Di sisi lain perpaduan kewilayahan ini juga akan membuka peluang untuk timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah pengembangan ini. Dalam rangka untuk menjalankan tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Tanggamus pada umumnya dan pembangunan kawasan pesisir dan laut pada khususnya, maka diperlukan strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Tanggamus yang matang dan terarah dengan melibatkan peran serta semua stakeholder. Strategi ini akan memberikan arah dan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan yang lebih terinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi di masa mendatang.

Visi yang dikembangkan dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus adalah "Terwujudnya Kawasan Pesisir

Kabupaten Tanggamus yang Bersih, Indah, Aman, Tertata dan Produktif yang Dikelola secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat"

d) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

e) Pengembangan Ruang Dalam Bumi

Rencana ruang dalam bumi meliputi :

1. Wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/ eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
2. Wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;
3. Wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus yang telah dibahas pada Bab IV, dengan memperhatikan pada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2023, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta pagu indikatifnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan. Seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 merupakan akumulasi dari tahapan perencanaan, melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, *top down* dan *bottom up*.

Beberapa pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025 dengan melibatkan pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Penentuan program dan kegiatan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Daerah Kabupaten Tanggamus.

Matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara terperinci berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Perkiraan anggaran

disusun berdasarkan pilar pembangunan yang telah ditetapkan menurut SKPD yang akan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahun 2025.

Peralihan paradigma dalam penyusunan anggaran saat ini mengalami perubahan dari *money follow function* ke prinsip *money follow program* yang berbasis *outcome* menuntut agar pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penganggaran *money follow program* juga mendukung pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu perencanaan yang *tematik* (terfokus), *holistik* (menyeluruh), integratif (terpadu) dan spasial (lokasi yang jelas). Pada kondisi penuruan belanja, maka *money follow program* diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; relokasi dari program dan kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya; dan efisiensi program dan kegiatan non prioritas.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrument untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policydriven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dilakukan dengan penguatan kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep ***Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS)** sebagai berikut:

1) ***Tematik*** *:* Kebijakan yang dilaksanakan yaitu menentukan tema pembangunan yang merupakan kristalisasi dari penyatuan unsur-unsur yang terkait dengan pokok permasalahan pembangunan dan

memperhatikan potensi yang ada di daerah sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

Sebagai contoh dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mengatasi kelangkaan pangan yang berdampak pada inflasi maka ditentukan tema pembangunan yaitu Kedaulatan Pangan.

2) ***Holistik*** : Kebijakan yang dilaksanakan yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas serta melakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan *stakeholders* yang terkait.

   Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikulturan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Komisi Irigasi (Komir), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

3) ***Integratif*** *:* Kebijakan yang dilaksanakan yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan.

   Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, penyedian pupuk, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).

4) ***Spasial*** : Kebijakan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

   Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, serta pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep ***Tematik, Holistik, Integratif,*** **dan** ***Spasial*** **(THIS)** ini yaitu :

1) **Sasaran Pembangunan**; fokus pada pencapaian prioritas pembangunan.
2) **Arah Kebijakan**; kebijakan yang menyeluruh pada setiap prioritas pembangunan.
3) **Kerangka Regulasi**; memberikan kemudahan dan mengurangi beban masyarakat, mendorong potensi kreatif, mendorong efektivitas dan efisiensi, serta memiliki nilai tambah atau insentif.
4) **Kerangka Kelembagaan**; tidak ada tumpeng tindih fungsi/kewenangan, tata Kelola dan hubungan kerja yang sinergis antar fungsi/kewenangan, tersedianya ASN yang professional dan memberikan daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pebangunan.
5) **Kerangka Kewilayahan**; setiap kegiatan memiliki lokasi yang jelas (koordinat), keterkaitan lokasi dalam mencapai sasaran program prioritas dan distribusi kegiatan antar wilayah.
6) **Kejelasan Pelaksana Kegiatan**; siapa berbuat apa (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD), memiliki indikator yang jelas dan terukur dan memiliki tahapan kegiatan prioritas.
7) **Kejelasan Sumber Pembiayaan**; penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, APBD, Pinjaman Daerah maupun Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Gambar VI.1 Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Salah satu bentuk implementasi kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) di Kabupaten Tanggamus adalah disusun koridor percepatan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh yang memuat tema dan lokasi pengembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Gambar VI.2 Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus

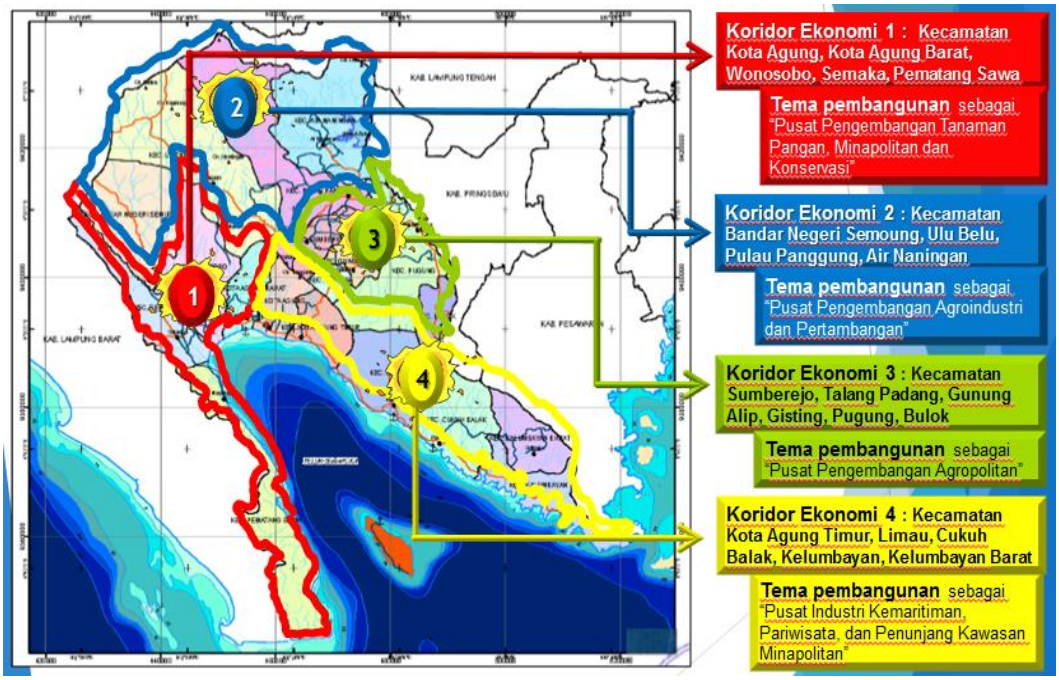

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan hasil perpaduan usulan tingkat Pekon, tingkat Kecamatan dengan usulan Perangkat Daerah, dapat diketahui usulan dana pembangunan untuk tahun 2025 yang dibiayai APBD Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			649.087.718.805,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			648.590.093.665,00					
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			648.590.093.665,00					
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	503.132.070.915,00					
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kiner	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	105.000.000,00			-		
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	501.078.218.065,00			-		
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3742 Orang/bulan	499.081.211.815,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.877.006.250,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangk	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	57.327.000,00			-		
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	57.327.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	100%	314.163.750,00			-		
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	28.536.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	171.117.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	114.510.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	777.762.500,00			-		
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	29.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	748.762.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	658.420.000,00			-		
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.520.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	498.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang U	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik	100%	141.179.600,00			-		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.853.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 Unit	97.326.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	89 %	145.417.515.000,00					
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	100%	81.002.697.750,00			-		
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	96.322.700,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Purwodadi Kab. Tanggamus, Gisting, Gisting Permai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2231 Orang	12.383.953.750,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	133.490.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								

							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	400 Satuan Pendidikan	48.085.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	400 Satuan Pendidikan	51.750.835.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	16.162.124.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	427.886.800	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Per	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik	100%	40.785.630.500,00			-		
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	32.235.500,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom Kab. Tanggamus, Gisting, Gisting Permai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1264 Orang	5.906.092.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	51 Satuan Pendidikan	46.237.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan	20.483.300.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	51 Satuan Pendidikan	29.282.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17 Ruang	13.988.481.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas baik	100%	17.268.894.600,00			-		
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1258 Orang	6.631.537.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	495 Satuan Pendidikan	128.948.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								

							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	9.930.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD								
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	495 Orang	95.520.000,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	400.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	323 Satuan Pendidikan	82.288.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sarpras Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas baik.	100%	6.360.292.150,00			-		
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan								
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								

							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	28.963.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	4.488.300.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	323 Orang	19.799.150,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	63 %	40.507.750,00					
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Persentase Penetapan Penggunaan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar SD	100%	40.507.750,00			-		
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	250 Orang	40.507.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			497.625.140,00					
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			497.625.140,00					
4	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	77.083.540,00					

	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	100%	77.083.540,00			-		
	2	22	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	77.083.540,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaaan lokal yang Difasilitasi Pengembanganya	100 %	234.427.400,00					
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pela	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	190.266.000,00					
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	190.266.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya da	Persentas Lembaga Adat yang yang di beri Pembinaan	100%	44.161.400,00					Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat								
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	44.161.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADIS	Persentase Kelompok Kesenian yang Difasilitasi Pengembanganya	0%	0,00					
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakuny	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,00					
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
7	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Penerbitan Dokumen Sejarah	100 %	122.096.700,00					

	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	122.096.700,00					
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2 Orang	39.446.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah								
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	82.650.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
8	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN C/	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang Teregister	100 %	64.017.500,00					
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	64.017.500,00			-		
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	28.702.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	35.315.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Kesehatan			131.550.478.673,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			131.550.478.673,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			131.550.478.673,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	60.616.337.652,00					
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	105.450.000,00			-		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17.250.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.150.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	28.050.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	59.436.887.974,00			-		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	755 Orang/bulan	59.081.707.974,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	520.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	345.110.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.550.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100 %	55.587.000,00			-		
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	55.587.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12.500.000,00			-		
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	12.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	399.123.100,00			-		
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.045.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	18.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	15.978.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	70.400.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 0	33.773.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	34.290.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	218.637.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	18.008.378,00			-		
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	9.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.408.378,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	183.540.000,00			-		
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	183.540.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	405.241.200,00			-		
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	235.491.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	19.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.850.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100%	61.600.123.171,00					
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik	100%	38.633.265.840,00			-		
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas								
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	2.600.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	17.058.454.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								

							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	1.705.500.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	4.759.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	2.138.854.010,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	10.371.457.830,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	22.899.034.331,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12376 Orang	394.822.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12317 Orang	308.180.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11738 Orang	727.883.840,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		-
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23726 Orang	24.999.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		-
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99513 Orang	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								

							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418019 Orang	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77211 Orang	41.599.850,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132559 Orang	24.999.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4117 Orang	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		-
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13005 Orang	25.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		-
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15612 Orang	24.990.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	169.765.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	93.519.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	351.039.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	419.210.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	24 Dokumen	24.999.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72 Dokumen	545.915.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1140 Orang	163.974.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	1.232.334.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24 Dokumen	17.282.366.841,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Paket	24.999.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	24.750.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	100 Unit	25.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		-
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	26 Dokumen	24.990.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	26 Unit	242.090.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26 Laporan	20.028.100,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		-
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	20.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	113.040.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	100%	67.823.000,00			-		-
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26 Dokumen	67.823.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-		-
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disusun dengan Baik	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	26 Unit	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	8.993.241.850,00					
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan	100%	19.970.000,00			-		
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24 Dokumen	19.970.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	8.948.625.000,00			-		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	639 Orang	8.948.625.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	24.646.850,00			-		

	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	24.646.850,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100%	295.776.000,00					
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang memiliki izin	100%	295.776.000,00			-		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5000 Dokumen	295.776.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pekon Siaga Kategori Mandiri	100%	45.000.000,00					
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.000.000,00			-		-
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	25.000.000,00			-		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	J U M L A H							**131.550.478.673,00**						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
						Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung			47.854.921.944,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.854.921.944,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			47.854.921.944,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	37.011.518.544,00					
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	52.378.000,00			-		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	28.326.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.510.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	6.663.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.440.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3Laporan	2.238.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.976.058.912,00			-		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan	13.917.678.912,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53.760.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.200.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.420.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	10.316.000,00			-		
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.316.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	103.990.000,00			-		
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	103.990.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	621.271.000,00			-		
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.174.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	32.700.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	106.114.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	81.618.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	94.646.400,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	144.418.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	941.158.800,00			-		
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	864.357.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.580.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.221.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	233.110.400,00			-		
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	207.340.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.770.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	21.073.235.432,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	21.073.235.432,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	6.991.124.650,00					
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik	100%	6.667.373.300,00			-		
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
							0	1 0	40.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	6.600.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	26.873.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	322.550.550,00			-		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	61.421.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	13.995.450,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	196.207.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	21.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10.926.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1Dokumen	19.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disusun dengan Baik	100%	1.200.800,00			-		
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1.200.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	3.852.278.750,00					
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	3.847.418.750,00			-		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	184 Orang	3.847.418.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	4.860.000,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 Orang	4.860.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**47.854.921.944,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Siring Betik			21.289.634.904,00					

	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.289.634.904,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			21.289.634.904,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	1.518.588.904,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100 %	1.518.588.904,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.518.588.904,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100 %	19.771.046.000,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik	100 %	19.771.046.000,00					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	19.771.046.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**21.289.634.904,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12		13
						Puskesmas Wonosobo			1.250.774.718,00					
	X					NON URUSAN			1.250.774.718,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.250.774.718,00					
1	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	1.250.774.718,00					
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100 %	1.250.774.718,00					
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.250.774.718,00	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	J U M L A H								**1.250.774.718,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Sudimoro			1.233.494.400,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00					
1	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100 %	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	44 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	X					NON URUSAN			1.233.494.400,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.233.494.400,00					
3	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	1.233.494.400,00					
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.233.494.400,00			-		
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.233.494.400,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.233.494.400,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Sukaraja			1.696.145.610,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00					
1	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1108 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	58 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	X					NON URUSAN			1.696.145.610,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.696.145.610,00					
3	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.696.145.610,00					
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.696.145.610,00			-		
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.696.145.610,00	Kab. Tanggamus, Semaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
						J U M L A H			**1.696.145.610,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Sanggi			1.371.826.616,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00					
1	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Bandar Negeri Semuong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	X					NON URUSAN			1.371.826.616,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.371.826.616,00					
2	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.371.826.616,00					
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.371.826.616,00			-		
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.371.826.616,00	Kab. Tanggamus, Bandar Negeri Semuong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
						J U M L A H			**1.371.826.616,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Kota Agung			2.629.832.702,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00					
1	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		-
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2313 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		-
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	24 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	X					NON URUSAN			2.629.832.702,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.629.832.702,00					
3	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	2.629.832.702,00					
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	2.629.832.702,00			-		-
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.629.832.702,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**2.629.832.702,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Way Nipah			723.174.558,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			723.174.558,00					

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			723.174.558,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	723.174.558,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	723.174.558,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	723.174.558,00	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Way Nipah	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		-
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	46 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**723.174.558,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Pasar Simpang			1.528.401.988,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.528.401.988,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.528.401.988,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.528.401.988,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.528.401.988,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.528.401.988,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	414 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1808 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	49 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.528.401.988,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Negara Batin			1.338.453.185,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.338.453.185,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.338.453.185,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.338.453.185,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.338.453.185,00			-		-
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.338.453.185,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		-
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	630 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	626 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2084 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4535 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2597 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	110 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	114 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	90 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1111 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	80 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								

							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	572 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	132 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	486 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	100%	0,00					
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		-
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	36 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pekon Siaga Kategori Mandiri	100%	0,00					
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00			-		-
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	65 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.338.453.185,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Pulau Panggung			2.324.740.544,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.324.740.544,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.324.740.544,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	2.324.740.544,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	2.324.740.544,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.324.740.544,00	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**2.324.740.544,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	15
						Puskesmas Ngarip			1.778.679.400,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.778.679.400,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.778.679.400,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.778.679.400,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.778.679.400,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.778.679.400,00	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.778.679.400,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Air Naningan			1.999.167.224,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.999.167.224,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.999.167.224,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.999.167.224,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.999.167.224,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.999.167.224,00	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	77 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.999.167.224,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Talang Padang			2.888.110.319,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.888.110.319,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.888.110.319,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	2.888.110.319,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	1	2.888.110.319,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.888.110.319,00	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2975 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	262535000 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	96 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**2.888.110.319,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Margoyoso			1.133.465.462,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.133.465.462,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.133.465.462,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.133.465.462,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.133.465.462,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.133.465.462,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					

	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.133.465.462,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Gisting			1.680.005.695,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.680.005.695,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.680.005.695,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.680.005.695,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.680.005.695,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.680.005.695,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	74 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	J U M L A H								**1.680.005.695,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Kedaloman			1.171.618.165,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.171.618.165,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.171.618.165,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.171.618.165,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.171.618.165,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.171.618.165,00	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Kedaloman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Kedaloman	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Kedaloman	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Kedaloman	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Kedaloman	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Kedaloman	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.171.618.165,00**					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas

						Sub Kegiatan	Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Rantau Tijang			1.952.593.986,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.952.593.986,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.952.593.986,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.952.593.986,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.952.593.986,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.952.593.986,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.952.593.986,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Sumanda			2.328.322.466,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.328.322.466,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.328.322.466,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	2.328.322.466,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	2.328.322.466,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.328.322.466,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Sumanda	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Sumanda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Sumanda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Sumanda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Sumanda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Pugung, Sumanda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**2.328.322.466,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	15
						Puskesmas Bulok Sukamara			1.430.246.449,00					
	X					NON URUSAN			1.430.246.449,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.430.246.449,00					
1	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.430.246.449,00					
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.430.246.449,00			-		
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.430.246.449,00	Kab. Tanggamus, Bulok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.430.246.449,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Putih Doh			1.887.906.306,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.887.906.306,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.887.906.306,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.887.906.306,00					

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.887.906.306,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.887.906.306,00	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	J U M L A H								**1.887.906.306,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Klumbayan			986.170.034,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			986.170.034,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			986.170.034,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	986.170.034,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	986.170.034,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	986.170.034,00	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	45 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	J U M L A H								**986.170.034,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Antar Brak			1.462.502.974,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.462.502.974,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.462.502.974,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.462.502.974,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.462.502.974,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.462.502.974,00	Kab. Tanggamus, Limau, Atar Brak	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	J U M L A H								**1.462.502.974,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Klumbayan Barat			897.289.576,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			897.289.576,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			897.289.576,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	897.289.576,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	897.289.576,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	897.289.576,00	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**897.289.576,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Sumberejo			751.308.541,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			751.308.541,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			751.308.541,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	751.308.541,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	751.308.541,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	751.308.541,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	100%	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	100%	0,00			-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								

							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	100%	0,00					
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	100%	0,00			-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**751.308.541,00**					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas

						Sub Kegiatan	Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Gunung Sari			1.018.476.000,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.018.476.000,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.018.476.000,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	1.018.476.000,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	1.018.476.000,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.018.476.000,00	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**1.018.476.000,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						Puskesmas Martanda			612.069.038,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			612.069.038,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			612.069.038,00					
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	612.069.038,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik	100%	612.069.038,00			-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	612.069.038,00	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Martanda	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**612.069.038,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			113.362.744.031,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			109.960.944.031,00					
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			109.207.491.531,00					

1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	13.462.307.036,65					
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	160.463.156,00			-		
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	26.184.956,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.690.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.390.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.198.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.551.414.480,65			-		
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	7.870.371.980,65	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							JumlahDokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Dokumen	2.457.962.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	223.080.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengaan Baik	100%	60.000.000,00			-		
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	60.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD	100%	639.184.000,00			-		
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	74.626.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	112.114.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	43.113.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	60.024.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	349.305.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.055.075.000,00			-		
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	356.895.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	698.180.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	996.170.400,00			-		
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	976.170.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan

	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	3,75%	3.463.067.347,00					
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pembangunan Pengaman Sungai Kabupaten Tanggamus	40%	1.415.311.500,00			-		
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	2 Lembaga	167.311.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing								
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	10 Bangunan	1.248.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten	22,74%	2.047.755.847,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5 KM	795.755.847,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								

							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	1.000.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	252.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten	0,58%	8.556.760.000,00					
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	70%	8.556.760.000,00			-		
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	352.220.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	100 Liter/Detik	7.954.435.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7 SR	250.105.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	52%	7.862.106.405,00					
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapat hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	60%	7.862.106.405,00			-		
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								

							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	100 M^3/Hari	6.956.409.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	100 M^3/Hari	605.697.405,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pembangunan, Pengelolaandan Pengembangan Sistem Drainase	100%	105.000,00					
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Drainase Kabupaten Tanggamus	100%	105.000,00			-		
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan								
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan	105.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
6	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	100%	105.000,00					
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tanggamus	100%	105.000,00			-		
	1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota								
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	3 Ton/hari	105.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
7	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	100%	4.160.117.687,00					
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Tanggamus	100%	4.160.117.687,00			-		
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.109.117.687,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan								
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
8	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan/ lingkungan/kawasan yang tertata	100%	7.563.112.178,35					
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tanggamus	100%	7.563.112.178,35			-		
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	25 Kawasan	7.363.112.178,35	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	100%	62.130.955.337,00			-		
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan								
							Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	2.271.482.259,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								

							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	40 KM	947.075.753,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan								
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	20.177.998.209,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan								
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	38.383.439.116,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	960.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	570.634.050,00					
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	371.450.000,00			-		
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi								
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	66.243.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	305.207.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi Konstruksi Kabupaten Tanggamus	100%	199.184.050,00			-		
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	199.184.050,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
11	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	100%	1.438.221.490,00					

	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase RTRW dan RRTR Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan	100%	950.699.490,00			-		
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota								
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	609.566.490,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	341.133.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tanggamus	100%	487.522.000,00			-		
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang								
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	487.417.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	105.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			753.452.500,00					
12	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitas rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana/relokasi program pemerintah kab/kota	100%	509.728.000,00					
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana yang telah tertangani	100%	509.728.000,00			-		
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	509.728.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
13	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layah Huni) yang ditangani	100%	243.724.500,00					
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	243.619.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU								

							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	8 Dokumen	105.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.401.800.000,00					
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			3.401.800.000,00					
14	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	3.401.800.000,00					
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase 'Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.401.800.000,00					
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.401.800.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Satuan Polisi Pamong Praja			12.125.180.502,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.125.180.502,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			12.125.180.502,00					
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	11.690.824.202,00					
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	25.304.000,00			-		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.390.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1.010.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1.010.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.080.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							0	0 0	894.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	11.186.318.293,56			-		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	6.739.035.793,56	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	177 Dokumen	4.367.362.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.920.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	13.816.000,00			-		
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.816.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	122.801.480,00			-		
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	19.060.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	25.650.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120 Paket	18.200.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	690 Paket	27.590.680,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	32.300.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	49.081.028,44			-		
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.181.028,44	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	293.503.400,00			-		
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.852.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	205.286.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.365.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keteriban Umum	100%	434.356.300,00					

	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian gangguan kententraman dan ketertiban umum gangguan kententraman	100%	286.155.600,00			-		
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen	196.940.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota								
							Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	20 Dokumen	89.215.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	95.450.700,00			-		
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40 Laporan	29.633.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	36 Laporan	65.817.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	100%	52.750.000,00			-		
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan	52.750.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	J U M L A H								**12.125.180.502,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			5.685.331.902,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.685.331.902,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			5.685.331.902,00					

1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	4.299.926.902,00					
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	18.506.000,00			-		-
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.042.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	2.844.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	2.544.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2.244.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2.244.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.644.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.944.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.720.410.782,00			-		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.959.981.782,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	1.690.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.020.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.909.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	10.316.000,00			-		
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.316.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	49.000.000,00			-		-
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	49.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	49.735.720,00			-		
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	103 Paket	7.550.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	204 Paket	9.957.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	70 Paket	1.808.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	441 Paket	8.584.320,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	21.836.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	62.150.000,00			-		
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.150.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	389.808.400,00			-		
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	71.340.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	289.578.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28.890.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
2	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100%	1.385.405.000,00					
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.222.405.000,00			-		
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	86 Laporan	819.030.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	14.875.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	8 Orang	80.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	90 Unit	278.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang dilakukan	100%	163.000.000,00			-		
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	302 Orang	150.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	302 Desa/Kelurahan	3.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana								
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
								J U M L A H	**5.685.331.902,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			7.011.205.523,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.011.205.523,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			7.011.205.523,00					
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	3.719.862.417,83					
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	10.326.600,00					
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.310.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.544.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.072.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	300.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	300.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.400.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	2.461.280.167,83			-		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.820.125.167,83	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	581.875.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
							Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	59.280.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	13.816.000,00			-		
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.816.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	54.355.000,00					
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	54.355.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	186.068.450,00					
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.042.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	57.771.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.982.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13.486.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.926.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	77.860.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik"	100%	300.000.000,00			-		
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	159.800.000,00					
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.800.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	534.216.200,00			-		-
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.170.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	419.191.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya								
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	14.490.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.365.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,5 Skor	3.291.343.105,17					
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	422.105.500,00					
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	2.111.054.900,40					
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								

							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	16.750.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	250 Orang	66.511.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	1.540.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang	35.047.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	59.645.600,40	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	243.100.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	90 Kawasan	150.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	504.764.000,00					
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 Dokumen	173.934.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	700 Orang	57.090.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	40 Orang	49.240.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10000 Orang	224.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	253.418.704,77			-		
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota								

							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	35 Orang	103.689.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	149.729.204,77	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Sosial			4.676.879.579,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.676.879.579,00					
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.676.879.579,00					
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	3.498.814.729,00					
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	15.399.800,00			-		
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.413.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.565.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.433.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas

	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2.062.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1.923.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.068.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	2.934.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.067.980.532,00			-		-
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.576.684.182,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	426.606.250,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	63.240.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.450.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	10.316.000,00			-		
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.316.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	153.052.797,00			-		
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.088.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.348.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.762.697,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	73.254.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80.698.000,00			-		
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.290.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31.408.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	171.367.600,00			-		
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.906.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	127.541.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.520.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.400.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	47.814.500,00					
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	47.814.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	6.140.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11.700.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40558 Keluarga	26.365.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas

	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	3.608.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	2.770.000,00					
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	2.770.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi	100%	468.045.950,00					
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	361.698.100,00			-		
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1176 Orang	81.155.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang								
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1052 Orang	86.670.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas

	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Orang	63.157.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	12.075.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	227 Orang	56.960.000,00	Kab. Tanggamus, Gisting, Gisting Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	37.963.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan								

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	6.900.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan								
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	9.917.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	106.347.850,00			-		
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti								

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.735.850,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1.402.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	86.709.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	128.828.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	150 Keluarga	128.828.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas

6	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	100%	515.283.800,00					
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	484.851.800,00			-		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157.675.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	152.466.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	44.020.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	105.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial								
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	25.690.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas

	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	30.432.000,00			-		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	30.432.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
7	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	15.322.600,00					
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	15.322.600,00			-		
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	15.322.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
								J U M L A H	**4.676.879.579,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Tenaga Kerja			4.317.779.175,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.977.241.650,00					
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.977.241.650,00					
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	3.542.542.960,00					
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	16.266.400,00			-		
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	13.593.400,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	518.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	386.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	269.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.175.198.540,00			-		
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.241.954.790,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Dokumen	862.303.750,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	70.940.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	13.316.000,00			-		
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 orang Laporan	13.316.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	63.368.200,00			-		
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	850.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.820.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	1.600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	1.782.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket	3.418.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	37.897.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	91.472.220,00			-		
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.945.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.527.220,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	182.921.600,00			-		
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	181.091.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.830.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
2	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke dokumen rencana tenaga kerja	100%	2.266.490,00					
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100%	2.266.490,00			-		
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 Dokumen	2.266.490,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan	100%	408.420.500,00					
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	400.000.000,00			-		
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	400.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang diberi Pembinaan	100%	8.420.500,00			-		
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	8.420.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas

4	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapat pekerjaan	100%	15.534.800,00					
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelayanan Antar Kerja	100%	12.588.100,00			-		
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja								
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3500 Orang	12.588.100,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran								
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1600 Orang	2.946.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	100%	8.476.900,00					
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasidalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.476.900,00			-		
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	8.476.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			62.168.600,00					
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			7.609.900,00					
6	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan	100%	7.609.900,00					
	3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan yang optimal	100%	7.609.900,00					
	3	29	05	2.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	7.609.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			54.558.700,00					
7	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Berasal Dari Kabupaten Tanggamus	100%	54.558.700,00					
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Persebaran Penduduk melalui Transmigrasi	100%	54.558.700,00			-		
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	29.558.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi								
							Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			278.368.925,00					
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			278.368.925,00					
8	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100%	278.368.925,00					
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Pemakaian Energi Listrik Dalam Rangka Percepatan Perekonomian Dan Pembangunan	100%	278.368.925,00			-		
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	278.368.925,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender serta stabilitas kamtibnas
								J U M L A H	**4.317.779.175,00**					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
								Nasional		Daerah

						Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			14.147.089.417,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.146.570.517,00					
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			13.146.570.517,00					
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	12.817.330.717,00					
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	42.416.800,00					
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75 Dokumen	21.733.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	21 Dokumen	3.120.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	3.120.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	1.650.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1.243.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	12.219.226.917,00					
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/bulan	11.414.366.917,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	774.200.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	30.660.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	12.460.100,00					
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.460.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	156.607.100,00					
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.891.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.855.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.888.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22.029.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.943.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Bai	100 %	243.910.000,00					
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.450.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Laporan	142.460.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	142.709.800,00					
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.292.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	88.417.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	100%	305.039.800,00					
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	51.190.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota								
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	33.300.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	6 Dokumen	17.890.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Cadangan Pangan Kabupaten	100 %	150.000.000,00					
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	150.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	103.849.800,00					
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								

							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen	3.850.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	99.999.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
3	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	24.200.000,00					
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kemanan pangan segar di kabupaten	100 %	24.200.000,00					
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.000.518.900,00					
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.000.518.900,00					
4	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertani	100 %	199.999.000,00					
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Bibit Komoditas Unggulan Yang Diserahkan Masyarakat	100 %	199.999.000,00					
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman								
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	199.999.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
5	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	100 %	200.000.000,00					
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	100 %	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota								

							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	6 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
6	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	100 %	342.300.100,00					
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Petani Terdampak Bencana yang Mendapatkan Asuransi Pertanian	100 %	342.300.100,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
							0	0 0	175.000.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2 Laporan	167.300.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
7	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	100 %	258.219.800,00					
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petani Yang Memahami Proses Peningkatan Produksi Pertan	100 %	258.219.800,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								

							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	158.220.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	99.999.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
								J U M L A H	**14.147.089.417,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
						Dinas Lingkungan Hidup			7.005.941.777,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.005.941.777,00					
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			7.005.941.777,00					
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	5.597.401.777,00					
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	4.258.742.958,00			-		
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.237.367.958,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	949.975.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.400.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%	30.000.000,00			-		
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	30.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	374.882.580,00			-		
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	2.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	102.500.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	194 Paket	7.604.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	480 Paket	9.150.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55512 Paket	15.804.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	515 Paket	15.938.780,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189 Laporan	126.885.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	94.080.239,00			-		
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	94.080.239,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	201.500.000,00			-		
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	638.196.000,00			-		

	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.170.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	441.574.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22.490.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.961.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tataruang	30%	300.000.000,00					
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	300.000.000,00			-		
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	02	2.01	0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota								
							Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah parameter baku mutu air dan udara yang melebihi baku mutu	30%	445.220.000,00					
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase media lingkungan yang dipantau dengan uji laboratorium	100%	440.420.000,00			-		
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Lokasi	287.620.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan								
							Jumlah Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Kegiatan	18.200.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah								
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan								
							Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	66 Paket	84.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mematuhi peraturan yang berlaku dibidang lingkungan hidup	100%	4.800.000,00			-		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	4.800.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam	20%	60.000.000,00					
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase keanekaragaman hayati kabupaten yang terlaksana dengan baik	100%	60.000.000,00			-		
	2	11	04	2.01	0008									
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Unit	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan								
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
5	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan izin lingkungan	40%	1.000.000,00					
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	1.000.000,00					
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	23 Badan Usaha	1.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

6	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup	100%	54.320.000,00					
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang telah dibina dalam pengelolaaan lingkungan hidup	100%	54.320.000,00					
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	29.320.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat								
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
7	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase permasalahan lingkungan hidup yang terselesaikan	100%	9.750.000,00					
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penangan pengaduan yang terselesaikan	100%	9.750.000,00			-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	7 Pengaduan	9.750.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
8	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase peningkatan sampah yang terkelola	14%	538.250.000,00					
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah wilayah yang terlayani dalam pengelolaan sampah	100%	538.250.000,00			-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota								

							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	10 Dokumen	4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota								
							Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	97084 Ton	533.250.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6. Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
								J U M L A H	**7.005.941.777,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.936.141.292,00					
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			9.936.141.292,00					
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai	9.895.908.492,00					
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan tepat waktu	100 %	6.391.400,00			-		
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.773.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	645.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	660.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	660.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun dengan Baik dan Tepat waktu	100 %	6.649.531.302,00			-		
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5.051.981.302,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	1.526.180.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.370.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	10.566.000,00			-		
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.566.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	66.000.000,00			-		
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	66.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun Dengan Baik	100 %	426.191.540,00			-		
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.880.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.300.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	64.353.540,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	283.658.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.445.437.250,00			-		
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.835.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.106.402.250,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.200.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	291.791.000,00			-		
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.292.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	152.576.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	57.110.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.813.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik	100 %	348.900,00					
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase keluarga Memiliki Kartu Keluarga	100 %	348.900,00			-		
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	348.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100 %	1.011.500,00					
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	100 %	1.011.500,00			-		
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4950 Dokumen	1.011.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Melakukan PKS	100 %	2.752.400,00					

	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD yang Melakukan PKS	100 %	2.752.400,00			-		
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan								
5	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	100 %	36.120.000,00					
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	100 %	36.120.000,00			-		
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	36.120.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
								J U M L A H	**9.936.141.292,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.754.126.100,00					
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			8.754.126.100,00					
1	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	1.421.475.550,00					
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	100%	26.663.500,00			-		
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.817.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.781.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.693.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.386.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.035.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	606.231.250,00			-		
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	530.731.250,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	75.500.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	90%	13.816.000,00			-		
	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	95% Laporan	13.816.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	90%	435.785.800,00			-		
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	299.281.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.974.100,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	125.530.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	100%	199.845.000,00					
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.435.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	54.410.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	100%	139.134.000,00			-		
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.292.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	53.700.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	9.080.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	24.062.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana pemerintahan desa yang baik	73%	1.452.216.000,00					
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Peningkatan Penataan Pekon	100%	1.452.216.000,00					
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa								
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	24 Desa	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa								

							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	1.402.216.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Pelaksanaan Kerjas Sama Desa	73%	50.000.000,00					
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Pekon	100%	50.000.000,00					
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Pekon yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara tertib	73%	1.888.353.150,00					
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	100%	1.888.353.150,00					
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	1.613.353.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	45.000.150,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan pekon	75%	3.942.081.400,00					
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat yang di Tingkatkan Pemberdayaannya Hukum Adat	100%	3.942.081.400,00			-		
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	3.650.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit	9.545.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	182.536.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	X					NON URUSAN			2.512.634.016,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.512.634.016,00					
6	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	2.512.634.016,00					
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	100%	2.718.000,00					
	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.718.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	2.506.421.016,00					
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.506.421.016,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	90%	3.495.000,00			-		
	X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	150 Paket	3.495.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Perhubungan			6.098.130.850,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.098.130.850,00					
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			6.098.130.850,00					
1	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	5.169.545.250,00					
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	51.673.900,00					
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.490.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.089.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.096.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.813.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.753.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.394.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.037.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	4.102.144.946,00					
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.035.309.946,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.970.475.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96.360.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%	112.375.000,00			-		
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	112.375.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	303.806.199,00					
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.370.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.357.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.930.499,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	67.024.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	125.124.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	167.660.005,00					
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	127.778.005,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.882.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah yang Disusun dengan Baik	100 %	431.885.200,00					
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	431.885.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %	927.575.600,00					
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	100 %	328.332.000,00			-		
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan								
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 Unit	20.120.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 Unit	308.212.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan

	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	288.308.000,00					
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	86.650.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	201.658.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	120.194.000,00					
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	120.194.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	190.741.600,00			-		
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	107.110.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	83.631.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Kepemilikan Dokumen	100 %	1.010.000,00					
	2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.010.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan

	J U M L A H							**6.098.130.850,00**						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
						Dinas Komunikasi dan Informatika			10.374.475.837,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.374.475.837,00					
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.134.062.037,00					
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	4.066.278.087,00					
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	16.705.965,00			-		
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.186.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.859.865,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.040.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.040.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disajikan secara transpraran, akuntabel dan tepat waktu	100%	3.524.879.144,00					
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.071.899.144,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	376.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	76.080.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	10.316.000,00			-		
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	10.316.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	324.934.850,00			-		

	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	179.457.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.645.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.657.850,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	92.175.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	86.067.000,00			-		
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	33.429.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	52.638.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	103.375.128,00			-		
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	67.496.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	15.220.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.658.328,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik	100%	5.248.463.950,00					
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	100%	5.248.463.950,00			-		
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat								
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	171.805.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik								
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	14.980.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	15.450.950,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	680 Dokumen	4.846.728.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten								

							Jumlah Konten Informasi Publik	7 Konten	199.500.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Goverment	100%	819.320.000,00					
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain sesuai dengan standar Pemerintah	100%	19.000.000,00			-		
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa								
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan E-Governent	100%	800.320.000,00			-		
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	220.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE								
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	49 Perangkat Daerah	580.320.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			73.384.800,00					
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	73.384.800,00					
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	73.384.800,00			-		
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral								
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	25 Orang	27.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral								
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100% Persentase	17.999.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia								

							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	28.385.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			167.029.000,00					
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi	100%	167.029.000,00					
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kegiatan keamanan Informasi Persandian	100%	129.839.000,00			-		
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	4.710.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	21.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan	11.829.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8 Perangkat Daerah	91.800.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kegiatan keamanan Informasi Persandian	100%	37.190.000,00			-		
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4 Perangkat Daerah	37.190.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangung dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
								J U M L A H	**10.374.475.837,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.283.728.839,00					
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.283.728.839,00					

1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	7.171.310.639,00					
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	63.090.400,00			-		
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	8.875.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29 Dokumen	10.450.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	8.634.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	45 Dokumen	9.199.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	45 Dokumen	8.880.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	9.459.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	7.590.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	5.576.895.939,00			-		
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/14 Orang/bulan	4.306.899.689,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.198.856.250,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.140.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	13.816.000,00			-		
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	13.816.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	603.499.900,00			-		
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.160.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	159.175.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.262.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	76.620.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	49.356.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	41.286.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	269.640.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	300.000.000,00			-		
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas

	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	137.030.000,00			-		
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	122.130.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	14.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	476.978.400,00			-		
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.970.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	167.238.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.880.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	`Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	253.890.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	`Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
2	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang tertib administrasi	100%	20.401.100,00					

	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.401.100,00			-		
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	20.401.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan kualitas hidup SDM	`Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
3	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP/KOPERASI yang dinilai	100%	23.279.100,00					
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	23.279.100,00			-		
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	100%	9.106.000,00					
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan perkoperasian	100%	9.106.000,00			-		
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	9.106.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
5	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Peningkatan Pemberdayaan UMKM	100%	59.632.000,00					
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UKM yang diBina dan diberdayakan	100%	59.632.000,00			-		
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								

							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	59.632.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.451.010.468,00					
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.020.337.368,00					
6	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	100%	277.902.000,00					
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kesetabilan harga barang pokok dan penting di Kabupaten Tanggamus	100%	252.550.000,00					
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	252.550.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	11.682.000,00			-		
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	11.682.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tingkat Daerah	100%	13.670.000,00			-		
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								

							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	13.670.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
7	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	77.060.000,00					
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Presentase UTTP yang diawasi	100%	77.060.000,00			-		
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300 Unit	27.060.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan kualitas hidup SDM	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
8	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Usaha Perdagangan Yang Di Fasilitasi Akses Pemasarannya	100 %	665.375.368,00					
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Yang ditingkatkan akses pasarnya	100 %	665.375.368,00			-		
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								

							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120 UMKM	665.375.368,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			430.673.100,00					
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatkan volume usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Tanggamus	100 %	430.673.100,00			-		
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	396.429.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	34.244.100,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
								J U M L A H	**8.734.739.307,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3.620.161.295,17					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.620.161.295,17					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.620.161.295,17					
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	3.096.581.839,17					

	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	56.818.000,00					
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.089.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.493.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.265.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.909.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.992.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	3 Laporan	16.210.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.857.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat Waktu	100%	2.431.641.589,17					
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.684.843.589,17	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	684.350.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	58.640.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.808.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu	100%	335.479.850,00					
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	108.987.850,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.780.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	6 Paket	32.795.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	23.222.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	153.694.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah yang disusun dengan baik	100%	120.300.000,00					
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.300.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laopran Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah yang disusun dengan baik	100%	152.342.400,00					
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.670.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	103.612.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.060.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Regulasi Kebijakan Penanaman Modal yang Sudah ditetapkan	100%	119.450.000,00					
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	100%	52.650.000,00			-		
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	52.650.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	66.800.000,00					
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	57.700.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								

							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.100.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi	100%	69.058.600,00					
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keikutsertaan Pameran Investasi	100%	69.058.600,00					
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	69.058.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penyelesaian PerizinanTepat Waktu	100%	326.038.500,00					
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan daerah	100%	326.038.500,00					
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	323.451.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
5	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan data	100%	9.032.356,00					

	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	9.032.356,00					
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	9.032.356,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
								J U M L A H	**3.620.161.295,17**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.193.565.605,00					
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6.193.565.605,00					
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	3.168.866.205,00					
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	11.215.000,00					
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.310.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.010.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.560.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	2.813.311.505,00			-		-
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.297.611.505,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	444.420.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	71.280.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	11.394.000,00			-		

	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11.394.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.250.000,00			-		
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	20.250.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	85.344.900,00			-		
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	17.186.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.065.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.493.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	24.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik Yang Diterapkan	100%	37.980.000,00			-		
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	37.980.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	62.870.000,00			-		
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	39.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	23.870.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Inventaris BMD yang sesuai dengan ketentuan	100%	126.500.800,00			-		
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.300.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	43.200.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan	80 Persen	116.885.000,00					

	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor, Wira usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang di berdayakan dan di kembangkan	80 Persen	39.865.000,00			-		
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	11.260.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	40 Orang	28.605.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda								
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								

							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	40 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	3 Orang	77.020.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	77 Persen	2.444.982.700,00					
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	77 Persen	1.205.865.400,00			-		
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	709.990.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	495.875.400,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Persen	420.089.350,00			-		
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								

							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	364.059.350,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	44 Orang	56.030.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	80 Persen	71.010.000,00			-		
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga								
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	7 Orang	71.010.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)								
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								

							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota								
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	80 Persen	575.802.950,00			-		
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait								
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	575.802.950,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	172.215.000,00			-		
	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	92.020.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	80.195.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase KwarRan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaanya	100%	462.831.700,00					
	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik								
							Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	10.935.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	102.020.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah								
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah								
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	349.876.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sain, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (Generasi Milenial dan Generasi Z), penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	X					NON URUSAN			29.613.800,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			29.613.800,00					
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	29.613.800,00					

	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	29.613.800,00			-		
	X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.613.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**6.223.179.405,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			4.785.758.377,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.785.758.377,00					
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.625.758.427,00					
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	3.769.267.977,00					
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	48.605.200,00					
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17.249.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4.791.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	4.816.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.548.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, LKPj, Perangkat Daerah	5 Laporan	5.499.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	3.028.410.477,00					
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.216.772.177,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39 Dokumen	729.487.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39 Dokumen	82.150.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	13.816.000,00			-		
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	13.816.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pegawai yang disusun tepat waktu	100%	11.635.000,00			-		
	2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	11.635.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	100%	255.160.000,00					
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	114.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	29.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6000 Paket	28.959.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1000 Paket	32.200.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	110.281.300,00					
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.416.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.865.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	301.360.000,00					
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.476.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	201.544.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12.340.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca	100%	856.490.450,00					
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan layanan perpustakaan di tingkat daerah	100%	372.285.500,00					
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan								
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	61.679.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan								
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	5 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan								
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Eksemplar	113.406.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota								

							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Eksemplar	97.200.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan budaya gemar membaca	100%	484.204.950,00			-		-
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	60.425.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial								
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan	252.829.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat								

							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	10 Lokus	170.950.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			159.999.950,00					
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan arsip yang di kelola melalui JIKN	100%	145.845.050,00					
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang diolah	100%	37.397.550,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Laporan	37.397.550,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100%	108.447.500,00					
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	108.447.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi	100%	14.154.900,00					

	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Presentase Arsip yang dimusnakan	100%	14.154.900,00					
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	14.154.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang diselamatkan	%	0,00					
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana								
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	%	0,00					
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
									4.785.758.377,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.830.036.863,67					
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.830.036.863,67					

1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	73 Nilai	3.251.892.563,67					
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Bibit Komoditas Unggulan Yang Diserahkan Masyarakat	100%	5.089.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	501.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.588.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	2.702.488.463,67					
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.614.508.463,67	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	87.980.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	13.816.000,00			-		

	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	13.816.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	100%	48.914.300,00					
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	33.114.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.800.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik	100%	151.000.000,00					
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	151.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	330.584.800,00					
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	45.792.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	272.002.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.790.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
2	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%	1.388.306.000,00					
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan yang menjadi Kewenangan Daerah	100%	1.388.306.000,00			-		
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1.388.306.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Limau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100 %	707.094.300,00					
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	100 %	37.006.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								

							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	37.006.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %	670.088.300,00			-		
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	670.088.300,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
4	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100 %	212.514.000,00					
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100 %	212.514.000,00			-		
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota								
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha	45.975.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota								
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha	166.539.000,00	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Klumbayan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Limau, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
5	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	100%	270.230.000,00					

	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Informasi dan Promosi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	100%	20.230.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko								
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Dokumen	20.230.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	250.000.000,00			-		
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	250.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X					NON URUSAN			842.735.707,33					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			842.735.707,33					
6	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	842.735.707,33					
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	2.754.000,00					
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	501.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	501.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	501.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	501.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	686.000.000,00					
	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39 Dokumen	686.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	74.643.000,00					
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.700.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.761.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	66.182.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	79.338.707,33					
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.338.707,33	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
								J U M L A H	**6.672.772.571,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.698.711.943,00					
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.350.767.943,00					
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			5.350.767.943,00					
1	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	3.968.750.743,00					
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	51.907.100,00			-		-
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.565.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.864.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.634.100,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	1 Laporan	5.844.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.578.726.843,00			-		-
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.742.926.843,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	835.800.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	56.445.600,00			-		-
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	15.975.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.470.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	38.000.000,00			-		-
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	38.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	95.900.000,00			-		-
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	75.900.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	147.771.200,00			-		-
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	80.901.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9.870.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
2	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata	100%	750.144.200,00					
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	64.595.000,00			-		-
	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	50 Orang	64.595.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	685.549.200,00			-		-
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	45.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20 Lokasi	366.466.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	244.263.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	29.818.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
3	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti	100%	242.803.900,00					
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	100%	242.803.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-		Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	88.175.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	61.938.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	62.690.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
4	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif	100%	389.069.100,00					
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	139.069.100,00			-		-
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								

							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	76.151.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata								
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	52.560.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Laporan	10.357.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100%	250.000.000,00			-		-
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang	250.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	X					NON URUSAN			347.944.000,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			347.944.000,00					
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	347.944.000,00					
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	73.680.000,00			-		-
	X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	73.680.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	244.264.000,00			-		-
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	244.264.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	30.000.000,00			-		-
	X	XX	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan produktifitas dengan inovasi sector pertanian, perkebunan dan perikanan serta daya saing produk unggulan daerah
								J U M L A H	**5.698.711.943,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.231.794.873,00					
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			8.231.794.873,00					
1	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Nilai	6.772.162.523,00					
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	39.681.300,00			-		
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.925.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29 Dokumen	3.924.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	29 Dokumen	846.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	29 Dokumen	846.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.110.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.830.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	6.302.620.023,00			-		
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	4.902.139.923,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.318.800.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.680.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	100%	189.368.400,00			-		
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	75.310.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	750 Paket	32.850.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	14.207.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	33.488.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	33.512.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik	100%	175.610.000,00			-		
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.110.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	64.882.800,00			-		
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.274.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40.608.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
2	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	100%	1.142.921.200,00					
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	100%	376.832.100,00			-		
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	253.851.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	02	2.01	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang								
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	12000 Batang	122.980.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Benih / Bibit Perkebunan dan Peternakan	3%	210.250.600,00			-		
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman								

							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	96.433.500,00	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	113.817.100,00	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Bulok, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Ketersediaan bahan Pakan Ternak	100%	57.864.100,00			-		
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak								
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan	57.864.100,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Presentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	100%	497.974.400,00			-		
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	35 Ekor	497.974.400,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
3	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	100%	147.589.150,00					
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan Hewan Ternak	100%	87.659.150,00			-		
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan								
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5 Wilayah	87.659.150,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan								
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	5 Unit Usaha	59.930.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
4	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	100%	169.122.000,00					
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Petani Terdampak Bencana yang Mendapatkan Asuransi Pertanian	100%	169.122.000,00			-		
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								

							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	65 Ha	169.122.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	X					NON URUSAN			12.486.000,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			12.486.000,00					
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	12.486.000,00					
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	12.486.000,00			-		
	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.486.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
								J U M L A H	**8.244.280.873,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.087.588.650,00					
	5	01				PERENCANAAN			4.764.110.850,00					
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.337.938.700,00					
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Lebih Baik dan Tepat Waktu	100 %	50.023.400,00					
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.121.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.122.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.431.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.135.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.828.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.384.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	1.449.792.000,00					
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1.271.150.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	178.642.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Aparatur yang Melaksanakan Disiplin Kerja Sesuai Peraturan Perundang undangan	100 %	156.496.800,00					
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	18.800.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	137.696.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum yang terlaksana dengan Baik	100 %	555.376.100,00			-		
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	91.125.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	50.854.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	36.889.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	376.507.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	698.528.500,00					
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	670.653.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.875.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia dalam Kondisi Baik	100 %	427.721.900,00					
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	305.684.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	76.937.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 Unit	45.100.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	1.045.792.150,00					
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	210 Dokumen	819.332.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah								
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	183.773.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								

							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	45.659.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	40.525.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	421.458.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	127.915.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	52.295.000,00					
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								

							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kagungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah								
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	110 Orang	34.163.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	18.131.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	162.371.000,00			-		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	11 Laporan	95.218.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	67.153.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	11.793.950,00					
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	11.793.950,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	100 %	380.380.000,00					
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Indikator SDGs Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	100 %	89.393.700,00					
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	5.173.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	12.645.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	4.850.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	16.168.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	4.339.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	10.948.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	5.009.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	30.259.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen	178.985.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	3.619.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	9.628.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	20.092.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	122.487.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	4.179.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	10.507.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3.298.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	5.173.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	112.001.200,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	13.523.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	4.323.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	70.636.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	10.595.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	12.922.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.323.477.800,00					
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Iptek yang Dimanfaatkan	100 %	3.323.477.800,00					
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dimanfaatkan	100 %	57.123.300,00					
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	38.523.300,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	795.000.000,00					
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan								
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dimanfaatkan	100 %	2.263.460.000,00					
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	488.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan								

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	570.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	10 Dokumen	543.460.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	411.400.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Peningkatan Inovasi Perangkat Daerah	100 %	207.894.500,00					
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	207.894.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	X					NON URUSAN			6.304.780.336,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.304.780.336,00					
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.304.780.336,00					
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Lebih Baik dan Tepat Waktu	100 %	19.003.700,00					
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19.003.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	5.927.684.936,00					
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.927.684.936,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum yang terlaksana dengan Baik	100 %	358.091.700,00			-		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	358.091.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
								J U M L A H	**14.392.368.986,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
						Badan Keuangan dan Aset Daerah			432.498.865.519,99					
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			420.916.381.749,99					
	5	02				KEUANGAN			420.916.381.749,99					
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	73 Angka	21.912.496.125,00					
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	63.636.550,00					
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19.737.050,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.662.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.494.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.615.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.931.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.886.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.310.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	9.575.263.575,00			-		
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.052.422.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.499.413.375,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.832.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	8.288.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40 Dokumen	8.307.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	166.184.000,00					
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	166.184.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	1.218.967.800,00					
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	171.400.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	136.490.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	238.775.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	227.629.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	444.673.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	10.479.245.400,00			-		

	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.222.623.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	256.622.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	409.198.800,00					
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	263.958.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	42.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 Unit	102.640.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran terhadap Kebijakan Umum anggaran, Persentase Realisasi Belanja Daerah, Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan	100%	397.361.648.324,99					
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun dengan baik dan tepat waktu	100%	732.969.200,00					
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								

							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	120 Dokumen	69.006.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	120 Dokumen	69.167.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	220 Dokumen	148.298.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	145.413.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	134.370.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	87.076.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	79.638.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D	100%	309.509.150,00					
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	14 Dokumen	66.213.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	66 Dokumen	12.377.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	66.318.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	40 Dokumen	149.704.450,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	14.894.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disajikan secara transpraran, akuntabel dan tepat waktu	100%	239.243.200,00					
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	50 Laporan	30.099.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	11 Laporan	138.808.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	40.350.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	29.985.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Bantuan Keuangan	100%	396.079.926.774,99			-		
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	11.566.793.666,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	6.000.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	378.513.133.108,99	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	100%	1.642.237.300,00					

	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.642.237.300,00			-		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga								
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	100 Dokumen	83.081.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	116.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	122.474.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	532.058.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	75 Laporan	206.903.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	236.998.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	113.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsilijasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								

							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	51 Laporan	88.537.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	58.948.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	83.336.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	X					NON URUSAN			11.582.483.770,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			11.582.483.770,00					
4	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	11.582.483.770,00					
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	11.582.483.770,00			-		
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52/12 Orang/bulan	11.582.483.770,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
								J U M L A H	**432.498.865.519,99**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.852.764.599,00					
	5	02				KEUANGAN			4.852.764.599,00					
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	4.034.533.899,00					
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	30.746.850,00			-		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.819.250,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.448.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.117.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.131.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.131.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.006.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.092.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.658.698.049,00			-		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.631.456.379,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.005.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5.124.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.102.020,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	5.114.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100%	75.000.000,00			-		
	5	02	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	20 Dokumen Laporan	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah								

							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	6 DOKUMEN Laporan	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 DOKUMEN Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	178.326.000,00			-		-
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.850.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.476.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	44.000.000,00			-		
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	47.763.000,00			-		
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	29.233.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	3.550.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	14.980.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan dan Persentase Penerimaan Pajak terhadap Potensi Objek Pajak	100%	818.230.700,00					
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	818.230.700,00			-		
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	15.705.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	274.614.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100 Laporan	6.707.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	57.332.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	134617 Obyek Pajak	115.776.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10 Dokumen Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Dokumen Layanan	23.760.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								

							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1000 Dokumen	5.037.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1050 Dokumen	76.859.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	9.998.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	300 Dokumen	15.792.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	95.010.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	71.639.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
								J U M L A H	**4.852.764.599,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			71.221.923.246,00					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			71.221.923.246,00					
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76 Nilai	51.588.132.446,00					

	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	58.570.700,00			-		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.819.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.410.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.627.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.962.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.962.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.620.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.167.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	6.748.606.057,00			-		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	3.994.403.607,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.553.818.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.958.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.409.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	9.015.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	10.316.000,00			-		
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.316.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	9.357.456.000,00			-		
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	79.350.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54000 Orang	9.177.726.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.380.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	3.278.827.450,00			-		Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.742.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	173.500.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	386.821.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	136.558.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	145.696.450,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	2.285.509.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	2.309.485.500,00			-		
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.279.485.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	305.475.000,00			-		
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	305.475.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100 %	1.187.210.400,00					
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	245.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	580.310.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	88.700.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	242.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	27.393.482.239,00			-		Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	26.608.232.239,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	785.250.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	938.703.100,00			-		
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	77.942.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	19 Laporan	441.935.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	418.825.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Dengan Baik	100 %	19.633.790.800,00					
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi dengan Baik	100 %	568.308.500,00			-		
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20 Dokumen	168.308.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan								

							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan Baik dan tepat Waktu	100 %	251.269.000,00			-		
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	50.253.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	50.253.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	50.253.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	50.253.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	50.253.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Baik	100 %	126.000.000,00			-		
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	30.100.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	29.850.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat								
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	29.109.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Laporan	29.218.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Laporan	7.721.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Baik	100 %	12.264.478.900,00					
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	3.525.458.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								

							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11 Orang	660.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	420.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD								
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	10.829.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD								
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4431 Dokumen	7.498.191.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi dengan Baik	100 %	4.053.209.000,00			-		
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	23.640.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses								
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4.029.568.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan Baik	100 %	59.934.000,00			-		
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD								
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	6 Dokumen	59.934.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terfasilitasi Tugas DPRD dengan Baik	100 %	2.310.591.400,00			-		
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Dokumen	2.233.232.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	10 Laporan	7.149.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	70.209.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi,serta memperkuat pencgahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
								J U M L A H	**71.221.923.246,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			39.172.802.931,00					
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			39.172.802.931,00					
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	34.392.107.031,00					
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	58.125.700,00			-		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.948.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	7.513.500,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	6.824.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	6.032.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	6.217.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.733.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.857.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	14.395.437.233,00			-		
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	9.547.302.233,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.612.852.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	211.545.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	13.003.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	10.734.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	21.785.000,00			-		
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	21.785.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	540.793.000,00			-		
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	333.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	33.800.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	72.863.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	100.530.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	7.081.660.570,00					
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.165.525.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket	3.539.155.521,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	122.881.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	267.233.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan	1.986.865.149,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik"	100%	1.424.000.000,00					
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.300.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	124.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	5.657.640.275,00			-		
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.113.322.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.544.317.775,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.646.291.200,00					
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	1.860.736.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	276.254.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	231.100.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	691.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	586.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	925.820.853,00					
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	200.394.353,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	200.728.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	524.698.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah	100%	308.106.100,00			-		
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40 Dokumen	49.595.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	64.227.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	72.813.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 Dokumen	68.863.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	52.605.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terfasilitasi Dengan Baik	100%	332.447.100,00			-		
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	75.378.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	420 Laporan	61.211.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								

							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	240 Laporan	195.856.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	2.800.438.500,00					
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan Dengan Baik	100%	334.721.100,00			-		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	55.206.400,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	129.178.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	150.336.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kecukupan Indeks Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi dengan baik	100%	1.772.942.000,00			-		Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	1.727.784.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	29.352.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	15.805.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Capaian Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah	100%	387.042.200,00			-		Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	139.279.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	157.942.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	30 Dokumen	89.820.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan	100%	305.733.200,00			-		Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	212.942.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	26.183.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	66.608.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100%	1.980.257.400,00					
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD dan BLUD yang dimonitoring	100%	309.761.800,00					
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	115.756.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	166.707.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	27.297.800,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah	100%	171.922.000,00			-		Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 Dokumen	10.429.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	145.940.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	15.553.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Layanan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik Yang Diterapkan	100%	1.304.581.300,00			-		Reformasi Birokrasi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124 Dokumen	206.854.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	1.056.199.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	41.527.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	193.992.300,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	110.932.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	42.438.200,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	40.621.700,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penanggulangan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
	J U M L A H								**39.172.802.931,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.381.871.807,00					
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.381.871.807,00					
	5	03				KEPEGAWAIAN			6.169.314.507,00					
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	5.003.596.107,00					
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	23.744.400,00			-		
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.743.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.200.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.900.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	4.374.912.327,00			-		
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.757.072.477,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	543.593.750,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	72.700.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.546.100,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	10.316.000,00			-		
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.316.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	286.804.100,00			-		
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.366.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.104.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.495.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	71.153.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	50.582.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	110.103.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	142.429.000,00			-		
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.134.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	110.220.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	31.075.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	165.390.280,00			-		
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.406.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	81.028.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.820.480,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	36.135.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100%	1.165.718.400,00					
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi	100%	394.090.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								

							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	222.227.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	2.416.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan	169.446.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	612.961.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	612.961.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya melalui Pembinaan oleh Korpri	100%	18.856.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	2 Orang	18.856.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	139.810.300,00					
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	109.217.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	11.687.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN								
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	6 Orang	18.905.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			212.557.300,00					
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang berperidikat Memuaskan	100%	212.557.300,00					
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Meningkatnya Kualitas Pendidikan Teknis Aparatur	100%	143.694.000,00			-		
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3 Orang	143.694.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	100%	68.863.300,00			-		
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	68.863.300,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**6.381.871.807,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			14.141.913.026,00					
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			14.141.913.026,00					
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76 Nilai	11.681.020.826,00					
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	18.030.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.589.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29 Dokumen	5.637.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29 Dokumen	5.637.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	29 Dokumen	888.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	29 Dokumen	888.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	833.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.558.500,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	10.119.936.806,00					
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	9.679.433.006,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	319.980.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	120.523.800,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	100 %	314.285.000,00					
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	314.285.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	100 %	547.758.320,00					
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67 Paket	148.415.020,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5713 Paket	64.002.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	605 Paket	32.546.700,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1463 Paket	72.372.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	230.422.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun Dengan Baik	100 %	298.080.000,00					
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264.742.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.338.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun Dengan Baik	100 %	382.930.000,00					
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.870.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	264.620.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	19.630.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.810.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3 undefined	48 % undefined undefined	2.081.423.300,00					
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	1.679.918.300,00					
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	886.250.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	70.200.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	61.350.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								

							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15 Laporan	210.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	435.918.300,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	401.505.000,00					
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian								
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	13.905.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	387.600.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	80 %	379.468.900,00					
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi Yang Sesuai Dengan SOP	100 %	379.468.900,00					
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 perangkat daerah	36.668.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								

							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	342.800.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	J U M L A H								**14.141.913.026,00**					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Provinsi	Daerah
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			8.074.538.837,00					
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.074.538.837,00					
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	2.981.122.208,33					
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100%	42.253.300,00					
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	26.731.400,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	3.540.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11 Dokumen	3.180.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	681.900,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	1.090.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	1.030.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	2.379.196.608,33					
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.989.121.608,33	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	390.075.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	100%	10.316.000,00			-		
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 % Laporan	10.316.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	68.640.000,00					
	8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	68.640.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	118.885.700,00					
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	10.294.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	108.591.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	144.365.000,00					
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.000.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.365.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	92.006.000,00					
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	70.806.000,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100%	125.459.600,00					
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	125.459.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentasi elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	1.273.096.288,00					
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Monitoring dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	100%	1.273.096.288,00			-		
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	47.707.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka								
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	188.219.900,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka								
							Jumlah Paskibraka	33 Orang	781.026.888,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila								
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 Laporan	93.421.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila								
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	15 Dokumen	162.720.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persetasi partai politik dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	100%	1.854.453.600,00					
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan dalam pemantapan Pendidikan politik dan etika budaya politik	100%	1.854.453.600,00					
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	0,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	14 Dokumen	1.305.759.600,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 0	0,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	450.000.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	98.694.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan keberadaaan dan aktifias ORMAS	100%	1.854.007.440,67					
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan ORMAS	100%	1.854.007.440,67					
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	24 Dokumen	1.765.942.240,67	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	88.065.200,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan dibidang ekonomi, sosial dan budaya	100%	36.591.300,00					
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan ORMAS	100%	36.591.300,00			-		
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	36.591.300,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik	100%	75.268.000,00					
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konlfik Sosial	100%	75.268.000,00			-		
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	75.268.000,00	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
	X					NON URUSAN			37.613.600,00					
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			37.613.600,00					
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	73 Angka	37.613.600,00					
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik	100%	37.613.600,00			-		
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.613.600,00	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
								J U M L A H	**8.112.152.437,00**					

Tabel VI.2 Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus terhadap Indikator yang Mendukung Kegiatan SPM Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**145,417,515,000.00**
		K1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			**81,002,697,750.00**
				1SK	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	96,322,700.00
				2SK	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12,383,953,750.00
				3SK	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	133,490,000.00
				4SK	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	48,085,000.00
				5SK	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	51,750,835,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				6SK	Pembangunan Ruang Kelas Baru	16,162,124,500.00
				7SK	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	403,314,000.00
				8SK	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	24,572,800.00
		K2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			**40,785,630,500.00**
				1SK	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300,000,000.00
				2SK	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	32,235,500.00
				3SK	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,906,092,500.00
				4SK	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	46,237,800.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				5SK	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20,483,300,000.00
				6SK	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	29,282,800.00
				6SK	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13,988,481,900.00
		K3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			**17,268,894,600.00**
				1SK	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6,631,537,500.00
				2SK	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	128,948,200.00
				3SK	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9,930,600,000.00
				4SK	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	95,520,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				5SK	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	400,000,000.00
				6SK	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	82,288,900.00
		K4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			**6,360,292,150.00**
				1SK	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1,823,230,000.00
				2SK	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	28,963,000.00
				3SK	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,488,300,000.00
				4SK	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19,799,150.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**22,899,034,331.00**
		K1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**22,899,034,331.00**
				1SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	394,822,000.00
				2SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	308,180,000.00
				3SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	727,883,840.00
				4SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24,999,700.00
				5SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasa	25,000,000.00
				6SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25,000,000.00
				7SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	41,599,850.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				8SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24,999,900.00
				9SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25,000,000.00
				10SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25,000,000.00
				11SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	24,990,000.00
				12SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	25,000,000.00
				13SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	37,000,000.00
				14SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169,765,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				15SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	93,519,000.00
				16SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	351,039,200.00
				17SK	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	419,210,000.00
				18SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	24,999,500.00
				19SK	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	545,915,000.00
				20SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	163,974,500.00
				21SK	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,232,334,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				22SK	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17,282,366,841.00
				23SK	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	24,999,900.00
				24SK	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	24,750,000.00
				25SK	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25,000,000.00
				26SK	Operasional Pelayanan Puskesmas	24,990,000.00
				27SK	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	242,090,000.00
				28SK	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20,028,100.00
				29SK	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	20,000,000.00
				30SK	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	113,040,000.00
				31SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	411,538,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**8,556,760,000.00**
		K1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			**8,556,760,000.00**
				1SK	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	352,220,000.00
				2SK	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7,954,435,000.00
				3SK	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250,105,000.00
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**7,862,106,405.00**
		K1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			**7,862,106,405.00**
				1SK	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	6,956,409,000.00
				2SK	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	605,697,405.00
				3SK	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	300,000,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**509,728,000.00**
		K1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**509,728,000.00**
				1SK	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	509,728,000.00
6	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**243,724,500.00**
		K1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			**243,724,500.00**
				1SK	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	243,619,500.00
				2SK	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	105,000
7	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**262,757,700.00**
		K1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			**196,940,000.00**
				1SK	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	196,940,000.00
		K2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			**65,817,700.00**
				1SK	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	65,817,700.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
8	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**168,132,200.00**
		K1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			**154,229,700.00**
				1SK	Penyediaan Permakanan	81,155,000.00
				2SK	Penyediaan Alat Bantu	63,157,200.00
				3SK	Pemberian Layanan Rujukan	9,917,500.00
		K2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			**13,902,500.00**
				1SK	Pemberian Layanan Kedaruratan	12,500,000.00
				2SK	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1,402,500.00
9	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**262,675,800.00**
		K1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			**262,675,800.00**
				1SK	Penyediaan Makanan	157,675,800.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				2SK	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	105,000,000.00
10	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**2,078,743,000.00**
		K1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			**72,105,500.00**
				1SK	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	72,105,500.00
		K2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			**1,725,047,500.00**
				1SK	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1,540,000,000.00
				2SK	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	35,047,500.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF 2025
				3SK	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150,000,000.00
		K3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			**281,590,000.00**
				1SK	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	57,090,000.00
				2SK	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	224,500,000.00

Sumber : Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Tanggamus (data diolah), 2024

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026. Dalam dokumen tersebut, tertuang sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Kebijakan strategis dan produktif dengan implementasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas yang tinggi hingga mampu *merecovery* anggaran pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus guna mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah. Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Nilai Tukar Petani dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanggamus, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung. Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel VII.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN PER TAHUN	
				2024	2025	2026
1	IM.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,32	5,66
2	IM.2	Angka Kemiskinan	Persen	9,79	9,11	8,48
3	IM.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,15	2,96	2,79
4	IM.4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,55	71,17	71,79
5	IM.5	Indeks Gini	Angka	0,251	0,246	0,242
6	IM.6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,89	3,78	4,94

Sumber : Analisis data diolah, 2024

Penentuan Indikator Makro diatas mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tabel VII.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
1	**T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**	**IT.1 Indeks Pembangunan Manusia**			**Indeks**	**71,17**	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; Puskesmas; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	74,23	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; Puskesmas;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.2 Meningkatnya Kualitas	IS.2 Indeks Dimensi	Tahun	9,86	Dinas Pendidikan;	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
			Pendidikan	Pendidikan				Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2	**T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**	**IT.2 Indeks Desa Membangun**			**Skor**	**0,7267**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Kecamatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.3 Meningkatnya Pekon Maju	IS.3 Persentase Pekon Maju	Persen	54,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Kecamatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
								Terpadu Satu Pintu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.4 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IS.4 Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	38,48	Satuan Polisi Pamong Praja;	TNI-Polri Kecamatan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika;
			S.5 Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	IS.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,14	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;
				IS.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,78	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.6 Meningkatnya Ketangguhan TerhadapBencana	IS.7 Indeks Risiko Bencana	Angka	104,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
3	T.3 **Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender**	IT.3 **Indeks Pembangunan Gender**			**Angka**	**91,46**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.7 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS.8 Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
				IS.9 Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	750,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup;
4	T.4 **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	IT.4 **Indeks Reformasi Birokrasi**			**Nilai**	**66,32**	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan,	Seluruh Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
							Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	
			S.8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65,59	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
				IS.11 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	70,0000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika;	Seluruh Perangkat Daerah
			S.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	IS.12 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,64	Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat DPRD; Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; Puskesmas; Kecamatan;	Seluruh Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	**PENDUKUNG**
				IS.13 Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,8589	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
5	**T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan**	**IT.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**			**Angka**	**6,62**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;
			S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang BerbasisKerakyatan	IS.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	IS.15 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,96	Dinas Tenaga Kerja;	Dinas Sosial; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.16 Angka Kemiskinan	Persen	9,11	Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengeloa Keuangan Daerah;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
				IS.17 Indeks Gini	Angka	0,246	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengeloa Keuangan Daerah;
			S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.18 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemeadam Kebakaran dan Penyelamatan; Satuan Polisi Pamong Praja;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	**PENDUKUNG**
6	**T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan**	**IT.6 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB**			**Persen**	**1,44**	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.19 Nilai Tukar Petani	Angka	127,24	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan;	Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
				IS.20 Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,60	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;	Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
7	**T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal**	**IT.7 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB**			**Persen**	**21,29**	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
			S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan KearifanBudayaLokal	IS.21 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	9,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan;

Tabel VII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32	Indikator Makro
2	Angka Kemiskinan	Persen	9,11	Indikator Makro

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,96	Indikator Makro
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,17	Indikator Makro
5	Indeks Gini	Angka	0,246	Indikator Makro
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,78	Indikator Makro
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,17	Indikator Tujuan
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,23	Indikator Kinerja Utama
9	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9,86	Indikator Kinerja Utama
10	Indeks Desa Membangun	Skor	0,7267	Indikator Tujuan
11	Persentase Pekon Maju	Persen	54,52	Indikator Kinerja Utama
12	Angka Kriminalitas Terhadap Jumah Penduduk	Angka	38,48	Indikator Kinerja Utama
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,14	Indikator Kinerja Utama
14	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,78	Indikator Kinerja Utama
15	Indeks Risiko Bencana	Angka	104,23	Indikator Kinerja Utama
16	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,46	Indikator Tujuan
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56,99	Indikator Kinerja Utama
18	Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	750,25	Indikator Kinerja Utama
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66,32	Indikator Tujuan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
20	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65,59	Indikator Kinerja Utama
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	700,000	Indikator Kinerja Utama
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,64	Indikator Kinerja Utama
23	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	28,589	Indikator Kinerja Utama
24	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Angka	6,62	Indikator Tujuan
25	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32	Indikator Kinerja Utama
26	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,96	Indikator Kinerja Utama
27	Angka Kemiskinan	Persen	9,11	Indikator Kinerja Utama
28	Indeks Gini	Angka	0,246	Indikator Kinerja Utama
29	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57,96	Indikator Kinerja Utama
30	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	Persen	1,44	Indikator Tujuan
31	Nilai Tukar Petani	Angka	127,24	Indikator Kinerja Utama
32	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,60	Indikator Kinerja Utama
33	Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	Persen	21,29	Indikator Tujuan
34	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	9,00	Indikator Kinerja Utama

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Urusan Layanan Wajib Dasar			
35	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.1	Dinas Pendidikan
36	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.56	Dinas Pendidikan
37	APK Pendidikan PAUD	%	51.81	Dinas Pendidikan
38	APK Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	%	95.78	Dinas Pendidikan
39	APK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	%	88.57	Dinas Pendidikan
40	APK Pendidikan Paket A, B,C	%	3.18	Dinas Pendidikan
41	APM Pendidikan PAUD	%	40.63	Dinas Pendidikan
42	APM Pendidikan SD	%	89.76	Dinas Pendidikan
43	APM Pendidikan SMP	%	73.18	Dinas Pendidikan
44	APM Pendidikan Paket A, B, C	%	3.04	Dinas Pendidikan
45	APS Pendidikan	%	86.24	Dinas Pendidikan
46	Rasio SD Terakreditasi	%	63.16	Dinas Pendidikan
47	Rasio SMP Terakreditasi	%	63.16	Dinas Pendidikan
48	Angka Kelulusan SD	%	98.68	Dinas Pendidikan
49	Angka Kelulusan SMP	%	98.68	Dinas Pendidikan
50	Angka Melanjutkan ke SMP	%	94.22	Dinas Pendidikan
51	Rasio Ruang Kelas PAUD Berkondisi Baik	%	78.56	Dinas Pendidikan
52	Rasio Ruang Kelas SD Berkondisi Baik	%	83.72	Dinas Pendidikan
53	Rasio Ruang Kelas SMP Berkondisi Baik	%	73.47	Dinas Pendidikan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
54	Persentase Tenaga Pendidik PAUD Berijazah S1	%	48.13	Dinas Pendidikan
55	Persentase Tenaga Pendidik SD Bersertifikat	%	38.6	Dinas Pendidikan
56	Persentase Tenaga Pendidik SMP Bersertifikat	%	32.11	Dinas Pendidikan
57	Angka Kematian Ibu (AKI)	%	104	Dinas Kesehatan
58	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	3.7	Dinas Kesehatan
59	Prevalensi Balita Stunting	%	12	Dinas Kesehatan
60	Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	%	330	Dinas Kesehatan
61	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	%	23	Dinas Kesehatan
62	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan
63	Persentase Pekon Open Defecation Free (ODF)	%	92,7	Dinas Kesehatan
64	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,1	Dinas Kesehatan
65	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	Dinas Kesehatan
66	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	Dinas Kesehatan
67	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	Dinas Kesehatan
68	Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	Dinas Kesehatan
69	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	Dinas Kesehatan
70	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	Dinas Kesehatan
71	Pelayanan Kesehatan pada usia produkti	%	100	Dinas Kesehatan
72	Pelayanan pada usia lanjut	%	100	Dinas Kesehatan
73	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	Dinas Kesehatan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
74	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100	Dinas Kesehatan
75	Pelayanan Kesehatan orang Dengangangguan Jiwa Berat	%	100	Dinas Kesehatan
76	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	%	100	Dinas Kesehatan
77	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	Dinas Kesehatan
78	Angka Harapan Hidup	Tahun	70	RSUD Batin Mangunang
79	Indeks kepuasan masyarakat	%	95	RSUD Batin Mangunang
80	Persentase Sarana Pelayanan yang Harus Tersedia	%	84	RSUD Batin Mangunang
81	PersentaseKetersediaan Sarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik	%	84	RSUD Batin Mangunang
82	Persentase Tenaga Kesehatan yang Harus Tersedia	%	90	RSUD Batin Mangunang
83	Tingkat Pemenuhan Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	%	100	RSUD Batin Mangunang
84	Insiden Keselamatan Pasien	%	0.2	RSUD Batin Mangunang
85	Nilai Bed Occupany Rate (BOR)	%	64	RSUD Batin Mangunang
86	Nilai Average Length Of Stay (ALOS)	Hari	6	RSUD Batin Mangunang
87	Nilai Net Death Rate (NDR)	Angka	25	RSUD Batin Mangunang
88	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
89	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	67	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
90	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
91	Percentase Sarana dan Prasana Sumber Daya Air yang berkualitas	%	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
92	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian banjir	%	23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
93	Rasio Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai Rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman di pantai WS Kewenangan provinsi	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
94	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
95	Persentase kapsitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan pemenuhan Kapasitas yang memerlukan pelayanan Air minum curah lintas	%	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
96	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah domestik oleh SPAL Regional	%	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
97	Rasio Kemantapan Jalan	%	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
98	Rasio Tenaga kerja Konstruksi yang terlatih diwilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat Pelatihan Ahli	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
99	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	61	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
100	Persentase Warga Negara yang terkena Realokasi Akibat Program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni	%	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
101	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani	%	19.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
102	Persentase Satuan perumahan yang sidah di lengkapi PSU	%	67	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
103	Persentase Peningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyaraat	Persen	60	Satuan Polisi Pamong Praja
104	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	50	Satuan Polisi Pamong Praja
105	Presentase Peningkatan Kapasitas dan kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta bina potensi masyarakat Kabupaten Tanggamus	Persen	63	Satuan Polisi Pamong Praja
106	Presentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tanggamus	Persen	60	Satuan Polisi Pamong Praja
107	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	84%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
108	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dalam waktu tanggap (Response Time)	%	84%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
109	Cakupan Pelayanan Kebakaran	%	30%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
110	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (Response Time)	%	84%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
111	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar) yang dibentuk dan /atau dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	43%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
112	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
113	Layanan Pemadaman oleh relawan kebakaran (BALAKAR, SATLAKAR)	%	43%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
114	Layanan Penyelamatan dan evakuasi darurat Non Kebakaran	%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
115	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Angka	0.45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
116	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Angka	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
117	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Angka	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
118	Indeks Pencapaian SPM Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Angka	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
119	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinas Sosial
120	Persentase (%) korban bencanaalam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	%	100	Dinas Sosial
121	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12,65	Dinas Sosial
122	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	88	Dinas Sosial
123	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan	%	88	Dinas Sosial

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
	Sosial (PSKS) yang Aktif			
	Urusan Layanan Wajib Non Dasar			
124	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	60.2	Dinas Tenaga Kerja
125	Persentase Pertumbuhan Energi Baru dan Terbarukan yang Terbangun	Persen	96.5	Dinas Tenaga Kerja
126	Persentase Peningkatan Transmigran yang Di Fasilitasi Penempatannya	Persen	1.02	Dinas Tenaga Kerja
127	Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	72.2	Dinas Tenaga Kerja
128	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar negeri) Melalui Mekanisme layanan antar kerja	Jumlah	4575	Dinas Tenaga Kerja
129	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100	Dinas Tenaga Kerja
130	Persentase akseptor Pengguna KB MKJP	Persen	48	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
131	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok BKB	Persen	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
132	Persentase penurunan keluarga prasejahtera	Persen	10,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
133	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
134	Persentase pencapaian indikator kabupaten layak anak	Persen	87	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
135	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
136	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
137	Rasio kekerasan terhadap perempuan, terhadap TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
138	TFR	Persen	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
139	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Persen	58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
140	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persen	42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
141	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	6.31	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
142	Persentase Pekon Mandiri Pangan	%	0.99	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
143	NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	%	106.66	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
144	NTP Sub Sektor Hortikultura	%	96.45	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
145	Persentase Peningkatan Produksi Padi	%	91.87	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
146	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan	%	106.1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
147	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian (Afolu)	Persen	0.41	Dinas Lingkungan Hidup
148	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	5.15	Dinas Lingkungan Hidup
149	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Transportasi	Persen	1.42	Dinas Lingkungan Hidup
150	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri dan Penggunaan Produk	Persen	0,06	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
151	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengolahan limbah	Persen	0.52	Dinas Lingkungan Hidup
152	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,14	Dinas Lingkungan Hidup
153	Indeks Kualitas Air	Angka	70,44	Dinas Lingkungan Hidup
154	Indeks Kualitas Udara	Angka	71,51	Dinas Lingkungan Hidup
155	Indeks Tutupan Lahan	Angka	62,53	Dinas Lingkungan Hidup
156	Persentase Pengelolaan Sampah	Angka	16	Dinas Lingkungan Hidup
157	Nilai IKM Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	89.84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
158	Persentase Penduduk Ber-KTP	%	109,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
159	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
160	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	88,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
161	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran	%	117,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
162	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
163	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
164	Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Perangkat Daerah	%	64,52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
165	Persentase Kesesuaian Administrasi Kependudukan dengan Data Base	%	96.98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
166	Presentase Peningkatan Pekon Berkembang menjadi Pekon Maju dan/atau Mandiri	%	7,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
167	Presentase Pekon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
168	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	%	99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
169	Prentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	%	75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
170	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
171	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	50,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
172	Rasio konektivitas Provinsi	%	97.25	Dinas Perhubungan
173	V/C Ratio di Jalan Provinsi	%	60	Dinas Perhubungan
174	Persentase Kendaraaan Angkutan Darat Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	38.55	Dinas Perhubungan
175	Persentase Angkutan Laut Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	100	Dinas Perhubungan
176	Indeks SPBE	Indeks	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
177	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
178	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Satu Data Statistik Sektoral dengan baik	%	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
179	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Menejemen keamanan Informasi	%	32	Dinas Komunikasi dan Informatika
180	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68	Dinas Komunikasi dan Informatika
181	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,7	Dinas Komunikasi dan Informatika
182	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	Persen	11.5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
183	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	Persen	10.5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
184	Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
185	Persentase PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	8.33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
186	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Taat Dalam Tertib Niaga	Persen	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
187	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Akses Pemasaran	Persen	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
188	Persentase Produk Dalam Negeri yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	Persen	8.33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
189	Persentase Pertumbuhan UMKM yang Memasarkan Produk Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Persen	9.33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
190	Peningkatan Omzet Pedagang Pasar Rakyat yang Sudah Direvitalisasi	Persen	10.5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
191	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang bermitra	Persen	18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
192	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	87.55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
193	Persentase Capaian unsur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkinerja sangat baik	%	9.73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
194	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah	62,162,378,377.69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
195	Persentase Peningkatan Keikutsertaan PameranInvestasi	%	31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
196	Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	%	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
197	Persentase Pemuda yang Berprestasi Minimal Tk. Provinsi	%	7	Dinas Pemuda dan Olahraga
198	Persentase Atlit BerPrestasi Minimal Tk. Provinsi	%	40	Dinas Pemuda dan Olahraga
199	Persentase Peningkatan Kelompok Olahraga Rekreasi	%	40	Dinas Pemuda dan Olahraga
200	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.07	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
201	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.1	Dinas Pemuda dan Olahraga
202	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
203	Persentase Perangkat Daearah yang Menerapkan Arsip Statis	%	23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
204	Persentase Peningkatan Pengunjung ke Perpustakaan	%	26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
205	Persentase Perpustakaan Pekon yang di Kelola dengan Baik	%	25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
206	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
207	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
208	Tingkat ketersediaan arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggunjawaban Nasional	eksemplar	230	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
209	Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Urusan Layanan Pilihan			
210	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya Pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	Wilayah	1	Dinas Perikanan
211	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Kabupaten per tahun	Perizinan	9	Dinas Perikanan
212	Jumlah pelabuhan perikanan/tempat pelelangan ikan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	Unit	1	Dinas Perikanan
213	Jumlah seluruh pelabuhan perikanan/tempat pelelangan ikan	Unit	4	Dinas Perikanan
214	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	Unit	27	Dinas Perikanan
215	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	Unit	14	Dinas Perikanan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
216	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten yang diterbitkan pertahun	Kelompok	23	Dinas Perikanan
217	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan	Wilayah	1	Dinas Perikanan
218	Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki	Wilayah	1	Dinas Perikanan
219	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif	Wilayah	5	Dinas Perikanan
220	Keseluruhankawasankonservasiperairan yang dimiliki	Wilayah	5	Dinas Perikanan
221	Jumlah unit kapalperikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Unit	25	Dinas Perikanan
222	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	Kelompok	37	Dinas Perikanan
223	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan kabupaten yang mempunyai izin usaha perikanan kabupaten yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Kelompok	30	Dinas Perikanan
224	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	Dokumen	1	Dinas Perikanan
225	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Kelompok	140	Dinas Perikanan
226	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas kecamatan dalam 1 daerah kabupaten yang diterbitkan	Kelompok	30	Dinas Perikanan
227	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	45	Dinas Perikanan
228	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	7	Dinas Perikanan
229	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasarana Hasil Perikanan	%	3.5	Dinas Perikanan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
230	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Thn	65	Dinas Perikanan
231	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	800000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
232	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	25%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
233	Cakupan Perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Persen	45	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
234	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan		92.4	Dinas Perkebunan dan Peternakan
235	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan		88.5	Dinas Perkebunan dan Peternakan
236	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Unggulan	Persen (%)	5.45	Dinas Perkebunan dan Peternakan
237	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	Persen (%)	5.5	Dinas Perkebunan dan Peternakan
238	Persentase Penurunan Kematian Ternak	Persen (%)	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
239	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	Persen (%)	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
240	Populasi Sapi Potong (ekor)	Ekor	8,254	Dinas Perkebunan dan Peternakan
241	Populasi Sapi Perah (ekor)	Ekor	121	Dinas Perkebunan dan Peternakan
242	Populasi Kambing (ekor)	Ekor	268,806	Dinas Perkebunan dan Peternakan
243	Populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)	Ekor	471,716	Dinas Perkebunan dan Peternakan
244	Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	Ekor	34,124	Dinas Perkebunan dan Peternakan
245	Produksi Daging Sapi (ton)	Ekor	137	Dinas Perkebunan dan Peternakan
246	ProduksiTelur (ton)	Ekor	919	Dinas Perkebunan dan Peternakan
247	Produksi Kopi Robusta (ton)	Ekor	48,609	Dinas Perkebunan dan Peternakan
248	Produksi Kakao (ton)	Ekor	7,348	Dinas Perkebunan dan Peternakan
249	Produksi Kelapa Dalam (ton)	Ekor	16,379	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
250	Produksi Lada (ton)	Ekor	3,791	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Urusan Layanan Penunjang			
251	Persentase Propomperda yang ditetapkan menjadi PERDA	%	100	Sekretariat DPRD
252	Persentase Peningkatan Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%	100	Sekretariat DPRD
253	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda	Nilai	22.25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
254	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda	Nilai	22.05	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
255	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RPJMD	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
256	Indeks Inovasi Daerah	Skor	74.3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
257	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	97	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
258	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
259	Persentase Penyerapan Anggaran	%	86.24	Badan Pengelola Keuangan Daerah
260	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
261	Persentase Realisasi PAD	%	64.6	Badan Pengelola Keuangan Daerah
262	Persentase Penatausahaan BMD yang sesuai dengan Perda	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
263	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Daerah
264	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
265	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kepegawaian	Angka	98	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
266	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
267	Indeks Merit System	Angka	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
268	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	Persen	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
269	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Persen	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
270	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	Persen	95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
271	RasioPegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidaktermasuk guru dan tenagakesehatan)	Persen	7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
272	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0.79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
273	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0.09	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
274	Persentase ASN yang aktif menjadi Anggota Korpri	%	89,46	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
275	Persentase Event Pengembangan Jiwa Korsa Anggota Korpri	%	13,37	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
276	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Kewirausahaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purna bhakti	%	76,00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
277	Tingkat MaturitasSistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Inspektorat
278	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	3	Inspektorat
279	Persentase Konflik SARA yang tertangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
280	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pesta Demokrasi	%	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
281	Persentase Organisasi Masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
282	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
283	Nilai LPPD	Nilai	2.88	Sekretariat Daerah
284	IP SPM	persen	93.98	Sekretariat Daerah
285	Nilai Komponen Kinerja Organisasi pada IRB Kabupaten	Nilai	6.6	Sekretariat Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2025	KETERANGAN
286	Persentase TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sektretariat Daerah	persen	100	Sekretariat Daerah
287	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Menjadi Perda dan Perbup	persen	100	Sekretariat Daerah
288	Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa)	Tingkat	9-Jul	Sekretariat Daerah
289	Persentase TindakLanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	persen	60	Sekretariat Daerah
290	Persentase Perjanjian Kerjasama yang Dimplementasikan	persen	98	Sekretariat Daerah
291	IndeksKepuasan Masyarakat	Indeks	86	Sekretariat Daerah
292	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik pada IRB	Indeks	3.9	Sekretariat Daerah
293	Nilai Komponen Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan pada IRB	Indeks	86.6	Sekretariat Daerah
294	Indeks Kesejahteraan Rakyat	persen	70	Sekretariat Daerah
295	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	persen	95	Sekretariat Daerah
296	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Unit Sekretariat Daerah yang Terealisasi	persen	83	Sekretariat Daerah
297	Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa)	Tingkat	9-Jul	Sekretariat Daerah

Sumber : Analisis data diolah, 2024

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terpadu, guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh inovasi program pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Inovasi Daerah.

Inovasi sebagai salah satu daya ungkit bagi penyelenggaraan Pemerintahan terus didorong baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah, dimana regulasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong sistem inovasi daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh inovasi daerah baik dibidang digital maupun non-digital yang kemudian akan dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap masing-masing inovasi yang dikirim kemendagri dengan skor Indeks Inovasi Daerah 75.50.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

Berikut beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2024.

Tabel VII.4. Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI		SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
1	Dinas Pendidikan	1	SENAM PROTOKOL KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS	101.00
		2	Game Edukasi Sains Berbasis Android Materi Kalor	96.00
		3	DULILAH UNTUK GERAKAN LITERASI SEKOLAH PART 2	95.00
		4	MEJA SAE BERBAGI (Media Pembelajaran Smart App creator Berbasis Teknologi)	104.00
		5	Aplikasi P2KM (Aplikasi Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka)	111.00
		6	KEMUDI: Kendali Etika Siswa Melalui Implementasi Buku Disiplin	84.00
		7	LAMBAN (Laboratorium Maya Berbasis Android)	86.00
		8	LITERASI BAHAGIA BERSAMA GERTASTACAKA (GERAKAN BERANTAS BUTA MENULIS, MEMBACA, DAN MATEMATIKA)	81.00
		9	Media Pembelajaran Interaktif POP IT UP	96.00
2	Dinas Kesehatan	1	GEMA PENTING (GERAKAN BERSAMA PENCEGAHAN PENANGGULANGAN STUNTING) DINAS KESEHATAN	93.00
		2	RAKSASA JAHAT (GERAKAN BERSAMA MENUJU JAMBAN SEHAT) PKM ANTAR BRAK	97.00
		3	ANTING PERAK (ANTISIPASI STUNTING DENGAN PERBAIKAN GIZI ANAK) UPTD PUSKESMAS ANTAR BRAK	97.00
		4	TAKECARE BUNDA (Tekan Angka Kematian Dengan Cara Akselerasi Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Bayi) UPTD Puskesmas Ngarip	77.00
		5	SI CICI JASENK (Sistem Cicilan Jamban Dan Septiktank) pada pekon sukadamai UPTD Puskesmas Kedaloman	102.00
		6	RAJUTAN ODF (Gerakan Menuju Kecamatan ODF) UPTD Puskesmas Bulok Sukamara	88.00
		7	JUMANTUK (JURU PEMANTAU BATUK) UPTD PUSKESMAS SUMANDA	85.00
		8	NENG GEULIS (NENG DENGAN GERAKAN PEDULI STUNTING) UPTD PUSKESMAS SUMANDA	85.00
		9	RATU BUMI SALARAS (Kendaraan Untuk Ibu Hamil Periksa, Melahirkan, dan Nifas) UPTD PUSKESMAS RANTAU TIJANG	90.00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI		SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		10	GEMATING CATIN (GERAKAN BERSAMA CEGAH STUNTING DARI CALON PENGANTIN) UPTD PUSKESMAS TALANGPADANG	93.00
		11	PENDEKAR JIWA (PENDEKATAN TERPADU KASUS JIWA) UPTD PUSKESMAS SUMBEREJO	99.00
		12	SERBU RESPATI (SEHARI BERSAMA IBU RESIKO TINGGI TERTANGANI) UPTD PUSKESMAS SUDIMORO	94.00
		13	Brader Berbi (Bersama Kader Berantas TB)-UPTD PUSKESMAS NEGARA BATIN	98.00
		14	SI MANIS WAY NIPAH-UPTD Puskesmas Way Nipah	100.00
		15	KUPU DEWA (KUNJUNGAN PUSKESMAS DETEKSI JIWA) UPTD PUSKESMAS ANTARBRAK	94.00
		16	RATU BUMI SALARAS (Kendaraan Untuk Ibu Hamil Periksa, Melahirkan, dan Nifas) UPTD PUSKESMAS RANTAU TIJANG	90.00
		17	PENDEKAR JIWA REBORN (Pendekatan Terpadu Kasus Jiwa) UPTD Puskesmas Sumberejo	100.00
		18	Sirami Gizi "Aksi Ramah Peduli pemulihan Gizi UPTD Puskesmas Gisting	98.00
		19	GO CANTIK (Gerakan Otewe Cari Jentik) UPTD PUSKESMAS MARGOYOSO	96.00
		20	GEMA BU RESTI REBORN (GERAKAN PEMANTAUAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI REBORN) UPTD PUSKESMAS SANGGI	82.00
		21	RANING CABI (GERAKAN MENINGKATKAN CAPAIAN TB) UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI	94.00
		22	GENDER PENTING "Gerakan Kader Penurunan Stunting" wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukaraja	90.00
		23	GEMPITA (Gerakan Timbang tepat dan cepat) UPTD Puskesmas Pulau Panggung	86.00
		24	GEMATING CATIN (Gerakan Bersama Cegah Stunting Sejak Calon Pengantin) UPTD Puskesmas Talangpadang	97.00
		25	CHATING KITA " Cegah Stunting Khusus Bayi dan Balita" (UPTD Puskesmas Negara Batin)	100.00
		26	PONDER CEKIBA (TELEPON DAN KALENDER CEGAH KEMATIAN IBU DAN BAYI)-PUSKESMAS SIRING BETIK	83.00
		27	CEMILAN UMAT (Cegah Kehamilan Berisiko Preeklampsia dengan Konsumsi Kalsium Laktat) UPTD PUSKESMAS PASAR SIMPANG	81.00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI		SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		28	Pencegahan Stunting dengan Makanan Tambahan Tinggi Protein (PANCING MATA BATIN) Tahap II-UPTD Puskesmas Pasar Simpang	86.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung	1	Pojok Halaman RSUDBM	100.00
		2	SIWAK DAON (Efisiensi Waktu Pendaftaran Online)	102.00
		3	RATUSAN (Ruang Tunggu Keluarga Pasien)	102.00
		4	MO RAJA RANA (Monitoring Rawat Jalan dan Rawat Inap)	102.00
		5	RESEP BERDIGIT (Rekapitulasi Sepuluh Besar Diagnosa Penyakit)	102.00
		6	MINTA MU WAT PAS (Monitoring Indikator Mutu Waktu Tunggu Pasien)	102.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	GIS Drainase Perkotaan	94.00
		2	SIMTARU (Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang)	96.00
		3	GIS Jalan	94.00
		4	GIS Pemukiman	94.00
		5	Mas PALDO	94.00
		6	Mas Muh Kota Padang	96.00
		7	HSBGN (Harga Satuan Bangunan Negara)	94.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Pedas Dot Kom Pol-PP	82.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Penanganan Bencana Darurat Banjir ROB Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanggamus	95.00
7	Dinas Sosial	1	KIPAS SAKTI (KARTU INDONESIA PINTAR ANAK SEKOLAH SAMPAI KE PERGURUAN TINGGI)	95.00
		2	PUSKESOS MENYALA (Pusat Kesejahteraan Sosial Menyapa dan Melayani)	92.00
		3	BARISTA (Bantuan Dan Reaksi Sosial Terhadap Bencana Di Tanggamus)	97.00
		4	KIPAS SAKTI (Kartu Indonesia Pintar Anak Sekolah Sampai Ke Perguruan Tinggi)	88.00
		5	PEGIAT SUKSES (Pelayanan Bagi Masyarakat Melalui Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan)	89.00
		6	KERTAS TEBAL (Kerjasama Dan Sinergitas Tangani Penyandang Disabilitas)	89.00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI		SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
8	Dinas Tenaga Kerja	1	DUKA KHAM JEJAMA	88.00
		2	PECAT SDM	86.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	KADER TARBIAT (Kalender Pintar Bayi Sehat)	100.00
		2	CEMILAN (Cegah Hamil Melalui Implan)	98.00
		3	PILING (Pil Keliling)	102.00
		4	DULPIN (Edukasi Penyuluhan dan Informasi Bagi Calon Pengantin)	101.00
		5	MODETA (Metode Ketahanan Keluarga)	99.00
		6	JALINGER (Jejama Konseling Remaja)	100.00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	PELAKU SIKEP	111.00
		2	PENARI CANTIK	105.00
		3	NAPAS DAPDUK	102.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Pembagi Air Bersih Menggunakan Barang Bekas Yang Tidak Terpakai	80.00
		2	PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO	82.00
		3	Gerakan Amal Sedekah Sampah Plastik Olah Ecobrick (GASSPOLE)	85.00
12	Dinas Perhubungan	1	BUNDA SADAR LALU LINTAS (SALUD)	85.00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	STERNAN (Sterilisasi Ruang Pimpinan)	94.00
		2	TTE (Tanda Tangan Elektronik)	96.00
		3	PENTATIK (PENGEMBANGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK)	95.00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1	Jemput Bola Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.00
		2	Ollala Membawa Berkah	86.00
		3	Jempolan Ratu	87.00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1	TRANSPUSI	83.00
16	Dinas Perikanan	1	Jaminan Perlindungan Jiwa bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan) dalam Bentuk Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	68.00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	SISATA (SISTEM INFORMASI WISATA)	93.00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI		SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
18	Dinas Ketahan Pangan, Tanaan Pangan dan Hortikultura	1	MANTEL KEMAS PUTIH	95.00
19	Bapperida	1	UPGRADE SILUMBA (SISTEM LAYANAN UNTUK MASYARAKAT BAHAGIA)	102.00
		2	MASIR CILIMPA (MASYARAKAT PESISIR CINTA LIMBAH KELAPA)	99.00
		3	Klinik PAK RT 2.0	99.00
		4	IPB DREAMER	70.00
		5	MANTAU MONTOK BANGDAE (Pemantauan dan Montoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah)	86.00
		6	PAS TRADING (Pengembangan Pasar Tradisonal Kabupaten Tanggamus)	85.00
		7	Danaku CSR	100.00
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Pekon Sadar Pajak	96.00
		2	BU TANI (BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN OPINI)	100.00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	E-Absensi Pemerintah Kabupaten Tanggamus	92.00
		2	SIDAK (Sistem Digitalisasi Arsip Kepegawaian) berbasis Elektronik	86.00
22	Inspektorat	1	SI TEMAN TINJU	93.00
		2	pE-Ar Hape	70.00
		3	INTAI BETMAN 2	84.00
23	Kecamatan Wonosobo	1	Destinasi Wisata Pemandian Air Panas	100.00
24	Kecamatan Talang Padang	1	SEUNTAI CERITA DARI KAMPUNG GOLOK "PENEMPA" KECAMATAN TALANGPADANG	100.00
		2	SECERCAH HARAPAN	96.00
		3	MANISNYA SI GULMUT (GULA SEMUT)	82.00
25	Kecamatan Pulau Panggung	1	ALPUKAT RATU DEWI	100.00
		2	'' NIKMAT KHAWE ''	94.00
		3	' ALKA '	101.00
26	Kecamatan Semaka	1	MATA KEBENARAN	101.00
27	Kecamatan Sumberejo	1	MABUR REBORN (Mata Air Berbau Rupiah) Kecamatan sumberejo	98.00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI		SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		2	MABUR REBORN JILID II (Mata Air Berbau Rupiah) Kecamatan Sumberejo	99.00
28	Kecamatan Ulu Belu	1	SRIKANDI	110.00
		2	SRIKANDI WOW (Wonder Women)	104.00
		3	Mas Ubl Pelita (Masyarakat Ulubelu Peduli Lingkungan Sekitar)	98.00
29	Kecamatan Gisting	1	PEPES SOLMED	98.00
		2	SAPAL JAIT (SAMPAH PLASTIK JADI DUIT)	103.00
30	Kecamatan Kota Agung Timur	1	Persiapakan Ekspor Manggis, Kotaagung Timur Siapakan Kebun Beregister Jilid 2	92.00
31	Kecamatan Kota Agung Barat	1	BULE PELU (BUDIDAYA IKAN LELE PEKON BELU)	90.00
		2	REBORN MAAP WAY TAHILI (Lahir Lagi Mata Air Asli Pegunungan Way Tahili)	101.00
		3	BUAYA (Bila Usaha Aku Yakin Asik)	94.00
32	Kecamatan Gunung Alip	1	ASN MAIN HATI	102.00
		2	PENAPSIR (Penjaringan Aspirasi Masyarakyat)	102.00
		3	GELI PAI BANG (Geliat Petani Bawang)	96.00
33	Kecamatan Limau	1	GERTAK MINJAK	82.00
34	Kecamatan Bulok	1	BANANA BARRY	96.00
		2	KREASI BENANG EMAS	102.00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	WASDIN Kabupaten Tanggamus	96.00
		2	KUMBARA TANGGAMUS	94.00

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

BAB VIII
PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2024

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2025. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada akhir 2017 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Terkait dengan penetapan peraturan tersebut, berimplikasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun terutama mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah

ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan yang terdapat didalamnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan Tahun Kedua Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tanggamus dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyusun RKPD Tahun 2025 yang substansinya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Tanggamus.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai hal tersebut, sinergi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah perlu untuk dilakukan secara lebih terarah, karena pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari upaya dan pencapaian yang dilakukan daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyamakan langkah untuk memantapkan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berpijak pada kerangka pikir yang sama, yaitu : (i) **Pertumbuhan** (*growth)* yang menyeimbangkan komponen di sisi pengeluaran dan sisi produksi untuk lebih berkualitas dan memberikan efek pengganda yang lebih besar; (ii) **Stabilitas** (*stability)* yang mencakup stabilitas ekonomi, sosial, dan politik; yang perlu di jaga di setiap daerah

agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tanpa gangguan; (iii) **Pemerataan yang Berkeadilan** (*equity)* yang memastikan keikutsertaan seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (*inclusiveness).*

Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2025 ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif, akuntabel, terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menjalankan program-program yang telah disinergikan sehingga target dan sasarannya dapat tercapai dengan optimal.

RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2025 dengan menggunakannya sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
2) Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

3) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025, dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) dan akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD).

4) Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5) Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6) Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.
7) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
8) Rencana tindak menurut dimensi pembangunan, bidang-bidang pembangunan, maupun menurut Perangkat Daerah telah disusun dengan mendapatkan masukan dari seluruh Perangkat Daerah menjadi dokumen yang terintegrasi dari RKPD Tahun 2025;
9) Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender.

Kami menyadari RPKD ini masih perlu penyempurnaan, sehingga bersinergi dengan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dan pembangunan Nasional Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif masyarakat terutama dalam hal : (i) perumusan peraturan perundang-undangan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan; dan (iii) mobilisasi dan pengelolaan sumber daya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta kebijakan pusat dan provinsi Lampung, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2025 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2025. RKPD Tahun 2025 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

Dengan harapan setelah kita memiliki RKPD dan APBD Tahun 2025, kita dapat melaksnakan dengan menerapkan prinsip integratif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan baik untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2025. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN